



PEMERINTAH DAERAH KAB. POSO



**dr.VERNA G.M INKIRIWANG**  
BUPATI POSO



**M.YASIN MANGUN, S.Sos**  
WAKIL BUPATI POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026**

---



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 -2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1218);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah rencana strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan dan akan dituju pada akhir periode perencanaan.
13. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan.
18. Daerah adalah Kabupaten Poso.
19. Bupati adalah Bupati Poso.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah



berpedoman pada RPJPD Kabupaten Poso, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta mempedomani RPJM Nasional.

- (2) RPJMD, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

- (3) Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

### BAB III

#### PENYUSUNAN

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Bapelitbangda menyusun rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan dibahas dalam musrenbang RPJMD.
- (3) Perumusan rancangan akhir RPJMD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RPJMD.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Pengendalian

### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap RPJMD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan RPJMD; dan
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan/kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.
- (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bapelitbangda meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

### Pasal 7

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada masyarakat.



## Bagian Ketiga Perubahan

### Pasal 8

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, dan/atau kegiatan, sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bapelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENETAPAN

### Pasal 10

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah Peraturan Daerah diundangkan, maka harus dibaca dan di maknai sebagai nomenklatur perangkat daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat ditetapkan paling lama tahun 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI POSO,

ttd.

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 60,04/2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pemerintah Kabupaten Poso dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan fungsi dan peran pemerintah, sehingga dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut Pemerintah Kabupaten Poso menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Dokumen perencanaan ini disusun dengan menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Dimana satu sisi berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan agroindustri dan disisi lain pembangunan daerah diupayakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, yang dilaksanakan secara merata, berkualitas dan berkeadilan melalui keberpihakan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dirumuskan secara

transparan responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah inidalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis dan koordinatif.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara dokumen perencanaan yang satu dan dokumen perencanaan lainnya dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Adapun prisnsip dalam perencanaan harus memperhatikan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan, program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Kabupaten Poso yakni "Keberlanjutan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Poso".

## II. PASAL DEMI PASAL

- |         |   |
|---------|---|
| Pasal 1 | Cukup jelas   |
| Pasal 2 | Cukup jelas   |
| Pasal 3 | Cukup jelas   |
| Pasal 4 | Cukup jelas   |
| Pasal 5 | Cukup jelas   |
| Pasal 6 | Cukup jelas   |
| Pasal 7 | Informasi hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan dapat diakses melalui LPPD/LKPJ/SIPD/ website Pemerintah Daerah. |
| Pasal 8 | Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas  |



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perubahan yang mendasar antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR



## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	DI-i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	DT-i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	DG-i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-15
1.5. Sistematika .....	I-16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Aspek Geografis Dan Demografis .....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-2
2.1.2. Aspek Demografis .....	II-21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-27
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-28
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-56
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-82
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-83
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-84
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-139
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-190
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-200
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-213
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-213
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-216
2.4.3. Fokus Iklim Investasi .....	II-221
2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia .....	II-222
2.5. Evaluasi RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021 .....	II-244
2.5.1. Evaluasi Visi Misi RPJMD Tahun 2016-2021 s.d Tahun 2020.....	II-244
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-2
3.1.2 Neraca Daerah .....	III-17
3.2 Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu .....	III-22





3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-22
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-22
3.3	Kerangka Pendanaan .....	III-24
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III-25
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-29

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	IV-7
4.1.2	Aspek Pelayanan Umum.....	IV-15
4.2	Isu-Isu Strategis .....	IV-36
4.2.1	Isu Strategis Global .....	IV-37
4.2.2	Telaahan Kebijakan Nasional .....	IV-49
4.2.3	Isu Regional Sulawesi .....	IV-61
4.2.4	Isu Provinsi Sulawesi Tengah .....	IV-65
4.2.5	Isu Strategis Daerah Lainnya .....	IV-89
4.2.6	Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals/SDG's</i> ) .....	IV-91
4.2.7	Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso .....	IV-93
4.2.8	Penelaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Poso. ....	IV-92
4.2.9	Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Poso .....	IV-124
4.3	Isu Strategis Kabupaten Poso .....	IV-134

#### **BAB V VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

5.1	Visi .....	V-1
5.2	Misi Tujuan dan Sasaran .....	V-5
5.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran.....	V-15
5.4	Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kabupaten Poso 2021-2026 .....	V-22
5.5	Penyelarasan Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kabupaten Poso 2021-2026 dengan Prioritas Nasional tahun 2020-2024 .....	V-24
5.6	Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 .....	V-25



5.7	Keselarasannya Visi Misi Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026	V-27
5.8	Keselarasannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026	V-30
5.9	Keselarasannya SDGs Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026	V-33

## **BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-4
6.2	Tema Pembangunan	VI-29
6.3	Program Prioritas Pembangunan	VI-32

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-4

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

8.1	Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Daerah	VIII-3

## **BAB IX PENUTUP**

9.1	Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2	Pedoman Transisi	IX-3





## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Poso Menurut Kecamatan, Tahun 2020 .....	II-2
Tabel 2.2	Jarak Antara Ibukota Kabupaten Poso Dengan Ibukota Kecamatan 2020 .....	II-6
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-8
Tabel 2.4	Potensi Energi dan Mineral Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-9
Tabel 2.5	Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020 .....	II-12
Tabel 2.6	Tekanan Udara dan Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Poso, Tahun 2020.....	II-12
Tabel 2.7	Suhu Udara, Kelembaban dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Poso, Tahun 2020 .....	II-13
Tabel 2.8	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Arah Angin, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020	II-14
Tabel 2.9	Rencana Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032 .....	II-15
Tabel 2.10	Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Per Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Poso, 2020 .....	II-22
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tamat SD sampai dengan Tamat SMA Kabupaten Poso, 2020 .....	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana Kab. Poso 2020 .....	II-24
Tabel 2.13	Struktur Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Poso Tahun 2019 .....	II-25
Tabel 2.14	Tren Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Poso, Tahun 2010-2020 .....	II-26
Tabel 2.15	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Poso Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020 .....	II-27
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2016-2020 .....	II-29
Tabel 2.17	Jumlah PDRB-ADH Berlaku Kabupaten Poso Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 .....	II-32



Tabel 2.18	Jumlah PDRB-ADH Konstan Kabupaten Poso Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 .....	II-34
Tabel 2.19	Kontribusi PDRB-ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-35
Tabel 2.20	Kontribusi PDRB-ADH Konstan Kabupaten Poso Menurut Lapangan Usaha 2016-2021 .....	II-37
Tabel 2.21	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Poso, tahun 2019-2020 .....	II-38
Tabel 2.22	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Poso, tahun 2019-2020 ...	II-39
Tabel 2.23	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-41
Tabel 2.24	Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 .....	II-47
Tabel 2.25	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-68
Tabel 2.26	Perkembangan Opini Kabupaten Poso Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.27	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-73
Tabel 2.28	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Poso (Ton), Tahun 2016-2020 .....	II-74
Tabel 2.29	Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-82
Tabel 2.30	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-83
Tabel 2.31	Angka Partipasi Kasar (APK) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-87
Tabel 2.32	Capaian APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten/Kota Se-Sulteng Tahun 2020 .....	II-88
Tabel 2.33	Perbandingan Angka Partipasi Murni (APM) Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015-2020 .....	II-91
Tabel 2.34	Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kabupaten/Kota Se-Sulteng Tahun 2020 .....	II-92
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-101
Tabel 2.36	Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-104



Tabel 2.37	Cakupan Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan Kabupaten Poso tahun 2015-2020 .....	II-108
Tabel 2.38	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Poso tahun 2015-2020 .....	II-110
Tabel 2.39	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Poso tahun 2016-2020 .....	II-112
Tabel 2.40	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Poso tahun 2015-2020 .....	II-112
Tabel 2.41	Persentase Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.42	Persentase Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa Kabupaten Poso tahun 2016-2020 .....	II-114
Tabel 2.43	Perkembangan Angka Stunting Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.44	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-117
Tabel 2.45	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-118
Tabel 2.46	Presentase Jalan Kabupaten dalm kondisi baik (> 40 KM/Jam) Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-119
Tabel 2.47	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Poso Tahun 2016 - 2020 .....	II-120
Tabel 2.48	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-121
Tabel 2.49	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-121
Tabel 2.50	Jumlah Kelompok P3A/GP3AKabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-122
Tabel 2.51	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-124
Tabel 2.52	Data Air Baku Yang Memenuhi Persyaratan Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-128
Tabel 2.53	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-136
Tabel 2.54	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso tahun 2015-2020 .....	II-144





Tabel 2.55	Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin diKabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-145
Tabel 2.56	Persentase Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-147
Tabel 2.57	Rasio KDRT Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-149
Tabel 2.58	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Poso Tahun 2017 – 2020 .....	II-152
Tabel 2.59	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	II-152
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	II-154
Tabel 2.61	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-154
Tabel 2.62	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-155
Tabel 2.63	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-155
Tabel 2.64	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-156
Tabel 2.65	Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-156
Tabel 2.66	Terlaksananya pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-156
Tabel 2.67	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-157
Tabel 2.68	Ketersediaan Database Kependudukan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-160
Tabel 2.69	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-161
Tabel 2.70	Rasio Petugas PPKBD Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-170
Tabel 2.71	Arus Penumpang Darat, Laut dan Udara yang Turun dan Naik Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-172
Tabel 2.72	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Poso Tahun 2016–2020 .....	II-175
Tabel 2.73	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Poso Tahun 2016–2020 .....	II-175
Tabel 2.74	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-177



Tabel 2.75	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-179
Tabel 2.76	Persentase UMKM Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-180
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-185
Tabel 2.78	Ketersediaan Dokumen Statistik Di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-186
Tabel 2.79	Ketersediaan Dokumen Statistik Di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-189
Tabel 2.80	Jumlah Kunjungan Pariwisata dan Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-191
Tabel 2.81	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis Kabupaten Poso, Tahun 2015-2019 .....	II-194
Tabel 2.82	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Poso Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	II-196
Tabel 2.83	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 (Miliar Rp) .....	II-197
Tabel 2.84	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 (Jutaan Rp) .....	II-199
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2016-2020 .	II-200
Tabel 2.86	Dokumen Perencanaan RPJPD Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 .....	II-201
Tabel 2.87	Dokumen Perencanaan RPJMD Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016-2020 .....	II-201
Tabel 2.88	Dokumen Perencanaan RKPd Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020 .....	II-202
Tabel 2.89	Dokumen Perencanaan RTRW Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016-2020 .....	II-202
Tabel 2.90	Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Poso Tahun 2016-2020	II-203
Tabel 2.91	Penetapan APBD Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-208
Tabel 2.92	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-209
Tabel 2.93	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-209
Tabel 2.94	Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-209
Tabel 2.95	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-210



Tabel 2.96	Jumlah Jabatan Administrasi Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-210
Tabel 2.97	Capaian Urusan Penunjang Sekretariat Dewan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-213
Tabel 2.98	Pengeluaran Konsumsi RT perKapita Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-214
Tabel. 2.99	Nilai Tukar Petani Kabupaten Poso tahun 2016-2020 ....	II-214
Tabel 2.100	Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan perKapita Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-214
Tabel 2.101	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-215
Tabel 2.102	Panjang Jalan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-216
Tabel 2.103	Arus Penumpang Darat, Laut dan Udara yang Turun dan Naik Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-217
Tabel 2.104	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-217
Tabel 2.105	Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Poso Tahun 2017 - 2020 .....	II-218
Tabel 2.106	Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Poso, 2017-2020 .....	II-220
Tabel 2.107	Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-220
Tabel 2.108	Jumlah restoran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 ....	II-220
Tabel 2.109	Jenis dan Jumlah Hotel Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-221
Tabel 2.110	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Poso Tahun 2020 .....	II-222
Tabel 2.111	Rasio Ketergantungan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-223
Tabel 2.112	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-223
Tabel 2.113	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020	II-224
Tabel 2.114	Hasil Evaluasi Misi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 .....	II-245
Tabel 2.115	Evaluasi Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 .....	II-253
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Poso ..	III-3





Tabel 3.2.	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-6
Tabel 3.3.	Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-8
Tabel 3.4.	Struktur Lain-lain Pendapatan yang sah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-10
Tabel 3.5.	Struktur Belanja Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-12
Tabel 3.6.	Struktur Belanja Non Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-14
Tabel 3.7.	Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-15
Tabel 3.8.	Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-16
Tabel 3.9.	Neraca Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Poso Tahun 2017-2020 .....	III-19
Tabel 3.10.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-22
Tabel 3.11.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-23
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-23
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-24
Tabel 3.14.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2025 Kabupaten Poso .....	III-26
Tabel 3.15.	Realisasi dan Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Poso Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025 .....	III-30
Tabel 3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Poso .....	III-31
Tabel 4.1	Masalah Pokok Daerah Kabupaten Poso .....	IV-2
Tabel 4.2.	Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Menurut Urusan .....	IV-15
Tabel 4.3	Permasalahan Umum berdasarkan Aspek Kewilayahan .	IV- 27
Tabel 4.4	Isu Strategis Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	IV-66
Tabel 4.5	Isu Strategis Kewilayahan Sulawesi Tengah .....	IV- 72



Tabel 4.6	Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah 2019-2020 .....	IV-79
Tabel 4.7	Identifikasi RPJMD Daerah Lain .....	IV-89
Tabel 4.8	Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Poso .....	IV-93
Tabel 4.9	Jumlah Sambungan PDAM Poso Tahun 2021 .....	IV-106
Tabel 4.10	Kebutuhan Air Domestik Daerah Perkotaan Poso.....	IV-106
Tabel 4.11	Pencapaian Target Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah .....	IV-107
Tabel 4.12	Jenis Bencana dan Wilayah Potensi Terdampak di Kabupaten Poso .....	IV-108
Tabel 4.13	Target Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan, Realisasi dan Gap .....	IV-112
Tabel 4.14	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat. (Kelompok Penduduk 40% Terbawah).....	IV-115
Tabel 4.15	SDG's Tujuan 7 Terkait Dengan Energi.....	IV-116
Tabel 4.16	Data UMKM yang Berada di Kabupaten Poso .....	IV-119
Tabel 4.17	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Poso .....	IV-126
Tabel 4.18	Pusat Kegiatan Kabupaten Poso .....	IV-133
Tabel 5.1	Pokok Visi dan Penjelasan Visi .....	V-3
Tabel 5.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran .....	V-8
Tabel 5.3	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 .....	V-10
Tabel 5.4	Persandingan Sasaran RPJM Nasional 2020-2024 dengan Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026 .....	V-18
Tabel 5.5	Persandingan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dengan Prioritas Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 ....	V-24
Tabel 5.6	Keselarasn Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJPD 2005-2025 .....	V-26
Tabel 5.7	Keselarasn Misi RPJMD Poso 2021-2026 dan Misi Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 .....	V-29
Tabel 5.8	Keselarasn Misi RPJMD Poso 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) .....	V-30
Tabel 5.9	Keselarasn Misi RPJMD Poso 2021-2026 dan SDGs Desa .....	V-34



Tabel 6.1	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 .....	VI-13
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 .....	VI-33
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Poso .....	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Poso .....	VII-5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 .....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Poso .....	VIII-5





## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan .....	I-11
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Bab Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dan Dokumen Teknokratik Serta Renstra-PD .....	I-19
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Poso, Tahun 2020 .....	II-3
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Poso .....	II-6
Gambar 2.3	Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Poso .....	II-18
Gambar 2.4	Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Poso .....	II-19
Gambar 2.5	Peta Kerawanan Gempa Kabupaten Poso .....	II-19
Gambar 2.6	Peta Kerawanan Abrasi Kabupaten Poso .....	II-20
Gambar 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Poso Tahun 2015-2020 .....	II-21
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso (Persen) Tahun 2016-2021 .....	II-31
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah, Tahun 2020 .....	II-31
Gambar 2.10	PDRB Per kapita Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) .....	II-42
Gambar 2.11	PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah).....	II-42
Gambar 2.12	Rasio Gini Kabupaten Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2015-2020 .....	II-44
Gambar 2.13	Rasio Gini Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-45
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2016-2020 .....	II-46
Gambar 2.15	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-49
Gambar 2.16	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Se Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-50
Gambar 2.17	Data Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-51



Gambar 2.18	Penduduk Miskin (persen) Menurut Kabupaten Se Sulawesi Tengah, Tahun 2019-2020 .....	II-51
Gambar 2.19	Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-52
Gambar 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Poso, Sulteng, dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-53
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-54
Gambar 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Poso, Sulteng, dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-55
Gambar 2.23	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-55
Gambar 2.24	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2016-2020 .....	II-56
Gambar 2.25	Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2015-2020 .....	II-57
Gambar 2.26	Angka Melek Huruf Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020 .....	II-58
Gambar 2.27	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2015-2020 .....	II-59
Gambar 2.28	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020 .....	II-60
Gambar 2.29	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020 .....	II-61
Gambar 2.30	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020 .....	II-61
Gambar 2.31	Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-62
Gambar 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-63
Gambar 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-64



Gambar 2.34	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020 .....	II-64
Gambar 2.35	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-66
Gambar 2.36	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-67
Gambar 2.37	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-68
Gambar 2.38	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020 .....	II-70
Gambar 2.39	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-71
Gambar 2.40	Persentase Kontribusi Sub-Sektor Holtikultura Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-72
Gambar 2.41	Persentase Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-74
Gambar 2.42	Nilai Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-76
Gambar 2.43	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-77
Gambar 2.44	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-78
Gambar 2.45	Perkembangan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-79
Gambar 2.46	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 (%) .....	II-80
Gambar 2.47	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-80
Gambar 2.48	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-81
Gambar 2.49	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-85
Gambar 2.50	Angka Partipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-86





Gambar 2.51	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-89
Gambar 2.52	Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-90
Gambar 2.53	Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-92
Gambar 2.54	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-93
Gambar 2.55	Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-94
Gambar 2.56	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-95
Gambar 2.57	Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-96
Gambar 2.58	Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-97
Gambar 2.59	Persentase Penduduk Angka Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020 .....	II-98
Gambar 2.60	Persentase Penduduk Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2020 .....	II-99
Gambar 2.61	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-100
Gambar 2.62	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-102
Gambar 2.63	Rasio Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-103
Gambar 2.64	Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-104
Gambar 2.65	Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-106
Gambar 2.66	Rasio Ketersediaan Tenaga Medis Per Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-107
Gambar 2.67	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-108



Gambar 2.68	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-109
Gambar 2.69	Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-111
Gambar 2.70	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-114
Gambar 2.71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-115
Gambar 2.72	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kabupaten Poso Tahun 2015-2020.....	II-120
Gambar 2.73	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-123
Gambar 2.74	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-124
Gambar 2.75	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-125
Gambar 2.76	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-126
Gambar 2.77	Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-126
Gambar 2.78	Persentase Pemukiman yang Tertata Kabupaten Poso Tahun 2015-2019 .....	II-127
Gambar 2.79	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-128
Gambar 2.80	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-131
Gambar 2.81	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-132
Gambar 2.82	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-133
Gambar 2.83	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-134
Gambar 2.84	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	II-134
Gambar 2.85	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-136



Gambar 2.86	Persentase Penegakan Perda Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-137
Gambar 2.87	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-138
Gambar 2.88	Perkembangan penanganan PMKS Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	II-139
Gambar 2.89	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja (Jumlah) per Tahun Kabupaten Poso Tahun 2015 – 2020 .....	II-140
Gambar 2.90	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan Kabupaten Poso Tahun 2015 – 2020.....	II-141
Gambar 2.91	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Poso Tahun 2015 –2020 .....	II-142
Gambar 2.92	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-142
Gambar 2.93	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Poso Tahun 2015 – 2020 .....	II-143
Gambar 2.94	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-144
Gambar 2.95	Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-146
Gambar 2.96	Persentase Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Poso, Tahun 2020 .....	II-147
Gambar 2.97	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-148
Gambar 2.98	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-149
Gambar 2.99	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-150
Gambar 2.100	Perkembangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-151
Gambar 2.101	Rasio Penduduk ber-KTP di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-158
Gambar 2.102	Jumlah Bayi berakte Lahir di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-159
Gambar 2.103	Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Poso Tahun 2015-2019 .....	II-160





Gambar 2.104	Jumlah Kantor Desa Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-162
Gambar 2.105	Jumlah Kelompok PKK Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-163
Gambar 2.106	Persentase PKK Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-163
Gambar 2.107	Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-164
Gambar 2.108	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-165
Gambar 2.109	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-166
Gambar 2.110	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-166
Gambar 2.111	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-167
Gambar 2.112	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-168
Gambar 2.113	Rasio Peserta Program KB Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-168
Gambar 2.114	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-169
Gambar 2.115	Rata-rata Usia kawin Pertama di Kabupaten Poso Tahun 2015– 2020 .....	II-170
Gambar 2.116	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Poso, Tahun 2017-2020 .....	II-171
Gambar 2.117	Jumlah Izin Trayek yang di Keluarkan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-173
Gambar 2.118	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-174
Gambar 2.119	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-174



Gambar 2.120	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-177
Gambar 2.121	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-178
Gambar 2.122	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	II-180
Gambar 2.123	Jumlah Investor Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2016 – 2020 .....	II-182
Gambar 2.124	Nilai Investasi PMA Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	II-181
Gambar 2.125	Nilai Investasi PMDN Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-183
Gambar 2.126	Kenaikan/Penurunan (%) Investasi PMDN Kabupaten Poso Tahun 2017-2020 .....	II-184
Gambar 2.127	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-187
Gambar 2.128	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-188
Gambar 2.129	Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-189
Gambar 2.130	Jumlah Koleksi Buku perpustakaan per tahun Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-190
Gambar 2.131	Persentase PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Poso Tahun 2015–2020 .....	II-192
Gambar 2.132	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%) .....	II-193
Gambar 2.133	Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Poso Tahun 2015-2019 .....	II-195
Gambar 2.134	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-196
Gambar 2.135	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2019 .....	II-198
Gambar 2.136	Persentase SILPA Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 .....	II-204
Gambar 2.137	Persentase Belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2017-2020 .....	II-204
Gambar 2.138	Persentase Belanja urusan Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2017-2020 .....	II-205



Gambar 2.139	Persentase Belanja Langsung Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-206
Gambar 2.140	Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-207
Gambar 2.141	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-211
Gambar 2.142	Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-212
Gambar 2.143	Jumlah Temuan BPK Tahun 2015-2020 .....	II-212
Gambar 2.144	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 .....	II-216
Gambar 2.145	Luas Wilayah Kerbanjiran (Ha) di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	II-219
Gambar 2.146	Luas Wilayah Kekeringan (Ha) di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	II-219
Gambar 2.147	Angka Kriminalitas Yang tertangani Per 10.000 di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	II-222
Gambar 3.1.	Perkembangan dan Kontribusi PAD Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 .....	III-5
Gambar 3.2.	Perkembangan dan Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	III-8
Gambar 3.3.	Perkembangan dan Kontribusi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	III-9
Gambar 3.4.	Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	III-11
Gambar 3.5.	Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	III-12
Gambar 3.6.	Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Non Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020.....	III-13
Gambar 3.7.	Perkembangan dan Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	III-15
Gambar 3.8.	Perkembangan dan Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020 .....	III-16
Gambar 4.1	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 .....	IV-50



Gambar 4.2	Rencana Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024 .....	IV-50
Gambar 4.3	Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi .....	IV-51
Gambar 4.4	Peta pengembangan Wilayah Sulawesi dalam RPJMNas 2020-2024 .....	IV-65
Gambar 4.5	Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019 .....	IV-77
Gambar 4.6	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020 (Y on Y) .....	IV-80
Gambar 4.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan antar Provinsi Kuartal-3 tahun 2020 .....	IV-81
Gambar 4.8	Wilayah Terdampak Gempa Dan Tsunami .....	IV-87
Gambar 4.9	Tahapan RPJPD Kabupaten Poso 2005-2025 .....	IV-103
Gambar 4.10	Kondisi Tambang Tanpa Izin di Dongi-Dongi.....	IV-105
Gambar 4.11	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi tengah.....	IV-111
Gambar 4.12	Analisis Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Poso dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Sulawesi Tengah .....	IV-113
Gambar 4.13	Analisis Perkembangan Antar Waktu Kemiskinan di Kabupaten Poso .....	IV-113
Gambar 4.14	Analisis Efektivitas Penurunan Angka Kemiskinan di kabupate Poso .....	IV-114
Gambar 4.15	Analisis Relevansi Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Poso .....	IV-115
Gambar 4.16	Piramida Pendudu Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	IV-117
Gambar 4.17	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Poso.....	IV-120
Gambar 4.18	Korelasi Indikator TPB dan Covid-19 .....	IV-122
Gambar 4.19	Peta Bathimeterik DanaU Poso .....	IV-123
Gambar 5.1	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2021-2026 .....	V-22
Gambar 6.1	Tahapan dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 .....	VI-31
Gambar 6.2	Tema/Fokus Tahunan RPJMD Kabupaten Poso Periode 2021-2026 .....	VI-32



# BAB 1

# RPJMD



## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latarbelakang

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Lebih lanjut, Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pada pasal Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Perda paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.

Periode RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 akan berakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah dilantik, maka disusunnya RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 yang tahapannya telah diatur secara sistimatis yang kemudian dirumuskan menjadi Dokumen RPJMD melalui penetapan peraturan daerah.

Periodisasi RPJMD hasil pemilihan langsung 2020 sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun



2020 dimana sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dan menjalankan amanat Pasal 260 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan agar Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, ayat 3 dijelaskan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat bupati dan wakil bupati terpilih 2021-2024 sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dengan memperhatikan rancangan RPJMD, kondisi global dan nasional penting untuk diperhatikan. Kondisi global yang menjadi tantangan bagi pembangunan Kabupaten Poso kedepan antara lain pemulihan krisis perekonomian global akibat Pandemi Covid 19 yang diprediksikan akan sulit dan memerlukan waktu panjang, stabilitas politik global yang dinamis, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain krisis ekonomi, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama, terorisme dan radikalisme adanya bonus demografi, serta kebijakan pembangunan nasional di wilayah Sulawesi.

Selain Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) ditingkat Kabupaten sampai dengan Desa yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Poso, keberadaan undang-undang Desa juga menjadi perhatian penting dalam dokumen RPJMD ini mengingat jumlah desa di Kabupaten Poso yang begitu banyak dan memiliki kewenangan dan kapasitas finansial yang besar melalui Alokasi APBN dalam bentuk penggunaan Dana Desa yang disinergikan dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan yang menjadi Prioritas pemerintah Kabupaten Poso periode 2021-2026, sehingga ke depan desa diharapkan bisa menjadi pilar utama yang memperkuat pembangunan daerah. Pendekatan sektoral yang terintegrasi dengan pendekatan spasial menjadi pilihan strategi pembangunan daerah.

Untuk mendukung pembangunan Nasional maka Perumusan RPJMD akan memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Perpres Perpres Nomor 18 Tahun 2020 serta Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan penyempurnaan dokumen Ranwal RPJMD Poso tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN



2020-2024, RPJMD Teknoratik dan KLHS RPJMD, serta Permendagri 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah **ke-empat** pada periode RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 dengan Visi pembangunan **Kabupaten Poso yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Pembangunan jangka menengah daerah tahap ke-empat diarahkan pada a) Mewujudkan Kab. Poso yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dgn menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yg kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. b) Perekonomian berkembang melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. c) SDM yang berkualitas menjadi tonggak utama bagi terwujudnya Poso yang maju dan mandiri. D) Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal. e) Pengelolaan wilayah daratan dan lembah yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional. f) Terciptanya masyarakat Kabupaten Poso yang melek informasi teknologi sehingga bermanfaat dalam membangun kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM dan optimalisasi pelayanan pemerintah berbasis Informasi dan tehnologi.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Poso dan menyikapi tekanan ekonomi daerah akibat krisis ekonomi dan pandemi covid-19 yang masih dalam tahap pemutusan rantai penularan, keterbatasan fiskal didalam membiayai rencana pembangunan, bonus demografi yang saat ini sedang terjadi, adaptasi perkembangan teknologi informasi, pelayanan publik yang masih rendah, optimalisasi pembangunan pedesaan serta kewajiban daerah didalam pencapaian Tujuan Pembangunan Manusia/SDGs sampai di tingkat desa, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia dan pelayanan publik yang optimal berbasis desa dengan memanfaatkan perkembangan tehnologi informasi serta pembangunan ekonomi melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah dengan memperkuat ekonomi desa sebagai fokus pembangunan. Kunci pembangunan kedepan adalah **Membangun Bersama, Sejahtera Bersama**, sebagai suatu upaya kolektif yang





dibangun dengan keterlibatan seluruh elemen kemasyarakatan di Kabupaten Poso dengan pengawasan pemerintahan daerah yang bersih dan amanah dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun** untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Poso 2021-2026. mengarah pada terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan Kabupaten Poso kedepan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dicanankan sebagai sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya terorganisir dan sistematis. Keadaan yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju dalam semua bidang dan sektor pembangunan dan merata. Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Poso tidak sekedar Maju tetapi juga Tangguh menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Dalam Perumusan RPJMD sebagai hasil penyempurnaan Rancangan RPJMD hasil masukan Musrenbang RPJMD, konsultasi publik, konsultasi awal dan kesepakatan DPRD serta hasil fasilitasi dan konsultasi Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dilakukan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik sebagai mana dijelaskan dalam undang-undang tersebut memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dikonsultasikan Bersama dengan DPRD sebagai manifestasi keterwakilan rakyat. Kemudian Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Diselaraskan dengan berbagai dokumen Perencanaan dan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap



pembangunan. Pelibatan pemangku kepentingan adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki melalui Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan tahap awal rancangan awal, kemudian rancangan melalui Konsultasi Publik, Forum OPD dan Kesepakatan serta Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Poso serta Provinsi Sulawesi Tengah sebagai harmonisasi, sinergisitas antar dokumen perencanaan provinsi dan Kabupaten Poso yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026. Kemudian dimusrenbangkan dan hasil masukan proses tersebut dituangkan dalam rumusan rancangan akhir RPJMD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026 ini adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara





- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
28. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
  30. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi tengah tahun 2013 nomor 51 dan tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 1);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tentena (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 2);
  39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);



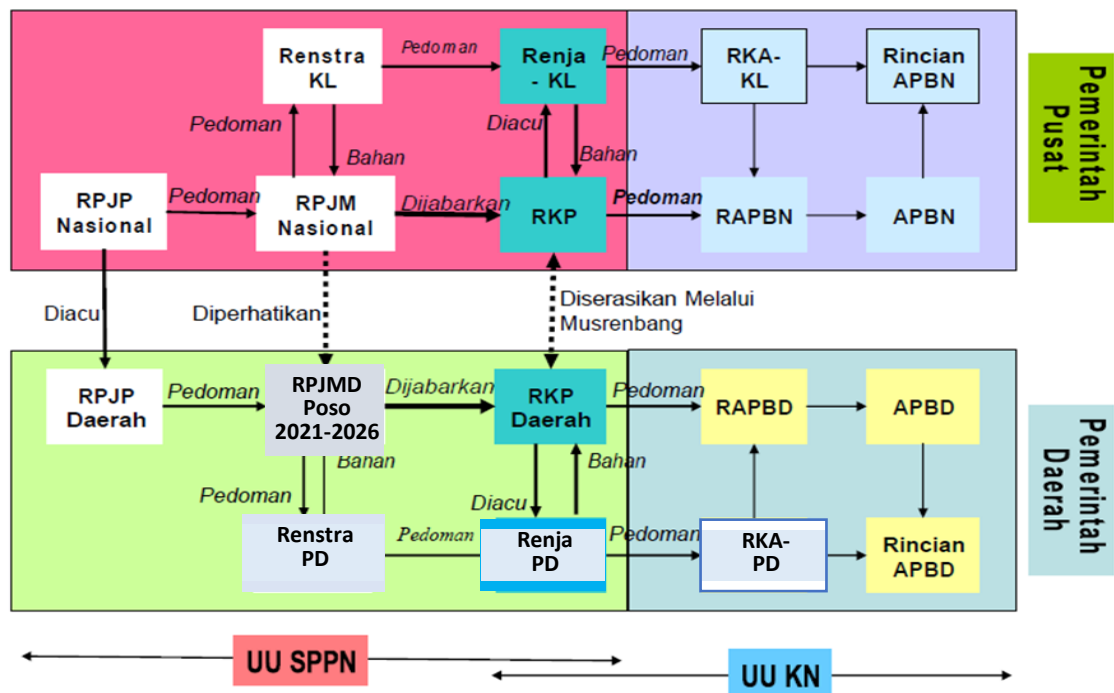
40. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional khususnya RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Perumusan RPJMD Poso ini memperhatikan juga Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Untuk mendukung pembangunan Nasional maka Perumusan RPJMD juga memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Perpres Perpres Nomor 18 Tahun 2020 serta Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD 2022-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja-PD. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1.1**

**Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan**

**1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)**

Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 di selaraskan dengan Visi, Misi yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang berlaku saat ini dalam Dokumen RPJMD ini maka akan diulas terkait dengan substansi dokumen RPJM Nasional menyangkut Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan dalam RPJMNas dan keterkaitan dengan rumusan RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis RPJMNas dan RPJMD Kabupaten Poso termuat dalam Bab IV, kemudian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dengan Visi, Misi yang diharmonisasikan dengan Visi Misi RPJMNas tahun 2020-2024 serta prioritas pembangunan Nasional dimuat dalam Bab V RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

**2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.**

Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan Isu Strategis yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 yang masih dalam tahap penyusunan.

**3. Hubungan RPJMD Kabupaten Poso dengan RPJPD Kabupaten Poso (Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025).**

Hubungan RPJMD 2021-2026 mencakup tahapan IV pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Poso yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025, yang Pada tahap ini diharapkan Kabupaten “Kabupaten yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dapat terwujud. Pembangunan jangka menengah daerah tahap *keempat* diarahkan pada a) Mewujudkan Kab. Poso yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dgn menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yg kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. b) Perekonomian berkembang melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. c) SDM yang berkualitas menjadi tonggak utama bagi terwujudnya Poso yang maju dan mandiri. d) Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal. e) Pengelolaan wilayah daratan dan lembah yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional. f) Terciptanya masyarakat Kab. Poso yang melek informasi teknologi sehingga bermanfaat dalam membangun kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM dan optimalisasi pelayanan pemerintah berbasis Informasi dan tehnologi. Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan Isu Strategis yang dijabarkan dalam RPJPD Kabupaten Poso khususnya pada Periode Ke IV tahun 2020-2025 yang masih berlaku saat ini.

**4. Hubungan RPJMD 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Poso (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso 2012-2032).**

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek *spasial* menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-



besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Poso. Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 harus selaras dengan Isu Strategis Pola Ruang dan Tata Ruang yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso yang masih berlaku saat ini.

#### **5. Hubungan antara RPJMD dan dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).**

Sesuai amanat Permendagri 53 tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5 bahwa TKPKD Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya dan fungsi salah satunya menyusun dokumen RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

*Dokumen **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berjangka waktu 5 (lima) Tahun, Sesuai Permendagri 53 tahun 2020 pasal 20 ayat 3 dimana RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD sehingga idealnya disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD.***

Upaya pengentasan kemiskinan Kabupaten Poso kedepan lebih sistematis dan terarah sejalan dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan sinergi antara Target Indikator Pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 dan Target TPB/SDGs Kabupaten Poso maupun SDGs Desa terkait penanggulangan kemiskinan daerah, diperlukan sebuah dokumen rinci yang memberikan arah program dan kegiatan serta lokasi prioritas penanganan penanggulangan kemiskinan yang dimuat didalam dokumen RPKD Kabupaten Poso tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD yang bersifat makro diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam dokumen RPKD untuk memberikan arah dan memperkuat keseluruhan proses pengentasan kemiskinan yang lebih fokus pada penyelesaian akar masalah kemiskinan. Pembangunan yang dituju tidak hanya diartikan sebatas pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu dan keluarga yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan kabupaten. Untuk itu, rangkaian target dan indikator penurunan kemiskinan di dalam kerangka

waktu periodisasi RPJMD juga ditetapkan sebagai target pencapaian pengentasan kemiskinan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

## **6. Hubungan RPJMD dengan RKP**

RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 akan dijabarkan ke dalam RKP Kabupaten Poso sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 point 28 memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan Daerah; penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan khususnya dalam penyusunan rancangan RKP 2022-2026.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RKP yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026. RKP 2022-2026 harus benar-benar selaras dengan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Poso setiap tahunnya yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

## **7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)**

RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD/PD Kabupaten Poso dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD/PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi **Bapelitbangda Kabupaten Poso**.

Perangkat Daerah (PD) Wajib Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra-PD sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam Pasal 110 memuat antara lain: analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri 86 tahun 2017, Renstra-PD tidak memuat Visi, misi, Perangkat Daerah (PD) akan tetapi mengacu pada Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 sebagai dokumen induk Perencanaan bersifat jangka menengah dengan tujuan untuk menyediakan data *Kinerja* pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah pada kurun 5 tahun ke depan. Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dan memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif, spasial dan transparan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan memperhatikan kemampuan alokasi anggaran berdasarkan program prioritas (*Money Follows Priority Program*).

#### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya dokumen yang memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah Kabupaten Poso yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menjelaskan tentang kinerja keuangan di masa lalu 2016-2020 menyangkut kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penganggaran dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026;
- c. Untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah;
- d. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan isu Global, Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan kondisi lingkungan strategis Kabupaten Poso;
- e. Merumuskan Visi dan Misi daerah Kabupaten Poso dalam bentuk Bahasa perencanaan yang sinergi dengan Visi Misi pemabangunan Nasional dan Provinsi Sulawesai Tengah
- f. Merumuskan tujuan, sasaran, Indikator Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Poso 5 (lima) tahun kedepan;
- g. Merumuskan program pembangunan daerah untuk



pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah dan Pagu Indikatif dengan pendekatan ***Money follows Program Priority*** untuk seluruh perangkat daerah;

- h. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 beserta target untuk Tahun 2021 sebagai tahun awal periode RPJMD, sampai dengan Tahun 2026 sebagai tahun akhir periode RPJMD.

### **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (Sembilan) Bab sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 paragraf 2, Pasal 47 Ayat 5 dimana perumusan RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Poso yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

#### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

#### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut, termasuk arah kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan tataruang daerah serta rangkuman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD Sebelumnya.

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Poso untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya serta Indikator dan target Outcome dari setiap Misi sampai dengan akhir Periode RPJMD.

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program Prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

#### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan

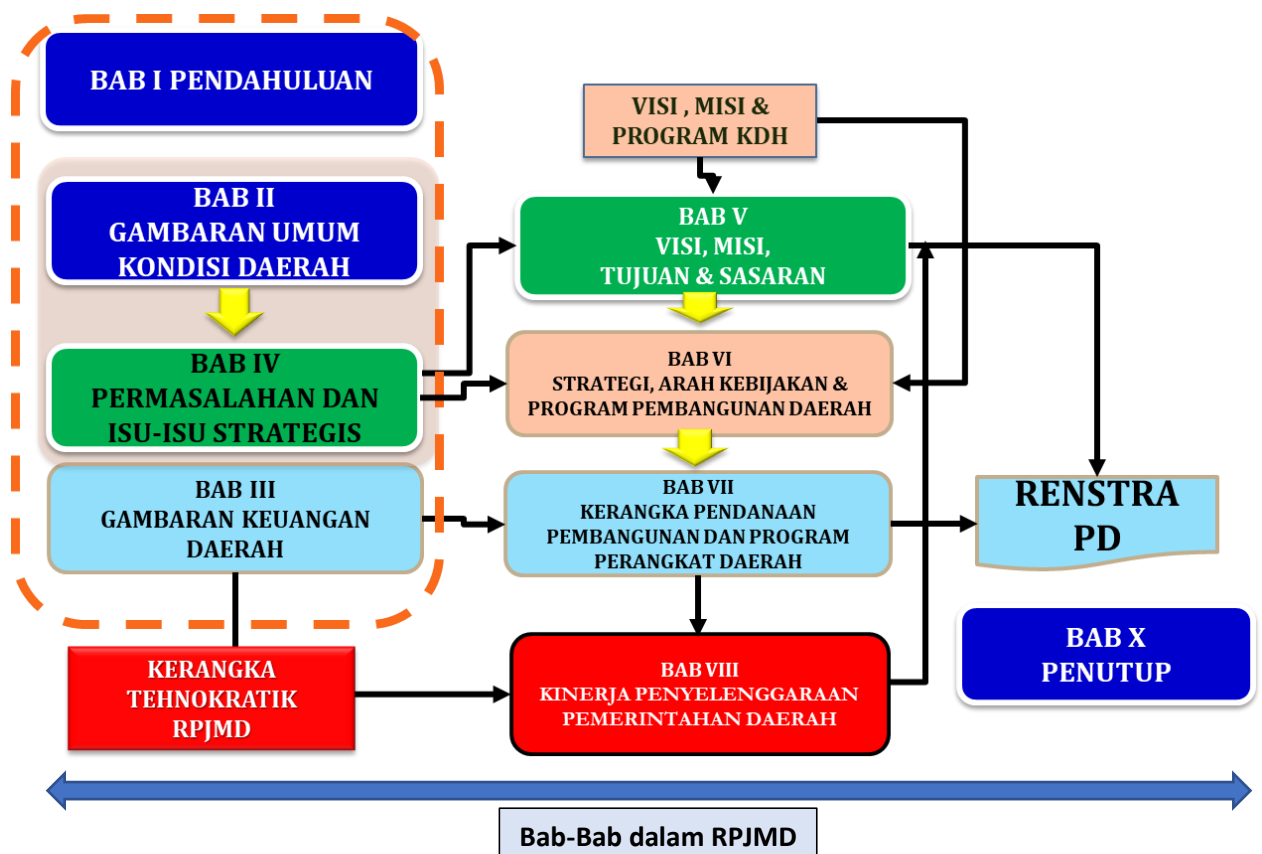
#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan dan Periode RPJMD tahun 2021-2026.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini berisikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Poso periode Tahun 2021-2026.



**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Bab RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dan Dokumen Teknokratik Serta Renstra-PD**

# BAB 2

# RPJMD



## GAMBARAN UMUM DAERAH

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sangat ditentukan oleh pengelolaan atas potensi sumberdaya yang dimiliki. Potensi sumberdaya suatu daerah, dapat digambarkan melalui kondisi daerah. Secara umum, gambaran kondisi daerah Kabupaten Poso meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, serta aspek kesejahteraan masyarakat.

### **2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS**

Gambaran umum kondisi daerah merupakan penjelasan tentang kondisi geografi dan demografi, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Poso, dimana indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan, dan identifikasi faktor-faktor, dan berbagai aspek yang perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Poso ke depan. Kondisi daerah ini memberikan basis atau pondasi dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta interpretasinya.





### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik dan kondisi geografis yaitu menyangkut kondisi yang terdiri dari; a) lokasi dan wilayah, mencakup: 1) Luas dan batas wilayah administrasi, 2) Letak posisi astronomis; b) Posisi geostrategis; dan c) Kondisi/kawasan; 3) Topografi, antara lain: kemiringan lahan dan ketinggian lahan; 4) Geologi, antara lain: struktur, karakteristik dan Potensi kandungan; 5) Hidrologi, antara lain; a) Daerah Aliran Sungai; b) Sungai, danau dan rawa; dan c) Debit; 6) Klimatologi terdiri dari: Tipe; Curah hujan; Suhu; dan Kelembaban; 7) Penggunaan lahan, antara lain: Kawasan budidaya dan Kawasan lindung.

#### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Secara astronomis, Kabupaten Poso terletak pada posisi  $1^{\circ}06'44,892''$ -  $2^{\circ}12'53,172''$  Lintang Selatan, dan  $120^{\circ}05'96''$ - $120^{\circ}52'4,8''$  Bujur Timur, dengan luas sekitar 7.112,25 Km<sup>2</sup>.

#### **2.1.1.2. Luas dan Batas Wilayah**

Karakteristik wilayah Kabupaten Poso berdasarkan luas dan batas wilayah. Dimana, Kabupaten Poso memiliki luas 7.112,25 terdiri atas 19 kecamatan pada Tahun 2020. Wilayah ini terletak pada deretan Pegunungan Fennema dan Tineba di Bagian Barat, Pegunungan Takolekaju di Bagian Barat Daya, Pegunungan Verbeek di Bagian Tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di Bagian Timur Laut. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lore Selatan seluas 771,59 km<sup>2</sup> atau 10,85 persen dari luas wilayah, dan kecamatan terbesar kedua pada Kecamatan Lore Tengah seluas 657,06 Km<sup>2</sup> atau 9,24%, sedangkan Kecamatan terkecil berada di Kecamatan Poso Kota yaitu seluas 11,29 Km<sup>2</sup> atau 0,16% dari luas Kabupaten Poso. Luas wilayah Kabupaten Poso menurut Kecamatan terdapat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Poso**  
**Menurut Kecamatan, Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
1	Pamona Selatan	Pendolo	474,65	6,67
2	Pamona Barat	Meko	174,91	2,46
3	Pamona Tenggara	Korobono	229,17	3,22
4	Pamona Utara	Sulewana	422,04	5,93
5	Pamona Pusalemba	Sangele	367,54	5,17
6	Pamona Timur	Taripa	549,38	7,72

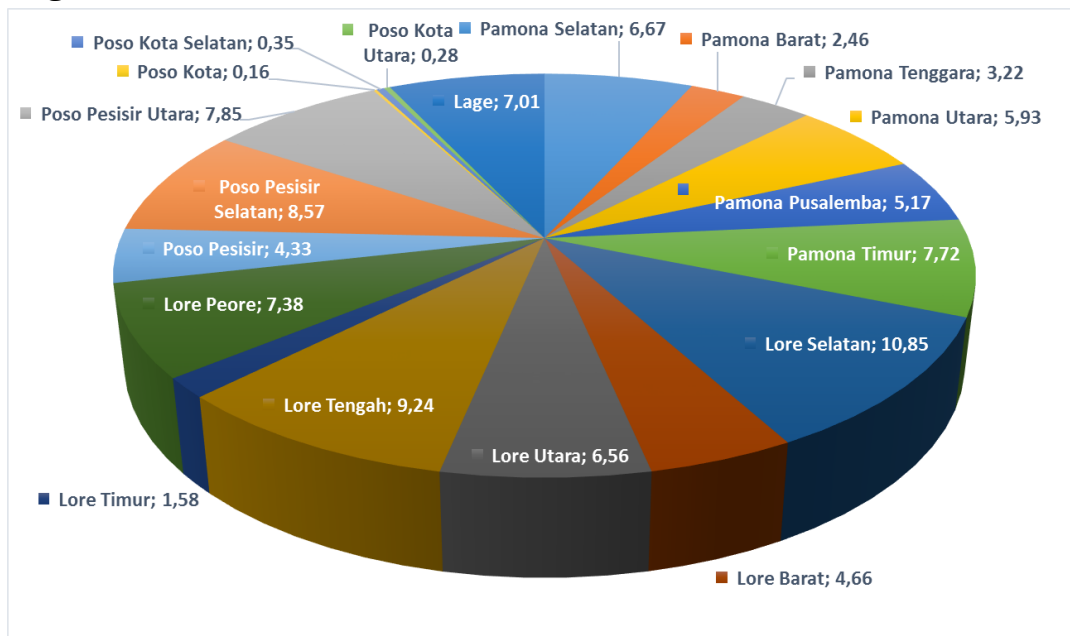


**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
7	Lore Selatan	Gintu	771,59	10,85
8	Lore Barat	Lengkeka	331,36	4,66
9	Lore Utara	Wuasa	466,75	6,56
10	Lore Tengah	Doda	657,06	9,24
11	Lore Timur	Maholo	112,4	1,58
12	Lore Peore	Watutau	525,2	7,38
13	Poso Pesisir	Mapane	307,66	4,33
14	Poso Pesisir Selatan	Tangkura	609,39	8,57
15	Poso Pesisir Utara	Tambarana	558,34	7,85
16	Poso Kota	Gebang Rejo	11,29	0,16
17	Poso Kota Selatan	Kawua	25,06	0,35
18	Poso Kota Utara	Lawanga	20,22	0,28
19	Lage	Tagolu	498,24	7,01
	<b>Poso</b>		<b>7.112,25</b>	

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

Secara administratif Kabupaten Poso sampai dengan Tahun 2020 terbagi 19 kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 7.112,25 km<sup>2</sup>, dengan persentase luas wilayah secara terinci per-kecamatan terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

**Gambar 2.1**  
**Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Poso, Tahun 2020**



Secara data detail profil singkat Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kabupaten Poso diuraikan sebagai berikut.

Pamona Selatan	:	Luas wilayah 474,65 atau 6,67% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 136 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Pendolo
Pamona Barat	:	Luas wilayah 174,91 atau 2,46% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 96 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Meko
Pamona Tenggara	:	Luas wilayah 229,17 atau 3,22% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 129 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Korobono
Pamona Utara	:	Luas wilayah 422,04 atau 5,93% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 56 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Sulewana
Pamona Puselemba	:	Luas wilayah 367,54 atau 5,17% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 65 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Sangele
Pamona Timur	:	Luas wilayah 549,38 atau 7,72% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 91 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Taripa
Lore Selatan	:	Luas wilayah 771,59 atau 10,85% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 124 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Gintu
Lore Barat	:	Luas wilayah 331,36 atau 4,66% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 129 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Lengkeka
Lore Utara	:	Luas wilayah 466,75 atau 6,56% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 117 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Wuasa
Lore Tengah	:	Luas wilayah 657,06 atau 9,24% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 156 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Doda
Lore Timur	:	Luas wilayah 112,4 atau 1,58% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 102 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Maholo
Lore Peore	:	Luas wilayah 525,2 atau 7,38% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 107 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Watutau
Poso Pesisir	:	Luas wilayah 307,66 atau 4,33% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 13 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Mapane
Poso Pesisir Selatan	:	Luas wilayah 609,39 atau 8,57% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 42 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Tangkura
Poso	:	Luas wilayah 558,34 atau 7,85% dari total luas wilayah



Pesisir Utara		kabupaten yang berjarak 45 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Tambarana
Poso Kota	:	Merupakan Ibukota Kabupaten Poso dengan Luas wilayah 11,29 atau 0,16% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 0 km dengan Ibukota Kecamatan di Gebang Rejo Timur
Poso Kota Utara	:	Luas wilayah 20,22 atau 0,28% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 3 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Lawanga
Poso Kota Selatan	:	Luas wilayah 25,06 atau 0,35% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 5 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kawua
Lage	:	Luas wilayah 498,24 atau 7,01% dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 7,5 km dari ibukota kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Tagolu

Sebagaimana data yang tersaji di atas, Kabupaten Poso merupakan Kabupaten berada di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 7.112,25 Km<sup>2</sup> atau sebesar 11,50 Persen dari luas wilayah Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara</li></ul>
Sebelah Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Sulawesi Selatan</li></ul>
Sebelah Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali</li></ul>
Sebelah Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong</li></ul>

### **2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Poso terletak di Pesisir Selatan Teluk Tomini, berada pada koordinat 1°06'44,892"- 2°12'53,172" Lintang Selatan dan 120°05'96"-120°52'4,8" Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomis, panjang wilayah Kabupaten Poso dari Ujung Barat sampai Ujung Timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2 Km. Kabupaten Poso yang merupakan wilayah Kabupaten yang berada di Pesisir Timur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jarak 220 Km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu), dapat dilalui menggunakan moda transportasi darat dan udara. Batas daratan Kabupaten Poso dengan







No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (Km)
3.	Pamona Tenggara	Korobono	129
4.	Pamona Utara	Sulewana	56
5.	Pamona Puselemba	Sangele	65
6.	Pamona Timur	Taripa	91
7.	Lore Selatan	Gintu	124
8.	Lore Barat	Lengkeka	129
9.	Lore Utara	Wuasa	117
10.	Lore Tengah	Doda	156
11.	Lore Timur	Maholo	102
12.	Lore Peore	Watutau	107
13.	Poso Pesisir	Mapane	13
14.	Poso Pesisir Selatan	Tangkura	42
15.	Poso Pesisir Utara	Tambarana	45
16.	Poso Kota	Gebang Rejo Timur	0
17.	Poso Kota Utara	Kawua	5
18.	Poso Kota Selatan	Lawanga	3
19.	L a g e	Tagolu	7,5

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat bahwa jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Lore Tengah dengan jarak 156 Km, disusul Kecamatan Pamona Selatan dengan jarak 136 Km, sedangkan kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Poso Kota Selatan dengan jarak tempuh 3 Km.

#### **2.1.1.4. Topografi**

Secara topografis sebagian besar struktur wilayah Kabupaten Poso merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan keadaan kemiringan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Kemiringan 0%-2% seluas 68.243 Ha (datar agak landai), tersebar di seluruh kecamatan. Khususnya Kecamatan Pamona Selatan. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian dan perkebunan;
2. Kemiringan 3%-15% seluas 37.502 Ha (landai agak miring). Tersebar hampir di seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Lage. Kondisi tanah ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air;



3. Kemiringan 16%-40% (miring agak curam), terdapat di hampir seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Lore Selatan. Kondisi tanah dengan kemiringan ini, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun, perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
4. Kemiringan di atas 40% (sangat curam), merupakan bagian terluas tanah dari seluruh wilayah di Kabupaten Poso. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena rawan erosi dan longsor, sehingga lebih tepat untuk wilayah pelestarian hutan lindung.

#### **2.1.1.5. Tinggi Wilayah**

Berdasarkan pemutakhiran data statistik Kabupaten Poso Tahun 2018, wilayah Kabupaten Poso dengan keadaan topografi yang terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan. Posisi daerah yang ada di wilayah ini merupakan daerah dataran rendah yang tersebar pada kedua bentang lahan, dengan dataran sebagai daerah terbesar menjadi permukiman masyarakat, wilayah pesisir pantai, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan pegunungan. Kabupaten Poso terletak pada ketinggian 0–1.200 meter dari permukaan laut, dengan keadaan topografis dataran tinggi hingga perbukitan sedang dan dataran rendah yang umumnya tersebar di sekitar pegunungan pantai dan letaknya bervariasi.

Perhitungan luas peta ketinggian, ternyata daerah dengan ketinggian 1.II-1.200 meter dpl antara lain Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Tengah, dan Kecamatan Lore Timur. Sedangkan, daerah di luar dari wilayah tersebut memiliki ketinggian permukaan tanah di bawah 800 m di atas permukaan laut atau berada pada dataran rendah sampai dataran tinggi. Untuk lebih detail pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Poso Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Tinggi DPL (m)</b>
<b>Pamona Selatan</b>	Pendolo	525
<b>Pamona Barat</b>	Meko	500
<b>Pamona Tenggara</b>	Korobono	500
<b>Pamona Utara</b>	Sulewana	650
<b>Pamona Puselemba</b>	Sangele	540
<b>Pamona Timur</b>	Taripa	782
<b>Lore Selatan</b>	Gintu	766
<b>Lore Barat</b>	Lengkeka	800
<b>Lore Utara</b>	Wuasa	1.200



Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
<b>Lore Tengah</b>	Doda	1.200
<b>Lore Timur</b>	Maholo	1.200
<b>Lore Peore</b>	Watutau	1.100
<b>Poso Pesisir</b>	Mapane	19
<b>Poso Pesisir Selatan</b>	Tangkura	15
<b>Poso Pesisir Utara</b>	Tambarana	2
<b>Poso Kota</b>	Gebang Rejo Timur	17
<b>Poso Kota Utara</b>	Kawua	4
<b>Poso Kota Selatan</b>	Lawanga	27
<b>Lage</b>	Tagolu	10

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

#### 2.1.1.6. Geologi

##### ➤ **Struktur dan karakteristik wilayah**

Kondisi geologi dan geografis di Kabupaten Poso terdapat sesar Baribis yang diprediksi patahan rawan gempa berkaitan dengan *local extention* di *volcanic arc* pada lajur sesar Baribis ke arah Barat Laut Tenggara. Litologi geologi untuk daerah Selatan dan Timur menunjukkan ciri rawan gerakan tanah. Berdasarkan data peristiwa bencana, akibat gerakan tanah terjadi di daerah Selatan dan Timur. Jenis litologi gunung api muda *alluvial* potensial untuk air tanah, dengan uraian kandungan sebagai berikut.

- i. *Aluvium*
- ii. *Pleistocene sedimentary facies*
- iii. *Miocene sedimentary facies*
- iv. *Undifferentiated volcanic product*
- v. *Pliocene sedimentary facies*
- vi. *Liparite dasite*
- vii. *Eosene*
- viii. *Old quaternary volcanic product*

##### ➤ **Potensi kandungan**

Merujuk hasil penelitian dan pemetaan, terdapat berbagai jenis bahan galian golongan C berupa lempung, pasir silica, marmer, sekis, sirtu, sedangkan galian golongan A dan B tidak ditemukan. Secara rinci uraian lokasi serta bahan galian terdapat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Potensi Energi dan Mineral Kabupaten Poso Tahun 2020**

No	Kecamatan	Mineral	Luas (Ha)
1.	Poso Pesisir	Aluvium muda berasal dari campuran	74.544.37





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Kecamatan	Mineral	Luas (Ha)
	Utara	endapan muara dan endapan, granit; granodiorit; riolit, batu pasir; batu lanau; batu lumpur; serpih; konglomerat	
2.	Pamona Timur	Quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist; genes; setempat breksi dan pualam, aluvium, batu pasir, lumpur, gamping	91.185.53
3.	Lore Barat	Granit; granodiorit; riolit, quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist	28.557.84
4.	PosoPesisir Selatan	Aluvium, endapan kipas alluvial, batu pasir; batu lumpur; serpih	83.630.83
5.	Pamona Utara	Aluvium, endapan kipas alluvial, batu pasir; batu lumpur; serpih, Peridotit; serpentinit, marmer; batu gamping	147.160.45
6.	Lo.re Utara	Aluvium, endapan kipas aluvial; koluvium, quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist, granit; granodiorit; riolit	58.726.57
7.	Poso Kota	Marmer; batu gamping, aluvium, endapan kipas aluvial	3.702.65
8.	Lage	Aluvium, endapan kipas alluvial, quartzite; schist; filit, Marmer; batu gamping, Batu pasir; batu lanau; batu lumpur; serpih; konglomerat	51.015.59
9.	Lore Peore	Quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist; genes; setempat breks dan pualam, granit; granodiorit; riolit, quartzite; schist; filit	50.778.39
10.	Lore Selatan	Granit; granodiorit; riolit, quartzite; batupasir; filit; serpih; schist, aluvium muda	68.064.56
11.	Lore Tengah	Aluvium muda berasal dari campuran endapan muara dan sungai, granit; granodiorit; riolit, quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist	59.498.24
12.	Lore Timur	Granit; granodiorit; riolit, quartzite; batupasir; filit; serpih; schist	18.683.66
13.	Pamona Selatan	Aluvium, endapan kipas aluvial; koluvium, quartzite; batupasir; filit; serpih; schist	38.371.24
14.	Pamona Barat	Aluvium, endapan kipas aluvial, filit; schist; batupasir; breksi, quartzite; batu pasir; filit; serpih; schist	23.578.41
15.	Pamona Tenggara	Aluvium muda berasal dari endapan sungai, quartzite; schist; filit, Filit; schist; batupasir; breksi, Peridotit; serpentinit	32.344.49
16.	Poso Kota	Aluvium muda berasal dari endapan	3.602.09



No	Kecamatan	Mineral	Luas (Ha)
	Utara	sungai, Quartzite; schist; filit, Marmer; batu gamping	
17.	Poso Kota Selatan	Quartzite; schist; filit, Marmer; batu gamping, Aluvium muda berasal dari endapan sungai	4.372.05
18.	PosoPesisir	Aluvium endapan kipas aluvial, marmer; batu gamping, batu pasir; batu lanau; batu lumpur; serpih; konglomerat	33.408.04
<b>Jumlah</b>			<b>871.225.00</b>

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020

#### **2.1.1.7. Hidrologi**

Sungai-sungai di Kabupaten Poso sebagian besar bermuara ke pesisir Utara, dan Timur Teluk Tomini. Terdapat sungai-sungai besar yakni Sungai Poso, Sungai Lairiang, Sungai Puna, Sungai Tambarana, Sungai Kilo dan Sungai Maranda. Bentuk morfologi sungai-sungai ini umumnya berbentuk huruf U dengan beberapa menunjukkan wilayah dataran banjir yang luas antara lain Sungai Puna dan Sungai tambarana. Terdapat sungai besar yang bermuara ke Selat Makassar, yakni Sungai Sedoa (Sungai Koro), atau Sungai Lairiang.

#### **2.1.1.8. Klimatologi**

Kabupaten Poso memiliki dua musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi April-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Oktober-Maret. Curah hujan tertinggi pada Oktober yaitu 407,6mm<sup>3</sup> dan Juli 291,4 mm<sup>3</sup>, sedangkan curah hujan terendah pada Desember dan Agustus yaitu 63,1 mm<sup>3</sup> dan 125 mm<sup>3</sup>. Rata-rata curah hujan mencapai 233,98 mm<sup>3</sup> per bulan.

Kecepatan angin rata-rata berkisar 1-4 knots, dan maksimum mencapai 0,81-1,33 knots. Hasil pencatatan suhu udara pada Laboratorium Kabupaten Poso Tahun 2020, rata-rata suhu udara 27,48°C. Suhu udara terendah Januari dan Februari sebesar 27,38°C, sedangkan waktu lainnya berkisar 27-27,81°C. Kelembaban udara rata-rata tertinggi pada Januari, Februari, April dan Juni mencapai 85,95 persen, sedangkan terendah Agustus sebesar 80,79 persen. Data keadaan curuh hujan tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut.



**Tabel 2.5**  
**Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan**  
**Menurut Bulan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (Hari)
1	Januari/ <i>January</i>	290,5	15
2	Pebruari/ <i>February</i>	174,4	17
3	Maret/ <i>March</i>	261,9	18
4	April/ <i>April</i>	242	23
5	Mei/ <i>May</i>	222,8	20
6	Juni/ <i>June</i>	223,2	17
7	Juli/ <i>July</i>	291,4	22
8	Agustus/ <i>August</i>	125	13
9	September/ <i>September</i>	249,1	19
10	Oktober/ <i>October</i>	407,6	20
11	Nopember/ <i>November</i>	256,8	15
12	Desember/ <i>December</i>	63,1	19

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Poso beriklim tropis dipengaruhi iklim musim dengan curah hujan rata-rata di atas 1.008,54 mm<sup>3</sup> per tahun. Suhu udara berkisar antara 27-27,81°C dengan kelembaban antara 85,01 persen pada musim hujan dan 85 persen pada musim kemarau. Iklim dipengaruhi musim Barat yang basah dan musim Utara yang kering. Angin Barat bertiup antara Oktober-Maret, pada periode ini ditandai dengan musim penghujan. Sedangkan, angin Utara bertiup April-September, yang pada periode ini di Kabupaten Poso terjadi musim kemarau. Data klimatologi Kabupaten Poso tahun 2020 pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

**Tabel 2.6**  
**Tekanana Udara dan Kecepatan Angin Serta Penyinaran Matahari**  
**Menurut Bulan di Poso, Tahun 2020**

No	Bulan/Month	Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)	Kecepatan Angin/Wind Velocity (knot)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
1	Januari/ <i>January</i>	1.008,83	0,81	52,25
2	Pebruari/ <i>February</i>	1.009,74	1,07	66,81
3	Maret/ <i>March</i>	1.009,18	0,94	51,01
4	April/ <i>April</i>	1.009,27	1,04	64,42
5	Mei/ <i>May</i>	1.008,67	0,99	54,54
6	Juni/ <i>June</i>	1.008,80	1,01	45,77
7	Juli/ <i>July</i>	1.008,02	1,00	56,57
8	Agustus/ <i>August</i>	1.008,75	1,33	71,57
9	September/ <i>September</i>	1.008,50	1,17	54,13



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Bulan/Month	Tekanan Udara <i>Atmospheric Pressure (mb)</i>	Kecepatan Angin/Wind Velocity (knot)	Penyinaran Matahari <i>Duration of Sunshine (%)</i>
10	Oktober/ October	1.007,82	1,21	75,56
11	Nopember/ November	1.008,06	0,96	75,42
12	Desember/ December	1.006,85	0,81	40,75

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

Suhu udara di Kabupaten Poso rata-rata maksimum berkisar 21,00°C-23,20°C dengan suhu udara tertinggi pada September dan Oktober, dan terendah pada Agustus. Sedangkan, untuk rata-rata minimum berkisar 20,20°C-23,20°C. Dimana, tertinggi terjadi pada Mei dan terendah pada Bulan Agustus. Untuk kelembaban udara berkisar 80-87 persen dengan rata-rata 85,01 persen di tahun 2020. Kelembaban udara tertinggi pada Januari, Maret, Mei, Desember, sedangkan terendah pada Agustus. Data tekanan udara terendah terjadi pada Desember 1.009,10 mb sebaliknya tekanan tertinggi pada Februari yakni 1.011,70 mb. Secara lengkap terdapat pada Tabel 2.7 sebagai berikut.

**Tabel 2.7**  
**Suhu Udara, Kelembaban dan Tekanan Udara**  
**Menurut Bulan di Poso, Tahun 2020**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum		
Januari	21,80	27,23	33,4	86,22	1.010,00
Pebruari	21,00	27,38	33,4	84,73	1.011,70
Maret	22,60	27,46	33,4	86,02	1.010,30
April	21,80	27,52	33,8	85,95	1.009,50
Mei	23,20	27,80	34,2	86,56	1.009,90
Juni	22,20	27,21	34,4	85,06	1.009,80
Juli	22,00	27,04	34,2	84,65	1.010,60
Agustus	20,20	27,61	35,0	80,79	1.010,70
September	21,60	27,26	34,6	84,86	1.011,20
Oktober	22,20	27,70	35,0	83,85	1.009,70
November	21,60	27,78	34,0	85,33	1.009,20
Desember	23,00	27,81	33,6	86,15	1.009,10

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021





Rata-rata suhu udara Kabupaten Poso di Tahun 2016 yakni 28,6 dan Tahun 2020 rata-rata suhu udara yakni 27,48. Untuk kelembaban udara rata-rata Tahun 2016 yakni 84,00 persen, lebih rendah pada Tahun 2020 dengan rata-rata 85,01 persen. Tekanan Udara rata-rata Tahun 2016 mencapai 1.007,40 mb, dan cenderung lebih rendah dari pada Tahun 2020 dengan rata-rata 1.010,14 mb, Kecepatan Angin Tahun 2016 yakni 2,6 knots, dan sebesar knots 1,03 knots Tahun 2020. Rata-rata curah hujan Tahun 2016 sebesar 164,30 mm<sup>2</sup> dan Tahun 2020 sebesar 233,98 mm<sup>2</sup> dan penyinaran matahari Tahun 2016 sebesar 70 persen, dan Tahun 2020 lebih rendah dengan rata-rata hanya sebesar 59,07 persen. Secara lengkap terdapat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

**Tabel 2.8**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Arah Angin, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Suhu (°C)	28,60	28,70	27,93	34,08	27,48
Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	84,00	85,00	81,16	85,01	85,01
Tekanan Udara (mb)	1.007,40	1.008,00	1.008,80	1.010,14	1.010,14
Kecepatan Angin Rata-rata (Knots)	2,60	2,60	2,60	2,42	1,03
Rata-rata Curah Hujan (mm <sup>2</sup> )	164,30	163,10	171,40	142,82	233,98
Penyinaran Matahari (%)	70,00	52,00	58,76	64,92	59,07

Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

#### **2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kabupaten Poso mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso. Merujuk pada RTRW Kabupaten Poso Tahun 2012–2032 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012, dimana Rencana Pengembangan Wilayah (RPW) Kabupaten Poso selama 20 tahun dirumuskan dalam bentuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian ruang. Pengembangan struktur wilayah dibagi 5 (lima) SWP terdapat pada Tabel 2.9 sebagai berikut.



**Tabel 2.9**  
**Rencana Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2012 – 2032**

No	SWP	Kecamatan	Zona	Fungsi Kawasan Lindung	Fungsi Kawasan Budidaya
1.	SWP 1	<ul style="list-style-type: none"><li>Poso Pesisir Utara</li><li>Poso Pesisir Selatan</li><li>Poso Kota</li></ul>	Zona Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Hutan Lindung</li><li>Sempadan pantai, sungai dan sekitar danau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Hutan Produksi</li><li>Kawasan Pertanian lahan basah</li><li>Kawasan perkotaan dan pemukiman.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Poso Kota Utara</li><li>Poso Kota Selatan</li><li>Lage</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Rawan Bencana Alam</li><li>Cagar Budaya (<i>heritage</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan pertambangan galian C</li><li>Kawasan perikanan tangkap</li><li>Kawasan pusat regional dan pemasaran</li><li>Kawasan industri pengolahan</li><li>Kawasan pariwisata (pantai, <i>heritage</i>)</li></ul>
2.	SWP 2	<ul style="list-style-type: none"><li>Lore Utara</li><li>Lore Tengah</li></ul>	Zona Tengah Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>Taman Nasional</li><li>Kawasan Hutan Lindung</li><li>Kawasan Sekitar mata air</li><li>Kawasan rawan bencana alam</li><li>Cagar Budaya (situs)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan hutan produksi</li><li>Kawasan pertanian</li><li>Kawasan pemukiman terbatas</li><li>Kawasan industri non polutan</li><li>Kawasan perikanan air tawar</li><li>Kawasan pariwisata</li></ul>
3.	SWP 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Pamona Utara</li><li>Pamona Barat</li></ul>	Zona Tengah Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Hutan Lindung</li><li>Kawasan sekitar Waduk/Bendung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Produksi hasil hutan dan perkebunan</li><li>Kawasan pertanian</li></ul>



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	SWP	Kecamatan	Zona	Fungsi Kawasan Lindung	Fungsi Kawasan Budaya
		<ul style="list-style-type: none"><li>Pamona Timur</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>an PLTA</li><li>Kawasan Rawan bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan pemukiman terbatas</li><li>Kawasan pariwisata</li><li>Kawasan simpul distribusi</li><li>Pertambangan galian C</li></ul>
4.	SWP 4	<ul style="list-style-type: none"><li>Lore Barat</li><li>Lore Selatan</li></ul>	Zona Tengah Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>Taman Nasional</li><li>Kawasan Hutan Lindung</li><li>Kawasan sekitar Waduk/bendung PLTA</li><li>Kawasan Rawan bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Industri pengolahan</li><li>Kawasan hutan produksi</li><li>Kawasan pertanian terbatas</li><li>Kawasan permukiman terbatas</li><li>Kawasan industri <i>non-polutan</i></li><li>Kawasan pariwisata</li></ul>
5.	SWP 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Pamona Selatan</li></ul>	Zona Timur Tenggara	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Hutan Lindung</li><li>Kawasan sekitar danau</li><li>Kawasan sekita mata air</li><li>Kawasan rawan bencana</li><li>Kawasan pelestarian ikan Sogili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan produksi perkebunan</li><li>Kawasan pertanian terbatas</li><li>Kawasan permukiman terbatas</li><li>Kawasan pariwisata</li><li>Kawasan perikanan air tawar</li></ul>

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Poso

Wilayah Kabupaten Poso termasuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). TNLL memiliki beragam jenis flora dan fauna endemik Sulawesi, karena terletak di garis *Wallace*—merupakan peralihan zona Asia dan Australia. Kawasan TNLL memiliki habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi, yakni Anoa, Babirusa, Rusa, Kera Hantu (Tangkasi), Kera Kakaktonkea, Kuskus Marsupial, dan hewan Carnivora terbesar di Sulawesi seperti musang Sulawesi hidup. TNLL juga memiliki sedikitnya 5 jenis bajing, dan terdapat 31 dari 38 jenis tikus, termasuk jenis endemik.



TNLL sebagai Cagar Biosfer Dunia memiliki berbagai tipe ekosistem yaitu hutan pamah tropika, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan sampai hutan dengan berbagai komposisi jenis berbeda. Berbagai jenis tumbuhan terdapat di hutan pamah tropika, dan pegunungan bawah antara lain *Pterospermum celebicum*, *Cananga odorata*, *Gnetum gnemon*, *Castanopsis argentea*, *Agathis philippinensis* dan *Philocladus hypophyllus*.

Hutan sub-alpin yang berada di atas ketinggian 2.000 mdpl, keadaan hutan sering berkabut dan banyak terdapat pohon kerdil yang ditumbuhi lumut. Kawasan TNLL juga terdapat berbagai ragam satwa. Dimana, lebih dari 50 persen satwa endemik seperti babi rusa (*Babyrousa babirussa*), tarsius (*Tarsius spectrum*), musang coklat sulawesi (*Macrogalidia musschenbrockii*), tikus sulawesi (*Rattus celebensis*), maleo (*Macrocephalon maleo*), ular emas (*Elaphe erythrura*), katak Sulawesi (*Bufo celebensis*), dan ikan betok (*Anabas testudinata*).

Kawasan TNLL ini juga memiliki batuan megalit—merupakan salah satu dari megalitik terbaik di Tanah Air. Patung-patung megalit mencapai ribuan tahun tersebar di kawasan ini antara lain Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Bada. Hasil penelitian Tahun 2013, sedikitnya terdapat 1.466 megalitik dari 83 situs. Terdapat 5 (lima) klasifikasi patung berdasarkan bentuknya:

1. Patung-patung batu: patung-patung ini biasanya memiliki ciri manusia, tetapi hanya kepala, bahu dan kelamin;
2. Kalamba: bentuk megalit yang banyak ditemukan dan menyerupai jambangan besar. Diduga sebagai tempat persediaan air, atau juga tempat menyimpan mayat pada upacara penguburan;
3. Tutu'na: ini adalah piringan-piringan dari batu, kemungkinan besar penutup Kalamba;
4. Batu Dakon: batu-batu berbentuk rata sampai cembung yang menggambarkan saluran-saluran, lubang-lubang tidak teratur dan lekukan-lekukan lain;
5. Lain-lain: mortar batu, tiang penyangga rumah dan beberapa bentuk lain juga ditemukan.

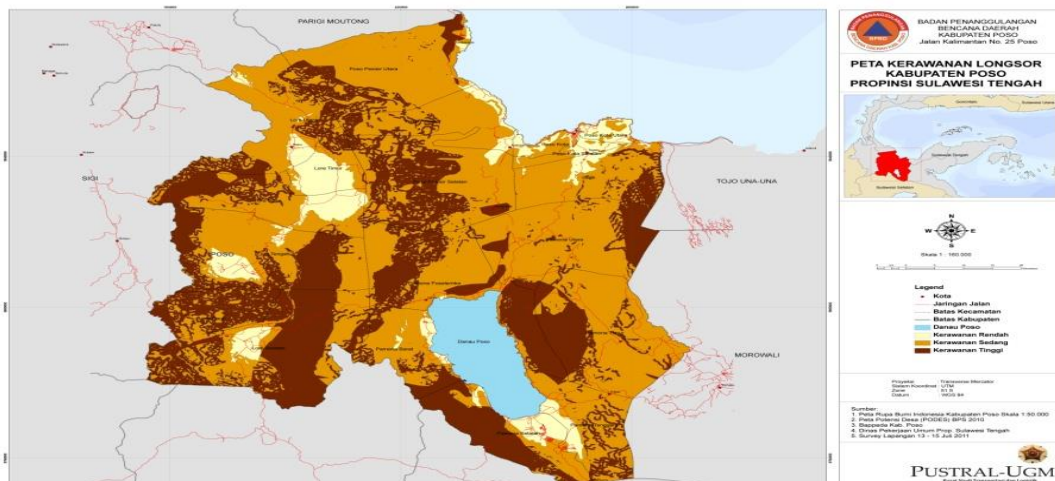
#### **2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana**

Pengembangan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Poso berdampak pada perubahan ekologis (ekosistem), dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Kondisi lingkungan yang umumnya terjadi secara lengkap sebagai berikut.



## 1. Tanah Longsor

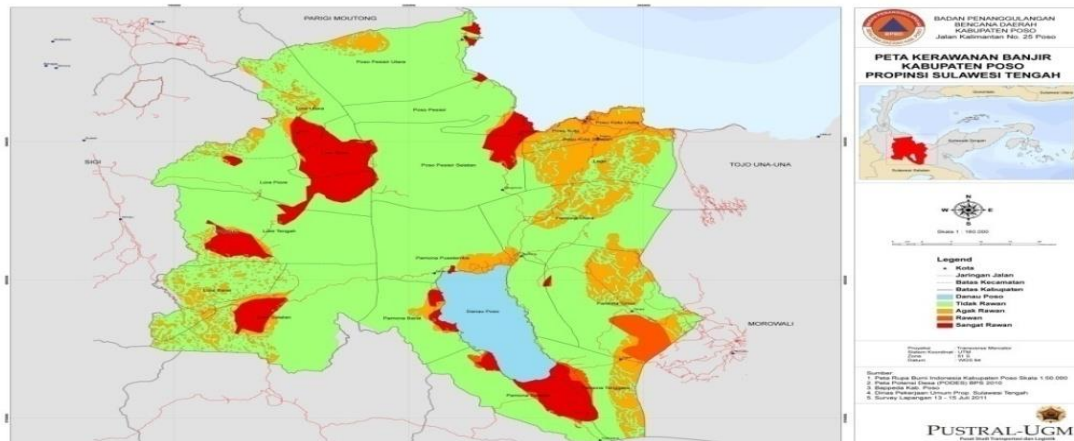
Penyebab utama tanah longsor adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran, serta akar tunggang. Kecamatan-kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi adalah Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Pamona Timur, Pamona Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, dan sebagian daerah Pamona Puselemba. Tanah longor terjadi di sisi jalan, tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.



**Gambar 2.3 Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Poso**

## 2. Banjir

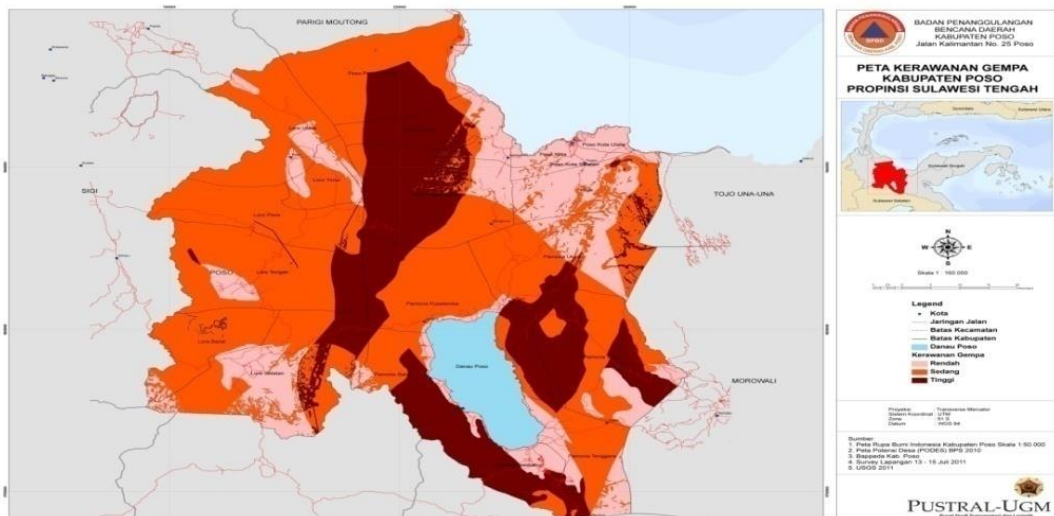
Beberapa kawasan wilayah kecamatan di Kabupaten Poso sering dilanda banjir dan genangan periodik. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah setempat relatif kecil. Lokasi sering terjadi banjir pada Kecamatan Lore Timur, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Selatan, Lore Selatan, Lore Tengah, dan sebagian wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara, serta Kecamatan Pamona Barat. Beberapa kejadian banjir dengan karakteristik dengan periode genangan singkat, namun memiliki potensi menimbulkan kerugian harta atau jiwa. Hal ini berkaitan dengan kondisi permukaan lahan hutan yang telah terbuka, dimanfaatkan sebagai perkebunan rakyat, serta kondisi topografi wilayah yang memiliki kelerengan yang curam (tajam).



**Gambar 2.4 Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Poso**

### 3. Gempa Bumi

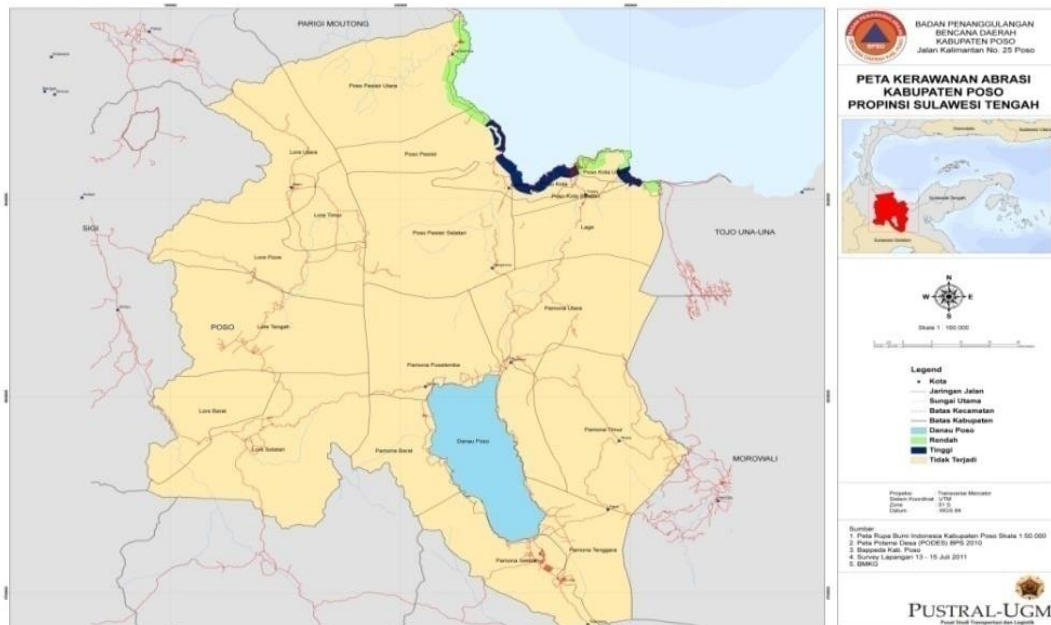
Jenis gempa bumi potensial terjadi di Kabupaten Poso adalah gempa bumi tektonik, yang diakibatkan oleh pergeseran di dalam perut bumi. Magnitudo gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa dalam bentuk dangkal, menengah, dan dalam. Apabila gempa bumi memiliki magnitudo besar dan memiliki kedalaman dangkal dapat menimbulkan risiko dan dampak yang sangat tinggi. Aktivitas gempa bumi terutama adanya patahan Palu Koro yang melintasi wilayah Barat kabupaten, serta patahan mikro Tambarana yang memanjang dari arah Utara ke Selatan di tengah Kabupaten Poso. Wilayah kecamatan yang paling rawan terjadi gempa antara lain Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Timur, Pamona Barat, dan Pamona Selatan.



**Gambar 2.5 Peta Kerawanan Gempa Kabupaten Poso**

#### 4. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai sehingga wilayah darat berkurang. Abrasi dan sedimentasi di perairan dekat pantai merupakan 2 proses geologi yang terkait. Abrasi berpotensi terjadi pada wilayah pantai yang tersusun oleh formasi batuan *alluvial*, atau batuan lepas. Agen utamanya adalah ombak dan arus susur pantai.



**Gambar 2.6 Peta Kerawanan Abrasi Kabupaten Poso**

Abrasi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia berupa pengambilan karang dari laut, pengambilan pasir di pantai, dan pembabatan *mangrove*. Potensi abrasi pantai dan danau di Kabupaten Poso tersebar di sepanjang pantai dan danau di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan dan Kecamatan Pamona Tenggara.

#### 5. Neraca Air

Kebutuhan terhadap air dimaksudkan untuk irigasi ahan pertanian dan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap air bersih. Secara umum masalah sumber daya air di Kabupaten Poso belum merupakan masalah yang serius bila dibandingkan dengan kota-kota besar, karena Kabupaten Poso memiliki suplai sumber daya air yang cukup memadai untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, pertanian, dan keperluan

industri rumah tangga. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Poso adalah Kawasan Laut Teluk Tomini, Danau Poso, daerah aliran sungai (DAS), dan rawa.

### 2.1.2 Aspek Demografis

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif bagi kemajuan daerah, apabila penduduk wilayah tersebut memiliki kualitas yang baik (tinggi), dan sebaliknya berarti negatif, jika terdapat banyak penduduk namun dengan kualitas yang rendah (rendah). Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Poso, dalam kurun 6 tahun terakhir terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Poso Tahun 2015-2020**

Merujuk pada gambar di atas, penduduk Kabupaten Poso terus meningkat dengan rata-rata peningkatan dalam kurun 6 tahun terakhir sebesar 0,81 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015 sebanyak 235.567 jiwa, dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 256.393 jiwa. Namun berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Poso, menunjukkan jumlah penduduk lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebanyak 244.857 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 2,37 persen.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Poso terkoreksi pada Tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki





mencapai 139.568 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 105.289 jiwa, dengan rata-rata jumlah penduduk tiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Jika dibanding tahun sebelumnya yang merupakan angka proyeksi oleh BPS, terjadi penurunan sebesar 4,50 persen, atau berkurang sebesar 183.758 dari proyeksi jumlah penduduk oleh BPS ditahun sebelumnya. Wilayah kecamatan memiliki penduduk terbanyak adalah Kecamatan Poso Kota Selatan, sebanyak 24.145 jiwa dan tingkat kepadatan sebanyak 963 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Pamona Pusalemba sebanyak 3.188 jiwa dan tingkat kepadatan 8,67 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni Kecamatan Poso Kota yakni sebesar 1.872,81, dan terendah Kecamatan Lore Tengah sebesar 7,57 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara lengkap terdapat pada Tabel 2.10 sebagai berikut.

**Tabel 2.10**

**Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Per Luas Wilayah  
Kecamatan Kabupaten Poso Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1	Pamona Selatan	12	-	20.977	474,65	44,19
2	Pamona Barat	6	-	10.214	174,91	58,40
3	Pamona Tenggara	9	-	7.888	229,17	34,42
4	Pamona Utara	7	3	6.774	422,04	16,05
5	Pamona Pusalemba	8	3	3.188	367,54	8,67
6	Pamona Timur	13	-	19.357	549,38	35,23
7	Lore Selatan	8	-	12.271	771,59	15,90
8	Lore Barat	6	-	14.628	331,36	44,15
9	Lore Utara	7	-	15.659	466,75	33,55
10	Lore Tengah	8	-	4.971	657,06	7,57
11	Lore Timur	5	-	6.690	112,4	59,52
12	Lore Peore	5	-	4.015	525,2	7,64
13	Poso Pesisir	13	3	22.285	307,66	72,43
14	Poso Pesisir Selatan	9	-	9.910	609,39	16,26
15	Poso Pesisir Utara	10	-	17.427	558,34	31,21
16	Poso Kota	-	7	21.144	11,29	1.872,81
17	Poso Kota Selatan	-	7	24.145	25,06	963,49
18	Poso Kota Utara	-	5	12.930	20,22	639,47
19	Lage	16	-	10.402	498,24	20,88
<b>Jumlah</b>		<b>142</b>	<b>28</b>	<b>244.875</b>	<b>7.112</b>	<b>34,43</b>

Sumber: Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2021



Penyebaran penduduk Kabupaten Poso terpusat pada beberapa ibukota kecamatan, yaitu Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, Lage, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara, Pamona Barat, Pamona Puselemba, Pamona Utara, Pamona Selatan, Pamona Timur, dan Lore Utara.

Menurut jenjang pendidikan, sebagian besar penduduk Kabupaten Poso merupakan tamatan SD sebesar 25,54 persen. Namun, jumlah penduduk untuk lulusan sekolah menengah atas sudah sebesar 31,45 persen. Penduduk yang belum bersekolah pada Tahun 2020 mencapai angka 46.313 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari tamatan SD sampai tamatan SMA pada masing-masing kecamatan terdapat pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tamat SD sampai Tamat SMA**  
**Kabupaten Poso Tahun 2020**

No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah (Jiwa)	Tamat SD/Sederajat (siswa)	Tamat SMP/Sederajat (siswa)	Tamat SMA/Sederajat (siswa)
1	Pamona Selatan	4.211	5.808	3.546	4.801
2	Pamona Barat	1.808	3.099	1.980	2.190
3	Pamona Tenggara	1.479	2.302	1.350	1.792
4	Pamona Utara	2.486	3.339	2.803	3.933
5	Pamona Pusalemba	3.226	3.531	3.386	6.005
6	Pamona Timur	2.170	2.707	2.649	3.339
7	Lore Selatan	1.276	1.737	1.250	1.631
8	Lore Barat	688	1.030	532	548
9	Lore Utara	3.468	4.755	2.558	2.636
10	Lore Tengah	1.041	1.468	855	895
11	Lore Timur	1.432	2.004	1.172	1.250
12	Lore Peore	867	1.212	677	716
13	Poso Pesisir	4.671	6.164	3.606	4.838
14	Poso Pesisir Selatan	1.867	1.319	1.419	3.460
15	Poso Pesisir Utara	2.624	1.545	1.938	4.505



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah (Jiwa)	Tamat SD/Sederajat (siswa)	Tamat SMP/Sederajat (siswa)	Tamat SMA/Sederajat (siswa)
16	Poso Kota	4.996	2.970	3.569	7.471
17	Poso Kota Selatan	1.867	1.391	1.419	3.460
18	Poso Kota Utara	2.624	1.545	1.938	4.505
19	Lage	3.512	3.531	3.692	5.387
<b>Jumlah</b>		<b>46.313</b>	<b>51.457</b>	<b>40.339</b>	<b>63.362</b>

Sumber:Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, 2021

Penduduk yang belum bersekolah pada tahun 2020 mencapai angka 46.313 jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi serius dan fokus dari pemerintah daerah, sehingga setiap tahun angka penduduk yang belum bersekolah dapat berkurang.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana Kabupaten Poso Tahun 2020**

No	Kecamatan	Diploma I-II	Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
1	Pamona Selatan	112	186	708	12	-
2	Pamona Barat	36	53	213	5	1
3	Pamona Tenggara	47	55	243	6	1
4	Pamona Utara	108	108	511	15	-
5	Pamona Pusalemba	174	298	1.224	124	7
6	Pamona Timur	75	100	386	9	-
7	Lore Selatan	31	56	229	1	1
8	Lore Barat	14	16	60	-	-
9	Lore Utara	63	81	280	13	-
10	Lore Tengah	33	22	127	2	-
11	Lore Timur	18	25	96	1	1
12	Lore Peore	27	14	73	1	-
13	Poso Pesisir	143	184	892	28	2
14	Poso Pesisir Selatan	74	83	312	9	1
15	Poso Pesisir Utara	67	87	418	4	-
16	Poso Kota	178	363	1.991	165	5
17	Poso Kota Selatan	90	229	1.068	88	7
18	Poso Kota Utara	97	205	1.020	60	5
19	Lage	155	195	909	51	3
<b>Jumlah</b>		<b>1.542</b>	<b>2.360</b>	<b>10.760</b>	<b>594</b>	<b>34</b>

Sumber:Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, 2021



Distribusi berdasarkan struktur jumlah penduduk di Kabupaten Poso menurut usia berada pada kisaran usia 15–59 tahun yaitu sebanyak 164.276 jiwa atau 64,07 persen, urutan kedua berada pada usia 5–14 tahun sebanyak 66.526 jiwa atau 25,94 persen. Selanjutnya, untuk penduduk usia >60 sebanyak 25.591 jiwa atau sebesar 9,98 persen. Mengacu pada struktur penduduk menurut usia tersebut, maka struktur penduduk Kabupaten Poso didominasi usia produktif. Struktur penduduk produktif merupakan modal yang penting untuk menurunkan angka ketergantungan penduduk, terutama untuk menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas daerah (naiknya output). Struktur usia penduduk Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.13 sebagai berikut.

**Tabel 2.13**  
**Struktur Jumlah Penduduk Menurut Usia**  
**Kabupaten Poso Tahun 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.849	11.370	23.219
5,9	11.680	10.964	22.644
10-14	10.656	10.007	20.663
15-19	10.172	9.231	19.403
20-24	10.832	9.043	19.875
25-29	10.841	9.675	20.516
30-34	10.339	9.654	19.993
35-39	10.370	9.590	19.960
40-44	10.154	9.266	19.420
45-49	9.132	8.533	17.665
50-54	7.704	7.376	15.080
55-59	6.203	6.161	12.364
60-64	4.716	4.557	9.273
65-69	3.249	3.118	6.367
70-74	2.264	2.388	4.652
75+	2.431	2.868	5.299
<b>Poso</b>	<b>132.592</b>	<b>123.801</b>	<b>256.393</b>

Sumber: Sumber: BPS, Poso Dalam Angka Tahun 2020





Berkaitan dengan data di atas, maka jumlah angkatan kerja atau usia produktif di Kabupaten Poso Tahun 2019 sebanyak 137.921 jiwa, dimana Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 134.817 jiwa, sedang belum bekerja (menganggur) sebanyak 3.104 jiwa. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 210.190 jiwa meningkat menjadi 244.875 jiwa Tahun 2020 atau jumlah penduduk naik sebesar 16,50 persen selama 2010-2020 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk periode tersebut tahun sebesar 1,65 persen. Data proyeksi BPS Kabupaten Poso menunjukkan pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 sebesar 2,15 persen; Tahun 2017-2018 tumbuh sebesar 2,37 persen; dan Tahun 2019 tumbuh sebesar 1,82 persen. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Poso Tahun 2010-2020 menurut kecamatan terdapat pada Tabel 2.14 sebagai berikut.

**Tabel 2.14  
Tren Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Kabupaten Poso, Tahun 2010-2020**

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun	
	2010	2020	2000-2010	2010-2020
Pamona Selatan	18.457	20.977	99,13	13,65
Pamona Barat	9.386	10.214	99,11	8,82
Pamona Tenggara	6.516	7.888	99,14	21,06
Pamona Utara	12.274	6.774	99,12	(44,81)
Pamona Pusalemba	18.057	3.188	99,13	(82,34)
Pamona Timur	9.574	19.357	99,13	102,18
Lore Selatan	5.657	12.271	99,12	116,92
Lore Barat	2.834	14.628	99,16	416,16
Lore Utara	11.956	15.659	99,13	30,97
Lore Tengah	4.051	4.971	99,07	22,71
Lore Timur	4.899	6.690	99,15	36,56
Lore Peore	2.957	4.015	99,13	35,78
Poso Pesisir	20.192	22.285	99,13	10,37
Poso Pesisir Selatan	8.882	9.910	99,10	11,57
Poso Pesisir Utara	15.753	17.427	99,13	10,63
Poso Kota	20.344	21.144	99,12	3,93
Poso Kota Selatan	9.035	24.145	99,14	167,24
Poso Kota Utara	11.109	12.930	99,12	16,39
Lage	18.257	10.402	99,12	(43,02)
Poso	210.190	244.875	99,125	16,50

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, 2021



Mengutip data pada tabel di atas, terlihat Kecamatan Lore Barat memiliki tren pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 416,16 persen periode 2010-2020, dan pertumbuhan penduduk terendah bahkan minus di Kecamatan Pamona Pusalemba dengan pertumbuhan sebesar (82,34) persen. Hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Poso sebanyak 244,88 ribu (statistik daerah Provinsi Sulawesi Tengah) atau sebesar 8,20 persen dari penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Poso dengan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Poso**  
**Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangkep	116,01	116,81	117,63	118,40	120,14
Banggai	360,02	365,62	371,32	376,81	362,28
Morowali	115,20	117,33	119,29	121,30	161,73
Poso	240,81	245,99	251,18	256,39	244,88
Donggala	296,38	299,17	301,59	304,11	300,44
Toli-Toli	228,50	231,00	233,40	235,80	225,15
Buol	152,30	155,59	158,79	162,18	145,25
Parigi Moutong	465,88	474,34	482,79	490,92	440,02
Tojo Una-una	149,21	150,82	152,47	153,99	163,83
Sigi	232,17	234,59	237,01	239,42	257,59
Banggai Laut	70,89	72,30	73,69	75,00	70,44
Morowali Utara	120,32	122,99	125,62	128,32	120,79
Palu	374,02	379,78	385,61	391,38	373,22
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.921</b>	<b>2.966</b>	<b>3.010</b>	<b>3.054</b>	<b>2.986</b>

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, hasil sensus penduduk terbaru menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.986 (000) jiwa. Dimana, Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 440,02 jiwa; Kota Palu sebanyak 373,22 ribu jiwa; Kabupaten Banggai sebanyak 362,28 ribu jiwa; Kabupaten Donggala sebanyak 300,44 ribu jiwa, Kabupaten Sigi sebanyak 257,59 ribu jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 70,44 ribu jiwa.



## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat membutuhkan berbagai jenis data indikator aspek kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui kinerja capai pembangunan ekonomi melalui pengukuran indikator makro ekonomi daerah, terdiri dari beberapa komponen antara lain: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB menurut sektor, PDRB perkapita dan tingkat inflasi.

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah menjadi tujuan penting untuk dicapai daerah, melalui indikator-indikator makro tersebut dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan yang sudah dicapai dari berbagai target yang ditetapkan.

#### **A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor PDRB**

Laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan alat ukur pertumbuhan output yang dihasilkan dalam suatu daerah pada periode tertentu. Hasil Perhitungan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Poso, dimana 2 (dua) tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 6%. Pertumbuhan cukup tinggi tersebut berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi; Sektor Pertambangan dan Pengalihan; dan Sektor Jasa Kesehatan dan Sosial.

Berdasarkan laju pertumbuhan ADHK 2010 dimana pada Tahun 2019 terjadi pertumbuhan sebesar 6,20 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,16 persen. Dimana, pertumbuhan tertinggi dicapai dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,35 persen. Pemicunya berasal dari adanya perusahaan penghasil sumber energi listrik di wilayah Kabupaten Poso. Dari sebanyak 17 lapangan usaha ekonomi tersebut, dimana seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Terdapat 11 (sebelas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-10 persen. Sedangkan, 5 (lima) lapangan usaha lainnya juga tumbuh positif (kurang dari 5 persen). Lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif yakni, Pertambangan dan Pengalihan 8,75 persen; Industri Pengolahan 5,94 persen; Konstruksi 8,25 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 6,37 persen; Transportasi dan Pergudangan 8,50%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,06 persen; Informasi dan Komunikasi 8,90 persen; Jasa Keuangan dan



Asuransi 5,90 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,83 persen; Jasa Pendidikan 5,85 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,73 persen.

Pada tahun 2020 yang merupakan tahun pandemic Covid-19, sangat berdampak pada perekonomian Global, nasional dan juga Kabupaten Poso. Ditahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tumbuh minus 3,89%. Sebanyak 11 sektor yang tumbuh minus ditahun 2020 yakni Pertambangan dan Penggalian (-19,36%), Transportasi dan Pergudangan (-31,23), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-10,93%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-0,97), Industri Pengolahan (-1,08%), Konstruksi (-11,35), Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-6,9%), Jasa Perusahaan (-0,09%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1,6%), dan sektor jasa pendidikan (-2,15%).

Sebaliknya beberapa sektor yang tetap tumbuh positif ditahun pandemic covid-19 diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas (6,38%), Informasi dan Komunikasi 7,92%, Jasa Keuangan dan Asuransi 2,77%, Real Estate 0,24%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,86 dan Jasa Lainnya 0,90%.

Data persentase laju pertumbuhan PDRB-ADHK 2010 Kabupaten Poso menurut Lapangan Usaha kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

**Tabel 2.16**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,33	5,27	5,07	4,58	-0,97
2	Pertambangan dan Penggalian	9,24	8,17	5,41	8,75	-19,36
3	Industri Pengolahan	5,92	5,77	6,54	5,94	-1,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,92	13,18	13,22	10,35	6,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,71	6,28	6,87	4,93	-3,78
6	Konstruksi	5,92	8,58	7,76	8,25	-11,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	4,34	6,74	6,37	-6,9
8	Transportasi dan Pergudangan	6,83	6,41	8,16	8,50	-31,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	7,65	7,52	8,09	-10,93
10	Informasi dan Komunikasi	9,22	8,77	7,51	8,90	7,92





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,37	6,01	4,98	5,90	2,77
12	Real Estate	4,39	3,52	3,86	3,84	0,24
13	Jasa Perusahaan	4,84	4,66	4,46	4,27	-0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,59	9,04	7,82	7,83	-1,6
15	Jasa Pendidikan	5,97	5,92	5,45	5,85	-2,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,89	7,15	6,78	8,73	5,86
17	Jasa Lainnya	8,63	5,70	6,81	4,89	0,90
	<b>PDRB</b>	<b>6,29</b>	<b>6,10</b>	<b>6,16</b>	<b>6,20</b>	<b>-3,89</b>

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, 2021

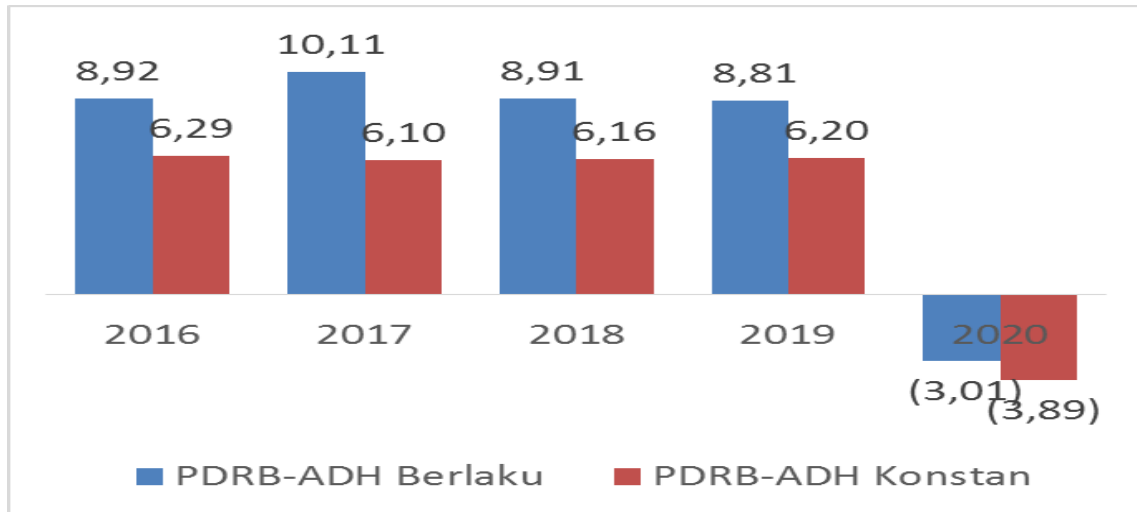
Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat diketahui lebih lanjut tentang laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Kabupaten Poso, ditahun pandemic Covid-19 tersebut ekonomi Kabupaten Poso tumbuh minus 3,89%, jauh dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 6,20 persen, dan tahun 2018 mencapai sebesar 6,16 persen.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Menurut PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso cenderung berfluktuatif. Dimana, pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso sebesar 7,12 persen meningkat Tahun 2016 menjadi sebesar 6,29 persen, dan menurun Tahun 2017 menjadi sebesar 6,10 persen. Selanjutnya, Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 6,10 persen, dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 6,20 persen. Dan pada tahun 2020 tumbuh minus 3,89%.

Sedangkan, pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2015 sebesar 11,06 persen, Tahun 2016 menurun menjadi 8,92 persen. Kemudian Tahun 2017 meningkat sebesar 1,19 persen menjadi sebesar 10,11 persen. Namun, Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 8,91 persen, dan Tahun 2019 turun kembali menjadi sebesar 8,81 persen. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi menurut PDRB ADH Konstan 2010 di tahun Pandemi Covid-19 juga tumbuh minus sebesar (-3,01%). Data persentase persentase Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 periode Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut.



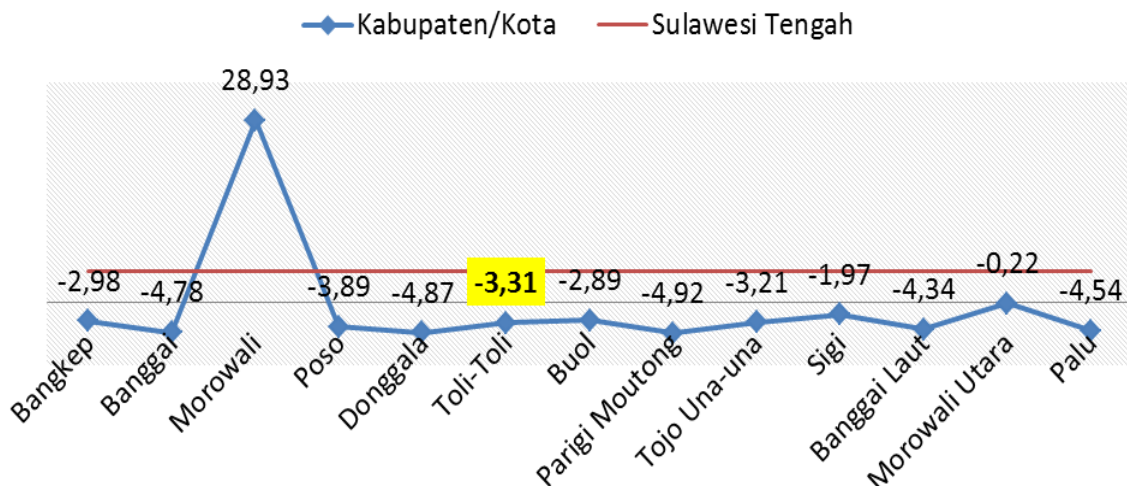
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, 2021

**Gambar 2.8**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku dan PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso (Persen) Tahun 2016-2021**

Selanjutnya gambaran perbandingan atau peringkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso dibanding kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.9**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2020**



Berdasarkan data pada gambar di atas, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sulawesi Tengah ditahun 2020 salah satu yang tumbuh positif di Indonesia. Pada tahun Covid-19 ekonomi Sulawesi Tengah meskipun tumbuh positif, namun menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,86%. Diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah hanya Kabupaten Morowali yang tetap tumbuh positif dan tumbuh sangat tinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 28,93 persen. Sedangkan 12 Kabupaten/kota lainnya tumbuh minus.

- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kemajuan perekonomian Kabupaten Poso dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Poso dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah (*value added*) yang mampu diciptakan akibat terjadinya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/ regional. Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam, dan memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Poso, saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK 2010, serta terciptanya laju pertumbuhan PDRB yang positif.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diukur dari laju pertumbuhan PDRB. Gambaran perekonomian Kabupaten Poso ditinjau dari PDRB ADHB selama 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat. Pada Tahun 2016 menjadi Rp7.285,05 (Miliar). Selanjutnya, Tahun 2017 menjadi sebesar Rp8.021,44 (Miliar); Tahun 2018 menjadi Rp8.735,84 (Miliar); dan Tahun 2019 sebesar Rp9.505,74 (Miliar). Dan pada tahun 2020 Jumlah PDRB ADH Berlaku Kabupaten Poso tahun 2020 menurun akibat Pandemi Covid-19 yakni sebesar Rp9.219,87 (Miliar). Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Poso dalam 5 tahun terakhir sebesar 7,32 persen. Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Poso dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut.



**Tabel 2.17**  
**Jumlah PDRB-ADH Berlaku Kabupaten Poso**  
**Menurut Lapangan Usaha 2016-2020**

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.890,23	3.165,50	3.390,56	3.644,20	3.589,36
B.	Pertambangan dan Penggalian	130,88	146,96	157,60	171,59	144,07
C.	Industri Pengolahan	111,21	122,36	134,55	145,95	148,43
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,52	2,00	2,28	2,53	2,70
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,73	6,24	6,79	7,23	7,43
F.	Konstruksi	810,25	906,73	985,88	1.077,45	1.060,77
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	877,98	949,14	1.062,33	1.155,15	1.090,41
H.	Transportasi dan Pergudangan	340,49	376,09	423,44	474,05	322,36
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	45,34	50,03	56,44	63,85	56,84
J.	Informasi dan Komunikasi	329,27	360,50	393,99	439,42	466,39
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	207,40	227,21	254,65	283,43	266,43
L.	Real Estat	199,36	219,83	236,37	254,33	250,01
M.	Jasa Perusahaan	2,44	2,64	2,84	2,97	3,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626,89	709,98	776,27	856,77	868,52
P.	Jasa Pendidikan	486,38	533,40	578,63	618,98	623,93
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,88	138,36	153,68	179,66	188,64
R.	Jasa lainnya	93,80	104,47	119,53	128,17	130,58
<b>PDRB</b>		<b>7.285,05</b>	<b>8.021,44</b>	<b>8.735,84</b>	<b>9.505,74</b>	<b>9.219,87</b>

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021

Gambaran pada Tabel 2.17 di atas, menunjukkan kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir dalam perhitungan PDRB ADHB Kabupaten Poso didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Poso yaitu Sektor Pertanian, Sektor perdagangan, dan Sektor konstruksi. Sektor Pertanian menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Poso dengan kontribusi yang terbesar dari tahun ke tahun. Sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan ke-dua, peranannya juga terus mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sektor unggulan ke-tiga yaitu Sektor konstruksi dan Sektor Administrasi. Sebaliknya, sektor dengan kontribusi terendah yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Sektor





Jasa Perusahaan serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sedangkan PDRB ADHK 2010 dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp5.413,90 (Miliar). Selanjutnya, pada Tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp5.744,15 (Miliar). Pada Tahun 2018 sebesar Rp6.098,00 (Miliar), dan Tahun 2019 juga meningkat menjadi sebesar Rp6.475,83 (Miliar). Dan Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi Rp6.224,31 (Miliar). Rata-rata peningkatan nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 223.620,84 (Miliar) atau sebesar 4,66 persen. Data jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.18 sebagai berikut.

**Tabel 2.18**  
**Jumlah PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Poso**  
**Menurut Lapangan Usaha 2016-2020**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.136,81	2.242,91	2.356,63	2.464,52	2.429,75
B.	Pertambangan dan Penggalian	85,04	91,99	96,96	105,44	86,64
C.	Industri Pengolahan	78,82	83,34	88,79	94,06	91,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,81	2,05	2,32	2,56	2,73
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,57	4,85	5,19	5,44	5,02
F.	Konstruksi	541,80	580,85	625,89	677,51	643,19
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	678,55	718,00	766,38	815,24	737,10
H.	Transportasi dan Pergudangan	238,91	253,73	274,43	297,77	195,73
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,82	39,64	42,62	46,06	37,47
J.	Informasi dan Komunikasi	284,29	309,21	332,42	362,01	423,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	135,69	143,85	151,02	159,93	161,33
L.	Real Estat	159,84	165,46	171,85	178,45	171,86
M.	Jasa Perusahaan	1,85	1,94	2,03	2,11	2,11
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	484,70	528,52	569,84	614,46	599,72
P.	Jasa Pendidikan	381,58	404,18	426,20	451,11	441,40
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105,97	113,55	121,24	131,82	127,38
R.	Jasa lainnya	56,85	60,09	64,18	67,32	67,92
<b>PDRB</b>		<b>5.413,90</b>	<b>5.744,15</b>	<b>6.098,00</b>	<b>6.475,83</b>	<b>6.224,31</b>

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021



Selama kurun waktu 2015-2019, terdapat tiga sektor yaitu, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, dan Sektor Konstruksi yang menjadi sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Poso dengan andil sebesar 62,27 persen. Ketiga sektor tersebut dari tahun ke tahun memberikan kontribusi terbesar dalam dalam pembentukan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso. Dimana, Sektor Pertanian Tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 38,93 persen, selanjutnya Sektor Perdagangan sebesar 11,83 persen, dan Sektor Konstruksi dengan nilai kontribusi sebesar 11,51 persen.

**- Kontribusi Sektor PDRB**

Perkembangan berbagai sektor ekonomi untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif pada setiap sektor. Ditahun pandemic Covid 2020 beberapa sektor mengalami kontraksi yang cukup besar dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso. Berdasarkan peranan harga berlaku menunjukkan bahwa Sektor Pertanian merupakan sektor dominan dalam perkembangan perekonomian Poso. Distribusi persentase PDRB ADHB memperlihatkan sektor-sektor dominan atau berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Poso dalam pembentukan PDRB ADH Berlaku sebagai berikut.

**Tabel 2.19**  
**Kontribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,67	39,46	38,81	38,34	38,93
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,80	1,83	1,80	1,81	1,56
C.	Industri Pengolahan	1,53	1,53	1,54	1,54	1,61
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F.	Konstruksi	11,12	11,30	11,29	11,33	11,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,05	11,83	12,16	12,15	11,83
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,67	4,69	4,85	4,99	3,5
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,65	0,67	0,62
J.	Informasi dan Komunikasi	4,52	4,49	4,51	4,62	5,06
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	2,83	2,92	2,98	2,89
L.	Real Estat	2,74	2,74	2,71	2,68	2,71
M.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	8,61	8,85	8,89	9,01	9,42



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan Jaminan Sosial Wajib					
P.	Jasa Pendidikan	6,68	6,65	6,62	6,51	6,77
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,73	1,72	1,76	1,89	2,05
R	Jasa lainnya	1,29	1,30	1,37	1,35	1,42
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021

Merujuk pada Tabel 2.19 di atas, menjelaskan capaian Persentase PDRB ADHB Kabupaten Poso menurut Lapangan Usaha, pada periode Tahun 2016-2020 terdapat tiga sektor yang sangat dominan terhadap pembentukan total PDRB yaitu pada Tahun 2020, Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 38,93 persen; Sektor Perdagangan sebesar 11,83 persen; dan Sektor Konstruksi sebesar 11,51 persen. Sementara sektor-sektor yang mempunyai kontribusi dibawah satu persen dari satu persen adalah Sektor Listrik dan Gas sebesar 0,03 persen; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah sebesar 0.08 persen; Sektor Penyedia Akomodasi sebesar 0,62 persen; dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,03 persen. Untuk sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang terus meningkat, dan sebagai penyumbang terbesar ke-empat pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Poso tercatat sebesar 9,42 persen.

Data kontribusi sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Poso dimana sektor-sektor yang tetap memberikan angka sama dari tahun sebelumnya, atau tidak mengalami perkembangan atau kenaikan, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya antara lain; Sektor Pertanian dimana Tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 39,67 persen; menurun setiap tahun. Bahkan, kontribusi Sektor pertanian Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 38,81 persen; dan Tahun 2019 turun menjadi sebesar 38,34 persen, namun di Tahun 2020 Kontribusi Sektor Pertanian sedikit mengalami peningkatan menjadi 38,93 persen. Sektor Pertanian memiliki nominal yang tinggi, namun setiap tahun mengalami penurunan dalam kontribusinya, tetapi ditahun 2020 yang merupakan tahun Pandemi Covid-19 justru sedikit mengalami peningkatan, hal ini lebih dikarenakan Karen sektor lainnya sangat terdampak negatif.

Penurunan kontribusi sektor ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Kabupaten Poso, oleh karena Sektor Pertanian adalah sektor dengan tenaga kerja yang terbanyak dan mata pencaharian utama penduduk. Sementara itu, sektor-sektor dengan kontribusi yang sama



dengan tahun sebelumnya yaitu; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, dan Sektor Jasa Perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa sektor yang meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya masih rendah yakni: Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Sektor Real Estat.

Selanjutnya untuk data Perkembangan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso dapat dilihat pada Tabel 2.20 sebagai berikut.

**Tabel 2.20**  
**Kontribusi PDRB-ADH Konstan Kabupaten Poso**  
**Menurut Lapangan Usaha 2016-2021**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,47	39,05	38,65	38,06	39,04
B.	Pertambangan dan Pengecilan	1,57	1,60	1,59	1,63	1,39
C.	Industri Pengolahan	1,46	1,45	1,46	1,45	1,48
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
F.	Konstruksi	10,01	10,11	10,26	10,46	10,33
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,53	12,50	12,57	12,59	11,84
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,41	4,42	4,50	4,60	3,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,69	0,70	0,71	0,60
J.	Informasi dan Komunikasi	5,25	5,38	5,45	5,59	6,80
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,50	2,48	2,47	2,59
L.	Real Estat	2,95	2,88	2,82	2,76	2,76
M.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,95	9,20	9,34	9,49	9,64
P.	Jasa Pendidikan	7,05	7,04	6,99	6,97	7,09
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	1,98	1,99	2,04	2,05
R.	Jasa lainnya	1,05	1,05	1,05	1,04	1,09
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021

Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso Tahun 2020 menurut lapangan usaha terdapat 4 (empat) sektor yang sangat dominan yaitu Sektor Pertanian sebesar 39,04 persen; Sektor Perdagangan sebesar 11,84 persen; Sektor Konstruksi sebesar 10,33 persen; dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan





Sosial Wajib sebesar 9,64 persen. Sementara sektor-sektor yang mempunyai kontribusi lebih kecil dari satu persen adalah Sektor Listrik dan Gas sebesar 0,04 persen; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah sebesar 0,08 persen; Sektor Penyedia Akomodasi sebesar 0,60 persen, serta sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,03 persen.

Beberapa sektor yang memiliki kontribusi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya seperti sektor pertanian, industri Pengolahan, Jasa keuangan dan asuransi serta sektor real estate. Sebaliknya sektor yang kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya diantaranya Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Administrasi Pemerintahan, serta Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

• **Kondisi Makro Ekonomi Dari Sisi Permintaan**

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, tahun 2019 dan 2020 didapatkan hasil bahwa rata-rata pengeluaran makanan untuk kelas pengeluaran untuk makanan pada tahun 2019 yakni Rp560.255 dan Rp583.529 pada tahun 2020. Sedangkan untuk pengeluaran Non Makanan pada tahun 2019 sebesar Rp528.959 dan pada tahun 2020 sebesar Rp614.537. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada keuda tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**

**Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Poso, Tahun 2019-2020**

Kelompok Makanan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Padi-Padian	78.501	14,01	77.082	13,21
Umbi-Umbian	3.760	0,67	4.179	0,72
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	52.074	9,29	58.555	10,03
Daging	16.165	2,89	22.264	3,82
Telur dan Susu	25.587	4,57	30.476	5,22
Sayur-Sayuran	40.830	7,29	45.400	7,78
Kacang-Kacangan	8.804	1,57	9.416	1,61
Buah-Buahan	45.180	8,06	41.705	7,15
Minyak dan Kelapa	13.324	2,38	13.954	2,39



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kelompok Makanan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Bahan Minuman	18.776	3,35	20.816	3,57
Bumbu-Bumbuan	13.274	2,37	13.715	2,35
Konsumsi/ Lainnya	7.169	1,28	8.414	1,44
Makanan dan Minuman Jadi	161.198	28,77	159.397	27,32
Rokok	75.613	13,50	78.156	13,39
<b>Jumlah</b>	<b>560.255</b>	<b>100</b>	<b>583.529</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, 2021

Rata-rata Pengeluaran per Kapita untuk Konsumsi makanan menurut kelompok makanan di Kabupaten Poso ditahun 2020 adalah sebesar Rp**583.529** dan non-makanan sebesar Rp**634.141**. Konsumsi terbesar masyarakat Kabupaten Poso pada Tahun 2020 pada kelompok Makanan dan Minuman yakni mencapai sebesar 27,32 persen; padi-padian sebesar 13,21 persen; dan Rokok sebesar 13,39 persen. Masyarakat Kabupaten Poso yang konsumsi rokok tergolong masih tinggi, perlu mendapatkan perhatian dan fokus Dinas Kesehatan. Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rokok dapat dikurangi dan ditekan. Selanjutnya, untuk rata-rata pengeluaran kelompok Non-Makanan mayoritas pada kelompok perumahan dan fasilitas Rumah Tangga sebesar 49,42 persen; untuk aneka barang dan jasa sebesar 20,62 persen; dan barang yang tahan lama sebesar 13,80 persen. Secara lengkap data rata-rata pengeluaran dan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan terdapat pada Tabel 2.22 sebagai berikut.

**Tabel 2.22**

**Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran  
Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di  
Kabupaten Poso, Tahun 2019-2020**

Kelompok Bukan Makanan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Perumahan dan Fasilitas RT	263.580	49,83	303.733	49,42
Aneka Barang dan	100.213	18,95	126.706	20,62



Kelompok Bukan Makanan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Rata-rata Pengeluaran
Jasa				
Pakaian, Alas Kaki dan Tutp Kepala	31.719	6,00	34.304	5,58
Barang Yang Tahan Lama	66.331	12,54	84.778	13,80
Pajak, Pungutan dan Asuransi	35.091	6,63	46.380	7,55
Keperluan Pesta dan Upacara	32.025	6,05	18.636	3,03
<b>Jumlah</b>	<b>528.959</b>	<b>100</b>	<b>614.537</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, 2021

## **B. PDRB Per Kapita**

Indikator menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk (*people welfare*) di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita. Dimana, PDRB Per Kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk setempat. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2017, PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp32,69 juta; Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp34,78 juta; dan Tahun 2019 naik meningkat menjadi sebesar Rp37,06 juta. Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB Tahun 2019 sebesar 4,09 persen; dan 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 4,05 persen. Selanjutnya ditahun 2020 PDRB Perkapita baik ADH Berlaku dan Konstan 2010 sedikit mengalami perlambatan dimana untuk PDRB ADH Berlaku sebesar 37,65 Juta. Pertumbuhan PDRB Perkapita ditahun 2020 PDRB Perkapita ADHB sebesar 1,58 persen.

Sedangkan untuk PDRB Perkapita ADHK 2010 nilainya meningkat setiap tahun. Peningkatan terjadi cukup tinggi, dimana pertumbuhan pada Tahun 2019 sebesar 6,58 persen; dan dalam kurun 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh mencapai 7,25 persen. Nilai PDRB Perkapita ADHK 2010 pada Tahun 2015 sebesar Rp21,68 juta; dan Tahun 2019 meningkat mencapai sebesar Rp25,26 juta. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat meskipun di Tahun Pandemi Covid-19 sebesar 25,42 Juta. Data perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK 2010



Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel 2.23 sebagai berikut.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

<b>Tahun/ Year</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Nilai PDRB/ GRDP (Miliar Rupiah/ Billion rupiahs)</b>					
-ADHB	7.285	8.021	8.735	9.503	9.219,87
-ADHK 2010	5.414	5.744	6.098	6.476	6.224,31
<b>PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/ Thousand rupiahs)</b>					
-ADHB	30,25	32,69	34,78	37,06	37,65
-ADHK 2010	22,48	23,41	24,27	25,26	25,42
-Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB	3,71	4,12	3,67	4,09	1,58
-Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	6,55	8,05	6,39	6,58	0,63
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>240.812</b>	<b>245.993</b>	<b>251.185</b>	<b>256.393</b>	<b>244.875</b>

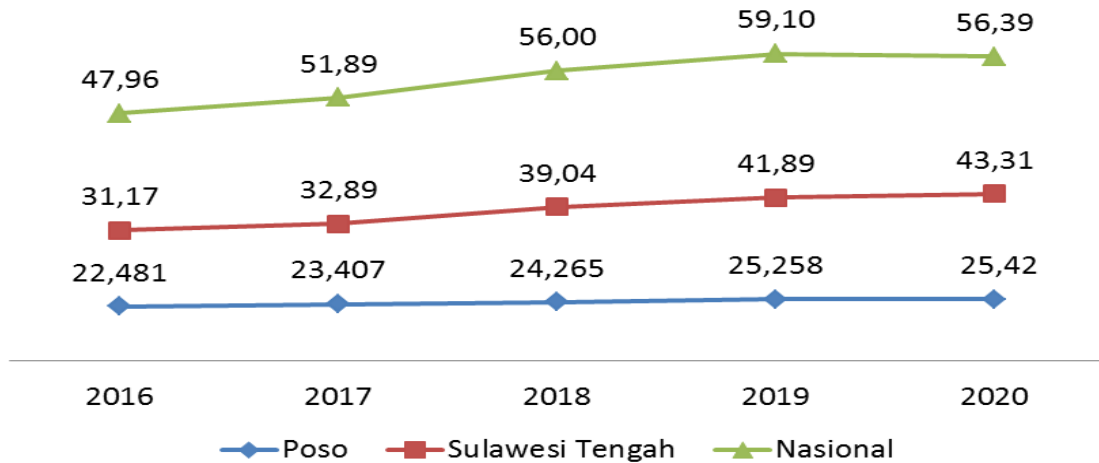
Sumber : Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data yang terlihat pada gambar 2.10 di bawah, PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Poso dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Ditahun 2016 PDRB Perkapita Kabupaten Poso sebesar Rp22,48 Juta, jauh dibawah rata-rata Nasional sebesar Rp47,96 Juta dan juga dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp31,17 Juta. Selanjutnya hingga tahun 2020 PDRB Kabupaten Poso terus meningkat meskipun ditahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, sedangkan PDRB Perkapita Nasional mengalami sedikit penurunan menjadi Rp56,39 Juta, dan Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat menjadi Rp43,31 Juta. Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Poso ditahun 2020 tersebut, masih dibawah rata-rata Nasionaal maupun rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini.





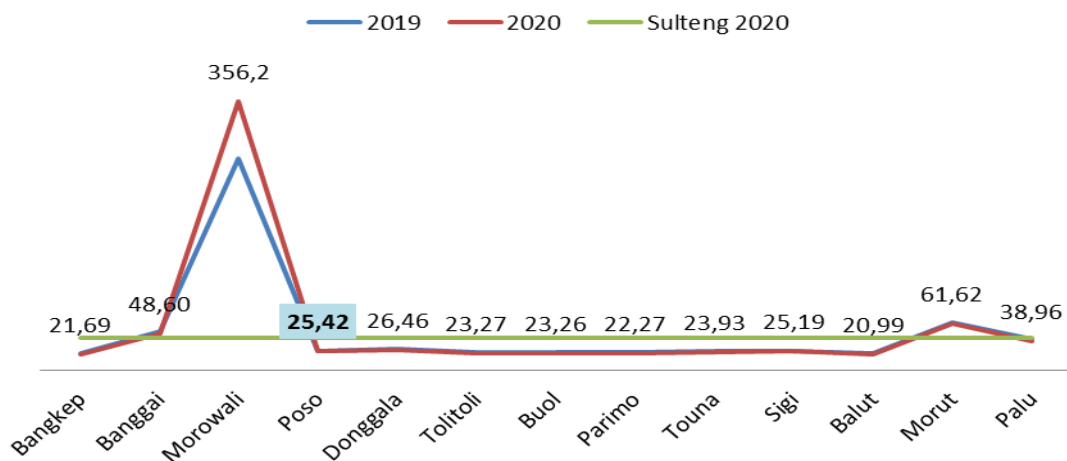
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026



Sumber: BPS, Tahun 2021

**Gambar 2.10**  
**PDRB Per kapita Kabupaten Poso dan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2016-2020**  
**(Juta Rupiah)**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka PDRB Perkapita kabupaten Poso masih berada pada urutan ke-8, masih di bawah Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menjadi Kabupaten dengan PDRB Per Kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara lengkap terdapat pada Gambar 2.11 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

**Gambar 2.11**  
**PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah)**



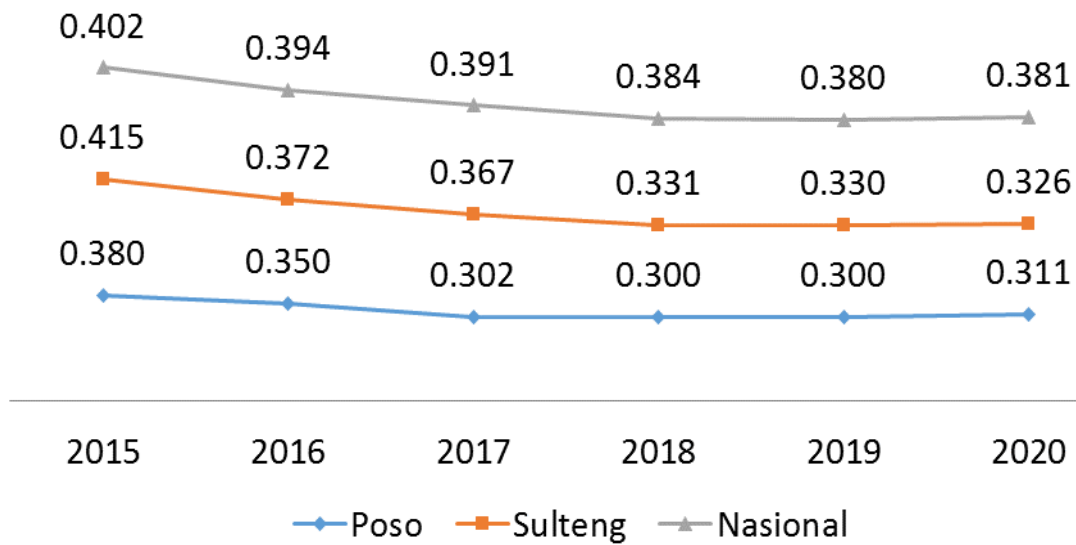
### C. Indeks Gini

Indikator yang umumnya digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio Gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Nilai rasio Gini berkisar antara nol dan satu. Rasio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata, karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna. Namun, bila rasio gini sama dengan satu, menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna, karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Sementara itu, kriteria bank dunia mendasarkan pengukuran atau penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh sebesar 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: a). **Tinggi**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b). **Sedang**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c). **Rendah**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan.

Sedangkan kriteria pengukuran menggunakan rasio Gini, jika rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna; tetapi jika rasio Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima: Ketimpangan "**rendah**" bila indeks Gini kurang dari 0,35; Ketimpangan "**sedang**" bila indeks Gini antara 0,35-0,5; dan Ketimpangan "**tinggi**" bila indeks Gini di atas 0,5.

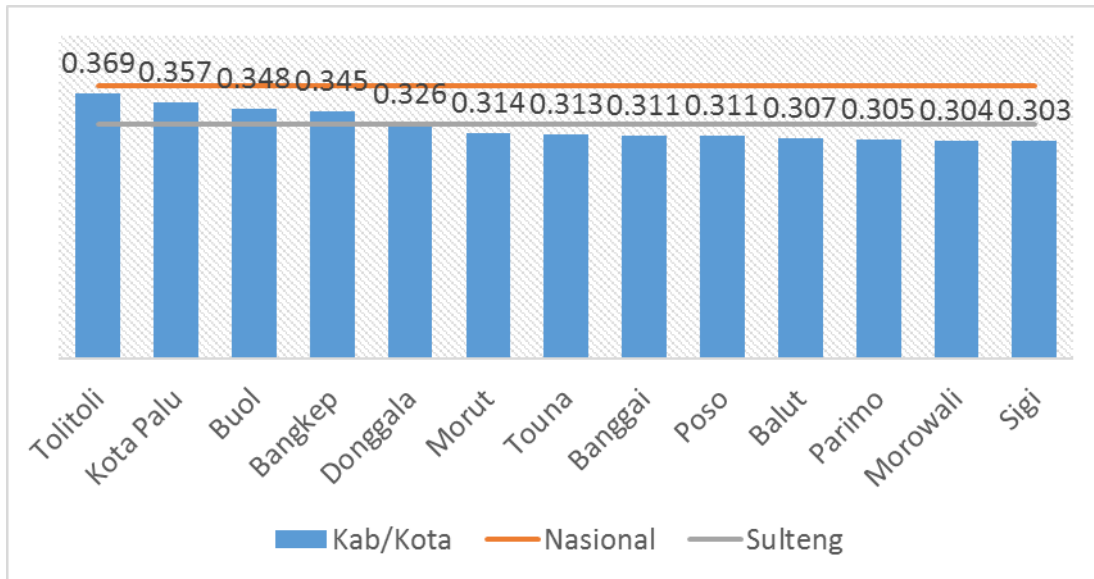
Badan Pusat Statistik (BPS) merujuk pada patokan kriteria Oshima, dimana indeks Gini terjadi: Ketimpangan "**rendah**" bila indeks Gini < 0,35; Ketimpangan "**sedang**" bila indeks Gini antara 0,35-0,50; dan Ketimpangan "**tinggi**" bila indeks Gini > 0,5. Data indeks Gini Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.12 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Tahun 2021

**Gambar 2.12**  
**Rasio Gini Kabupaten Kabupaten Poso**  
**Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2015-2020**

Mengutip data pada Gambar 2.12 di atas terlihat, indeks Gini Kabupaten Poso pada periode Tahun 2015-2020 relatif menurun, dimana Tahun 2020 sebesar 0,311, lebih baik dari rata-rata Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif menengah, karena indeks Gini Kabupaten Poso di berada dalam kriteria ketimpangan sedang (0,3-0,40). Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah indeks Gini sebesar 0,326 pada tahun yang sama, sedangkan rata-rata nasional sebesar 0,381. Rasio Gini Kabupaten Poso jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah rasio Gini terendah. Data lengkap perbandingan rasio Gini Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.13 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Tahun 2021

**Gambar 2.13**  
**Rasio Gini Kabupaten/Kota**  
**Di Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Berdasarkan Gambar 2.13 di atas, Pada Tahun 2020 dimana Kabupaten Poso adalah kabupaten dengan rasio Gini peringkat, sedangkan Kabupaten dengan rasio Gini tertinggi adalah Kabupaten Tolitoli sebesar 0,38. Dimana, rata-rata rasio Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,369.

#### **D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

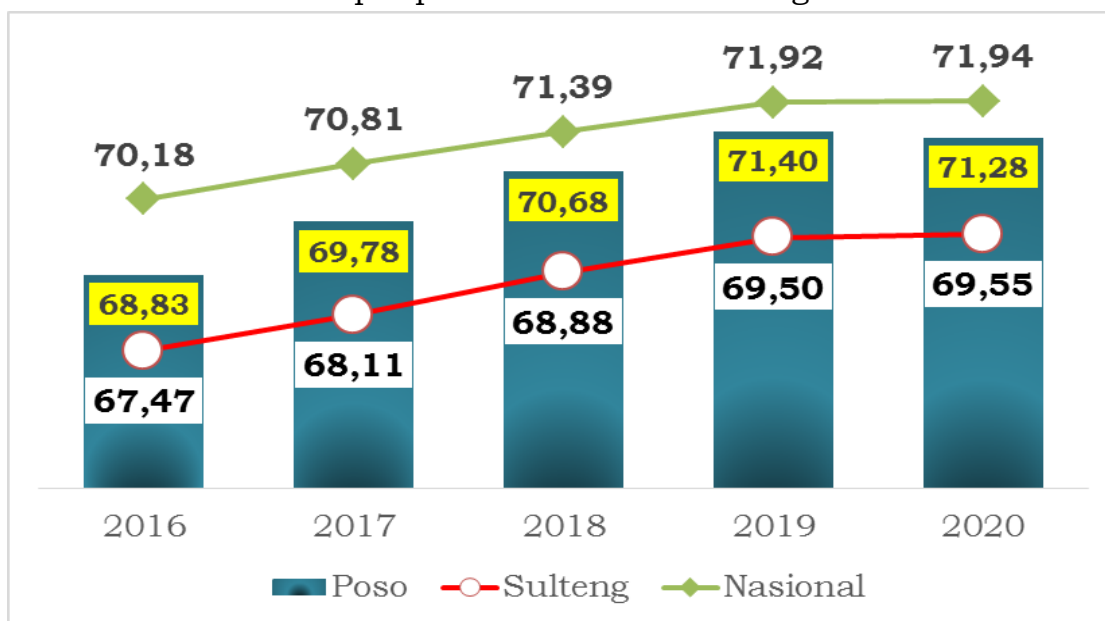
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25



tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ke-tiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM Kabupaten Poso sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Sementara capaian IPM tahun 2020 dengan model perhitungan baru Kabupaten Poso berada pada urutan 3 dari 13 Kabupaten/Kota dengan nilai IPM sebesar 71,28. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu; kesehatan, pendidikan dan daya beli. Data perbandingan IPM Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional selama periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.14 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.14**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso**  
**Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2016–2020**

Merujuk Gambar 2.14 di atas terlihat, capaian IPM Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan berada di atas



IPM Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih berada di bawah IPM secara Nasional. Pada Tahun 2016, IPM Kabupaten Poso sebesar 68,83; IPM Sulawesi Tengah sebesar 67,47; dan IPM secara nasional sebesar 69,55. Pada Tahun 2017, IPM Kabupaten Poso meningkat menjadi sebesar 69,78 lebih tinggi dari IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 68,11. Selanjutnya Tahun 2019, IPM Kabupaten Poso naik menjadi sebesar 71,40, dan berada di atas IPM Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih terus berada di bawah IPM secara Nasional. Ditahun 2020 IPM Kabupaten Poso mengalami sedikit penurunan menjadi 71,28 poin. Kondisi dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19, juga berada di atas IPM Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih terus berada di bawah IPM secara Nasional Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah posisi Kabupaten Poso, secara lebih jelas capaian IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 2.24 sebagai berikut.

**Tabel 2.24**  
**Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Banggai Kepulauan	63,45	63,45	64,68	65,13	65,42
Banggai	68,17	68,17	69,85	70,36	70,52
Morowali	69,69	69,69	71,14	72,02	72,21
Poso	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28
Donggala	64,42	64,42	65,14	65,49	65,56
Toli-Toli	63,27	63,27	64,60	65,42	65,69
Buol	66,37	66,37	67,30	67,69	67,82
Parigi Moutong	63,60	63,60	64,85	65,47	65,44
Tojo Una-Una	62,27	62,27	63,38	64,52	64,59
Sigi	65,95	65,95	67,66	68,16	68,12
Banggai Laut	63,49	63,49	64,80	65,27	65,43
Morowali Utara	66,57	66,57	67,95	68,45	68,36
Kota Palu	79,73	79,73	80,91	81,50	81,47

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Kondisi IPM Sulawesi Tengah tahun 2020 sebesar 69,55 poin yang masih dibawah rata-rata nasional sebesar 71,94 peringkat ke 26 dari 33 Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2020 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar Provinsi se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Sulawesi Tengah menempati urutan ke 4(empat) setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.



Dalam konteks Sulawesi Tengah, angka IPM Kabupaten dan kota dengan metode perhitungan baru ternyata, hanya Kota Palu yang masuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). Untuk daerah Kabupaten/kota, Tahun 2020 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Kota Palu tercatat memiliki IPM tertinggi yang mencapai 81,47 pada tahun 2020; diikuti Kabupaten Morowali sebesar 72,21; dan secara berturut-turut adalah Kabupaten Poso sebesar 71,28; Kabupaten Banggai sebesar 70,52; Kabupaten Morowali Utara sebesar 68,36; Kabupaten Buol sebesar 67,82; Kabupaten Sigi sebesar 68,12; Kabupaten Donggala sebesar 65,56; Kabupaten Parigi Moutong sebesar 65,44; Kabupaten Toli-Toli sebesar 65,69; Kabupaten Banggai Laut sebesar 65,43; Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 65,42; dan Kabupaten Tojo Una-una sebesar 64,59.

Berdasarkan kondisi tersebut, posisi Kabupaten Poso berada pada urutan ke-3 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan IPM sebesar 71,94. Capaian IPM ini masih harus terus didorong dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso di masa mendatang, dan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terutama berfokus pada aspek-aspek-aspek pembentuk IPM yakni ekonomi (daya beli), Pendidikan dan Kesehatan.

#### **E. Persentase Kemiskinan**

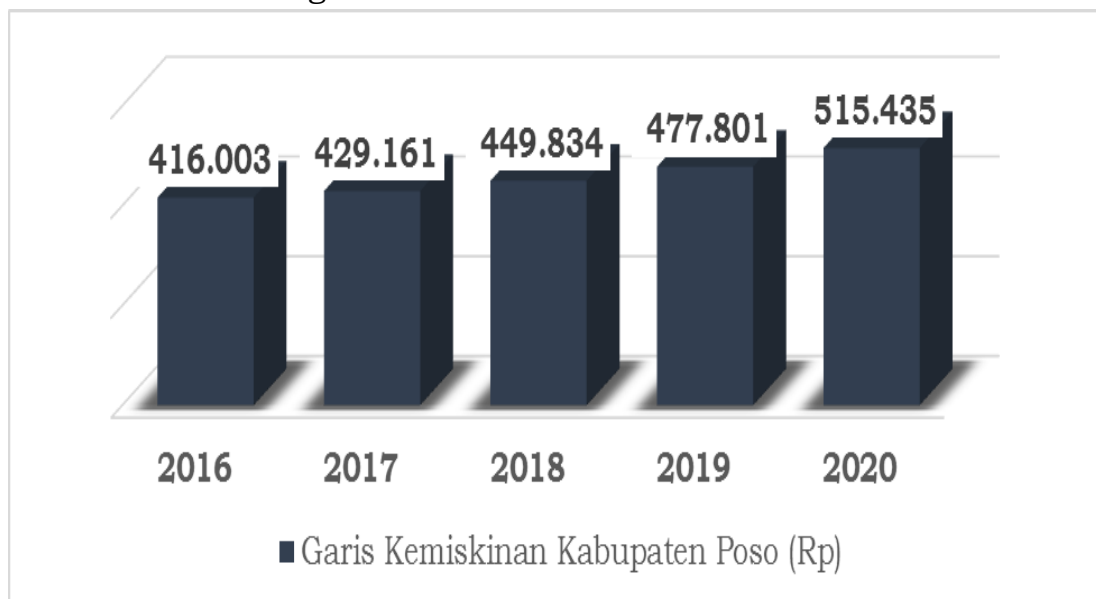
Untuk mengukur kemiskinan, pendekatan yang digunakan yakni konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi (pengukuran moneter) untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

##### **▪ Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili 52 jenis komoditas (seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum

untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili 51 jenis komoditas di daerah perkotaan dan 47 jenis komoditas di daerah perdesaan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Poso setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Poso periode tahun 2016-2020 sebesar 6,41 persen. Dimana pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Poso sebesar Rp416.003, tahun 2017 sebesar Rp429.161 dan pada Tahun 2019, garis kemiskinan mencapai sebesar Rp477.801. Kemudian ditahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Poso sebesar Rp515.435 atau meningkat sebesar Rp37.634. tagliner pembangunan pemerintah Kabupaten Poso periode tersebut menjadikan penanganan kemiskinan sebagai prioritas daerah melalui program ekonomi cerdas, Pertanian Cerdas, Pariwisata Cerdas, Infrastruktur cerdas. Secara lengkap data garis kemiskinan di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.15 sebagai berikut.



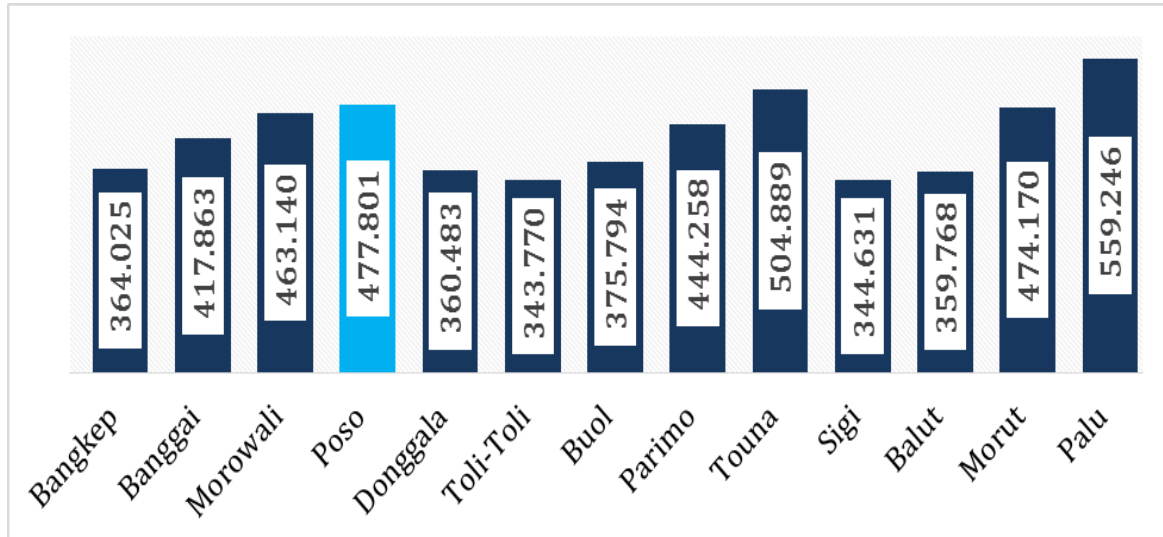
Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Poso,**  
**Tahun 2016-2020**

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dikategorikan garis kemiskinan Kabupaten Poso, termasuk salah satu yang tertinggi. Dimana, garis kemiskinan Kabupaten Poso tertinggi Ketiga di Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu tertinggi garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp559.246. Sebaliknya, garis kemiskinan terendah Kabupaten



Tolitoli Rp343.770. Tingginya garis kemiskinan tersebut perlu segera dicarikan solusinya, sehingga dapat mengurangi penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

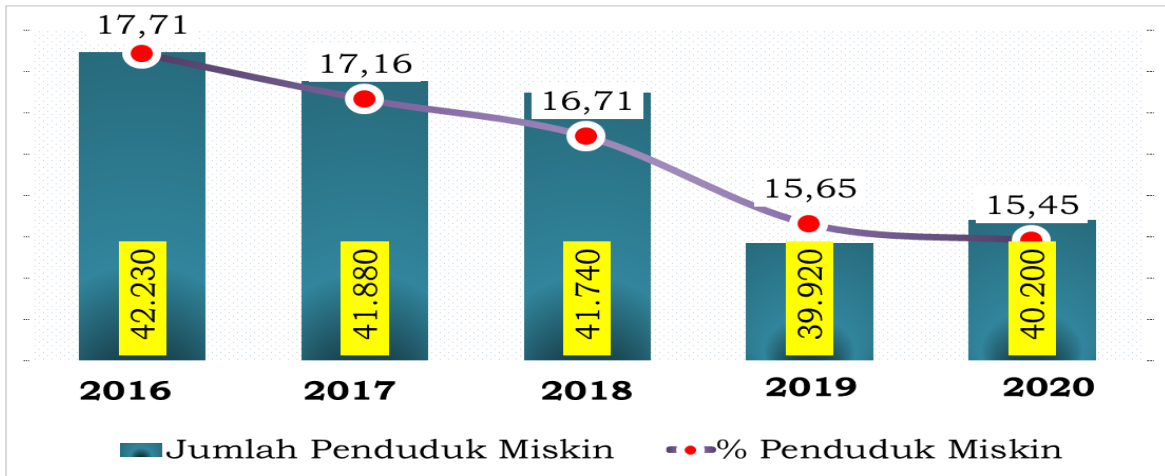
**Gambar 2.16**  
**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Se Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2020**

#### ▪ **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Poso, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2014, penduduk miskin di Kabupaten Poso sebesar 17,09 persen, dan hingga Tahun 2019, penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 15,65 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin jika dilihat dari tren selama kurun waktu itu mengalami penurunan dari jumlah penduduk Kabupaten Poso sebanyak 245.993 Tahun 2017, sebanyak 41 ribu jumlah penduduk miskin; dan Tahun 2019 penduduk miskin sebanyak 39.920 jiwa. Selanjutnya di tahun 2020 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Poso meningkat menjadi 40.220 Jiawa, namun dari persentase mengalami penurunan 0,20 persen menjadi 15,45%. Perkembangan penurunan penduduk miskin tetap harus dilakukan pada periode selanjutnya, dengan kolaborasi pendanaan dengan APBDes, APBN, Ngo dan lainnya. Data perkembangan kemiskinan di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.17 sebagai berikut.



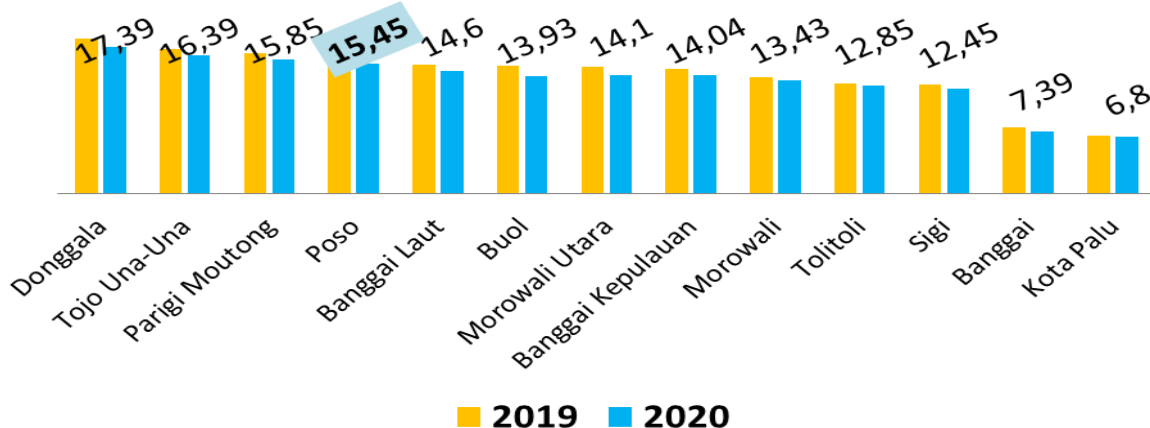
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026



Sumber Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.17**  
**Data Perkembangan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

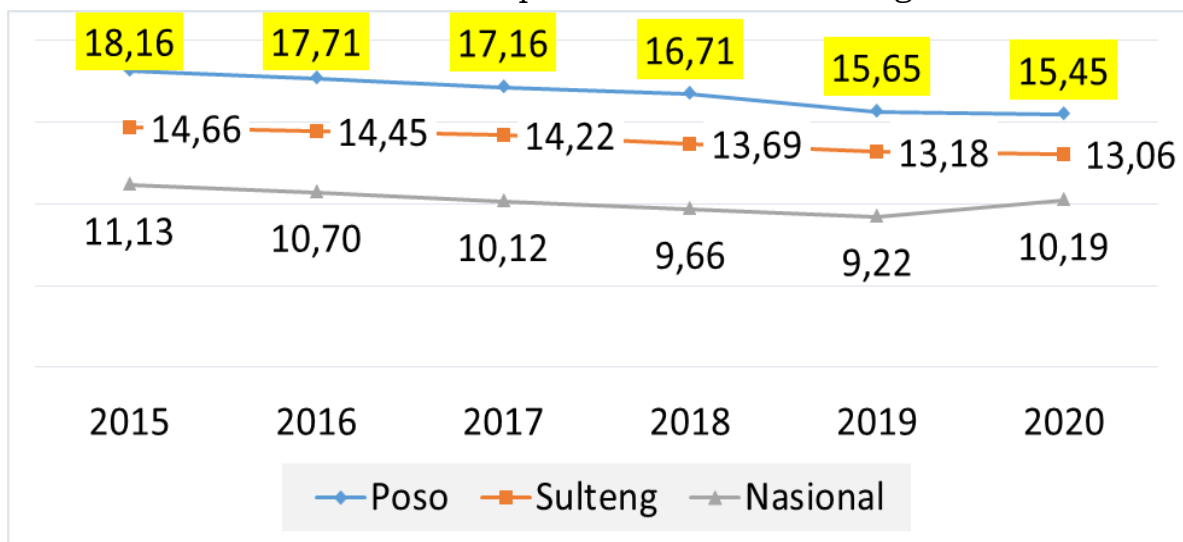
Batas garis kemiskinan untuk Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar Rp441.036 perkapita per bulan dan ditahun 2020 sebesar Rp478.687. Artinya setiap penduduk yang memiliki total pengeluaran perbulan (makanan + non makanan) kurang dari Rp478.687 masuk dalam kategori penduduk miskin. Pada Tahun 2020, Kabupaten Poso pada posisi keempat yang memiliki penduduk miskin tertinggi sebanyak 40.220 jiwa atau sebesar 15,45 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi yakni Kabupaten Donggala mencapai 17,39 persen. Data mengenai perbandingan jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.18 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.18**  
**Penduduk Miskin (persen) Menurut**  
**Kabupaten Se Sulawesi Tengah, Tahun 2019-2020**

Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang terdiri atas dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi makanan. Data perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 pada Gambar 2.19 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

**Gambar 2.19**  
**Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin**  
**Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

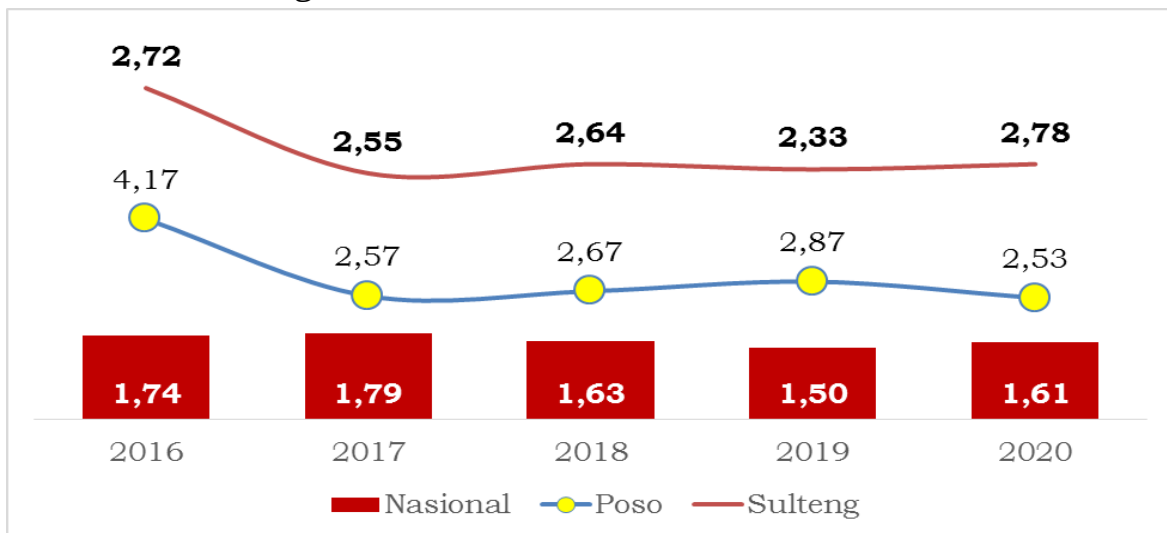
Merujuk data pada Gambar 2.19 di atas, terlihat persentase penduduk miskin Kabupaten Poso Tahun 2020 sebesar 15,45 persen. Angka kemiskinan ini berada di atas persentase rata-rata kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana persentasenya sebesar 13,06 persen, dan berada di atas rata-rata nasional. Secara keseluruhan capaian persentase masyarakat miskin baik secara nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Poso hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan kinerja pemerintah dalam upaya menekan atau menurunkan angka kemiskinan.

▪ **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk



miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Poso pada periode Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dari sebesar 4,17 Tahun 2016; Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,57, Tahun 2018 kembali meningkat sebesar 2,67; dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2,87, menurun pada tahun 2020 sebesar 2,53. Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2019, selalu di atas Sulawesi Tengah dan secara Nasional, namun di tahun 2020 Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Poso lebih baik dari rata-rata Provinsi, namun masih berada di atas rata-rata Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan (pengeluaran) penduduk miskin belum mengalami peningkatan yang signifikan. Data Perkembangan P1 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan Nasional terdapat pada Gambar 2.20 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

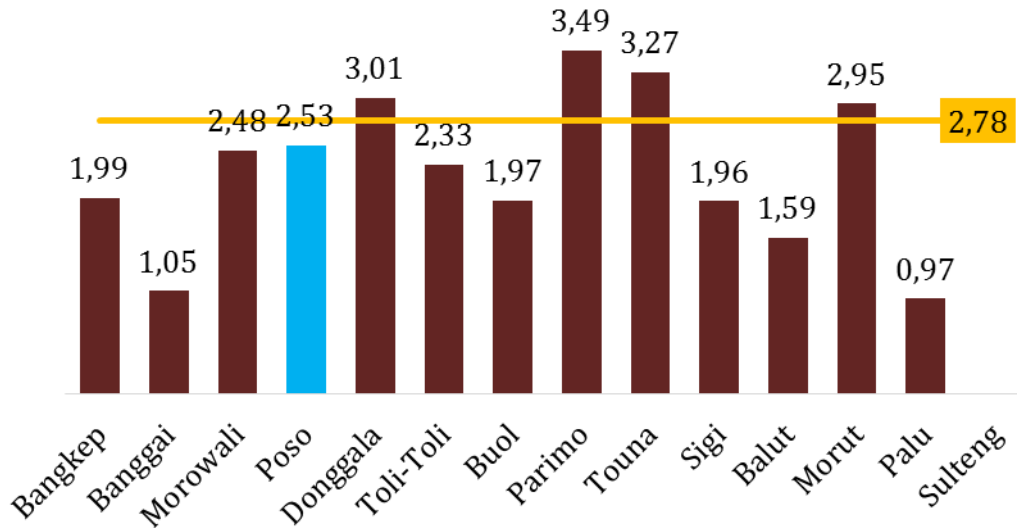
**Gambar 2.20**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Poso, Sulteng,**  
**dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Capaian P1 Kabupaten Poso pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-5 tertinggi. Posisi Kabupaten Poso berada di bawah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 3,49; Kabupaten Tojo Una-una sebesar 3,27; dan Donggala sebesar 3,01 serta Kabupaten Morowali Utara sebesar 2,95. Daerah-daerah dengan indeks kedalaman kemiskinan rendah yaitu Kota Palu sebesar 0,97 dan Kabupaten Banggai sebesar 1,05. Data gambaran mengenai data indeks kedalaman kemiskinan





kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.21 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

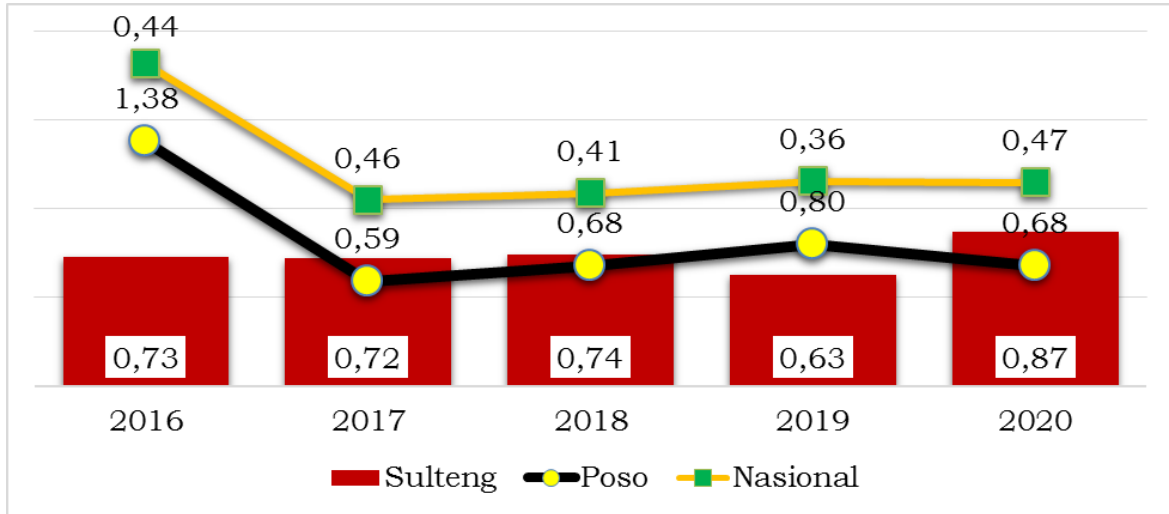
**Gambar 2.21**  
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

▪ **Indeks Keparahan Kemiskinan**

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Poso berfluktuatif, namun tren-nya menurun pada periode Tahun 2016-2020, yaitu sebesar 1,38 pada Tahun 2016; pada Tahun 2017 menjadi sebesar 0,59; Tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebesar 0,68 persen; dan pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 0,80 persen, ditahun 2020 P2 Kabupaten Poso juga menurun menjadi 0,68. Pada tahun 2020, kondisi P2 di Kabupaten Poso berada di atas Nasional, namun masih lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk miskin menunjukkan tren meningkat. Jika dikaitkan dengan P1 yang juga meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin belum merata dan kesenjangan cenderung meningkat. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) secara rinci terdapat pada Gambar 2.22 sebagai berikut.



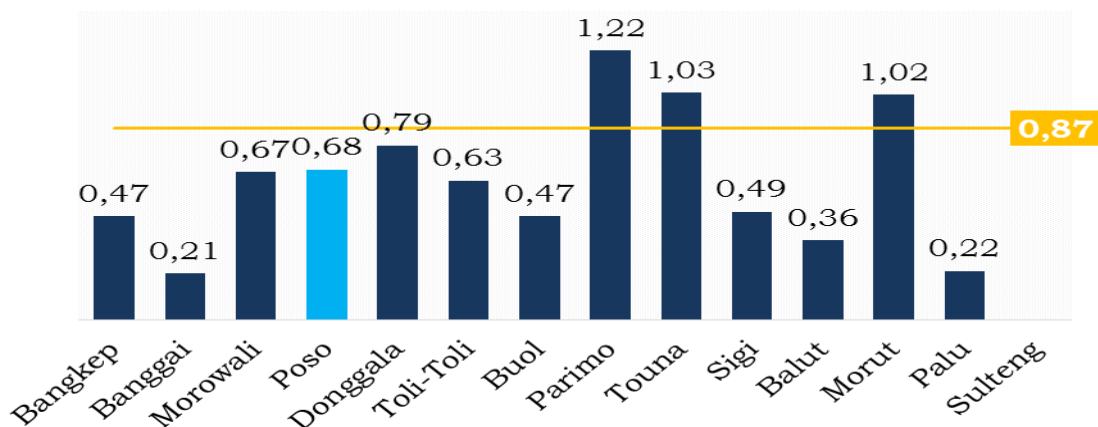
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

**Gambar 2.22**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Poso, Sulteng, dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian P2 Kabupaten Poso Tahun 2020 menempati peringkat ke-5 tertinggi. Berada di bawah P2 Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,22, Kabupaten Tojo Una-una 1,03, kemudian Kabupaten Morowali Utara sebesar 1,02 dan Kabupaten Donggala 0,79. Daerah dengan Indeks Keparahan Kemiskinan terendah yaitu Kota Palu dan Kabupaten Banggai sebesar 0,21. Data gambaran mengenai Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.23 sebagai berikut.

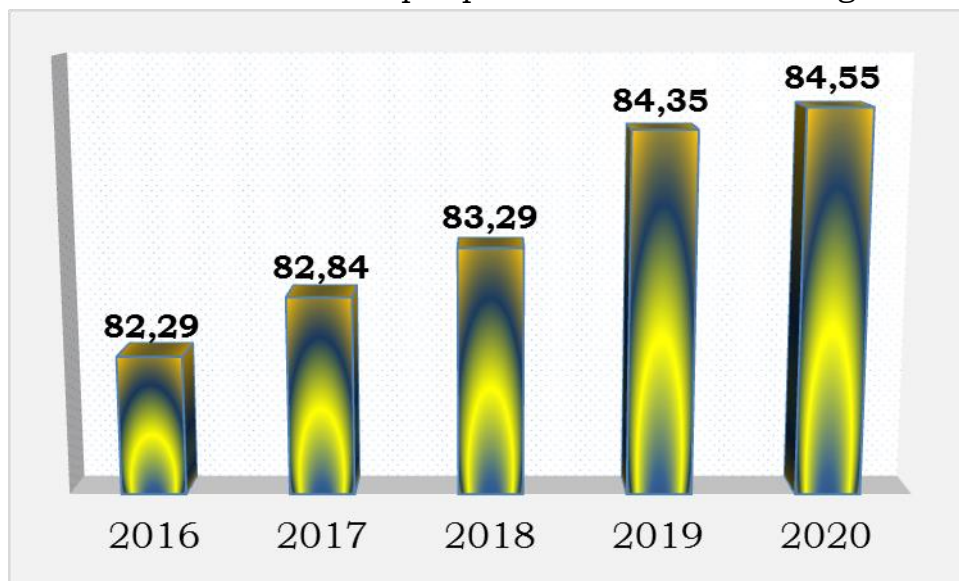


Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.23**  
**Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

#### **F. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis kemiskinan Non Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2020 sebesar Rp 515.435 ribu dikategorikan sebagai penduduk miskin. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan sebanyak 40.200 jiwa atau sebesar 15,45 persen. Pada Tahun 2020 penduduk Kabupaten Poso yang berada di atas garis kemiskinan sebanyak 204.675 jiwa atau sebesar 84,55 persen. Data persentase penduduk Kabupaten Poso dengan pendapatan di atas garis kemiskinan periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.24 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka 2021

**Gambar 2.24**

#### **Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2016–2020**

##### **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

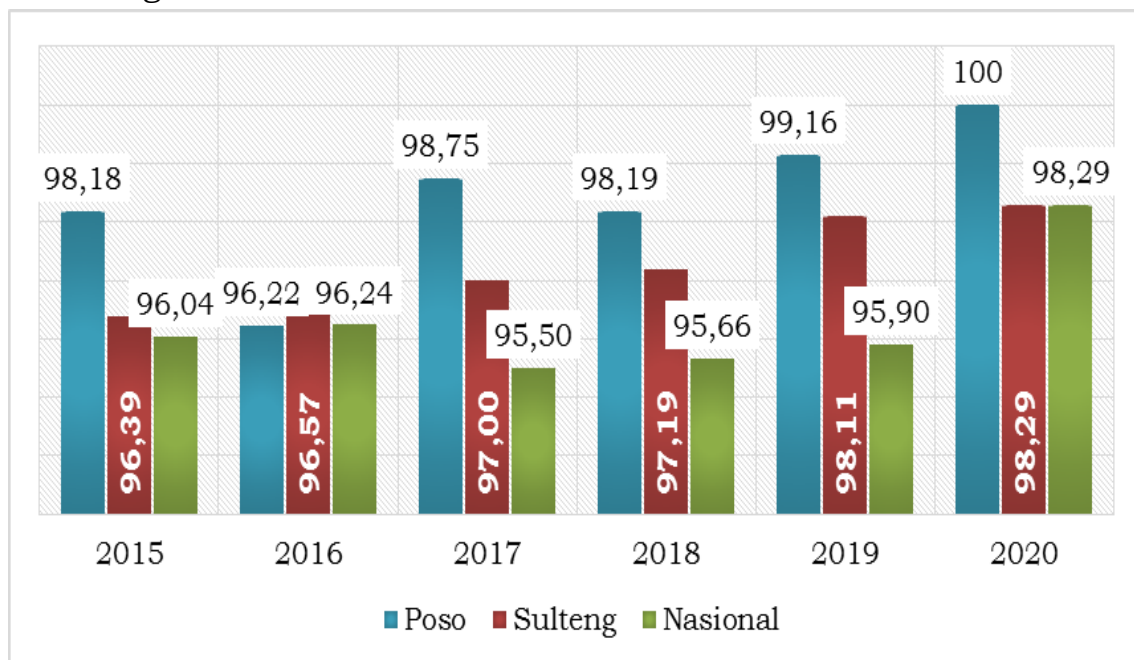
Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut berdasarkan pemikiran dan pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama lima tahun terakhir periode Tahun 2013-2017 berbagai program di Kabupaten Poso telah dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan taraf

pendidikan penduduk.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan fokus pada aspek kesejahteraan sosial dilakukan terhadap; indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

### **A. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat amat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Keterampilan baca tulis ini dibutuhkan untuk mempelajari dan menguasai keterampilan lainnya. Data perbandingan angka melek huruf di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.25 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Tahun 2016-2021 (diolah kembali)

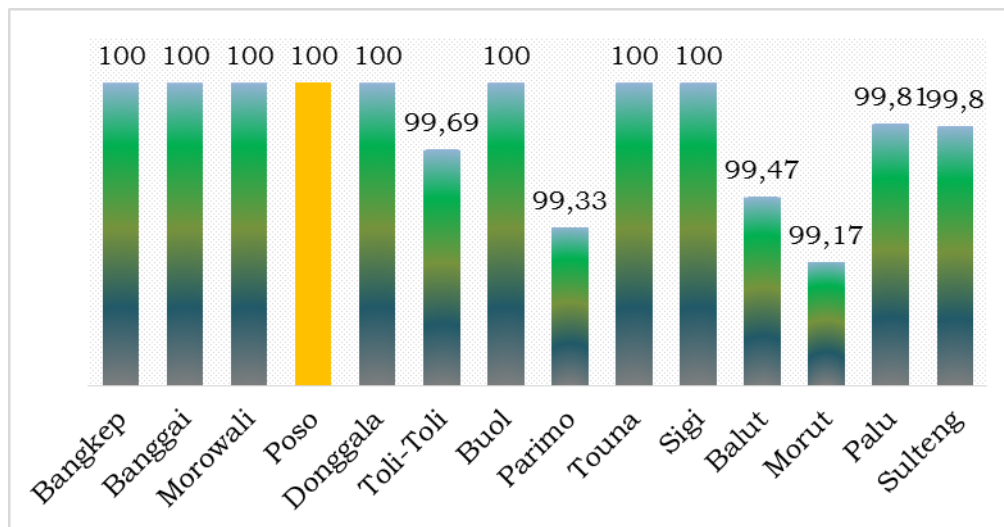
**Gambar 2.25**  
**Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Poso,**  
**Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2015-2020**

Mengacu pada data Gambar 2.25 di atas, perkembangan angka melek huruf Kabupaten Poso masuk kategori sangat baik, karena berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, indeks angka melek huruf Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020



mempunyai angka yang relatif berfluktuatif yaitu sebesar 98,18 pada tahun 2015; sebesar 96,22 Tahun 2016; menjadi sebesar 98,75 Tahun 2017; sebesar 98,19 Tahun 2018; dan Tahun 2019 meningkat menjadi 99,16, kemudian di tahun 2020 AMH Kabupaten Poso mencapai 100%. Capaian Tahun 2020 tersebut di atas rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98,29 dan secara Nasional sebesar 95,90.

Berdasarkan perbandingan AMH kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, pada Tahun 2020 Kabupaten Poso sejajar dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi, dan Kota Palu. Beberapa Kabupaten yang kondisi AMHnya dibawah 100% diantaranya Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu. Data perbandingan AMH kabupaten/Kota terdapat pada Gambar 2.26 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

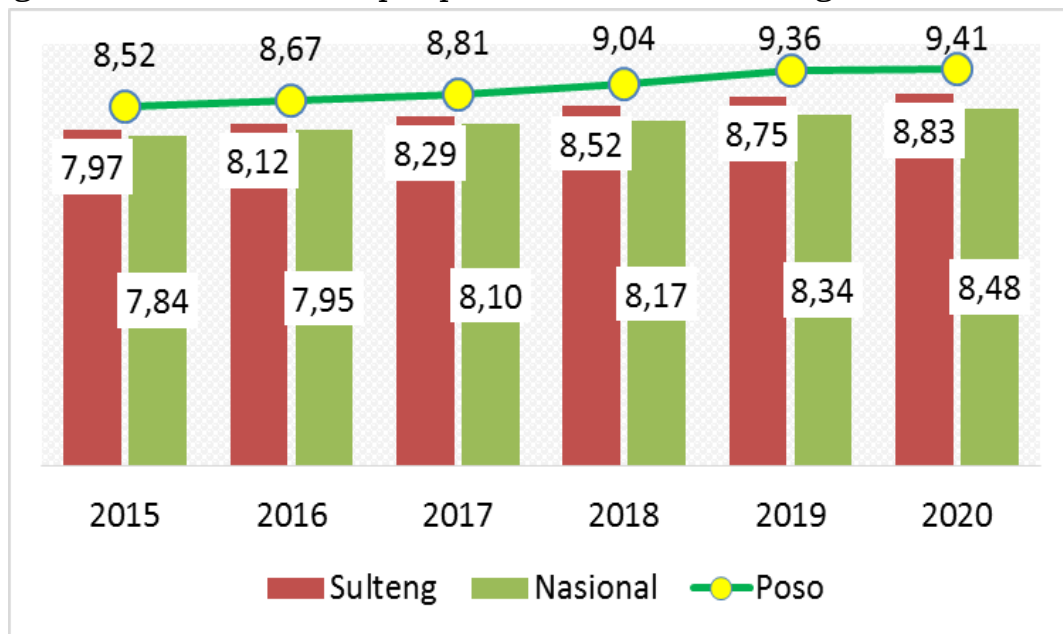
**Gambar 2.26**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Poso**  
**dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020**

### **B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (RLS) atau *mean years of schooling* merupakan salah satu sub-komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia dari indikator pendidikan. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang Pendidikan atau tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Poso. Pada indikator ini, angka RLS Kabupaten Poso pada Tahun 2015 tercatat selama 8,52 tahun; Tahun 2016 selama 8,67 tahun; Tahun 2017 menjadi selama 8,81 tahun; Tahun 2018 menjadi selama 9,04 tahun; dan Tahun 2019 meningkat menjadi selama



9,36 tahun. Selanjutnya ditahun 2020 RLS Kabupaten Poso meningkat sangat rendah yakni hanya 0,05 tahun menjadi 9,41 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia sekolah memiliki rata-rata lama sekolah sudah makin baik dan meningkat. Kondisi ini juga mengindikasikan penduduk usia produktif di Kabupaten Poso memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat. Data angka RLS Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.27 sebagai berikut.



Sumber: BPS, Tahun 2016-2021 (diolah kembali)

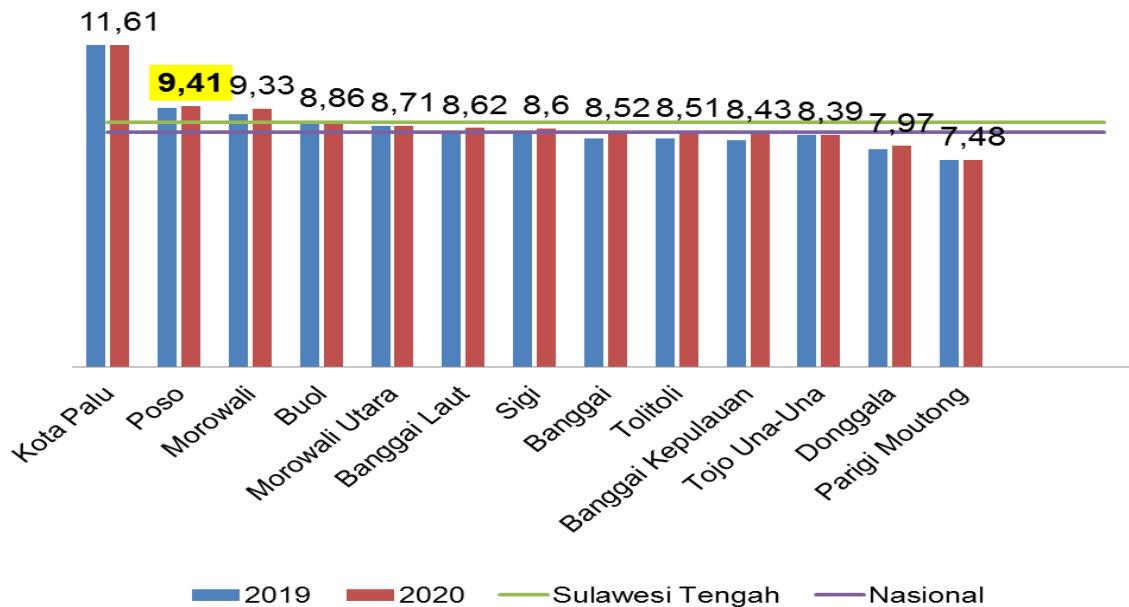
**Gambar 2.27**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional,**  
**Tahun 2015-2020**

Mengutip data pada Gambar 2.27 di atas terlihat perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Poso dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional tahun 2020. Dimana posisi rata-rata lama sekolah Kabupaten Poso lebih tinggi dari provinsi dan angka nasional. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Kabupaten Poso selama 9,41 tahun, dimana angka ini mulai mendekati keberhasilan dari program pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, terutama pada kelompok usia sekolah memiliki rata-rata lama sekolah relatif baik. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota angka RLS Kabupaten Poso tergolong tinggi dan menempati peringkat kedua dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, angka RLS Tertinggi Kota Palu



selama 11,61 tahun dan terendah yakni Kabupaten Parigi Moutong selama 7,48 tahun. Data angka RLS Kabupaten Poso dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.28 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2021

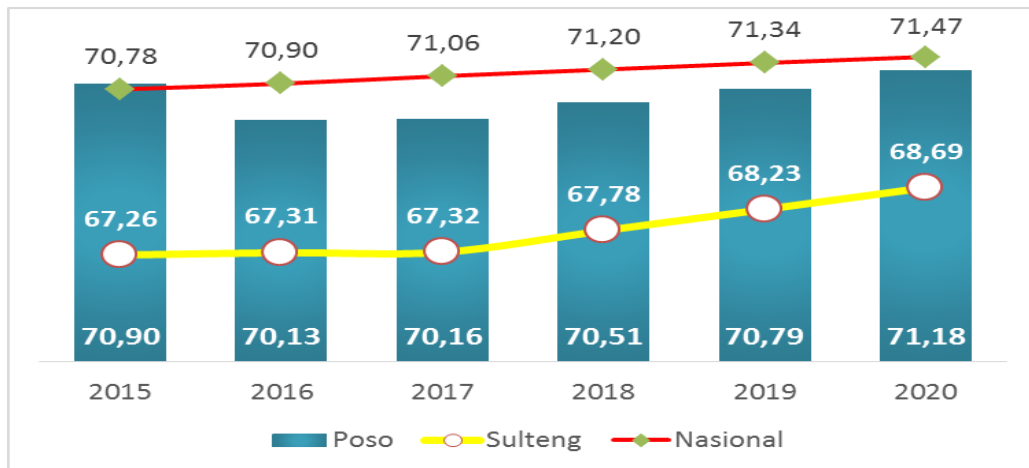
**Gambar 2.28**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020**

### C. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama waktu atau usia seseorang untuk hidup yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan derajat kesehatan masyarakat. UHH Kabupaten Poso pada Tahun 2015 selama 70,70 tahun; Tahun 2016 selama 70,13 tahun; Tahun 2017 menjadi selama 70,16 tahun; Tahun 2018 menjadi selama 70,51 tahun; dan Tahun 2019 selama 70,79 tahun, kemudian di tahun 2020 UHH kabupaten Poso mencapai 71,18 tahun. Kondisi UHH tahun 2020 di atas rata-rata UHH Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih di bawah rata-rata UHH nasional yang mencapai 71,47 tahun. Data perbandingan UHH Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.29 sebagai berikut.



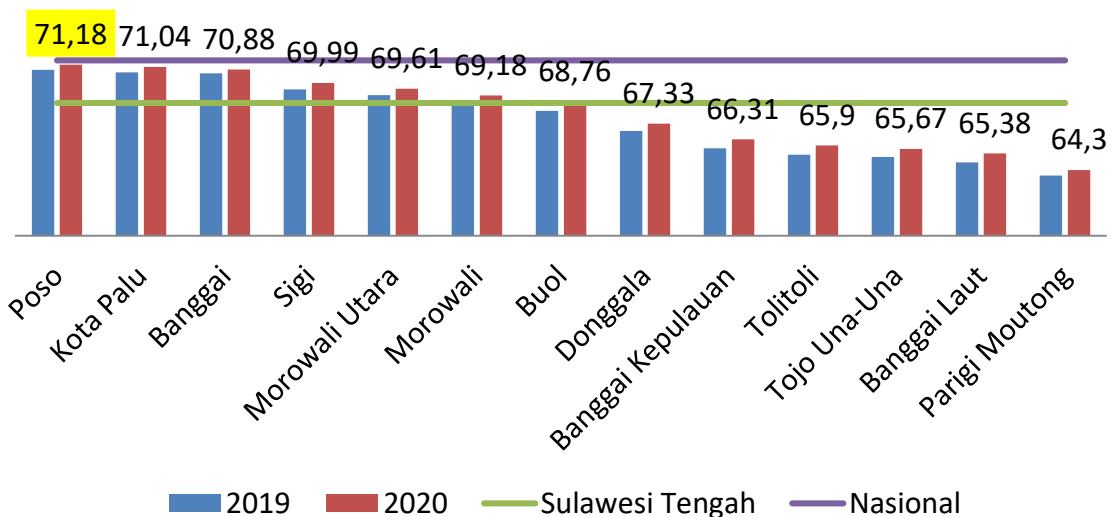
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026



Sumber: BPS, Tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.29**  
**Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)**  
**Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data perbandingan capaian UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020, dimana UHH Kabupaten Poso menempati peringkat pertama dengan angka UHH selama 71,18 tahun, dan Kota Palu memiliki UHH tertinggi selama 71,04 tahun dan Kabupaten Banggai selama 70,88 tahun. Kabupaten dengan UHH terendah adalah Kabupaten Parigi Moutong selama 64,30 tahun. Data mengenai perbandingan UHH antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.30 sebagai berikut.

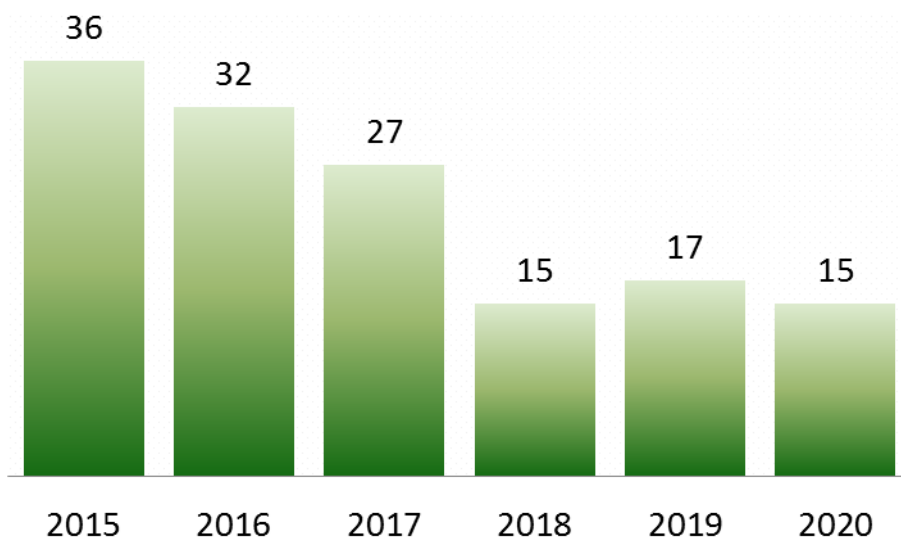


Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, 2021

**Gambar 2.30**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Poso**  
**dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020**

#### **D. Balita Gizi Buruk**

Status gizi masyarakat diukur dalam bentuk jumlah balita yang menderita gizi buruk, semakin sedikit jumlah balita yang menderita gizi buruk mengindikasikan semakin baik status gizi masyarakat. Angka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Poso terus mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2015 sebanyak 36 balita; Tahun 2016 menurun menjadi 32 balita; Tahun 2017 menurun menjadi 27 balita; Tahun 2018 menurun menjadi 15 balita. Namun, Tahun 2019 balita yang mengalami gizi buruk meningkat menjadi 17 kasus. Selanjutnya ditahun 2020 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Poso sebanyak 15 kasus. Hal ini menggambarkan upaya yang dilakukan dinas terkait untuk Pemantauan Status Gizi (PSG) anak balita di Kabupaten Poso yang berhubungan dengan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, sanitasi, pola asuh anak dan ketahanan pangan rumah tangga sudah berjalan baik dan efektif. Rata-rata penurunan kasus balita gizi buruk Kabupaten Poso periode tersebut sebesar 13,92 persen. Data jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.31 sebagai berikut.



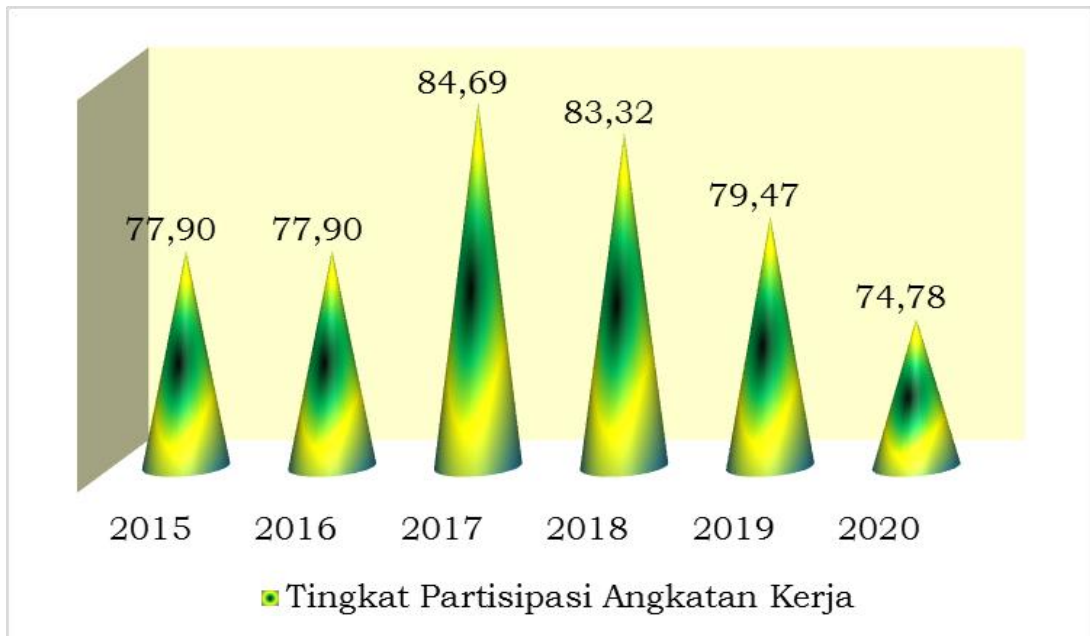
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.31**  
**Jumlah Balita Gizi Buruk**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

#### **E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Data persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.32 berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.32**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Sebagaimana data pada Gambar 2.32 di atas, TPAK Kabupaten Poso dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 77,90 persen; Tahun 2017 sebesar 84,69 persen; Tahun 2018 sebesar 83,32 persen; dan Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 79,47 persen, dan juga menurun di tahun 2020 menjadi 74,78 persen.

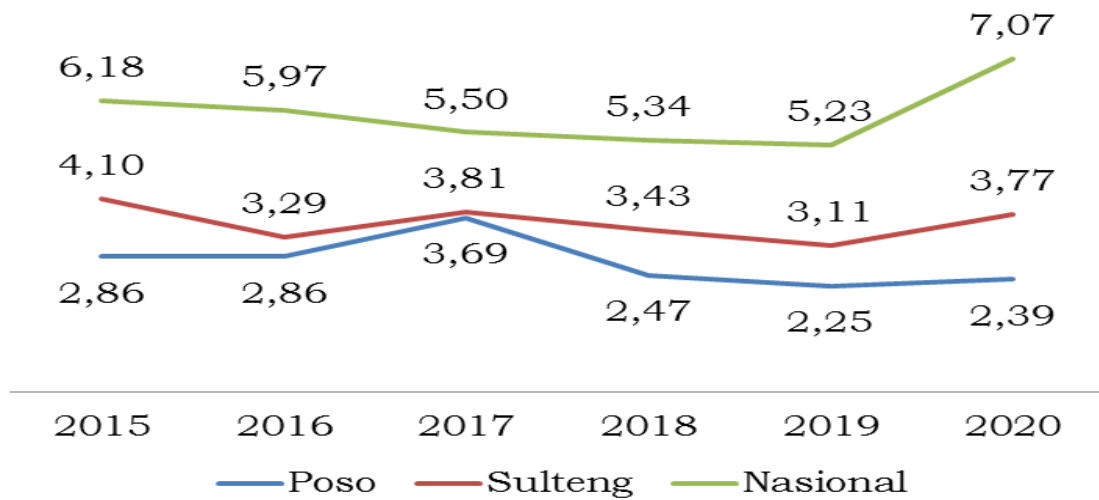
#### **F. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran (*unemployment*) merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Data yang menggambarkan TPT Kabupaten Poso dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.33 sebagai berikut.





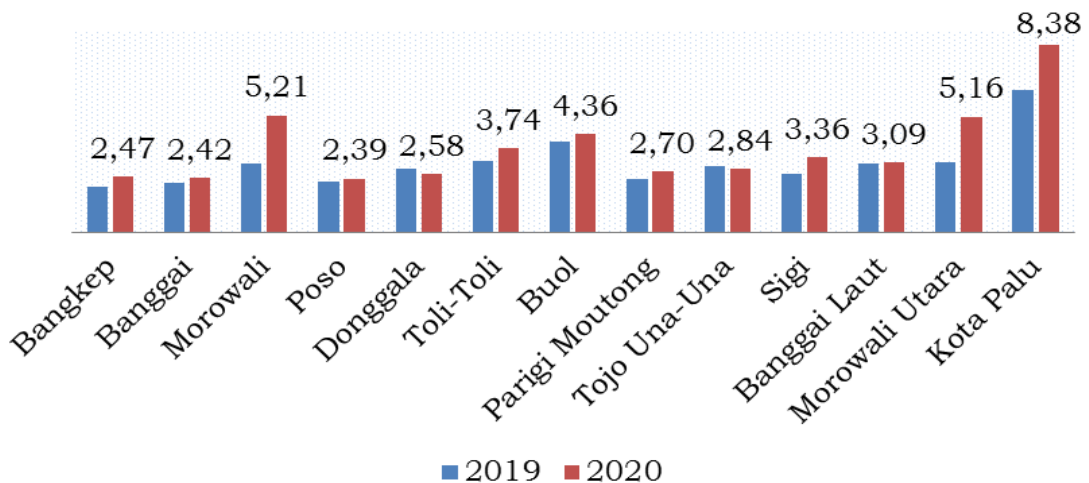
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.33**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020**

Mengutip data pada Gambar 2.33 di atas, TPT Kabupaten Poso hingga Tahun 2020 sebesar 2,39 persen menurun dari tahun sebelumnya. Secara umum perkembangan TPT Kabupaten Poso dalam 6 (enam) tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Namun, pada Tahun 2017 TPT tertinggi mencapai sebesar 3,69 persen. Data perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.34 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.34**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengan Tahun 2019-2020**

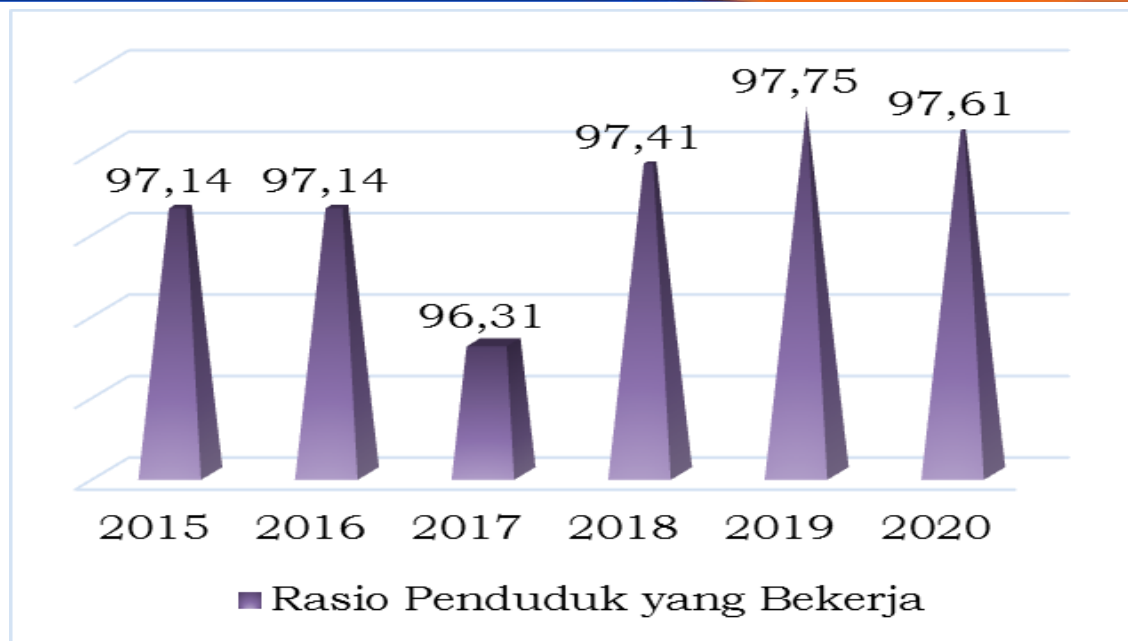


Merujuk secara cermat data pada Gambar 2.34 di atas, data perbandingan TPT Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, dimana Kabupaten Poso memiliki TPT terendah sebesar 2,02 persen. Sementara itu, TPT tertinggi di kota Palu yaitu sebesar 8,38 persen dan Kabupaten Morowali sebesar 5,21 persen. Rata-rata TPT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 3,77 persen, dimana terdapat sembilan daerah Kabupaten/Kota memiliki TPT di bawah rata-rata provinsi.

### **G. Rasio Penduduk yang Bekerja**

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi (penanaman modal) yang dapat mencipta-kan kesempatan kerja (peluang kerja) baru. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun. Indikator ketenagakerjaan yang meliputi persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan berkualitas (*quality of growth*), apabila pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan pengangguran.

Banyaknya penduduk yang berada pada angkatan kerja dan mendapatkan pekerjaan menggambarkan TPAK. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh, atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 (satu) jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Sedangkan, pencari kerja adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dalam seminggu yang lalu, termasuk mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru dalam seminggu yang lalu. Data rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.35 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2016-2021

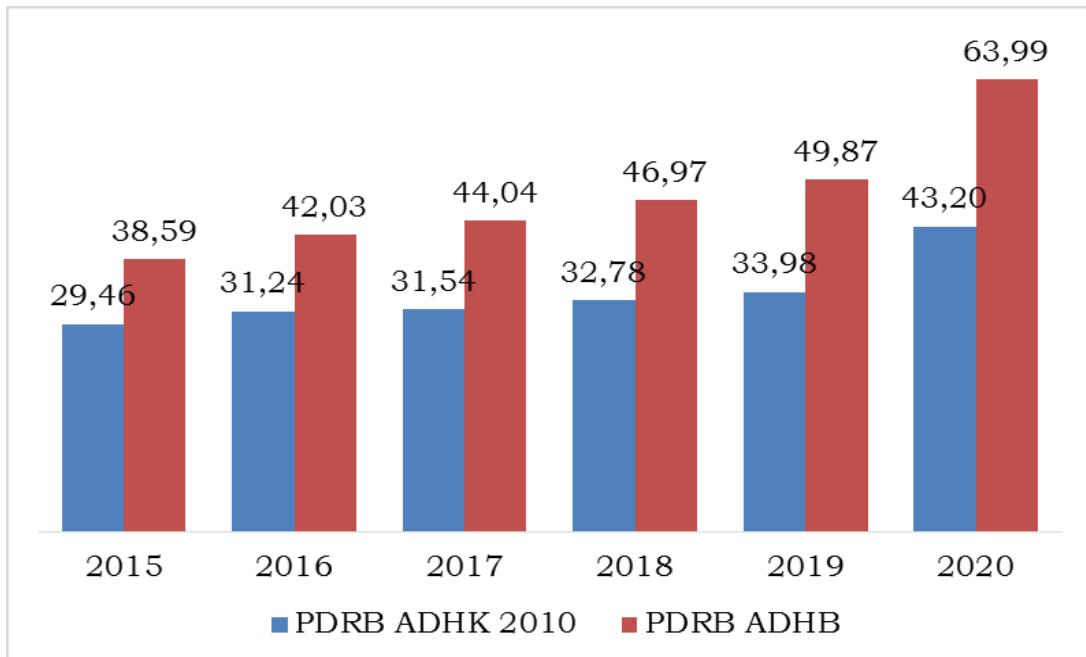
**Gambar 2.35**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data Gambar 2.35 di atas, terlihat rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2017 sebesar 96,30 persen, dimana jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso sebanyak 134.767 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 139.937 orang. Artinya dalam 1.000 orang angkatan kerja terdapat sebanyak 963 orang merupakan penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Selanjutnya, Tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso mengalami peningkatan menjadi 97,75 persen dan di tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso sebesar 97,61 persen. Kondisi ini jumlah pengangguran dari angkatan kerja di Kabupaten Poso relatif sedikit.

#### **H. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja**

Kondisi ketenagakerjaan yang meliputi persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah, sehingga memberikan referensi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi digerakan oleh aktivitas mobilitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bekerja dan produktivitas tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan produksi (output) atau nilai tambah (*value added*). Semakin

tinggi produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021

**Gambar 2.36**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Mereferensi data pada Gambar 2.36 di atas, terlihat laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Poso dimana berdasarkan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 masing-masing Tahun 2015 sebesar 38,59 dan 29,46; Tahun 2016 sebesar 42,03 dan 31,24; Tahun 2017 sebesar 44,04 dan 31,54; Tahun 2018 sebesar 46,97 dan 32,76; serta Tahun 2019 sebesar 49,87 dan 33,98. Selanjutnya ditahun 2020 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Poso sebesar 43,20 juta untuk PDRB ADHB dan 63,99 juta untuk PDRB ADHK 2010.

#### **I. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2016-2020 menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Poso terhadap dana tranfer pemerintah. Dimana Tahun 2016 sebesar 5,68 persen; meningkat

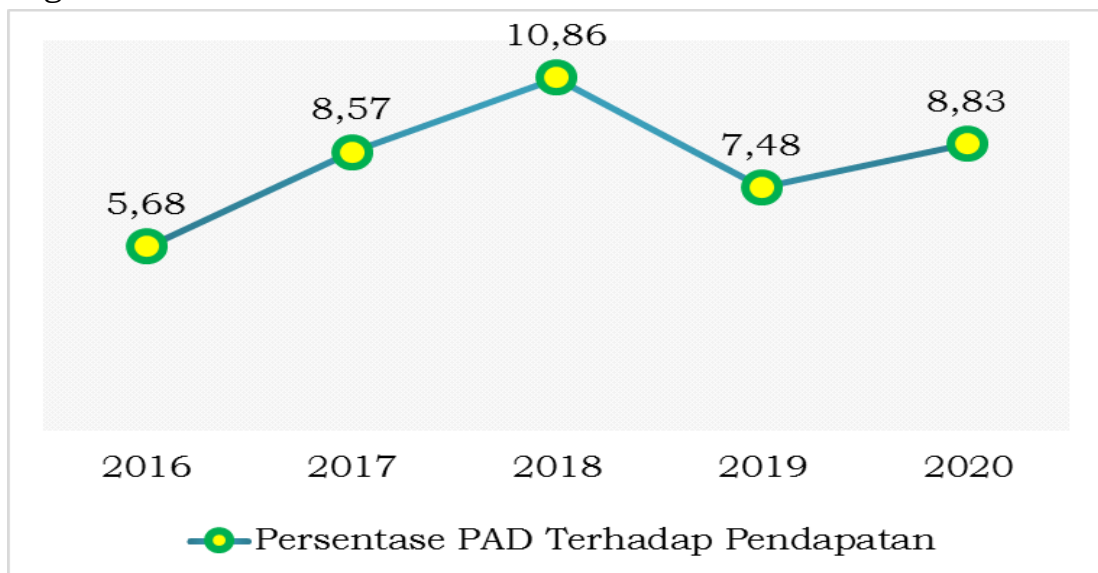
menjadi sebesar 8,57 persen Tahun 2017; Tahun 2018 menjadi sebesar 10,86 persen; dan pada Tahun 2019 persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menurun menjadi sebesar 7,48 persen. Kemudian ditahun 2020 persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Poso sebesar 8,83 persen. Data persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.25 sebagai berikut.

**Tabel 2.25**  
**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD	73.133.891.223	110.337.795.303	164.258.513.305	101.232.214.731	119.902.453.046,56
Total Pendapatan	1.288.335.521.610	1.287.408.975.643	1.512.064.420.025	1.353.944.293.040	1.358.065.958.814
Persen	5,68	8,57	10,86	7,48	8,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Tahun 2017-2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Poso total pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.358.065.958.814; sedangkan PAD hanya sebesar Rp119.902.453.046,56. Data perkembangan persentase PAD terhadap pendapatan daerah terdapat pada Gambar 2.37 sebagai berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, Tahun 2017-2021 (diolah Kembali)

**Gambar 2.37**  
**Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**





## J. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan, disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menunjukkan pengelolaan keuangan suatu daerah. Pada era *new public management* menuntut pengelolaan keuangan yang akuntabel dan trans-paran. Pengelolaan keuangan Kabupaten Poso menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam 2 (dua) tahun berturut-turut opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Poso mendapat opini **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)**. Opini untuk tahun 2020 juga memperoleh opini audit WTP. Data Perkembangan opini BPK dalam 6 (enam) tahun terakhir terdapat pada Tabel 2.26 sebagai berikut.

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Opini Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Tahun	Opini BPK
2015	WDP
2016	WDP
2017	WDP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: BKAD Kabupaten Poso, 2021

## K. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Data skor PPH Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 memperlihatkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perbaikan kondisi pangan masyarakat. Pada tahun 2020 skor pola pangan harapan Kabupaten Poso sebesar 120 kg/kap/thn. Data skor PPH Kabupaten Poso disajikan secara lengkap pada Gambar 2.38 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

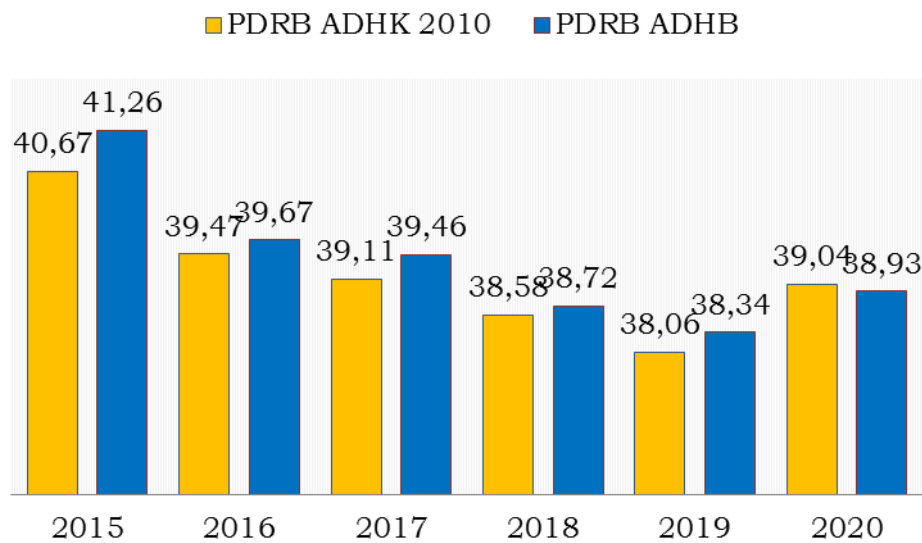
**Gambar 2.38**  
**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

#### **L. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten**

Kabupaten Poso merupakan daerah pertanian (agraris). Oleh karena itu, Sektor Pertanian memegang peranan yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Kategori ini mencakup Sub-sektor Pertanian, Sub-Sektor Kehutanan, dan Sub-Sektor Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan. Perkembangan industri berbasis hasil Sektor Pertanian (agroindustri) maupun agribisnis menjadi salah satu tumpuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tanaman padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) merupakan bahan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Poso, meskipun jagung dan umbi-umbian tidak sebanyak konsumsi beras namun di waktu-waktu tertentu menjadi pangan pengganti beras sebagai pangan pokok. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, khususnya Tanaman Pangan.

Data kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.39 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2021 (diolah kembali)

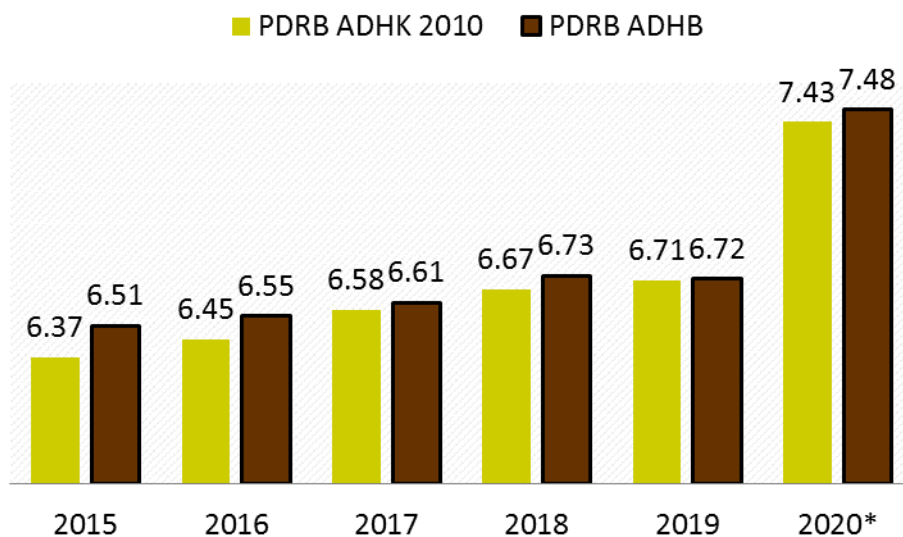
**Gambar 2.39**  
**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Merujuk pada data Gambar 2.39 di atas, persentase kontribusi Sektor Pertanian tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso Tahun 2015 masing-masing sebesar 41,26 persen dan 40,67 persen; Tahun 2016 menjadi sebesar 39,67 persen dan 39,47 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 39,46 persen dan 39,11 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 38,72 persen dan 38,58 persen; dan Tahun 2019 turun menjadi sebesar 38,34 persen dan 38,06 persen. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ditahun 2020 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 masing-masing sebesar 38,93 persen dan 39,04 persen.

Namun, selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir sektor ini masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Poso. Kondisi ini meng-indikasikan terjadinya penurunan produktivitas (output) dan nilai tambah (*valued added*) dari tahun ke tahun. Kondisi ini juga menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang tidak masuk ke Sektor Formal bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

### **M. Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB Kabupaten**

Kabupaten Poso memiliki potensi Sektor Pertanian yang besar, khususnya pada Sub-Sektor Hortikultura. Kondisi ini ditunjukkan kontribusi sub-sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Poso. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 6,51 persen dan 6,37 persen; Tahun 2016 menjadi sebesar 6,55 persen dan 6,45 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 6,61 persen dan 6,58 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 6,73 persen dan 6,67 persen; dan Tahun 2019 naik menjadi sebesar 6,72 persen dan 6,72 persen, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 7,48 persen dan 7,43 persen. Data kontribusi Sub-Sektor Hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 tersaji pada Gambar 2.40 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka tahun 2020 (diolah kembali)  
Keterangan: \*) Proyeksi

**Gambar 2.40**  
**Persentase Kontribusi Sub-Sektor Hortikultura**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Memperhatikan data pada Gambar 2.40 di atas, dapat diketahui persentase Kontribusi Sub-Sektor Hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 cenderung mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya penurunan kenaikan produktivitas dan nilai tambah dari Sub-Sektor Hortikultura di Kabupaten Poso.



#### **N. Produksi Tanaman Pertanian**

Secara umum produksi tanaman pertanian di Kabupaten Poso mengalami penurunan, kemarau panjang yang terjadi Tahun 2019 menjadi salah satu penyebab penurunan produksi tersebut. Produksi tanaman padi di Kabupaten Poso sebesar 118.785,13 ton di tahun 2019 dan menurun ditahun sebesar 99.359,51 ton. Angka produksi tersebut mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, dimana Tahun 2018 produksi sebesar 138.559,82 ton. Untuk tanaman jagung juga mengalami penurunan produksi Tahun 2019 yaitu sebesar 54.449,00 ton bahkan ditahun 2020 menuruns angat signifikan menjadi 8.510 ton. Selanjutnya, produksi kacang kedelai mengalami penurunan sangat tajam, hanya sebesar 189,00 ton, jika disbanding produksi tahun sebelumnya yang mencapai 6.116,00 ton. Produksi kacang tanah sebesar 107 ton, kacang hijau sebesar 20,6 ton, ketela pohon sebanyak 7.626 ton, ketela rambat sebanyak 7.043 ton. Data Produksi tanaman padi dan tanaman pangan lainnya di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.27 sebagai berikut.

**Tabel 2.27**  
**Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	160.085,00	182.557,00	138.559,82	118.785,13	99.359,51
Jagung	32.660,00	53.888,0	77.515,00	54.449,00	8.510,00
Kacang Kedelai	1.974,00	1.108,0	6.116,00	189,00	471,00
Kacang Tanah	156,81	156,8	228,00	107,00	107,00
Kacang Hijau	14,00	14,0	29,00	164,00	20,6
Ketela Pohon	5.203,54	5.203,5	11.512,00	7.626,00	7.626,00
Ketela Rambat	2.657,40	2.657,4	5.698,00	7.043,00	7.043,00

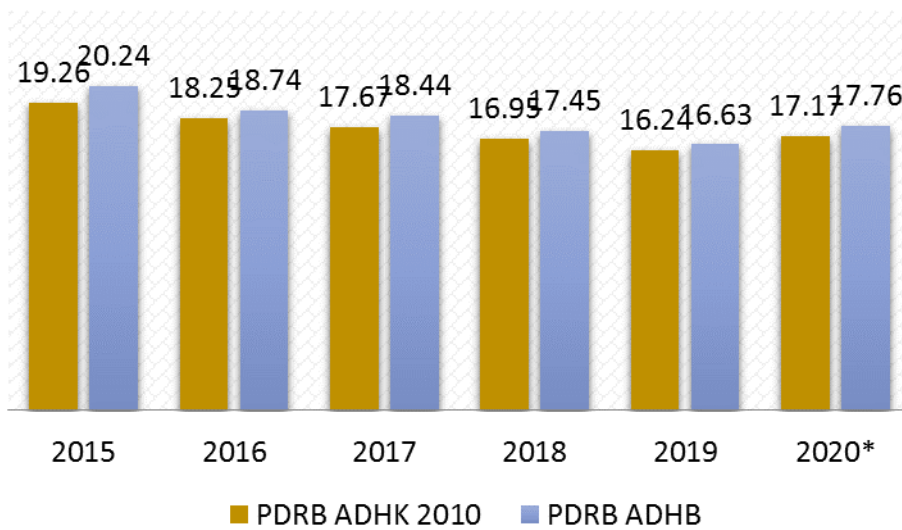
Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

#### **O. Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB**

Kabupaten Poso memiliki potensi Sub-Sektor Perkebunan juga cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Poso. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 19,26 persen dan 20,24 persen; Tahun 2016 menjadi sebesar 18,74 persen dan 18,25 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 18,44 persen dan 17,67 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 17,45 persen dan 16,95 persen; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 16,63 persen dan 16,24 persen, dan ditahun 2020 sebesar 17,76 persen dan 17,17 persen. Data kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB



Kabupaten Poso kurun 2015-2020 pada Gambar 2.41 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka tahun 2021 (diolah kembali)  
Keterangan: \*) Proyeksi

**Gambar 2.41**  
**Persentase Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

#### **P. Produksi Tanaman Perkebunan**

Komoditas tanaman perkebunan adalah merupakan tanaman perdagangan yang cukup strategis di Kabupaten Poso, selain sebagai sumber penghasilan pendapatan (*income*) di Sub-Sektor Pertanian, namun juga kegiatan produksinya mulai dari proses penanaman, perawatan, panen dan pemasaran dapat menciptakan lapangan kerja (peluang usaha) bagi masyarakat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Tanaman perkebunan dikembangkan di Kabupaten Poso terdiri dari 9 (sembilan) jenis tanaman antara lain: cengkeh, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, karet, kakao, pala dan kemiri. Perkebunan kakao merupakan komoditas perkebunan terluas area tanam dan produksinya di Kabupaten Poso. Pada tahun 2020, luas tanam perkebunan kakao seluas 38.908 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 23.740,31 ton. Tanaman kakao tersebut semuanya adalah perkebunan milik masyarakat. Data Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Poso pada periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.28 sebagai berikut.



**Tabel 2.28**  
**Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman**  
**Kabupaten Poso (Ton), Tahun 2016-2020**

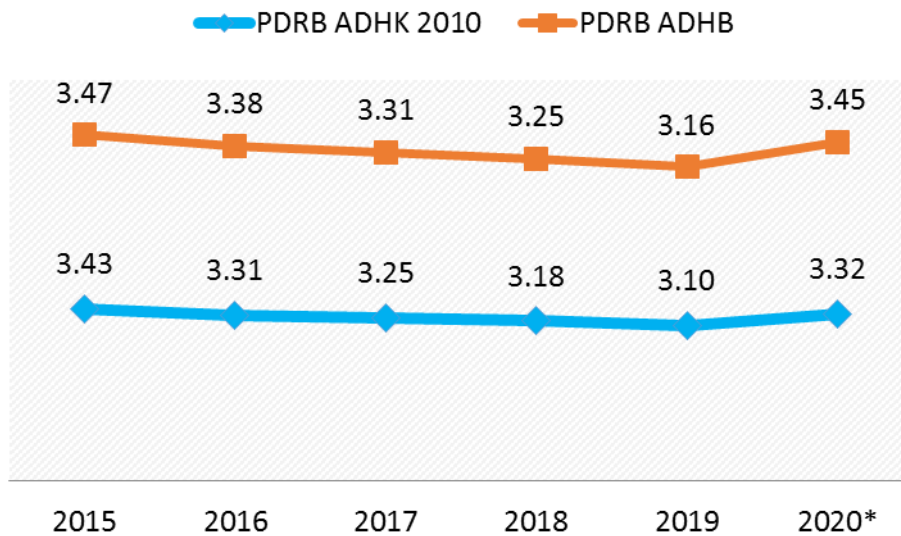
Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cengkeh	226,00	127,00	189,57	189,57	3.452,00
Kelapa Dalam	3.957,00	4.259,00	4.218,56	1.774,35	8.194,73
Kelapa Sawit	732,00	586,00	1.045,33	1.045,33	2.700,39
Kopi	1.039,00	940,00	1.048,79	563,32	737,30
Karet	-	25,00	48,00	13,25	216,00
Kakao	25.639,00	26.265,00	24.409,36	24.409,36	23.740,31
Pala	5,00	7,00	8,10	3,73	9,91
Kemiri	102,00	186,00	142,55	77,10	83,12

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28 di atas, jumlah produksi pada tanaman perkebunan di Kabupaten Poso tahun 2020 secara umum juga mengalami penurunan pada hampir semua jenis tanaman. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Poso pada Tahun 2020 yakni; Cengkeh sebesar 3.452,00 ton; Kelapa Dalam sebesar 8.194,73 ton; Kelapa Sawit sebesar 2.700,39 ton; Kopi sebesar 737,30 ton; Karet sebesar 216,00 ton; Kakao sebesar 23.740,31 ton; dan Pala sebesar 9,91 ton; serta Kemiri sebesar 83,12 ton.

#### **Q. Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**

Kabupaten Poso juga memiliki potensi Sub-sektor Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Sub-Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Poso. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 3,47 persen dan 3,43 persen; Tahun 2016 menjadi sebesar 3,38 persen dan 3,31 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 3,31 persen dan 3,25 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 3,25 persen dan 3,18 persen; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 3,16 persen dan 3,10 persen, kemudian ditahun 2020 sebesar 3,45 persen dan 3,32 persen. Data Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Poso selama kurun 2015-2020 disajikan pada Gambar berikut.



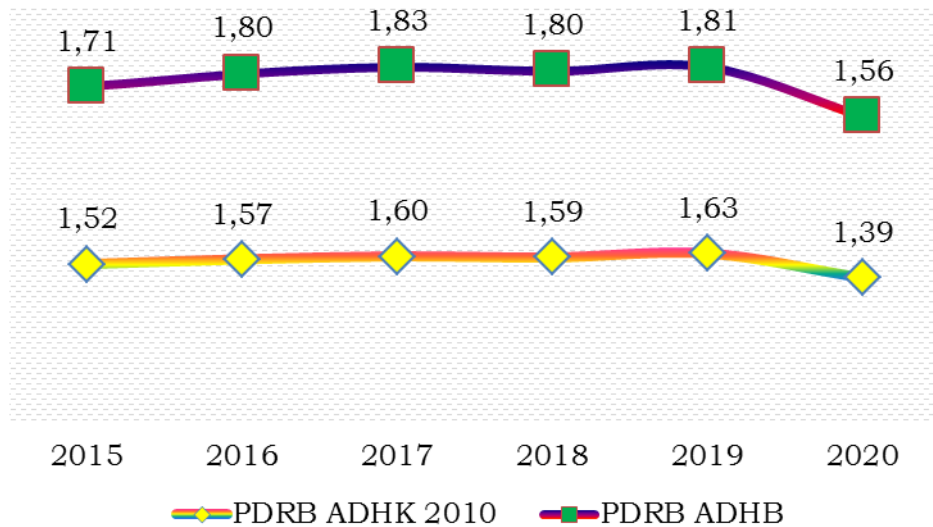
Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka tahun 2021 (diolah kembali)  
Keterangan: \*) Proyeksi

**Gambar 2.42**  
**Nilai Kontribusi Sub-Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

#### R. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki 4 (empat) sub-kategori, antara lain: sub-kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; sub-kategori Pertambangan Batubara dan Lignit; sub-kategori Pertambangan Bijih Logam; dan sub-kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya.

Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Poso sebagai sektor yang masih kecil peran dan kontribusinya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) PDRB Kabupaten Poso. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 1,71 persen dan 1,52 persen; Tahun 2016 sebesar 1,80 persen dan 1,57 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 1,83 persen dan 1,60 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 1,80 persen dan 1,59 persen; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 1,81 persen dan 1,63 persen, selanjutnya ditahun 2020 menurun masing-masing menjadi 1,56 persen dan 1,39 persen. Data persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.43 sebagai berikut.



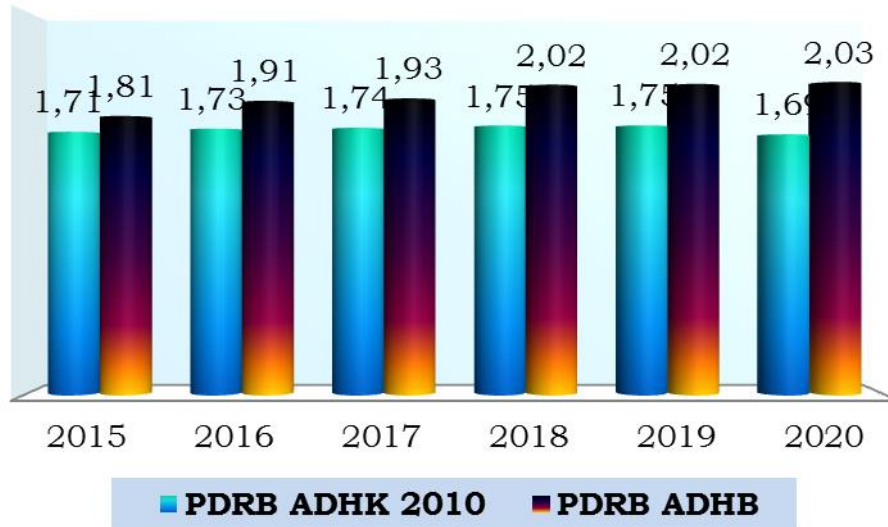
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.43**  
**Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Seperti terlihat pada Gambar 2.43 di atas, terlihat Sektor Pertambangan memiliki kontribusi sangat minim dalam menunjang PDRB di Kabupaten Poso, jika di banding dengan kontribusi Sektor Pertambangan di Kabupaten-Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Poso sebesar Rp114,46 miliar atau sekitar 1,71 persen tahun 2015; dan meningkat menjadi Rp171,59 miliar atau sekitar 1,81 persen pada Tahun 2019, kontribusi sektor ini ditahun 2020 menurun menjadi 1,56 persen dengan nilai Rp144,07 Miliar.

#### **S. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

Pembangunan Sektor Pariwisata di berbagai daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, belum mampu diikuti pembangunan Sektor Pariwisata di Kabupaten Poso. Meski jumlah obyek wisata yang tersedia cukup banyak, namun perkembangan sektor ini belum besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pengembangan potensi obyek dan tempat wisata (destinasi wisata) belum optimal. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Poso yang bersumber dari Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih sangat kecil. Data kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Posos disajikan pada Gambar 2.44 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

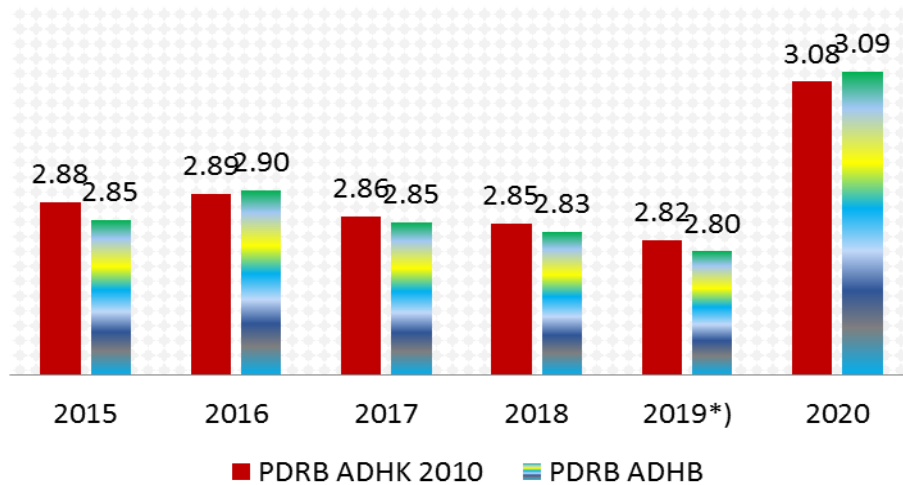
**Gambar 2.44**  
**Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Merujuk pada data Gambar 2.44 di atas, Sektor Parawisata memiliki kontribusi terkecil dari seluruh sektor dan sub-sektor dalam menunjang PDRB di Kabupaten Poso. Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 1,81 persen dan 1,71 persen; Tahun 2016 sebesar 1,91 persen dan 1,73 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 1,93 persen dan 1,74 persen; kontribusi sub-sektor ini Tahun 2018 dan Tahun 2019 sama yakni masing-masing untuk PDRB ADHB sebesar 2,02 persen dan PDRB ADHK 2010 sebesar 1,75 persen, selanjutnya pada Tahun 2020 yakni masing-masing untuk PDRB ADHB sebesar 2,03 persen dan PDRB ADHK 2010 sebesar 1,61 persen. Kontribusi sektor Pariwisata yang masih sangat rendah menunjukkan pengelolaan sektor pariwisata belum optimal dilakukan, padahal, Kabupaten Poso memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, antara lain patung megalitikum, danau poso, wisata adat bada, behoa dan TNLL.

#### **T. Kontribusi Sub-Sektor Perikanan terhadap PDRB**

Sub-Sektor perikanan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB dan nilai produksinya di Kabupaten Poso. Potensi perikanan diharapkan akan meningkat kontribusi Sub-Sektor Perikanan terhadap PDRB. Data Kontribusi Sub-Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.45 sebagai berikut.





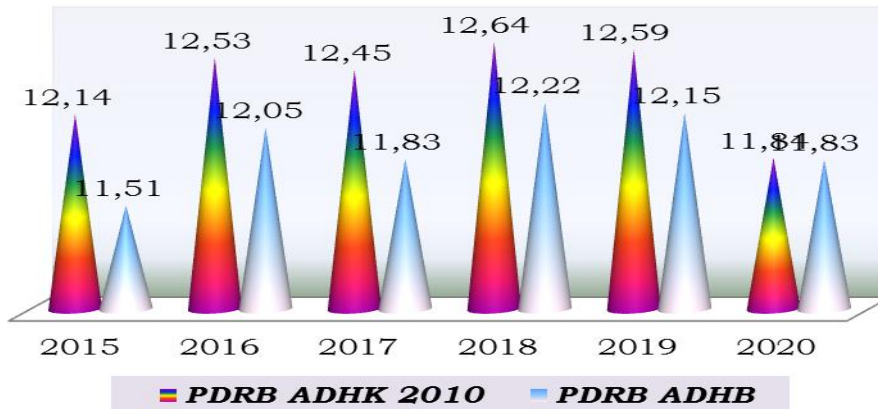
Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka tahun 2021 (diolah kembali)  
Keterangan: \*) Proyeksi

**Gambar 2.45**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Sub-Sektor Perikanan sebagai bagian dari Sektor Pertanian yang memiliki potensi besar dan menjadi sub-sektor yang dapat diandalkan di Kabupaten Poso. Kontribusi Sub-Sektor ini, terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso pada Tahun 2015 masing-masing sebesar 2,85 persen dan 2,88 persen; Tahun 2016 sebesar 2,90 persen dan 2,89 persen; Tahun 2017 menjadi sebesar 2,85 persen dan 2,86 persen; Tahun 2018 menjadi sebesar 2,83 persen dan 2,85 persen; dan Tahun 2019 sama yakni masing-masing untuk PDRB ADHB sebesar 2,80 persen dan PDRB ADHK 2010 sebesar 2,82 persen. Kemudian ditahun 2020 yakni masing-masing untuk PDRB ADHB sebesar 3,09 persen dan PDRB ADHK 2010 sebesar 3,08 persen.

#### **U. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Sektor Perdagangan memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Poso. Sektor Perdagangan juga menjadi sektor andalan selain Sektor Pertanian di Kabupaten Poso. Dimana, Kontribusi kategori Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada Tahun 2019 mencapai sebesar Rp1.155,153 miliar atau sebesar 12,15 persen dan ditahun 2020 menurun menjadi 11,83 persen. Penurun kontribusi ini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga berdampak di Kabupaten Poso. Data kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Poso selama kurun 2015-2020 terlihat sebagaimana terdapat pada Gambar 2.46 sebagai berikut.

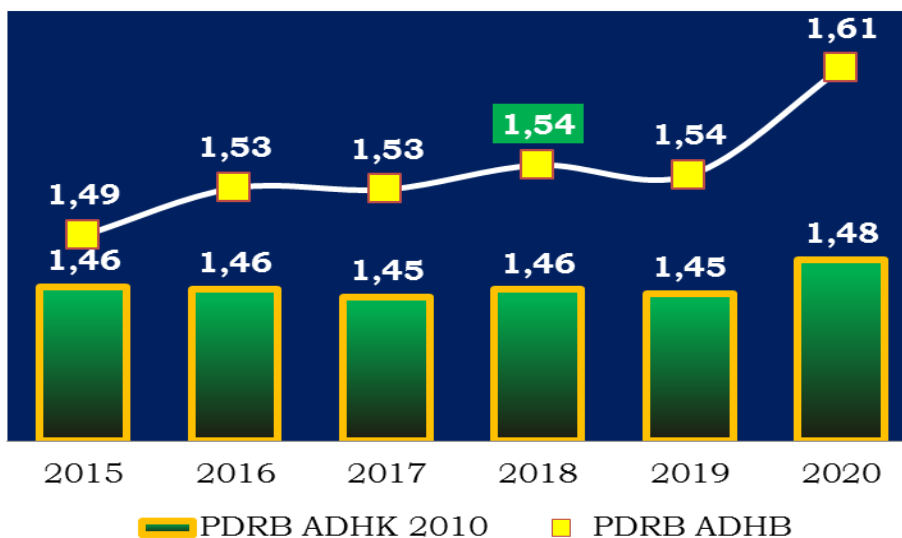


Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.46**  
**Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020 (%)**

#### V. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor kunci (*key sector*) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri memiliki peran penting sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) masyarakat. Data persentase kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.47 sebagai berikut.



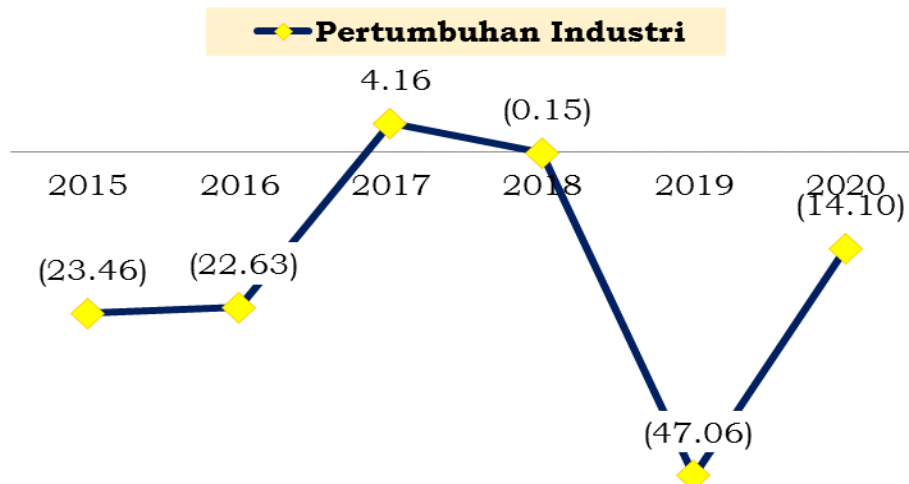
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.47**  
**Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Merujuk pada Gambar 2.47 di atas, memperlihatkan persentase kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB terlihat Pada tahun 2015, persentase kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Poso masing-masing mencapai 1,49 persen dan 1,46 persen. Selama kurun waktu Tahun 2015-2020 dimana kontribusinya mengalami kenaikan terus menerus. Pada Tahun 2019 kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Poso masing-masing mencapai 1,54 persen dan 1,45 persen. Selanjutnya ditahun 2020 kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Poso masing-masing mencapai 1,61 persen dan 1,48 persen. Namun, secara umum dapat disimpulkan kontribusi Sektor Industri terhadap perekonomian Kabupaten Poso selama periode waktu tersebut masih sangat kecil.

### **W. Pertumbuhan Industri**

Pertumbuhan industri menjadi barometer utama untuk menilai masuknya aliran modal (*capital inflow*) ke suatu daerah. Tren perekonomian daerah yang membaik sering diikuti dengan masuknya investasi terutama industri. Sebaliknya, keputusan investasi dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi daerah yang juga makin membaik dari tahun ke tahun. Masuknya investasi melalui perusahaan industri akan memberikan dampak positif bagi daerah, terutama penyerapan tenaga kerja yang naik dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan industri di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.48 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.48**  
**Pertumbuhan Industri di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**



Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 2.48 di atas, pertumbuhan industri di Kabupaten Poso selama kurun waktu Tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, bahkan pertumbuhan industri di Kabupaten Poso mengalami kontraksi pada Tahun 2015; Tahun 2016; Tahun 2018 dan Tahun 2019. Hanya terlihat pada Tahun 2017 terjadi pertumbuhan industri sebesar 4,16 persen, ditahun 2020 juga tumbuh negative sebesar minus 14,10 persen. Kondisi ini menunjukkan belum stabilnya keputusan investasi industri di Kabupaten Poso.

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda, serta olahraga.

#### **A. Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Poso terdiri atas 19 kecamatan dan 142 desa, juga memiliki adat-istiadat, serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika dan keanekaragaman budaya dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan data pada Tabel 2.29 di bawah digambarkan bahwa setiap tahun selama lima tahun terakhir grup kesenian berjumlah 75 grup, dan gedung kesenian sebanyak 30 gedung. Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Poso Tahun 2019 sebesar 2,93; sedangkan rasio gedung kesenian per 10.000 penduduk sebesar 1,17, dan ditahun 2020 Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk sebesar 1,02 dan Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk sebesar 1,23. Data perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.29 sebagai berikut.

**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Seni dan Budaya**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,00	1,02	0,99	0,98	1,02
2	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,25	1,22	1,19	1,17	1,23

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2021



## **B. Pemuda dan Olahraga**

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda sebagai penerus yang tangguh, cerdas dan sehat. Untuk memenuhi kebutuhan menyiapkan generasi tersebut, maka salah satu indikator bagu terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Data perkembangan pemuda dan olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.30 sebagai berikut.

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	0,91	0,89	0,79	0,78	1,02
3	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Pembangunan olahraga dan pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan olahraga dan kepemudaan. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui induk cabang olahraga daerah, dan kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Pada tahun 2019, jumlah klub olahraga di Kabupaten Poso sebanyak 20 grup dengan jumlah gedung olahraga sebanyak 3 gedung. Dengan demikian jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sebesar 0,78; dan jumlah gedung per 10.000 penduduk sebesar 0,12, kemudian ditahun 2020 Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk sebesar 1,02 dan Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk sebesar 0,08.

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan dalam regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah. Merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, terdapat klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

**Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan**





**pemerintahan konkruen** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

### **2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi/ Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 meliputi 6 (enam) Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Poso. Identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Poso dijabarkan secara detail sebagai berikut.

#### **A. Pendidikan**

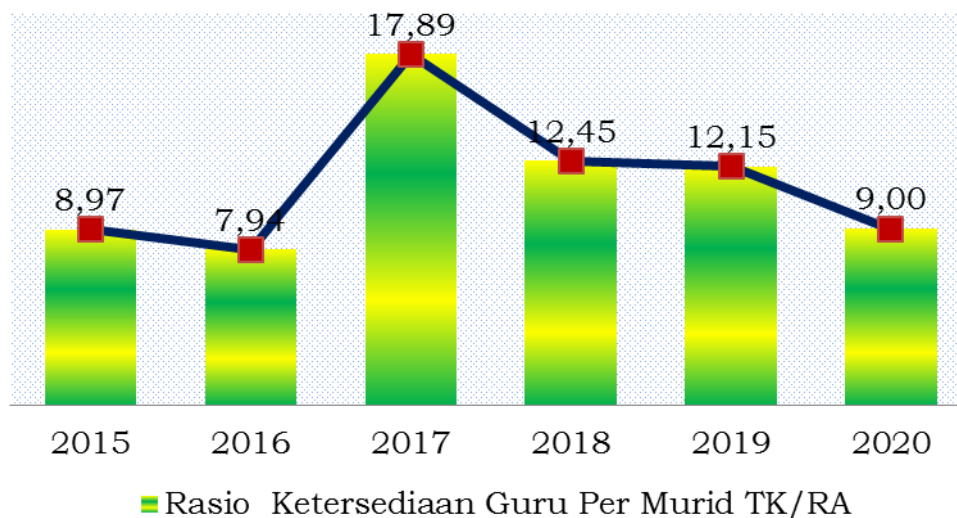
Pendidikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan suatu wilayah atau negara, dari beberapa survei menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan/semakin baik pendidikan masyarakat pada suatu wilayah/negara, maka kualitas hidup masyarakat/negara tersebut akan lebih baik. Posisi penting dan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia, maka pemerintah memberikan perhatian yang serius dan fokus dengan Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun dan Wajar dua belas tahun.

Sasaran utama kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pendidikan, termasuk dengan membuka kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk dibebaskan pembayaran SPP melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), adanya beasiswa bagi siswa yang memenuhi syarat. Urusan wajib bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Poso adalah pendidikan

anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar hingga pendidikan menengah pertama (SMP dan sederajat). Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja Pendidikan sebagai berikut.

### 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD menjadi fokus pendidikan yang ditujukan untuk membangun pendidikan sejak usia dini. PAUD memiliki peran strategis dan penting dalam meletakkan nilai-nilai dasar pendidikan bagi anak usia dini. Pondasi dasar melalui PAUD ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang inovatif, kreatif dan berdaya saing. Secara khusus, PAUD/TK di Kabupaten Poso sudah dapat menjangkau sebagian besar masyarakat hingga kawasan perdesaan dan terpencil. Gambaran kondisi PAUD di Kabupaten Poso dapat dilihat dari rasio ketersediaan guru terhadap jumlah murid. Data perkembangan rasio ketersediaan guru terhadap jumlah murid selama kurun waktu Tahun 2015-2020 pada Gambar 2.49 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.49**  
**Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

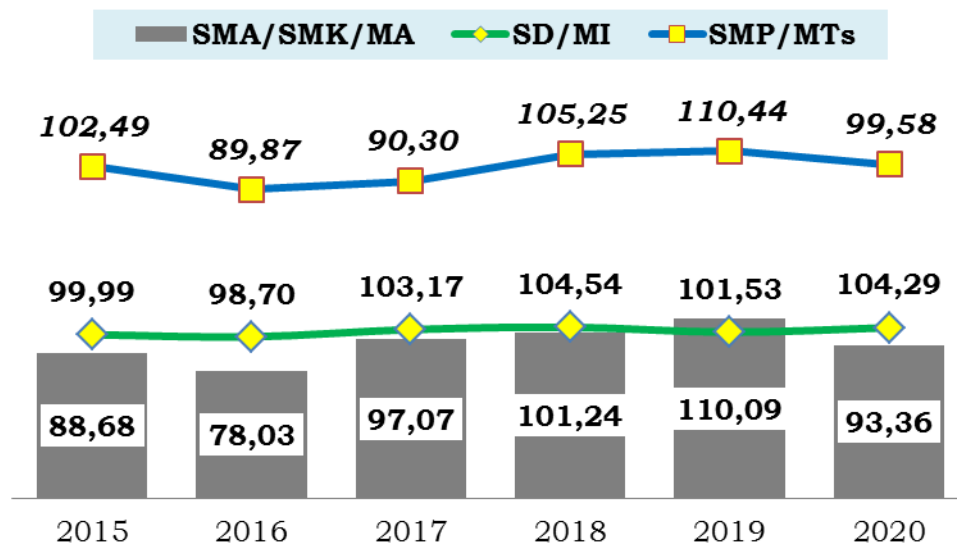
Data pada Gambar 2.49 di atas menunjukkan rasio ketersediaan guru per murid TK. Dimana, angka rasio ketersediaan guru per murid TK pada Tahun 2015 sebesar 8,97; Tahun 2016 menjadi sebesar 7,94; kemudian menjadi sebesar 17,89 Tahun 2017; Tahun 2018 rasio ketersediaan Guru Per Murid TK sebesar 12,45; dan Tahun 2019 sebesar 12,15. Dimana Tahun 2019, jumlah guru sebanyak 523 orang; dan siswa



sebanyak 6.512 orang. Selanjutnya rasio ketersediaan guru per murid Paud sebesar 9.

## 2) Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh SDM berkualitas. Pendidikan merupakan cara meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan akses seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, melalui ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup Pendidikan, dan penyerapan pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK menunjukkan proporsi anak sekolah secara gender pada jenjang tertentu. Data APK Kabupaten Poso Menurut Jenjang Pendidikan periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.50 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.50**  
**Angka Partipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Merujuk pada data Gambar 2.50 di atas, APK Kabupaten Poso mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA. Tahun 2015, APK SD/MI Kabupaten Poso sebesar 99,99; Tahun 2016 sebesar 98,70; menjadi sebesar 103,17 Tahun 2017; Tahun 2018 menjadi sebesar 104,54; dan Tahun 2019 sebesar 101,53 kemudian ditahun 2020 sebesar



104,29. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 102,49; Tahun 2016 sebesar 89,87; Tahun 2017 menjadi sebesar 90,30; Tahun 2018 sebesar 105,25; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 110,44 dan ditahun 2020 sebesar 99,58. Selanjutnya, jenjang SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 sebesar 88,68; Tahun 2016 sebesar 78,03; menjadi sebesar 97,07 tahun 2017; Tahun 2018 sebesar 101,24; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 110,09 dan pada tahun 2020 menjadi 93,26 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut melebihi nilai 100, menunjukkan banyaknya siswa yang bersekolah bukan pada usia sekolahnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui OPD terkait, khusus Dinas Pendidikan. Data Perbandingan APK Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Tabel 2.31 sebagai berikut.

**Tabel 2.31**  
**Angka Partipasi Kasar (APK) Kabupaten Poso,**  
**Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2015-2020**

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>SD/MI</b>						
Poso	99,99	98,70	103,17	104,54	101,53	104,29
Sulawesi Tengah	107,28	118,52	104,19	105,28	105,13	103,95
Nasional	108,00	106,44	106,44	103,54	103,50	106,32
<b>SMP/MTs</b>						
Poso	102,49	89,87	90,30	105,25	110,44	99,58
Sulawesi Tengah	90,73	107,08	91,86	92,88	90,63	91,98
Nasional	106,72	101,05	101,05	100,86	101,32	92,06
<b>SMA/SMK/MA</b>						
Poso	88,68	78,03	97,07	101,24	110,09	93,36
Sulawesi Tengah	82,87	75,47	84,85	83,53	87,35	88,42
Nasional	81,95	76,45	81,95	88,55	92,92	84,53

Sumber : BPS, Tahun 2026-2021 (diolah kembali)

Berdasarkan data pada Tabel 2.31 di atas, selanjutnya dibandingkan dengan APK Sulawesi Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2020, APK jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Poso lebih rendah dibanding APK Nasional (106,32), namun lebih tinggi dri rata-rata Provinsi Sulawesi yakni sebesar (103,95). Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, APK Kabupaten Poso lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dimana masing-masing sebesar 91,98dan sebesar 92,06. untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 88,42 dan sebesar 84,53.



Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi tengah, menunjukkan APK SD/MI Tahun 2020, Kabupaten Poso berdasarkan data berada pada posisi peringkat ke-9 yakni sebesar 104,29. APK SD/MI tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 108,95. Untuk jenjang SMP/MTs Kabupaten Poso berada pada peringkat ke-5 dengan APK SMP/MTs sebesar 99,58, pada jenjang ini Kabupaten Sigi tertinggi yaitu 111,82, dan terendah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 80,23. Sedangkan jenjang APK SMA/MA/SMK/Paket C tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 111,55, dan terendah Kabupaten Buol sebesar 75,80, sementara Kabupaten Poso berada pada urutan ke-2. Data perbandingan APK pada semua jenjang Tahun 2020 Menurut Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 2.32 sebagai berikut.

**Tabel 2.32**  
**Capaian APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK**  
**Kabupaten/Kota Se-Sulteng Tahun 2020**

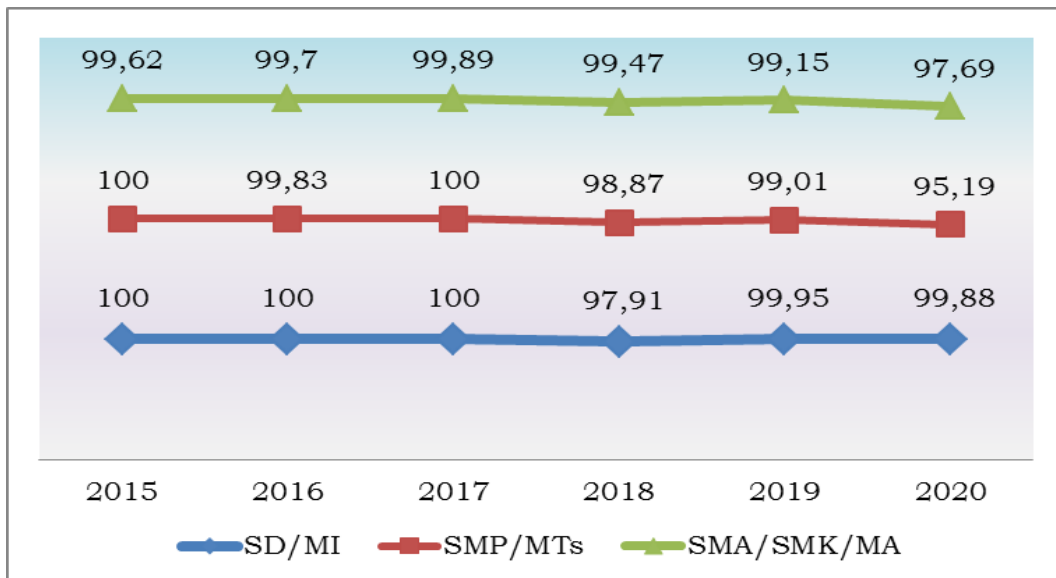
No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK /MA
1	Banggai Kepulauan	104,55	90,03	88,31
2	Donggala	106,91	93,90	78,43
3	Poso	104,29	99,58	93,36
4	Banggai	106,08	89,77	83,23
5	Buol	108,70	90,84	75,80
6	ToliToli	97,20	90,27	85,29
7	Morowali	108,95	103,84	81,03
8	Parigi Moutong	99,80	88,88	83,74
9	Tojo Una-Una	107,91	80,23	88,62
10	Sigi	105,10	111,82	86,70
11	Banggai Laut	88,16	102,79	81,97
12	Morowali Utara	99,72	103,64	85,52
13	Kota Palu	104,81	91,85	111,55

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

### **3) Angka Pendidikan yang ditamatkan**

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Meningkatnya APT pada semua jenjang pendidikan setiap tahun ajaran menunjukkan terjadinya peningkatan masyarakat yang menamatkan pendidikannya. Data APT menurut jenjang pendidikan periode Tahun 2015-2020 di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar berikut.





Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.51**  
**Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

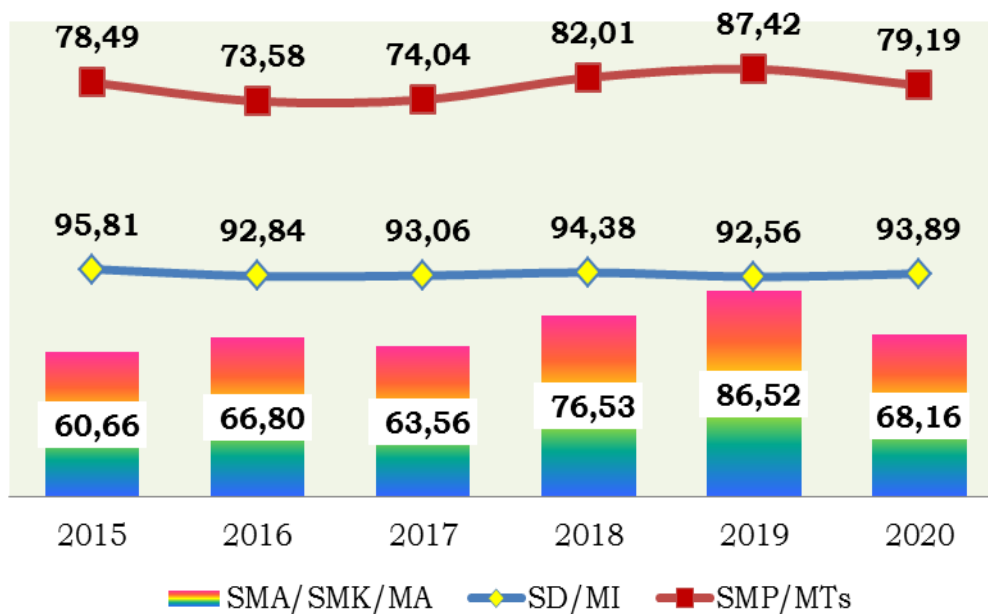
Sebagaimana data pada Gambar 2.51 di atas, APT pada jenjang pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sebesar 100 persen; pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) sebesar 100 persen; pendidikan SMA/SMK/MA (usia 16-18 tahun) sebesar 99,62 persen. Hingga pada Tahun 2020, data APT untuk pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) sebesar 99,88; pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) sebesar 95,19 persen; pendidikan SMA/SMK/MA (Usia 16-18 tahun) sebesar 97,69 persen.

#### 4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan, dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APM jenjang SMP/MTs sederajat mengalami kenaikan. Namun, APM ini masih harus ditingkatkan, karena APM relatif kecil jika dikaitkan dengan Program Wajib 9 tahun. Data memperlihatkan terus tumbuhnya kesempatan belajar sehingga mencapai angka tertinggi pada pendidikan SD. Perluasan SD ini secara langsung memberi pengaruh positif terhadap perluasan kesempatan pada jenjang-jenjang lebih tinggi. Banyaknya penduduk yang berstatus masih sekolah pada kelompok usia sekolah tertentu merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan penduduk atau

kesempatan penduduk dalam memperoleh pendidikan. Besarnya daya serap penduduk usia sekolah dalam pendidikan sebagai gambaran tingkat partisipasi penduduk usia sekolah. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan lebih tinggi persentase yang melanjutkan masih sedikit.

Data APM jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Poso Tahun 2015 sebesar 95,81 persen; jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 78,49 persen; dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 60,66 persen. Sedangkan untuk Tahun 2020 sebesar 93,89 persen jenjang pendidikan SD/MI; jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 79,19 persen; dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 68,16 persen. Data APM menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Poso secara lengkap terdapat pada Gambar 2.52 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.52**  
**Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Peningkatan SDM diutamakan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Ketersediaan fasilitas pendidikan, sarana maupun prasarana pendidikan turut meningkatkan mutu pendidikan dan akhirnya menghasilkan SDM berkualitas. Data Perbandingan APM Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan periode Tahun 2015-2020 terdapa pada Tabel 2.33 sebagai berikut.



**Tabel 2.33**  
**Perbandingan Angka Partipasi Murni (APM)**  
**Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah**  
**Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015-2020**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>SD/MI</b>						
Poso	95.81	92.84	93.06	94,38	92,56	93,89
Sulawesi Tengah	92.35	92.48	92.74	92,82	93,17	93,24
Nasional	93,53	93,38	93,73	91,94	92,88	97,69
<b>SMP/MTs</b>						
Poso	78.49	73.58	74.04	82,01	87,42	79,19
Sulawesi Tengah	71.10	71.25	72,16	73,2	73,82	74,42
Nasional	80,76	81,01	76,29	75,57	77,21	80,12
<b>SMA/SMK/MA</b>						
Poso	60.66	66.80	63.56	76,53	86,52	68,16
Sulawesi Tengah	63.32	63.61	63,8	64,25	64,66	65,02
Nasional	57,15	59,1	61,2	67,14	60,84	61,25

Sumber : BPS, Tahun 2021 (diolah kembali)

Merefensi data pada Tabel 2.33 di atas, APM Kabupaten Poso untuk semua jenjang pendidikan masih berada di atas APM Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Poso berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah, namun di bawah capaian Nasional. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs capaian Kabupaten Poso berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih di bawah rata-rata Nasional, sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten Poso berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Sementara itu, untuk perbandingan APM menurut kabupaten/kota Tahun 2020, dimana APM SD/MI tertinggi di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 98,94 persen, dan terendah Kabupaten Banggai Laut sebesar 88,16 persen. APM SD/MI Kabupaten Poso berada pada posisi ke-5. Sementara itu, APM untuk jenjang SMP/MTs tertinggi Kabupaten Poso Morowali Utara sebesar 84,35 persen, dan terendah Kabupaten Tolitoli sebesar 63,42 persen, sedangkan Kabupaten Poso berada urutan ketiga. Selanjutnya, jenjang SMA/MA/SMK Tahun 2020, capaian APM terendah adalah Kabupaten Tolitoli sebesar 56,76 persen dan yang tertinggi adalah Kota Palu yakni sebesar 74,94. Kabupaten Poso berada pada posisi ke-3. Data perbandingan APM pada semua jenjang Tahun 2020 menurut Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 2.34 sebagai berikut.

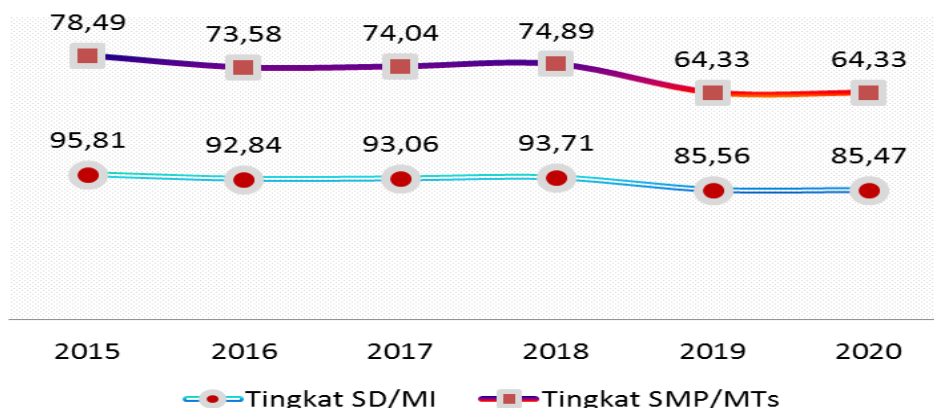
**Tabel 2.34**  
**Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK**  
**Kabupaten/Kota di Sulteng Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK /MA
1	Banggai Kepulauan	98,06	67,86	60,87
2	Donggala	93,38	77,51	60,45
3	Poso	93,89	79,19	68,16
4	Banggai	93,69	73,74	63,94
5	Buol	96,66	75,26	62,14
6	ToliToli	91,68	63,42	56,76
7	Morowali	94,72	73,49	67,54
8	Parigi Moutong	90,75	72,71	66,32
9	Tojo Una-Una	98,94	70,71	63,33
10	Sigi	90,62	79,41	61,59
11	Banggai Laut	88,16	71,46	60,55
12	Morowali Utara	91,05	84,35	70,29
13	Kota Palu	92,50	78,81	74,94

Sumber: BPS, Tahun 2021 (diolah kembali)

### 5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang Pendidikan, dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Data APS menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.53 sebagai berikut.



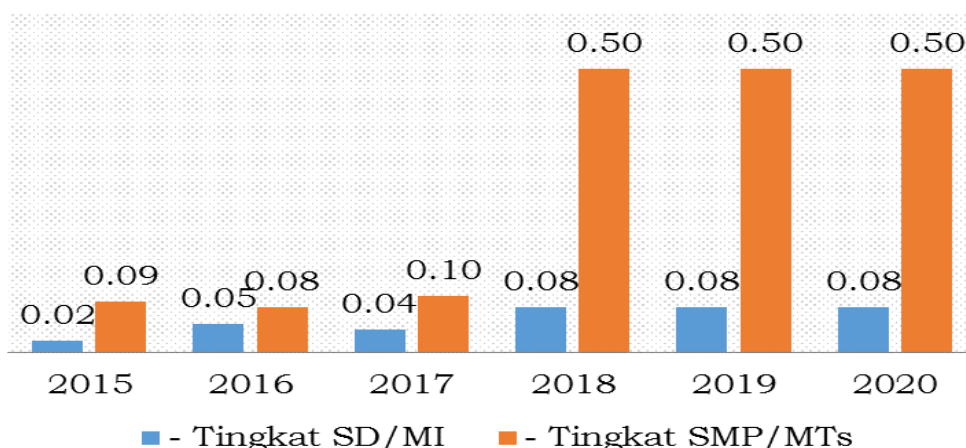
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.53**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI**  
**dan SMP/MTs Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 2.53 di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Poso untuk pendidikan dasar tingkat SD/MI mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2015, APS jenjang pendidikan SD/MI sebesar 95,81 persen, menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 85,56 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 85,47 persen. Selanjutnya, penurunan APS juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2015 sebesar 78,49 menurun hingga tahun 2020 menjadi 64,33 persen.

### 6) Angka Putus Sekolah

Permasalahan dunia pendidikan adalah adanya siswa atau penduduk usia sekolah yang putus sekolah. Putus sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kemampuan anak usia sekolah untuk mengikuti Pendidikan di sekolah, kondisi sosial ekonomi anak usia sekolah tersebut. Dimana, Kabupaten Poso masih terdapat jumlah anak putus sekolah. Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI cenderung meningkat periode Tahun 2015-2019. Tahun 2015, angkat putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Poso sebesar 0,02 persen, dan meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 0,08 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga cenderung meningkat. Pada Tahun 2015, angkat putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,09 persen, dan Tahun 2020 meningkat menjadi 0,50 persen. Data angka putus sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.54 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

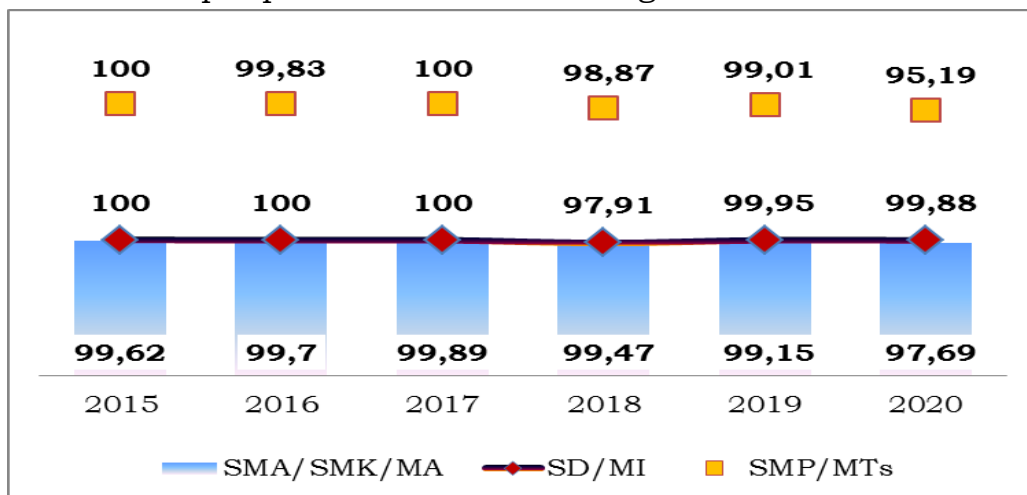
**Gambar 2.54**  
**Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**



### 7) Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan indikator yang menjelaskan dampak yang dicapai, atau hasil yang diraih dalam proses belajar mengajar di sekolah. Angka kelulusan sebagai media monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satu kurun waktu tertentu. Angka kelulusan sebagai tolok ukur melakukan pembenahan atau perbaikan atas seluruh elemen yang memberikan dampak pada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.

Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Poso perjenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2017 mengalami peningkatan kelulusan. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Poso mengalami peningkatan. Angka kelulusan siswa pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Poso dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mencapai hasil yang baik. Dimana, angka kelulusan untuk Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar 100 persen; Tahun 2018 sebesar 97,91; dan Tahun 2019 sebesar 99,95 persen, kemudian ditahun 2020 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,88 persen. Sementara itu, angka kelulusan pada tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan, meski beberapa tahun tahun mengalami fluktuasi berada di bawah 100 persen. Angka kelulusan Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.55 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso tahun 2021 (diolah kembali)

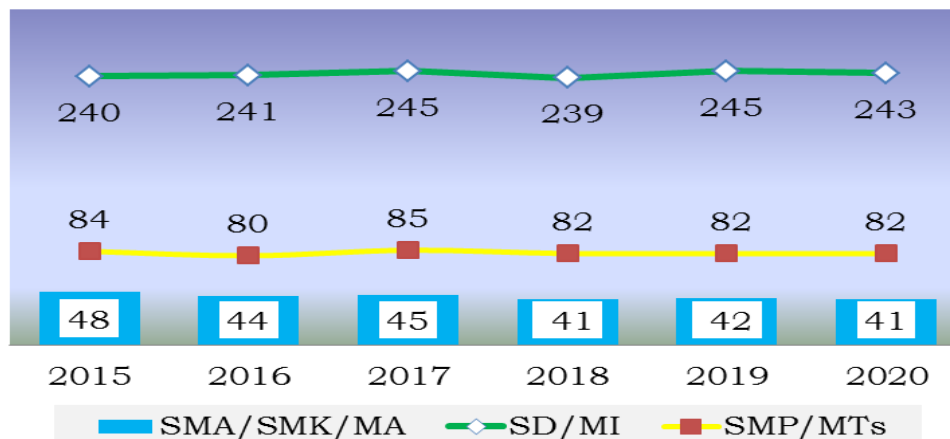
**Gambar 2.55**  
**Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

Pada Gambar 2.55 di atas terlihat jumlah kelulusan siswa pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Poso Tahun 2020 sebesar 99,88

persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka kelulusan sebesar 99,01 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,01 persen. Sementara itu, angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Tahun 2019 sebesar 99,15 persen dan ditahun 2020 sebesar 97,69 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

### 8) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang memenuhi standar menjadi wadah untuk mendidik siswa-siswi menjadi generasi masa depan yang kompetitif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Pemerintah daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Pendidikan secara terus menerus telah meningkatkan pelayanan bidang pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah. Ketersediaan fasilitas sarana pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar pada semua strata pendidikan. Pada Tahun 2020, jumlah Sekolah Dasar (SD/MI) sebanyak 243 sekolah yang tersebar di Kabupaten Poso; sementara untuk jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) sebanyak 82 sekolah; dan jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK/MA) sebanyak 41 sekolah. Data jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.56 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.56**  
**Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

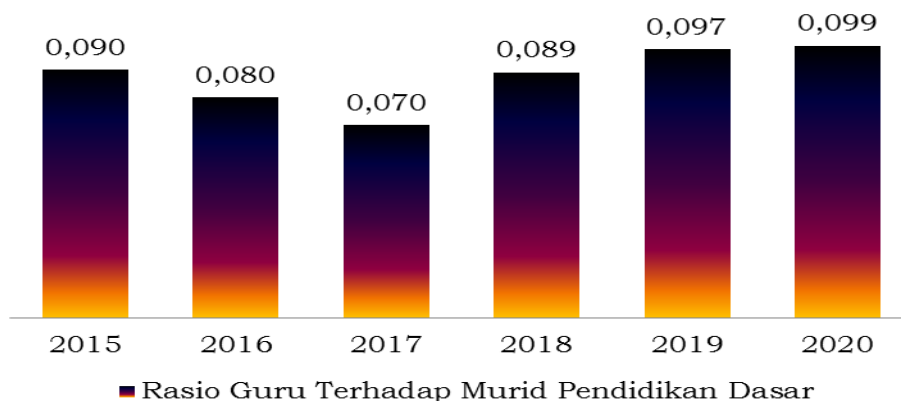
Merujuk pada data Gambar 2.56 di atas, ketersediaan fasilitas sarana pendidikan/gedung sekolah di Kabupaten Poso dari tahun ke tahun meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2015

sebanyak 240 sekolah, hingga Tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 245 sekolah, namun berkurang pada tahun 2020 menjadi 243 sekolah. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2015 sebanyak 84 sekolah, hingga Tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 82 sekolah. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Tahun 2015 sebanyak 48 sekolah; namun sampai Tahun 2019 jumlahnya turun menjadi sebanyak 42 sekolah, juga pada tahun 2020 menurun menjadi 41 sekolah.

### 9) Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa selama periode Tahun 2015-2020, terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, karena rasio jumlah guru yang mengajar sejumlah murid menjadi semakin banyak.

Selama kurun waktu Tahun 2015-2020, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Poso untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI) pada Tahun 2015 sebesar 0,090; Tahun 2016 menjadi sebesar 0,080; Tahun 2017 sebesar 0,070; Tahun 2018 meningkat menjadi 0,089; dan Tahun 2019 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar yakni 0,097, dan pada tahun 2020 sebesar 0,099. Data rasio guru terhadap murid di Kabupaten Poso tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.57 sebagai berikut.

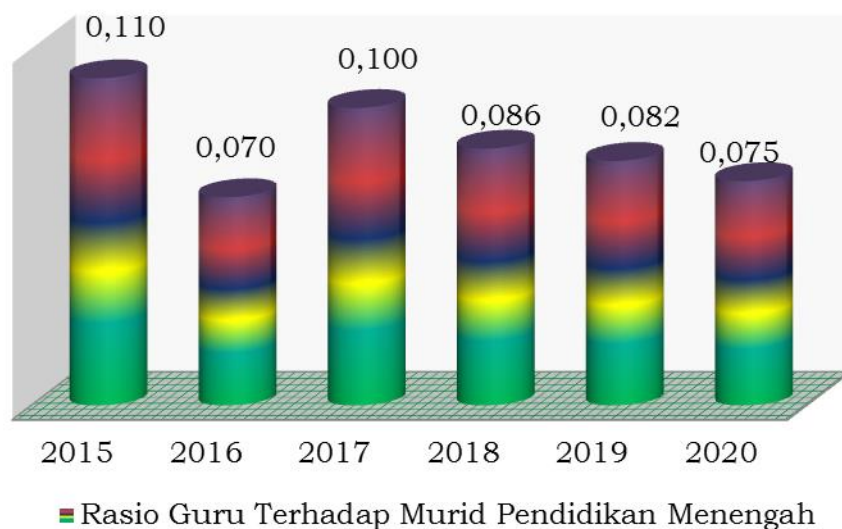


Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.57**  
**Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

### 10) Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa selama tahun 2015 hingga tahun 2020 terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang mengajar sejumlah murid menjadi semakin banyak. Data rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pada periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.58 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.58**  
**Rasio Guru/Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

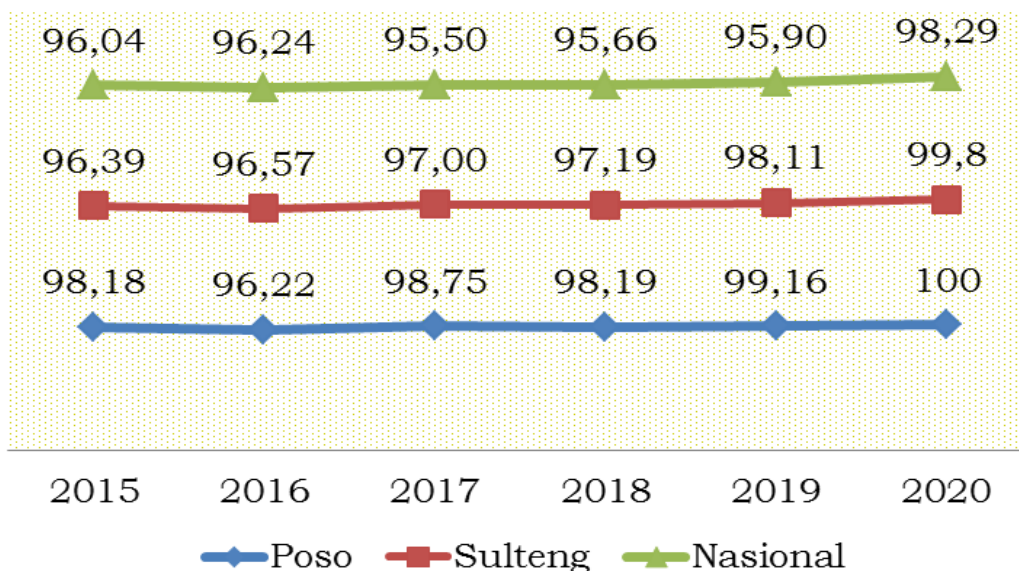
Berdasarkan pada data Gambar 2.58 di atas, selama kurun waktu Tahun 2015-2019, rasio ketersediaan guru terhadap murid Pendidikan menengah di Kabupaten Poso per 10.000 jumlah murid mengalami peningkatan pada Tahun 2015 sebesar 0,110; Tahun 2016 sebesar 0,070; menjadi sebesar 0,100 pada Tahun 2017; Tahun 2018 sebesar 0,086; dan pada Tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,082 poin, juga ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,075.

### 11) Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun

Angka melek huruf (AMH) digunakan untuk menggambarkan

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pengetahuan masyarakat dipengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca tulis ini dibutuhkan untuk mempelajari dan menguasai pengetahuan serta keterampilan atau keahlian lainnya.

AMH merupakan salah satu bagian dari pengukuran keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu daerah, termasuk angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Poso Tahun 2015 sebesar 98,18 persen hingga Tahun 2020 sebesar 100 persen. AMH Kabupaten Poso ini berada di atas AMH Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Data perkembangan AMH Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan Nasional sampai Tahun 2020 terdapat pada Gambar 2.59 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.59**  
**Persentase Penduduk Angka Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**  
**Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020**

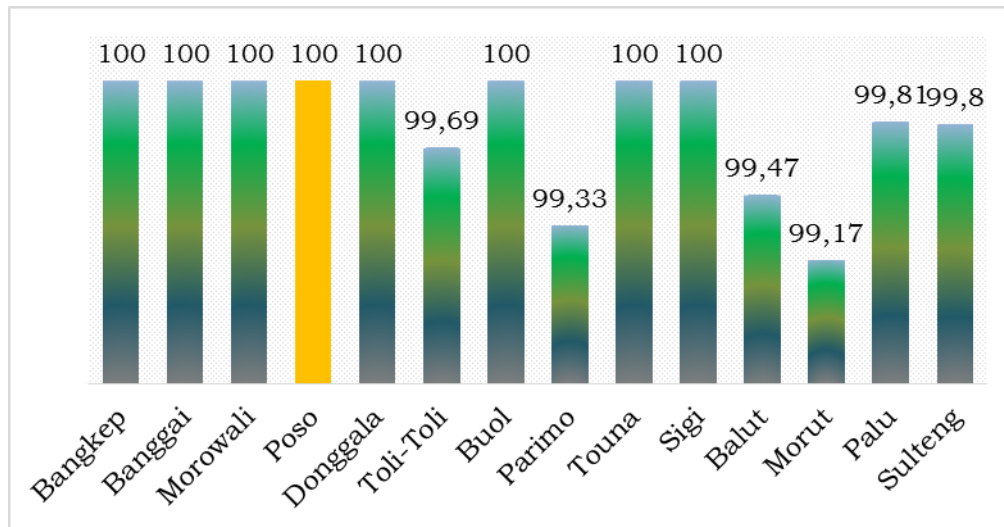
## 12) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan model pengukuran keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu daerah, termasuk RLS, APM, APK dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Data AMH Kabupaten Poso dan





kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.60 sebagai berikut.



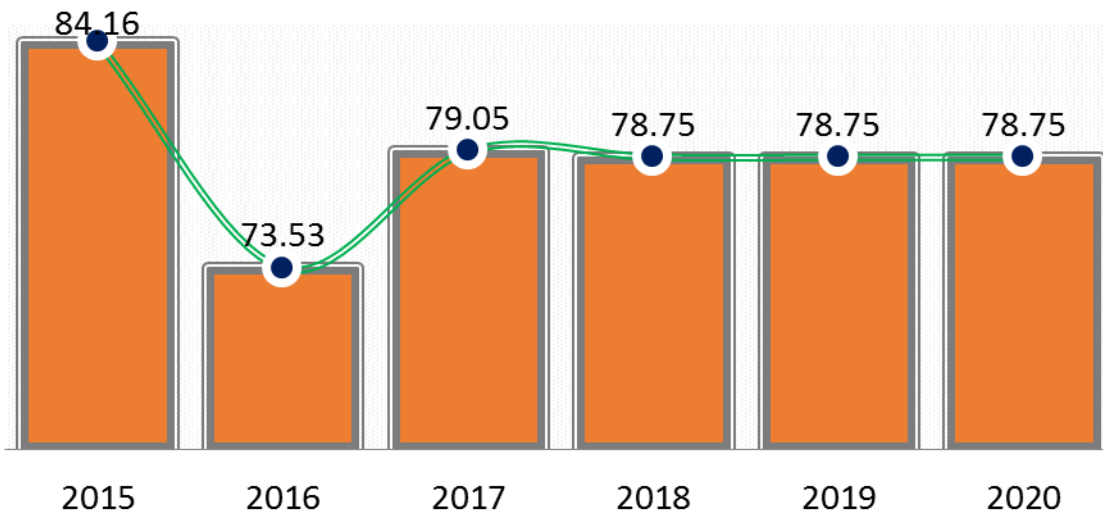
Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.60**  
**Persentase Penduduk Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**  
**Kabupaten Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

Seperti yang terlihat pada Gambar di atas, Persentase Penduduk Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) tahun 2020 berdasarkan perbandingan angka melek huruf kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana Kabupaten Poso Tahun 2020 sejajar dengan beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, Banggai, Donggala, Kabupaten Buol, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi. Sebaliknya beberapa Kabupaten yang capaiannya masih di bawah 100 persen yakni Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Banggai Laut dan Morowali Utara.

### **13) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Guru berkualitas adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga mampu optimal. Data guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Poso secara keseluruhan mengalami penurunan dalam periode Tahun 2015-2020. Dimana, pada Tahun 2015 sebesar 84,16 persen; hingga Tahun 2020 turun menjadi sebesar 78,75 persen. Data Guru Yang Memenuhi Kualifikasi terdapat pada Gambar 2.61 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.61**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

## **B. Kesehatan**

Kesehatan merupakan indikator penting karena ukuran tersebut yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin dari Undang-Undang Kesehatan No.23/1992 (BPS, Meneg Kependudukan/BKKBN, Depkes, DHS; 1997) yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup yang sehat. Peningkatan taraf hidup kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sedangkan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

Pembangunan bidang kesehatan memegang peran penting dalam menyiapkan generasi mendatang yang inovatif dan kreatif. Tanpa pembangunan bidang kesehatan yang baik, tidak mungkin dapat menghasilkan sumberdaya yang andal dan berkualitas. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2019, terus menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi umum pembangunan kesehatan dapat dilihat kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat sebagai berikut.



**1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**

Angka kematian bayi adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Tingkat kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak mengindikasikan adanya kesenjangan dalam memberikan layanan yang standar. Data AKB di Kabupaten Poso disajikan pada Tabel 2.35 sebagai berikut.

**Tabel 2.35**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

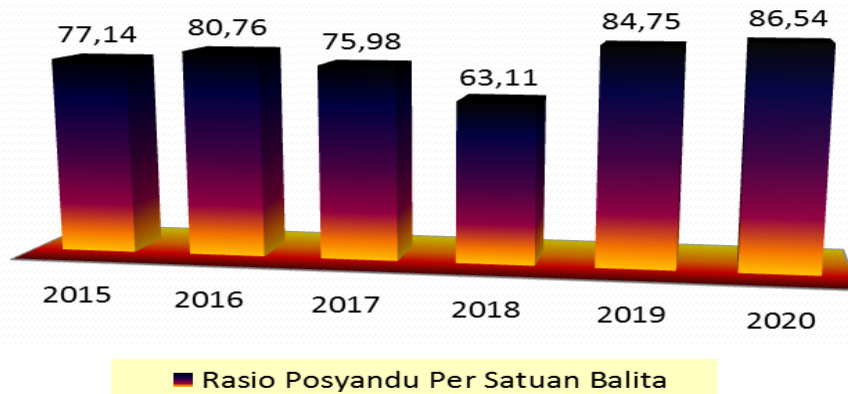
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	14,9/1.000 KH	11,5/1.000 KH	13,6/1.000 KH	15,5/1.000 KH	8,7/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Tahun 2021

Merujuk pada data AKB masih terjadi di Kabupaten Poso dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016, kasus AKB sebesar 14,90/100 KH. Selanjutnya, pada Tahun 2020 menunjukkan kecenderungan menurun menjadi sebesar 8,71/1.000 KH. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kabupaten Poso perlu ditingkatkan untuk menekan angka kematian bayi.

**2) Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemba-ngunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB. Rasio Posyandu persatuan balita didapat dengan membagi jumlah posyandu dengan total balita pada satu tahun tertentu dikali dengan 1.000. Data rasio ketersediaan sarana Posyandu persatuan balita di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapa pada Gambar 2.62 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

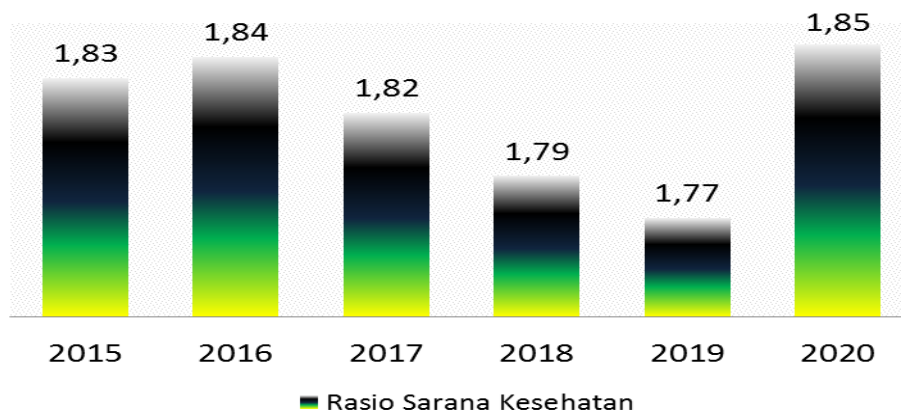
**Gambar 2.62**  
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 2.62 di atas, menunjukkan keberadaan posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Melalui posyandu, diperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan dasar ibu, bayi dan balita. Pelayanan posyandu menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Data Posyandu di Kabupaten Poso pada tahun 2017 dengan rasio posyandu terhadap jumlah Balita sebesar 75,98. Dimana jumlah posyandu pada tahun tersebut sebanyak 280 posyandu dengan jumlah balita sebanyak 24.124 orang. Angka rasio tersebut sedikit mengalami penurunan dibanding Tahun 2015 sebesar 77,15.- dengan jumlah posyandu pada tahun tersebut sebanyak 268 posyandu dengan jumlah balita sebanyak 23.100 balita. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah balita yang terdata di Kabupaten Poso sebanyak 3.351 jiwa, dimana rasio Posyandu per satuan balita menjadi sebesar 84,75. Kemudian pada tahun 2020 rasio posyandu persatuan balita sebesar 86,54.

### **3) Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk**

Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes merupakan sarana pelayanan penunjang kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes maka semakin memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Poso telah menyentuh sampai ke pelosok desa terpencil. Layanan kesehatan di Kabupaten Poso hingga tahun 2019

terdiri dari; Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes. Secara keseluruhan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Poso hingga tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. peningkatan di jumlah sarana kesehatan yang tersedia sebanyak 24 Puskesmas, 284 Posyandu dan polindes sebanyak 145 tahun 2019 dengan angka rasio sebesar 0,18 dengan jumlah penduduk sebanyak 256.393 jiwa. Selanjutnya ditahun 2020 Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk sebesar 1,85 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Poso yang lebih rendah dari proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Poso kurun tahun 2011-2019. Untuk lebih jelasnya perkembangan rasio sarana kesehatan per penduduk dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.63 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.63**  
**Rasio Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Poso, terlihat Puskesmas pada Tahun 2020 rasionya sebesar 0,10. Sementara itu, ketersediaan Polindes mengalami peningkatan di tahun 2020 mejadi sebesar 145 jika dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 143 dengan rasio terdahap jumlah penduduk sebesar 0,59. Secara keseluruhan jumlah sarana kesehatan mengalami peningkatan di Kabupaten Poso dalam kurun waktu 6(enam). Lebih jelasnya Data mengenai ketersediaan sarana kesehatan menurut jenisnya per jumlah penduduk di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel 2.36 sebagai berikut.





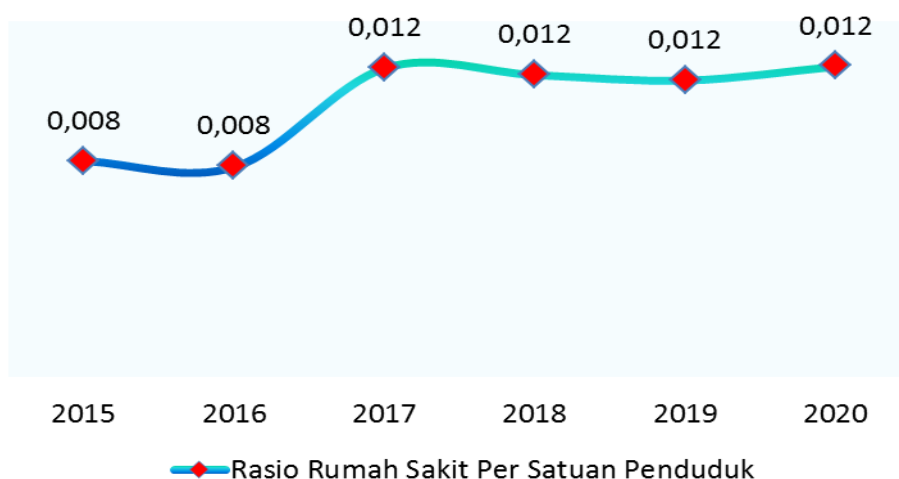
**Tabel 2.36**  
**Ketersediaan Sarana Kesehatan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Sarana Kesehatan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Puskesmas	23	23	24	24	24	24
Posyandu	268	280	280	283	284	284
Polindes	141	141	143	143	145	145
Total Sarana Kesehatan	432	444	447	450	453	453
Jumlah Penduduk	235.567	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
<b>Rasio Puskesmas</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
<b>Rasio Posyandu</b>	1,14	1,16	1,14	1,12	1,11	1,16
<b>Rasio Polindes</b>	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,59
<b>Rasio Sarana Kesehatan</b>	1,83	1,84	1,82	1,79	1,77	1,85

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka tahun 2016-2021 (diolah kembali)

#### 4) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, berarti semakin mudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 memiliki 2 (dua) Rumah Sakit. Data rasio ketersediaan Rumah sakit per penduduk Kabupaten Poso dari tahun 2015-2020 tersaji pada Gambar 2.64 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

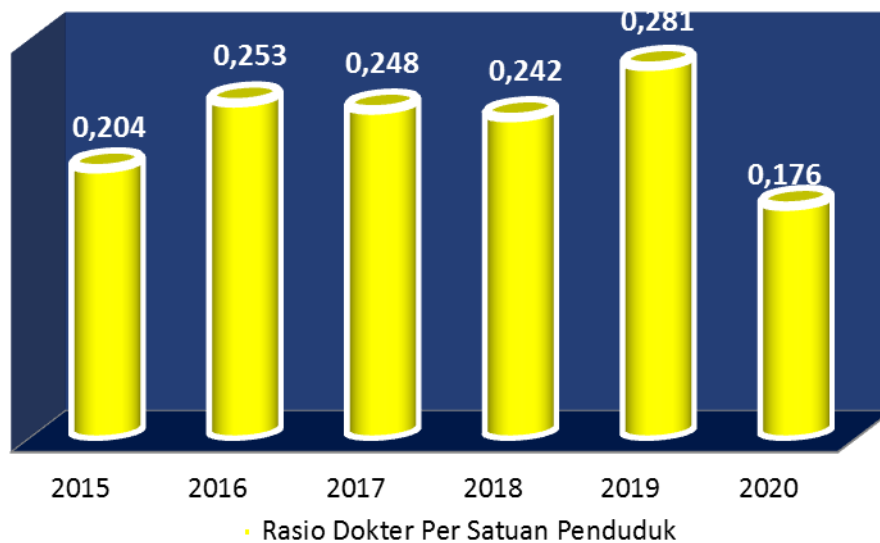
**Gambar 2.64**  
**Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk**  
**Di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**



Merujuk pada data Gambar 2.64 di atas menunjukkan Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Poso tahun 2015 mencapai 0,008. Artinya, untuk 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Poso pada Tahun 2015 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,008. Angka tersebut cenderung stagnan hingga Tahun 2016 tetap sebesar 0,008 per 1.000 penduduk. Selanjutnya, Tahun 2019 rasio rumah sakit per jumlah penduduk sebesar 0,012 dan ditahun 2020 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Poso sebesar 0,012. Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan jumlah rumah sakit yang tersedia di daerah ini. Kenaikan rasio ketersediaan rumah sakit per penduduk di Kabupaten Poso tersebut, sejalan dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Posyandu, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya semakin dapat merata dan terjangkau masyarakat secara lebih luas.

#### **5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan dokter terhadap penduduk suatu daerah. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana kondisi idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Berbicara mengenai kesehatan suatu daerah tentu tak lepas dari beberapa jumlah tenaga dokter yang tersedia di daerah tersebut. Semakin banyak tenaga dokter yang tersedia, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan bagi masyarakat semakin mudah diakses. Tahun 2020, jumlah dokter di Kabupaten Poso adalah 72 orang tenaga dokter. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dimana jumlah dokter dua tahun sebelumnya hanya sebanyak 61 dokter. Data rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.65 sebagai berikut.



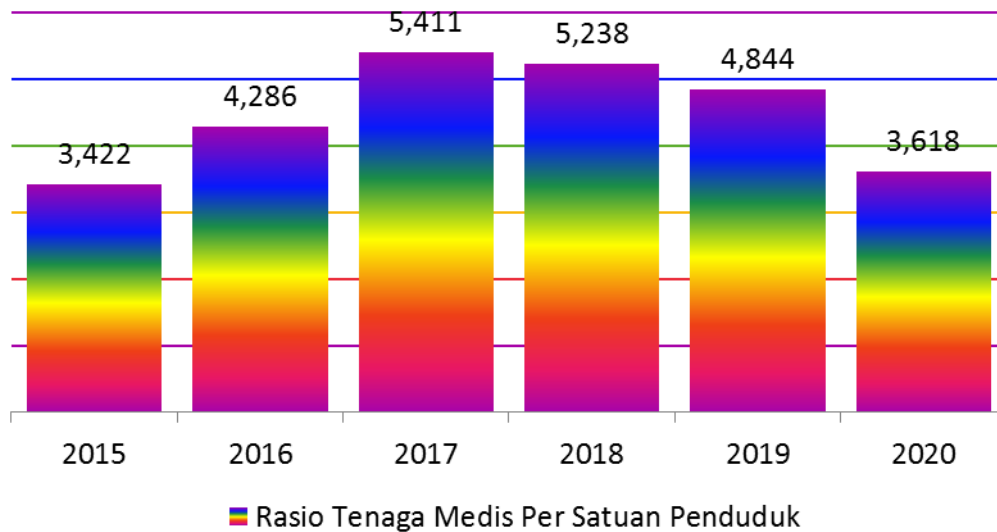
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.65**  
**Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 2.65 di atas, rasio ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Poso periode 6 (enam) tahun terakhir relatif mengalami peningkatan. Data jumlah dokter di Kabupaten Poso pada tahun 2019 sebanyak 72 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 256.393 jiwa. Sehingga, rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,25 atau meningkat dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,281. Artinya dari jumlah 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,281. Selanjutnya pada tahun 2020 rasio dokter per jumlah penduduk di Kabupaten Poso sebesar 0,176 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

#### **6) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan tenaga dokter juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis. Rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya ketersediaan sumber daya kesehatan di Kabupaten Poso dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata. Data rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Poso terhadap penduduk pada periode Tahun 2015-2020 terlihat pada Gambar 2.66 sebagai berikut.



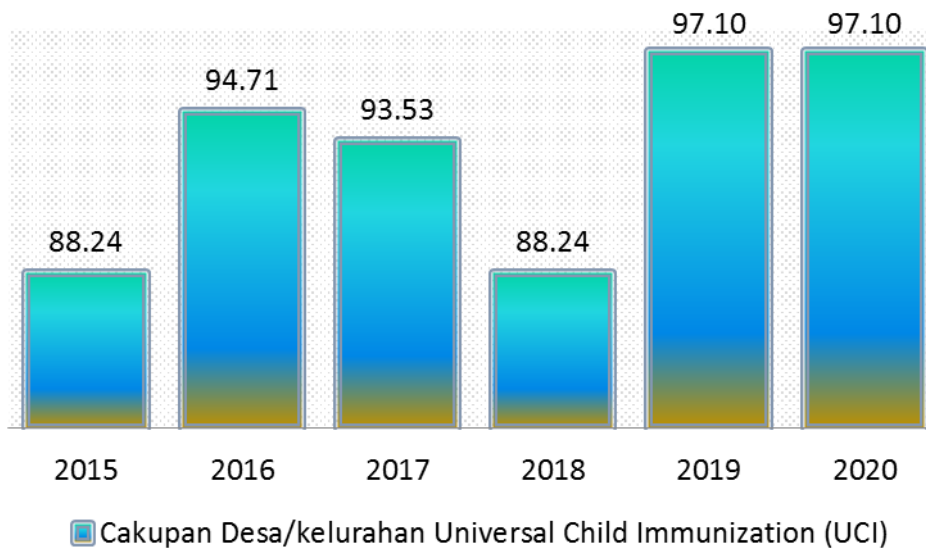
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.66**  
**Rasio Ketersediaan Tenaga Medis Per Penduduk**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Merujuk pada data Tahun 2020 di atas, secara umum rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Poso mencapai 3,618. Ini berarti tersedia 3 (tiga) atau 4 tenaga medis untuk melayani setiap 1.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding dengan Tahun 2018 yang mencapai 5,238.- Secara statistik, rasio ketersediaan tenaga medis pada masing-masing kecamatan semakin merata. Perbedaan jumlah tenaga medis antar kecamatan atau wilayah dipandang tidak begitu signifikan, karena ada beberapa kecamatan yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang sulit dijangkau, sehingga memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap tenaga medis.

#### **7) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

UCI adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Cakupan UCI yang dilaksanakan di Kabupaten Poso melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 88,24 persen. Pada Tahun 2019 sudah meningkat mencapai 97,10 persen, dan ditahun 2020 sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.67 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, tahun 2021

**Gambar 2.67**  
**Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

#### 8) Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani disarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wiayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada periode lima tahun ini cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Poso telah mencapai 100 persen. Jumlah penderita gizi buruk dikabupaten Poso tahun terakhir mengalami penurunan, dimana hingga Tahun 2020, jumlah penderita gizi buruk sebanyak 15 kasus balita. Data cakupan gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.37 sebagai berikut.

**Tabel 2.37**  
**Cakupan Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

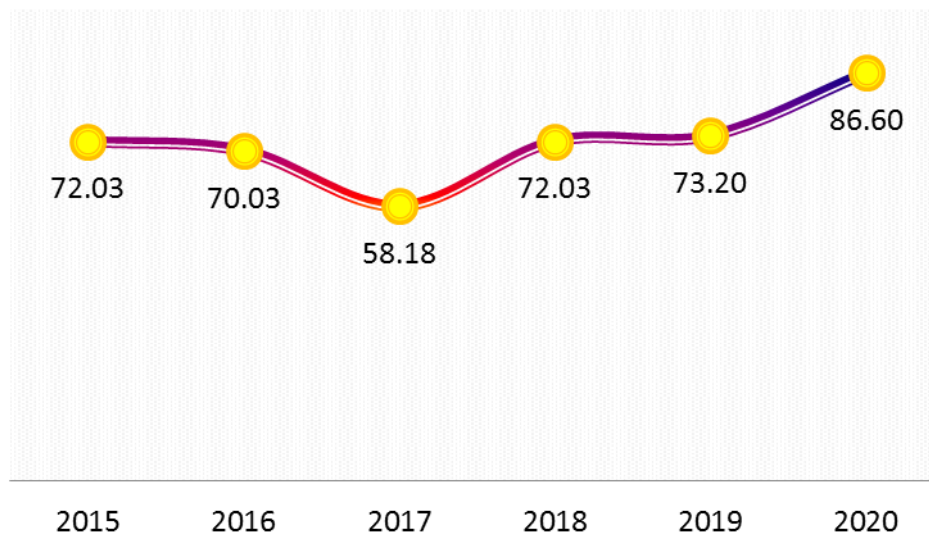
No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penderita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	36	32	27	15	17	15
2.	Jumlah Gizi Buruk	36	32	27	15	17	15
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)



**9) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**

Imunisasi penting diberikan pada anak agar tidak tertular virus campak. Memastikan kesehatan buah hati merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Caranya adalah dengan memberikan vaksin pada anak sesuai usianya. Salah satu vaksin dasar yang harus didapatkan anak adalah imunisasi campak. Perkembangan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak periode Tahun 2015-2020 cenderung berfluktuatif. Capaian pada Tahun 2015 sebesar 72,03 persen, menurun cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 58,18 persen. Namun, kembali meningkat Tahun 2019 sebesar 73,20 sebesar, dan ditahun 2020 sebesar 86,60 persen. Data secara lengkap ditampilkan pada Gambar 2.68 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, tahun 2021

**Gambar 2.68**  
**Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

**10) Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tuberkulosis (TB) yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Jika melihat data WHO tahun 2019 menyebutkan, jumlah estimasi kasus TB di Indonesia sebanyak 845.000 orang. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebanyak 843.000 orang. Ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang 60 persen dari seluruh kasus TB dunia. Data jumlah



penderita TB di Kabupaten Poso sebanyak 203 orang pada Tahun 2019, kemudian ditahun 2020 kasus TBC yang tercatat terjadi sebanyak 38 kasus, sehingga tingkat prevalensi menurun sangat signifikan menjadi 15,52. Data peenderita TB secara lengkap terdapat pada Tabel 2.38 sebagai berikut.

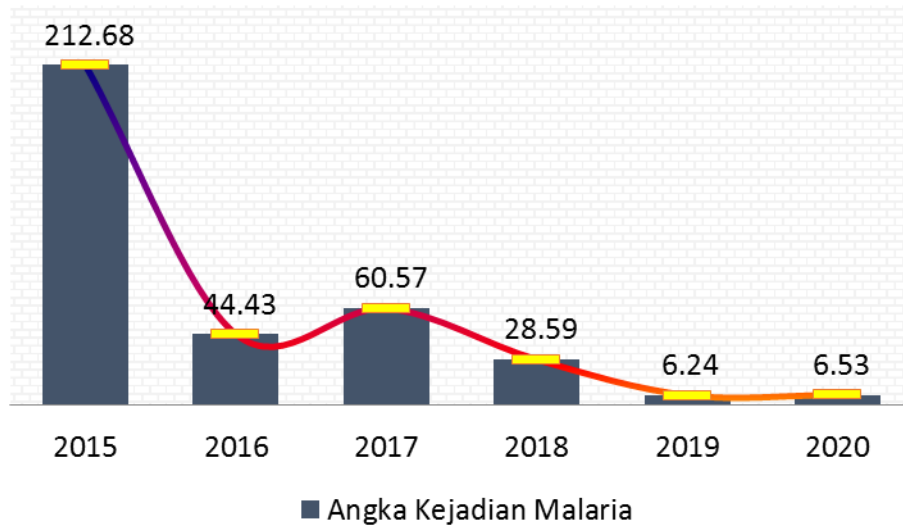
**Tabel 2.38**  
**Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Poso tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus TBC	354	312	331	227	203	38
2	Total Penduduk	235.567	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
	Tingkat Prevalensi	150,28	129,56	134,56	90,15	79,18	15,52

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

### **11) Angka Kejadian Malaria**

Sejarah malaria di Indonesia dimulai pada era 1900-an ketika jumlah penderita mencapai 30 juta orang dan menyebabkan kematian 120.000 orang. Ada 24 spesies nyamuk *Anopheles* sp sebagai pembawa penyakit dan ada lima jenis parasit penyebab, yaitu *Plasmodium falciparum*, *vivax*, *malariae*, *ovale* dan *knowlesi* yang terbaru. Situasi malaria di Indonesia menunjukkan masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria. Daerah tersebut terutama meliputi Papua, Papua Barat, dan NTT. Pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari malaria pada 2030. Salah satu upaya mencapai target itu ditentukan oleh efektivitas pengobatan. Pengobatan efektif artinya pemberian *artemi-sinin-based combination therapies (ACT)* pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis dalam tiga hari. Angka kejadian malaria per 100.000 penduduk di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.69 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.69**  
**Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 2.69 di atas, data angka kejadian malaria per 100.000 penduduk di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sangat tinggi, yakni mencapai 212,68 dengan jumlah kasus sebanyak 501 kasus. Namun setelah Tahun 2015, pemerintah Kabupaten Poso berhasil menurunkan kasus malaria sangat signifikan menjadi 6,24 kejadian dengan total kasus pada Tahun 2019 hanya sebanyak 16 Kasus. Dan ditahun 2020 sebesar 6,53 angka kejadian malaria per 100.000 penduduk Kabupaten Poso.

## **12) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi**

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sama sekali. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menangani HIV/AIDS. Namun, hanya ada obat yang dapat memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Data per Juni 2020, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 349.883. Selanjutnya, untuk Kabupaten Poso jumlah penderita HIV/AIDS hingga Tahun 2019



sebanyak 94 kasus dengan tingkat prevalensi sebesar 0,0384. Data prevalensi HIV/AIDS secara lengkap terdapat pada Tabel 2.39 sebagai berikut.

**Tabel 2.39**  
**Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi**  
**Kabupaten Poso tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penderita	32	44	30	26	94
2	Total Penduduk	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
	Prevalensi	0,0133	0,0179	0,0119	0,0101	0,0384

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Salah satu langkah penting untuk menghindarkan masyarakat dari penyakit menular HIV/AIDS ini adalah memberikan pengetahuan yang holistik dan komperhensif kepada seluruh masyarakat, terutama penduduk usia 15-24 tahun. Pengetahuan terhadap penyakit HIV/AIDS ini dapat melalui sosialisasi dan media lainnya. Data proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS terdapat pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

**Tabel 2.40**  
**Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki**  
**pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS**  
**Kabupaten Poso tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Paham HIV	1.312	19.343	20.113	668	695	1.600
2	Jumlah Penduduk Usia 15-24	38.085	38.085	39.769	40.609	39.278	37.292
	Proporsi	3,44	50,79	50,57	1,64	1,77	4,29

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan yang konperhensif terkait penyakit ini masih sangat rendah. Kondisi dapat diukur dari jumlah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait masih sangat rendah dan terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman penduduk usia 15-24 akan lebih efektif dan jangkauan yang lebih luas. Dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 15-24 yang diberikan sosialisasi hanya sebanyak 695 jiwa dari total 37.292 penduduk kabupaten poso yang rentan usianya 15-24 tahun.



### **13) Cakupan Puskesmas**

Gambaran lain mengenai akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan adalah tersedianya Puskesmas yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah kecamatan. Semakin tinggi tingkat ketersediaan puskesmas maka semakin tinggi pula tingkat jangkauan puskesmas terhadap masyarakat yang berada jauh dari akses fasilitas kesehatan rumah sakit umum. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Poso tahun 2020 mencapai 126,32 persen. Hal ini menunjukkan ketersediaan Puskesmas di setiap Kecamatan wilayah Kabupaten Poso sudah sangat mencukupi bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas. Data persentase cakupan Puskesmas di Kabupaten Poso tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.41 sebagai berikut.

**Tabel 2.41**  
**Persentase Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	23	23	24	24	24
Jumlah Kecamatan	19	19	19	19	19
Persentase	121,05	121,05	126,32	126,32	126,32

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas persentase Puskesmas terhadap Jumlah Kecamatan di Kabupaten Poso tahun 2020 berada di atas 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelayanan bidang kesehatan masyarakat hingga pelosok kecamatan dan pedesaan sudah berjalan cukup maksimal.

### **14) Cakupan Polindes**

Gambaran lain mengenai akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan adalah tersedianya Puskesmas Pembantu/Polindes yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok dan terpencil di wilayah pedesaan. Semakin tinggi tingkat ketersediaan polindes maka semakin tinggi pula tingkat jangkauan polindes terhadap masyarakat yang berada jauh dari akses fasilitas kesehatan rumah sakit umum dan puskesmas. Ketersediaan polindes di daerah-daerah pelosok dan terpencil sangat membantu upaya peningkatan akses dan derajat kesehatan masyarakat miskin di daerah pelosok dan terpencil. Data persentase ketersediaan Polindes terhadap jumlah desa di Kabupaten Poso tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.42 sebagai berikut.



**Tabel 2.42**  
**Persentase Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa**  
**Kabupaten Poso tahun 2016-2020**

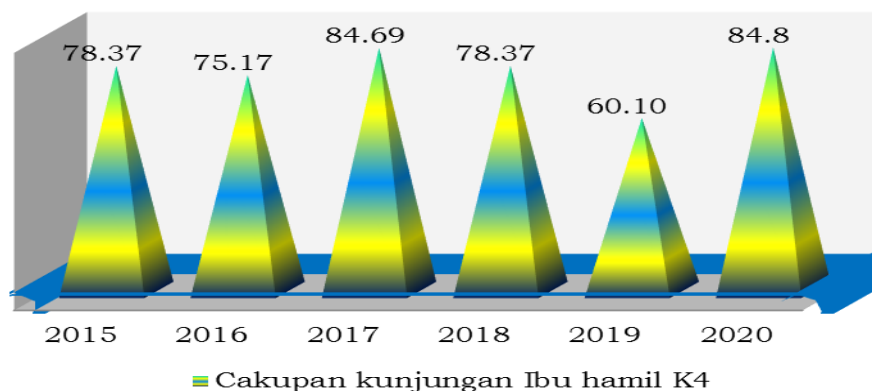
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polindes	141	143	143	145	145
Jumlah Desa	170	170	170	170	170
<b>Persentase</b>	82,94	84,12	84,12	85,29	85,29

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2020 (diolah kembali)

Berdasarkan data pada Tabel 2.42 di atas, cakupan pelayanan Polindes di Kabupaten Poso tahun 2020 mencapai 85,29 persen dengan jumlah polindes sebanyak 145 dari total 170 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa maksimalnya kinerja pelayanan kesehatan ke pelosok perdesaan yang ada di Kabupaten Poso.

#### 15) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 di Kabupaten Poso sebesar 78,37 persen. Menurun pada Tahun 2019 hanya sebesar 60,10, dan ditahun 2020 meningkat sebesar 84,80 persen. Menurunnya Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 ini bias berdampak pada tingkat kesehatan Ibu hami dan bayi yang dikandungnya. Penurun yang terjadi pada tahun 2020 tersebut kemudian berdampak secara tidak langsung pada menurunnya kasus angka kematian bayi di Kabupaten Poso pada tahun yang sama. Data cakupan kunjungan ibu hamil K4 terdapat pada Gambar 2.70 sebagai berikut.

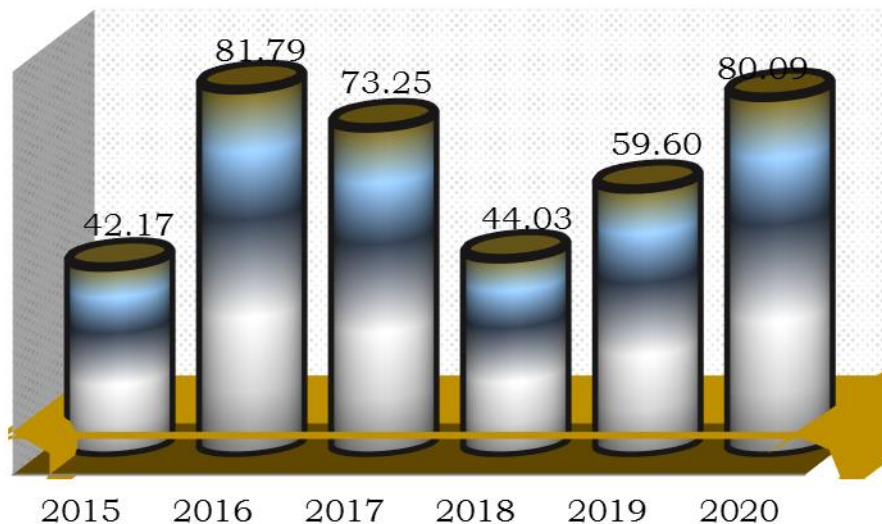


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, tahun 2021

**Gambar 2.70**  
**Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

**16) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tahun 2020 sebesar 80,09 persen, lebih tinggi dari tahun 2019. Data cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin secara lengkap terdapat pada Gambar 2.71 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, tahun 2021

**Gambar 2.71**  
**Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

**17) Stunting**

*Stunting* merupakan suatu kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Data perkembangan angka *stunting* Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.43 sebagai berikut.

**Tabel 2.43**  
**Perkembangan Angka Stunting Kabupaten Poso dan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No	Kab/Kota	Prevalensi TB/U				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sigi	31,6	36,4	43,0	24,6	19,0
2	Tojo Una-Una	31,2	38,4	26,2	26,0	22,7
3	Bangkep	36,5	37,3	40,5	22,6	23,0
4	Palu	33,8	36,8	24,1	17,0	14,0
5	Parimo	23,6	34,4	33,7	21,5	11,4
<b>6</b>	<b>Poso</b>	<b>29,7</b>	<b>35,4</b>	<b>26,2</b>	<b>21,8</b>	<b>16,8</b>



No	Kab/Kota	Prevalensi TB/U				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Morowali	27,4	34,0	34,8	12,0	7,6
8	Banggai	39,4	31,5	31,9	19,9	17,9
9	Balut	34,1	33,4	34,2	20,7	20,8
10	Morut	29,1	36,5	28,5	24,0	17,4
11	Donggala	33,9	39,5	36,0	34,9	16,8
12	Toli-Toli	36,9	36,9	31,7	11,2	9,8
13	Buol	35,6	41,3	34,2	9,4	11,7
	Sulteng	32,0	36,1	32,3	21,4	16,2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, 2021

Berdasarkan pada Tabel 2.43 di atas, dapat diketahui bahwa, dalam waktu tahun 2016 ke 2017, angka stunting Kabupaten Poso mengalami peningkatan. Dimana Tahun 2016, persentase angka *stunting* Kabupaten Poso sebesar 29,70 persen, kemudian tumbuh negatif menjadi 35,4 persen, kemudian pada Tahun 2019, angka *stunting* di Kabupaten Poso menurun menjadi 21,80 persen dan pada tahun 2020 juga menurun menjadi 16,80 persen. Penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Poso menunjukkan kinerja pemerintah daerah melalui urusan kesehatan sudah sangat baik dan berada pada jalur yang positif. Kondisi angka *stunting* di Kabupaten Poso berada di bawah rata-rata *stunting* di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbagi dalam dua bagian yaitu Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Penataan Ruang, sebagai-mana diuraikan berikut. Kondisi terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk; Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4; Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam); Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m); Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar; Persentase rumah tinggal bersanitasi; Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar; Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun; Persentase pembangunan turap di wilayah jalan



penghubung dan aliran sungai rawan longsor; Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik; Rasio Jaringan Irigasi; Persentase penduduk berakses air minum; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Persentase areal kawasan kumuh; Luas Kawasan Kumuh; Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

### 1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan terhambat, apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Data mengenai panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2015-2020 terdapat pada Tabel 2.44 sebagai berikut.

**Tabel 2.44**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**  
**Di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik	700,4	730,4	735,0	733,3	733,5	733,5
Panjang jalan keseluruhan	1.678,1	1.678,1	1.678,1	1.678,1	1.678,1	1.678,1
<b>Proporsi jalan kondisi baik</b>	0,417	0,435	0,438	0,437	0,437	0,437

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Poso mengalami sedikit penurunan, di mana pada Tahun 2020 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 733,5 Km atau dengan rasio 0,437 dari panjang jalan keseluruhan 1.678,1 Km. Data proporsi jalan kondisi baik tersebut mengalami peningkatan jika



dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana total panjang jalan tahun 2015 sepanjang 1.678,1 Km dengan proporsi jalan kondisi baik sepanjang 0,417 Km atau sebesar 700,4 dari total jalan di Kabupaten Poso.

## **2) Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk**

Semakin panjang jalan yang dilalui oleh penduduk, menunjukkan semakin luas daya jangkau masyarakat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Atau sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui oleh penduduk menunjukkan semakin pendek daya jangkau masyarakat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Data rasio panjang jaringan jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.45 sebagai berikut.

**Tabel 2.45**  
**Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk**  
**Di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
Jumlah Penduduk	235.567	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
<b>Rasio Jalan Per Penduduk</b>	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Data rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Poso Tahun 2020 sebesar 0,007, kondisi masih sama dengan tahun sebelumnya.

## **3) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)**

Ketersediaan panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat memberikan indikasi kuat mengenai pergerakan moda transportasi yang





mengangkut orang dan barang/jasa. Semakin panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empat, semakin luas daya jangkau untuk melayani mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat serta barang yang terjadi di suatu wilayah. Sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui kendaraan roda empat, semakin rendah daya jangkau untuk melayani mobilitas masyarakat dan barang. Data rasio panjang jaringan jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Poso selama kurun waktu 2015-2019 terdapat pada Tabel 2.46.

**Tabel 2.46**  
**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

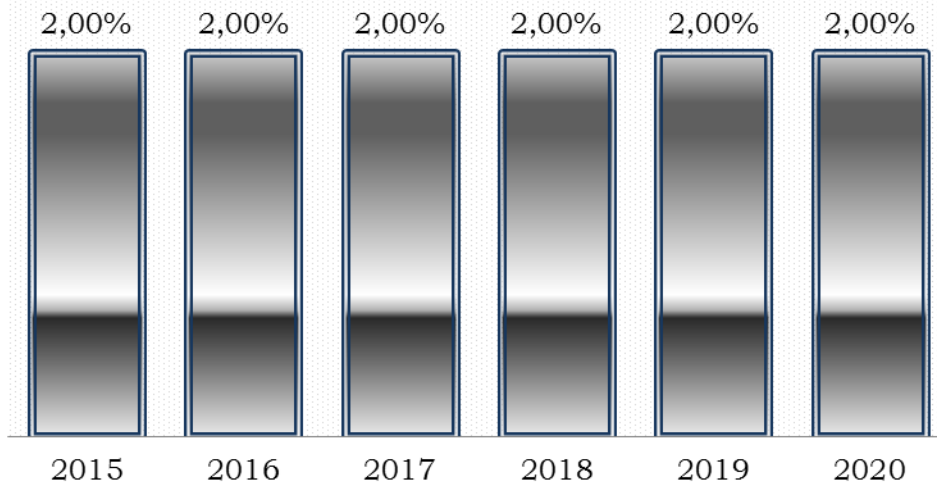
Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	700,4	730,4	735,0	733,3	733,5	733,5
Panjang jalan Kabupaten	1.229,06	1.229,06	1.229,06	1.229,06	1.229,13	1.229,13
<b>Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat</b>	56,99	59,43	59,80	59,66	59,68	59,68

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

Merujuk pada Tabel 2.46 di atas, memperlihatkan kinerja jaringan jalan berdasarkan rasio panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Poso. Angka rasio panjang jalan yang dilalui roda empat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dimana tahun 2015 sebesar 56,99 persen kemudian naik menjadi sebesar 59,88 persen pada tahun 2020. Peningkatan rasio panjang jalan yang dilalui roda empat menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam memacu pemerataan pembangunan di Kabupaten Poso.

#### **4) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)**

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Poso sebagian besar hanya terdapat di Wilayah perkotaan kabupaten Poso. Penataan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan menjadi penting untuk mendukung tata kota yang lebih baik. Dari tahun 2015 s/d tahun 2020 persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (Minimal 1,5 m) hanya sebesar 2 persen. Data persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase terdapat pada Gambar 2.72 sebagai berikut.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Poso, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.72**

**Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

**5) Rasio Jaringan Irigasi**

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Poso pada kurun Tahun 2016-2020 tetap sama, karena tidak ada penambahan panjang jaringan irigasi, baik primer maupun sekunder. Data rasio jaringan irigasi pada Tabel 2.47.

**Tabel 2.47**

**Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2020**

No.	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (meter)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jaringan primer	105.357	105.357	105.357	105.357	105.357
2.	Jaringan sekunder	137.768,10	137.768,10	137.768,10	137.768,10	137.768,10
3.	Luas lahan budidaya	20.968,50	20.968,50	20.968,50	20.968,50	20.968,50
4.	Rasio	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, 2021

Selanjutnya, berdasarkan aspek efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi, juga mengalami perubahan pada Tahun 2017 indeksinya mencapai 48,28 persen, sedangkan di Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 53,69 persen dan hingga tahun 2020 meningkat menjadi 60,70 persen. Data efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.48



sebagai berikut.

**Tabel 2.48**  
**Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Pasokan Irigasi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasok Irigasi per Area	17,75	1,13	1,011	1,011	1,06
2.	Pasok Irigasi Relatif	17,75	0,98	0,67	0,67	0,92
3.	Pasok Air Relatif	17,75	0,98	0,87	0,87	0,92
4.	Indeks Luas Areal	100	48,28	53,69	53,69	60,7
5.	Rancangan Luas Areal	20.968,50	20.968,50	20.968,50	20.968,50	20.968,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, 2021

Selanjutnya, jika data efisiensi dan efektivitas jaringan irigasi dilihat menurut sebaran per kecamatan, dimana Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan memiliki rasio tertinggi untuk dapat memasok irigasi per area. Data efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi menurut kecamatan di Kabupaten Poso pada Tahun 2020 secara lengkap terdapat pada Tabel 2.49 sebagai berikut.

**Tabel 2.49**  
**Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi**  
**Menurut Kecamatan Kabupaten Poso Tahun 2020**

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan		Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air		PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
			Terairi (Ha)	Tanaman (Ha)		Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)				
1	Lage	406	313	1,16	72,89	72,89	72,89	1,16	1	1	83,6
2	Poso Pesisir	934,5	883,5	1,16	204,44	204,44	204,4	1,16	1	1	88
3	Poso Pesisir Selatan	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Poso Pesisir Utara	1,678	1.050	0,39	202,48	202,48	202,5	0,39	0,33	0,33	28,1
5	Pamona Selatan	3.298	2.323	1,16	149,32	149,32	149,3	1,16	1	1	63,2
6	Pamona	1.476,50	718	1,16	75,52	75,52	75,52	1,16	1	1	49,1



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan		Kebutuhan Air	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air	Total Pasok Air	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
			Terairi (Ha)	Tanaman (Ha)								
	Tenggara											
7	Pamona Timur	2.789	1.318	1,16	84,72	84,72	84,72	1,16	1	1	45	
8	Pamona Barat	1.711	699	1,16	101,09	101,09	101,1	1,16	0,88	0,88	36,7	
9	Pamona Puselemba	1.852,50	948	1,16	57,73	57,73	57,73	1,16	1	1	50,6	
10	Pamona Utara	930	434	1,16	71,73	71,73	71,73	1,16	1	1	50,8	
11	Lore Barat	476	385,75	1,16	47,44	47,44	47,44	1,16	1	1	54,4	
12	Lore Selatan	700	567,28	1,16	200,93	200,93	200,9	1,16	1	1	80,1	
13	Lore Tengah	1.029	833,9	1,16	127,73	127,73	127,7	1,16	1	1	57,4	
14	Lore Peore	471	381,7	1,16	49,46	49,46	49,46	1,16	1	1	50,6	
15	Lore Timur	1.269	1.028,40	1,16	289,83	289,83	289,8	1,16	1	1	78	
16	Lore Utara	20.968,50	726	0,9	93,33	93,33	93,33	1,16	0,78	0,78	44,4	
	<b>Jumlah</b>	<b>20.968,50</b>	<b>12.611,53</b>	<b>0,94</b>	<b>114,29</b>	<b>114,29</b>	<b>114,3</b>	<b>1,01</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>53,7</b>	

Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2021

Sementara itu data jumlah kelompok P3A/GP3A di Kabupaten Poso pada Tahun 2020 secara lengkap disajikan pada Tabel 2.50 sebagai berikut.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Kelompok P3A/GP3A Kabupaten Poso Tahun 2020**

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	P3A	GP3A
1.	DI. Kasiguncu	Poso Pesisir	3	1
2.	DI. Kilo	Poso Pesisir Utara	4	1
3.	DI. Tambarana	Poso Pesisir Utara	2	1
4.	DI. Taripa	Pamona Timur	4	1
5.	DI. Panjo	Pamona Selatan	10	1
6.	DI. So'e	Pamona Puselemba	2	1
7.	DI. Ponggee	Pamona Timur	2	1
8.	DI. Uebangke	Pamona Selatan	3	1
9.	DI. Wimbi	Pamona Selatan	3	1
10.	DI. Kamba	Pamona Timur	2	1
11.	DI. Saluopa	Pamona Puselemba	2	1
12.	Subak Amerta (Desa Wera)	Pamona Puselemba	2	1

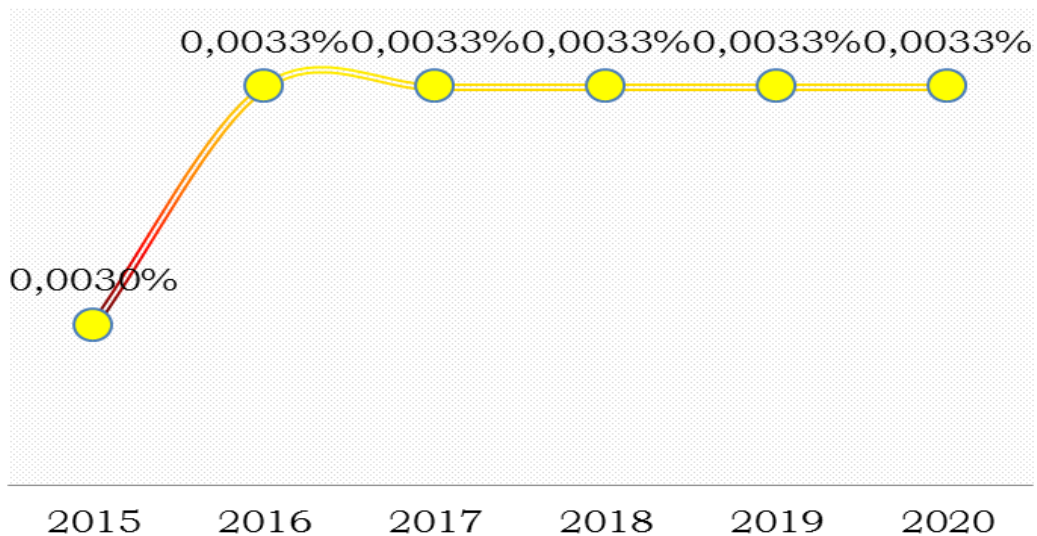


No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	P3A	GP3A
13.	DI. Singkona	Pamona Tenggara	2	1
14.	DI. Kelei	Pamona Timur	2	1

Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2021

#### 6) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Poso pada tahun 2015 sebesar 0,0030 persen, meningkat pada periode Tahun 2015-2020 menjadi 0,0033 persen, yang terdapat pada Gambar 2.73 sebagai berikut.



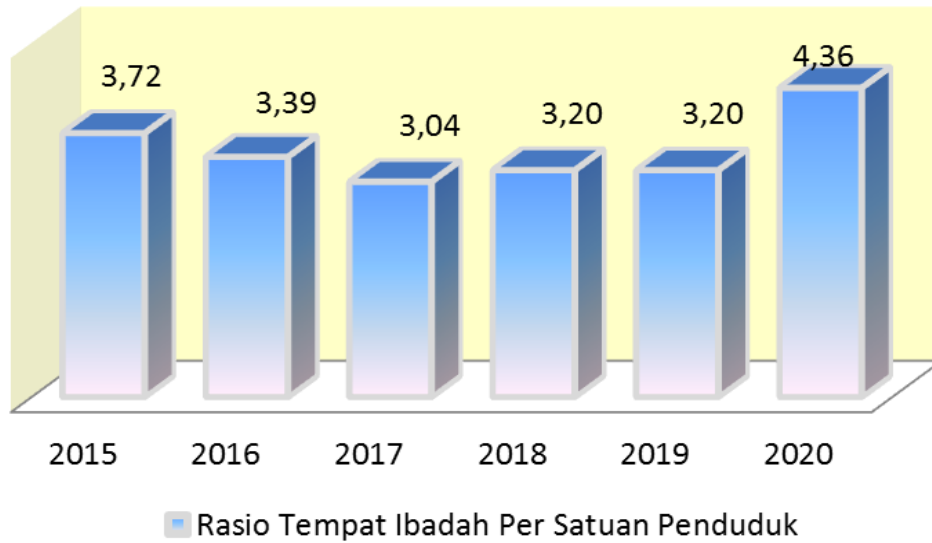
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.73**  
**Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

#### 7) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Angka rasio tempat ibadah persatuan penduduk di Kabupaten Poso menunjukkan menurun setiap tahunnya. Dimana hingga tahun 2020 rasio tempat ibadah per satuan penduduk kabupaten Poso sebesar 4,36. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 1.068 rumah ibadah di Kabupaten Poso. Ada 178 masjid, 74 mushola, 690 gereja Protestan, 26 gereja Katolik dan 100 pura. Masjid terbanyak ada di Kecamatan Poso Pesisir yaitu sebanyak 35, gereja Protestan terbanyak ada di Kecamatan Pamona Pusalemba sebanyak 99, dan pura terbanyak ada di Kecamatan Pamona Barat sebanyak 30. Data rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Poso secara lengkap terdapat pada Gambar 2.74 sebagai berikut.





Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.74**  
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

#### 8) Rasio Ruang Terbuka Hijau

Rasio ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Poso masih sangat rendah. Sampai Tahun 2020, luas ruang terbuka hijau hanya mencapai sebesar 3,9 persen. Data rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Poso per satuan luas wilayah terdapat pada Tabel 2.51 sebagai berikut.

**Tabel 2.51**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%

Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2021

#### 9) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Poso masih sangat rendah, pada Tahun 2016 kurang dari sebanyak 90 izin, dan hingga Tahun 2020 bertambah menjadi sebanyak 129 izin. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh OPD terkait, untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam mengurus IMB. Selain itu, tindakan pengawas-an dan

penindakan yang tepat sangat diperlukan. Data rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten terdapat pada Gambar 2.75 sebagai berikut.



Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.75**  
**Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

#### **D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

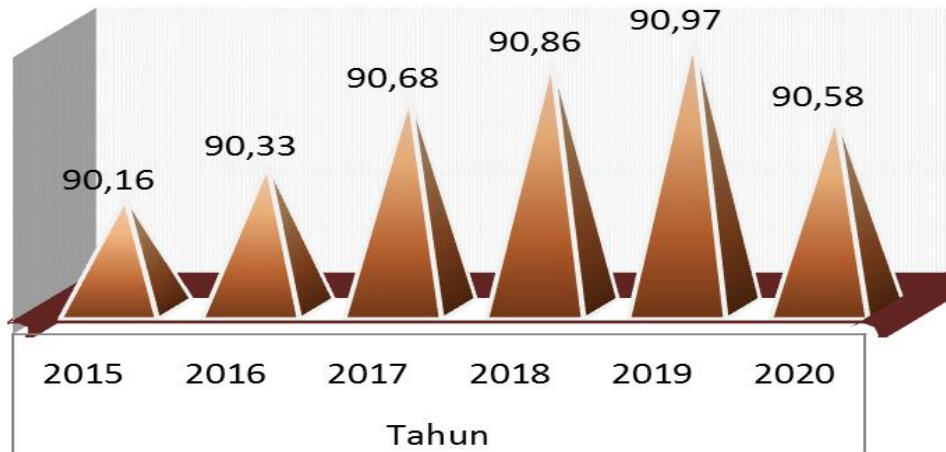
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: 1). Rasio rumah layak huni; 2). Rasio Pemukiman layak huni; 3). Cakupan ketersediaan rumah layak huni; 4). Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; 5). Persentase pemukiman luas wilayah permukiman; 6). Persentase lingkungan pemukiman kumu; 7). Persentase luasan permukiman kumu di kawasan perkotaan; 8). Proporsi rumah tangga kumu perkotaan; dan 9). Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU.

##### **1) Rasio Rumah Layak Huni**

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, namun sangat kecil. Peningkatan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 kurang dari 1 (satu) persen. Pada Tahun 2015, rasio rumah layak huni sebesar 90,16 persen, dan hingga Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 90,97 persen. Kemudian pada tahun 2020 rasio rumah layak huni di Kabupaten Poso sedikit mengalami penurunan menjadi 90,58 persen. Data rasio rumah layak huni di



Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.76 sebagai berikut.

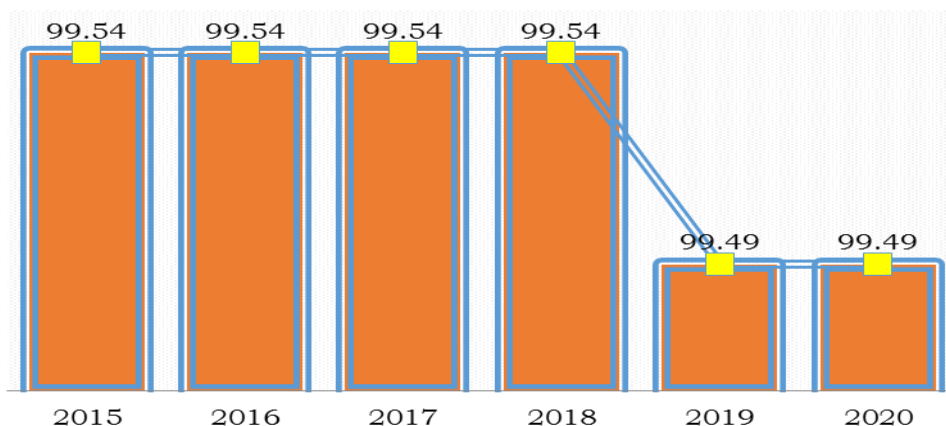


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.76**  
**Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

## 2) Rasio Pemukiman Layak Huni

Pemukiman layak huni sangat dibutuhkan dalam mendukung lingkungan sosial masyarakat yang baik. Rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Poso sudah cukup tinggi. Dimana, pada periode Tahun 2015-2018 sudah mencapai sebesar 99,54 persen. Namun, Tahun 2020 mengalami sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 99,45 persen. Data lengkap rasio permukiman di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.77 sebagai berikut.

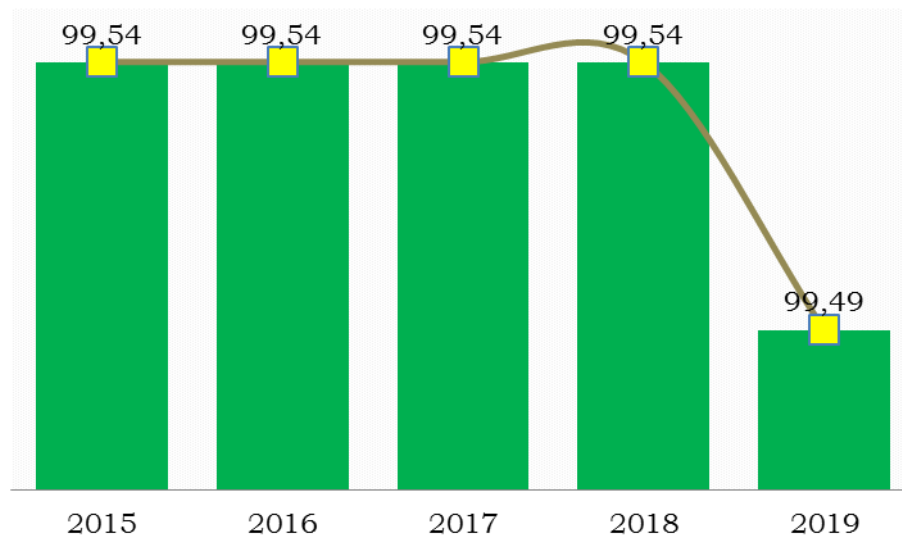


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.77**  
**Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Poso  
Tahun 2015-2020**

### 3) Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang sudah tertata di Kabupaten Poso hingga Tahun 2019 sebesar 99,49 persen, mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Data persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.78 sebagai berikut.



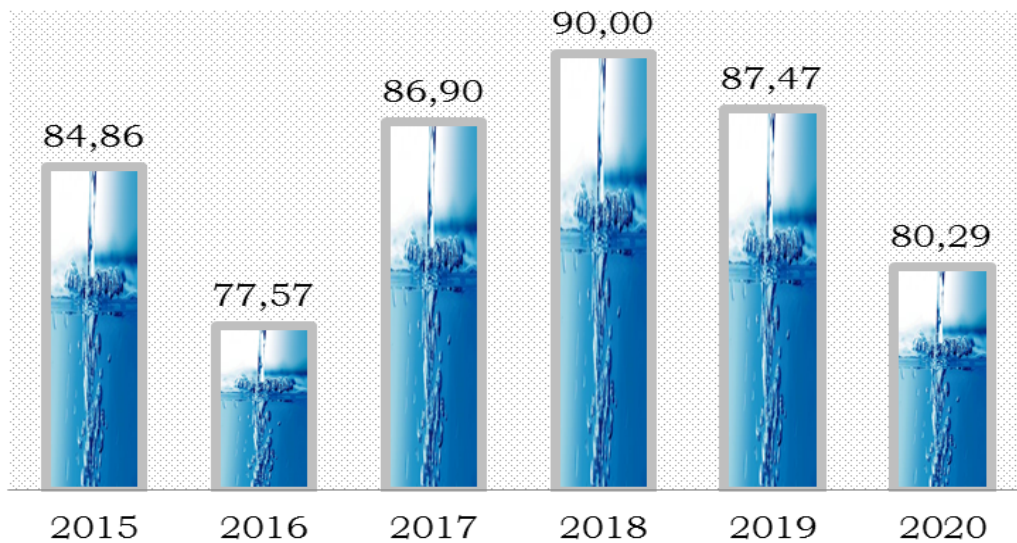
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.78**  
**Persentase Pemukiman yang Tertata Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2019**

### 4) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih bertalian erat dengan uru-san perumahan. Ketersediaan air bersih yang cukup bagi rumah tangga merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi kesehatan masyarakat. Gambaran umum ketersediaan air bersih dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas sumur dan air dalam tanah. Data proporsi rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.79 sebagai berikut.





**Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih**

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.79**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Mereferensi data yang terdapat pada Gambar 2.79 di atas, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Poso terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Poso periode waktu Tahun 2015-2020. Dimana, pada Tahun 2015 sebesar 84,86 persen, dan hingga Tahun 2019 proporsi RT dengan akses air minum bersih mencapai sebesar 87,47 persen, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 80,29 persen. Sedangkan untuk data sumber air baku yang memenuhi persyaratan untuk diminum terdapat pada Tabel 2.52 sebagai berikut.

**Tabel 2.52**  
**Data Air Baku Yang Memenuhi Persyaratan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2020**

No	Nama Sumber Air Baku	Debit (l/dtk)	Lokasi	Jenis Pemanfaatan
1.	Sungai Poso	144.000	Gebangrejo/Poso Kota	PAM POSO
2.	Mata Air Pobai	1,68	Kayamanya/Poso Kota	-
3.	Mata Air Maleogu	0,03	Madale/Poso Kota Utara	Air Bersih
4.	Mata Air Mogumpo	5,5	Petirodongi/Pamona Utara	Air Bersih/Irigasi
5.	Mata Air Untu Tobi	9,5	Tendeadongi/Pamona Utara	Air Minum





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Nama Sumber Air Baku	Debit (l/dtk)	Lokasi	Jenis Pemanfaatan
6.	Sungai Koro Pokaage	8	Sawidago/Pamona Utara	Air Minum
7.	Sungai Angkole	5,5	Sawidago/Pamona Utara	Air Minum
8.	Sungai Silolonge	2,75	Saojo/Pamona Utara	Air Minum
9.	Sungai Uelincu	10	Uelincu/Pamona Utara	Air Minum
10.	Mata air Pinanipia	3	Lena/Pamona Utara	Air Minum
11.	Mata Air Ponombua	2,3	Sangira/Pamona Utara	Air Minum
12.	Mata Air Kamiri	5	Kuku/Pamona Utara	Air Minum
13.	Sungai Koro Pesi	8	Panjoka/Pamona Utara	Air Minum
14.	Mata Air Koro Oga	4	Tonusu/Pamona Puselemba	Air Bersih
15.	Mata Air Lantangkorowu	5	Mayakeli/Pamona Puselemba	Air Minum
16.	Mata Air Owoi Lomo	0,3	Mayakeli/Pamona Puselemba	Air Minum
17.	Mata Air Tamperiwoyu	5	Buyungpondoli/Pamona Puselemba	Air Minum
18.	Sungai Kasimbuncu	8,1	Peura/Pamona Puselemba	Air Minum
19.	Sungai Kawaraboba	5,6	Peura/Pamona Puselemba	Air Minum
20.	Sungai Solonco	10	Dulumai/Pamona Puselemba	Air Minum
21.	Mata Air Ngakai Yosar	2	Leboni/Pamona Puselemba	Air Minum
22.	Mata Air Morano	3	Soe/Pamona Puselemba	Air Minum
23.	Sungai Tongko	3.763,8	Silanca/Lage	Air mInum dan Irigasi
24.	Sungai Tomasa	3931	Pandiri/Lage	Air Minum dan Irigasi
25.	Untu S. Watuawu	79,6	Watuawu/Lage	Air Minum
26.	Mata Air Palemasiku	11,7	Bategencu/Lage	Air Minum
27.	Mata Air Malingindure	10,6	Tongko/Lage	Air Minum
28.	Mata Air Ue Metebe	11,8	Labuan Dago/Lage	Air Minum
29.	Sungai Koro ndompu	8	Sepe/Lage	Air Minum
30.	Mata Air Meleougu Watu	8,42	Tagolu/Lage	Air Minum
31.	Mata Air Untu Majulea	9,4	Toyado/Lage	Air Minum
32.	Sungai Alakai	300	Betue/Lore Peore	Irigasi/ Air Bersih
33.	Sungai Pembangu	281,25	Watutau/Lore Peore	Belum dimanfaatkan
34.	Sungai Pohorea	40	Watutau/Lore Peore	Air Minum
35.	Sungai Siwo	150	Watutau/Lore Peore	Belum dimanfaatkan
36.	Sungai Wanga	200	Wanga/Lore Peore	Irigasi
37.	Sungai Apari	196	Watutau/Lore Peore	Irigasi
38.	Sungai Pehalua	12	Torire/Lore Tengah	Belum



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

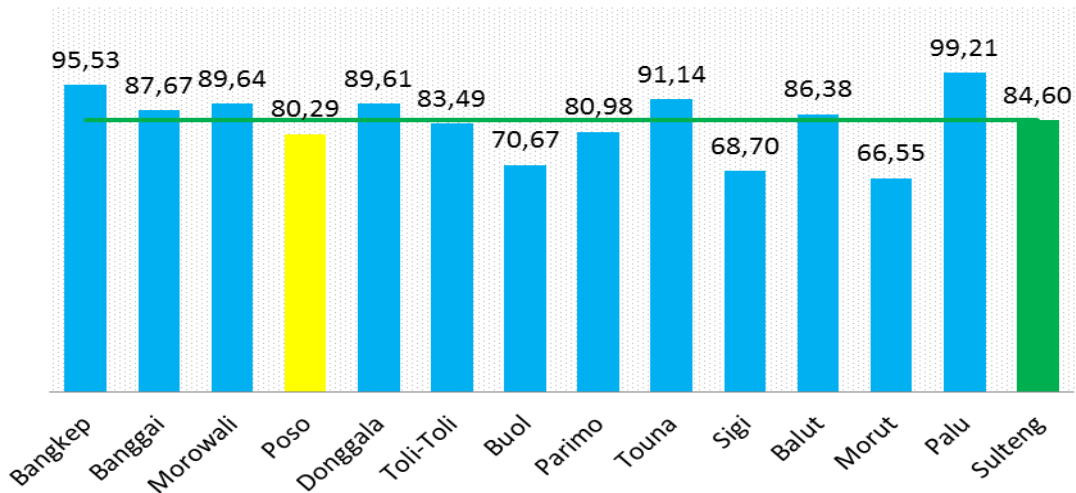
No	Nama Sumber Air Baku	Debit (l/dtk)	Lokasi	Jenis Pemanfaatan
				dimanfaatkan
39.	Sungai Watumuni	3,45	Torire/Lore Tengah	Belum dimanfaatkan
40.	Sungai Rumue	35,7	Torire/Lore Tengah	Irigasi dan Air Bersih
41.	Sungai Halubaru	15	Doda/Lore Tengah	Air Bersih
42.	Sungai Torire	86,7	Doda/Lore Tengah	Irigasi/PLTA
43.	Sungai Pedaiya	10	Doda/Lore Tengah	Irigasi
44.	Sungai Bombai	120	Bariri/Lore Tengah	Irigasi
45.	Sungai Baintala	8,4	Bariri/Lore Tengah	Air Bersih
46.	Sungai Kakanda	288	Hanggira/Lore Tengah	Irigasi
47.	Sungai Kalingki	100	Hanggira/Lore Tengah	Irigasi
48.	Sungai Tedei	16,8	Hanggira/Lore Tengah	Air Bersih
49.	Sungai Kalaena	54	Bariri/Lore Tengah	Air Bersih
50.	Sungai Mati-mati	46,2	Winowanga/Lore Timur	Air Bersih
51.	Sungai Makara	140	Mekarsari/Lore Timur	Air Minum
52.	Sungai Hile	189	Mekarsari/Lore Timur	Air Minum
53.	Sungai Tambua	355	Tamadue/Lore Timur	Air Minum/PLTA
54.	Sungai Salu	140	Mekarsari/Lore Timur	Belum dimanfaatkan
55.	Sungai Barana	560	Tamadue/Lore Timur	Irigasi
56.	Sungai Halulai	2793	Tamadue/Lore Timur	Irigasi
57.	Sungai Maholo	1363	Maholo/Lore Timur	Air Minum/Irigasi
58.	Sungai Maholo	450	Winowanga/Lore Timur	Irigasi
59.	Sungai Kie	390	Alitupu/Lore Utara	Air Minum
60.	Sungai Makapa	600	Watumaeta/Lore Utara	Air Minum dan Irigasi
61.	Sungai Pembela'a	2400	Wuasa/Lore Utara	Air Minum dan Irigasi
62.	Sungai Salunamange	195	Wuasa/Lore Utara	Irigasi
63.	Sungai Kadua'a	520	Kadua'a/Lore Utara	Irigasi dan PLTA
64.	Sungai Coe	160	Dodolo/Lore Utara	Irigasi dan Air Minum

Sumber: Dinas PU Kabupaten Poso, 2021

Data perbandingan persentase rumah tangga pengguna air bersih menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan posisi Kabupaten Poso tertinggi kedua setelah Kota Palu. Data persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Poso pada Tahun 2020, berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten dengan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih terendah yakni



Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Sigi. Data perbandingan persentase rumah tangga pengguna air bersih menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.80 sebagai berikut.

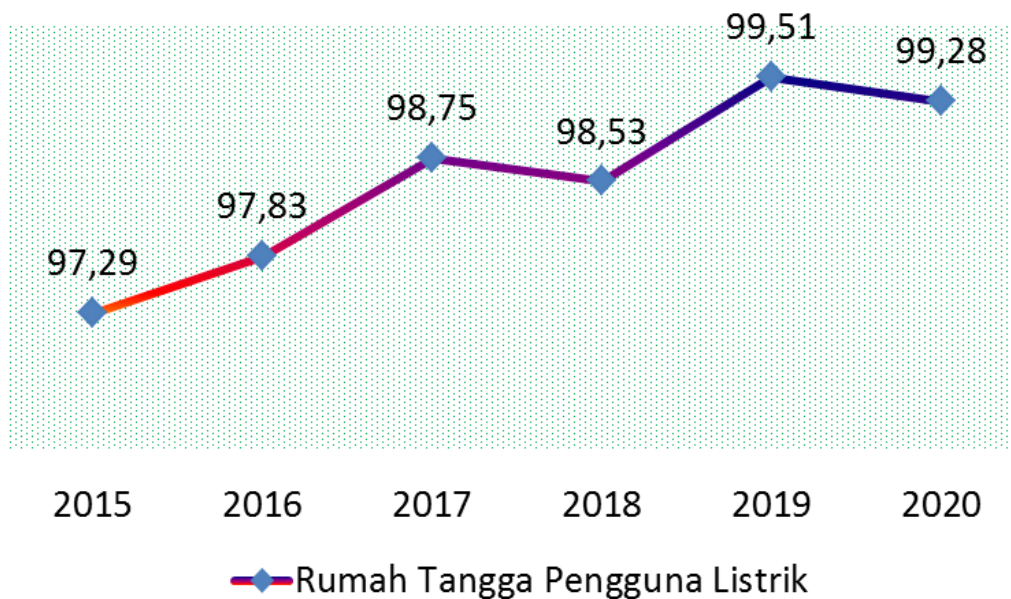


Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.80**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

### 5) Rumah Tangga Pengguna Listrik

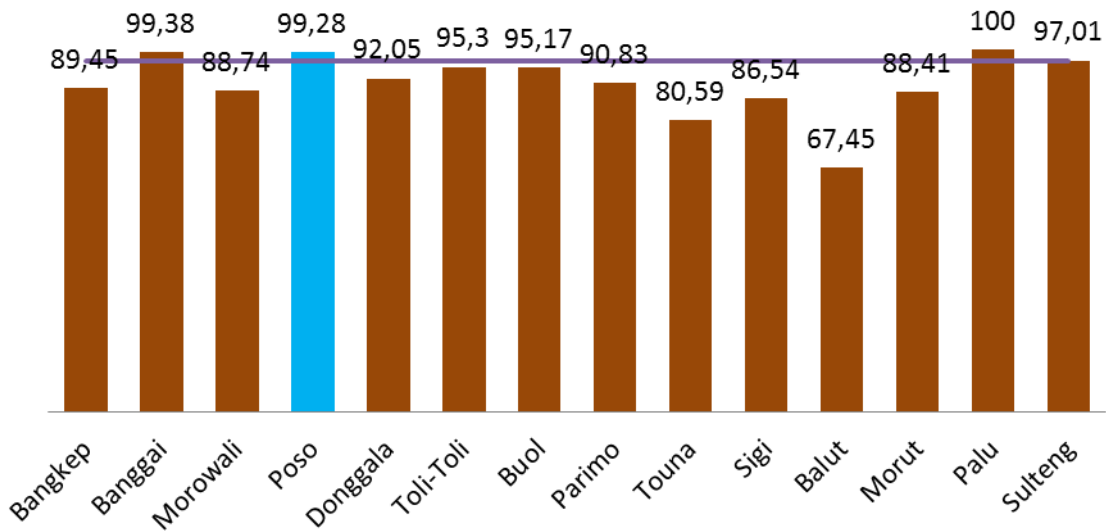
Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kegiatan perekonomian, bermuara pada upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dimana, ketersediaan tenaga listrik sudah mencapai suatu daerah atau wilayah, maka aktivitas dan kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Kemajuan pembangunan bidang ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang melayani Kabupaten Poso menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Tenaga listrik yang diproduksi oleh PT. PLN Poso hingga Tahun 2020 berhasil didistribusikan kepada pelanggan baik rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dalam suatu daerah. Data persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Poso pada tahun 2015 sebesar 97,29 persen meningkat hingga pada Tahun 2019 mencapai 99,51 persen, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,28 persen. Data persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.81 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.81**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Selanjutnya, jika dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana kondisi persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Poso tertinggi ketiga setelah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, yakni mencapai sebesar 99,28 persen dan tertinggi pertama Kota Palu mencapai 100 persen. Selain itu juga menempatkan Kabupaten Poso berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan persentase sebesar 99,28 persen. Sedangkan kabupaten dengan rasio elektrifikasi terendah adalah kabupaten Banggai Laut. Data persentase rumah tangga pengguna listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.82 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.82**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

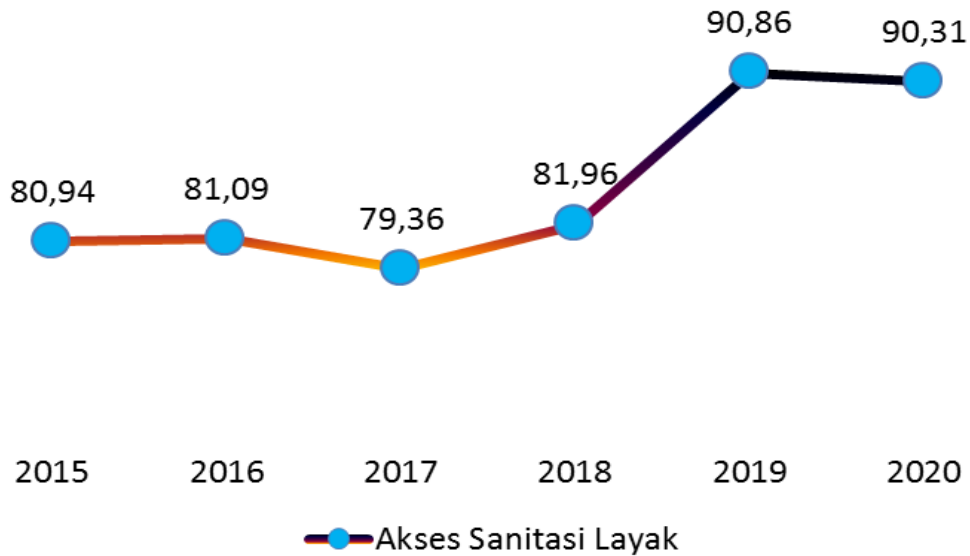
#### **6) Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak**

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik, atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 menunjukkan perkembangan dan tren positif. Pada Tahun 2015, rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 80,94 persen; meningkat Tahun 2016 menjadi sebesar 81,09 persen; Tahun 2017 turun menjadi sebesar 79,36 persen; dan meningkat Tahun 2018 menjadi sebesar 81,96 persen; Tahun 2019 meningkat signifikan menjadi sebesar 90,86 persen, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 90,31 persen. Data rumah tangga akses sanitasi layak di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.83 sebagai berikut.





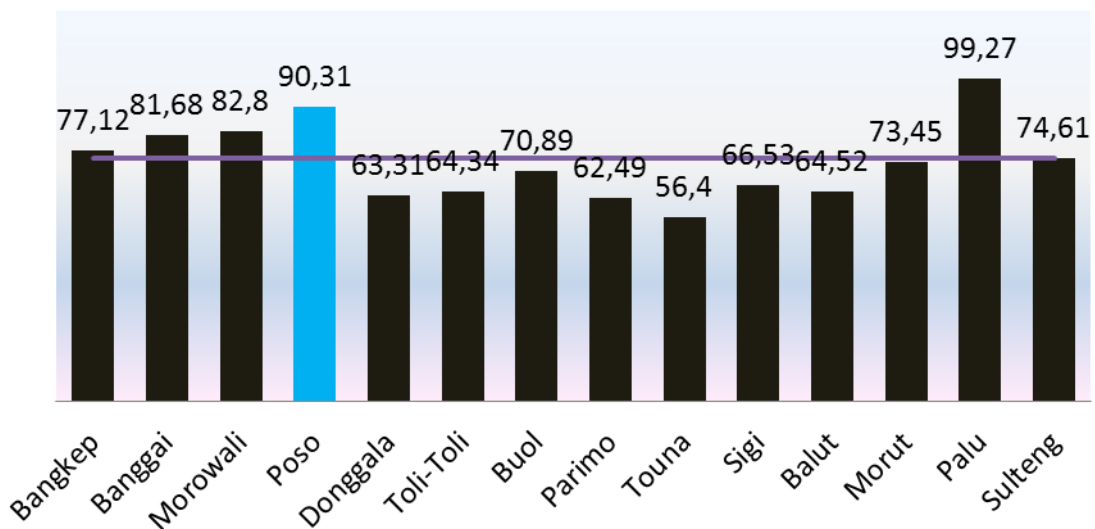
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2016-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.83**  
**Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Selanjutnya perbandingan persentase rumah tangga akses sanitasi layak menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.84 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.84**  
**Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**



Berdasarkan data pada Gambar 2.84 di atas, diketahui persentase rumah tangga akses sanitasi layak menempatkan Kabupaten Poso masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 83,42 persen. Kabupaten Poso juga tertinggi kedua setelah Kabupaten Kota Palu. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Secara umum kondisi di Kabupaten Poso periode Tahun 2014-2018 cukup kondusif. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, dimana semakin berkembangnya modus kejahatan, dan kontrol sosial masyarakat semakin rendah menjadi penyebab meningkatnya tindak kriminalitas, dan kerawanan sosial yang dapat dikurangi dengan meningkatkan upaya perlindungan masyarakat. Yang perlu menjadi acuan bagi pemerintah daerah adalah dampak dari semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi yang dapat menjadi pemicu kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang khususnya kasus *cyber crime*.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Poso dilakukan dengan pendekatan prepetif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan prepetif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut; Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas); Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan); Caku-pan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota; Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Persentase Penegakan Perda.

**1) Rasio Polisi Pamong Praja**

Rasio Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Poso hingga tahun 2018 sebesar 11,82. Dimana, jumlah penduduk sebanyak 251.185 jiwa dan jumlah polisi PP sebanyak 297 orang. Dan ditahun 2020 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 5,43 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Data rasio jumlah Polisi Pamong Praja dengan penduduk di Kabupaten Poso periode Tahun 2016–2020 mengalami kenaikan yang terdapat pada Tabel 2.53 sebagai berikut.

**Tabel 2.53**

**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah polisi pamong	156	336	297	140	133
2.	Jumlah penduduk	240.812	240.812	251.185	256.393	244.857
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	6,48	13,95	11,82	5,46	5,43

Sumber: Satuan Pol. PP dan Damkar, 2021

**2) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Poso masih cukup rendah. Pada Tahun 2015 sebesar 2,48 persen, dan hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 23,80 persen, dan ditahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya. Data cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.85 sebagai berikut.

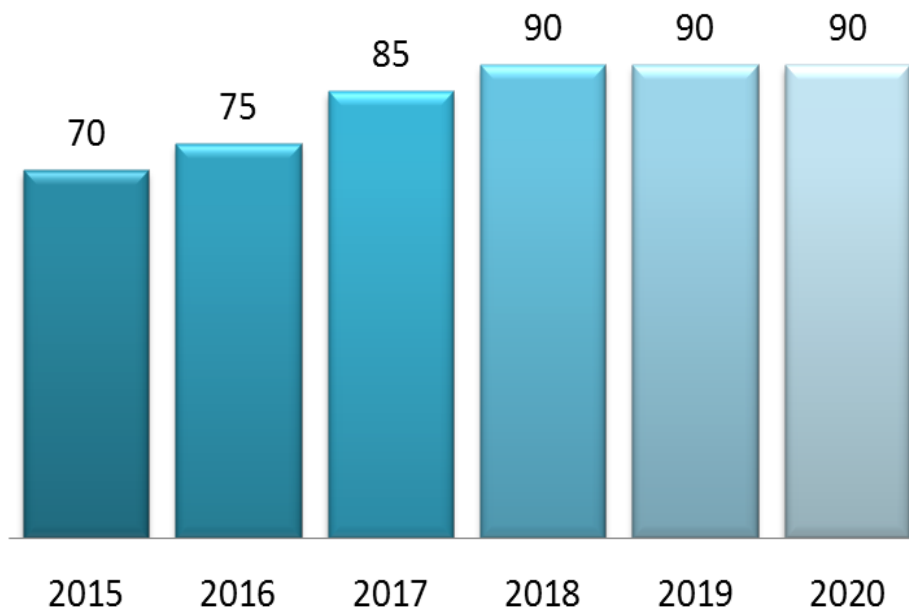


Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.85**  
**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

### 3) **Persentase Penegakan Perda**

Berdasarkan data yang diperoleh di Kabupaten Poso, jumlah Perda yang ditetapkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir sebanyak 51 Perda. Pada Tahun 2019 sebanyak 6 Perda dan 5 perda ditahun 2020 yang disahkan dan ditetapkan Pemda dan DPRD Kabupaten Poso. Data persentase penegakan Perda sebesar 90 persen, meningkat setiap tahunnya seperti yang terdapat pada Gambar 2.86 berikut ini.



Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.86**  
**Persentase Penegakan Perda**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

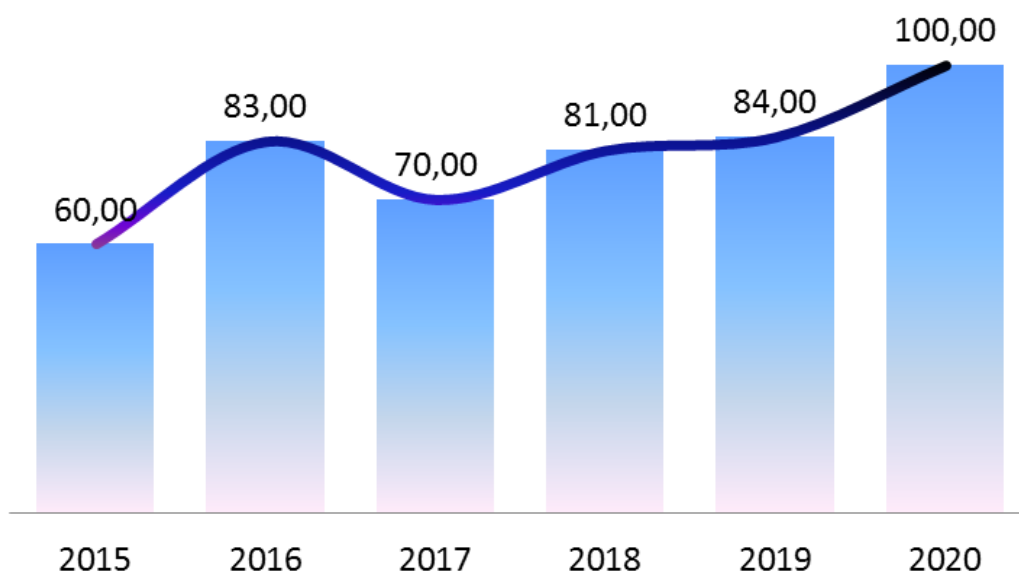
### **F. Sosial**

Tantangan dan kendala pembangunan bidang sosial senantiasa meng-hadapi berbagai perubahan seiring dengan semakin luas dan kompleks. Penanganan PMKS di Kabupaten Poso berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PMKS. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Poso relatif masih besar. Kondisi daerah terkait urusan sosial antara lain dilihat dari indikator kinerja; Persentase PMKS yang mem-peroleh bantuan sosial; Persentase PMKS yang tertangani; Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi se-jenis lainnya;

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial; Persentase wahana kesejahteraan sosial ber-basis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap; Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

### 1) **Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan**

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sebesar 60 persen, dan hingga Tahun 2020 mencapai 100 persen. Data persentase PMKS yang memperoleh bantuan di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.87 sebagai berikut.



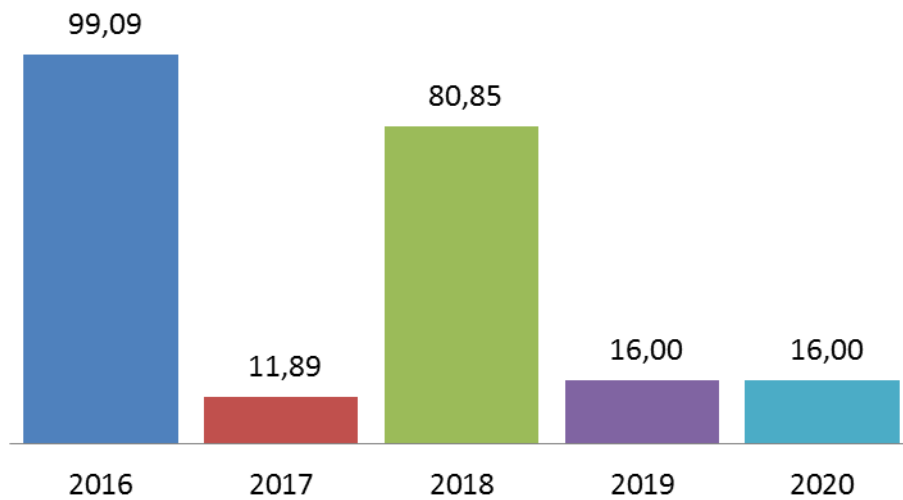
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.87**  
**Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

### 2) **Jumlah PMKS Yang Ditangani**

Jumlah PMKS pada Tahun 2018 yang tertangani sebesar 127 jiwa, dari total jumlah PMKS yaitu 157.246 jiwa, kemudian pada tahun 2020 sebesar 16 persen. Data perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.88 sebagai berikut.





Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.88**  
**Perkembangan penanganan PMKS Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016–2020**

### **2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan daerah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 meliputi 18 (delapan belas) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah pilihan berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Poso dijabarkan secara detail sebagai berikut.

#### **A. Tenaga Kerja**

Berdasarkan publikasi ILO, penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).

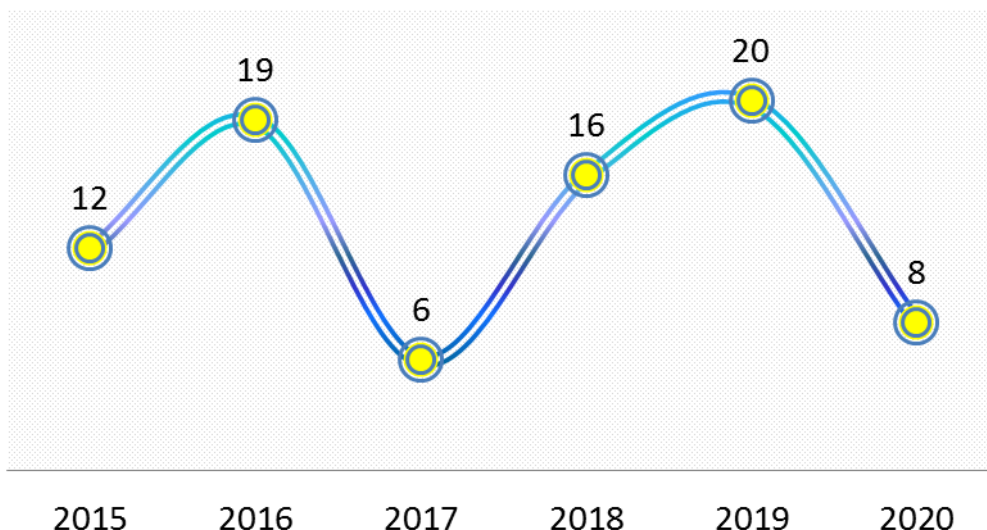
Indikator secara umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat

berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Per-selisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Beberapa indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun**

Sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Poso dalam 5 tahun terakhir masih terjadi, namun perkembangannya berfluktuatif. Pada Tahun 2015 sebanyak 12 kasus, dan Tahun 2019 meningkat menjadi 20 kasus, kemudian pada tahun 2020 jumlah sengketa menurun sebanyak 12 kasus menjadi 8 kasus, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.89 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.89**  
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja (Jumlah) per Tahun**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

## **2) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2015 sebanyak 615 pekerja. Menurun signifikan pada Tahun 2016 menjadi 67 orang, dan hingga Tahun 2020, sebanyak 136 orang. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.90 sebagai berikut.

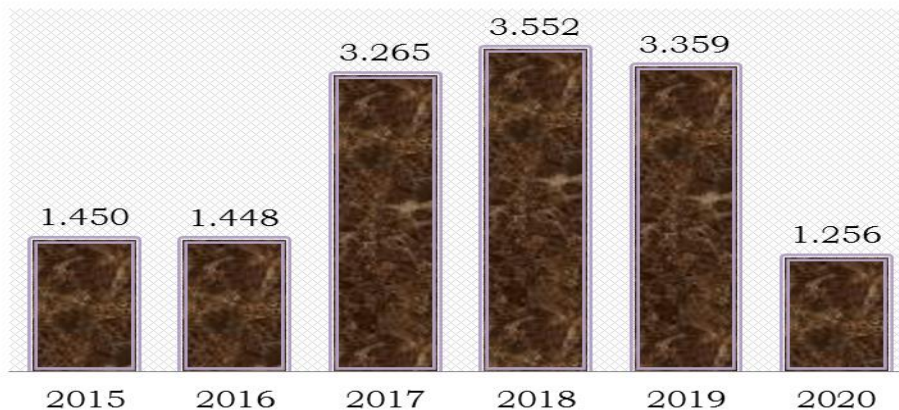


Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.90**  
**Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015–2020**

## **3) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**

Kesadaran pekerja/buruh untuk menjadi peserta program Jamsostek semakin meningkat di Kabupaten Poso. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah buruh setiap tahun yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek pada Tahun 2015 sebanyak 1.450 orang, Pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi sebanyak 1.448 orang. Dan hingga Tahun 2019 meningkat signifikan menjadi sebanyak 3.359 orang. Kemudian untuk data tahun 2020 sebanyak 1.256 orang. Data besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.91 sebagai berikut.

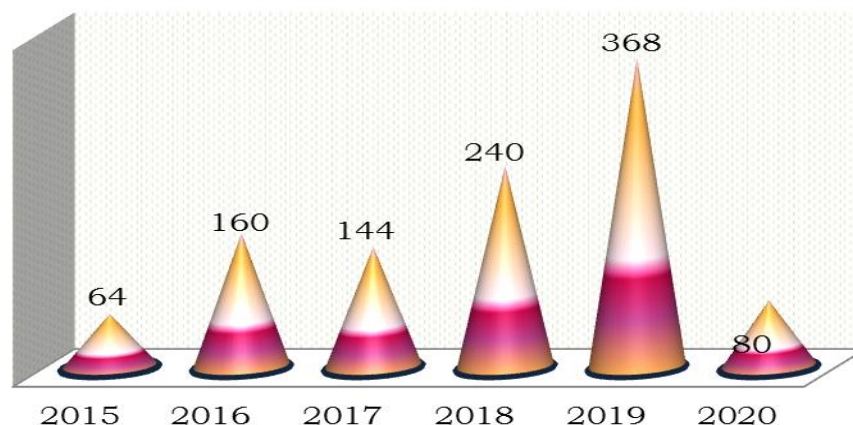


Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.91**  
**Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek  
Kabupaten Poso Tahun 2015–2020**

#### 4) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan kompetensi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pekerja di Kabupaten Poso. Hingga tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi sebanyak 368 pekerja. Namun pada tahun 2020 pekerja yang memperoleh pelatihan berkurang signifikan menjadi 80 pekerja, hal ini dikarenakan terjadi refocusing anggaran dan masih pandemic Covid-19. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi terdapat pada Gambar 2.92 sebagai berikut.



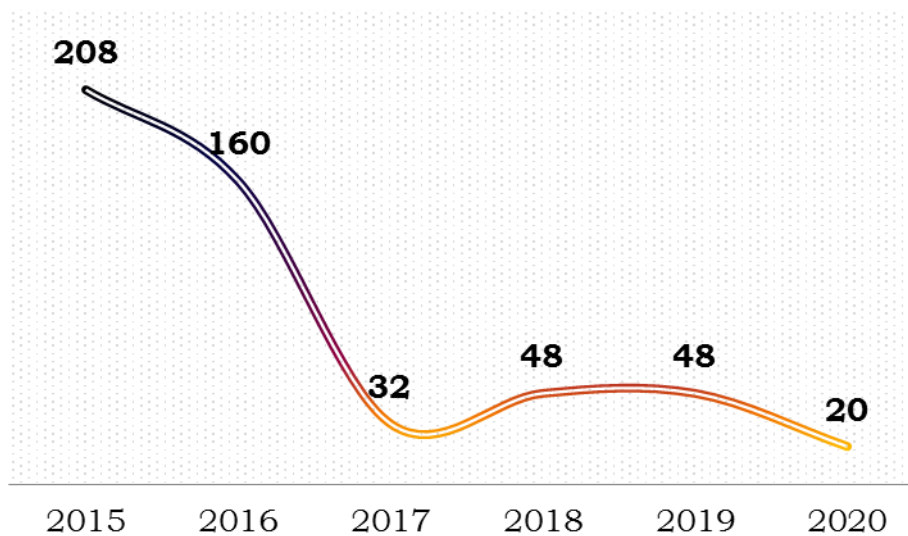
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.92**  
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis  
Kompetensi Kabupaten Poso Tahun 2015–2020**



### **5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**

Pelatihan berbasis masyarakat yang diikuti oleh tenaga kerja di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sebanyak 208 orang, namun pada Tahun 2016 sebanyak 160 yang mengikuti pelatihan. Pada Tahun 2019 sebanyak 48 orang yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Namun mengalami sedikit penurunan sebesar 20 orang. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Poso periode 2015-2020 pada Gambar 2.93 sebagai berikut.



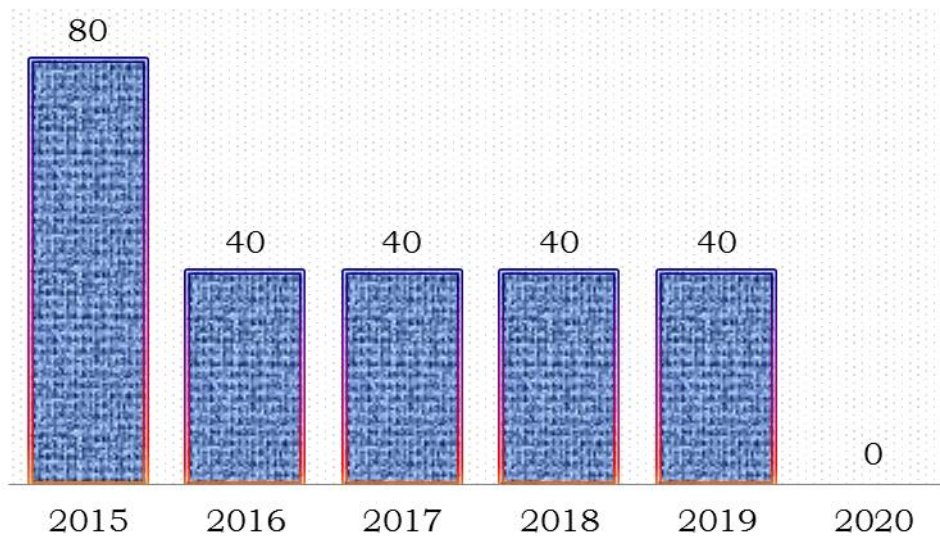
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.93**  
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Poso Tahun 2015 – 2020**

### **6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Pelatihan kewirausahaan juga diberikan kepada pekerja yang ada di Kabupaten Poso. Rata-rata pertahun tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebanyak 40 orang, namun ditahun 2020 tidak dilaksanakan karena terjadinya refocusing anggaran karena Covid-19. Data tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.94.





Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.94**  
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Poso Tahun 2015–200**

#### 7) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap per 10.000 penduduk di Kabupaten Poso hingga tahun 2019 sebesar 31,48 dan ditahun 2020 sebesar 32,96. Data terkait secara lengkap terdapat pada Tabel 2.54 sebagai berikut.

**Tabel 2.54**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan S1/S2/S3 (orang)	976,00	1249,00	1597,00	1911,00	807,00	807
Jumlah Penduduk	235.567	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
Rasio (per 10.000 Penduduk)	41,43	51,87	64,92	75,89	31,48	32,96

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, 2021

#### 8) Penduduk usia 15 Tahun keatas dirinci menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan daerah, karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Data penduduk usia produktif Tahun 2020 menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Poso



terdapat pada Tabel 2.55 sebagai berikut.

**Tabel 2.55**  
**Penduduk Usia 15 Tahun keatas**  
**Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**  
**serta Jenis Kelamin diKabupaten Poso Tahun 2020**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	Bekerja	86.349	57.738	144.087
	Pengangguran	2.544	983	3.527
	Jumlah penduduk angkatan kerja(i)	88.893	58.721	147.614
2	Bukan Angkatan Kerja			
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	13.153	36.633	49.786
3	Jumlah penduduk usia kerja (i) +(ii)	102.046	95.354	197.400
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	86,51	61,58	74,78
5	TPT(tingkat pengangguran terbuka)	2,86	1,67	2,39

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

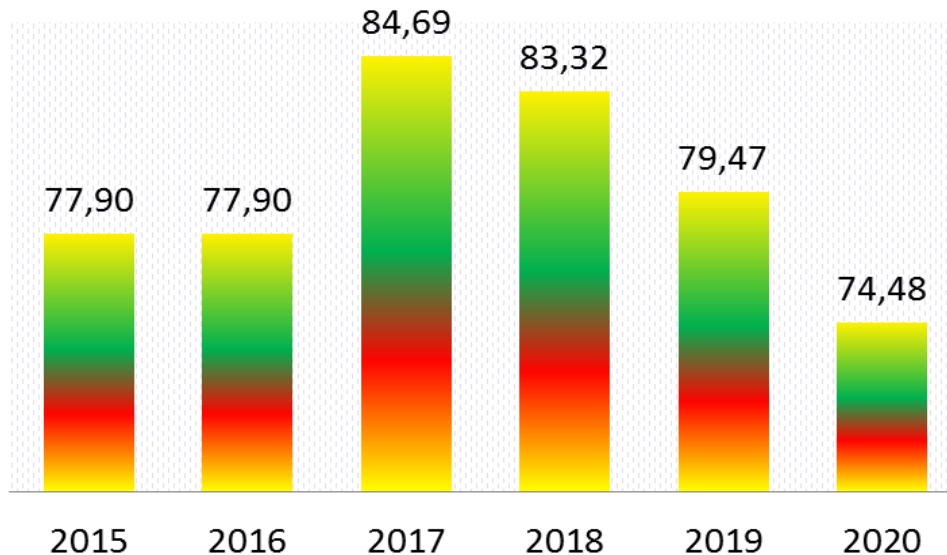
Berdasarkan data Tabel 2.55 di atas, diketahui bahwa sebesar 60,29 persen penduduk di Kabupaten Poso dengan usia 15 tahun ke atas kegiatan utamanya adalah bekerja, dan sisanya pengangguran sebesar 1,63 persen, sekolah 8,29 persen, mengurus rumah tangga sekitar 15,65 persen, dan kegiatan lainnya sekitar 3,69 persen. Untuk bekerja dan pengangguran dikategorikan sebagai penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja, sedangkan yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja.

### **9) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Berdasarkan publikasi ILO, penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah



bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Data persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.95 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

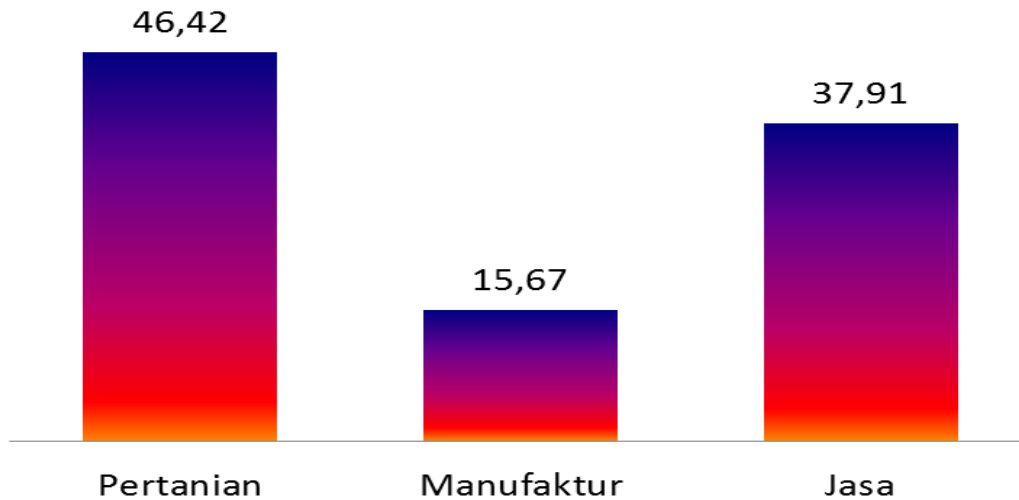
**Gambar 2.95**  
**Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

Persentase Partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan yang berfluktuatif. Dimana pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sama yakni sebesar 77,90 persen, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,69 persen Tahun 2017. Namun, Tahun 2018 turun menjadi sebesar 83,32 persen; dan kembali menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 79,74 persen. Kemudian pada tahun 2020 persentase angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Poso sedikit mengalami penurunan sebesar 74,48 persen.

Selanjutnya jika dilihat dari jenis lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang berkerja di Kabupaten Poso menunjukkan Untuk Jenis Kelamin Laki-Laki, lapangan pekerjaan dengan persentase terbesar adalah di Sektor Pertanian yaitu 51,36 persen, berbeda dengan Perempuan yang terbesar bekerja di Sektor Jasa dengan 53,37 persen. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bidang pekerjaan utama penduduk Kabupaten Poso adalah Sektor Pertanian. Kondisi ini dapat memberikan data dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan difokuskan dominan pada Sektor Pertanian



seperti ketersediaan dan perluasan lahan, ketersediaan sarana dan prasaranan produksi, serta berbagai usaha untuk meningkatkan hasil produksi. Data persentase pekerja berdasarkan lapangan kerja di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.96 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

**Gambar 2.96**  
**Persentase Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2020**

Sebagian besar penduduk di kabupaten Poso dalam bekerja berstatus sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/Tidak, Berusaha Sendiri, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar dengan persentase masing-masing sebesar 28,67 persen; 31,30 persen; 25,60 persen; dan 5,69 persen. Sedangkan sebagian kecil sisanya berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar, Pekerja Bebas dengan persentase masing-masing 3,17 persen; 5,74 persen. Data persentase pekerja berdasarkan status pekerjaan utama di Kabupaten Poso pada Tabel 2.56.

**Tabel 2.56**  
**Persentase Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama**  
**Kabupaten Poso Tahun 2020**

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	22.705,00	9.565,00	32.270,00
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/Pekerja Keluarga/Tidak	23.632,00	5.354,00	28.986,00
Berusaha dibantu buru tetap/dibayar	2.392,00	1.194,00	3.586,00
Buruh/Karyawan/Pegawai	17.976,00	17.453,00	35.429,00



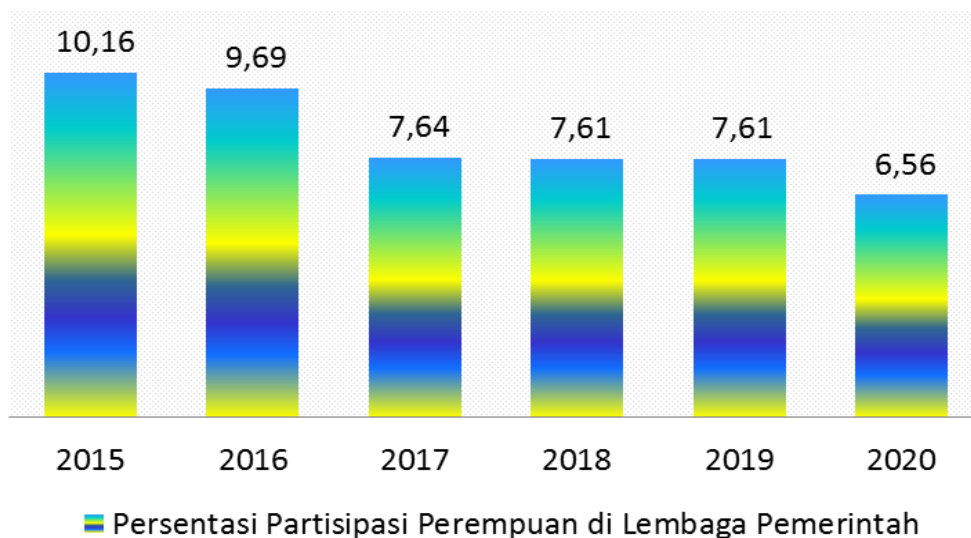
Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pekerja Bebas	4.618,00	1.878,00	6.496,00
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	6.020,00	419,00	6.439,00

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

## **B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1) Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Poso berfluktuasi periode Tahun 2015-2020. Tahun 2015, persentase partisipasi perempuan sebesar 10,16 persen, dan Tahun 2019 menurun menjadi hanya sebesar 7,61 persen, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 6,56 persen. Data persentase perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 pada Gambar 2.97.



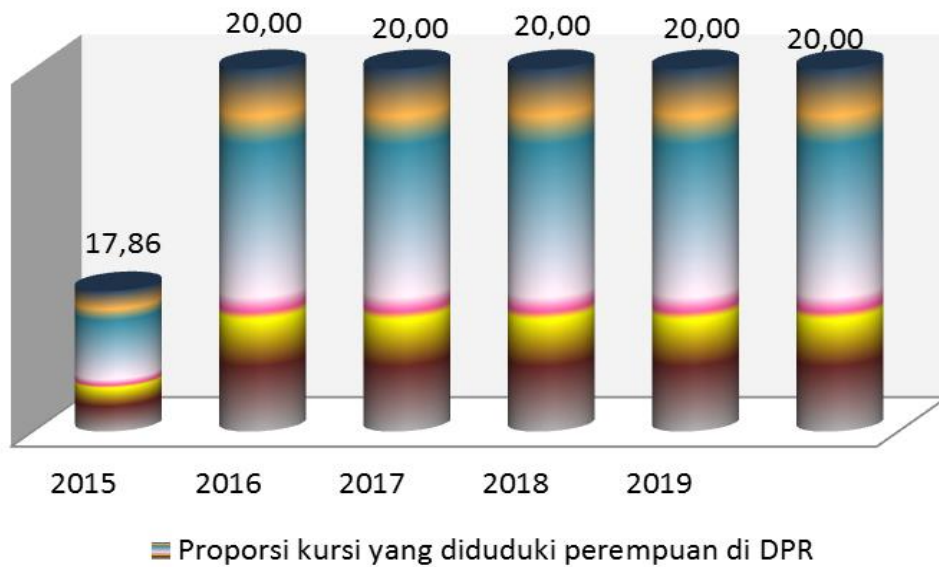
Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

**Gambar 2.97**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

### **2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR**

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Poso periode 2019-2024 di Tahun 2020 sebanyak 30 orang, terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan sebesar 20 persen dari total kursi yang tersedia. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Posos terdapat pada Gambar 2.98 sebagai berikut.





Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

**Gambar 2.98**  
**Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

### 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT di Kabupaten Poso selama Tahun 2016–2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2016 rasionya hanya sebesar 0,06 menurun pada Tahun 2017 menjadi 0,11. Meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 0,093, ditahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 0,11 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,08. Data Jumlah KDRT selama Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.57 sebagai berikut.

**Tabel 2.57**  
**Rasio KDRT Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2018**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT	0,06	0,01	0.093	0,11	0,08

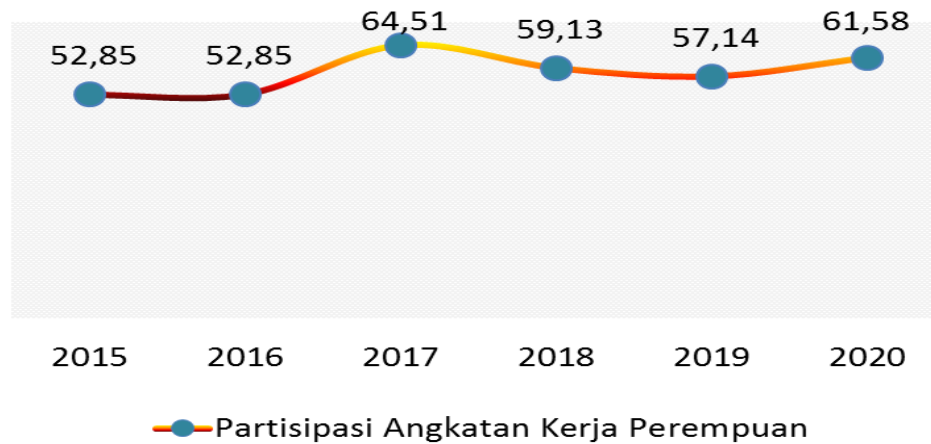
Sumber: Pemberdayaan Perempuan, dan PA, 2021

### 4) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Kabupaten Poso dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat, namun dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Dimana, Tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 57,14 persen, kemudian pada tahun 2020 partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Poso meningkat menjadi 61,48 persen.



Data partisipasi angkatan kerja Perempuan di Kabupaten Poso selama periode 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.99 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

**Gambar 2.99**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

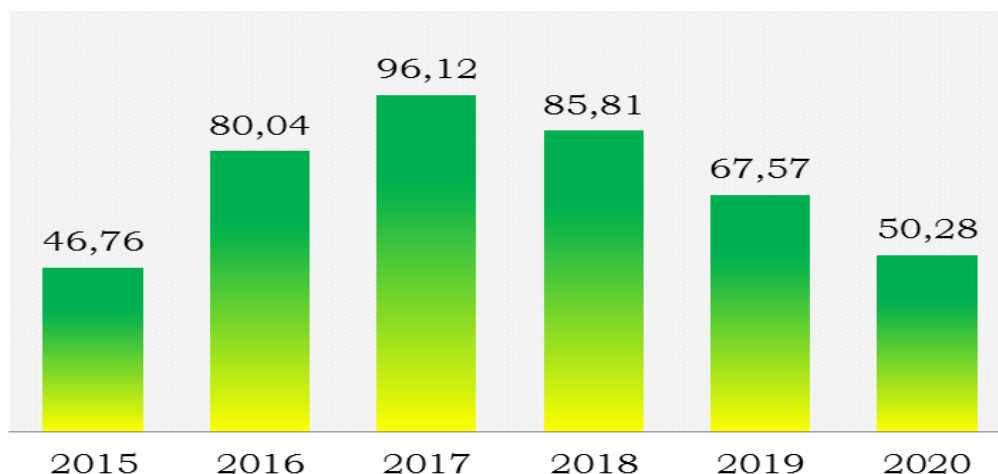
### C. Ketahanan Pangan

Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan bahwa **kedaulatan pangan** merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. **Kemandirian pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. **Ketahanan pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, harus mengutamakan produksi wilayah setempat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal hal tersebut, terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah: 1). ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal

secara optimal; 2) keterjangkauan pangan (distribusi) dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, terutama pada daerah rawan pangan; serta 3). Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dari ketiga aspek tersebut, sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. Keterpaduan SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan tiga aspek strategis diatas merupakan rekonstruksi kebijakan pangan menuju ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan melalui kerjasama kolektif dan sinergis diantara pihak-pihak terkait.

### 1) **Ketersediaan Pangan Daerah**

Tingkat ketersediaan pangan daerah diperoleh dari jumlah produksi pangan (kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Dari hasil tersebut menunjukkan, hingga Tahun 2019 ketersediaan pangan utama di Kabupaten Poso sebesar 67,57 persen, selanjutnya pada tahun 2020 rasio ketersediaan rawan pangan Kabupaten Poso sedikit mengalami penurunan menjadi 50,28 persen. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan pangan utama masih dalam status aman. Data ketersediaan pangan daerah merupakan gambaran mengenai produksi beras dan kebutuhan beras yang pencapaian yang terdapat pada Gambar 2.100 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

**Gambar 2.100**  
**Perkembangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015–2020**



## 2) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Konsumsi energi dan protein yang cukup dapat berdampak baik pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan energi secara keseluruhan di Kabupaten Poso sebesar 2.752 kkal/kap/hari, sedangkan untuk ketersediaan protensi perkapita sebesar 80.4 gram/kap/hari ditahun 2020 lebih rendah dari kondisi tahun sebelumnya. Data ketersediaan energi dan proten perkapita periode Tahun 2017-2020 di kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.58 sebagai berikut.

**Tabel 2.58**  
**Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Poso**  
**Tahun 2017-2020**

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)			
	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi	2.721 kkal/kap/ hari	4.651 kkal/kap/ hari	5.357 kkal/kap/ hari	2.752 Kkal/Kap/Hari
Ketersediaan Protein	81,06 gram/kap/hari	175,19 gram/kap/hari	180,04 gram/kap/hari	80.4 gram/Kap/Hari

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

## 3) Jumlah Kecamatan Rawan Pangan

Berdasarkan data kecamatan rawan panga yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, pada Tahun 2017, terdapat 4 (empat) kecamatan yang dinyatakan **waspada pangan**, yaitu Kecamatan Pamona utara, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Peore dan Kecamatan Poso Pesisir Utara; serta 5 (lima) kecamatan yang dinyatakan **rawan pangan**, yaitu Kecamatan Pamona timur, Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota, dan Kecamatan Poso Kota Utara. Sementara itu pada Tahun 2020 kondisinya semakin banyak kecamatan waspada dan rawan pangan. Data jumlah kecataman rawan pangan di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.59 sebagai berikut.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

Skor	Jumlah Kecamatan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hijau (Aman)	10	10	6	6	3
Kuning (Waspada)	2	4	6	6	9
Merah (Rawan)	7	5	7	7	7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021



#### **D. Bidang Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan indikator kinerja yang diarahkan untuk menghimpun informasi mengenai persentase penduduk yang memiliki lahan pertanahan. Kegiatan pensertifikatan lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dilakukan sejak berdirinya Bagian Pertanahan pada Tahun 2014, namun sejak tahun 2017 telah digabung di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, sehingga data tentang Jumlah tanah bersertifikat dan terinventarisasi tanah Pemda pada Tahun 2018 sebanyak 232 bidang tanah, dan ditahun 2020 sebesar 304 bidang tanah.

#### **E. Lingkungan Hidup**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten; 2) Tersusunnya RPPLH Kabupaten; 3) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah; 4) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air; 5) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara; 6) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan; 7) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 8) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten; 9) Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA; 10) Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional; 11) Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional; 12) Penetapan hak MHA; 13) Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan; 14) Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana; 15) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat; 16) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup; 17) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota; 18) Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota; 19) Timbulan sampah yang ditangani; 20) Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; 21) Persentase cakupan area pelayanan; 22) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 23) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten; 24) Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan dan 25) Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pada urusan lingkungan hidup menggambarkan





tentang keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah, jumlah usaha/kegiatan wajib amdal, serta capaian indikator pendukung lainnya sebagaimana dapat pada Tabel 2.60 sebagai berikut.

**Tabel 2.60**  
**Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016 – 2020**

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah	1	1	1	3	3
2.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL	4	48	48	48	48
3.	Persentase jumlah sumber air sesuai baku mutu kualitas air	60	75	75	75	75
4.	Jumlah Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	7	7	7	7	7
5.	Jumlah kegiatan sosialisasi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2	2	2	9	9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021

### 1) Tersusunnya RPPLH Kabupaten Poso

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selama periode Tahun 2016-2020 di Kabupaten Poso belum disusun RPPLH yang terdapat pada Tabel 2.61 sebagai berikut.

**Tabel 2.61**  
**Tersusunnya RPPLH Kabupaten**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Poso Tahun 2021

### 2) Terselenggaranya KLHS K/R/P

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah



dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya ditahun 2017 terbit aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Kabupaten Poso pada tahun 2020 telah terselenggaranya dokumen KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. Khusus pada tahun 2021 telah disusun dokumen KLHS untuk Rancangan RPJMD Kabupaten Poso telah dilaksanakan kerjasama dengan Universitas Tadulako dengan DLH Kabupaten Poso, seperti yang terdapat pada Tabel 2.62 sebagai berikut.

**Tabel 2.62**  
**Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021

### 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Hasil pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Poso Tahun 2020 ditemukan bahwa 5 (lima) sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan), masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya yang terdapat pada Tabel 2.63 sebagai berikut.

**Tabel 2.63**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Indeks Pengukuran Kualitas Air	Tidak dilakukan penelitian di karenakan tidak di anggarkan pendanaanya	1 titik danau (memenuhi) dan 31 titik sungai memenuhi	Tidak dilakukan penelitian di karenakan tidak di anggarkan pendanaanya	5 sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan)	5 sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021



#### **4) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**

Pengukuran indeks kualitas udara pada Tahun 2016 s/d tahun 2018 belum dilakukan pengukuran oleh OPD terkait, sejak dari tahun 2019 dilaksanakan, dimana pada Tahun 2019 sebesar 102,61, ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,68 yang terdapat pada Tabel 2.64 sebagai berikut.

**Tabel 2.64**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Hasil Indeks Pengukuran Kualitas Udara	Belum melakukan pengukuran	Belum melakukan pengukuran	Belum melakukan pengukuran	102,61	91,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021

#### **5) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2016-2017 tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran yang tersedia. Jumlah pejabat pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Poso hingga Tahun 2020 hanya berjumlah 5 orang yang terdapat pada Tabel 2.65 sebagai berikut.

**Tabel 2.65**  
**Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawasa Lingkungan**  
**Hidup Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Pejabat	0,00	0,00	3 orang	5 orang	5 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021

#### **6) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**

Pemerintah kabupaten Poso dalam kurun tahun 2016 s/d tahun 2020 belum pernah melaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup, terdapat pada Tabel 2.66 sebagai berikut.

**Tabel 2.66**  
**Terlaksananya pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021



### **7) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Sampah masih menjadi masalah di Kabupaten Poso, dimana penanganan sampah belum optimal. Pada Tahun 2015, persentase jumlah sampah yang ditangani sebesar 60,2 persen dan hingga Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 88,63 persen, ditahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 85% yang terdapat dilihat pada Tabel 2.67 sebagai berikut.

**Tabel 2.67**  
**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	60,23%	58,92%	59,61%	85,19%	88,63%	85,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, 2021

### **F. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus diseleenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

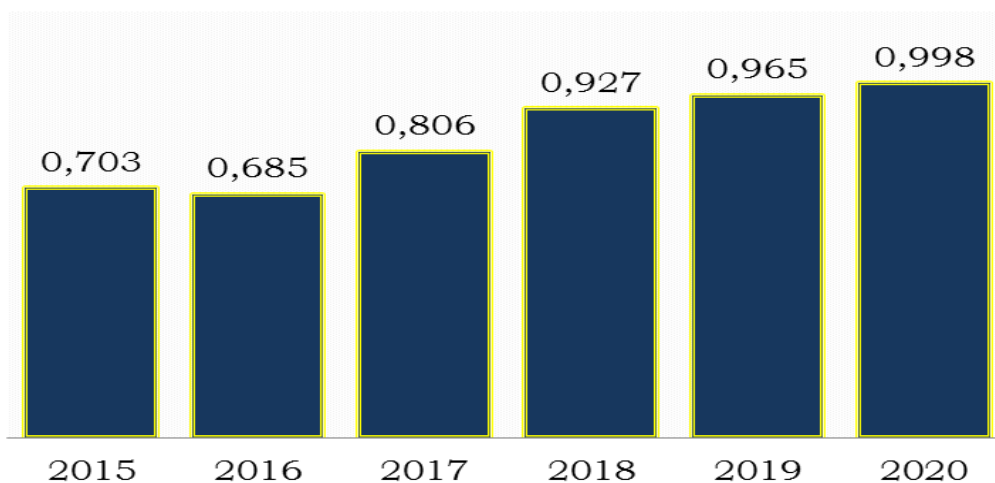
Pemerintah Kabupaten Poso dalam meningkatkan kinerja administrasi kependudukan melakukan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Optimalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Poso dilakukan melalui Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpadu.

Ketersediaan data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum optimal di Kabupaten Poso. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, namun proporsinya juga masih relatif rendah. Sementara administrasi akta-akta lainnya belum berjalan baik. Kondisi tersebut terjadi disebabkan masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian,

maupun perceraian yang terjadi.

### 1) Rasio Penduduk ber-KTP

Untuk mengukur kinerja pelayanan kependudukan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, terlihat berapa jumlah penduduk ber-KTP. Pemilikan KTP merupakan pemenuhan hak perorangan, tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, pada Tahun 2018 jumlah penduduk wajib ber-KTP sebanyak 179.051 orang, dan telah melakukan rekam e-KTP sebanyak 164.509 orang. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk yang ber-KTP menjadi sebanyak 13.641 orang, sehingga keseluruhan penduduk yang ber-KTP sebanyak 183.333 jiwa. Data rasio penduduk ber-KTP terhadap penduduk berumur >17 tahun pada Tahun 2015 sebesar 0,703, capaian ini meningkat setiap tahun hingga Tahun 2019 menjadi 0,965, kemudian pada tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP mengalami peningkatan menjadi 0,998. Data rasio penduduk yang ber-KTP di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.101 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, 2021 (diolah kembali)

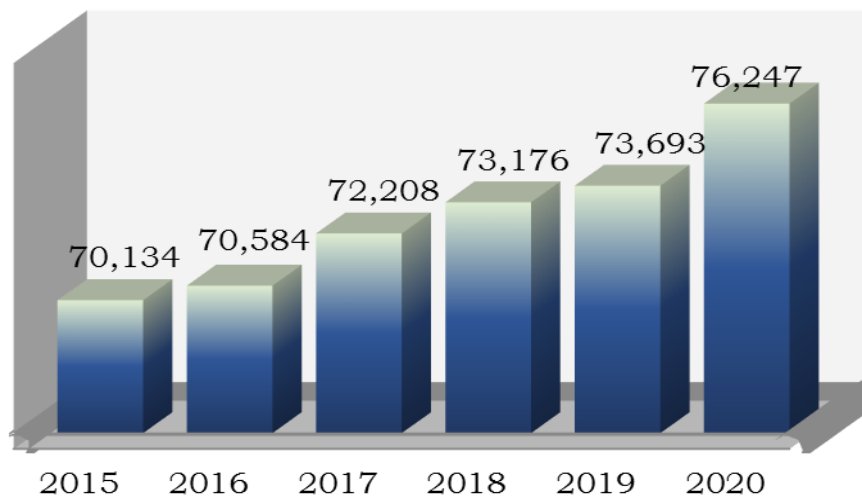
**Gambar 2.101**  
**Rasio Penduduk ber-KTP di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

### 2) Rasio Bayi berakte Lahir

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas



merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Data jumlah bayi yang berakte lahir di Kabupaten Poso hingga tahun 2020 sebanyak 76.247 jiwa secara lengkap terdapat untuk data periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.102 sebagai berikut.

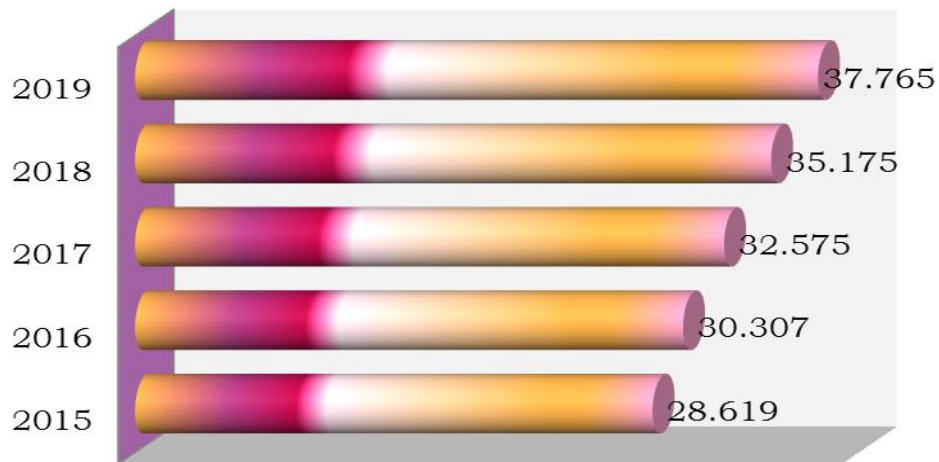


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.102**  
**Jumlah Bayi berakte Lahir di Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

### **3) Jumlah Pasangan Berakte Nikah**

Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Bagi pasangan suami istri, mempunyai akta perkawinan adalah bukti sah bahwa telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum. Data jumlah pasangan berakte nikah di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.103 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.103**  
**Jumlah Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Gambar 2.103 di atas, jumlah pasangan yang berakte nikah pada Tahun 2015 sebanyak 28.619 akte nikah, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebanyak 37.765 akte nikah.

#### 4) **Ketersediaan Database Kependudukan**

Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan daerah, merupakan aspek yang strategis dan memegang peran yang sangat penting. Untuk menyediakan database kependudukan dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk, yang dibutuhkan untuk dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik dan *updating* untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu strategi dan kebijakan pembangunan. Untuk Kabupaten Poso selama tahun 2015-2020 telah tersedia database kependudukan yang secara lengkap diuraikan pada Tabel 2.68 sebagai berikut.

**Tabel 2.68**  
**Ketersediaan Database Kependudukan**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso, 2021



### 5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kondisi jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Poso, serta untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan atau tindak kriminal baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya suatu sistem dan model penataan, agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dan lebih aman dari tahun ke tahun, dan terpadu secara nasional. Penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 telah tersedia yang disajikan pada Tabel 2.69 ini.

**Tabel 2.69**  
**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso, 2021

### G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

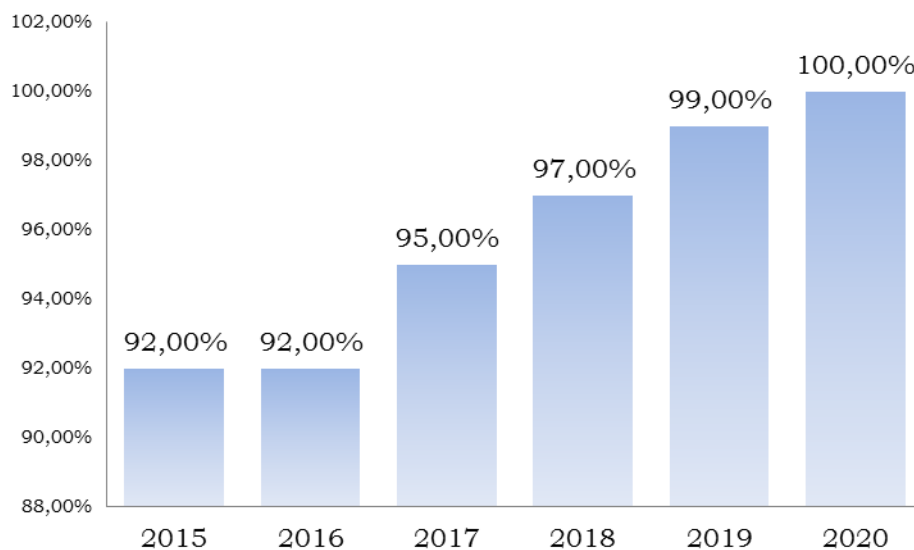
Pemberdayaan masyarakat desa (*rural society*) merupakan strategi dan kebijakan penting dalam pembangunan desa (*rural development*) secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan daerah. Kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik; Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; Persentase LSM aktif; Persentase LPM Berprestasi; Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif; Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat; dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

#### 1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana disebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam



dan lingkungan secara berke-lanjutan. Cakupan sarana prasarana kantor desa dalam kondisi baik di Kabupaten Poso Tahun 2019 sudah mencapai sebesar 99 persen dan ditahun 2020 sebesar 100 persen. Adanya dana desa telah memberikan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan perbaikan sarana-prasarana termasuk kantor desa. Namun, beberapa kekurangan atau kelemahan yang terdapat di kantor desa, antara lain sarana komputer, jaringan internet dan *tools* lainnya. Data kondisi ketersediaan terdapat pada Gambar 2.104 sebagai berikut.

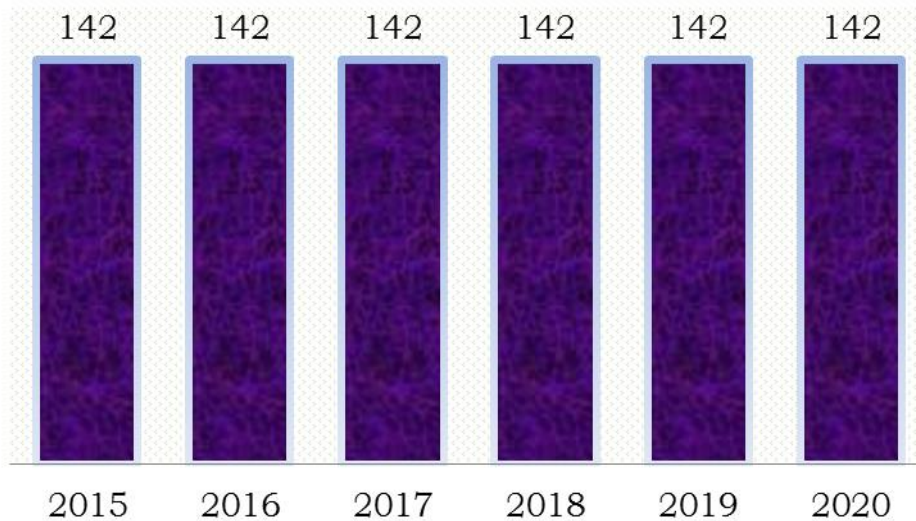


Sumber: Dinas PMD Kabupaten Poso, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.104**  
**Jumlah Kantor Desa Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

## **2) Jumlah Kelompok PKK**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Jumlah kelompok PKK di Kabupaten Poso terdata periode Tahun 2015-2020 sebanyak 142 kelompok, yang terdapat pada Gambar 2.105 sebagai berikut.

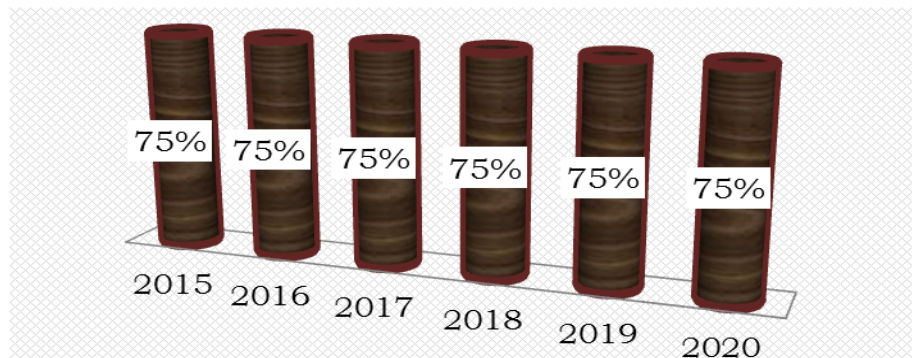


Sumber: Dinas PMD Kabupaten Poso, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.105**  
**Jumlah Kelompok PKK Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

### 3) Persentase PKK yang Aktif

Persentase PKK aktif di Kabupaten Poso dari periode Tahun 2015-2020 sebesar 75 persen yang terdapat pada Gambar 2.106 sebagai berikut.



Sumber: Dinas PMD Kabupaten Poso, tahun 2021 (diolah kembali)

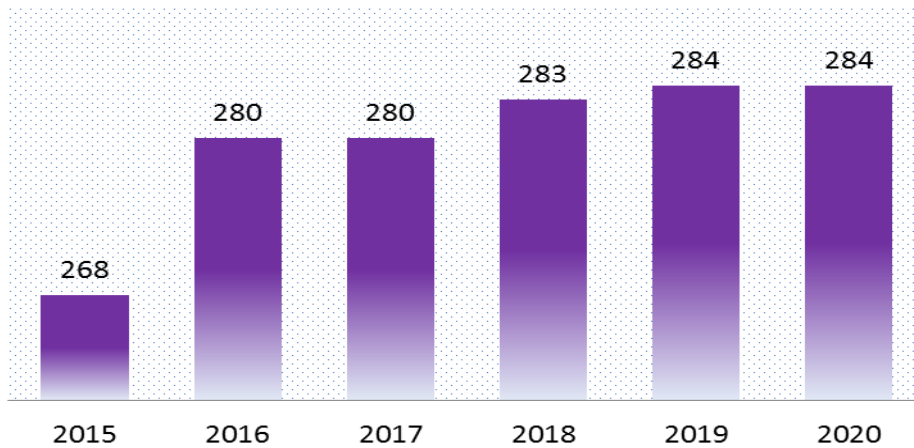
**Gambar 2.106**  
**Persentase PKK Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

### 4) Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan



dasar, untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB. Data persentase sarana posyandu aktif di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.107 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021

**Gambar 2.107**  
**Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

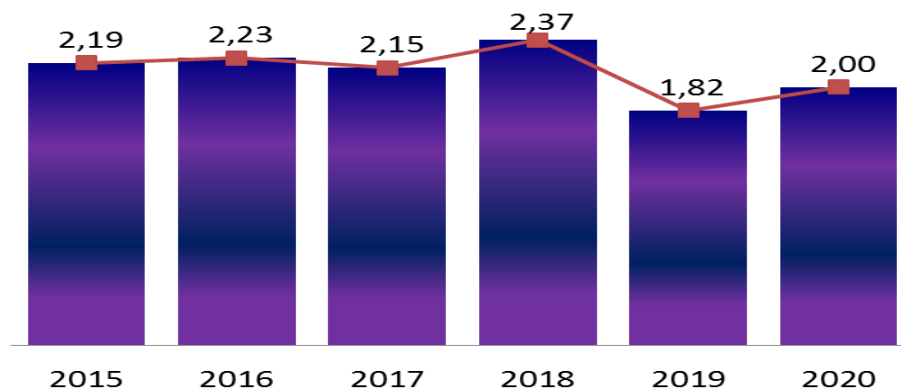
Merujuk pada data Gambar 2.107 di atas, jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Poso pada Tahun 2020 sebanyak 284 posyandu. Dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah posyandu tahun sebelumnya yaitu sebanyak 283 posyandu.

#### **H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Seperti telah diketahui bersama bahwa **Gerakan** Keluarga Berencana yang awalnya dimulai dengan **Program** Keluarga Berencana secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi Keluarga Berencana **Mandiri**. Kondisi daerah terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: Rata-rata jumlah anak per keluarga; Rasio akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif; Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang diuraikan sebagai berikut.

### 1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan meningkatnya migrasi masuk (*in-migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out-migration*). Selanjutnya, berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) di Kabupaten Poso dimana data perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.108 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.108**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**

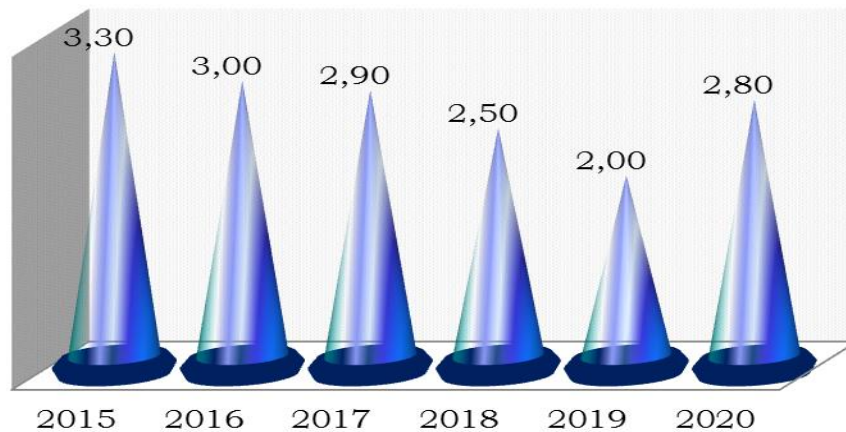
Berdasarkan data terdapat pada Gambar 2.108 di atas, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Poso dari periode Tahun 2015-2020 cenderung menurun. Dimana, Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 persen menurun dari 5 (lima) tahun sebelumnya yang sebesar 2,19 persen per tahun. Dan ditahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Poso sebesar 2 persen. Kondisi ini mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk di Kabupaten Poso dalam menekan pertumbuhan penduduk.

### 2) Total Fertility Rate (TFR)

Angka fertilitas total merupakan perhitungan kelahiran yang telah digunakan untuk menentukan kelahiran yang terjadi pada anak yang telah ditentukan dengan menggunakan angka fertilitasi total. *Total Fertility Rate (TFR)* merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. TFR merupakan salah satu indikator ukuran kemajuan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dalam satu negara. TFR Kabupaten Poso dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi capaian yang baik.



Dimana, pada Tahun 2015, TFR sebesar 3,30 persen, dan selanjutnya menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 2,00 dan pada tahun 2020 sebesar 2,80 persen meningkat dari tahun sebelumnya, yang terdapat pada Gambar 2.109 sebagai berikut.

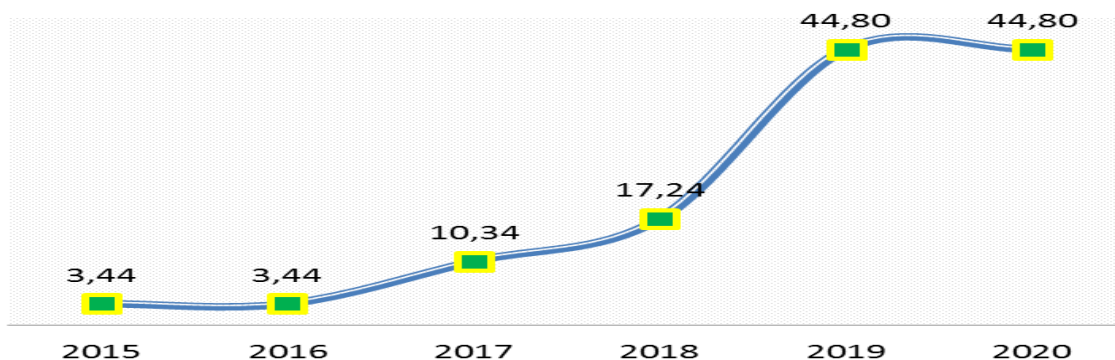


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.109**  
**Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**

**3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB**

Partisipasi lintas perangkat daerah dalam menyukseskan program kampung KB menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Partisipasi OPD yang berperan aktif dalam program KB mengalami peningkatan hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 44,80 persen yang terdapat pada Gambar 2.110 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.110**  
**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kabupaten Poso Tahun 2015–2020**

**4) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**

Dinas yang menyusun rencana induk pengendalian penduduk yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten Poso. Persentase PD yang menyusun dan memanfaatkan rencana induk pengendalian penduduk di Kabupaten Poso sebesar 3,40 persen seperti yang disajikan pada Gambar 2.111 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

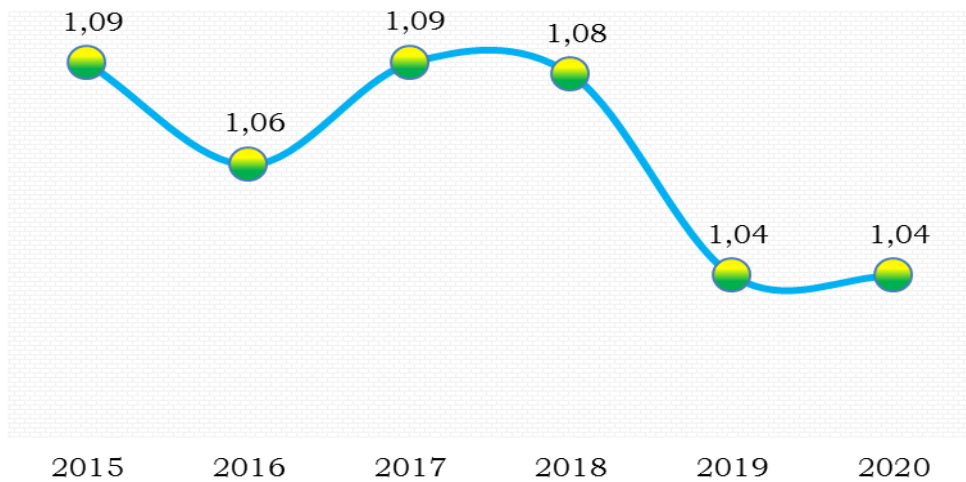
**Gambar 2.111**  
**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Poso Tahun 2015- 2020**

**5) Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**

Data kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah terkait dengan pendendalian kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2015-2020 belum ada. Melihat kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Poso melalui kajian perangkat daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. OPD terkait perlu menyusun *grand design* kependudukan untuk menyusun rencana dan kebijakan kependudukan di Kabupaten Poso.

**6) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga**

Program pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan pertumbuhan dan jumlah penduduk di Indonesia melalui program 2 (dua) anak lebih baik. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2015-2020 adalah sebanyak 1 orang yang terdapat pada data Gambar 2.112 sebagai berikut.

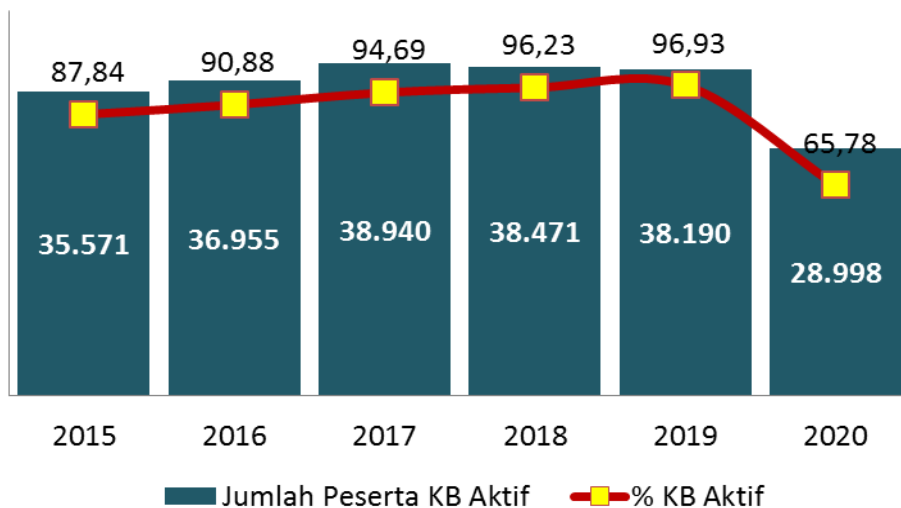


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.112**  
**Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015- 2020**

#### 7) Cakupan Peserta KB Aktif

Data cakupan peserta KB aktif adalah membandingkan jumlah peserta Program KB Aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Data cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Posos terdapat pada Gambar 2.113 ini.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

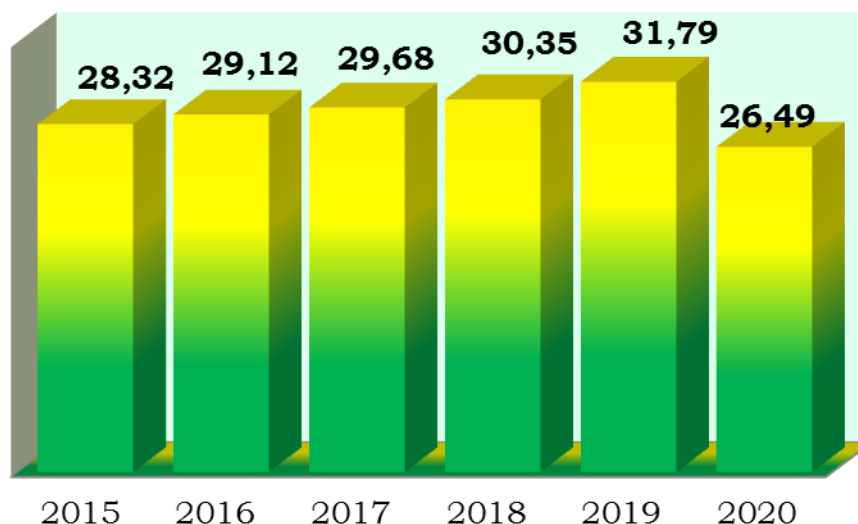
**Gambar 2.113**  
**Rasio Peserta Program KB Aktif**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**



Berdasarkan data pada Gambar 2.113, dimana jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sebanyak 35.571 jiwa atau sebesar 87,84 persen dari keseluruhan jumlah pasangan usia subur. Selanjutnya Tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 38.190 jiwa atau sebesar 96,93 persen. Dan ditahun 2020 rasio peserta KB yang aktif sedikit mengalami penurunan menjadi 65,78 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif semakin kecil, merupakan dampak dari semakin tingginya kesadaran pasangan usia subur untuk memprogram KB di Kabupaten Poso.

#### **8) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontra-sepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. Jenis-jenis MKJP yakni; Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/ Implan/Susuk, Tubektomi (pada Perempuan), dan Vasektomi (pada Laki-Laki). Data peserta KB yang menggunakan MKPJ sebesar 31,79 persen ditahun 2019 dari total peserta. Namun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 26,94 persen. Selain penggunaan alat KB di atas, PUS juga banyak menggunakan alat kontrasepsi lainnya yang disajikan datanya pada Gambar 2. 114 sebagai berikut.



Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.114**  
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**



**9) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**

Jumlah desa dan kelurahan sebanyak 170 di Kabupaten Poso yang terdiri atas 142 desa; dan sebanyak 28 kelurahan. Berdasarkan data masing-masing desa/kelurahan memiliki petugas PPKBD yang terdapat pada Tabel 2.70 sebagai berikut.

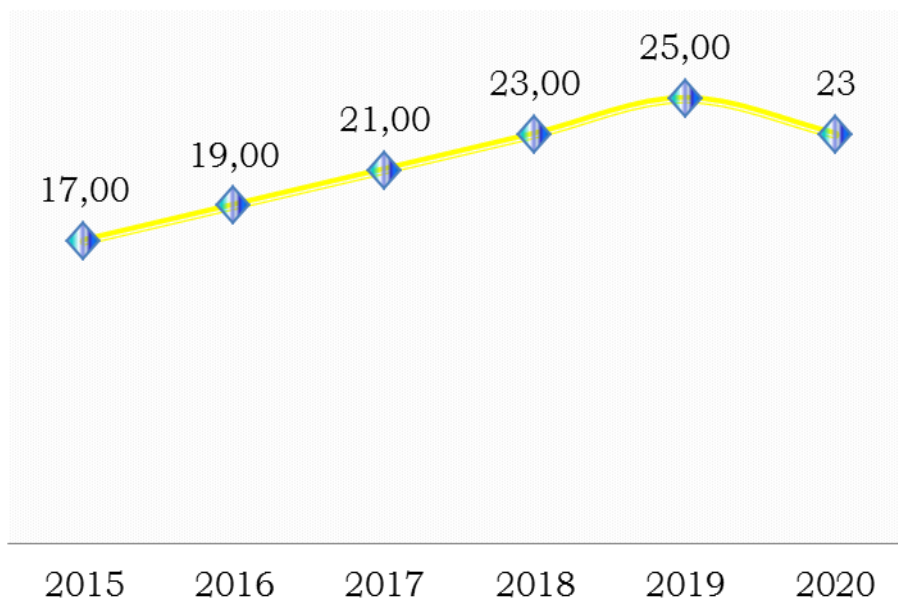
**Tabel 2.70**  
**Rasio Petugas PPKBD Setiap Desa/Kelurahan**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	170	170	170	170	170
Jumlah Desa/Kelurahan	170	170	170	170	170
Rasio	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

**10) Rata-rata Usia Kawin Pertama**

Rata-rata usia kawin pertama di Kabupaten Poso semakin menunjukkan perkembangan yang baik. Dimana, rata-rata usia kawin pertama hingga Tahun 2020 mencapai 23 tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya, seperti yang terdapat pada Gambar 2.115 sebagai berikut.

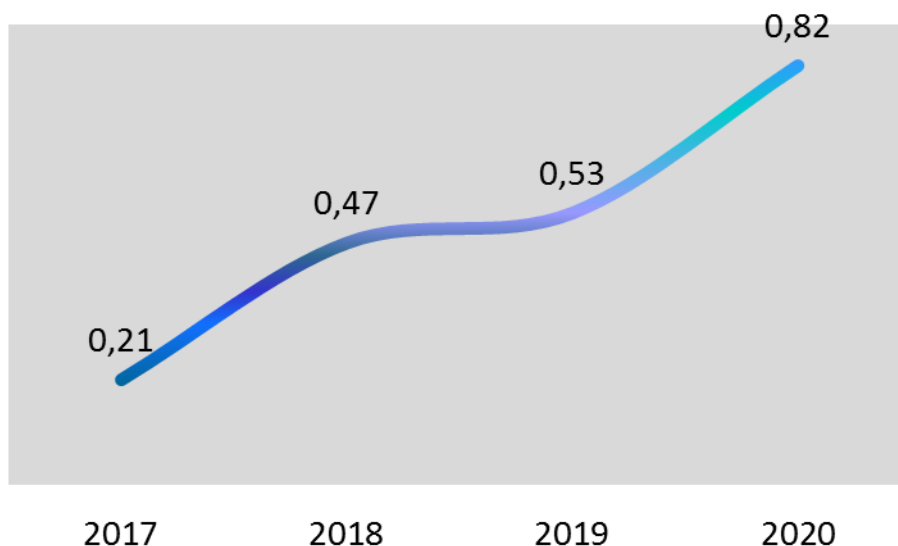


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.115**  
**Rata-rata Usia kawin Pertama di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**

### **11) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD**

Persentase pembiayaan program urusan terkait memang masih sangat rendah, namun terjadi peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2019, total anggaran untuk urusan terkait sebesar Rp7.323.374.910 atau sebesar 0,53 persen dari total anggaran APBD 2019 yang mencapai Rp1,3 triliun. Dan pada tahun 2020 persentase pembiayaan program kependudukan di Kabupaten Poso mengalami peningkatan menjadi 0,82 persen. Peningkatan ini menunjukkan komitmen daerah untuk kualitas program kependudukan di Kabupaten Poso. Data persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.116 sebagai berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Poso, tahun 2020-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.116**  
**Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Poso, Tahun 2017-2020**

#### **I. Perhubungan**

Perhubungan sebagai sektor strategis (*strategy sectors*) dalam menunjang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi daerah (*regional economy*). Semakin tinggi mobilitas arus manusia dan barang, maka makin semakin cepat berkembang dan maju daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah mobilitas arus manusia dan barang, maka semakin sulit daerah atau wilayah tersebut berkembang dan maju. Kondisi daerah terkait urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja antara



lain; a) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR); b) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum; c) Pemasangan Rambu-Rambu yang diuraikan sebagai berikut.

### 1) Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum

Untuk jasa transportasi di Kabupaten Poso sebagai bagian dari memanfaatkan moda transportasi laut dan darat. Moda transportasi untuk memperlancar arus mobilitas dan aksesibilitas antar daerah, termasuk pasokan (*supply chain*) terhadap barang-barang kebutuhan dan pengiri-man hasil produk daerah (*regional output*). Moda transportasi laut di Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat vital dan strategis, karena berfungsi untuk transportasi manusia dan barang. Tinggi rendahnya arus penumpang dan barang dalam suatu daerah, memberikan gambaran dinamika aktivitas dan perkembangan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Data jumlah arus penumpang dan angkutan umum di Kabupaten Poso selama kurun waktu 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.71 berikut ini.

**Tabel 2.71**  
**Arus Penumpang Darat, Laut dan Udara yang Turun dan Naik**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Bis	87.120	53.000	65.000	56.520	28.260
2.	Jumlah penumpang Kapal laut	713	775	881	4.326	3.044
3.	Jumlah penumpang Pesawat udara	37.983	30.339	31.489	23.278	21.753
Total Jumlah Penumpang		125.816	84.114	97.370	84.124	53.057

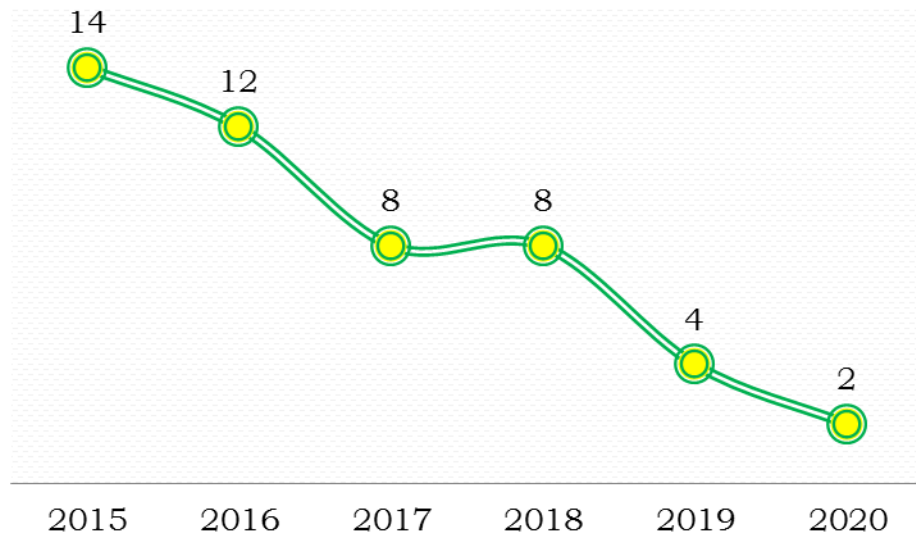
Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Melihat data pada Tabel 2.71 di atas, data jumlah penumpang bis sebanyak 28.260 orang, kemudian jumlah penumpang kapal laut sebanyak 3.044, serta jumlah penumpang pesawat udara sebanyak 21.753 orang. Sehingga, total penumpang selama Tahun 2019 di Kabupaten Poso sebanyak 53.057 orang atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini akibat dari berbagai kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju sebaran virus Covid-19 yang terjadi ditahun 2020 dan masih berlangsung hingga sekarang.

### 2) Jumlah Izin Trayek

Jumlah izin trayek di Kabupaten Poso periode Tahun 2015–2020 mengalami penurunan setiap tahun. Dimana, pada Tahun 2015 jumlah

izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 14 izin, dan Tahun 2019 tercatat hanya 4 izin, dan ditahun 2020 sedikit mengalami penurunan yakni 2 izin, seperti yang diuraikan pada data Gambar 2.117 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Tahun 2021

**Gambar 2.117**  
**Jumlah Izin Trayek yang di Keluarkan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

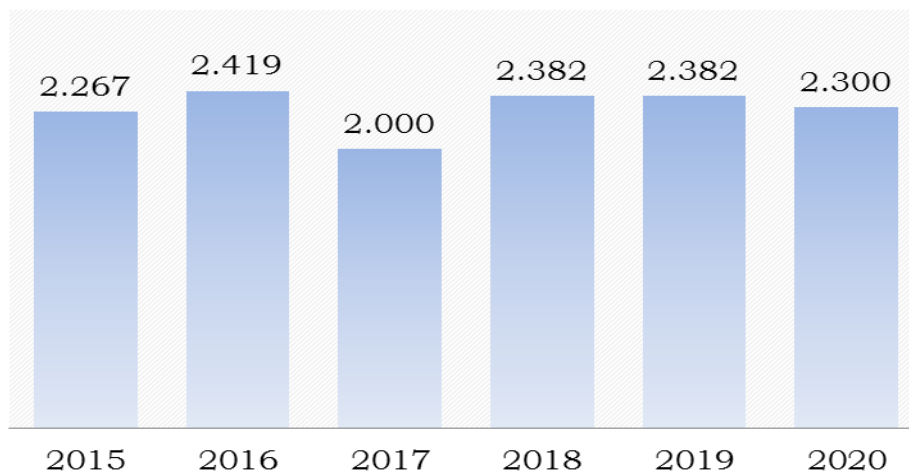
Penurunan jumlah angkutan umum/izin trayek tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Pada saat kerusakan berkepanjangan yang lalu, banyak orang/pemilik kendaraan angkutan umum yang keluar dari Kabupaten Poso, yang pindah beroperasi pada daerah lain seperti Ampana, Morowali, Parigi dan Palu yang tidak lagi kembali lagi;
- Para pemilik kendaraan/operasional angkutan umum yang ada di Kabupaten Poso tidak memperbaharui/meremajakan armada. Kenda-raan yang sudah tua, itulah yang saat ini terus beroperasi di wilayah tersebut;
- Sangat mudahnya masyarakat memperoleh kendaraan baru, baik roda dua maupun roda empat melalui sistem kredit bunga ringan, yang ditawarkan distributor penjualan kendaraan.

### **3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Kendaraan yang melakukan jumlah uji kir setiap tahun di Kabupaten Poso, dimana pada Tahun 2015 sebanyak 2.267, dan hingga pada Tahun 2019 sebanyak 2.382, dan ditahun 2020 menurun menjadi 2.300. Data jumlah uji Kir angkutan umum selama periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.118 sebagai berikut.



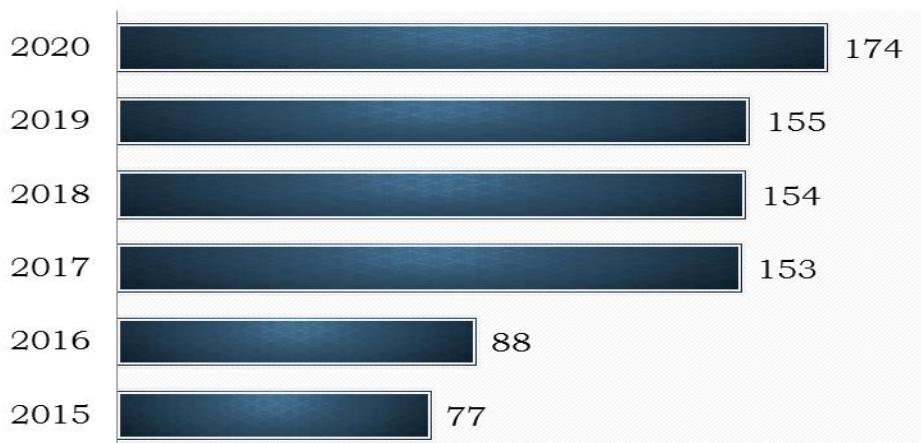


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Tahun 2021

**Gambar 2.118**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

#### 4) Pemasangan Rambu-Rambu

Data Jumlah rambu-rambu yang terpasang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Poso pada Tahun 2019 sebanyak 155 rambu-rambu dan total rambu-rambu yang terpasang di Kabupaten Poso hingga tahun 2020 sebesar 174 yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Poso. Data mengenai pemasangan rambu-rambu perhubungan lalu lintas tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.119 berikut ini.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Tahun 2021

**Gambar 2.119**  
**Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**



### 5) Jumlah Barang Angkutan Umum

Mobilitas penduduk dan barang di Kabupaten Poso tergolong cukup tinggi. Data ini dapat terlihat dari banyaknya orang dan barang yang terangkut dengan angkutan umum yang terdapat pada Tabel 2.72.

**Tabel 2.72**  
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang (orang)	110.441	115.245	128.300	84.124	53.057
2.	Jumlah Barang (ton)	186.784	200.000	295.000	239.306	298.446
Total Jumlah Angkutan Barang		297.225	315.245	423.300	323.430	351.503

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.72 di atas, jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2019 sebesar 323.430 yang terdiri 84.124 orang dan 239.306 ton barang, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 351.503. Pada tahun 2019 jumlah orang yang menggunakan angkutan umum menurun akibat Pandemi Covid-19, sedangkan jumlah barang meningkat cukup signifikan.

### 6) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur perhubungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tidak langsung, juga dari ketersediaan pelabuhan laut, bandar udara dan terminal angkutan darat yang dimiliki. Pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Poso yakni Pelabuhan (KUPP) Kelas III Poso dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.57 Tahun 2009 yang masuk dalam rencana kerja kementerian perhubungan 2010. Untuk terminal tipe A Siwagilemba Kecamatan Poso Kota Selatan, dan Bandara Kasiguncu—bandara domestik di Desa Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Bandara Kasiguncu beroperasi kembali sejak tanggal 13 Juli 2005. Data jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.73 sebagai berikut.

**Tabel 2.73**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelabuhan Laut	1	1	1	1	1



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Bandara Udara	1	1	1	1	1
3	Terminal Angkutan Darat	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, tahun 2021 (diolah kembali)

## **J. Komunikasi dan Informatika**

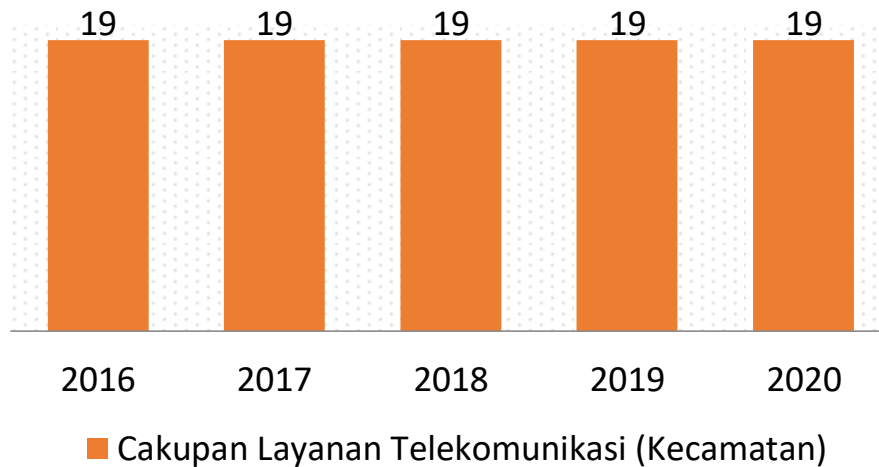
Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang sangat pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, dan cara berbisnis. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilaku-kan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan memberikan kenyamanan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan, serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, sehingga kecepatan kinerja lebih meningkat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memani-pulasi (rekayasa) data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (*up date*), yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan (*decision making*). Beberapa indikator terkait urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut.

### **1) Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Poso telah mencakup 19 wilayah kecamatan yang ada. Namun masih terdapat beberapa desa-desa yang masih terpencil yang pada setiap kecamatan yang masih kesulitan jaringan telekomunikasi. Data cakupan layana telekomunikasi di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.120 sebagai berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso Tahun 2021

**Gambar 2.120**  
**Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

Data cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2020 masih terdapat beberapa desa yang sinyal komunikasi masih lemah, dan masih terdapat beberapa desa yang blind spot. 3 Desa yang masih blind spot di Kabupaten Poso yakni Dewua, Sangginora dan Desa Lena. Desa yang masih belum terakses jaringan tersebut karena kondisi geografis yang sulit dijangka dan terpencil. Data mengenai cakupan layanan telekomunikasi periode Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.74 sebagai berikut.

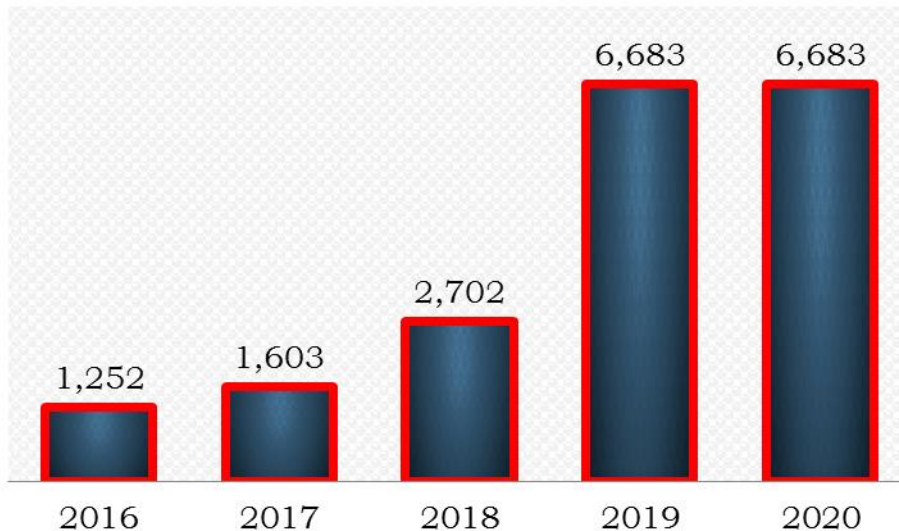
**Tabel 2.74**  
**Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan layanan komunikasi	19 Kecamatan 1. Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde) 2. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena)	19 Kecamatan 1. Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde) 2. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena)	19 Kecamatan 1. Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde) 2. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena)	19 Kecamatan 1. Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde) 2. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena)	19 Kecamatan 1. Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde) 2. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso Tahun 2021

## **2) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**

Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016, proporsi RT dengan akses internet sebanyak 1.252 RT, dan kemudian Tahun 2019 meningkat signifikan menjadi sebanyak 6.683 RT, dan untuk data tahun 2020 juga sebesar 6.683 RT, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.121 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso Tahun 2020

**Gambar 2.121**  
**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

## **K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Persentase koperasi aktif; Jumlah UKM non BPR/LKM UKM; Jumlah BPR/LKM dan; Usaha Mikro dan Kecil, yang dijabarkan sebagai berikut.

### **1) Persentase koperasi aktif**

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi rakyat yang memegang peran penting bagi pemberdayaan masyarakat miskin, terutama yang berada di daerah perdesaan. Sebagai satu diantara pelaku ekonomi, koperasi mempunyai kedudukan yang strategis bagi tatanan perekonomian yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan





aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi semestinya bisa menjadi katup penyelamat masyarakat miskin dari jeratan dan lilitan rentenir/lintah darat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dapat di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan baik. Semakin banyak koperasi aktif dalam suatu daerah tentunya akan semakin berkembang perekonomian masyarakat. aktifnya koperasi tersebut akan mendorong terjadi pergerakan dan perkembangan aktivitas atau usaha ekonomi produktif masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase koperasi aktif di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.75 sebagai berikut.

**Tabel 2.75**  
**Persentase Koperasi Aktif**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

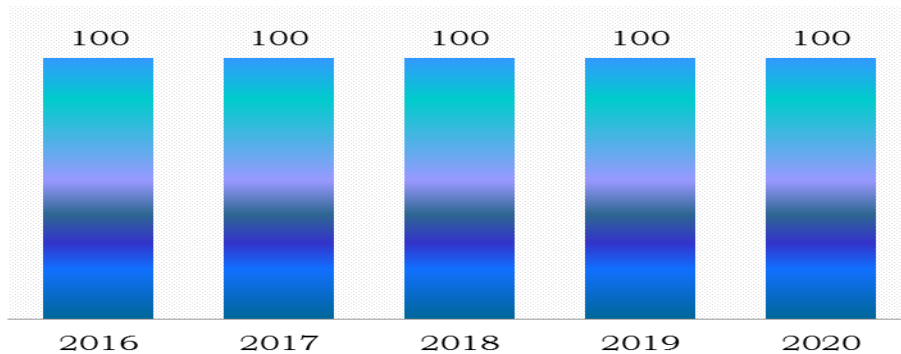
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	208	51	230	230	236
2	Jumlah koperasi	337	346	354	359	359
3	Persentase koperasi aktif	61,72	14,74	64,97	64,07	65,74

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Data perkembangan jumlah koperasi dan anggota di Kabupaten Poso dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh secara berfluktuatif. Dimana, jumlah koperasi Tahun 2017 sebanyak 346 unit dengan jumlah aktif sebesar 51 unit dengan persentase sebesar 14,74 persen. Selain itu, koperasi juga telah menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Poso. Selanjutnya, hingga Tahun 2019, persentase Koperasi aktif meningkat menjadi sebesar 64,07 persen atau sebanyak 230 dari 359 koperasi terdata di Kabupaten Poso. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase koperasi aktif di Kabupaten Poso sedikit mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen meenjadi 65,74 persen.

## **2) Persentase UKM non BPR/LKM aktif**

Persentase UKM non BPR/LKM yang aktif di Kabupaten Poso sebesar 100 persen periode Tahun 2016-2020 yang tersaji pada Gambar 2.122.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.122**  
**Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016–2020**

### 3) Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aktif

Usaha kecil dan mikro memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian daerah, untuk itu usaha kecil dan mikro harus menjadi sektor yang perlu di dorong untuk di kembangkan karena memiliki pengaruh strategis bagi akvitas ekonomi masyarakat. Data UMKM aktif di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.76 sebagai berikut.

**Tabel 2.76**  
**Persentase UMKM Aktif**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UMKM aktif	11.981	12.201	12.635	13.095	5.937
2	Jumlah UMKM	11.981	12.201	12.635	13.095	13.095
3	Persentase UMKM aktif (%)	100	100	100	100	45,34

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Merujuk pada Tabel 2.76 di atas, dimana pertumbuhan UMKM di Kabupaten Poso terus meningkat. Pada Tahun 2016 sebanyak 11.981 UMKM aktif dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 13.095 UMKM aktif. Kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah UMKM di Kabupaten Poso meningkat sebanyak 2.474 UMKM atau tumbuh sebesar 23,29 persen. Selanjutnya, persentase UMKM aktif mencapai 100 persen. Keaktifan dari UMKM ini dapat menjadi sektor penggerak (*trigger sector*) yang menghidupkan ekonomi masyarakat Kabupaten Poso. Pemerintah Kabupaten Poso juga perlu untuk menyusun regulasi untuk melindungi UMKM di tengah serbuan minimarket (perusahaan ritel) yang masuk di Kabupaten Poso. Pandemi covid-19 yang terjadi ditahun 2020 hingga



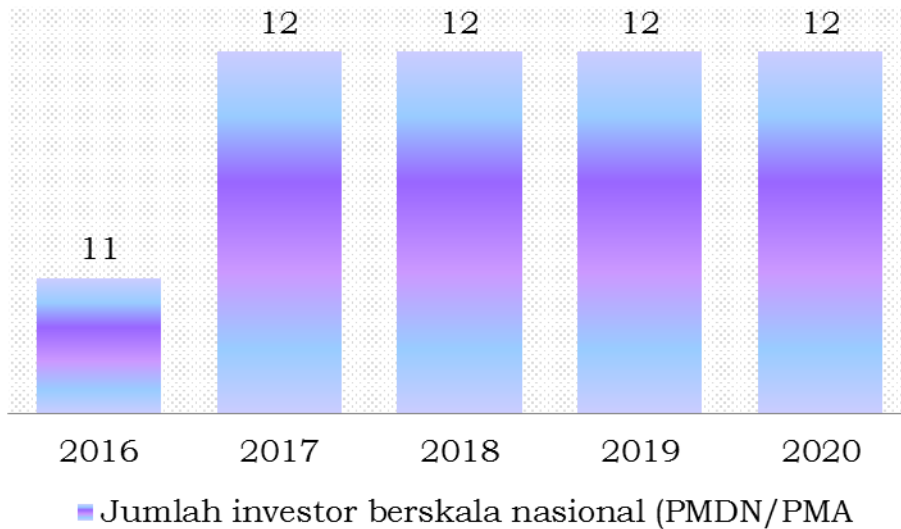
sekarang sangat berdampak pada UMKM di Kabupaten Poso, pertumbuhan ekonomi Poso yang negatif di tahun 2020 salah satunya karena Sektor UMKM yang terdampak cukup parah, sehingga sebagian besar UMUM harus tutup dan berhenti berdagang. Ditahun 2020 persentase UMKM yang aktif di Kabupaten Poso sebesar 45,34 persen.

#### **L. Penanaman Modal**

Untuk meningkatkan ekonomi daerah dan pengentasan angka pengangguran, peran penting dari para investor sangat membantu. Kehadiran para investor berskala nasional maupun internasional, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dianggap berperan untuk meningkatkan investasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman modal dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA); 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA); 3) Rasio daya serap tenaga kerja; 4) Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).

##### **1) Jumlah Investor PMDN/PMA**

PDB dan investasi memiliki korelasi positif, dimana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga naik. Sebaliknya, jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga turun. Untuk meningkatkan nilai investasi yang masuk ke daerah, juga perlu memberikan ruang bagi banyak investor. Jumlah investor yang berinvestasi di suatu daerah, menunjukkan tingkat daya tarik investasi bagi daerah yang baik dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah melalui investasi. Jumlah investor baik PMA dan PMDN di Kabupaten Poso sebanyak 12 investor, masih didominasi oleh investor dalam negeri.

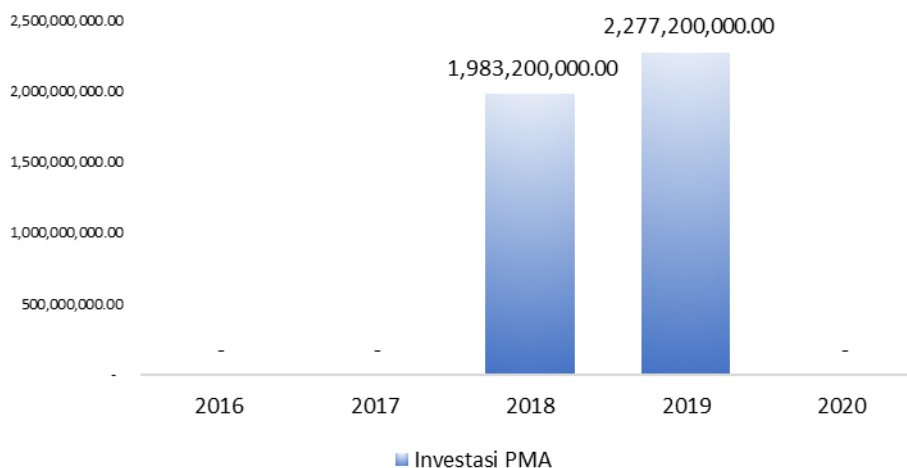


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.123**  
**Jumlah Investor Nasional (PMA/PMDN)**  
**Tahun 2016–2020**

## 2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dinamika masuknya penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap daerah berusaha menciptakan iklim yang baik bagi investasi (*market friendly*). Data jumlah investasi di Kabupaten Poso untuk PMA pada Gambar 2.124 berikut ini.

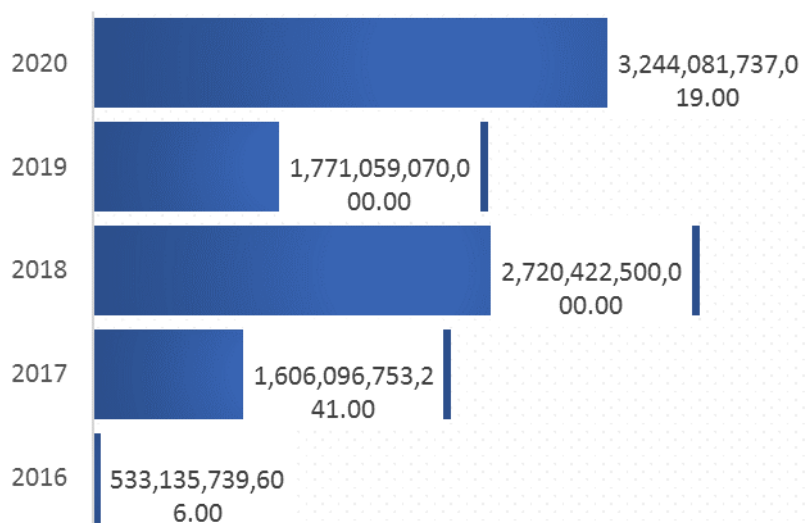


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.124**  
**Nilai Investasi PMA Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**



Nilai investasi PMA di Kabupaten Poso dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan tidak terlalu baik. Pada Tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020. Ditahun 2018 dan 2019 nilai PMA di Kabupaten Poso masing-masing sebesar Rp1.983.200.000,00 dan Rp2.277.200.000,00. Sementara itu, untuk investasi PMDN menunjukkan tren berfluktuatif, namu meningkat dalam periode 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2020, investasi PMDN di Kabupaten Poso sebesar Rp3.244.081.737.019,00 . Data nilai investasi PMDN di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.125 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.125**  
**Nilai Investasi PMDN Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

### 3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

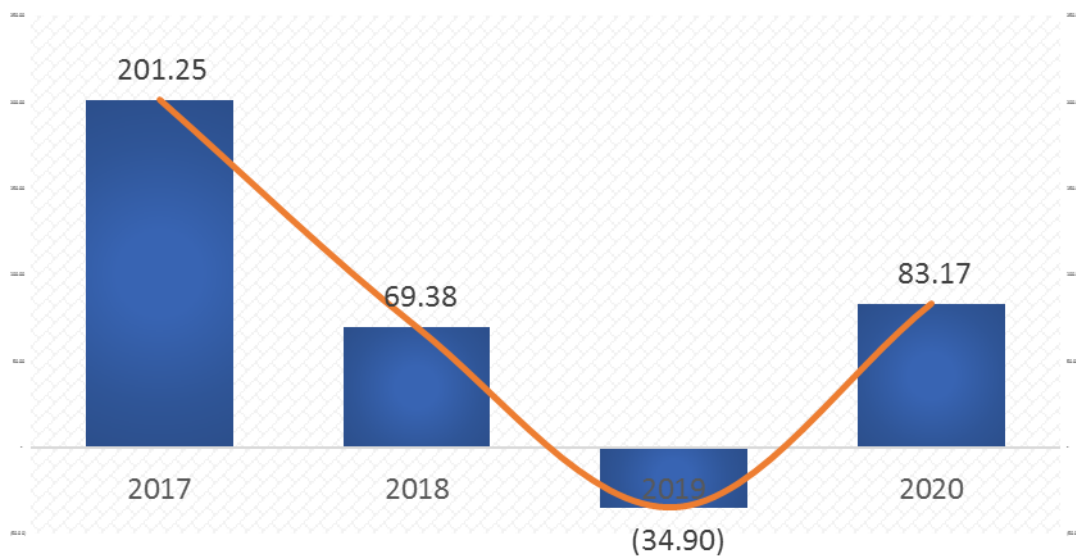
Kesempatan dan kemudahan bagi penanam modal, baik modal domestik (PMDN) maupun modal asing (PMA) antara lain bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja. Sehubungan dengan tujuan itu, maka hingga saat ini masih adanya anggapan bahwa PMA lebih bersifat padat modal (*capital intensive*), sedangkan PMDN lebih bersifat padat karya. Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Poso berdasarkan data yang tersedia hanya Tahun 2020 yang dapat diolah, dimana rasio serap tenaga kerja sebesar 0,000000000193.

### 4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rp)

PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di



wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN di Kabupaten Poso pada Tahun 2017 terjadi kenaikan sangat besar mencapai 201,25 persen, dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 69,38 persen. Namun, pada Tahun 2019 nilai investasi PMDN di Kabupaten Poso mengalami kontraksi atau tumbuh minus 34,90 persen. Kemudian ditahun 2020 investasi PMDN Kabupaten Poso tetap tumbuh sebesar 83,17 persen. Data kenaikan dan penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Poso terdapat pada Gambar 2.126 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.126**  
**Kenaikan/Penurunan (%) Investasi PMDN Kabupaten Poso**  
**Tahun 2017-2020**

#### **M. Kepemudaan dan Olahraga**

Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan melaksanakan kegiatan yang erat hubungannya dengan Pemuda dan Olahraga. Generasi muda merupakan penerus tongkat estafet pembangunan daerah. Kegiatan dilakukan dengan memfasilitasi generasi muda, untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda, sehingga generasi muda tidak hanya mengandalkan masuk pada pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup menjalankan usaha menjadi *entrepreneur*. Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya



penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat Kabupaten, yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Data capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.77 sebagai berikut.

**Tabel 2.77**

**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Poso  
Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah organisasi pemuda yang dibina	80	87	90	90	14
2	Jumlah Pemuda Non Organisasi yang dibina	5	7	10	10	142
3	Jumlah Organisasi Pemuda	50	55	60	60	58
4	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat nasional	6	24	25	25	2
5	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat regional (asean)	1	2	3	3	0
6	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat internasional	2	2	2	2	0

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupate Poso, 2021

## **N. Statistik**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Instrumen analisis sebagai bahan eva-luasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan bahan pene-ntuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (data statistik). Ketersediaan dokumen sta-tistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pemba-ngunan daerah dan sebagai bahan menetapkan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen statistik dimaksud adalah Indikator Pertumbuhan Ekonomi,



Kinerja Pembangunan Manusia, Profil Kabupaten, Profil Kecamatan dan Profil Kesejahteraan Rakyat. Ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.78 sebagai berikut.

**Tabel 2.78**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik**  
**Di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Poso tahun 2021 (diolah kembali)

## **O. Persandian**

### **1) Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah**

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Dalam struktur Diskominfo, Seksi Persandian berada di bawah Bidang Persandian dan Statistik. Salah satu wujud tugasnya yaitu implementasi absen pegawai dengan penggunaan sidik jari dan tanda tangan elektronik bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Poso. Persentase OPD yang menerapkan sistem tanda elektronik mencapai 100 persen.

## **P. Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Poso ditujukan untuk melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global yang cukup negatif. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Poso memasuki kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah lokal, namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Poso seperti halnya kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar sehingga solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja

"jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan". Penyelenggaraan urusan kebudayaan di tingkat Kabupaten terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

### **1) Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni dan budaya yang dilakukan di Kabupaten Poso yang telah menjadi agenda pariwisata rutin pemerintah daerah yakni sebanyak 3 festival diantaranya Festival Dana Poso dan Festival Budaya Daerah serta Festival Mosintuwu.

- Festival Dana Poso dan Festival Budaya Daerah: jelajah dana poso, pemilihan putra putri Danau Poso dan Ongga Bale serta Dero.
- Festival Sintuwu: elaran hasil bumi yang dipajang di lokasi pasar desa Festival Mosintuwu, serta karya-karya kreatif kerajinan yang dibuat oleh berbagai komunitas di stand pameran Festival Mosintuwu. Tidak ketinggalan, pojok etnobotani dan iktiologi Danau Poso yang banyak dikunjungi pelajar, menampilkan 94 jenis botani di Kabupaten Poso dan ikan-ikan endemik di 5 aquarium.

Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai sekarang. Dikarenakan pandemi yang terjadi pemerintah daerah Kabupaten Poso tidak menyelenggarakan festival seni dan budaya di tahun tersebut.

**Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

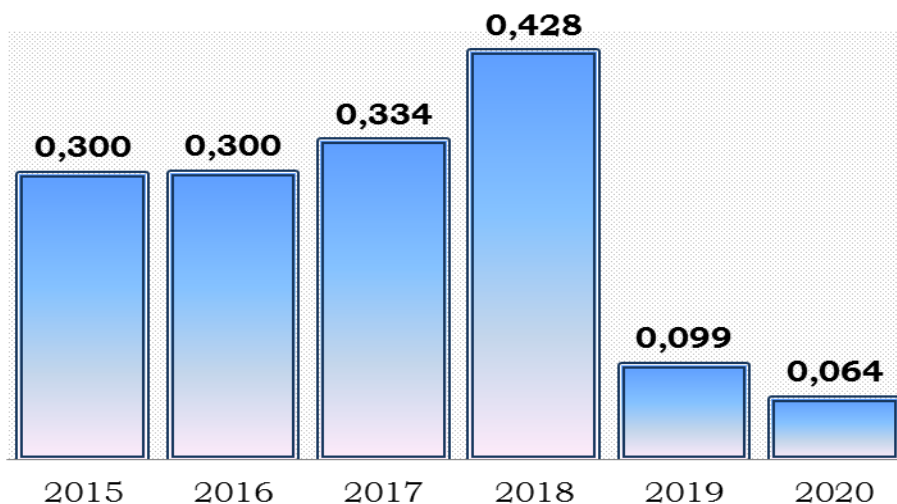
**Gambar 2.127**  
**Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

## **Q. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Pemerintah Kabupaten Poso menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Gambaran capaian indikator urusan perpustakaan dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Jumlah Kunjungan Perpustakaan Per Tahun**

Jumlah kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan menggambarkan tingkat minat membaca masyarakat suatu daerah. Jumlah kunjungan perpustakaan pertahun adalah jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun dibagi jumlah populasi yang harus dilayani. Tujuan masyarakat berkunjung ke perpustakaan dapat berbeda satu sama lain. Jumlah kunjungan ke perpustakaan di Kabupaten Poso dalam periode tahun 2015 s/d tahun 2020 cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2015 jumlah kunjungan ke perpustakaan sebesar 0,300 pengunjung per populasi, meningkat hingga tahun 2018 menjadi 0,428 per populasi. Namun pada tahun 2019 kunjungan ke perpustakaan Kabupaten Poso menurun sangat signifikan menjadi 0,099 per populasi dan ditahun 2020 menurun kembali menjadi 0,064 per populasi. Data jumlah kunjungan perpustakaan per tahun terdapat pada Gambar 2.128 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.128**  
**Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**



## 2) Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 sebanyak 97 perpustakaan. Untuk data rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Poso masih sangat kecil yakni sebesar 0,04. Pemerintah Kabupaten Poso melalui OPD terkait perlu melakukan inovasi layanan perpustakaan berbasis online (e-perpustakaan), agar seluruh masyarakat Kabupaten Poso dapat lebih mudah mengakses perpustakaan Kabupaten Poso. Data mengenai rasio perpustakaan persatuan penduduk ditampilkan pada Tabel 2.79 sebagai berikut.

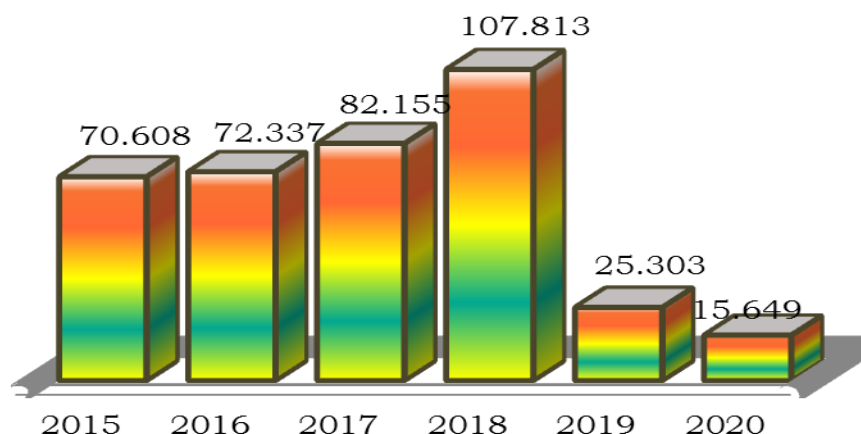
**Tabel 2.79**  
**Ketersediaan Dokumen Statistik**  
**Di Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	97	97	97	97	97
Jumlah Penduduk	240.812	245.993	251.815	256.393	244.857
Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Poso, 2021 (diolah kembali)

## 3) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

Rata-rata jumlah kunjungan perpustakaan setiap tahunnya mengalami penurunan pengunjung selama periode Tahun 2015-2020. Diman pada tahun 2015 sebanyak 70.608 orang, meningkat hingga tahun 2018 sebesar 107.813 orang, namun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2020 menjadi 15.649 orang. Data terkait dapat dilihat pada Gambar 2.129 ini.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.129**  
**Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

#### **4) Jumlah Koleksi Buku**

Jumlah koleksi buku yang terdaftar di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 cenderung mengalami penurunan. Jumlah koleksi buku Tahun 2015 sebanyak 511 koleksi. Meningkat signifikan Tahun 2016 menjadi sebanyak 1.130 koleksi. Namun 3 (tiga) tahun kemudian jumlah koleksi buku menurun menjadi 450 koleksi buku hingga tahun 2020, ditahun 2020 terjadi refocusing anggaran yang menyebabkan penganggran untuk penambahan buku tidak tersedia . Perpustakaan Daerah Kabupaten Poso perlu menerapkan pelayanan berbasis *online*, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses koleksi buku. Data mengenai jumlah koleksi buku di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.130 sebagai berikut.



Sumber:Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.Poso, 2021

**Gambar 2.130**  
**Jumlah Koleksi Buku perpustakaan per tahun Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**

#### **2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pemerintah daerah bersifat pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 meliputi 8 (delapan) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah pilihan berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Poso dijabarkan secara detail sebagai berikut.

##### **A. Pariwisata**

#### **1) Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya**

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun



wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2016-2020 sebanyak 332.195 orang yang masih didominasi wisatawan nusantara. Sementara itu, jumlah event festival seni dan budaya yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) event setiap tahun. Namun pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19, tidak ada event seni budaya yang dilaksanakan. Data jumlah kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan event seni dan budaya di Kabupaten Poso selama kurun waktu Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.80 sebagai berikut.

**Tabel 2.80**

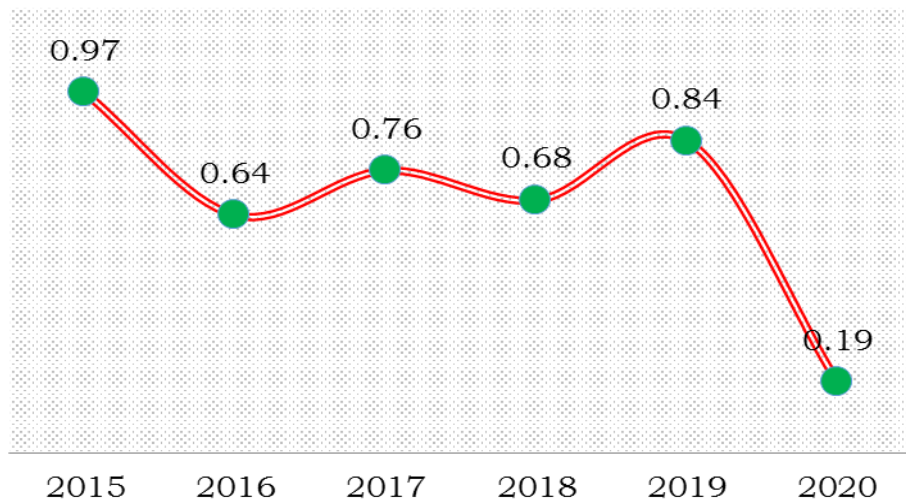
**Jumlah Kunjungan Pariwisata dan Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Lapangan Usaha	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisman	3.061	1.450	1.129	1.691	214
2	Jumlah Kunjungan Wisnu	79.098	86.540	55.456	37.427	19.374
3	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan budaya	3	3	3	4	0
	Total Kunjungan Wisatawan	82.159	87.990	56.585	39.118	19.588

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso, 2021

**2) PAD Sektor Pariwisata**

Sektor Pariwisata dapat menjadi sektor baru yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Poso. Persentase sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Poso masih sangat rendah, dan cenderung menurun setiap tahun. Pada Tahun 2015 kontribusi Sektor Pariwisata sebesar 0,97 persen dan hingga pada Tahun 2019 hanya sebesar 0,84 persen. Ditahun 2020 sektor pariwisata di Kabupaten Poso adalah yang terdampak cukup besar oleh Pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan yang menurun dan pembatasan-pembatasan oleh kebijakan penanganan pandemic Covid-19, hal ini sehingga berdampak pada penerimaan daerah dari sector pariwisata. Dimana pada tahun 2020 PAD dari sector pariwisata sebesar 0,19 persen. Data persentase PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Poso kurun waktu 2015-2020 terdapat Secara pada Gambar 2.131 berikut ini.



Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Poso, 2021

**Gambar 2.131**  
**Persentase PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015–2020**

## **B. Pertanian**

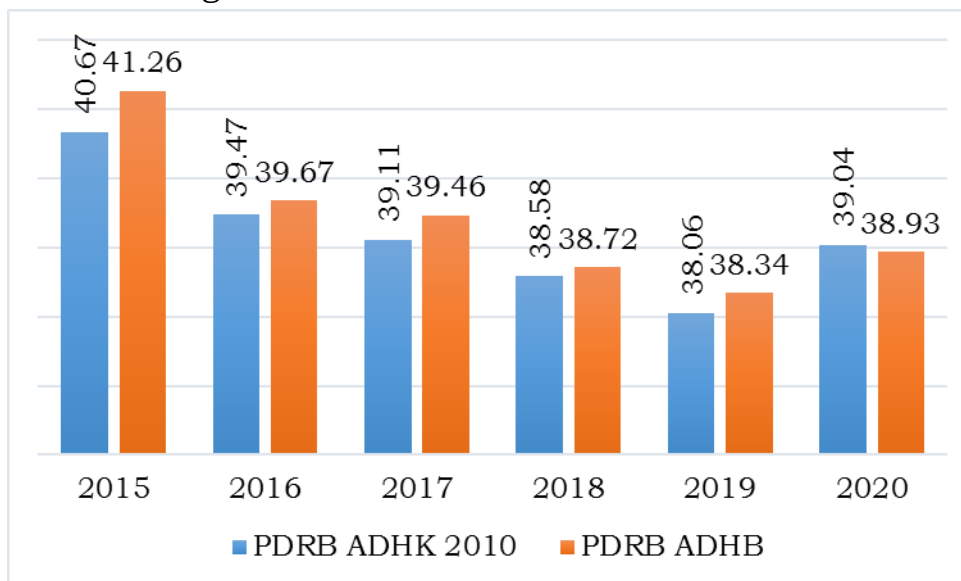
Sektor Pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, termasuk di Kabupaten Poso. Keberhasilan program pembangunan Sektor Pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi, serta perencanaan pengembangan selanjutnya, oleh karena itu disajikan data mengenai kondisi Sektor Pertanian di Kabupaten Poso serta sub-sektor, yakni: Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Sub-Sektor Perkebunan; Sub-Sektor Kehutanan, Sub-Sektor Peternakan; dan Sub-Sektor Perikanan.

Gambaran umum kondisi daerah yang erat keterkaitannya dengan urusan Pertanian adalah: Kontribusi Sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB; Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB; Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dan cakupan bina kelompok petani akan dijelaskan secara detail melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut.

### **1) Kontribusi Sektor Pertanian**

Kabupaten Poso merupakan daerah pertanian. Oleh karena itu Sektor Pertanian memegang peranan yang strategis dalam pengembangan

ekonomi daerah. Kategori ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sub-kategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Gambaran mengenai kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.132 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.132**  
**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020 (%)**

Merujuk pada data Gambar 2.132 di atas, persentase kontribusi Sektor Pertanian tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2015, kontribusi Sektor Pertanian masing-masing terhadap PDRB ADHB sebesar 41,26 persen dan PDRB ADHK 2010 sebesar 40,67 persen, sedangkan pada Tahun 2020 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 38,93 persen dan 39,04 persen. Kondisi ini menunjukkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi Sektor Pertanian makin lama makin kecil terhadap perekonomian Kabupaten Poso.

## **2) Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya per hektar**

Secara umum produksi tanaman pertanian di Kabupaten Poso mengalami penurunan. Kemarau panjang menjadi salah satu penyebab





penurunan produksi. Produksi tanaman padi di Kabupaten Poso pada Tahun 2020 sebesar 99,359.51 ton. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya mencapai produksi sebesar 118,785.13 ton. Untuk tanaman jagung juga mengalami penurunan menjadi sebesar 8,510.00 ton. Selanjutnya untuk produksi kacang kedelai mengalami peningkatan, sebesar 471.00 ton. Selanjutnya, untuk tanaman kacang tanah produksi sebesar 107 ton, kacang hijau sebesar 20,6 Ton, tanaman ketela pohon sebesar 7.626 ton, dan ketela rambat sebesar 7.043 ton. Data jumlah produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan lainnya di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.81 sebagai berikut.

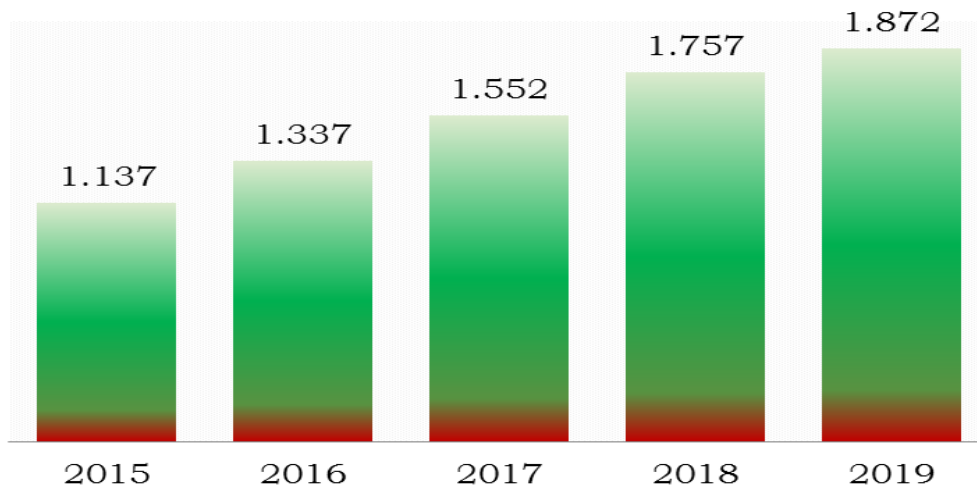
**Tabel 2.81**  
**Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2015-2019**

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	160,085.00	182,557.00	138,559.82	118,785.13	99,359.51
Jagung	32,660.00	53,888.0	77,515.00	54,449.00	8,510.00
Kacang Kedelai	1,974.00	1,108.0	6,116.00	189.00	471.00
Kacang Tanah	156.81	156.8	228.00	107.00	107.00
Kacang Hijau	14.00	14.0	29.00	164	20,6
Ketela Pohon	5,203.54	5,203.5	11,512.00	7,626.00	7,626.00
Ketela Rambat	2,657.40	2,657.4	5,698.00	7,043.00	7,043.00

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2020 (diolah kembali)

### **3) Cakupan Bina Kelompok Petani**

Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Poso pada Tahun 2015 sebanyak 1.137 kelompok, dan hingga Tahun 2019 meningkat menjadi 1.872 kelompok tani. Data cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.133 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pertanian 2020 (diolah kembali)

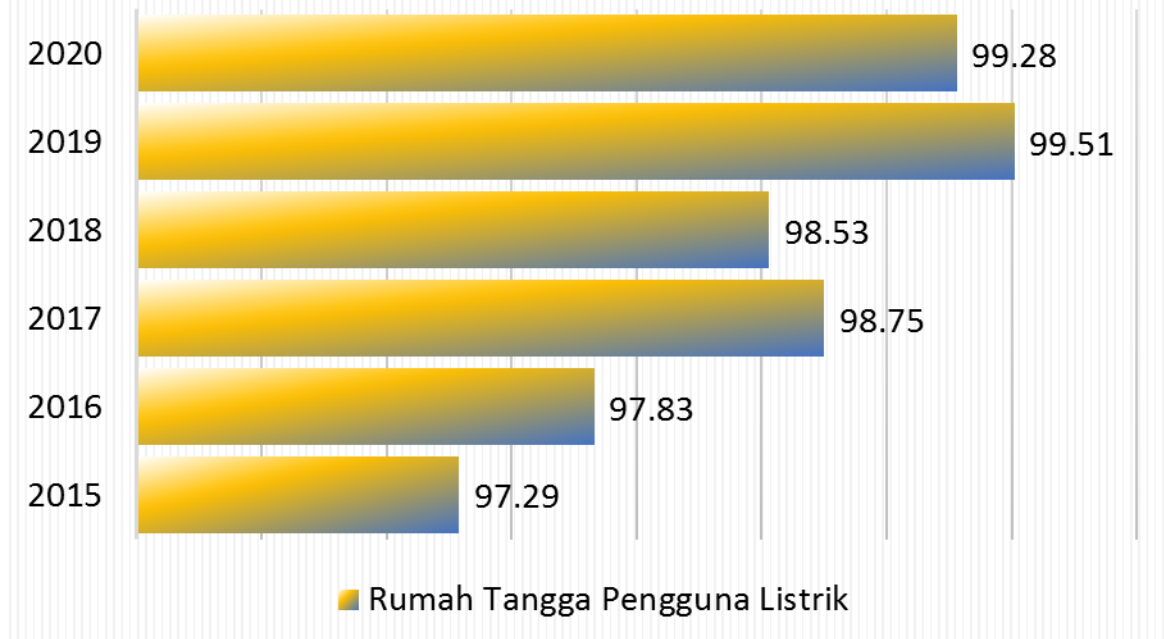
**Gambar 2.133**  
**Cakupan Bina Kelompok Tani**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2019**

### **C. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Poso di tinjau dari beberapa indikator capaian kinerja antara lain; Persentase pertambangan tanpa izin.

#### **1) Persentase RT Pengguna Listrik**

Berdasarkan data pada Gambar 2.134 di bawah ini, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Poso pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 97,29 persen; Tahun 2016 tercatat sebesar 97,83 persen; Tahun 2017 sebesar 98,75 persen; Tahun 2018 sebesar 98,53 persen. Selanjutnya pada Tahun 2019 meningkat hingga mencapai 99,51 persen. Kemudian ditahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 99,28 persen. Data persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2015-2020 sebagai berikut.



Sumber: Profil Kabupaten Poso tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.134**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**Kabupaten Poso Tahun 2015-2020**

Selanjutnya sebaran persentase RT yang telah mengakses listrik di Kabupaten Poso pada setiap Kecamatan terdapat pada Tabel 2.82 sebagai berikut.

**Tabel 2.82**  
**Rasio Elektrifikasi Kabupaten Poso Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)			
			PLN	Non PLN	Belum Berlistrik	Total Rasio Elektrifikasi
1	Pamona Selatan	5.459	92,18	0	7,82	92,18
2	Pamona Barat	2.508	97,33	0	2,67	97,33
3	Pamona Tenggara	1.973	98,07	0,1	1,82	98,18
4	Lore Selatan	1.703	99,65	0	0,35	99,65
5	Lore Barat	838	95,94	0	4,06	95,94
6	Pamona Pusalemba	5.556	98,51	0,59	0,9	99,10
7	Pamona Timur	6.857	93,51	3,69	2,8	97,20
8	Lore Utara	3.770	91,49	0,53	7,98	92,02
<b>9</b>	<b>Lore Tengah</b>	<b>1.279</b>	<b>69,9</b>	<b>11,96</b>	<b>18,14</b>	<b>81,86</b>
10	Lore Timur	1.572	90,08	4,45	5,47	94,53
<b>11</b>	<b>Lore Peore</b>	<b>1.010</b>	<b>66,04</b>	<b>20,3</b>	<b>13,66</b>	<b>86,34</b>
12	Poso Pesisir	5.841	95,65	0,27	4,07	95,93
13	Poso Pesisir	2.693	95,85	0	4,16	95,84



No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)			
			PLN	Non PLN	Belum Berlistrik	Total Rasio Elektrifikasi
	Selatan					
14	Poso Pesisir Utara	5.409	96,57	0,57	2,85	97,15
15	Lage	5.520	97,63	1,21	1,16	98,84
16	Poso Kota	5.056	100	0	0	100
17	Poso Kota Utara	4.802	99,92	0	0,08	99,92
18	Poso Kota Selatan	2.538	100	0	0	100
TOTAL		64.384	93,24	2,43	4,33	96,78

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data pada Tabel 2.82 di atas, disajikan data mengenai rasio elektrifikasi RT pada setiap kecamatan di Kabupaten Poso. Dimana terdapat dua kecamatan dengan rasio elektrifikasi masih di bawah rata-rata 90 persen, yakni Kecamatan Lore Peore sebesar 86,34 persen; dan Kecamatan Lore Tengah sebesar 81,86 persen.

#### **D. Perdagangan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; Ekspor Bersih Perdagangan; Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

##### **1) Ekspor Bersih Perdagangan**

Perkembangan ekspor bersih perdagangan Kabupaten Poso dapat dilihat pada Tabel 2.83 sebagai berikut.

**Tabel 2.83**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rp)	642,47	697,22	4.016,80	6.747,23	4.796,72
Impor Barang dan Jasa (Miliar Rp)	2.285,14	2.494,73	6.203,83	9.183,30	7.051,72
Nilai Bersih Ekspor (Miliar Rp)	(1.642,67)	(1.797,51)	(2.187,03)	(2.436,07)	(2.255,00)

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020, Tahun 2021 (diolah kembali)

Merujuk data pada Tabel 2.83 di atas, kurun Tahun 2016-2020 nilai ekspor bersih Kabupaten Poso selalu negatif. Pada Tahun 2016 nilai ekspor bersih negatif (Rp1.642,67) miliar, hingga Tahun 2020 nilai ekspor bersih lebih negatif sebesar (Rp2.255,00) miliar, menurun signifikan dari

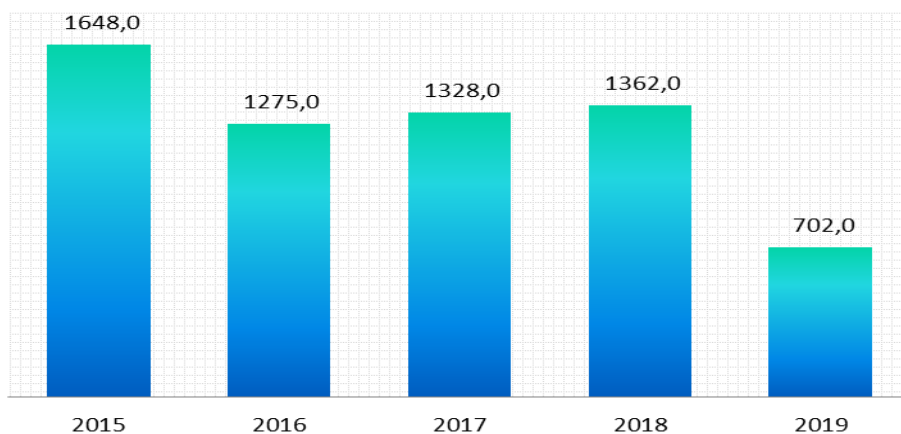
tahun-tahun sebelumnya.

## **E. Perindustrian**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian adalah capaian kinerja mengenai; Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri; Pertumbuhan Industri dan Cakupan bina kelompok pengrajin.

### **1) Pertumbuhan Industri**

Tren membaiknya perekonomian nasional dan regional, khususnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah—menjadi faktor pendorong pertumbuhan Sektor Industri daerah, termasuk kondisi industri di Kabupaten Poso. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi daerah yang semakin membaik dari tahun sebelumnya, terutama jumlah perusahaan industri dan daya serap tenaga kerja yang naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai tambah (*value added*) Sektor Industri terhadap pendapatan regional di Kabupaten Poso. Data pertumbuhan industri di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.135 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2020 (diolah kembali)

**Gambar 2.135**  
**Pertumbuhan Industri di Kabupaten Poso, Tahun 2015-2019**

Mengutip data yang tersaji pada Gambar 2.135 di atas, Jumlah perusahaan industri sesuai data pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.648 perusahaan yang terdiri dari: Industri formal dan nonformal; Tahun 2016 tercatat sebanyak 1.275 perusahaan; Tahun 2017 sebanyak 1.328; Tahun 2018 sebanyak 1.362 hingga Tahun 2019 jumlah industri di Kabupaten Poso menurun menjadi 702 industri.





## 2) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor kunci (*key sector*) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Poso memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan PDRB Kabupaten Poso dan memiliki peran penting sebagai penyanggah ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Poso. Data persentase kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.84 sebagai berikut.

**Tabel 2.84**  
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020 (Jutaan Rp)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sektor Industri					
Nilai Sektor Industri ADHK 2010	78.817	83.362	88.831	94.064	91,910
Nilai Sektor Industri ADHB	111.206	122.360	134.699	145.953	148,430
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHK 2010	5.413.903	5.746.975	6.102.817	6.475.826	6.224,310
Nilai PDRB ADHB	7.285.052	8.021.441	8.732.894	9.505.743	9.219,870
Kontribusi					
PDRB ADHK 2010	1,46	1,45	1,46	1,45	1,48
PDRB ADHB	1,53	1,53	1,54	1,54	1,61

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Mengutip data pada Tabel 2.84 di atas, dimana persentase kontribusi Sektor Industri masing-masing terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terlihat di Kabupaten Poso Tahun 2016 sebesar 1,53 persen dan sebesar 1,46 persen. Hingga pada Tahun 2020 kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Poso tidak banyak berubah yakni masing-masing sebesar 1,54 persen dan sebesar 1,61 persen. Kondisi ini menunjukkan masih kecilnya kontribusi Sektor Industri terhadap perekonomian di Kabupaten Poso selama kurun waktu tersebut.

## F. Transmigrasi

Untuk bidang transmigrasi diuraikan informasi tentang capaian kinerja bidang transmigrasi yaitu jumlah UPT pendukung Kota Terpadu



Mandiri, Jumlah warga transmigran yang dibina di kawasan transmigrasi, dan jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi lokal di Kabupaten Poso kurun waktu Tahun 2016-2020 yang terdapat pada Tabel 2.85 menjelaskan capaian kinerja bidang transmigrasi sebagai berikut.

**Tabel 2.85**  
**Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2016–2020**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah UPT Pendukung Kota Terpadu Mandiri (Unit)	4	4	4	4	4
Jumlah warga transmigran yang dibina di kawasan transmigrasi (KK)	735	435	435	100	100
Jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi lokal (KK)	546	100	533	100	100

Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Poso, 2021

#### **2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang**

##### **A. Perencanaan Pembangunan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada; 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada; 4) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda; 5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; 6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD; dan 7) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang dijabarkan sebagai berikut.

##### **1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja-OPD. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang ada harus memiliki prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan, perencanaan yang terintegrasi, serta



perencanaan yang sesuai dinamika perkembangan serta kondisi dan potensi yang dimiliki. Dokumen perencanaan RPJP merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD kabupaten Poso ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025.

**Tabel 2.86**

**Dokumen Perencanaan RPJPD Telah Ditetapkan dengan Perda  
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
20Dokumen perencanaan RPJPD (2005-2025) yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Poso, Tahun 2021 (diolah kembali)

**2) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada**

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penetapan dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Dan untuk dokumen Perencanaan RPJMD periode tahun 2021-2026 masih dalam tahapan penyusunan.

**Tabel 2.87**

**Dokumen Perencanaan RPJMD Telah Ditetapkan dengan PERDA  
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Poso, Tahun 2021 (diolah kembali)

**3) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya menyusun dokumen RKPd. Perencanaan Kabupaten Poso dalam 2 tahun terakhir menjadi dokumen perencanaan RKPd terbaik pertama di Provinsi Sulawesi Tengah dan



bahkan menjadi dokumen RKPD terbaik kedua Nasional pada tahun 2019.

**Tabel 2.88**

**Dokumen Perencanaan RKPD Telah Ditetapkan dengan Perkada  
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Poso, Tahun 2021 (diolah kembali)

**4) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda**

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. RTRW kabupaten poso ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8).

**Tabel 2.89**

**Dokumen Perencanaan RTRW Telah Ditetapkan dengan PERKADA  
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Poso, Tahun 2021 (diolah kembali)

**B. Keuangan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Keuangan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; 1) Opini BPK terhadap laporan keuangan; 2) Persentase SILPA; 3) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; 4) Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; 5) Persentase belanja pendidikan (20 persen); 6) Persentase belanja kesehatan (10 persen); 7) Persentase belanja langsung; 8)



Persentase belanja belanja tidak langsung; 9) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; dan 10) Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.

### 1) **Opini BPK terhadap laporan keuangan**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini atas LKPD Kabupaten Poso periode Tahun 2016- 2020 terdapat pada Tabel 2.90 sebagai berikut.

**Tabel 2.90**  
**Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Poso	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

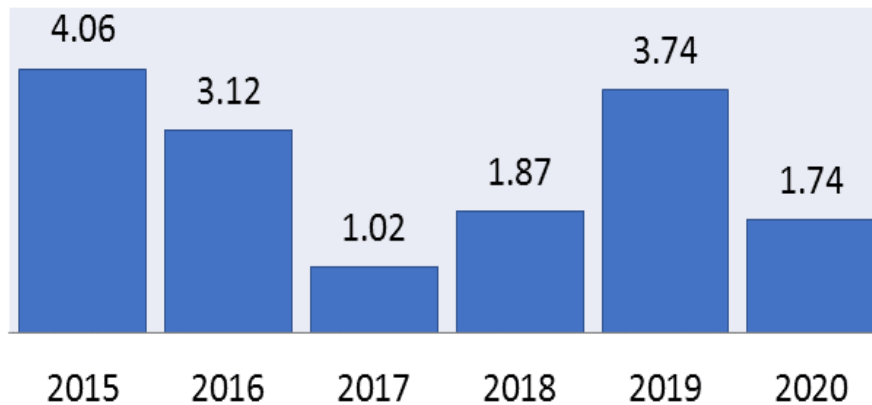
Sumber: DPPKAD Kabupaten Poso, Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.90 di atas, Opini LKPD Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan kualitasnya. Pada periode Tahun 2016-2017 opini LKPD Kabupaten Poso adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya, periode Tahun 2018-2020, opini LKPD Kabupaten meningkat kualitasnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

### 2) **Persentase SILPA**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Besaran SILPA terhadap APBD Kabupaten Poso dari Tahun 2015 sebesar 4,06 persen yakni sebesar Rp46.945.242.136,86; dan hingga Tahun 2019 menurun menjadi sebesar 3,74 persen atau sebanyak Rp51.770.681.759,91 selanjutnya ditahun 2020 SILPA sebesar 24.387.142.783,78 atau sebesar 1,74 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, Data terkait terdapat pada Gambar 2.136 sebagai berikut.



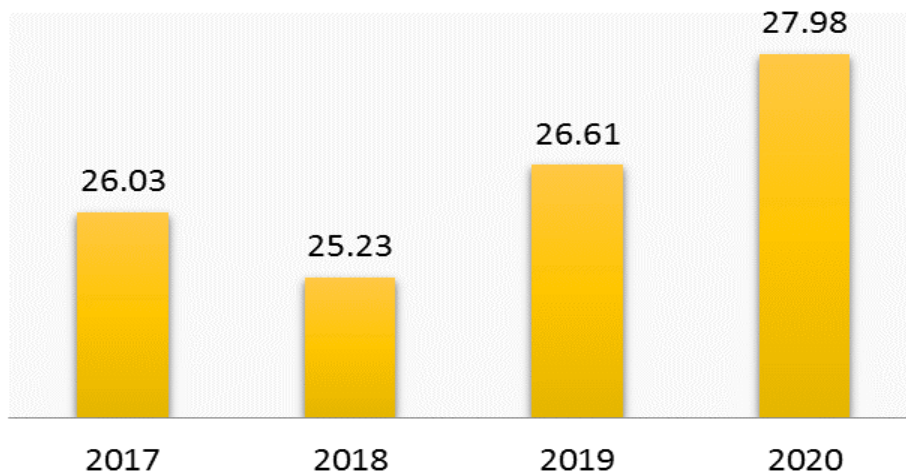


Sumber: DPPKAD, Tahun 2020-2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.136**  
**Persentase SILPA Kabupaten Poso, Tahun 2015-2020**

### 3) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai dengan amanah regulasi yang tertuang dalam undang-undang mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Data persentase belanja Pendidikan di Kabupaten Poso periode Tahun 2017-2020 terdapat pada Gambar 2.137 sebagai berikut.



Sumber: DPPKAD, Tahun 2021 (diolah kembali)

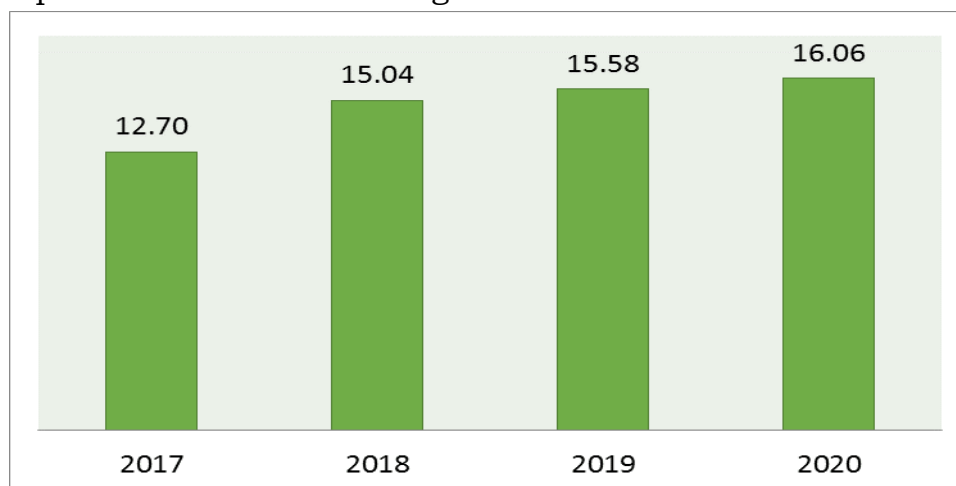
**Gambar 2.137**  
**Persentase Belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Poso  
Tahun 2017-2020**

Merujuk pada ketentuan belanja pendidikan 20 persen yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Poso

sudah melaksanakan perintah regulasi tersebut. Berdasarkan data persentase belanja yang alokasikan khusus untuk urusan Pendidikan yakni belanja urusan pendidikan kurun Tahun 2017-2020 selalu meningkat tiap tahun yakni Tahun 2017 sebesar Rp331.999.674.504,00; Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp333.549.982.033,00 hingga Tahun 2019 anggaran Pendidikan meningkat menjadi sebesar Rp368.769.132.033,00. Mengutip data tersebut, maka disimpulkan persentase anggaran pendidikan di Kabupaten Posos sudah di atas 20 persen, yakni masing-masing Tahun 2017 sebesar 25,29 persen; Tahun 2018 sebesar 24,84 persen; dan Tahun 2019 sebesar 26,94 persen. Kemudian pada tahun 2020 anggaran untuk urusan pendidikan sebesar 27,98 persen.

#### **4) Persentase belanja kesehatan (10%)**

Merujuk pada Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan: besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 (lima) persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Pada ayat (2): Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Data belanja kesehatan terhadap total APBD Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2017-2019 terdapat pada Gambar 2.138 sebagai berikut.



Sumber: DPPKAD, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.138**  
**Persentase Belanja urusan Kesehatan Kabupaten Poso**  
**Tahun 2017-2020**

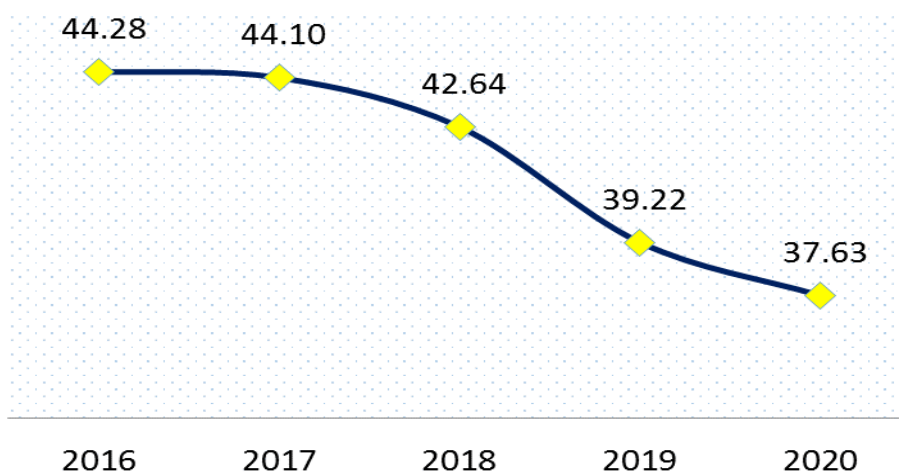
Urusan kesehatan di Kabupaten Poso berada pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Kabupaten Poso. Dimana, kedua



perangkat daerah tersebut menggunakan total anggaran untuk urusan kesehatan pada Tahun 2017 sebesar Rp165.182.739.850,00, meningkat di Tahun 2018 menjadi sebesar Rp208.365.239.554,90; dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp234.342.672.824,50. Persentase anggaran kesehatan dari total APBD Kabupaten Poso juga di atas 10 persen. Yakni masing-masing pada Tahun 2017 sebesar 12,58 persen; Tahun 2018 sebesar 15,52 persen; dan pada Tahun 2019 sebesar 17,12 persen, dan ditahun 2020 sebesar 16,06 persen.

#### **5) Persentase belanja langsung**

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Perkembangan belanja langsung di Kabupaten Poso periode 2016-2019 mengalami penurunan setiap tahun. Pada Tahun 2016 persentase belanja langsung sebesar 44,02 persen; Tahun 2017 sebesar 43,72 persen; Tahun 2018 sebesar 42,59 persen; dan Tahun 2019 sebesar 39,22 persen, kemudian ditahun 2020 menurun sebesar 37,63 persen. Besaran masing-masing anggaran belanja langsung yakni Tahun 2016 sebesar Rp615.960.638.816,61; Tahun 2017 sebesar Rp573.951.252.562,00; dan Tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp571.920.901.732,42, dan Tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp536.757.009.396,00 dan ditahun 2020 sebesar Rp518.711.868.386,00 yang terdapat pada Gambar 2.139 sebagai berikut.



Sumber: DPPKAD, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.139**  
**Persentase Belanja Langsung Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

## 6) **Persentase Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung Adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Persentase belanja tidak langsung dalam 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 persentase belanja tidak langsung sebesar 55,98 persen atau sebanyak Rp783.368.415.455,40. Selanjutnya Tahun 2017 meningkat 0,30 persen menjadi sebesar 56,28 persen, namun secara nominal (absolut) mengalami penurunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Poso yakni sebesar Rp738.832.262.910,11. Dan hingga Tahun 2019 persentase belanja langsung meningkat mencapai 60,78 persen. Dan ditahun 2020 sebesar 62,37 persen atau sebesar Rp859.574.604.262,00. Data persentase belanja tidak langsung di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.140 sebagai berikut.



Sumber: DPPKAD, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.140**  
**Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

## 7) **Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.**

Berdasarkan amanah Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang tahapan penyusunan APBD Pemerintah Daerah. Penetapan



Pemerintah Daerah harus memenuhi Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II Agustus Tahun 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat 30 November 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Poso dalam penetapan APBD telah mengikuti semua tahapan yang diatur salah satunya penetapan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dalam periode Tahun 2016-2020 penetapan APBD Kabupaten Poso telah tepat waktu terdapat pada Tabel 2.91 sebagai berikut.

**Tabel 2.91  
Penetapan APBD Kabupaten Poso  
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APDB Kabupaten Poso	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: DPPKAD Kabupaten Poso, Tahun 2021

### **C. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan salah satunya dapat dilihat dari; Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

#### **1) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan**

Pelatihan kepada pegawai sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dari setiap pegawai pemerintah daerah. Di Kabupaten Poso rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan pelatihan yakni selama 3 bulan. Data rata-rata lama pegawai





mendapatkan Pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.92 sebagai berikut.

**Tabel 2.92**

**Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Poso, 2021

**2) Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Poso pada Tahun 2016 sebanyak 1 dan hingga Tahun 2020 sebanyak 285 ASN yang mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan formal, seperti yang disajikan terdapat pada Tabel 2.93 sebagai berikut.

**Tabel 2.93**

**Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal  
Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	1	2	0	285

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Poso, 2021

**3) Jumlah Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural**

Jumlah pejabat ASN di Kabupaten Poso yang mengikuti diklat struktural pada tahun 2016 sebanyak 47 ASN, hingga Tahun 2020 menurun menjadi 3 ASN terdapat pada Tabel 2.94 sebagai berikut.

**Tabel 2.94**

**Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural  
Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	47	54	57	19	3

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Poso, 2021



**4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah**

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi di Kabupaten Poso pada tahun 2016 sebanyak 38 jabatan, pada tahun 2020 sebanyak 37 jabatan terdapat pada Tabel 2.95 sebagai berikut.

**Tabel 2.95**  
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	38	37	37	37	37

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Poso, 2021

**5) Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**

Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Poso hingga tahun 2020 sebanyak 869 jabatan yang terdapat data pada Tabel 2.96 sebagai berikut.

**Tabel 2.96**  
**Jumlah Jabatan Administrasi Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	897	909	887	869	869

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Poso, 2021

**D. Penelitian dan Pengembangan**

Terkait dengan Urusan Penelitian dan pengembangan yang mencakup ketersediaan Dokumen Penelitian dan pengembangan yang dapat mempermudah perencanaan sebagai sektor penunjang guna mendukung pembangunan pada sektor lainnya diantaranya pembangunan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa serta memicu daya saing ekonomi.

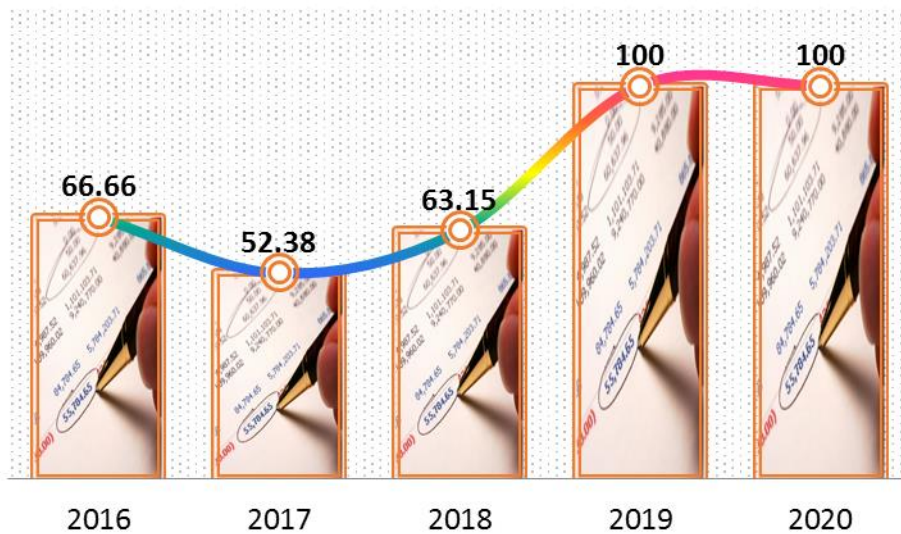
**E. Pengawasan**

Beberapa capaian indikator pengawasan di Kabupaten Poso dijelaskan sebagai berikut.

**1) Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Salah satu faktor yang membuat Opini terhadap LPKD Kabupaten Poso semakin membaik dengan memperoleh Opini Audit WTP tahun 2018

dan 2020 adalah tindak lanjut atas temuan yang ada.



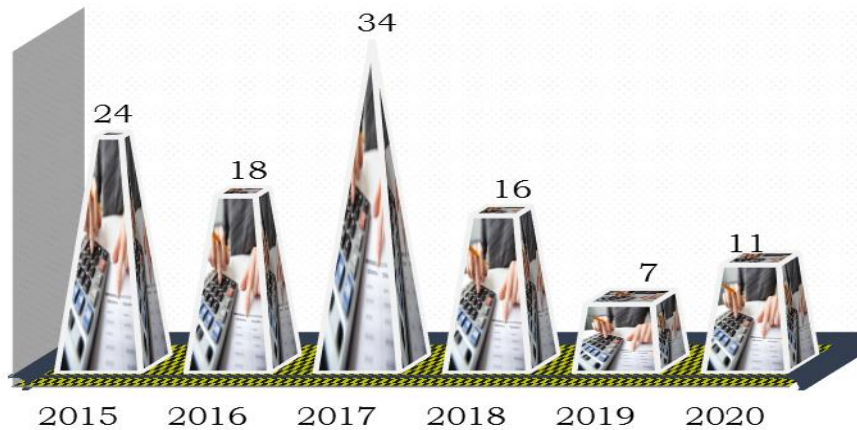
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.141**  
**Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 2.141 di atas, terdapat tindak Tindaklanjut atas temuan yang ada semakin meningkat. Pada Tahun 2015 persentase tindak lanjut atas temuan sebesar 53,03 persen, dan hingga Tahun 2020 persentase atas tindak lanjut temuan mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Poso yang semakin baik, akuntabel, dan transparan.

## 2) Jumlah ASN yang dikenai sanksi

Sanksi Bagi ASN Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 Tentang Disiplin ASN. Sanksi diberikan kepada ASN yang melanggar aturan yang ada. Jumlah ASN yang dikenai sanksi di pemerintah daerah Kabupaten Poso pada tahun 2015 sebanyak 24 ASN, dan hingga Tahun 2019 jumlah ASN yang dikenai sanksi menurun yakni sebanyak 7 ASN, dan ditahun 2020 sebanyak 11 ASN yang terdapat pada Gambar 2.142 sebagai berikut.

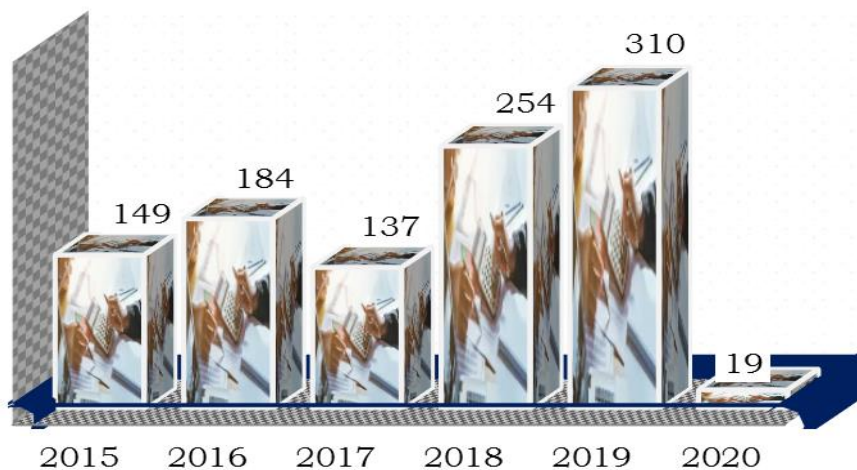


Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.142**  
**Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

### 3) Jumlah temuan BPK

Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso dalam periode Tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah temuan BPS sebanyak 149 temuan, dan selanjutnya hingga Tahun 2019 jumlah temuan meningkat cukup signifikan sebanyak 310 temuan, dan ditahun 2020 temuan BPK mengalami penurunan yang signifikan yakni hanya sebanyak 19 temuan. Data jumlah temuan BPK di Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2020 terdapa pada Gambar 2.143 sebagai berikut.



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Poso, Tahun 2021

**Gambar 2.143**  
**Jumlah Temuan BPK Tahun 2015-2020**





## **F. Sekretariat Dewan**

Capaian urusan penunjang Sekretariat Dewan Kabupaten Poso dapat diakumulasi pada Tabel 2.97 sebagai berikut.

**Tabel 2.97**

### **Capaian Urusan Penunjang Sekretariat Dewan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Poso	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Poso, Tahun 2021

## **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

#### **1) Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menunjukkan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi upaya peningkatan ekonomi daerah. Di Kabupaten Poso angka pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita pada Tahun 2016 sebesar Rp570.488; Tahun 2017 Rp918.349; Tahun 2018 sebesar Rp940.634; dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp1.186.090, kemudian pada tahun 2020 juga meningkat sebesar Rp1.198.066 yang terdapat pada Tabel 2.98 sebagai berikut.





**Tabel 2.98**  
**Pengeluaran Konsumsi RT perKapita Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016–2020**

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi RT Per kapita (Rp/Bln/Kapita)	570.488	918.349	940.634	1.186.090	1.198.066

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021

### 2) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan indikator yang mengindikasikan menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 tidak menunjukkan tren positif. NTP Kabupaten Poso justru mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2016, NTP Kabupaten Poso sebesar 96,06 meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 96,37, kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar 98,14. Data NTP Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 2.99 sebagai berikut.

**Tabel 2.99**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Poso tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani	96,06	95,78	97,51	96,37	98,14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Poso, 2021

### 3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita disusun untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga diluar pangan. Di Kabupaten Poso angka pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp407.895; Tahun 2017 menjadi sebesar Rp465.951; Tahun 2018 sebesar Rp615.937; dan Tahun 2019 sebesar Rp634.140, selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar Rp614.537 yang terdapat pada Tabel 2.100 sebagai berikut.

**Tabel 2.100**  
**Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan perKapita**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi RT non Pangan per kapita	407.895	465.951	615.937	634.140	614.537

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021



Berdasarkan data Tabel 2.100 di atas, pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) non pangan per kapita di Kabupaten Poso selama tahun 2016–2019 relatif meningkat, namun ditahun 2020 sedikit mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya perbaikan pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Poso pada Non Pangan dan juga dapat menggambarkan terjadinya kenaikan harga-harga konsumsi RT Non pangan di daerah setempat. Ditahun 2020 sedikit menurun dikarenakan pandemic Covid-19, dimana masyarakat Kabupaten Poso mengurangi belanja-belanja untuk kebutuhan non-pangan.

#### **4) Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah Kabupaten Poso periode Tahun 2016–2019 relatif meningkat, namun ditahun 2020 mengalami kontraksi. Pada Tahun 2016 produktivitas total daerah sebesar 43,92;. Namun, pada Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 41,05 dan Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 44,53 dan hingga Tahun 2019 turun menjadi 46,95, selanjutnya ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 42,17 juta yang terdapat pada Tabel 2.101 sebagai berikut.

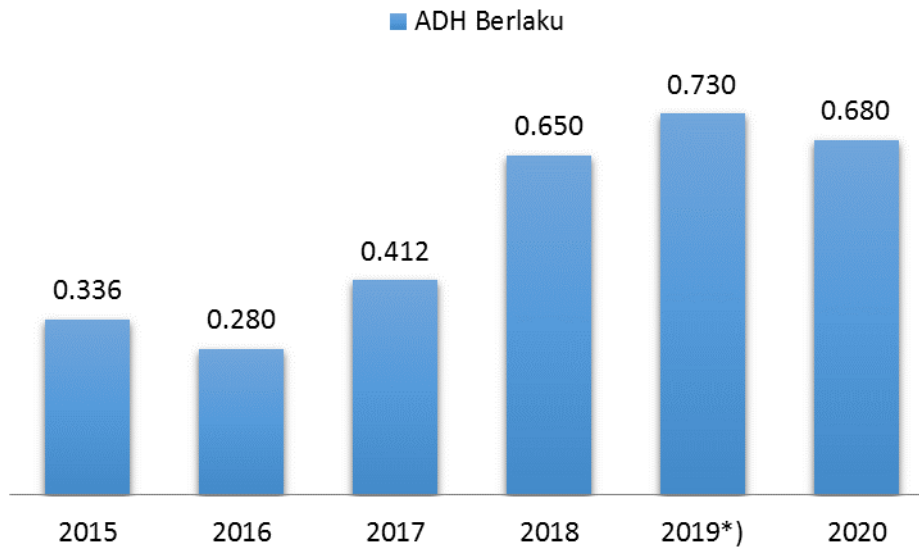
**Tabel 2.101**  
**Produktivitas Total Daerah Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016–2020**

No	Uraian	Tahun (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas Total Daerah	43,92	41,05	44,53	46,95	42,17

Sumber: Kabupaten Poso Dalam Angka, Tahun 2021

#### **5) Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)**

Keterbukaan ekonomi diukur melalui rasio ekspor + impor dibagi total PDRB. Menurut data BPS menunjukkan perkembangan setiap tahun. Dimana hingga Tahun 2020 untuk PDRB ADHB sebesar 0,680 yang terdapat pada Gambar berikut ini.



Sumber: PDRB Kabupaten Poso Menurut Pengeluaran 2016-2020, Tahun 2021

**Gambar 2.144**  
**Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2015-2020**

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1) Panjang Ruas Jalan Kabupaten

Panjang jalan di Kabupaten Poso pada tahun 2016 sebanyak 1.140,15 Km kemudian meningkat ditahun 2020 yakni sepanjang 1.229,13 Km. Hal ini dapat pada Tabel 2.102 sebagai berikut.

**Tabel 2.102**  
**Panjang Jalan Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (km)	1.140,15	1.229,13	1.229,13	1.229,13	1.229,13

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021

##### 2) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

###### a) Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum

Untuk jasa transportasi di Kabupaten Poso sebagai bagian dari memanfaatkan moda transportasi laut dan transportasi darat. Moda transportasi untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah termasuk dalam hal pemasokan terhadap barang-barang kebutuhan dan pengiriman hasil produksi daerah. Moda transportasi laut di Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat vital karena berfungsi untuk transportasi penumpang dan barang. Tinggi rendahnya arus penumpang dan barang dalam suatu daerah memberikan gambaran dinamika



perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial ekonomi daerah tersebut. Data arus penumpang darat, laut dan udara yang turun dan naik di Kabupaten Poso selama periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.103 sebagai berikut.

**Tabel 2.103**  
**Arus Penumpang Darat, Laut dan Udara yang Turun dan Naik**  
**Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Bis	87.120	53.000	65.000	56.520	28.260
2.	Jumlah penumpang Kapal laut	713	775	881	4.326	3.044
3.	Jumlah penumpang Pesawat udara	37.983	30.339	31.489	23.278	21.753
	Total Jumlah Penumpang	125.816	84.114	97.370	84.124	53.057

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Berdasarkan data pada Tabel 2.103 di atas, pada Tahun 2020 terdapat data jumlah penumpang bis sebanyak 28.260 orang, kemudian jumlah penumpang kapal laut sebanyak 3.044 serta jumlah penumpang pesawat udara sebanyak 21.753, sehingga total penumpang selama tahun tersebut sebanyak 53.057 orang. Menurun signifikan dari tahun 2019.

#### **b) Jumlah Barang Angkutan Umum**

Mobilitas penduduk Kabupaten Poso tergolong cukup dinamis, hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang dan barang yang terangkut dengan angkutan umum yang terdapat pada Tabel 2.104 sebagai berikut.

**Tabel 2.104**  
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten**  
**Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang (orang)	110.441	115.245	128.300	84.124	53.057
2.	Jumlah Barang (ton)	186.784	200.000	295.000	239.306	298.446
	Total Jumlah Angkutan Barang	297.225	315.245	423.300	323.430	351.503

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

Berdasarkan gambaran data pada Tabel 2.104 di atas jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2019 menjadi sebesar



239.306 barang (ton). Kemudian ditahun 2020 sedikit meningkat sebesar 351.503 (ton)

### **3) Ketaatan terhadap RTRW**

Kinerja ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Poso belum bisa diukur. Hal ini disebabkan karena RTRW Kabupaten Poso, sah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012–2032.

### **4) Luas Wilayah Produktif**

Rasio luas wilayah produktif Kabupaten Poso pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, adalah sebesar 0,6032 persen yang terdapat pada Tabel 2.105 sebagai berikut.

**Tabel 2.105**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Poso**  
**Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah produktif(Ha)	363.776	363.776	363.776	363.776
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	603.105	603.105	603.105	603.105
Rasio (1/2)		0,6032	0,6032	0,6032	0,6032

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Poso, 2021

### **5) Luas Wilayah Kebanjiran**

Pada tahun 2020 (dikutip dari Kompas.com) beberapa wilayah di Kabupaten Poso di landa banjir yakni Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, dan Kelurahan Sayo, Kecamatan Lage. Selain itu juga terjadi di bulan Mei 2020 (dikutip dari detiks.com) banjir melanda empat desa diantaranya Desa Bumi Banyusari, Desa Kaduwaa, Desa Watumaeta, dan Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Poso atau biasa dikenal dengan daerah Lembah Napu. Kondisi tersebut menunjukkan banjir masih menjadi potensi bencana yang mengancam masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Poso. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa hingga tahun 2020 luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Poso sebesar 76.328 Ha menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Data tentang luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Poso tahun 2016-2020 sebagai berikut.



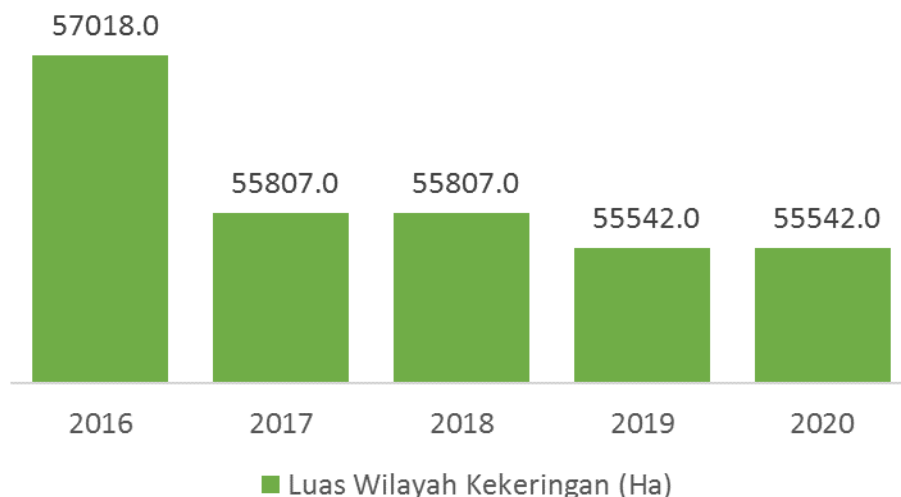


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.145**  
**Luas Wilayah Kerbanjiran (Ha) di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

#### 6) Luas Wilayah Kekeringan

Data mengenai luas wilayah kekeringan di Kabupaten Poso dari tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dimana hingga tahun 2020 luas wilayah kekeringan di Kabupaten Poso sebesar 5.5542 Ha, secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 2.146**  
**Luas Wilayah Kekeringan (Ha) di Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**



### 7) Luas Wilayah Perkotaan

Rasio luas wilayah perkotaan di Kabupaten Poso pada tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah sebesar 0,0096 persen yang terdapat pada Tabel 2.106 sebagai berikut.

**Tabel 2.106  
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Poso, 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Perkotaan (Km <sup>2</sup> )	5.794	5.794	5.794	5.794
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	603.105	603.105	603.105	603.105
Rasio (1/2)		0,0096	0,0096	0,0096	0,0096

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Poso, 2021

### 8) Jenis dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah bank di Kabupaten Poso pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 unit dan pada tahun 2020 tetap 8 unit yang termuat pada Tabel 2.107 sebagai berikut.

**Tabel 2.107  
Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Sektor	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konvensional	7	7	7	7	7
2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		8	8	8	8	8

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

### 9) Jenis, kelas, dan Jumlah Restoran

Jumlah restoran di Kabupaten Poso pada tahun 2016 sebanyak 130, meningkat hingga tahun 2020 menjadi 107 restoran yang terdapat pada Tabel 2.108 sebagai berikut.

**Tabel 2.108  
Jumlah restoran Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah (Unit)	130	130	130	107	107

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

### 10) Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah Peningapan/Hotel di Kabupaten Poso hingga Tahun 2020



sebanyak 77 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 1.019, serta jumlah tempat tidur sebanyak 1.439 unit yang termuat pada Tabel 2.109 sebagai berikut.

**Tabel 2.109**  
**Jenis dan Jumlah Hotel Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

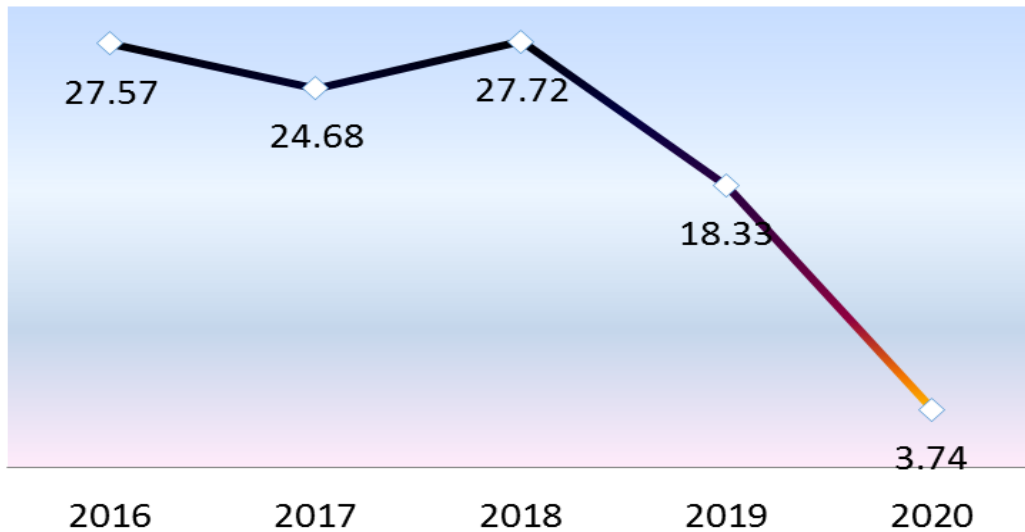
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotel	60	57	60	71	77
2	Jumlah Kamar	753	781	864	911	1.019
3	Jumlah Tempat Tidur	1.281	1.255	1.381	1.419	1.439

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2021 (diolah kembali)

### **2.4.3. Fokus Iklim Investasi**

#### **1) Angka Kriminalitas yang ditangani**

Jumlah laporan kasus pidana yang diterima oleh seluruh Polres di Kabupaten periode Tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan. Dimana pada Tahun 2017 jumlah laporan tindak pidana sebanyak 963 kasus; pada Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 775 kasus; dan hingga Tahun 2019 sebanyak 656 kasus. Penurunan jumlah kasus yang terjadi ini menunjukkan tingkat keamanan semakin baik, dan potensi terjadinya tindak kriminalitas semakin menurun. Kondisi ini dapat menjadi faktor penting dan strategis sebagai prasyarat untuk membangun Kabupaten Poso. Selanjutnya, untuk jumlah penyelesaian kasus pidana hingga Tahun 2019 sebanyak 379 Kasus. Sementara itu, presentase angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Poso periode Tahun 2016–2020 relatif menurun. Pada tahun 2016, angka kriminalitas sebesar 27,57 per 10.000; dan Tahun 2019 menurun menjadi sebesar 18,33 kasus dan ditahun 2020 sebesar 3,74 yang termuat pada Gambar 2.147 sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

**Gambar 2.147**  
**Angka Kriminalitas Yang tertangani Per 10.000 di Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

## 2) Jumlah Demonstrasi

Data jumlah terjadinya aksi demonstrasi di Kabupaten Poso selama Tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.110 sebagai berikut.

**Tabel 2.110**  
**Jumlah Demonstrasi Kabupaten Poso Tahun 2020**

No.	Uraian	2020
1.	Bidang Politik	-
2.	Ekonomi	0
3.	Sosbud	0
4.	Keamanan	0
Jumlah		0

Sumber: Polres Poso, 2021

## 2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

### 1) Rasio Ketergantungan

Rasio usia-populasi dari mereka yang biasanya tidak berada dalam angkatan kerja (bagian yang bergantung berusia 0 hingga 14 dan 65+) dan mereka yang biasanya berada dalam angkatan kerja (bagian produktif berusia 15 hingga 64). Ini digunakan untuk mengukur tekanan pada populasi produktif. Rasio ketergantungan dari tahun 2015 ke tahun 2019 cenderung menurun dimana di Kabupaten Poso pada tahun 2015



adalah sebesar 48,87% dan pada tahun 2020 sebesar 46,10 persen yang tertuang pada Tabel 2.111 sebagai berikut.

**Tabel 2.111**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	64.045	66.887	68.299	66.526	61.120
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	13.290	13.876	14.171	16.318	16.150
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	77.335	80.763	82.470	82.844	77.270
4.	Jumlah Penduduk Usia 15–64 tahun	158.232	165.230	168.715	173.549	167.605
	<b>Rasio ketergantungan(3/4)</b>	<b>48,87</b>	<b>48,88</b>	<b>48,88</b>	<b>47,74</b>	<b>46,10</b>

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka, Tahun 2020 (diolah kembali)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada kuwun waktu Tahun 2016–2020, diketahui bahwa dari setiap 100 orang penduduk yang produktif di Kabupaten Poso mempunyai rata-rata tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif, atau sudah tidak produktif.

## 2) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Poso pada tahun 2020 adalah sebesar 465 per 10000 penduduk tertuang pada Tabel 2.112 sebagai berikut.

**Tabel 2.112**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	6.889	8.009	9.714	9.714	10.760
2.	Jumlah lulusan S2	325	433	551	551	594
3.	Jumlah lulusan S3	19	18	26	26	34
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	7.233	8.460	10.291	10.291	11.388
5.	Jumlah penduduk	235.567	245.993	251.185	256.393	244.875
	Rasio Lulusan SI/S2/S3	307	344	410	401	465

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, 2021





**Tabel 2.113**

**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran  
(Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	8,92	10,11	8,91	8,81	(3,01)
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	6,29	6,10	6,16	6,20	(3,89)
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	7.285.051,49	8.021.441,16	8.735.836,04	9.505.742,94	9.219,87
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	7.285.051,49	8.021.441,16	8.735.836,04	9.505.742,94	9.219,87
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	5.413.903,34	5.744.154,59	6.097.996,82	6.475.826,23	6.224,31
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	5.413.903,34	5.744.154,59	6.097.996,82	6.475.826,23	6.224,31
1.1.7	Laju inflasi					
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)					
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	30,25	32,69	34,78	37,06	37,65
	- Perkembangan PDRB Perkapita (%)	3,71	4,12	3,67	4,09	1,58
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	22,48	23,41	24,27	25,26	25,42
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	6,55	8,05	6,39	6,58	0,63
1.1.9	Indeks Gini	2,57	3,85	2,95		
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin					
	- Garis Kemiskinan (000)	416.003	429.161	449.834	477.801	515.435
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	42.230,00	41.880,00	41.740,00	39.920,00	40.200,00



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	- Persentase Kemiskinan (%)	17,71	17,16	16,71	15,65	15,45
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,17	2,57	2,67	2,87	2,53
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,38	0,59	0,68	0,80	0,68
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	82,29	82,84	83,29	84,35	84,55
<b>1.2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>					
1.2.1	Angka Melek Huruf	96,22	98,75	98,19	100	100
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,67	8,81	9,04	9,36	9,41
1.2.3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	70,13	70,16	70,51	70,79	71,18
1.2.4	Balita Gizi Buruk	32	27	15	17	15
1.2.5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	71,11	76,83	75,47	72,36	72,36
1.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,90	84,69	83,32	79,47	74,78
1.2.7	Tingkat pengangguran terbuka	2,86	3,69	2,47	2,25	2,39
1.2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja	97,14	96,31	97,41	97,75	97,61
1.2.9	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan					
	- PDRB ADHB	42,03	44,04	46,97	49,87	63,99
	- PDRB ADHK	31,24	31,54	32,78	33,98	43,20
1.2.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	5,68	8,57	10,86	7,48	8,83
1.2.11	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
1.2.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,30	91,20	92,70	95,00	120,00
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten					
	- PDRB ADHB	39,67	39,46	38,72	38,34	38,93
	- PDRB ADHK	39,47	39,11	38,58	38,06	39,04



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten					
	- PDRB ADHB	6,55	6,61	6,73	6,72	7,48
	- PDRB ADHK	6,45	6,58	6,67	6,71	7,43
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian					
	Padi	160.085,00	182.557,00	138.559,82	118.785,13	99.359,51
	Jagung	32.660,00	53.888,00	77.515,00	54.449,00	8.510,00
	Kacang Kedelai	1.974,00	1.108,00	6.116,00	189,00	471,00
	Kacang Tanah	156,81	156,81	228,00	107,00	107,00
	Kacang Hijau	14,00	14,00	29,00	164,00	20,6
	Ketela Pohon	5.203,54	5.203,54	11.512,00	7.626,00	7.626,00
	Ketela Rambat	2.657,40	2.657,40	5.698,00	7.043,00	7.043,00
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	18,74	18,44	17,45	16,63	17,76
	- PDRB ADHK	18,25	17,67	16,95	16,24	17,17
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan					
	Cengkeh	226,00	127,00	189,57	189,57	3.452,00
	Kelapa Dalam	3.957,00	4.259,00	4.218,56	1.774,35	8.194,73
	Kelapa Sawit	732,00	586,00	1.045,33	1.045,33	2.700,39
	Kopi	1.039,00	940,00	1.048,79	563,32	737,30
	Karet	-	25,00	48,00	13,25	216,00
	Kakao	25.639,00	26.265,00	24.409,36	24.409,36	23.740,31
	Pala	5,00	7,00	8,10	3,73	9,91
	Kemiri	102,00	186,00	142,55	77,10	83,12
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	3,38	3,31	3,25	3,16	3,45



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	- PDRB ADHK	3,31	3,25	3,18	3,10	3,32
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	1,80	1,83	1,80	1,81	1,56
	- PDRB ADHK	1,57	1,60	1,59	1,63	1,39
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	1,91	1,93	2,02	2,02	2,03
	- PDRB ADHK	1,73	1,74	1,75	1,75	1,69
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	2,90	2,85	2,83	2,80	3,09
	- PDRB ADHK	2,89	2,86	2,85	2,82	3,08
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	12,05	11,83	12,22	12,15	11,83
	- PDRB ADHK	12,53	12,45	12,64	12,59	11,84
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	1,53	1,53	1,54	1,54	1,61
	- PDRB ADHK	1,46	1,45	1,46	1,45	1,48
1.2.24	Pertumbuhan Industri	-22,63	4,16	-0,15	-47,06	-14,10
<b>1.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>					
1.3.1	Seni Budaya					
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	1,00	1,02	0,99	0,98	1,02
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,25	1,22	1,19	1,17	1,23
1.3.2	Olahraga					
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000	0,91	0,89	0,79	0,78	1,02



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penduduk					
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08
<b>2.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Pendidikan</b>					
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	7,94	17,89	12,45	12,15	9,00
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	98,7	103,17	104,54	101,53	104,29
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89,87	90,3	105,25	110,44	99,58
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	78,03	97,07	101,24	110,09	93,36
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)					
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100	100	97,91	99,95	99,88
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	99,83	100	98,87	99,01	95,19
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	99,7	99,89	99,47	99,15	97,69
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	92,84	93,06	94,38	92,56	93,89
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	73,58	74,04	82,01	87,42	79,19
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	66,8	63,56	76,53	86,52	68,16
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah					
	- Tingkat SD/MI	92,84	93,06	93,71	85,56	85,47





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	- Tingkat SMP/MTs	73,58	74,04	74,89	64,33	64,33
	- Tingkat SMA/SMK/MA	66,80	-	-	-	-
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah					
	- Tingkat SD/MI	0,05	0,04	0,08	0,08	0,08
	- Tingkat SMP/MTs	0,08	0,10	0,50	0,50	0,50
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,20	-	-	-	-
2.1.1.7	Angka Kelulusan					
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00	97,91	99,95	99,88
	- Tingkat SMP/MTs	99,83	100,00	98,87	99,01	95,19
	- Tingkat SMA/SMK/MA	99,70	99,89	99,47	99,15	97,69
2.1.1.8	Fasilitas Pendidikan					
	- Tingkat SD/MI	241	245	239	245	243
	- Tingkat SMP/MTs	80	85	82	82	82
	- Tingkat SMA/SMK/MA	44	45	41	42	41
2.1.1.9	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	0,080	0,070	0,089	0,097	0,099
2.1.1.10	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	0,070	0,100	0,086	0,082	0,075
2.1.1.11	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	96,22	98,75	98,19	99,16	98,11
2.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	73,53	79,05	78,75	78,75	78,75
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi	14,9/1.000 KH	11,5/1.000 KH	13,6/1.000 KH	15,5/1.000 KH	8,7/1.000 KH
2.1.2.2	Rasio posyandu per satuan balita	80,76	75,98	63,11	84,75	86,54
2.1.2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk					
	Rasio Puskesmas	0,096	0,098	0,095	0,094	0,098



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Rasio Posyandu	1,163	1,138	1,124	1,108	1,160
	Rasio Polindes	0,586	0,581	0,568	0,566	0,592
	Rasio Sarana Kesehatan	1,844	1,817	1,787	1,767	1,850
2.1.2.4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012
2.1.2.5	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,25	0,25	0,24	0,28	0,18
2.1.2.6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	4,29	5,41	5,24	4,84	3,62
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94,71	93,53	88,24	97,10	97,10
2.1.2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	70,03	58,18	72,03	73,20	86,60
2.1.2.8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	129,56	134,56	90,15	79,18	15,52
2.1.2.9	Angka Kejadian Malaria	44,43	60,57	28,59	6,24	6,53
2.1.2.10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01329	0,01789	0,01191	0,01014	0,03839
2.1.2.11	Cakupan puskesmas (Persen)	121,05	126,32	126,32	126,32	0,00
2.1.2.12	Cakupan Polindes (Persen)	82,94	84,12	84,12	85,29	0,00
2.1.2.13	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	75,17	84,69	78,37	60,10	84,80
2.1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	81,79	73,25	44,03	59,60	80,09
2.1.2.15	Angka Stunting	29,70	35,40	26,20	21,80	16,80
<b>2.1.4.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
2.1.4.1	Proporsi panjang jaringan jalan	0,4352	0,4380	0,4370	0,4371	0,4371



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dalam kondisi baik					
2.1.4.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
2.1.4.3	Proporsi Jalan yang dapat dilalui Kendaraan Roda Empat	59,43	59,80	59,66	59,68	59,68
2.1.4.4	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2.1.4.5	Rasio Jaringan Irigasi	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
2.1.4.6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (1.000)	3,39	3,04	3,20	3,20	4,36
2.1.4.7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,0033%	0,0033%	0,0033%	0,0033%	0,0033%
2.1.4.8	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
2.1.4.9	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan	90,00	83,00	80,00	50,00	129,00
<b>2.1.5.</b>	<b>Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;</b>					
2.1.5.1	Rumah tangga pengguna air bersih	77,57	86,90	90,00	87,47	80,29
2.1.5.2	Rumah tangga pengguna listrik	97,83	98,75	98,53	99,51	99,28
2.1.5.3	Rumah layak huni	90,33	90,68	90,86	90,97	90,58
2.1.5.4	Rumah tangga ber-Sanitasi	81,09	79,36	81,96	90,86	90,31
2.1.5.5	Rasio Permukiman Layak Huni	99,54	99,54	99,54	99,49	99,49
2.1.5.6	Persentase Pemukiman yang Tertata	99,54	99,54	99,54	99,49	99,49
<b>2.1.6.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;</b>					
2.1.6.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	6,48	13,95	11,82	5,46	5,43
2.1.6.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	2,48	23,80	23,80	23,80	23,80



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.6.3	Persentase Penegakan PERDA	75,00	85,00	90,00	90,00	90,00
<b>2.1.8.</b>	<b>Sosial</b>					
2.1.8.1	Jumlah PMKS PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	83	70	81	84	100
<b>2.2.</b>	<b>Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
2.2.1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (Kasus)	19,00	6,00	16,00	20,00	8,00
2.2.1.2	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Orang)	67,00	154,00	136,00	176,00	136,00
2.2.1.3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (Orang)	1.448,00	3.265,00	3.552,00	3.359,00	1.256,00
2.2.1.4	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	160,00	144,00	240,00	368,00	80,00
2.2.1.5	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)	160,00	32,00	48,00	48,00	20,00
2.2.1.6	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Orang)	40,00	40,00	40,00	40,00	-
2.2.1.7	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.249,00	1.597,00	1.911,00	807,00	807,00
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,69	7,64	7,61	7,61	6,56
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.2.3	Rasio KDRT	0,06	0,01	0,09	0,11	0,08



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	52,85	64,51	59,13	57,14	61,58
<b>2.2.3.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>					
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	80,04	96,12	85,81	67,57	50,28
2.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein					
	Ketersediaan Energi	-	2.721 kkal/kap/hari	4.651 kkal/kap/hari	5.357 kkal/kap/hari	2.752 Kkal/Kap/Hari
	Ketersediaan Protein	-	81,06 gram/kap/hari	175,19 gram/kap/hari	180,04 gram/kap/hari	80.4 gram/Kap/Hari
2.2.3.3	Wilayah Rawan Pangan (Kecamatan)					
	Aman	10,00	10,00	6,00	6,00	3,00
	Waspada	2,00	4,00	6,00	6,00	9,00
	Rawan	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00
<b>2.2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>					
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Poso	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
2.2.5.2	Terselenggaranya KLHS K/R/P	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Tidak dilakukan penelitian di karenakan tidak di anggarkan pendanaanya	1 titik danau (memenuhi) dan 31 titik sungai memenuhi	Tidak dilakukan penelitian di karenakan tidak di anggarkan pendanaanya	5 sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan)	5 sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan)
2.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	102,61	91,68
2.2.5.5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	3 orang	5 orang	5 orang





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	58,92%	59,61%	85,19%	88,63%	85,00%
<b>2.2.6.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,68	0,81	0,93	0,96	1,00
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	70.584,00	72.208,00	73.176,00	73.693,00	76.247,00
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte menikah	30.307,00	32.575,00	35.175,00	37.765,00	37.765,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	92,00%	95,00%	97,00%	99,00%	100,00%
2.2.7.2	Jumlah Kelompok PKK	142	142	142	142	142
2.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi	0%	0%	0%	0%	0%
2.2.7.4	Persentase PKK Aktif	75%	75%	75%	75%	75%
2.2.7.5	Posyandu aktif	280	280	283	284	284
<b>2.2.8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,23	2,15	2,37	1,82	2,00
2.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	3,00	2,90	2,50	2,00	2,80
2.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	3,44	10,34	17,24	44,80	44,80



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,06	1,09	1,08	1,04	1,04
2.2.8.7	Cakupan peserta KB aktif	90,88	94,69	96,23	96,93	65,78
2.2.8.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,12	29,68	30,35	31,79	26,49
2.2.8.9	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	94,71
2.2.8.10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,00	21,00	23,00	25,00	23,00
2.2.8.11	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD		0,21	0,47	0,53	0,82
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>					
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)					
	- Jumlah Penumpang Angkutan Darat	87.120	53.000	65.000	56.520	28.260
	- Jumlah Penumpang Angkutan Laut	713	775	881	4.326	3.044
	- Jumlah Penumpang Angkutan Udara	37.983	30.339	31.489	23.278	21.753
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	12	8	8	4	4
2.2.9.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2,419	2	2,382	2,382	2300
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	88	153	154	155	174
2.2.9.5	Jumlah Angkutan Barang					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah orang (orang)	110.441	115.245	128.300	84.124	53.057
	Jumlah Barang (ton)	186.784	200.000	295.000	239.306	298.446
2.2.9.6	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis					
	- Jumlah Pelabuhan Laut	1	1	1	1	1
	- Jumlah Bandar Udara	1	1	1	1	1
	- Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
<b>2.2.10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
2.2.10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	19	19	19	19	19
2.2.10.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	1.252	1.603	2.702	6.683	6.683
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>					
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	61,72	14,74	64,97	64,07	65,74
2.2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100	100	100	100	45,34
2.2.11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.11.4	Persentase BPR/LKM aktif	0%	0%	0%	0%	0%
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	11	2	2	2	2
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					
	- Jumlah investasi PMA	-	-	1.983.200.000,00	2.277.200.000,00	-
	- Jumlah investasi PMDN	533.135.739.606,00	1.606.096.753.241,00	2.720.422.500.000,00	1.771.059.070.000,00	3.244.081.737.019,00
2.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	0,00000000041	0,00000000016	0,00000000013	0,00000000035	0,00000000019
2.2.12.4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	16,3	201,25	69,38	(34,90)	83,17
<b>2.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.13.1	Persentase jumlah organisasi pemuda yang dibina	80	87	90	90	14
2.2.13.2	Jumlah Pemuda Non Organisasi yang dibina	5	7	10	10	142
2.2.13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	50	55	60	60	58
2.2.13.4	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat nasional	6	24	25	25	2
2.2.13.5	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat regional (asean)	1	2	3	3	0
2.2.13.6	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat internasional	2	2	2	2	0
<b>2.2.14.</b>	<b>Statistik</b>					
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.2.15.</b>	<b>Persandian</b>					
2.2.15.1	Pengelolaan Persandian	100	100	100		100
2.2.15.2	Peningkatan SDM pengelola Persandian					
<b>2.2.16.</b>	<b>Kebudayaan</b>					
2.2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	2	4	0
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>					
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,300	0,300	0,334	0,428	0,099
2.2.17.2	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	0,041	0,040	0,039	0,039	0,038
2.2.17.3	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	70.608	72.337	82.155	107.813	25.303
2.2.17.4	Jumlah koleksi judul buku	511	1130	663	391	450



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	perpustakaan					
<b>2.3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>					
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisman	3.061	1.450	1.129	1.691	214
	Jumlah Kunjungan Wisnu	79.098	86.540	55.456	37.427	19.374
2.3.1.2	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan budaya	3	3	3	4	0
2.3.1.3	PAD sektor pariwisata	0,64	0,76	0,68	0,84	0,19
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian</b>					
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian					
	- PDRB ADHB	39,67	39,46	38,72	38,34	38,93
	- PDRB ADHK	39,47	39,11	38,58	38,06	39,04
2.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	Padi	160.085,00	182.557,00	138.559,82	118.785,13	99.359,51
	Jagung	32.660,00	53.888,00	77.515,00	54.449,00	8.510,00
	Kacang Kedelai	1.974,00	1.108,00	6.116,00	189,00	471,00
	Kacang Tanah	156,81	156,81	228,00	107,00	107,00
	Kacang Hijau	14,00	14,00	29,00	164,00	20,6
	Ketela Pohon	5.203,54	5.203,54	11.512,00	7.626,00	7.626,00
	Ketela Rambat	2.657,40	2.657,40	5.698,00	7.043,00	7.043,00
2.3.2.3	Cakupan bina kelompok petani	1.337,00	1.552,00	1.757,00	1.872,00	1.873,00
<b>2.3.3.</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>					
2.3.3.1	Rumah tangga pengguna listrik	97,83	98,75	98,53	99,51	99,28
<b>2.3.4.</b>	<b>Perdagangan</b>					
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	(1.642,67)	(1.797,51)	(2.187,03)	(2.436,07)	(2.255,00)
<b>2.3.5.</b>	<b>Perindustrian</b>					





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.3.5.1	Pertumbuhan Industri	(22,63)	4,16	(0,15)	(47,06)	(14,10)
2.3.5.2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB					
	- PDRB ADHB	1,53	1,53	1,54	1,54	1,61
	- PDRB ADHK	1,46	1,45	1,46	1,45	1,48
2.3.5.3	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan penda	4	-	-	-	-
<b>2.3.5.</b>	<b>Transmigrasi</b>					
2.3.5.1	Jumlah UPT Pendukung Kota Terpadu Mandiri (Unit)	4	4	4	4	4
2.3.5.2	Jumlah warga transmigran yang dibina di kawasan transmigrasi (KK)	735	735	435	435	100
2.3.5.3	Jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi lokal (KK)	546	546	100	533	100
2.3.5.4	Jumlah Transmigran Swakasa	0	0	0	0	0
<b>2.4.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Penunjang</b>					
<b>2.4.1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>					
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.4.2</b>	<b>Keuangan</b>					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	0
2.4.2.2	Persentase SILPA	3,12	1,02	1,87	3,74	1,74
2.4.2.3	Persentase belanja pendidikan (20%)		26,03	25,23	26,61	27,98
2.4.2.4	Persentase belanja kesehatan (10%)		12,70	15,04	15,58	16,06
2.4.2.5	Persentase belanja langsung	44,28	44,10	42,64	39,22	37,63
2.4.2.6	Persentase belanja belanja tidak langsung	55,72	55,90	57,36	60,78	62,37
2.4.2.7	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
<b>2.4.3</b>	<b>Kepegawan serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
2.4.3.2	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma	1	1	2	0	285
2.4.3.3	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktura	47	54	57	19	3
2.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	38	37	37	37	37
2.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	897	909	887	869	869
<b>2.4.4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
<b>2.4.5</b>	<b>Pengawasan</b>					
2.4.5.1	Persentase/Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	53,03	53,03	53,03	53,03	53,03
2.4.5.2	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	18	34	16	7	0
2.4.5.3	Jumlah temuan BPK	184	137	254	310	0
<b>2.4.6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Poso	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>3</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>					
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>					
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	570.488	918.349	940.634	1.186.090	1.198.066
3.1.2	Nilai Tukar Petani	96,06	95,78	97,51	96,37	98,69
3.1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita	407.895,00	465.951,00	615.937,00	634.140,00	614.537,00
3.1.4	Produktivitas Total Daerah	43,92	41,05	44,53	46,95	42,17
3.1.5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)					
	- PDRB ADHB	0,280	0,412	0,650	0,730	0,680
	- PDRB ADHK	0,445	0,452	0,486	0,515	-



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>					
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	1.229,06	1.229,06	1.229,06	1.229,13	1.229,13
3.2.2	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum					
	Jumlah Arus Penumpang (Orang)					
	Jumlah penumpang Bis	87.120	53.000	65.000	56.520	28.260
	Jumlah penumpang Kapal laut	713	775	881	4.326	3.044
	Jumlah penumpang Pesawat udara	37.983	30.339	31.489	23.278	21.753
	Jumlah Angkutan Barang					
	Jumlah orang (orang)	110.441	115.245	128.300	84.124	53.057
	Jumlah Barang (ton)	186.784	200.000	295.000	239.306	298.446
3.2.5	Luas Wilayah Produktif					
	- Jumlah Luas Wilayah Produktif		363.776	363.776	363.776	363.776
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya		603.105	603.105	603.105	603.105
	- Persentase Wilayah Produktif		0,6032	0,6032	0,6032	0,6032
3.2.6	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	106.741	105.675	91.761	77.988	76.328
3.2.7	Luas Wilayah Kekeringan (Ha)	57.018	55.807	55.807	55.542	55.542
3.2.9	Luas Wilayah Perkotaan					
	- Jumlah Luas Wilayah Perkotaan	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.795,00
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	603.105	603.105	603.105	603.105	603.105
	- Persentase Wilayah Perkotaan	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096
3.2.10	Jumlah Bank					
	- Konvensional	7	7	7	7	7
	- Syariah	1	1	1	1	1
3.2.11	Jumlah Restoran/Rumah Makan	130	130	130	107	107
3.2.12	Jumlah Penginapan/Hotel	60	57	60	71	77



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.3.</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>					
3.3.1	Angka Kriminalitas	27,57	24,68	61,17	76,60	78,13
<b>3.4.</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>					
3.4.1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)					
	- Lulusan S1	6.889	8.009	9.714	9.714	10.760
	- Lulusan S2	325	433	551	551	594
	- Lulusan S3	19	18	26	26	34
	- Jumlah Lulusan S1-S2-S3	7.233	8.460	10.291	10.291	11.388
	- Jumlah Penduduk	235.567	245.993	251.185	256.393	244.875
	- Rasio Lulusan S1-S2-S3	307	344	410	401	465
3.4.2	Tingkat Ketergantungan					
	- Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	64.045	66.887	68.299	66.526	61.120
	- Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	13.290	13.876	14.171	16.318	16.150
	- Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	77.335	80.763	82.470	82.844	77.270
	- Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	158.232	165.230	168.715	173.549	167.605
	- Rasio Ketergantungan	48,87	48,88	48,88	47,74	46,10





## **2.5 EVALUASI RPJMD KABUPATEN POSO 2016-2021**

### **2.5.1 Evaluasi Visi Misi RPJMD Tahun 2016-2021 s.d Tahun 2020**

Evaluasi capaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Poso periode 2016-2021 dilakukan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan RPJMD periode sebelumnya. Hasil evaluasi dilakukan sampai pada tahun 2020 untuk capaian indikator RPJMD dan sampai pada tahun 2020 untuk evaluasi kerangka pendanaan. Terdapat 5 Misi RPJMD Kabupaten Poso tahun 2016-2021. Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.114  
Hasil Evaluasi Misi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021**

**Misi 1:**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1.1.Mewujudkan rasa aman, tenteram dan nyaman	1.1.1.Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam semangat sintuwu maroso berdasarkan wawasan kebangsaan	Cakupan paham radikalisme yang ditangani	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	
		Prosentase kasus kamtibmas dan tindak kriminal yang tertangani	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	

**Misi 2:**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
2.1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat	2.1.1.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,20 - 6,50	6,30 - 7,00	6,2	-3,80	100	100	98,41	(60,32)	
		Pengeluaran Rill Per Kapita	8.937-8.995	9.000-9.100	9.084	8.808	100	100	101,64	97,87	
	2.1.2.Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,00 - 4,00%	2,00 - 4,00%	2,25	2,39	0	0	12,5	19,50	
2.2 Meningkatkan Ketahanan	2.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	Tingkat konsumsi beras (Kg/ Kapita/tahun)	125	122	125	120	100	100	100	98,36	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Pangan daerah dalam mendukung Kedaulatan Pangan Nasional	daerah	Skor PPH	88,33	90,81	95	95	100	100	107,55	104,61	
	2.2.2.Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,1 - 98	98,1 - 99	96,37	98,14	100	100	99,24	102,41	
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	40,08%	40,08%	38,06	38,93	100,00	100,00	94,96	97,13	
2.3.Mewujudkan Kabupaten Poso sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Sulawesi Tengah	2.3.1.Berkembangnya industri pariwisata	Persentase PAD sektor pariwisata	4,50%	4,00%	1,75	1,8	100	100	102,85	102,86	
		cakupan kunjungan wisatawan mancanegara	400 Orang	450 Orang	1.691	214	100	100	422,75	47,56	
		cakupan kunjungan wisatawan nusantara	48.000 Orang	49.000 Orang	39.118	19.374	100	100	81,49	39,54	

**Misi 3:**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
3.1.Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian	3.1.1Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar kewilayahan	Total panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi mantap	765,9 Km	780,9 Km	503,29	503,29	100	100	65,712	64,45	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
3.2.Meningkatkan prasarana dasar perkotaan sesuai arahan Tata Ruang	3.2.1.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan	Cakupan universal akses 100	90 - 0,004 - 70	95 - 0,004 - 85	NA	NA	100	100	NA	NA	
	3.2.2.Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap arahan tata ruang daerah	Persentase ketaatan terhadap arahan tata ruang	35%	40%	35	40	100	100	100	100,00	
3.3.Terpeliharanya kelestarian lingkungan	3.3.1.Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Persentase masyarakat dalam penanganan persampahan	63%	84,21%	63,00	90,00	100	100	100	106,89	
		Operasionalisasi TPA/TPST	60%	70%	40	50	100	100	66,67	71,43	
		Pencemaran status mutu air:									
		- COD	0-10	0-10	5	5	100	100	100	100	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
		- BOD	0-2	0-2	2	2	100	100	100	100	
	3.3.2.Meningkatnya upaya pencegahan, antisipasi dan mengatasi bencana alam dan kebakaran	Cakupan pembangunan daerah pasca bencana	65%	65%	65%	65%	100	100	100	100,00	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	12,36%	12,36%	23,8	23,8	100	100	192,56	192,56	

**Misi 4:**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
4.1.Meningkatkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing	4.1.1.Meningkatnya pelayanan pendidikan secara merata	Angka rata-rata lama sekolah	9,05-9,10	9,11-9,15	9,36	9,41	100	100	103,43	103,29	
	4.1.2.Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (7 s.d 12 Tahun)	93%	94,50%	NA	NA	100	100	NA	NA	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	4.1.3.Meningkatnya minat baca masyarakat	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (13 s.d 15 Tahun)	57%	57,50%	NA	NA	100	100	NA	NA	
		Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	66%	73%	85	85	100	100	100	100	
		Perolehan medali cabang olahraga ditingkat regional dan nasional	8	13	NA	1	100	100	NA	7,69	
		Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional	1,45	1,45	1,45	1,45	100	100	100	100,00	
4.2.Meningkatkan masyarakat yang sehat mandiri	4.2.1.Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2,07%	2,03%	1,82	1,22	100	100	-12,08	(39,90)	
		Persentase penurunan pernikahan usia dini	79%	64%	79,00	65,00	100	100	100	101,56	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	4.2.2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70,55-71,00	70,71-70,15	70,79	71,81	100	100	100,34	102,37	
		Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	64,56/100000	21,52/100000	NA	262,70/100.00KH	100	100	NA	1118,04	
		Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	9,68/1000	8,61/1000	15,5/1000	8,7/1.000 KH	100	100	60,124	1,05	
		Persentase balita gizi buruk	0,19%	0,16%	0,08	2,05	100	100	42,11	2.462,50	
4.3. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan kearifan lokal	4.3.1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91%	96%	81,0	84,0	100	100	89,01	87,50	
	4.3.2. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan	Rasio KDRT	0,02%	0,02%	0,2	0,2	100	100	0	0	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	perlindungan anak	Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	
	4.3.3 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	16.50-16.25	16.20-16.00	15,65	15,45	100	100	-5,15	0,14	
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	4-2	4-2	2,87	2,53	100	100	-28,25	(36,75)	
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0.5-1,0	0.5-1,0	0,8	0,68	100	100	(0,00)	(0,00)	

**Misi 5:**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
5.1.Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa	5.1.1.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100,00	
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%	85%	75	78,27	100	100	93,75	92,08	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Target		Realisasi		Persentase Capaian				Status Capaian s/d tahun 2020
			2019	2020	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
		Nilai Sakip Kabupaten	B	B	B	B	100	100	100	100	
5.2.Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan produktif	5.2.1.Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat penyerapan dana desa	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	
		persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan	52%	70%	52	70	100	100	100	100,00	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2026-2021, Tahun 2021

Keterangan:

Sangat Tinggi	
Tinggi	
Sedang	
Rendah	
Sangat Rendah	
Tidak Dapat Diketahui/Tidak Dapat Diolah	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 2.115  
Evaluasi Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
11	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>										
111	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>										
1111	Pertumbuhan PDRB %	Persen	6,36	6,19	6,20-6,50	6,3	6,36	6,19	6,20	(3,01)	Belum Tercapai
1112	Produk Domestik Regional Bruto		-				-	-			
	- ADH Berlaku (Juta\an)	Juta Rp	8.087.111,00	8.760.635	9.434.159	10.107.683	8.087.111,00	8.760.635,11	9.466,92	9.219,87	Belum Tercapai
	- ADH Konstan (Jutaan)	Juta Rp	5.722.518,00	6.082.136	6.441.754	6.801.372	5.722.518,00	6.082.136,09	6.476	6.224	Belum Tercapai
1113	Laju inflasi (%)	Persen	3,85	3,85-3,00	3,85-3,00	3,85	3,85	3,85-3,00	2,3	0,63	Belum Tercapai
1114	PDRB per kapita		-				-	-			
	- ADH Berlaku (Juta\an)	Juta Rp	32,88	34,19	35,49	36,80	32,88	34,19	37,06	37,65	Melampaui
	- ADH Konstan (Jutaan)	Juta Rp	23,26	24,19	25,12	26,05	23,26	24,19	25,26	25,42	Belum Tercapai
1115	Kemiskinan		-				-	-			
	- Persentase Kemiskinan	Persen	17,16	17,09	17,01	16,94	17,16	17,09	15,65	15,45	Melampaui





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,57	2,20	1,84	1,47	2,57	2,20	2,87	2,53	Belum Tercapai
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,59	0,39	0,20	0,00	0,59	0,39	0,8	0,68	Belum Tercapai
	- Jumlah Penduduk Miskin (000)	Ribu Org	41,88	41,07	40,27	39,46	41,88	41,07	39,92	40,2	Belum Tercapai
	- Perkembangan Garis Kemiskinan	Ribu Rp	429.161,00	438.653,27	448.145,54	457.637,80	429.161,00	438.653,27	477.801	515.435	Belum Tercapai
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,78	70,37	70,95	71,54	69,78	70,37	71,4	71,28	Belum Tercapai
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	70,16	70,22	70,27	70,33	70,16	70,22	70,79	71,18	Melampaui
	- Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,55	13,73	13,90	13,38	13,55	13,69	13,7	Belum Tercapai
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,92	9,02	9,13	8,81	8,92	9,36	9,41	Melampaui
	- Pengeluaran (000)	Ribu RP	8.781,00	8.977,49	9.173,97	9.370,46	8.781,00	8.977,49	9.084	8.808	Belum Tercapai
<b>12</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		-				-	-			
11	Angka melek huruf	Persen	99,14	99-100	99-100	100,00	98,75	98,19	100,00	100,00	Sesuai
12	Angka Partisipasi Kasar :		-				-	-			
131	- APK SD/MI	Persen	103,17	102,83	102,50	102,16	103,17	104,54	101,53	104,29	Melampaui
132	- APK SMP/MTs	Persen	90,30	90,25	90,20	90,16	90,30	105,25	110,44	99,58	Melampaui
133	- APK SMA/MA/SMK	Persen	97,07	96,61	96,14	95,68	97,07	101,24	110,09	93,36	Belum Tercapai
	Angka Partisipasi Murni :		-				-	-			
15	- APM SD/MI	Persen	93,06	93,49	93,93	94,36	93,06	94,38	92,56	93,89	Belum Tercapai
	- APM SMP/MTs	Persen	74,04	74,22	74,40	74,58	74,04	82,01	87,42	79,19	Melampaui



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	- APM SMA/MA/SMK	Persen	63,56	64,16	64,77	65,37	63,56	76,53	86,52	68,16	Melampaui
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		-				-	-			
21	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,13	70,18	70,22	70,27	70,13	70,16	70,51	70,79	Melampaui
	Angka Kematian Ibu (Kasus)	Jml Kasus	1,00	1,28	1,56	1,83	1,00	1,28	2,63		Melampaui
	Angka Kematian Bayi (Kasus)	Jml Kasus	27,00	27-20	20-15	10,00	27,00	13,60	15,5	8,7	Melampaui
22	Persentase Kekurangan Gizi	Persen	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	Belum Tercapai
23	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	Belum Tercapai
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>		-				-	-			
<b>4</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		-				-	-			
41	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	96,30	96,64	96,99	97,33	84,69	83,32	79,47	74,78	Belum Tercapai
42	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	76,83	77,00	77,18	77,35	71,11	76,83	75,47	72,36	Belum Tercapai
43	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,69	2,46	2-3,50	2	3,69	2,47	2,25	2,39	Belum Tercapai
	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>		-				-	-			
11	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya (Kali)	Kali	1,00	1-3	1-3	3,00	3,00	3,00	4	0	Belum Tercapai
	Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya (unit)	Jumlah	30,00	20-30	20-30	20	3,00	3,00	4	0	Belum Tercapai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diLestarkan	Jumlah	57,00	57	57	57	57,00	57,00	57	57	Sesuai
<b>2</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>		-				-	-			Sesuai
21	Jumlah klub olahraga	Jumlah	25,00	20-25	20-25	25	22,00	20,00	20,00	25,00	Sesuai
22	Jumlah gedung olahraga	Unit	3,00	3-5	3-5	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	Belum Tercapai
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		-				-	-			
	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		-				-	-			
111	Pendidikan Dasar :		-				-	-			
1111	Angka Partisipasi Sekolah		-				-	-			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	99,57	95-100	95-100	95,00	93,06	93,71	85,56	85,47	Belum Tercapai
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	96,15	95-100	95-100	95,00	74,04	74,89	64,33	64,33	Belum Tercapai
1112	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :		-				-	-			
	SD/MI	Per 10000	99,34	98,83	98,32	97,81	99,34	98,83	98,83	98,83	Melampaui
	SMP/MTs	Per 10000	90,30	89,76	89,22	88,68	90,30	89,76	89,76	89,76	Melampaui
1113	Rasio guru terhadap murid		-				-	-			
	SD/MI	Per 10000	11,00	11,47	11,93	12,40	11,00	11,47	9,73	9,86	Belum Tercapai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
	SMP/MTs	Per 10000	12,00	12,05	12,11	12,16	12,00	12,05	8,22	7,54	Belum Tercapai
113	Fasilitas Pendidikan:		-				-	-			
1131	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jml Unit	228,00	228	228	228	245,00	239,00	245,00	243,00	Melampaui
1132	Sekolah pendidikan SMP/MTs SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik :		-				-	-			
	SMP/MTs	Jml Unit	72,00	70-75	70-75	75	85,00	82,00	82,00	82,00	Melampaui
	SMA/MA/SMK	Jml Unit	42,00	42	42	42	45,00	41,00	42,00	41,00	Belum Tercapai
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>		-				-	-			
22	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Per 1000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,098	0,095	0,094	0,098	Melampaui
23	Rasio Pustu per satuan penduduk	Per 1000	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	Sesuai
24	Rasio Polindes per satuan penduduk	Per 1000	0,60	0,59	0,58	0,57	0,5813	0,5679	0,5655	0,5922	Melampaui
25	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Melampaui
26	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1000	0,16	0,18	0,20	0,21	0,25	0,24	0,28	0,18	Belum Tercapai
27	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Per 1000	2,80	3,32	3,84	4,37	5,41	5,24	4,84	3,62	Belum Tercapai
28	Rasio Posyandu terhadap Balita	Per 1000	7,63	7,33	7,02	6,72	7,60	6,31	8,48	8,65	Melampaui



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
29	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80	80	Sesuai
21	CakupanDesa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	Persen	90,03	90,49	90,96	91,42	93,53	88,24	97,10	97,10	Melampaui
211	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	Sesuai
212	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	Persen	8,65	7,34	6,02	4,71	134,56	90,15	79,18	15,52	Melampaui
213	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	Sesuai
214	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	Persen	0,87	0,87	0,87	0,87	0,73	0,44	0,60	0,80	Belum Tercapai
215	Cakupan kunjungan bayi (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	Sesuai
216	Jumlah Puskesmas (bh)	Jml Unit	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19	19	Sesuai
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>		-				-	-			
31	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	38,53	39,10	39,67	40,23	43,80	43,70	43,71	43,71	Melampaui





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
32	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 10000	3,04	3,08	3,13	3,17	3,04	3,08	3,20	3,60	Melampaui
33	Rasio rumah layak huni	Per 10000	92,32	93,12	93,91	94,71	90,68	90,86	90,97	90,58	Belum Tercapai
34	Panjang jalan dilalui Roda 4	Km	473,68	474,42	475,15	475,89	735,00	733,30	733,50	733,50	Melampaui
35	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	Km	699,69	707,74	715,79	723,84	735,00	733,30	733,50	733,50	Melampaui
<b>4</b>	<b>Perumahan</b>		-				-	-			
41	Rumah tangga pengguna air bersih (persen)	Persen	67,39	67,86	68,33	68,80	86,90	90,00	87,47	80,29	Melampaui
42	Rumah tangga pengguna listrik (Persen)	Persen	96,29	96,37	96,45	96,53	98,75	98,53	99,51	99,28	Melampaui
43	Rumah tangga ber-Sanitasi (persen)	Persen	49,74	50,77	51,80	52,82	79,36	81,96	90,86	90,31	Melampaui
44	Rumah layak huni (persen)	Persen	92,32	93,12	93,91	94,71	90,68	90,86	90,97	90,58	Belum Tercapai
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>		-				-	-			
61	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
62	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
63	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
64	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
<b>7</b>	<b>Perhubungan</b>		-				-	-			
73	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2,27	2,42	2	2,382	2,27	2,42	2,382	2,3	Belum Tercapai
742	Jumlah Terminal	Unit	1,00	1	1	1	1,00	1,00	2	2	Melampaui
76	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	-				-	-			Sesuai
77	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	30,00	30	30	30	30,00	30,00	30	30	Sesuai
<b>8</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		-				-	-			
81	Persentase penanganan sampah	Persen	9,00	9,46	9,92	10,38	88,63%	88,63%	88,63%	88,63%	Belum Tercapai
82	Persentase Penanganan RTH	Persen	6,00	6,54	7,09	7,63	6,00	6,54	6,54	6,54	Belum Tercapai
83	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	Persen	15,00	17,36	19,71	22,07	15,00	17,36	19,71	22,07	Sesuai
84	Presentase luas lahan dan/atau tanah untuk produksi bimassa yang ditetapkan dan informasikan status kerusakannya	Persen	0,17	0,23	0,29	0,35	0,17	0,23	0,29	0,35	Sesuai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
85	Persentase pengendalian/penangan kerusakan sumber daya alam dan ekosistem laut	Persen	0,73	1,81	2,88	3,96	0,73	1,81	2,88	3,96	Sesuai
<b>9</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>		-				-	-			
91	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,78	0,73	0,68	0,64	0,81	0,93	0,96	1,00	Melampaui
92	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,30	0,31	0,32	0,33	0,30	0,31	0,32	0,33	Sesuai
93	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,89	0,90	0,92	0,93	0,89	0,90	0,92	0,93	Sesuai
94	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
95	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>		-				-	-			
101	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	Kasus	56,00	50-60	50-60	60,00	56,00	60,00	65	74,3	Melampaui
102	Rasio KDRT	Rasio	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	Sesuai
103	Rasio akseptor KB	Rasio	15,50	17,17	18,84	20,51	15,50	17,17	24,56	25,81	Melampaui
104	Cakupan peserta KB aktif	Persen	94,69	95,93	97,17	98,40	94,69	96,23	96,93	65,78	Belum Tercapai
<b>11</b>	<b>Sosial</b>		-				-	-			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
111	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	persen	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100	100	Sesuai
112	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	17,84	100,00	100,00	100,00	17,84	100,00	100	100	Sesuai
<b>12</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>		-				-	-			
121	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	96,30	96,64	96,99	97,33	84,69	83,32	79,47	74,78	Belum Tercapai
122	Pencari kerja yang ditempatkan (Jiwa)	Jmlh	6.603,00	9.019,36	11.435,72	13.852,07	154,00	136,00	176,00	136,00	Belum Tercapai
123	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,69	2,46	2-3,50	4,00	3,69	2,47	2,25	2,39	Melampaui
<b>13</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>		-				-	-			
131	Persentase koperasi aktif	Persen	63,58	63,93	64,28	64,63	14,74	64,97	64,07	65,74	Melampaui
<b>14</b>	<b>Penanaman Modal</b>		-				-	-			
142	PMA	Jmlh	2,00	2-5	2-5	2,00	2,00	2,00	2,00	-	Belum Tercapai
143	PMDN	Jmlh	9,00	5-10	5-10	5,00	9,00	10,00	10,00	12,00	Melampaui
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>		-				-	-			
151	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jmlh	1,00	1-3	1-3	3,00	3,00	3,00	4,00	-	Belum Tercapai
152	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jmlh	30,00	20-30	20-30	20	30,00	30,00	30,00	-	Belum Tercapai
153	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jmlh	57,00	57	57	57	57,00	57,00	57,00	57,00	Sesuai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
<b>16</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>		-				-	-			
161	Jumlah organisasi pemuda	Jmlh	55,00	20-25	20-25	25	55,00	60,00	60,00	58,00	Melampaui
162	Jumlah Lapangan olahraga	Jmlh	3,00	3-5	3-5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Sesuai
<b>17</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>		-				-	-			
171	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	Kali	2,00	2-3	2-3	2-3					Belum Tercapai
172	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	Kali	3,00	3-5	3-5	3	3,00	3,00	3,00	3,00	Sesuai
<b>18</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>		-				-	-			
181	Ketersediaan Pangan utama (beras) (ton)	Ton	63.351,00	65.469,27	67.587,54	69.705,81	63.351,00	65.469,27	69.755,16	58.347,70	Belum Tercapai
<b>19</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		-				-	-			
191	Posyandu aktif	Jmlh	280,00	280	280	280	280,00	283,00	284,00	284,00	Melampaui
<b>20</b>	<b>Statistik</b>		-				-	-			
201	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
202	Buku "PDRB kabupaten"	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
<b>21</b>	<b>Kearsipan</b>		-				-	-			
211	Pengelolaan arsip secara baku	Jmlh	8,00	8-10	10,00	10,00	8,00	8,00	10,00	10,00	Sesuai





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
212	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jmlh	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Sesuai
<b>22</b>	<b>Perpustakaan</b>		-				-	-			
222	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jmlh	88.125,00	88.427,57	88.730,13	89.032,70	72.337,00	82.155,00	107.813,00	25.303,00	Belum Tercapai
223	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jmlh	663,00	670,16	677,32	684,48	1.130,00	663,00	391,00	450,00	Belum Tercapai
224	Jumlah unit perpustakaan	Jmlh	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154	154	Sesuai
	<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>		-				-	-			
1	Kontribusi sektor Perkebunan	Persen	1.268,00	1.185,16	1.102,33	1.019,49	1.268,00	1.185,16	1.051,46	1.068,50	Melampaui
2	Kontribusi sektor Peternakan	Persen	286,00	305,85	325,70	345,55	286,00	305,85	325,70	345,55	Sesuai
<b>2</b>	<b>Kehutanan</b>		-				-	-			
21	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	419,00	403,06	387,12	371,18	3,31	3,25	3,16	3,45	Belum Tercapai
<b>3</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		-				-	-			
31	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	1,82	1,82	1,82	1,82	1,83	1,80	1,81	1,56	Belum Tercapai
32	Produktivitas total Daerah dari sektor pertambangan/penggalan (Juta)	Persen	1.238,00	1.247,94	1.257,89	1.267,83	0,657	0,708	0,765	0,587	Belum Tercapai



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
33	Persentase elektrifikasi kelistrikan daerah	Persen	96,29	96,37	96,45	96,53	98,75	98,53	99,51	99,28	Melampaui
<b>4</b>	<b>Pariwisata</b>		-				-	-			
41	Kunjungan wisata	jmlh	87.990,00	88.309,89	88.629,78	88.949,67	87.990,00	56.585,00	39.118,00	19.588,00	Belum Tercapai
42	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	63,00	63,17	63,34	63,51	1,93	2,02	2,02	2,03	Belum Tercapai
<b>8</b>	<b>Ketransmigrasian</b>		-				-	-			
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>		-				-	-			
	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		-				-	-			
11	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu	485.763,00	486.902,68	488.042,36	489.182,03	485.763,00	486.902,68	1.186.090	49,9	Belum Tercapai
12	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Ribu	465.951,00	468.384,07	470.817,14	473.250,21	465.951,00	468.384,07	634.140,00	50,1	Belum Tercapai
13	Produktivitas total daerah	Jt	2.816,00	3.000,22	3.184,45	3.368,67	2.816,00	3.000,22	46,95		Belum Tercapai
	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>		-				-	-			
<b>1</b>	<b>Perhubungan</b>		-				-	-			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target				Realisasi				Interpretasi i belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
11	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	-				-	-			
12	Jumlah jaringan telepon genggam/Stasioner	Rasio	-				-	-			
<b>2</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		-				-	-			
21	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Jmlh	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	107,00	107,00	Belum Tercapai
22	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jmlh	61,00	61,00	61,00	61,00	57,00	60,00	71,00	77,00	Melampaui
<b>3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		-				-	-			Sesuai
41	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Persen	6.739,00	67,86	68,33	68,80	86,90	90,00	87,47	80,29	Melampaui
<b>5</b>	<b>Komunikas dan Informatika</b>		-				-	-			
51	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	Ribu	9.629,00	96,37	96,45	96,53	98,75	98,53	99,51	99,28	Melampaui

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2026-2021, Tahun 2021

# BAB 3

# RPJMD



## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

---

Gambaran pengelolaan keuangan daerah menyangkut: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah, dan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Poso. Dimana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir periode 2016-2020 dan proyeksi selama lima tahun ke depan periode 2021-2026.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengelola pendapatan yang terangkum dalam belanja daerah, serta pemanfaatan sisa anggaran untuk dipergunakan dalam pembiayaan daerah. Selain itu, kinerja keuangan masa lalu dapat digunakan untuk melakukan prediksi besarnya pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun selanjutnya.



### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir sampai dengan tahun berjalan. Uraian mengenai kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari perkembangan maupun struktur dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara rinci, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Poso adalah sebagai berikut.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Kinerja pendapatan daerah dapat dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam lima tahun terakhir, secara nominal pendapatan daerah Kabupaten Poso masih didominasi oleh Dana pendapatan transfer. Artinya, penggalan potensi pendapatan asli daerah masih belum maksimal. Selain itu, dapat dikatakan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam dana perimbangan masih cukup besar, termasuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,11 persen. Kemudian dilihat dari sisi komponen pada pertumbuhan untuk tahun 2016-2020, Lain-Lain Pendapatan yang Sah memiliki persentase pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan dua komponen lain yakni Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, dengan rata-rata pertumbuhan pada periode 2016-2020 sebesar 13,36 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut dipicu oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Sedangkan pendapatan transfer memiliki rata-rata pertumbuhan terendah bahkan minus pada periode tersebut dengan persentase hanya 0,69 persen dalam lima tahun terakhir. Secara rinci diuraikan pertumbuhan masing-masing komponen penyusun Pendapatan Daerah Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.





**Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Poso**

URAIAN	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata-rata Pertum- buan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>1.288.335.521.610,93</b>	<b>1.287.408.975.643,27</b>	<b>1.308.172.613.013,79</b>	<b>1.353.935.611.144,77</b>	<b>1.400.082.987.985,46</b>	<b>2,11</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>73.133.891.223,90</b>	<b>110.337.795.303,27</b>	<b>94.146.870.933,79</b>	<b>101.220.105.853,77</b>	<b>110.422.625.299,46</b>	<b>13,20</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	12.327.334.782,24	14.823.015.274,81	19.203.921.305,02	19.645.875.321,59	18.582.954.213,46	11,67
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.333.944.126,00	7.436.636.759,56	8.697.897.160,00	9.760.036.222,00	6.957.679.766,00	0,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.320.638.253,52	2.770.189.208,00	2.419.088.762,00	2.401.727.224,00	2.391.113.501,00	(7,60)
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	50.151.974.062,14	85.307.954.060,90	63.825.963.706,77	69.412.467.086,18	82.490.877.819,00	18,13
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>1.032.812.399.742,00</b>	<b>1.020.817.735.053,00</b>	<b>1.032.568.226.002,00</b>	<b>1.040.998.988.919,00</b>	<b>1.003.897.750.566,00</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>1.032.812.399.742,00</b>	<b>1.020.817.735.053,00</b>	<b>1.032.568.226.002,00</b>	<b>1.040.998.988.919,01</b>	<b>1.003.897.750.566,01</b>	<b>(0,69)</b>
Bagi Hasil Pajak - LRA	14.745.139.230,00	10.841.830.158,00	11.108.334.649,00	7.870.657.300,00	10.077.407.453,00	(6,28)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.664.782.139,00	10.280.773.233,00	22.700.899.727,00	15.175.501.225,00	30.421.240.340,00	55,56
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	725.610.454.000,00	719.435.512.000,00	723.089.621.000,00	752.954.397.000,00	683.391.776.000,00	(1,36)
DAK FISIK REGULER - LRA	284.792.024.373,00	280.259.619.662,00	275.669.370.626,00	264.998.433.394,00	280.007.326.773,00	(0,36)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>182.389.230.645,03</b>	<b>156.253.445.287,00</b>	<b>181.457.516.078,00</b>	<b>211.716.516.372,00</b>	<b>285.762.612.120,00</b>	<b>13,36</b>
Pendapatan Hibah - LRA	20.034.366.052,03	3.666.452.118,00	28.687.133.961,00	42.891.557.458,00	45.075.056.954,00	163,83
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	38.650.074.832,00	40.685.707.169,00	41.346.749.117,00	39.153.036.914,00	41.763.054.166,00	2,06
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LRA	122.756.323.000,00	111.476.286.000,00	110.953.533.000,00	129.386.922.000,00	195.436.681.000,00	14,50
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	948.466.761,00	425.000.000,00	470.100.000,00	285.000.000,00	3.487.820.000,01	259,96



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

URAIAN	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata-rata Pertum- buhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>BELANJA</b>	<b>1.153.105.771.655,55</b>	<b>1.083.774.769.580,01</b>	<b>1.088.752.627.306,50</b>	<b>1.164.857.944.640,90</b>	<b>1.162.586.798.974,27</b>	<b>0,31</b>
<b>BeLANJA OPERASI</b>	919.604.704.554,31	821.881.868.416,72	864.063.798.179,00	908.851.712.454,00	927.077.794.175,00	0,42
Belanja Pegawai	563.849.047.995,00	508.431.665.322,22	527.225.322.812,00	561.983.472.661,00	547.535.833.454,00	(0,53)
Belanja Barang dan Jasa	343.216.235.084,00	299.388.381.606,00	319.551.688.697,00	332.662.537.488,00	313.451.189.807,00	(1,93)
Belanja Bunga	6.425.897,31	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	10.666.799.328,00	7.694.330.000,00	10.391.258.000,00	8.076.400.000,00	53.914.078.655,00	138,11
Belanja Bantuan Sosial	67.750.000,00	4.066.243.000,00	3.363.239.000,00	6.104.302.305,00	12.176.692.259,00	1.516,38
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.798.446.250,00	2.301.248.488,50	3.532.289.670,00	25.000.000,00	0,00	(29,46)
<b>BeLANJA MODAL</b>	<b>233.267.545.501,24</b>	<b>261.860.264.230,29</b>	<b>224.688.829.127,50</b>	<b>255.843.927.186,90</b>	<b>227.245.588.544,27</b>	<b>0,19</b>
<b>BeLANJA TAK TERDUGA</b>	233.521.600,00	32.636.933,00	-	162.305.000,00	8.263.416.255,00	1.226,32
Belanja Tak Terduga	233.521.600,00	773.087.500,00	773.067.500,00	162.305.000,01	8.263.416.255,01	1.285,83
<b>TRANSFER</b>	<b>151.528.495.033,00</b>	<b>192.001.498.160,00</b>	<b>187.552.715.644,00</b>	<b>210.807.893.921,00</b>	<b>203.472.005.443,00</b>	<b>8,33</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	-	-	-	3.192.074.296,00	1.440.566.313,00	11,28
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	3.192.074.296,00	0,00	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,00	1.440.566.313,00	25,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	151.528.495.033,00	192.001.498.160,00	187.552.715.644,00	207.615.819.625,00	202.031.439.130,00	8,10
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	151.042.635.513,00	192.001.498.160,00	187.552.715.644,00	207.615.819.625,01	202.031.439.130,01	8,20
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	485.859.520,00	-	-	483.185.125,00	0,00	(25,00)
Jumlah Belanja dan Transfer	<b>1.304.634.266.688,55</b>	<b>1.275.776.267.740,01</b>	<b>1.276.305.342.950,50</b>	<b>1.375.665.838.561,90</b>	<b>1.366.058.804.417,27</b>	<b>1,23</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.298.745.077,62)</b>	<b>11.632.707.903,26</b>	<b>31.867.270.063,29</b>	<b>(21.730.227.417,13)</b>	<b>34.024.183.568,19</b>	<b>(105,55)</b>



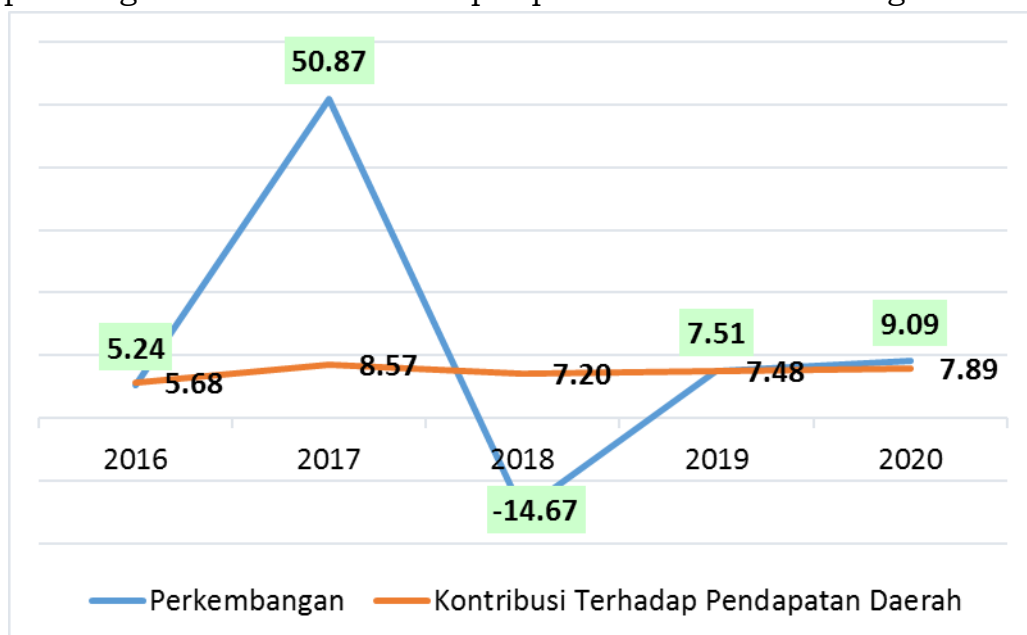
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

URAIAN	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata-rata Pertum- buhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>PENERIMAANPeMBIAYAAN</b>	<b>42.669.778.727,26</b>	<b>13.041.797.955,36</b>	<b>24.674.499.194,62</b>	<b>51.734.370.200,91</b>	<b>24.387.142.783,78</b>	<b>19,14</b>
Penggunaan SiLPA	42.669.778.727,26	13.041.797.955,36	24.674.499.194,62	51.734.370.200,92	24.387.142.783,78	19,14
<b>PENGELUARANPeMBIAYAAN</b>	<b>13.089.228.694,28</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>5.617.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14,89)</b>
Penyertaan Modal/InvestasiPemerintah Daerah	13.034.366.052,03		4.000.000.000,00	5.617.000.000,01	0,00	(14,89)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	54.862.642,25	-	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>29.580.550.032,98</b>	<b>13.041.797.955,36</b>	<b>20.674.499.194,62</b>	<b>46.117.370.200,91</b>	<b>24.387.142.783,78</b>	<b>19,64</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>13.281.804.955,36</b>	<b>24.674.505.858,62</b>	<b>52.541.769.257,91</b>	<b>24.387.142.783,78</b>	<b>58.411.326.351,97</b>	<b>71,16</b>

Sumber: LRA Kabupaten Poso Tahun 2016-2020

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara umum, pertumbuhan PAD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada Tahun 2017 sebesar 50,87 persen. Sedangkan persentase pertumbuhan terendah PAD terjadi pada Tahun 2018 yakni sebesar -14,67 persen. Namun, pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 7,51 persen, kemudian ditahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 9,09 persen. Dimana, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Poso selama kurun Tahun 2016-2020 sebesar 11,61 persen. Sedangkan untuk kontribusinya juga mengalami kecendrungan meningkat hingga tahun 2020 sebesar 7,89 persen. Secara rinci, perkembangan dan pertumbuhan PAD Kabupaten Poso Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terdapat pada Gambar 3.2 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021 (diolah kembali)

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan dan Kontribusi PAD Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016–2020**

Pertumbuhan PAD tidak terlepas dari peranan masing-masing dari komponen pembentuknya. Komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi masing-masing komponen dari PAD terdapat dalam struktur PAD terdapat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi Terhadap PAD				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Daerah	16,86	13,43	19,93	19,41	16,83
2	Retribusi Daerah	10,03	6,74	9,03	9,64	6,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,54	2,51	2,51	2,37	2,17
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68,58	77,32	66,23	68,58	74,70

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021 (diolah kembali)

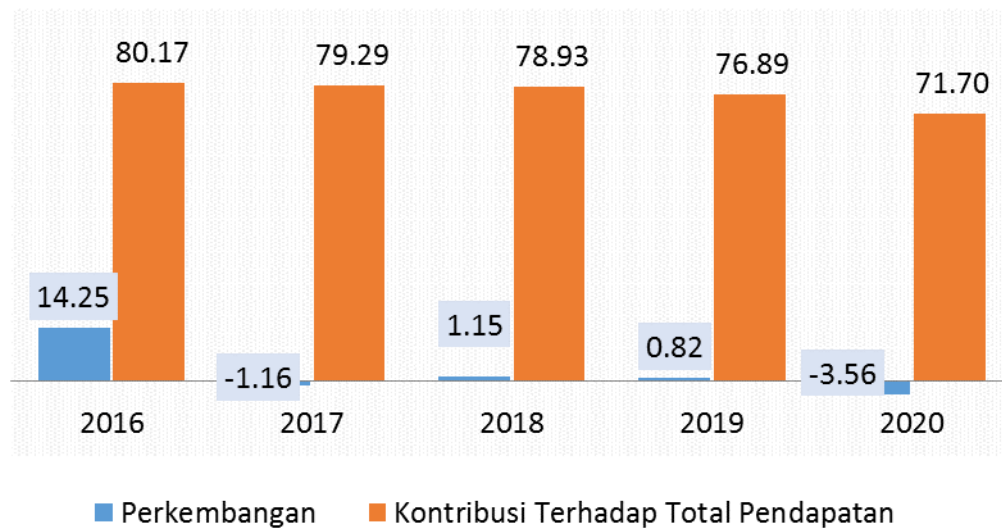
Komponen terbesar dalam penyusun PAD sampai Tahun 2020 terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dimana, pada Tahun 2020 kontribusinya sebesar 74,70 persen. Sedangkan, persentase terendah dalam komponen PAD terdapat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 2,17 persen Tahun 2020. Selanjutnya, untuk kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 16,83 persen dan untuk kontribusi retribusi daerah sebesar 6,30 persen.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Perkembangan Pendapatan Transfer di Kabupaten Poso setiap tahun mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020. Pertumbuhan pendapatan dari komponen pendapatan transfer ini sebesar 14,25 persen pada Tahun 2016. Namun, pada Tahun 2017 pertumbuhannya negatif -1,16 persen dan Tahun 2018 meningkat sebesar 1,15 persen, dan pada Tahun 2019 meningkat lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,82 persen, ditahun 2020 negatif (lebih rendah dari tahun sebelumnya) yakni sebesar -3,56 persen.

Sedangkan untuk kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah juga konsisten menurun setiap tahunnya, hingga tahun 2020 sebesar 71,70 persen. Secara lebih mendetail, nilai dan pertumbuhan dan proporsi pendapatan transfer di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat dalam Gambar 3.2 sebagai berikut.





Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan dan Kontribusi Pendapatan Transfer**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Komponen terbesar dalam menyusun pendapatan transfer di Kabupaten Poso adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Persentase DAU sebesar 68,07 persen pada Tahun 2020. Selain itu, komponen lain dalam menyusun pendapatan transfer adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak merupakan komponen yang memiliki proporsi terendah dalam pendapatan transfer, dengan kontribusi DBH yang semakin menurun setiap tahun. Perkembangan struktur pendapatan transfer Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

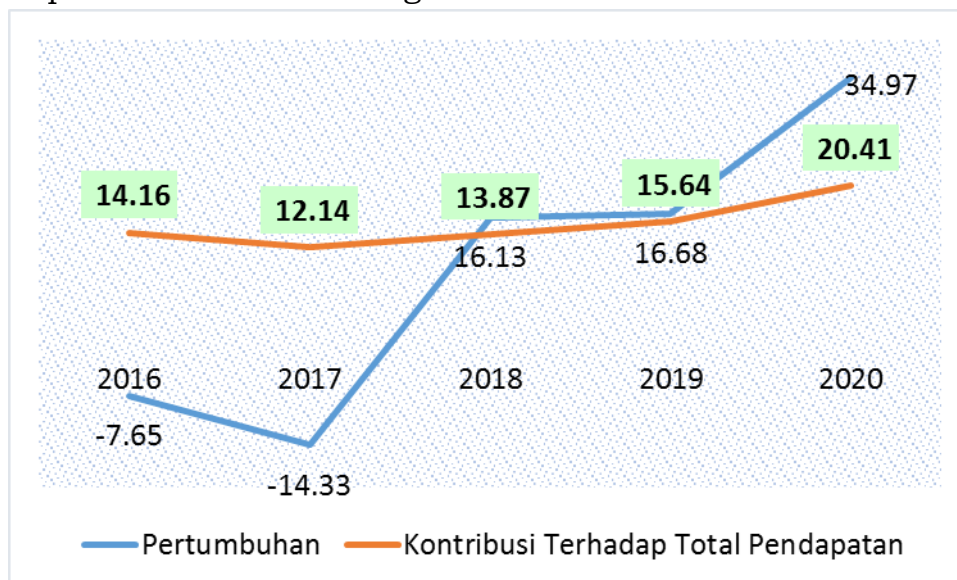
No	Uraian	Proporsi Terhadap Pendapatan Transfer				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	1,43	1,06	1,08	0,76	1,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0,74	1,01	2,20	1,46	3,03
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	70,26	70,48	70,03	72,33	68,07
4	DAK Fisik Reguler - LRA	27,57	27,45	26,70	25,46	27,89

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Berdasarkan data Tabel 3.3 di atas, urutan kontribusi terbesar dalam pendapatan transfer adalah DAU, DAK dan Dana Perimbangan adalah DBH. Pada Tahun 2020, persentase kontribusi DAU cenderung berfluktuatif, memberikan kontribusi sebesar 68,07 persen terhadap dana perimbangan. Di sisi lain, DAK justru mengalami sedikit peningkatan dengan persentase kontribusi sebesar 27,89 persen, serta untuk Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA kontribusi terhadap pendapatan transfer hanya sebesar 3,03 persen, dan terendah adalah Bagi Hasil Pajak - LRA sebesar 1,00 persen.

### c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan kecenderungan yang juga berfluktuatif. Penurunan yang cukup signifikan pada komponen ini terjadi pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan masing-masing pertumbuhan negatif (-7,65) persen dan (-14,33) persen. Selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 16,13 persen, dan Tahun 2019 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tumbuh sebesar 16,68 persen, kemudian ditahun 2020 meningkat sebesar 34,97 persen. Seiring dengan pertumbuhannya juga sejalan dengan meningkatnya proporsi terhadap pendapat daerah hingga tahun 2020 sebesar 20,41 persen. Secara umum, nilai dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah terdapat pada Gambar 3.3 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.3**  
**Perkembangan dan Kontribusi Lain-Lain Pendapatan yang Sah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Struktur terbesar dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD di Kabupaten Poso adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Struktur komponen ini cenderung menunjukkan persentase yang semakin menurun pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Secara rinci kontribusi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah setiap tahun terdapat dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Struktur Lain-lain Pendapatan yang sah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi Terhadap Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Hibah - LRA	10,98	2,35	15,81	20,26	15,77
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	21,19	26,04	22,79	18,49	14,61
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LRA	67,30	71,34	61,15	61,11	68,39
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	0,52	0,27	0,26	0,13	1,22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Merujuk pada Tabel 3.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa selain Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2020, proporsi pendapatan hibah terhadap Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 15,77 persen, serta untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 14,61 persen, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 68,39 persen serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 1,22 persen.

## **2. Belanja Daerah**

Tren nilai belanja daerah Kabupaten Poso menunjukkan kondisi yang menurun selama dua tahun terakhir, meski terjadi peningkatan dalam periode Tahun 2016-2017. Kondisi ini disebabkan, bahwa belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso harus selalu menyesuaikan dengan besarnya pendapatan yang diterima setiap tahun. Secara nominal, nilai dari belanja daerah ini menunjukkan peningkatan. Sampai Tahun 2019, nilai total belanja di Kabupaten Poso mencapai lebih dari Rp1.164 triliun. Dalam dua tahun terakhir total belanja daerah Kabupaten Poso mengalami peningkatan, yakni Tahun 2018 tumbuh sebesar 0,04 persen dan Tahun 2019 tumbuh sebesar 7,79 persen,

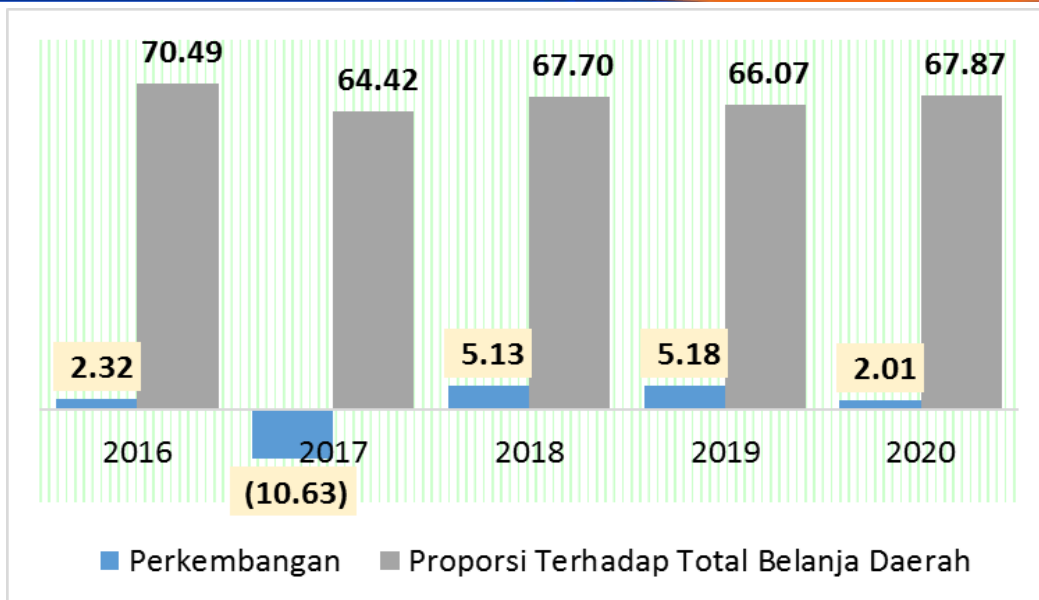
kemudian ditahun 2020 total belanja daerah tumbuh negatif minus 0,70 persen. Data rincian nilai dan persentase belanja daerah di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 3.4 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016–2020**

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, komposisi belanja mengalami perubahan. Dimana sebelumnya terbagi pada belanja langsung dan tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut komposisi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Perkembangan belanja operasi Kabupaten Poso dari tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecendrungan menurun, ditahun 2016 meningkat sebesar 2,32 persen, menurun ditahun 2017 dengan tumbuh negatif minus 10,63 persen (terendah dalam 5 tahun terakhir), selanjutnya ditahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 5,13 persen, namun ditahun 2020 mengalami pengurangan sebesar 2,01 persen. Selanjutnya proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah adalah yang tertinggi, mencapai 67,87 persen ditahun 2020. Selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.5**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Operasi**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Selanjutnya, struktur dari belanja operasi di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Struktur Belanja Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi terhadap Belanja Operasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Pegawai	61,31	61,86	61,02	61,83	59,06
2	Belanja Barang dan Jasa	37,32	36,43	36,98	36,60	33,81
3	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	1,16	0,94	1,20	0,89	5,82
5	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,49	0,39	0,67	1,31
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,20	0,28	0,41	0,00	-

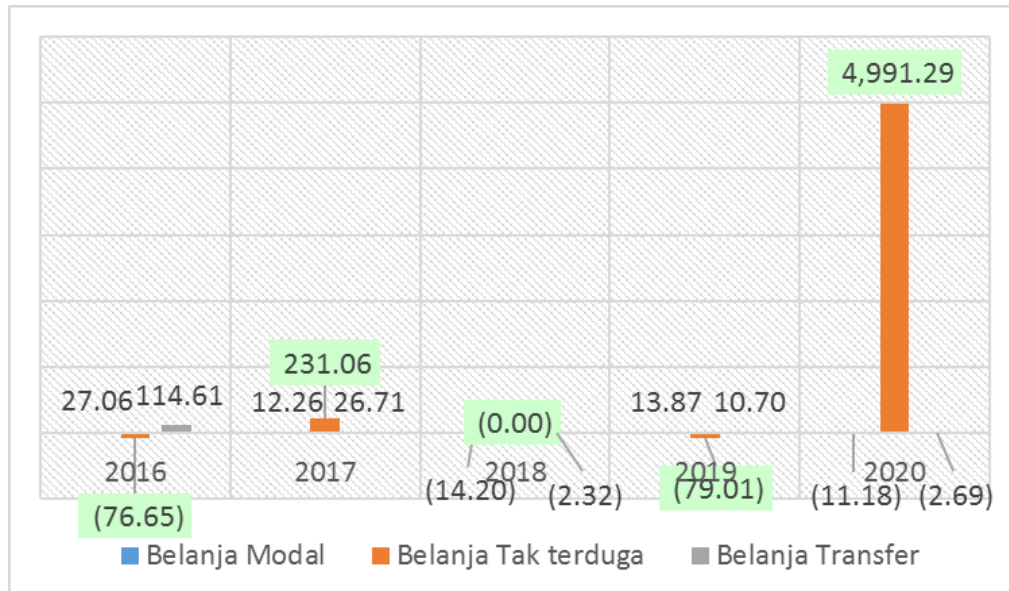
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Belanja operasi Kabupaten Poso masih didominasi oleh belanja pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase belanja pegawai yang berkisar antara 70-75 persen ditahun 2016-2019, namun ditahun 2020 menurun sebesar 59,06 persen dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar



alokasi belanja masih digunakan untuk membayar gaji pegawai. Alokasi terbesar selanjutnya adalah Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya untuk data perkembangan dan pertumbuhan belanja non operasi Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 3.6 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.6**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Non Operasi**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 3.6 di atas, pertumbuhan belanja non operasi sangat berfluktuatif di Kabupaten Poso terjadi dalam kurun tahun 2016-2020. Untuk Belanja Modal dari tahun 2016 sebesar 27,06, kemudian tumbuh 12,26 persen ditahun 2017, ditahun 2018 mengalami pertumbuhan yang negatif yakni minus 14,20 persen (terendah dalam 5 tahun terakhir). Kemudian kembali meningkat ditahun 2019 dan kembali menurun ditahun 2020 sebesar 11,18 persen. Selanjutnya untuk belanja transfer ditahun 2016 meningkat sangat tinggi sebesar 114,61 persen dan hingga tahun tumbuh negatif sebesar -2,69 persen. Selanjutnya selanjutnya belanja Tak Terduga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi ditahun 2020 mencapai 4.991,29 persen. Kondisi tersebut akibat refocusing anggaran dalam rangka mengatasi Pandemi Virus Corona-19

yang terjadi. Selanjutnya untuk struktur proporsi belanja non operasi terhadap belanja ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6****Struktur Belanja Non Operasi Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi terhadap Belanja Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Modal	17,88	20,53	17,60	18,60	16,64
2	Belanja Tak terduga	0,02	0,00	-	0,01	0,60
3	Belanja Transfer	11,61	15,05	14,69	15,32	14,89

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Merujuk pada data Tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa sebagian besar alokasi non operasi dipergunakan untuk belanja Modal dan Belanja Transfer. Kondisi tersebut ditunjukkan persentase proporsi modal sebesar 17,88 persen pada Tahun 2016 dan sampai Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 16,64 persen. Alokasi terbesar kedua adalah transfer, yang proporsinya menunjukkan perkembangan meningkat, dimana pada Tahun 2016 sebesar 11,61 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 14,89 persen. Sedangkan untuk belanja tak terduga meskipun meningkat sangat signifikan ditahun 2020, namun proporsinya terhadap belanja daerah sangat rendah, hanya sebesar 0,60 persen.

### 3. Pembiayaan Daerah

Sumber pembiayaan terbesar di Kabupaten Poso dalam lima tahun terakhir berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan daerah. Salah satu fungsinya adalah menutup desifit anggaran dalam APBD. Selain SILPA, sumber penerimaan pembiayaan lainnya adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Poso pada Tahun 2016 sebesar minus 9,11 persen, menurun signifikan hingga pada Tahun 2017 tumbuh negatif (-69,44) persen. Pada periode Tahun 2018-2019, penerimaan pembiayaan tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 109,67 persen Tahun 2019, namun ditahun 2020 sebesar 52,86 persen. Data perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan daerah terdapat pada Gambar 3.7 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.7**

**Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso  
Tahun 2016-2020**

Perkembangan nilai dan pertumbuhan SILPA di Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan negatif pada Tahun 2017 dan juga ditahun 2020. Komposisi penerimaan pembiayaan Kabupaten Poso terdapat dalam Tabel 3.7 sebagai berikut.

**Tabel 3.7**

**Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Poso  
Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Struktur Penerimaan Pembiayaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	100	100	100	100	100
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
3.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 di atas, maka pada periode Tahun 2016-2020, penerimaan pembiayaan hanya satu-satunya bersumber dari SILPA. SILPA berkontribusi sebesar 100 persen terhadap penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020.

Sedangkan untuk perkembangan pengeluaran pembiayaan terdapat dalam Gambar 3.8 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, 2021

**Gambar 3.8**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data pada Gambar 3.8 di atas, terlihat bahwa peningkatan pengeluaran pembiayaan terbesar terjadi pada Tahun 2016 dengan persentase pertumbuhan sebesar 55,51 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2017 tumbuh negatif sebesar (-90,57) persen, dan pada Tahun 2018 kembali tumbuh sebesar 100 persen, dan Tahun 2019 masih tumbuh sebesar 40,43 persen dan ditahun 2020 nol. Secara rinci, struktur pengeluaran pembiayaan Kabupaten Poso periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Struktur Penerimaan Pembiayaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	99,28	59,37	100,00	100	0
2.	Pembayaran Pokok Utang	0,72	40,63	0,00	0	0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

Merujuk pada data Tabel 3.8 di atas, dimana komposisi terbesar dalam pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal (investasi)



pemerintah daerah. Namun, proporsi penyertaan modal pemerintah ini berfluktuatif dengan persentase yang tetap mencapai 100 persen di tahun 2019. Hal ini disebabkan, pemerintah daerah juga harus melakukan pembayaran pokok utang yang nilainya semakin besar pada setiap tahun. Dimana, pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar 100 persen. Ditahun 2020 pemerintah Kabupaten Poso tidak menganggarkan untuk penyertaan Modal. Hal ini dikarenakan refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca Daerah berfungsi memberikan informasi penting kepada pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### **a. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya ketika jatuh tempo.

1. *Current Ratio*, menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *Current Ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200 persen atau tepatnya sebesar 231,71 persen pada Tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 *current ratio* sedikit mengalami peningkatan menjadi 454,31. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Poso memiliki kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki adalah cukup tinggi.
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen, namun nilai *quick ratio* Kabupaten Poso Tahun 2019 sebesar 79,35 persen dan ditahun 2020 sebesar 236,53. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid adalah kurang cukup atau rendah.

#### **b. Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka





panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total hutang (kewajiban) terhadap asset. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio solvabilitas tahun 2017 sebesar 0,48 persen, kemudian pada Tahun 2018 sebesar 0,65 persen hingga Tahun 2019 sebesar 1,42 persen, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 1,08. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Poso selama periode Tahun 2017-2020 cukup kuat untuk membayar kewajiban.

Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci terdapat pada Tabel 3.9 sebagai berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 3.9**

**Neraca Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Poso Tahun 2017-2020**

URAIAN	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	
<b>ASET</b>					
ASET LANCAR					
<b>Kas</b>	<b>24.674.521.130,62</b>	<b>51.770.681.759,91</b>	<b>25.531.742.815,43</b>	<b>58.613.973.621,71</b>	62,90
Kas di Kas Daerah	20.151.325.263,62	46.325.793.819,91	16.461.368.726,78	50.650.645.179,97	91,04
Kas di Bendahara Penerimaan	-	288.350.112,00	-	383.346.529,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	18.573.132,00	4.526.846,00	1.121.105.258,65	172.110.856,74	8.168,48
kas di Bendahara BLUD RSUD	129.874.413,00	2.542.271.673,00	97.092.086,00	4.590.144.680,00	2.129,64
Kas di bendahara Bos	2.269.760.973,00	674.893.220,00	697.773.192,00	1.121.155.111,00	(2,07)
Kas Di Bendahara (FKTP)	2.104.987.349,00	1.934.846.089,00	2.154.403.552,00	1.690.355.580,00	(6,09)
Setara Kas	-	-	5.000.000.000,00	6.215.685,00	0,06
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	26.048.909.014,45	17.630.957.816,70	46.251.812.458,44	28.657.807.877,29	30,66
Piutang Lainnya	-	-	-	341.283.636,00	33,33
Penyisihan Piutang	(7.607.978.556,15)	(8.380.224.118,40)	(16.598.065.189,48)	(11.001.757.269,10)	24,83
Beban Dibayar Dimuka	-	207.900.000,00	-	-	(50,00)
Persediaan	21.430.786.790,55	26.054.609.902,06	19.375.591.167,31	35.971.562.176,82	27,20
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>64.546.238.379,47</b>	<b>87.283.925.360,27</b>	<b>74.561.081.251,70</b>	<b>112.582.870.042,72</b>	<b>23,88</b>
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	215.405.047,00	215.405.047,00	215.405.047,00	215.405.047,00	-
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(215.405.047,00)	(215.405.047,00)	(215.405.047,00)	(215.405.047,00)	-
Investasi Permanen	<b>29.706.650.690,00</b>	<b>32.820.845.056,00</b>	<b>37.796.783.872,41</b>	<b>37.535.010.681,00</b>	<b>8,32</b>



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

URAIAN	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.706.650.690,00	32.820.845.056,00	37.796.783.872,41	37.535.010.681,00	<b>8,32</b>
Jumlah Investasi Jangka Panjang	<b>29.706.650.690,00</b>	<b>32.820.845.056,00</b>	<b>37.796.783.872,41</b>	<b>37.535.010.681,00</b>	<b>8,32</b>
ASET TETAP					
Tanah	300.864.135.032,20	285.298.208.327,00	274.275.082.276,00	270.157.527.276,00	(3,51)
Peralatan dan Mesin	293.015.903.199,57	277.498.169.294,78	317.044.585.965,27	376.307.246.747,59	9,22
Gedung dan Bangunan	709.299.327.673,49	746.423.985.597,40	787.495.460.439,58	831.088.127.279,88	5,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	957.130.211.287,03	1.063.561.824.154,11	1.191.174.854.028,28	1.302.539.825.830,46	10,82
Aset Tetap Lainnya	158.843.435.673,08	181.582.930.949,68	208.001.015.983,18	215.026.912.529,76	10,75
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.440.213.000,00	15.785.518.000,00	12.646.955.500,00	1.699.234.790,79	(22,82)
Akumulasi Penyusutan	(584.944.760.517,36)	(616.470.122.393,16)	(729.892.819.406,16)	(910.164.980.072,16)	16,16
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.845.648.465.348,01</b>	<b>1.953.680.513.929,81</b>	<b>2.060.745.134.786,15</b>	<b>2.086.653.894.382,32</b>	<b>4,20</b>
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	1.543.291.436,00	1.543.291.436,00	1.543.291.436,00	1.543.291.436,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.931.789.065,39	5.431.558.398,72	5.444.837.765,39	5.374.814.984,39	(3,16)
Akumulasi Aset Tidak Berwujud	(1.373.249.200,00)	-	-	-	-
Aset Lain-lain	78.287.715.007,70	160.008.941.198,91	117.132.737.975,08	116.012.486.347,08	-
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		(46.677.209.181,08)	(33.529.433.987,08)	(54.780.877.034,45)	17,61
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>84.389.546.309,09</b>	<b>120.306.581.852,55</b>	<b>90.591.433.189,39</b>	<b>68.149.715.733,02</b>	<b>(2,30)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.024.290.900.726,57</b>	<b>2.194.091.866.198,63</b>	<b>2.263.694.433.099,65</b>	<b>2.304.921.490.839,06</b>	<b>4,46</b>



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

URAIAN	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<b>9.742.486.997,43</b>	<b>14.211.159.613,76</b>	<b>32.177.934.681,56</b>	<b>24.780.968.919,32</b>	49,77
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.272,00	36.242.931,00	1.144.600.031,65	196.431.584,74	80.063,83
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	115.583.333,33	104.916.666,67	21.666.666,67	(44,29)
Utang Beban	785.848.376,00	3.325.040.563,00	3.133.999.648,81	7.874.088.147,00	156,21
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.956.623.349,43	10.734.292.786,43	27.794.418.334,43	16.688.782.520,91	46,27
<b>Jumlah Investasi Jangka Pendek</b>	<b>9.742.486.997,43</b>	<b>14.211.159.613,76</b>	<b>32.177.934.681,56</b>	<b>24.780.968.919,32</b>	49,77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9.742.486.997,43</b>	<b>14.211.159.613,76</b>	<b>32.177.934.681,56</b>	<b>24.780.968.919,32</b>	<b>49,77</b>
EKUITAS					
Ekuitas	<b>2.014.548.413.729,25</b>	<b>2.179.880.706.584,87</b>	<b>2.231.516.498.418,09</b>	<b>2.280.140.521.919,74</b>	<b>4,25</b>
Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.014.548.413.729,25</b>	<b>2.179.880.706.584,87</b>	<b>2.231.516.498.418,09</b>	<b>2.280.140.521.919,74</b>	<b>4,25</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.024.290.900.726,68</b>	<b>2.194.091.866.198,63</b>	<b>2.263.694.433.099,65</b>	<b>2.304.921.490.839,06</b>	<b>4,46</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2017-2020

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

#### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan realisasi belanja daerah Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi terhadap total pengeluaran per tahun sebesar 45,23 persen. Persentase belanja pemenuhan aparatur di Kabupaten Poso dalam periode Tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahun. Dimana proporsi belanja pemenuhan aparatur pada Tahun 2016 sebesar 45,62 persen, menurun hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 40,08 persen.

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang semakin menurun mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja publik semakin meningkat. Proporsi pengeluaran pemerintah untuk belanja publik yang semakin meningkat diharapkan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi yang kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Poso. Data analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 3.10 sebagai berikut.

**Tabel 3.10**

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur</b>	<b>Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)</b>	<b>Persentase</b>
1	Tahun anggaran 2016	644.343.743.521,40	1.412.458.082.966,29	45,62
2	Tahun anggaran 2017	569.753.713.441,37	1.314.021.596.494,58	43,36
3	Tahun anggaran 2018	603.388.531.345,20	1.346.868.872.388,62	44,80
4	Tahun anggaran 2019	633.103.161.963,52	1.437.643.820.979,32	44,04
5	Tahun anggaran 2020	547.535.833.454,00	1.366.058.804.417,27	40,08

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

#### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Dalam analisis pembiayaan, dapat diketahui secara riil kondisi surplus atau defisit pembiayaan di Kabupaten Poso pada periode yang telah berjalan Tahun 2015-2019. Analisis pembiayaan daerah Kabupaten Poso dilakukan dengan terlebih dahulu untuk mengetahui besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.





## 1. Defisit Riil Anggaran

Defisit riil anggaran Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada Tahun 2016 besarnya difisit riil APBD Kabupaten Poso sebesar (Rp42.669.778.727,26), menurun hingga Tahun 2017 menjadi sebesar (Rp13.282.004.955,36), namun kembali meningkat Tahun 2018 sebesar (Rp24.674.505.858,62), dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi (Rp51.770.681.759,91). Ditahun 2020 anggaran Kabupaten Poso surplus sebesar Rp34.024.183.568,19. Data defisit riil anggaran terdapat pada Tabel 3.11 sebagai berikut.

**Tabel 3.11**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.369.788.304 .239,03	1.300.739.591. 539,22	1.322.194.366. 530,00	1.385.873.139. 219,41	1.400.082.987. 985,46
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.399.329.054 .272,01	1.312.783.515. 472,11	1.342.868.872. 388,62	1.431.291.820. 979,32	1.366.058.804. 417,27
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.129.028.69 4,28	1.238.081.022, 47	4.000.000.000, 00	6.352.000.000, 00	-
	Defisit Rill	(42.669.778.7 27,26)	(13.282.004.95 5,36)	(24.674.505.85 8,62)	(51.770.681.75 9,91)	34.024.183.56 8,19

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

## 2. Penutup Defisit Ril Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menggunakan dana SiLPA sebagai pos penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit riil pembiayaan daerah selama periode Tahun 2016-2020, yang terdapat pada Tabel 3.12 sebagai berikut.

**Tabel 3.12**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00	100,00	100,00	99,89	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

### 3. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Data gambaran perolehan SiLPA selama periode Tahun 2016-2020. Perolehan SiLPA selama periode Tahun 2016-2020 diperoleh dari surplus pembiayaan daerah yang terdapat pada Tabel 3.13 sebagai berikut.

**Tabel 3.13**

**Realisasi Sisa Lebih perhitungan Anggaran  
Kabupaten Poso Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jumlah SiLPA	42.669,7 78.727,2 6	100	13.282,00 4.955,36	100	24.674,50 5.858,62	100	51.770,68 1.759,91	100	24.387,14 2.783,78	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2021

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan meliputi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah yang dikelola berdasarkan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan kapastitas riil kemampuan keuangan daerah. Penyusunan kerangka pendanaan Kabupaten Poso tahun 2021-2026, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam nasional pada Tahun 2020, maka arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran Tahun 2021 ditetapkan dengan tema "Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*". Untuk itu, penyusunan kerangka pendanaan Kabupaten



Poso untuk perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 dan seterusnya perlu melakukan sinergi antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan terkait dan kebijakan pemerintah dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, yakni aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup kebijakan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan kapasitas riil daerah serta prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran yang dimaksud antara lain *value for money* (efektif dan efisien), memenuhi SPM, dan Standart Analisa Belanja (SAB). Pendapatan periode Tahun 2021-2026 Kabupaten Poso. Secara rinci kebijakan pada masing-masing komponen APBD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dapat dirangkum pada Tabel 3.14 sebagai berikut.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 3.14  
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021–2026  
Kabupaten Poso**

Kode Rek	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.358.065.958.814,00</b>	<b>1.051.618.056.862,00</b>	<b>1.063.472.746.966,50</b>	<b>1.079.182.759.914,00</b>	<b>1.110.070.049.970,97</b>	<b>1.140.957.340.027,94</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>119.868.513.205,00</b>	<b>120.368.513.205,00</b>	<b>122.823.534.613,63</b>	<b>125.778.556.022,26</b>	<b>131.130.947.694,99</b>	<b>136.483.339.367,72</b>
4.1.1	Pajak Daerah	36.639.139.709,00	36.396.678.343,00	37.738.313.900,27	38.837.488.091,54	40.669.445.076,99	42.501.402.062,44
4.1.2	Retribusi Daerah	15.930.688.590,00	16.173.149.956,00	16.408.609.247,70	16.886.529.905,40	17.683.064.334,90	18.479.598.764,40
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.195.286.154,00	3.195.286.154,00	3.291.144.738,62	3.387.003.323,24	3.546.767.630,94	3.706.531.938,64
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.103.398.752,00	64.603.398.752,00	65.385.466.727,04	66.667.534.702,08	69.231.670.652,16	71.795.806.602,24
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.176.464.633.669,00</b>	<b>900.379.188.397,00</b>	<b>908.544.200.854,07</b>	<b>920.064.536.154,14</b>	<b>943.643.140.614,21</b>	<b>967.221.745.074,28</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.131.113.838.000,00</b>	<b>856.982.484.000,00</b>	<b>868.048.367.430,00</b>	<b>878.208.178.860,00</b>	<b>900.426.259.450,00</b>	<b>922.644.340.040,00</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	949.228.865.000,00	723.477.928.000,00	732.970.216.650,00	742.462.505.300,00	763.345.540.330,00	784.228.575.360,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	48.380.417.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.5	Dana Desa	133.504.556.000,00	133.504.556.000,00	135.078.150.780,00	135.745.673.560,00	137.080.719.120,00	138.415.764.680,00
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>45.350.795.669,00</b>	<b>43.396.704.397,00</b>	<b>40.495.833.424,07</b>	<b>41.856.357.294,14</b>	<b>43.216.881.164,21</b>	<b>44.577.405.034,28</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>61.732.811.940,00</b>	<b>30.870.355.260,00</b>	<b>32.105.011.498,80</b>	<b>33.339.667.737,60</b>	<b>35.295.961.661,77</b>	<b>37.252.255.585,94</b>
4.3.1	Hibah	31.667.811.940,00	805.355.260,00	1.438.711.498,80	2.072.067.737,60	2.825.761.661,77	3.579.455.585,94
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.065.000.000,00	30.065.000.000,00	30.666.300.000,00	31.267.600.000,00	32.470.200.000,00	33.672.800.000,00



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode Rek	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.358.065.958.814,00</b>	<b>1.051.618.056.861,80</b>	<b>1.063.472.746.966,50</b>	<b>1.079.182.759.914,00</b>	<b>1.110.070.049.970,97</b>	<b>1.140.957.340.027,94</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>913.226.130.607,00</b>	<b>731.287.813.402,00</b>	<b>743.422.962.616,75</b>	<b>753.600.492.274,30</b>	<b>775.409.261.205,64</b>	<b>797.218.030.136,97</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	593.994.826.247,00	516.945.227.694,00	525.082.920.573,09	530.262.993.894,98	543.296.650.636,10	556.330.307.377,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.978.300.432,00	212.663.381.780,00	202.345.277.986,05	206.600.974.192,10	214.808.388.303,76	223.015.802.415,42
5.1.3	Belanja Bunga		-	0	0	0	0
5.1.4	Belanja Subsidi		-	0	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	6.498.403.928,00	1.679.203.928,00	6.591.640.908,45	6.684.877.888,89	6.814.845.967,45	6.944.814.046,01
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.754.600.000,00	0,00	9.403.123.149,17	10.051.646.298,33	10.489.376.298,33	10.927.106.298,33
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>228.408.310.908,00</b>	<b>103.324.780.438,00</b>	<b>107.801.583.331,80</b>	<b>112.278.386.225,59</b>	<b>119.130.635.552,83</b>	<b>125.982.884.880,07</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tak terduga</b>	<b>5.295.438.069,00</b>	<b>5.896.131.391,90</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.614.911.006,10</b>	<b>3.729.822.012,19</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>211.136.079.230,00</b>	<b>211.109.331.629,90</b>	<b>208.748.201.017,96</b>	<b>209.803.881.414,11</b>	<b>211.915.242.206,41</b>	<b>214.026.602.998,71</b>
	<b>SURPLUS (/DEFISIT)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>					-	-
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Pencairan Dan Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode Rek	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	-	-	-	-	-
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2021



### **3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos, atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Poso periode Tahun 2021-2026.

Pada kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Poso direncanakan semakin meningkat dan membaik. Kondisi ini didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan yang diimbangi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah tersebut. Perkiraan pendapatan dan belanja prioritas dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Poso untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 terdapat pada Tabel 3.15 sebagai berikut.



Tabel 3.15

Realisasi dan Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Poso Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1.358.065.958.814,00	1.051.618.056.862,00	1.063.472.746.966,50	1.079.182.759.914,00	1.110.070.049.970,97	1.140.957.340.027,94
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
<i>Total penerimaan</i>		1.358.065.958.814,00	1.051.618.056.862,00	1.063.472.746.966,50	1.079.182.759.914,00	1.110.070.049.970,97	1.140.957.340.027,94
Dikurangi:							
4	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	216.431.517.299,00	217.005.463.021,81	212.248.201.017,96	213.303.881.414,11	215.530.153.212,51	217.756.425.010,90
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>		<b>1.141.634.441.515,00</b>	<b>834.612.593.840,20</b>	<b>851.224.545.948,54</b>	<b>865.878.878.499,89</b>	<b>894.539.896.758,46</b>	<b>923.200.915.017,04</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2021



**Tabel 3.16**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Poso**

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	1.141.634.441.515	834.612.593.840	851.224.545.949	865.878.878.500	894.539.896.758	923.200.915.017
2	<b>Prioritas I</b>	662.147.976.079	484.075.304.427	493.710.236.650	502.209.749.530	518.833.140.120	535.456.530.710
3	<b>Prioritas II</b>	365.323.021.285	267.076.030.029	272.391.854.704	277.081.241.120	286.252.766.963	295.424.292.805
4	<b>Prioritas III</b>	114.163.444.152	83.461.259.384	85.122.454.595	86.587.887.850	89.453.989.676	92.320.091.502

Sumber: Hasil Analisis, 2021

# BAB 4

# RPJMD



## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

---

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis komprehensif yang mencakup analisis capaian kinerja pembangunan Kabupaten Poso selama kurun waktu lima tahun terakhir serta memperhatikan kondisi saat ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Poso sebagai berikut.

### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan yang diidentifikasi adalah permasalahan pembangunan yang merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (*strength*) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi dan tidak diminimalisir, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threat*) yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu pada periode pemerintahan daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen





pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan (*mapping*) menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab II dokumen Rancangan RPJMD yang kemudian disempurnakan dalam Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 ini, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Poso dapat dirangkum menjadi 9 (sembilan) permasalahan pokok sebagai berikut.

- 1) Banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan di desa;
- 2) Tingginya tingkat kemiskinan;
- 3) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
- 4) Sektor pariwisata dan sektor pertanian belum dikembangkan secara optimal;
- 5) Ketimpangan infrastruktur dasar antar kecamatan;
- 6) Kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas;
- 7) Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal;
- 8) Masih adanya isu konflik dan tindak kriminalitas;
- 9) Kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

**Tabel 4.1**  
**Masalah Pokok Daerah Kabupaten Poso**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	
Banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan di desa	Sarana Prasarana Desa Terbatas	Terbatasnya sumberdaya untuk menyediakan sarana prasarana desa	
	Ekonomi Desa Belum Berkembang	Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa	
	Rendahnya Sumber Daya Aparat Desa		Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa
			Rendahnya tingkat kepemimpinan kepala desa
	Kemampuan Keuangan Desa Rendah	Masih Rendahnya APBDes	
	Rendahnya aksesibilitas desa	Sulitnya masyarakat untuk dijangkau layanan pemerintahan desa	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Karakteristik Desa	Adanya desa-desa berada di gunung-gunung yang sulit dicapai
Tingginya tingkat Kemiskinan	Garis kemiskinan tinggi	Inflasi daerah tinggi
		Harga kebutuhan pokok tinggi
		Ketersediaan produksi dan distribusi kebutuhan pokok terbatas
	Bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran	Verifikasi dan validasi pkh belum optimal
	Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin	Masyarakat miskin tidak memiliki <i>asset-Liability</i>
		Kondisi pendidikan dan kesehatan keluarga miskin rendah
		Masih banyak rumah tidak layak huni
Rendahnya akses atas infrastuktur dasar (air bersih, sanitasi layak, dan listrik)		
Pendapatan perkapita rendah	Harga jual produk pertanian rendah	
	Lapangan kerja terbatas	
Rendahnya kualitas SDM (capaian IPM Rendah, yang diukur dari aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan)	Rendahnya pengeluaran perkapita masyarakat (yaitu sebesar 25,50 persen penduduk di Kabupaten Poso termasuk golongan yang memiliki pengeluaran per kapita Rp500.000–Rp749.999 per bulan)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal
		Infrastruktur sektor ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh kecamatan yang ada di Kab. Poso
		Diversifikasi usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal belum dilakukan secara optimal
	Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS)	Minat anak usia sekolah untuk melanjutkan masih perlu ditingkatkan
		Kuantitas dan kualitas guru masih belum optimal
		Belum meratanya distribusi guru
	Masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS)	Program paket A, B, C belum berjalan optimal
		Masih adanya anak putus sekolah



<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
	Angka Harapan Hidup (AHH) masih perlu ditingkatkan	Terbatasnya tenaga medis dan paramedis di seluruh wilayah
		Masih kurangnya kemampuan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja puskesmas dan pusku
		Belum optimalnya pola hidup bersih dan sehat
		Angka Kesakitan Masih Tinggi
Sektor pariwisata dan sektor pertanian belum dikembangkan secara optimal	Pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian semakin menurun	Nilai tukar petani (NTP) rendah
		Harga jual komoditas hasil pertanian rendah
		Rendahnya akses pasar produk pertanian
		Masih terbatas distribusi hasil pertanian
		Terbatasnya sarana prasarana produksi petani seperti modal usaha, alsinta, pupuk/obat-obatan terbatas
		Nilai tambah produk pertanian rendah
	Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata masih rendah	Pengembangan pariwisata belum terintegrasi
		Pemasaran pariwisata belum optimal
		Investasi di sektor pariwisata masih rendah
		Aksesibilitas ke destinasi unggulan masih rendah
		Industri yang mendukung pariwisata belum berkembang
		Koordinasi pengembangan pariwisata antar OPD belum optimal
		Paket wisata terusan belum berjalan (3T yaitu Toraja, Tentena, Togeana)
Ketimpangan infrastruktur dasar antar kecamatan	Pusat pengembangan wilayah masih terfokus di ibukota kabupaten Poso	Koordinasi dan integrasi program dan kegiatan antar OPD yang menangani infrastruktur dengan OPD lainnya belum optimal
		Data spasial di wilayah kecamatan yang membutuhkan pengembangan infrastruktur belum



<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
		dimanfaatkan dengan baik
		Terbatasnya anggaran infrastruktur yang dimiliki APBD Kabupaten Poso
	Kecamatan dan desa belum secara optimal memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayahnya	Potensi, kompetensi inti, dan unggulan masing-masing kecamatan dan desa belum diidentifikasi dengan baik, agar pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran di kecamatan atau desa tersebut
		Pemetaan konektivitas antar kecamatan masih perlu dipetakan dengan baik sehingga pembangunan infrastruktur lebih merata
Kapasitas Keuangan dalam membiayai pembangunan daerah terbatas	Pendapatan Daerah Rendah	Masih rendahnya kinerja Pajak dan retribusi daerah rendah
		Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
		Belum optimalnya tatakelola pendapatan daerah
		Sumber pembiayaan lain dalam pembangunan belum optimal
	Belanja daerah Belum Efisien dan Efektif	Belum optimalnya pemanfaatan belanja
		Masih adanya Belanja yang dialokasi pada program dan kegiatan yang tidak tepat
Turunnya Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Masih Rendahnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Pengendalian, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Sebesar 62,67 persen
		Rendahnya Persentase Penanganan Sampah 21,88 persen Dan Persentase Sampah Terkelola 27,36 persen
		Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Persampahan masih sebesar 63 Persen
		Masih Dibutuhkan Pengembangan TPA Poso Berbasis <i>Sanitary Landfill</i> Seluas 13 Ha



<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	
		Masih Dibutuhkan Pengembangan TPA dan IPLT Tentena Seluas 10 Ha	
		Rendahnya Persentase Ketaatan Masyarakat Terhadap Arahan Rencana Tata Ruang sebesar 40 persen	
		Belum Tuntasnya Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Poso Tahun 2012-2032	
	Masih Rendahnya Mitigasi Bencana		Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Penetapan Fungsi Kawasan Rawan Bencana Sebesar 35 persen
			Rendahnya Kesiapsiagaan Untuk Mitigasi Bencana (Desa Tangguh Bencana) Sebesar 28,76 persen Pada Tahun 2020
			Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana Sebesar 24 Persen Pada Tahun 2020
			Masih Rendahnya Kualitas SDM Penanganan Bencana Sebesar 29,5 Persen Pada Tahun 2020
Masih Adanya Konflik dan Kriminalitas	Masih terjadinya Konflik Sosial (Konflik Komunal)	Masih Adanya Kelompok Bersenjata di Daerah Pegunungan	
		Masih Mudahnya Masyarakat Terprovokasi Dengan Isu-Isu Sosial Dan Keagamaan	
	Masih Terjadinya Tingkat Kriminalitas	Masih Terjadinya Tindakan Kriminalitas	
Rendahnya Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan	Rendahnya Kinerja Aparatur	Belum Adanya Kesempatan Kerja (Peluang Kerja) Bagi Masyarakat Sehingga Memicu Tindakan-Tindakan Yang Bersentuhan Dengan Hukum	
		Rendahya Nilai SAKIP	
		Belum Optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis	





<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Publik		Kinerja Adanya Regulasi tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	Masih Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Sumber : Hasil Pemetaan Masalah Daerah Kab. Poso, 2020-2021

Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek sebagai berikut.

#### **4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Cenderung Meningkat Akibat Pandemi Covid-19**

Pada periode Tahun 2015-2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 18,16 persen ke 15,65 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Poso belum optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dan Indonesia. Khususnya, saat terjadi pandemi Covid-19 pada Triwulan II-2020, diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Poso cenderung meningkat dan persentase penduduk miskin juga meningkat.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2015 sebesar 18,16 persen dan hingga Tahun 2019 persentase penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 15,65 persen dan Selanjutnya di tahun 2020 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Poso meningkat menjadi 40.220 Jiwa, namun dari persentase mengalami penurunan 0,20 persen menjadi 15,45 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin jika di lihat dari tren 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami penurunan dari total jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 245.993 terdapat sebanyak 41 ribu penduduk miskin; Tahun 2019 sebanyak 39.920 jiwa penduduk miskin dan Selanjutnya di tahun 2020 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Poso meningkat menjadi 40.220 Jiawa, namun dari persentase mengalami penurunan 0,20 persen menjadi 15,45 persen. Jumlah penduduk miskin ini masih tergolong tinggi. Angka ini



mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan Tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 2.720 ribu jiwa.

Untuk Tahun 2020 persentase penduduk miskin seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami penurunan, namun posisi Kabupaten Poso tetap berada pada posisi **keempat** di bawah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Donggala sebesar 17,39 persen; Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 16,39 persen; dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 15,85 persen. Kabupaten Poso memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 15,45 persen.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Poso cenderung disebabkan akses infrastruktur antar wilayah kecamatan yang relatif sulit, jalan usaha tani, sarana prasarana irigasi teknis yang tidak berfungsi, NTP yang masih rendah, produktivitas Sektor Pertanian rendah sementara sebagian besar penduduk bekerja pada sector tersebut.

## **2. Nilai Tukar Petani (NTP) Belum Di Atas 100, Mengakibatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Rendah**

NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP Kabupaten Poso periode Tahun 2015-2019 tidak menunjukkan perkembangan yang positif. NTP Kabupaten Poso justru mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2015, NTP Kabupaten Poso sebesar 98,97 menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 96,37. kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar 98,69.

## **3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata**

Indeks Gini Kabupaten Poso Tahun 2014-2019 relatif menurun, dimana Tahun 2019 hanya sebesar 0,300. Ini artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif menengah karena indeks Gini Kabupaten Poso berada dalam distribusi pendapatan ketimpangan sedang (0,3-0,40). Sementara itu, rata-rata indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah pada periode yang sama terjadi perubahan yakni sebesar 0,34, dimana capaian tahun 2019 sebesar 0,33, nasional sebesar 0,38. Indeks Gini Kabupaten Poso jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, memiliki indeks Gini yang rendah.



Indeks Gini Kabupaten Poso masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3-0,5. Pada Tahun 2015, indeks Gini Kabupaten Poso sebesar 0,38 mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2019 menjadi 0,30. Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Kabupaten Poso memiliki angka lebih rendah. Indeks gini nasional Tahun 2019 sebesar 0,38. Walaupun lebih rendah dari provinsi dan nasional kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Poso masih cukup besar dan membutuhkan berbagai kebijakan untuk pemerataan.

#### **4. Pembangunan Sumber Daya Manusia Masih Perlu Ditingkatkan**

SDM merupakan modal pembangunan (*human capital*), maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitas sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Capaian IPM Kabupaten Poso dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan berada di atas IPM Provinsi, namun masih berada di bawah IPM Nasional. Pada Tahun 2019, IPM Kabupaten Poso menjadi sebesar 71,40, kemudian Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Poso menjadi sebesar 71,28 dan berada di atas IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan di bawah IPM Nasional. Pada Tahun 2019, kualitas hidup penduduk Kabupaten Poso secara umum terus bergerak positif meski di bawah nasional. Hal ini terlihat dimana IPM Kabupaten Poso mencapai 71,40. Artinya mengalami kenaikan sebesar 0,72 poin, kenaikan ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen IPM yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi.

Pada awal Tahun 2020, sejak munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Poso memberikan pengaruh dan dampak cukup signifikan kepada seluruh aspek pembangunan, sehingga diperkirakan pandemi Covid-19 tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan sasaran pembangunan terkoreksi atau terkendala, termasuk capaian IPM.



**a) Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub-komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Poso. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,36 tahun dan Selanjutnya ditahun 2020 RLS Kabupaten Poso meningkat sangat rendah yakni hanya 0,05 tahun menjadi 9,41 Tahun atau sampai pada usia sekolah tamat SMP. Capaian Kabupaten Poso telah lebih tinggi dari capaian Sulawesi tengah sebesar 8,75 dan Nasional sebesar 8,34. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah sudah cukup tinggi dan makin meningkat, namun masih harus ditingkatkan terus karena masih ada masyarakat yang belum mengenyam Pendidikan secara baik karena ketersediaan sarana prasarana Pendidikan, distribusi guru yang belum merata. Posisi ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan RLS penduduk Kabupaten Poso. Permasalahan yang dihadapi yakni masih terdapat daerah kecamatan yang nilai RLS rendah. Beberapa daerah yang membutuhkan peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, khususnya untuk meningkatkan RLS.

Terjadinya pandemi Covid-19 awal Tahun 2020, menyebabkan perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Covid-19 ini telah menyebabkan perubahan di dalam mekanisme pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Mekanisme pembelajaran mengharuskan kegiatan belajar mengajar melalui *online system* (dalam jaringan) atau *pembelajaran jarak jauh (PJJ)* yang memunculkan masalah baru, antara lain adanya tuntutan untuk menyediakan *smartphone*, kuota internet, terdapat sebagian wilayah Kecamatan dan Desa memiliki keterbatasan akses jaringan Internet, pola belajar mengajar yang sangat baru dan masih dalam taraf penyesuaian, dan perlunya pendampingan orang tua pada saat proses belajar terutama bagi anak didik yang masih belia.

**5. Layanan Kesehatan Pada Masyarakat Masih Perlu Ditingkatkan**

Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Berbagai masalah kesehatan ditemui. Adapun masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan sebagai berikut.



**a) Gizi Masyarakat**

Status gizi masyarakat diukur dalam bentuk jumlah balita yang menderita gizi buruk, semakin sedikit jumlah balita yang menderita gizi buruk mengindikasikan status gizi masyarakat semakin baik. Angka persentase balita gizi buruk di kabupaten Poso mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tahun 2019 jumlah balita yang mengalami gizi buruk meningkat menjadi 17 jiwa, Selanjutnya ditahun 2020 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Poso sebanyak 15 kasus. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan dinas terkait untuk Pemantauan Status Gizi (PSG) anak balita di Kabupaten Poso yang berhubungan dengan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, sanitasi, pola asuh anak dan ketahanan pangan rumah tangga belum berjalan baik, sehingga masih diperlukan peningkatan menuju pada zero gizi buruk.

**b) Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Sejak beberapa tahun terakhir, Kabupaten Poso dihadapkan pada masalah kesehatan terjadinya peningkatan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kabupaten Poso memiliki masalah penyakit menular spesifik daerah yaitu *Schistosomiasis* dimana penyakit ini adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh cacing darah (*Schistosoma japonicum*) dengan perantara keong *Oncomelania hupensis lindoensis*, Penyakit Kuno & terabaikan (*neglected tropical diseases*). Angka kesakitan > 1 persen, fokus keong 269 dampak dari penyakit ini, Angka prevalensi di Lembah Napu dan lembah bada 0,13 persen berakibat menurunnya produktivitas dan kualitas SDM masyarakat dan menyebabkan kematian. Pada sisi lainnya Kecenderungan jumlah penderita TB di Kabupaten Poso pada usia lebih dari 15 tahun masih dijumpai. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, di Kabupaten Poso jumlah penderita TB sebanyak 203 orang pada Tahun 2019. Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Poso masih ditemukan kasus pada Tahun 2019 sebanyak 16 Kasus. kemudian ditahun 2020 kasus TBC yang tercatat terjadi sebanyak 38 kasus, sehingga tingkat prevalensi menurun sangat signifikan menjadi 15,52. Prevalensi penyakit tidak menular tinggi (26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular,





kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD).

Penderita HIV/AIDS Kabupaten Poso Tahun 2019 sebanyak 26 kasus dengan tingkat prevalensi sebesar 0,01. Untuk Kabupaten Poso jumlah penderita HIV/AIDS hingga Tahun 2020 meningkat dari posisi penderita kasus pada tahun sebelumnya sebanyak 94 kasus dengan tingkat prevalensi sebesar 0,0384. Adanya peningkatan jumlah penderita berkaitan dengan meningkatnya upaya penemuan dan pengobatan kasus HIV/AIDS maupun TB Penyakit berpotensi KLB yang harus diwaspadai antara lain DBD, diare, keracunan makanan, campak, *difteri*, dan rabies.

Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, *diabetes mellitus*, *cancer*, ODGJ, PPOK dan *cardio vascular* (jantung). Penyakit tidak menular menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, *diabetes militus*, dan kesehatan jiwa. Selain itu, dalam 5 (lima) tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya.

Masalah kesehatan penyakit menular semakin diperburuk dengan adanya Covid-19 sebagai bencana non alam. Salah satu bentuk baru virus sejenis SARS yang mematikan. Penyebaran Virus ini sangat cepat dengan melalui *droplet* dari orang yang terinfeksi. Banyaknya orang yang terinfeksi menyebabkan banyak korban jiwa meninggal di berbagai kalangan usia. Covid-19 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso fokus dalam penanganan dengan melakukan *refocusing* anggaran untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

### **c) Belum optimalnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**

Akses penduduk terhadap sarana kesehatan di Kabupaten Poso belum optimal. Hal ini ditunjukkan antara lain: adanya kecenderungan penurunan rasio Puskesmas per satuan penduduk. Permasalahan lain yaitu sumber daya Kesehatan yang terbatas. Kabupaten Poso dihadapkan dengan masalah kurangnya jumlah tenaga dokter pada layanan Puskesmas di wilayah kecamatan terpencil pada Lembah Lore dan Lembah Bada, tenaga kesehatan tertentu seperti apoteker, *nutrisionis*, dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dan Pustu.



## **6. Ketimpangan Infrastruktur antar Wilayah Kecamatan**

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Poso yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah perdesaan, perdalaman dan terpencil, sekaligus juga sebagai penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan, dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi, serta kelistrikan.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sulit dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dan layak.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Poso pada Tahun 2019 sepanjang 767,7 Km atau 0,625 dari panjang jalan keseluruhan 1.229,15 Km. Pada Tahun 2020 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 733,5 Km atau dengan rasio 0,437 dari panjang jalan keseluruhan 1.678,1 Km. Data proporsi jalan kondisi baik mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian rasio jaringan irigasi di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020, dimana tidak ada penambahan panjang saluran irigasi primer maupun sekunder. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten belum optimal, di sisi lain daerah Irigasi kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain jaringan irigasi kewenangan kabupaten provinsi, dan pusat dalam kondisi rusak berat dan ringan, sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang lama tidak mendapatkan alokasi pemeliharaan, dan pembangunan juga lebih disebabkan kerusakan, karena rentan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Kabupaten Poso.

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Poso telah mencakup 19 wilayah kecamatan. Namun, masih terdapat beberapa desa yang terpencil dan terisolasi sehingga masih kesulitan jaringan telekomunikasi. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi telekomunikasi Tahun 2020 ditemukan antara lain: 1). Sinyal Lemah terdapat pada 7 (tujuh) desa yakni Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu,



Olumokunde; 2). Titik *blind-spot* 3 (tiga) desa yakni Dewua, Sanggionora, Lena.

## **7. Kapasitas Keuangan dalam Membiayai Pembangunan Daerah Terbatas**

Kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas menjadi tantangan dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Poso. Rendahnya kemampuan fiskal daerah ini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi saat ini belum mampu mendorong peningkatan sumber-sumber APBD. Alokasi APBD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada dana transfer (dana perimbangan) karena rendahnya kinerja pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, belum optimalnya tatakelola pendapatan daerah, dan sumber pembiayaan lainnya.

Belanja daerah dinilai belum efisien dan efektif, belum optimalnya pemanfaatan belanja, masih adanya belanja yang dialokasi pada program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Merujuk pada konsep dan pengertian efisiensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana efisiensi dimaknai sebagai hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain: 1). Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (*input-output*); 2). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan; 3). Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Belanja pemerintah daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan daerah. Besarnya pendapatan daerah tidak akan bermanfaat secara optimal, apabila alokasi belanja



masih menyebabkan terjadinya pemborosan-pemborosan (inefisiensi) dan tidak berorientasi serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, maka belanja daerah memiliki peran yang penting dan strategis, sebagai stimulus ekonomi bagi daerah. Untuk mendapatkan dampak positif (*positive impact*) yang optimal bagi ekonomi daerah, maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah daerah yang baik dan tepat sasaran.

#### **4.1.2 Aspek Pelayanan Umum**

Berdasarkan kajian normatif, analisis atas berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Poso, sehingga diperoleh rumusan permasalahan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Poso yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan data dan realitas, bahwa masih terdapat masalah pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2.**

#### **Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Menurut Urusan**

<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
1.01	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kualitas layanan pendidikan yang merata dan terjangkau disemua wilayah khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan anak tidak sekolah (akreditasi SD/SMP 24,00 persen dan rata-rata lama sekolah 9,36 tahun 2019 menjadi 9,41 Tahun 2020.</li><li>2. Persebaran guru yang belum merata dan ketersediaan guru di kecamatan luar ibukota kabupaten masih didominasi Non-PNS sebesar 80 persen</li></ol>



Kode	Urusan	Permasalahan
		<p>setiap sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Rendahnya tingkat pendapatan guru honorer</li><li>4. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan didalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ)</li><li>5. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li><li>6. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan.</li><li>7. Kurangnya pendidikan vokasi ber-basis sumber daya dan potensi di bidang pariwisata dan pertanian</li></ol>
1.02	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Relatif tingginya prevalensi <i>stunting</i> dan gizi buruk masing-masing sebesar 16,80 persen dan 0,11 persen Tahun 2020.</li><li>2. Rendahnya persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yakni hanya sebesar 38,87 persen Tahun 2020.</li><li>3. Masih Kurangnya fasilitas/sarana dan prasarana rumah sakit yakni sebesar 86,00 persen</li><li>4. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit yakni tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75 persen</li></ol>
1.03	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jaringan irigasi dalam kondisi rusak sebesar 10,21 persen dan rasio jaringan irigasi sebesar 11,59 tahun 2020.</li><li>2. Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) yang belum berkembang di Kecamatan Lage yang tersebar pada 6 (enam) desa yakni Pandiri, Watuawu, Tambaro, Sintuwu lemba, Tagolu, dan Maliwuko</li><li>3. Kekurangan pengembangan</li></ol>





Kode	Urusan	Permasalahan
		<p>TPA di Kabupaten Poso berbasis <i>sanitary landfill</i> seluas 13 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kekurangan pengembangan TPA dan IPLT Tentena seluas 10 Ha</li><li>5. Belum optimalnya akses masyarakat daerah perkotaan terhadap air minum yang disediakan oleh PDAM sebesar 55 persen</li><li>6. Belum tuntasnya pembangunan ruas jalan Kayamanya-Bonesompe 830m atau sebesar 37 persen; ruas Lembomawo-Tagolu sepanjang 3,5 Km atau sebesar 50 persen; dan ruas Doda-Lelio sepanjang 2 Km atau sebesar 1 persen</li><li>7. Rendahnya persentase ketaatan masyarakat terhadap arahan rencana tata ruang atau masih sebesar 40 persen</li><li>8. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penetapan fungsi kawasan rawan bencana sebesar 35 persen</li><li>9. Belum Tuntasnya Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Poso Tahun 2012-2032</li><li>10. Persentase database sungai serta database air baku dalam perencanaan masih sebesar 21,05 persen</li></ol>
1.04	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya kontribusi penanganan kumuh perkotaan pada kawasan kumuh sebesar 45,50 persen</li><li>2. Rendahnya target penyelesaian RTLH sampai Tahun 2020 sebesar 826 unit rumah dari target sebanyak 5.627 unit</li></ol>
1.05	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana. Dimana jumlah desa tangguh bencana sebesar 28,76 persen</li></ol>



<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
		<p>pada Tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana sebesar 24 persen pada Tahun 2020</li><li>3. Rendahnya kualitas SDM dalam penanganan bencana alam dan non alam sebesar 29,5 persen pada Tahun 2020</li><li>4. Rendahnya penanganan daerah pasca bencana sebesar 25 persen</li><li>5. Belum optimalnya cakupan penegakan Perda terhadap masalah K3 yakni sebesar 80 persen Tahun 2019</li><li>6. Rendahnya cakupan antisipasi dan pelayanan kebakaran dan bencana alam sebesar 12,36 persen</li></ol>
1.06	Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya persentase penduduk miskin yakni sebesar 15,65 persen atau sebanyak 39.920 jiwa tahun 2019. Sementara tahun 2020 meningkat menjadi 40.220 Jiwa, namun dari persentase mengalami penurunan 0,20 persen menjadi 15,45 persen.</li><li>2. Perlunya dilakukan verifikasi dan validitasi (verivale) data kemiskinan</li><li>3. Belum terintegrasi program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, penyandang disabilitas dan lansia. Dimana bantuan sosial masih sebesar 16,88 persen Tahun 2019. kemudian pada tahun 2020 sebesar 16 persen.</li></ol>
<b>2</b>	<b>Bidang Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>	
2.07	Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya pengangguran terbuka sebesar 2,25 persen Tahun 2019. Tahun 2020 sebesar 2,39 persen meningkat dari tahun sebelumnya.</li><li>2. Adanya pengusaha dan pekerja</li></ol>



Kode	Urusan	Permasalahan
		sebesar 13,16 persen belum memahami ketentuan perundangan-undangan ketenagakerjaan Tahun 2019. 3. Tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso mengalami peningkatan menjadi 97,75 persen dan di tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Poso sebesar 97,61 persen.
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Rendahnya penyelesaian pendaftaran perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 50,00 persen. 2. Kurangnya cakupan regulasi dan kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibuatkan aturan hukumnya masih sebesar 1 persen
2.09	Bidang Pangan	1. Tingginya Tingkat Ketergantungan Konsumsi Beras masyarakat yakni sebesar 121,8 Kg/Kapita/Tahun 2. Terdapat desa rawan pangan sebanyak 10 desa
2.10	Bidang Pertanahan	1. Belum optimalnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah Pemda yakni sebesar 36,32 persen 2. Rendahnya Persentase Kelengkapan Data dan Kepemilikan Tanah Milik Pemda yakni sebesar 43,75 persen
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	1. Rendahnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, luas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan yakni sebesar 62,67 persen 2. Rendahnya persentase penanganan sampah yakni sebesar 21,88 persen dan persentase sampah terkelola yakni sebesar 27,36 persen 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan



<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
		persampahan yakni sebesar 63 persen
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya penyelesaian pasangan berakta nikah yakni sebesar 88,00 persen</li><li>2. Belum optimalnya penerbitan kutipan akta kematian yakni sebesar 86,00 persen</li><li>3. Seluruh pelaksanaan catatan sipil perkawinan masih dilaksanakan tingkat kabupaten.</li></ol>
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya kemampuan manajerial pengurus Bumdesa dalam pengelolaan yakni sebesar 69 persen Tahun 2020</li><li>2. Kurangnya tingkat pemahaman dan komitmen aparaturnya Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yakni sebesar 64,79 persen Tahun 2020.</li><li>3. Rendahnya kualitas SDM pengelola Keuangan dan asset desa yakni sebesar 77,46 persen Tahun 2020</li></ol>
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yakni sebesar 2,19 persen</li><li>2. Belum optimalnya capaian penurunan angka pernikahan usia dini yakni sebesar 0,34 persen Tahun 2020</li><li>3. Rendahnya capaian persentase Keluarga Sejahtera yakni sebesar 45,35 persen Tahun 2020.</li></ol>
2.15	Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pemanfaatan terminal oleh jasa angkutan penumpang umum yakni hanya sebanyak 10 angkutan umum/hari yang masuk terminal</li><li>2. Rendahnya rasio izin trayek yakni sebesar 0,001 (dari sebanyak 39 izin trayek hanya terealisasi 4 izin trayek atau</li></ol>



Kode	Urusan	Permasalahan
		<p>sebesar 10,2 persen Tahun 2019. Dan ditahun 2020 sedikit mengalami penurunan yakni 2 izin.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Rendahnya frekuensi penerbangan udara dari dan ke Kota Poso (dari 7/pekan menjadi 0/pekan) karena adanya pandemi Covid-19</li><li>4. Belum adanya jaringan transportasi angkutan umum perkotaan</li><li>5. Tidak adanya PPNS Bidang Perhubungan</li></ol>
2.16	Bidang Komunikasi Dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yakni sebesar 70 persen Tahun 2020</li><li>2. Belum optimalnya Ketersediaan jaringan komunikasi dan informatika terutama di wilayah-wilayah kecamatan yakni sebesar 27 persen Tahun 2020</li><li>3. Rendahnya minat masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang disediakan pemerintah daerah melalui situs resmi pemda/website yakni sebesar 20 persen Tahun 2020.</li></ol>
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	<p>Koperasi berstatus kurang sehat yakni sebesar 6,36 persen dari sebanyak 236 koperasi aktif. Sementara koperasi aktif sebesar 65,74 persen tahun 2020.</p>
2.18	Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA yakni sebesar 5,7 triliun Tahun 2020.</li><li>2. Iklim investasi masih kurang kondusif karena pandemi dan factor keamanan investasi.</li><li>3. Kurangnya kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yakni sebesar 76 persen Tahun 2019</li></ol>





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
2.19	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan yakni sebesar 59,00 persen</li><li>2. Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik yakni sebesar 20 persen</li></ol>
2.20	Bidang Statistik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data dan informasi statistik daerah belum terintegaris dan disajikan masih parsial.</li><li>2. Belum terbangunnya satu data poso yang berbasis online.</li></ol>
2.21	Bidang Persandian	Belum tersedia Sandiman daerah. Anggaran dalam membangun persandian masih terbatas.
2.22	Bidang Kebudayaan	Belum dilaksanakannya pelestarian Budaya Lokal daerah dan benda situs cagar budaya yakni masing-masing sebesar 0,00 persen dan 2,00 persen Tahun 2020.
2.23	Bidang Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Budaya literasi masih kurang, dimana rendahnya minat baca masyarakat yakni hanya sebanyak 139.100 orang Tahun 2019. rasio kunjungan ke perpustakaan sebesar 0,099 per populasi dan ditahun 2020 menurun kembali menjadi 0,064 per populasi.</li><li>2. Kurangnya jumlah koleksi buku/ bahan bacaan di perpustakaan yakni hanya sebanyak 6,160 judul Tahun 2020.</li></ol>
2.24	Bidang Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian Arsip secara baku sesuai standar arsip yang baik yakni sebesar 50 persen Tahun 2020.
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
3.27	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angka NTP belum mencapai nilai 100 yakni sebesar 96,37 Tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat sebesar 98,69 namun belum mencapai</li></ol>



Kode	Urusan	Permasalahan
		<p>100.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menurunnya kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB selama beberapa tahun terakhir</li><li>Rendahnya kemampuan kelompok tani yakni Pemula sebesar 77 persen Tahun 2020.</li><li>Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian</li><li>Belum optimalnya peran Balai Benih di Kabupaten Poso dan semakin berkurangnya tenaga PPL dan petugas para medik perternakan</li><li>Lebih mengutamakan produk-produk pertanian yang memenuhi kebutuhan ekspor tanpa memperhatikan kebutuhan lokal</li></ol>
3.25	Bidang Kelautan Dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Rendahnya kesejahteraan nelayan sebesar 57 persen Tahun 2020.</li><li>Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan</li></ol>
3.26	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>Rendahnya kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Poso yakni hanya sebesar 0,84 persen Tahun 2019.</li><li>Kontribusi sektor Pariwisata yang masih sangat rendah menunjukkan pengelolaan sektor pariwisata belum optimal dilakukan, padahal, Kabupaten Poso memiliki banyak destinasi wisata.</li><li>Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata (DTW)</li><li>Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi</li></ol>
3.30	Bidang Perdagangan	Rendahnya akses permodalan bagi pedagang/usaha mikro/informal dalam pemberdayaan dan penge-



<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
3.31	Bidang Perindustrian	mbangan Sektor UMKM 1. Belum berkembang baik skala industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Poso 2. Rendahnya akses permodalan bagi IKM 3. Rendahnya kemampuan SDM yang dimiliki IKM
3.32	Bidang Transmigrasi	1. Tidak adanya pembangunan permukiman transmigrasi Baru selama periode Tahun 2014–2019 2. Belum tersedianya pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman transmigrasi baru
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG</b>	
4.01	Sekretariat Daerah	1. Rendahnya hasil penilaian EPPD Kabupaten Poso oleh Kemendagri Tahun 2019 2. Belum optimalnya Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan yakni hanya sebesar 10 persen dari target 50 dokumen 3. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi Daerah yakni sebesar 85 persen 4. Belum adanya Fasilitasi Kerjasama Daerah yakni nihil dari target 10 dokumen
	Bagian Organisasi dan Tata laksana	1. Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP belum mencapai A
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terbatasnya aparatur UKPBJ yakni hanya sebanyak 11 orang Tahun 2019 2. Belum adanya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang (JF-PPBJ) 3. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa
	Bagian Ekonomi terkait Stabilitas	1. Belum stabilnya harga LPG di wilayah Lore Bersaudara



<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
	Harga Komoditi dan Layanan BUMD	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Belum stabilnya harga komoditas buahbuahan dan sayursayuran</li><li>3. Pelayanan BUMD (PDAM) masih belum optimal dan masih mengalami kerugian setiap tahun</li><li>4. BUMD PT. Global Mandiri Siwagilemba belum aktif</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimal dan terlaksana secara baik model aparatur yang profesional, adaptif, dan responsif</li><li>2. Belum optimalnya kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li></ol>
	Bagian Hukum	Belum optimalnya kordinasi dan tindak lanjut RANHAM serta penanganan kasus litigasi dan non litigasi
	Bagian Humas	Belum optimalnya kordinasi penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
	Bagian Kesra	Belum optimalnya kordinasi dan fasilitasi pelayanan hidup beragama
4.02	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda yakni hanya sebesar 60 persen dari target Tahun 2019
5.01	Perencanaan	Rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan yakni hanya sebanyak 17 orang atau 58 Persen dari standar target Tahun 2019
5.02	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang optimalnya capaian pendapatan dari PAD di Kabupaten Poso yakni hanya sebesar 7,74 persen dari target Tahun 2019. Kemudian ditahun 2020 persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Poso sebesar</li></ol>



<b>Kode</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>
		8,83 persen. 2. Terjadinya penurunan pendapatan Tahun 2020, karena adanya pandemi dan adanya perintah untuk melakukan <i>refocusing</i> anggaran akibat Covid-19
5.03	Kepegawaian	Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN yakni hanya sebesar 1,46 persen Tahun 2020
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis yakni sebesar 66,23 persen Tahun 2019. Tahun 2020 sebanyak 285 ASN yang mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan formal.
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	Rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso
6.01	Inspektorat Daerah	1. Kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal yakni hanya sebesar 56,98 persen Tahun 2020 2. Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas standar auditor yakni hanya sebesar 62,50 persen Tahun 2020
7.01	Kecamatan	1. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (wilayah kecamatan) 2. Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan yakni sebesar 85 persen Tahun 2020 2. Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat 3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti,





Kode	Urusan	Permasalahan
		<p>kewarganegaraan, dan kebangsaan</p> <p>4. Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama</p> <p>5. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa</p> <p>6. Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari sebesar 75,36 pada Tahun 2015 menjadi sebesar 70,90 Tahun 2019</p>

Sumber : Hasil Pemetaan Masalah Berdasarkan Urusan, 2020-2021

Selanjutnya, analisis permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Poso juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial atau kewilayahan. Beberapa permasalahan yang dianalisis sebagai permasalahan umum berdasarkan aspek kewilayahan sebagai berikut.

**Tabel 4.3**

**Permasalahan Umum berdasarkan Aspek Kewilayahan**

Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
Lore Barat	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Belum adanya pasar menjual hasil panen pertanian dan perkebunan
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Kurangnya tenaga guru yang berstatus PNS (ASN)
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kurangnya tenaga dokter, perawat dan bidan (banyak non PNS)
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
1	Sungai Lariang perlu dilakukan normalisasi untuk pencegahan banjir yang berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan	
	<b>G</b>	<b>Aspek Pariwisata dan Keunggulan Daerah</b>
1	Patung palindo perlu penataan, pengelolaan serta pengembangan untuk menarik minat kunjungan wisatawan, BPJK gorontalo hanya berperan dalam hal pemeliharaan	



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
	2	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pariwisata
<b>Lore Selatan</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Perambahan hutan liar ( <i>illegal logging</i> ) masih terjadi
	2	Bumdes tidak aktif
	3	Tidak ada kantor bank di wilayah kecamatan
	4	Tidak ada pasar untuk menjual hasil panen pertanian perkebunan
	5	Tingginya intervensi dan monopoli kelompok tengkulak dalam membeli hasil pertanian perkebunan menyebabkan harga rendah
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Kurangnya tenaga pendidik yang PNS, dan banyak yang berstatus tenaga honorer
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kurangnya tenaga medis kesehatan (perawat dan bidan)
	2	Tidak adanya kendaraan <i>ambulance</i> jenazah
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Kondisi rusak berat poros jalan Gintu-Bewa (jalan lingkar)
	2	Sungai Malei (bulili, bakekau, badangkaiya, gintu, runde) perlu dilakukan normalisasi untuk mencegah banjir di wilayah pemukiman dan lahan pertanian/perkebunan
	3	Pembangunan irigasi pembagi air di dalam sawah ( apabila hujan deras mengakibatkan meluapnya air)
	<b>E</b>	<b>Aspek Pertanian</b>
1	Kurang proaktif tenaga pendamping Penyuluh Pertanian	
2	Banyak lahan pertanian dan perkebunan belum memiliki sertipikat	
<b>Lore Tengah</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Akses pemasaran produksi (produk) hasil pertanian di dominasi kelompok tengkulak
	2	Keterbatasan sarana ekonomi dimana pasar rakyat tidak ada



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
	3	Sulitnya saluran distribusi barang terkendala transportasi
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Kurangnya tenaga pendidik yang berstatus PNS (ASN), dan umumnya berstatus honorer
	2	Masih sulitnya dilaksanakan pembelajaran sistem <i>online</i> (daring) karena kendala fasilitas telekomunikasi, sehingga model pembelajaran dilaksanakan dari rumah ke rumah ( <i>door to door</i> ) oleh gugus tugas kecamatan
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kurangnya tenaga medis kesehatan (perawat dan bidan)
	2	Puskesmas sudah terakreditasi namun terkendala-rujukan rumah sakit sangat jauh harus ke Kota Palu atau wilayah sekitarnya
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur &amp; Pengembangan Wilayah</b>
	1	Irigasi teknis tidak tersedia untuk mengaliri sawah
	2	Rendahnya akses jalan transportasi—perbaikan ruas jalan Watau-Doda
	3	Belum terealisasi Lore Terkoneksi—tower jaringan internet di puncak dingin
	4	Belum teraspalnya jalan di wilayah Ibukota kecamatan (Doda)
	5	Belum adanya jaringan air bersih
	<b>E</b>	<b>Aspek Pertanian</b>
	1	Kurangnya pendamping Penyuluh Pertanian yang proaktif
	2	Masih terbatasnya bantuan peralatan pertanian
	3	Masih terbatasnya bantuan Pupuk dan Obat-obatan
	<b>G</b>	<b>Aspek Pariwisata dan Keunggulan Daerah</b>
	1	Belum terkelolanya potensi wisata Air terjun Lore Tengah
	2	Rendahnya pemeliharaan situs sejarah Lore Tebungkahi-bada dan behoa Patung megalit, seperti patung Padang Sepe, patung Tadulako, dan cagar budaya lainnya
<b>Kecamatan Lore Peore</b>	<b>A</b>	<b>Ekonomi</b>
	1	Keterbatasan sarana irigasi sehingga cetak



Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
		sawah baru gagal
	2	Masih terbatasnya pemasaran hasil produksi dan stabilisasi harga komoditi pertanian unggulan
	3	Belum optimalnya penguatan lembaga petani
	4	Belum adanya gudang pertanian
		<b>B Pendidikan</b>
	1	Keterbatasan tenaga pendidik berstatus PNS
		<b>C Kesehatan</b>
	1	Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan KIS
	2	Kekurangan tenaga kesehatan
	3	Belum tersedianya rumah sakit Tipe D sebagai rumah sakit rujukan
		<b>D Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Jalan penghubung antar kecamatan (Maholo – Wanga) dalam kondisi rusak
	2	Sebagian besar infrastruktur jalan antar desa dan kecamatan dalam kondisi rusak
		<b>E Pelayanan Publik</b>
	1	Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
<b>Kecamatan Lore Utara</b>		<b>A Aspek Ekonomi</b>
	1	Masih rendahnya SDM petani dan belum optimalnya peran PPL
	2	Perlunya dilakukan rehabilitasi irigasi
	3	Keterbatasan pupuk bersubsidi
	4	Masih rendahnya peran BUMDES dalam mendukung pemasaran hasil pertanian
	5	Pemasaran hasil pertanian masih di dominasi oleh tengkulak
	6	Belum ada lagi program PRONA untuk membantu masyarakat dalam pensertifikatan tanah dan lahan masyarakat
		<b>B Pendidikan</b>
	1	Kekurangan tenaga guru bersatus PNS
	2	Mutasi guru kurang berkoordinasi dengan camat
	3	Sebagian besar tenaga guru di Dongi-Dongi masih berstatus honorer
		<b>C Kesehatan</b>
	1	Kekurangan tenaga dokter



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
	<b>D</b>	<b><i>Pelayanan Publik</i></b>
	1	Penarikan kewenangan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Capil sehingga memperlambat proses pembuatan administrasi kependudukan masyarakat
	2	Jaringan infrastruktur kecamatan yang sudah tidak berfungsi
<b>Kecamatan Lore Timur</b>	<b>A</b>	<b><i>Ekonomi</i></b>
	1	Belum optimalnya BUMDES dalam mendukung pemasaran hasil produksi pertanian
	2	Belum maksimal sarana dan prasarana pertanian
	3	Kelangkaan pupuk bagi petani dan diharapkan BUMDES dapat menjadi distributor penyaluran pupuk
	4	Keterbatasan LPG bersubsidi
	<b>B</b>	<b><i>Pendidikan</i></b>
	1	Kekurangan tenaga guru dan sebagian besar masih berstatus honorer
	2	Fasilitas komputer yang masih kurang
	3	Kekurangan tenaga guru katolik
	4	Belum ada sekolah yang bisa melaksanakan UNBK
	<b>C</b>	<b><i>Kesehatan</i></b>
	1	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS
	2	Kekurangan tenaga medis
	3	Ambulance sudah tidak layak
	<b>D</b>	<b><i>Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</i></b>
	1	Perlu dilakukan peningkatan/rehabilitasi jalan Maholo – Tamadue
	2	Perlu dilakukan peningkatan/rehabilitasi jalan lingkaran Maholo – Mekarsari
	3	Perlu dilakukan peningkatan/rehabilitasi jalan dalam ibu kota kecamatan
	<b>Kecamatan Lage</b>	<b>A</b>
1		Pendampingan PPL bagi petani yang belum





Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
		optimal
	2	BUMDES belum maksimal dalam mendukung pemasaran hasil produksi pertanian
	3	Masih tinggi nya angka kemiskinan di wilayah kecamatan lage
	<b>B</b>	<b>Pendidikan</b>
	1	Masih kurangnya tenaga pendidik khususnya pada mata pelajaran tertentu
	<b>C</b>	<b>Kesehatan</b>
	1	Masih kurangnya tenaga medis
	2	Perlu dilakukan rehabilitasi puskesmas pembantu
	<b>D</b>	<b>Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Ruas jalan Watuawu – Trans Rato’ombu dalam kondisi rusak
	2	Belum dikelolanya SPAM Pandiri untuk sarana air bersih di kawasan lage
	<b>Poso Kota Bersaudara</b>	<b>A</b>
1		Perlunya pembangunan pasar, khususnya bangunan yang mengalami kebakaran
2		Belum adanya pasar buah-buahan
3		Masih kurangnya bibit durian dan kelapa dalam
4		Belum adanya bantuan karamba jaring apung
<b>B</b>		<b>Aspek Pendidikan</b>
1		Tingkat kesejahteraan tenaga pendidik yang berstatus honorer masih rendah
2		Belum optimalnya layanan digitalisasi pelayanan pendidikan
<b>D</b>		<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
1		Belum adanya tanggul Sungai Poso untuk mencegah banjir saat musim hujan tinggi
2		Belum selesainya pembangunan Kantor Lurah Kayamanya
<b>F</b>		<b>Aspek Koperasi dan UMKM</b>
1		Belum optimalnya bantuan KUBE untuk UMKM
<b>G</b>	<b>Aspek Pariwisata dan Keunggulan Daerah</b>	
1	Belum terkelola dan tertata dengan baik	



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
		kawasan wisata Pantai Penghibur Kota Poso
<b>Pamona Selatan</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Pemasaran produksi hasil pertanian didominasi para tengkulak
	2	Hasil panen tidak sesuai dengan target karena gagal panen dan hama penyakit
	3	Bumdes belum mampu mengintervensi dan membantu sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil pertanian
	4	Belum ada BUMDES di Desa Pandayora
	5	Belum optimal PPL melakukan pendampingan terhadap petani
	6	Pembelian pupuk bersubsidi kepada distributor harus beserta pembelian pupuk non subsidi
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Kekurangan guru dan masih didominasi tenaga honorer
	2	Kekurangan tenaga guru PNS PAUD sebanyak 13 orang sedangkan jumlah PAUD sebanyak 19 unit
	3	Rendahnya tingkat tunjangan bagi kesejahteraan guru honorer, hanya sebesar Rp250.000 per bulan
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kekurangan tenaga dokter, hanya terdapat 1 (satu) dokter di Puskesmas Pendolo dan Mayo
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Jembatan ruas jalan Pasir Putih-Bangun Jaya hampir putus
	2	Terjadinya banjir di Dusun Bahulu jika curah hujan tinggi
	3	Jalan antar desa dalam di Kecamatan Pamona Selatan rusak
	<b>F</b>	<b>Aspek Koperasi &amp; UMKM</b>
	1	BUMDES bersama di Pandajaya tidak aktif
	<b>G</b>	<b>Aspek Pariwisata dan Keunggulan Daerah</b>
1	Belum direalisasikannya rencana pembentukan UPTD Pariwisata di Pendolo	



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
	<b>H</b>	<b>Sosial dan Permasalahan Lainnya</b>
	1	Penegakan surat edaran Bupati Poso tentang protokoler kesehatan bagi pelaku perjalanan dari luar provinsi yang harus dengan rapid tes covid-19
	2	Penarikan tugas dan fungsi pelayanan akte nikah yang diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Poso
	3	Seluruh pengurusan dokumen kependudukan harus diselesaikan di Kabupaten
<b>Pamona Tenggara</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Pemasaran terhadap hasil pertanian masih didominasi tengkulak
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Kekurangan tenaga guru berstatus PNS (ASN)
	2	SMP Korobono belum memiliki laboratorium
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kekurangan tenaga medis
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Perlunya pembangunan ruas jalan jalan Korobono-Wayura
	<b>E</b>	<b>Aspek Pertanian</b>
	1	Kandang kerbau di sekitar daerah 3 T tidak terkendali
	2	Wilayah persawahan belum memiliki irigasi teknis seluas $\pm$ 200 hektar
	<b>F</b>	<b>Aspek Koperasi dan UMKM</b>
	1	BUMDES tidak berjalan dengan baik
	<b>H</b>	<b>Sosial dan permasalahan lainnya</b>
1	Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Pamona Selatan	
2	Kantor kecamatan rusak	
<b>Pamona Timur</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Masih kurangnya kapasitas D.I. Taripa dan D.I. Pongge'e
	2	Sebagian persawahan tidak dapat dikelola karena kekurangan air, karena jaringan irigasi yang kurang baik



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
	3	Akses pemasaran terhadap hasil produksi khususnya buah Manggis dimana harganya jatuh saat panen raya
	4	Belum ditetapkannya Matialemba sebagai Kampung Durian sesuai dengan potensi dan kualitas durian
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Pagar sekolah Matialemba sudah rusak
	2	Kekurangan tenaga guru, khususnya Desa Pongge'e
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Kekurangan tenaga medis, hanya 1 orang dokter status tenaga kontrak
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Belum adanya reklamasi rawa Desa Pongge'e, Kancu'u, dan Petiro
	2	Sebagian rumah di sekitar Sungai Walati Desa Pongge'e rawan longsor
	3	Ancaman banjir Sungai Tokasuli di Desa Petiro
	<b>F</b>	<b>Aspek Koperasi dan UMKM</b>
	1	Bundes belum berperan dalam mendukung potensi dan program unggulan kecamatan antara lain potensi buah manggis
	<b>H</b>	<b>Sosial dan Masalah Lainnya</b>
	1	Kantor camat rusak berat dan akses dalam kondisi yang kurang baik mendukung roda pemerintahan
	2	Sarana dan prasarana lapangan kecamatan yang belum memadai
<b>Pamona Barat</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Belum dioptimalkannya pemanfaatan pasar kecamatan yang sudah dibangun
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Rasio ketersediaan guru SD dan SMP yang masih kurang
	2	Sebagian besar guru berstatus tenaga honorer
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
1	Cukup tingginya prevalensi penyakit TBC	



Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
	2	Kekurangan tenaga dokter (3 dokter yang ada berstatus Dokter nusantara sehat) dan kekurangan sarana air bersih di Puskesmas
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Rusak berat ruas Jalan Ruas Tonusu-Pendolo
	2	Rusaknya jalan dalam dan sekitar Ibukota Kecamatan Pamona Barat
	<b>E</b>	<b>Aspek Pertanian</b>
	1	Belum optimalnya irigasi memenuhi kebutuhan persawahan milik masyarakat
	2	Volume air danau meningkat sehingga sebagian besar lahan sawah terendam di Desa Meko seluas $\pm$ 104 Ha
<b>Pamona Puselemba</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Tingginya air danau yang mempengaruhi produksi padi sawah yang berada di sekitar Danau Poso
	2	Belum terlaksananya pembangunan jalan kantong produksi
	3	Akses pemasaran dikendalikan oleh para pedagang besar maupun kelompok tengkulak
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Belum ada sekolah yang menerapkan belajar tatap muka
	2	Pembayaran honor guru Non-PNS khususnya di masa Pandemi Covid-19
	3	Penempatan dan persebaran guru yang belum merata
	4	Tingginya angka putus sekolah di Desa Wera
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Masih tingginya angka prevalensi <i>stunting</i> di Desa Wera
	<b>E</b>	<b>Aspek Pertanian</b>
	1	Menurunnya produksi kakao sebesar 90 persen karena masyarakat beralih mata pencaharian sebagai petani
	2	Terbatasnya pengadaan bibit kemiri dan agatis
	<b>F</b>	<b>Aspek Koperasi, UMKM dan BUMDES</b>





<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
	1	Masih kurangnya UMKM yang menyediakan makanan/minuman khas Poso
	2	Belum optimalnya akses pemasaran produk UMKM yang sudah ada
	3	BUMDES Bersama 5 Desa tidak berkembang meski sudah mendapatkan bantuan yang cukup besar dari Pemerintah Daerah (Perencanaan, Manajemen dan Pengawasan yang masih lemah)
	<b>G</b>	<b>Aspek Pariwisata dan Keunggulan Daerah</b>
	1	Penetapan aset pembangunan pelabuhan di sekitar lokasi cagar budaya Watu Mpangasa Angga yang menjadi kewenangan cagar budaya Gorontalo
	2	Akses menuju cagar budaya Watu Mpangasa Angga belum baik
	3	Belum optimalisasi penataan dan pengelolaan obyek wisata
	4	Belum tertibnya pedagang di sekitar Danau Poso
	5	Belum optimalnya Sektor Pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	6	Belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata air terjun Saluopa, dan Pokdarwis juga belum optimal
<b>Pamona Utara</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Terbatasnya pengetahuan petani tentang budidaya tanaman jagung yang menjadi komoditi unggulan desa
	2	Kurang optimalnya pendampingan dan pengawasan PPL terhadap budidaya tanaman pertanian dan perkebunan
	3	Rendahnya pendapatan petani atas hasil produksi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan
	4	Tingginya upah buruh yang disebabkan oleh penetapan standar upah pada PLTA yang lebih tinggi
	5	Penetapan Desa Uelincu masuk dalam kategori desa miskin tidak sesuai dengan data dan realitas



Kecamatan	No	Permasalahan Pembangunan Kecamatan
	6	Pola tanam sebagian besar petani masih tradisional khususnya budidaya padi ladang
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Belum meratanya ketersediaan guru
	2	Terbatasnya jumlah guru
	3	Tidak adanya pengangkatan guru status P3K
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Tingginya prevalensi angka <i>stunting</i> khususnya di Desa Sangria sebanyak 20 orang Tahun 2019
	2	Terbatasnya anggaran untuk penanganan <i>stunting</i>
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Belum terbangunnya poros jalan Sangira-Panjoka dan poros jalann Kuku-Panjoka
	2	Belum direhabilitasi poros jalan Panjoka-Lena
	3	Rusaknya jembatan Panjoka
	4	Belum adanya lahan untuk pembangunan Kantor Polsek dan Koramil
	5	Belum tuntasnya pembangunan poros jalan Sulewana-Dewua
	6	Belum terealisasinya pembangunan poros jalan Sulewana-Watunoncu masuk prioritas urutan ke-7 dalam Mogombo Lipu
	<b>F</b>	<b>Aspek Koperasi, UMKM dan BUMDES</b>
	1	Rendahnya pendampingan pasca produksi terhadap hasil panen dan potensi yang ada
	2	Belum optimalnya Bumdes yang sudah dibentuk karena belum adanya pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Terbatasnya SDM dalam pengelolaan Bumdes	
<b>H</b>	<b>Aspek Sosial</b>	
1	Status warga Desa Sangira sebagai penerima KIS (sebanyak $\pm$ 500 KK), namun hanya sebagian yang menerima KIS	
<b>Poso Pesisir Bersaudara</b>	<b>A</b>	<b>Aspek Ekonomi</b>
	1	Mayoritas BUMDES di wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Pesisir Selatan tidak berjalan



<b>Kecamatan</b>	<b>No</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Kecamatan</b>
		optimal yang diakibatkan antara lain manajemen dan SDM yang masih kurang
	2	Perlu kerjasama BUMDES dan Perusahaan Daerah dalam membuka akses pasar dan penanganan pasca panen
	3	Akses pasar terhadap seluruh hasil produksi pertanian
	4	Perlunya dilakukan rehabilitasi irigasi
	5	Keterbatasan pupuk bersubsidi
	<b>B</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>
	1	Belum meratanya ketersediaan guru
	2	Terbatasnya jumlah guru
	3	Tidak adanya pengangkatan guru status P3K
	<b>C</b>	<b>Aspek Kesehatan</b>
	1	Tingginya prevalensi angka <i>stunting</i>
	2	Terbatasnya anggaran untuk penanganan <i>stunting</i>
	3	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS
	<b>D</b>	<b>Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
	1	Akses jalan antar desa wilayah kecamatan Poso Pesisir Selatan yang masih dalam kondisi rusak

Sumber : Hasil Pemetaan dan FGD Lapangan, 2020

#### **4.2. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan daerah, serta pembangunan antar



daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan khususnya Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso.

Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dilakukan juga penelaahan terhadap isu internasional (global) yang dapat mempengaruhi kondisi Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan holistik dan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional, dan regional.

#### **4.2.1 Isu Strategis Global**

##### **1. Pandemi Covid-19**

Wabah virus corona atau Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi terakhir yang terjadi di dunia adalah pada 2009 akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Ciri-ciri pandemi meliputi: merupakan jenis virus baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. Virus corona atau Covid-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut.

Covid-19 telah menginfeksi sedikitnya 36.727.392 orang di sekitar 123 negara. Jumlah kasus dan kematian berubah setiap menit, setiap jam, dan dilaporkan hingga Oktober 2020, Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 1.066.098 orang kematian di seluruh dunia.

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk social, ekonomi dan politik. Lebih lanjut, hal ini telah mengguncang pasar global yang saat ini sedang rapuh dengan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Semua negara sedang berupaya



untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, serta memproduksi vaksin anti virus corona atau Covid-19.

## **2. Krisis Perekonomian Global**

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Perekonomian global sampai akhir tahun 2020 ditandai ketidakpastian dan menuju pada krisis ekonomi global berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 yang menyebabkan banyak negara mengalami banyak kesulitan. Penyebaran Covid-19 ini menyebabkan sejumlah negara mengambil langkah *lockdown* dan *physical distancing* bagi warganya. Kebijakan *lockdown* di sejumlah negara ini telah memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian, karena beberapa sektor tidak beroperasi normal. Akibatnya, mulai ada pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Jika Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 persen, maka pada April prediksi itu menjadi minus 3 persen. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran Covid-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF menyebut perekonomian pada 2020 menjadi yang terburuk setelah *Great Depression* pada 1930-an.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 sebesar minus 3 persen. Lembaga itu menyebut pandemi Covid-19 membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tinggi dan ekonomi menjadi terdampak akibat langkah-langkah perlindungan yang diambil pemerintah. Sebagai catatan, pada *World Economic Outlook* edisi Januari 2020, angka proyeksi masih lebih tinggi (3,3 persen) karena penyebaran Covid-19 belum meluas. Proyeksi minus pada Tahun 2020 tersebut diikuti oleh negara



perekonomian maju (-6,1%), Uni Eropa (-7,1%), dan negara G7 dengan minus 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga turut diprediksi minus. Negara perekonomian berkembang diprediksi minus 1 persen, sementara ASEAN-5 minus 0,6 persen.

Berbagai negara mengalami kelesuan ekonomi. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah.

Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian.

### **3. Sustainable Development Goals (SDG's)**

Pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berkelanjutan merupakan isu penting dalam peningkatan martabat kemanusiaan secara bersama sama. Isu ini meliputi beberapa tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi perbaikan lingkungan hidup. SDGs dideklarasikan pada akhir Tahun 2015, berorientasi pada peningkatan martabat dan kualitas hidup manusia melalui: (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *Economic Development - Population Development - Environment Development*.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: *thriving lives and livelihoods* (kehidupan yang sehat dan layak), *sustainable food security* (keamanan dan ketahanan pangan), *secure sustainable water* (sumber air bersih), *universal clean energi* (energi yang aman), *healthy and productive ecosystems* (ekosistem yang produktif dan sehat), *governance for sustainable Societies* (kebijakan yang berpihak terhadap komunitas). Untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan



masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 dan tersusun Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Regulasi ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat *platform* partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Amanah aturan ini tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ia juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju.

Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi masalah bagi pemerintah daerah Kabupaten Poso untuk mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusunan Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

#### **4. Degradasi Lingkungan Hidup**

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang



dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (*Protocol Kyoto*), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan perlindungan kehidupan laut. Berdasarkan *Copenhagen Accord*, catatan yang dihasilkan dari rangkaian pembahasan 26 negara termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim dalam *Conference of the Parties (COP) ke-15 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Copenhagen, Denmark, telah disepakati bahwa upaya mitigasi global (*global coherent mitigation actions*) secara sukarela/tidak mengikat dibutuhkan untuk membatasi peningkatan suhu global. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penurunan emisi GRK oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Isu internasional tentang lingkungan hidup adalah perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Perubahan iklim menjadi agenda global akhir-akhir ini karena kegiatan manusia semakin banyak menggunakan energi yang terkait dengan bahan bakar yang berasal dari fosil dan alih guna lahan dari hutan menjadi permukiman. Perubahan iklim yang dikhawatirkan sejumlah pihak, terutama yang berasal dari kegiatan manusia (*man-made/anthropogenic*), bukan karena adanya fenomena alam seperti letusan gunung berapi dan sebagainya.

Masih banyak sejumlah pihak, baik dari kalangan pemerintah, pelaku bisnis dan industri, maupun masyarakat, yang belum menyadari bahwa fenomena degradasi lingkungan hidup telah terjadi seiring dengan intensitas kegiatan manusia di berbagai aspek kehidupan. Pengabaian *ecological/environmental truth*



sebagai fakta bahwa dunia alam semesta tempat kita bermukim akan rusak dan menimbulkan dampak bencana bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri terus terjadi. Kegiatan-kegiatan manusia tersebut, yang berakibat meningkatnya efek gas rumah kaca, diakibatkan karena adanya emisi gas-gas CO (karbon dioksida), CH (*metana*), NO (*nitrogen oksida*), PFC (perflourokarbon), HFC (*hidroflourokarbon*), dan SF (*sulfur heksaflorida*). Gas-gas tersebut dapat mengakibatkan peningkatan suhu bumi karena bersifat menahan radiasi gelombang panjang yang bersifat panas.

Fakta yang ditunjukkan Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terjadi anomali kenaikan suhu akibat adanya efek rumah kaca pada akhir abad ke-21, ada tren kenaikan 2-4,5 derajat celsius. Bila hal ini dibiarkan saja tanpa ada perubahan perilaku manusia, berbagai bencana besar akan terjadi karena anomali perubahan iklim akan memicu kekacauan pada keberlanjutan industri pangan, pertanian, dan kenaikan air permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Berbagai kerusakan lingkungan yang dirasakan saat ini ternyata memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masa kini, lalu kemudian muncul keinginan untuk memperbaiki. Hal ini terjadi silih berganti sesuai dengan zamannya yang merupakan siklus hidup dari masa ke masa, dari zaman ke zaman dan dari peradaban ke peradaban. Kondisi memasuki peralihan dari fase buruknya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menjadi fase positif terhadap lingkungan. Sekarang ini umumnya manusia telah menyadari pentingnya alam untuk kelangsungan hidup. Perlahan manusia memperbaiki alam yang telah rusak dan mengurangi hal-hal yang merugikan alam. Manusia melakukan upaya penyelamatan hutan dan makhluk hidup lain yang menggantungkan kehidupannya pada alam. Namun, banyak pula manusia yang terus mencemari alam tanpa memikirkan risiko yang ditimbulkan ke depan. Meski memang tidak dapat dipungkiri



bahwa mengembalikan keseimbangan alam merupakan pekerjaan yang sulit dan terkadang butuh biaya tidak sedikit, namun jika ada tekad dan komitmen, maka insya Allah pasti dapat dilakukan untuk tujuan dan keinginan terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melalukukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*).

Kabupaten Poso yang memiliki Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sebagai biosfer dunia yang memiliki posisi strategis dan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup baik flora, fauna maupun kondisi ekologis di Pulau Sulawesi, Indonesia maupun para paru dunia. Beberapa jenis flora dan fauna yang langka juga merupakan indikator penting kelestarian lingkungan.

## **5. Perkembangan Tehnologi Informasi**

Terjadinya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah memberikan banyak perubahan, termasuk menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital, yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan





komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Diksi "*smart factory*" menjadi keniscayaan di era Industri 4.0 sebagaimana munculnya istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain. Istilah Industri 4.0 dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu. Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (*Fourth Industrial Revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan, dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Merujuk pada hasil dari *World Economic Forum* (WEF), Tahun 2020 dimana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh *soft-skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri yakni menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*People Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and Decision Making*), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*). Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi



barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara real time, dan mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar. Pelacakan produk dan transparansi akan semakin mengarah ke layanan baru. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme Industri 4.0 mengintegrasikan produsen dengan jalur pasokan tanpa batas geografis.

Selain itu, untuk mengantisipasi era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Poso, serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara *online*.

## **6. Ketahanan Pangan**

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).

Pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bejolok secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Menurut FAO *Agricultural and Development Economics Division* (June 2006) tentang "*Food Security*", ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengakses-nya.



Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan, jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan juga merupakan ukuran ketahanan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan dapat dilihat dari kacamata keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko yang dihadapi oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini masih banyak orang lapar. Salah satu ancaman serius dan ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini adalah terjadinya kelangkaan akan kecukupan pangan. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menjadi pengalaman yang berharga. Tingginya harga pangan menjadi salah satu sebab munculnya gerakan reformasi yang radikal. Mozambique adalah salah satu negara contoh yang mengalami persoalan pangan dan berakhir pada ketidakstabilan politik.

Adanya dampak sosial yang cukup memprihatinkan dari meroketnya harga pangan dunia menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal dan sekaligus mengancam stabilitas keamanan negara itu. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin mahal mendorong permintaan akan peningkatan pendapatan demi bertahan dalam situasi ekonomi dan politik yang sulit. Berdasarkan laporan *Food Security Information Network* (FSIN), kemungkinan krisis pangan dunia semakin memburuk, dan tampaknya keadaan ini akan bertambah parah di sejumlah tempat di dunia, khususnya di beberapa negara yang ketahanan pangannya rendah, sehingga berpotensi menghadapi tingginya risiko kelaparan.

Wilayah dan negara yang disinyalir memiliki potensi kelaparan yang tinggi antara lain di beberapa wilayah di Timur Laut Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Yemen. Penyebab kelaparan di beberapa negara ini yakni karena adanya konflik bersenjata, kekeringan, buruknya situasi ekonomi makro, dan politik.

Sebagaimana yang diumumkan FSIN, bahwa terdapat 108 juta orang menghadapi tingkat kritis kerawanan pangan pada 2019, dan terus meningkat secara drastis dari angka di tahun sebelumnya



yang tercatat sekitar hanya 80 juta orang. Penyebaran daerah rawan pangan akan terjadi di beberapa wilayah Asia lainnya menyusul Irak, Suriah, Malawi dan Zimbabwe. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diestimasi sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan.

Kabupaten Poso sebagai salah penghasil tanaman pangan di Pulau Sulawesi juga diharapkan menjadi salah satu pemasok penting kebutuhan pangan terutama beras dan Sayur-mayur di Sulawesi Tengah maupun di sebagian wilayah pulau Sulawesi. Terkait dengan isu pangan tersebut Kabupaten Poso perlu melakukan banyak melakukan peningkatan kinerja hasil pangan melalui berbagai cara seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dinamika pembangunan yang terjadi saat ini akan berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, sehingga perlu upaya-upaya pengendalian yang konsistensi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung perwujudan pencapaian target ketahanan pangan daerah maupun nasional.

## **7. Keterbatasan Energi**

Isu internasional energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan liar (*illegal mining*) dan pertambangan berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga meng-



agendakan isu energi dan ketahanan pangandisamping isu-isu perekonomian.

Sumberdaya hutan di Kabupaten Poso masih luas sehingga aktifitas pertanian dan kehutanan akan memberi pilihan antara kebutuhan energi dan pangan sebagai suatu substitusi. Artinya adalah para pelaku ekonomi di bidang pertanian dituntut untuk cerdas memilih komoditi yang akan diproduksi. Jika pilihan pilihan ekonomi saja menjadi pertimbangan maka konflik kepentingan terjadi. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Isu global diatas akan menjadi konflik konflik lokal jika tidak diantisipasi.

## **8. Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global**

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran.

Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, yang disebabkan perubahan iklim. Menurut para ahli, bencana yang dimaksud mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia, akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, wilayah Eropa dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum



mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus. Tahun 2018, negara bagian Amerika dan sebagian Eropa mengalami musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai (Badai Michael) yang paling kuat yang pernah menghantam kawasan itu. Kalau hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja dari bencana alam itu, mungkin kita tidak akan melihat bencana lain. Karenanya, peringatan dini membuat penilaian menyeluruh tentang dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, perlu dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban yang banyak akibat bencana. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus tergantung dari apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Kota Paris Tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Jika emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota di dunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar, kata para pakar iklim.

#### **4.2.2 Telaahan Kebijakan Nasional**

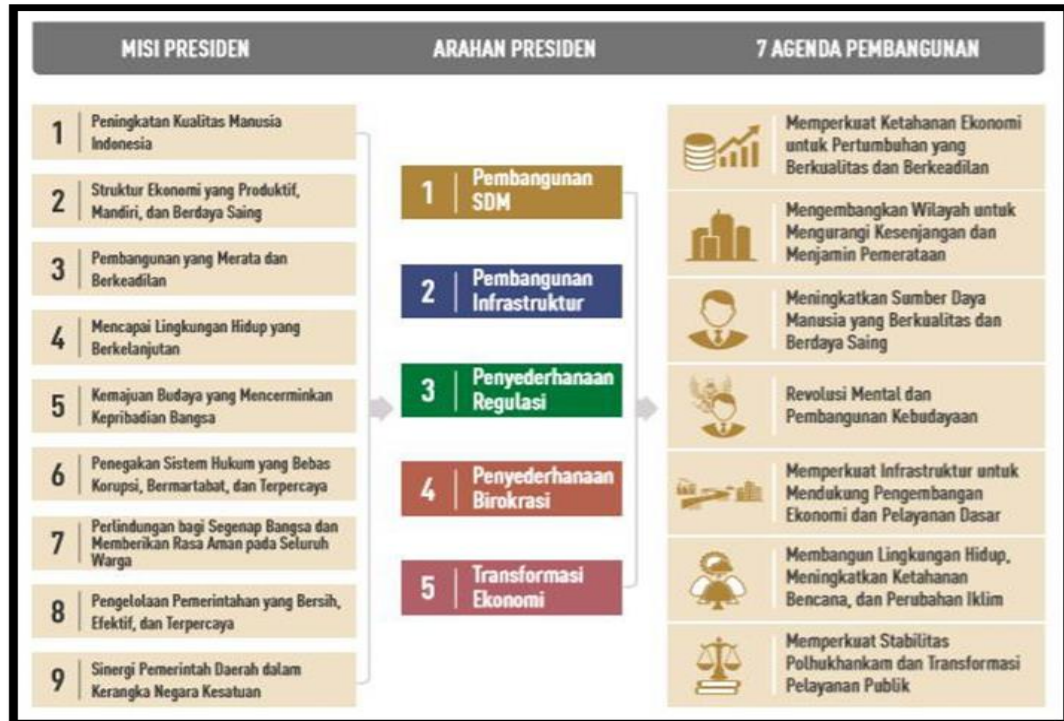
##### **1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah.



## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026

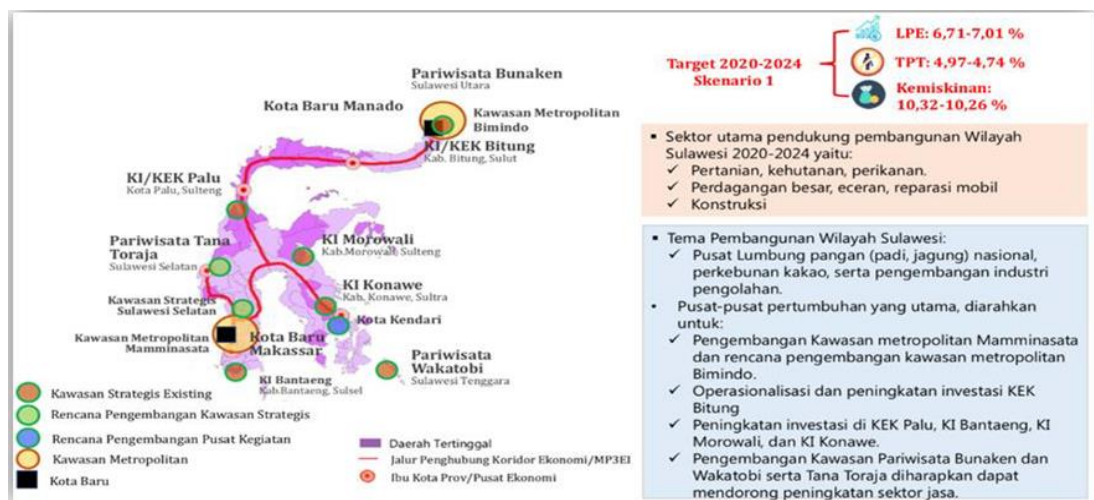
Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

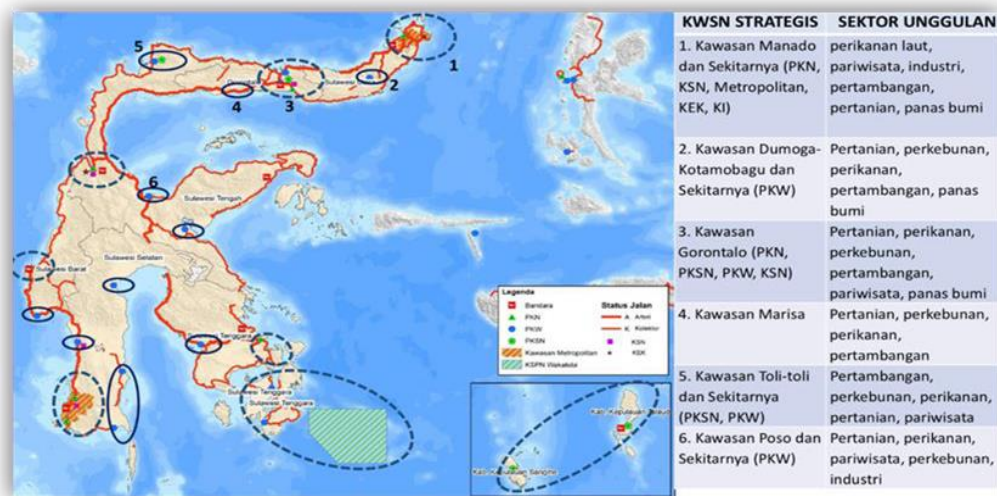
**Gambar 4.1**  
**Misi dan Agenda Pembangunan Nasional**  
**Tahun 2020-2024**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Kabupaten Poso diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional



**Gambar 4.2**  
**Rencana Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024**

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema pembangunan wilayah yaitu **“Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan”** dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.



**Gambar 4.3**  
**Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi**

Berdasarkan tema pembangunan wilayah Sulawesi tersebut, skenario pengembangan wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kawasan Tolitoli dan sekitarnya serta Kawasan Poso dan sekitarnya dititik beratkan pada sektor pertambangan, perkebunan, perikanan peternakan, pariwisata dan pertambangan. Untuk arah kebijakan untuk pengembangan **PKW Poso dengan fokus pada kegiatan pertanian, perikanan, Pariwisata, perkebunan dan industri.**

## 2. Kondisi Perekonomian Nasional

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020 memburuk. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan bahkan tumbuh negatif akibat adanya pandemi global virus Covid-19. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020 berada di rentang minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Pada kuartal II 2020, BPS melaporkan,



pertumbuhan ekonomi nasional minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar, maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3-4,8 persen. Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHB kuartal II mencapai sebesar Rp3.687,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan PDB ADHK 2010 sebesar Rp2.589,6 triliun.

Pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi lebih cepat pada tahun 2021. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen. IMF memprediksi, pada Tahun 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Target pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2020-2024: pertumbuhan ekonomi 5,4%-6 persen; tingkat kemiskinan 6,5-7 persen; indeks gini rasio 0,370-0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0-4,6; dan IPM sebesar 75,54.

### **3. Situasi Pangan Nasional**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya atau biasa disebut keanekaragaman hayati mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme

serta ekosistem dengan proses ekologi dari bentuk kehidupan yang merupakan bagiannya.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

#### **4. Ketimpangan Infrastruktur**

Buruknya infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya saing (*competitiveness*) bangsa secara keseluruhan masih rendah. Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (*doing business*) di samping birokrasi yang tak efisien dan korupsi. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Indonesia peringkat ke-82, Cina ke-74, Thailand ke-61 dan Malaysia ke-25. Indonesia pun jauh dari peringkat Singapura berada urutan ke-5.

Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur secara nasional yakni **Pertama**, tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 persen. **Ke-dua**, terbatasnya akses masyarakat ber-penghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan. **Ke-tiga**, aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang belum memadai. **Ke-empat**, rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun. **Ke-lima**, tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. **Ke-enam**, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum memadai yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur *broadband* dan belum terhubungnya Pulau Maluku





dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Ke-tujuh, urbanisasi masih tinggi, sekitar 53 persen penduduk menetap di wilayah perkotaan. Padahal daya dukung infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya di perkotaan semakin sempit, lantaran penambahan jumlah penduduk. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkat-kan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilaku-kan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

## **5. Bonus Demografi**

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubah-nya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada Tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara Tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional.

Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di seluruh Negara ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam



menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan (*trade openness*) dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

## **6. Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi meningkatnya perusakan/kebakaran hutan, terjadinya banjir/tanah longsor, musim kemarau yang panjang, terjadinya perburuan/perdagangan hewan dilindungi, aktivitas penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta RAN GRK sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN GRK merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di Tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan *bioprospeking* dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410

spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi

Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran air yang berasal dari permukiman, industri, pertanian serta kegiatan pertambangan. Kajian Bappenas (2018) menunjukkan kandungan Biological.



#### **Tutupan Hutan**

berkurang dari 50% (93,4 juta ha) tahun 2017 hingga tinggal 45% (84,7 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045.

Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018



#### **Kelangkaan air**

di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.



#### **Luas habitat ideal**

satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045.

## **7. Potensi dan Ancaman Bencana Alam**

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam (*natural*



*hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa-Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu Tahun 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai Selatan Pulau Jawa, pantai Utara dan Selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di





antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 (empat) erupsi gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain, laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan





kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Sepanjang Tahun 2018, terjadi lebih dari 2.564 bencana alam di Indonesia. Dampaknya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tren bencana Tahun 2018 didominasi angin puting beliung (799 kasus), banjir (677 kasus), dan longsor (472 kasus). Ketiga bencana tersebut disebut bencana hidrometeorologi dan menyumbang 97 persen dari total bencana alam. Tiga persen sisanya adalah bencana geologis. Meski begitu, bencana geologis berdampak lebih besar, terutama bencana geologis yang dipicu Tsunami dan gempa bumi.

Diperkirakan pada tahun 2020-2024 akan datang, bencana hidrometeorologimasih mendominasi 95 persen dari total bencana keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh luasnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, dan perubahan penggunaan lahan. BNPB melaporkan sekitar 110.000 hektar lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian sedang lahan kritis mencapai 14 juta hektar. Tidak ada potensi El Nino dan La Nina yang menguat, musim akan berjalan seperti normal baik musim penghujan juga musim kemarau. Puncak musim penghujan adalah Januari 2019, dengan potensi tinggi banjir besar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Gempa juga diprediksi akan terjadi sepanjang tahun 2020-2024. BNPB memperkirakan sekitar 500 gempa akan terjadi setiap bulannya di Indonesia. Ini berkaitan dengan posisi geologis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*ring of fire*) dan pertemuan beberapa lempeng tektonik. Sejauh ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti dimana dan kapan akan terjadi. Namun ditekankan, Indonesia bagian timur perlu mewaspadaai gempa karena kondisi geologisnya yang tergolong rumit.

Potensi tsunami disebutkan, tergantung pada gempa dan lokasi episentrumnya. Jika terjadi gempa berskala 7 SR atau lebih, dengan episentrum di kawasan laut atau samudra, maka potensi tsunami patut diwaspadai. Hampir seluruh tsunami diawali atau dipicu gempa kuat. Namun Tsunami Selat Sunda disebabkan



oleh longsor material yang dipicu Erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi ini tidaklah memicu monitor gempa secara signifikan.

Mitigasi bencana atau rangkaian pengurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan pembangunan struktural maupun non struktural. Pembangunan struktural dimulai dengan pembangunan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, shelter tsunami, sumur resapan, bendungan, dan lainnya. Sedangkan pembangunan non struktural dimulai melalui lembaga, legislasi, penataan ruang, sosialisasi, diklat, penelitian, dan lainnya.

Indonesia juga tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen (BNPB Tahun 2019).

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami di masyarakat belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempa bumi dan tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat serta masih kurangnya penelitian ‘prekursor’ (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat.



Jangkauan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Peningkatan frekuensi kejadian gempa bumi termasuk yang berpotensi tsunami menjadi peringatan bahwa keterpaparan masyarakat akan bencana tersebut masih tinggi.

## **8. Korupsi**

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu nasional dan menjadi komitmen RPJM nasional 2020-2024 hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Transparency International (TI) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemberantasan korupsi akan melemah, ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana publik, Terutama negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat makin rentan korupsi khususnya Indonesia. Laporan TI menyebutkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang menolak transparansi dan menoleransi korupsi, menciptakan kebudayaan impunitas yang pada gilirannya mendorong meluasnya korupsi. Korupsi tidak hanya merampok hak asasi masyarakat miskin, melainkan juga menciptakan masalah pemerintahan dan instabilitas. Di Indonesia, pemerintahan kini sedang berusaha membenahi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Revolusi mental. Organisasi tersebut mengalng kampanye *unmask the corrupt* yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan membeberkan tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terselubung.

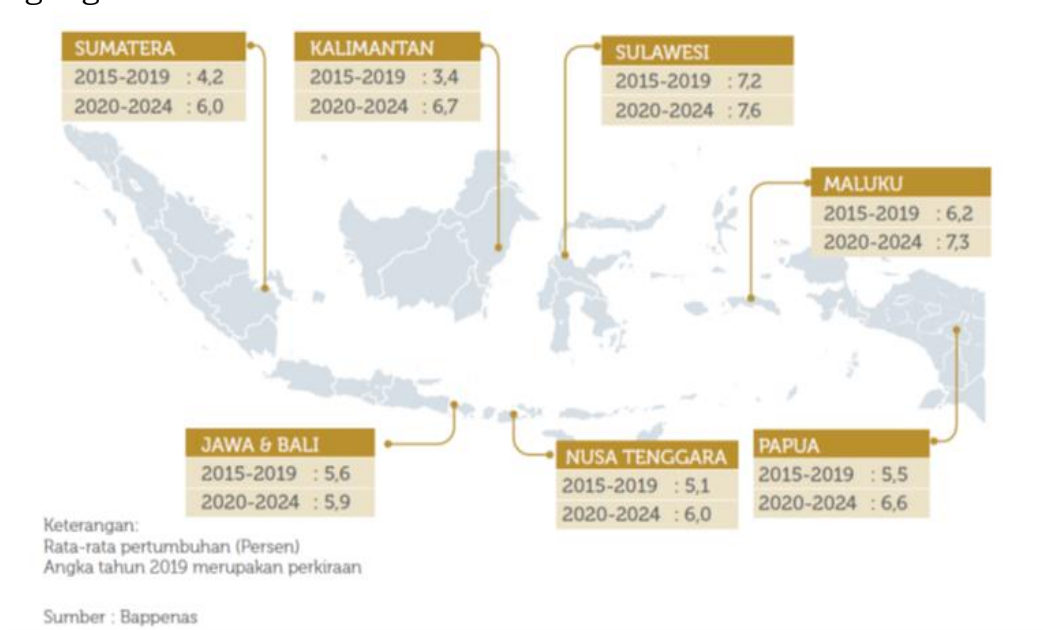
### **4.2.3 Isu Regional Sulawesi**

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Poso. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 dimana tema

pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi **“Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan”** dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.

Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia.



Isu strategis utama kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antara wilayah yang ditantai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kawasan timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hamper du kali lipat dari rata-rata Kawasan barat Indonesia (KBI) sebesar 10,30 persen; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi: juga belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, transmigrasi dan kawasan perbatasan. Pembangunan wilayah Sulawesi masih mengalami permasalahan menyangkut:

- Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
- Belum terwujudnya pengembangan hubungan internasional untuk kawasan timur Indonesia;
- Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, Mitigasi dan adaptasi bencana;



- d. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
- e. Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan untuk mendukung peran Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
- f. Belum optimalnya tatakelola dan kelembagaan pengelola Kawasan metropolitan;
- g. Masih rentannya ketahanan fisik dan social atas perubahan iklim, bencana, populasi dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah utama.

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk

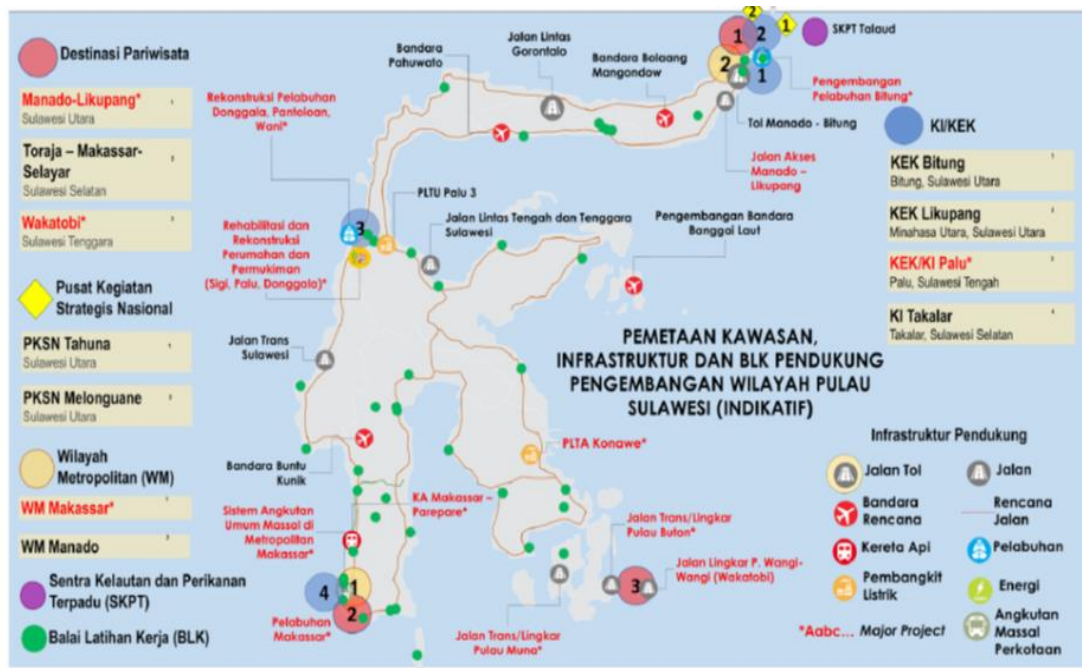




- mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
    - (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi yaitu kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KEK dan KI; dan (g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilaya;
  - 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antardaerah otonom di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan kepulauan;
  - 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
  - 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyara-kat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan

Sulawesi Tengah dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitar-nya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;

- 7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.



**Gambar 4.4**

**Peta pengembangan Wilayah Sulawesi dalam RPJMNas 2020-2024**

#### 4.2.4 Isu Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten Poso dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan



hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah.

#### **4.2.4.1 Isu Strategis Daerah**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Identifikasi isu strategis untuk tiap tingkatan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Isu Strategis Daerah Berdasarkan Urusan**  
**Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
1.01	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerataan Akses Pendidikan</li><li>2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.</li><li>3. Perlindungan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</li></ol>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Pelayanan Kesehatan terkait obat &amp; alat Kesehatan</li><li>2. Tentang Jaminan</li></ol>	Dinas Kesehatan/RSUD



No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kesehatan Nasional (JKN) 3. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Penurunan angka stunting	
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemantapan Jalan Provinsi Masih Rendah, Masih Dibawah Kemantapan Jalan Nasional</li><li>2. Ketersediaan Air Minum Masih Rendah</li><li>3. Infrastruktur Kebencanaan Belum Optimal</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konektivitas antar wilayah</li><li>2. Kemantapan jalan provinsi</li><li>3. Rencana Tata Ruang baik RUTR maupun RRTR yang berbasis mitigasi bencana sebagaipintu masuknya investasi dan sebagai instrument pemberian izin kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan pengawasan, penertiban serta penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan tertib penyelenggaraan informasi jasa konstruksi</li></ol>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Backlog yang masih tinggi</li><li>b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tinggi</li><li>c. Peningkatan kualitas permukiman Perumahan kumuh</li><li>d. Penanganan rumah di daerah rawan bencana</li><li>e. Database PSU Permukiman.</li><li>f. Inventarisasi dan Identifikasi permasalahan pertanahan lintas Kabupaten/Kota</li></ol>	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah



<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
1.05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.</li><li>b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.</li><li>c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.</li><li>d. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.</li></ol>	Satuan Polisi PamongPraja dan BPBD
1.06	Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemiskinan.</li><li>2. Kecacatan.</li><li>3. Keterlantaran.</li><li>4. Ketunaan Sosial</li><li>5. Keterpencilan</li><li>6. Korban Bencana Alam</li><li>7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi</li></ol>	Dinas Sosial
2.07	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Periode 2021 – 2025 yang melibatkan dinas/badan/lembaga/dunia usaha dalam Tim yang diangkat oleh Gubernur Sulawesi Tengah hendaknya didukung dengan dana yang memadai.</li><li>2. Rekomendasi dalam Perencanaan Tenaga Kerja dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan daerah dan dunia usaha untuk menuntaskan pengangguran di Sulawesi Tengah.</li></ol>	Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi





<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Sosialisasi rencana tenaga kerja mikro di perusahaan,</li><li>4. Perlu adanya Peraturan/Instruksi Gubernur yang menjelaskan tugas dan fungsi serta kewajiban bahkan sanksi sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja dan perusahaan sebagai penyedia lowongan/pemberi kerja/pengguna tenaga kerja.</li><li>5. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta tidak hanya berfungsi memberikan pelatihan kerja tetapi juga sekaligus bertanggung jawab untuk menempatkan alumninya melalui penempatan formal ataupun informal dengan membentuk Bursa kerja Khusus.</li><li>6. Lembaga Pelatihan Kerja tersebut di atas perlu difasilitasi untuk mendapatkan akreditasi.</li><li>7. Peningkatan kompetensi SDM sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di bidang teknis dan bursa kerja melalui Diklat/Bimtek.</li><li>8. Pelaksana di bidang teknis perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana untuk kelancaran beraktifitas dalam pelayanan penempatan tenaga kerja secara rutin.</li><li>9. Diperlukan adanya sistim dan mekanisme serta instrument penciptaan</li></ol>	



<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
		<p>perluasan kesempatan kerja yang jelas untuk menentukan skala prioritas secara adil dan merata pelaksanaannya di daerah dan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan usaha.</p> <p>10. Peningkatan kompetensi SDM sebagai penyuluh/pelaksana penciptaan perluasan kesempatan kerja di bidang teknis melalui Diklat/Bimtek.</p> <p>11. Diperlukan adanya monitoring dan evaluasi serta pengawasan Penempatan tenaga kerja asing dan penempatan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.</p> <p>12. Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI) dari Sulawesi Tengah atas sepengetahuan pemerintah setempat.</p> <p>13. Penyuluhan CPMI/PMI di Lurah/Desa dan aparatnya.</p> <p>14. Bimbingan teknis Petugas Pelaksana PMI di daerah dan Koordinasi Pengendalian terpadu.</p>	
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>1. Menurunya Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.</p> <p>2. Meningkatnya Kesejahteraan Gender dalam pembangunan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Urusan Pemerintahan	Isu Strategis	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Ekonomi. 3. Mewujudkan Pengarusutamaan 4. Meningkatnya Kualitas SDM Perempuan dan Anak.	
2.09	Kehutanan	<b>1. Isu Lingkungan</b> berkaitan dengan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas : kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati <b>2. Isu Ekonomi</b> berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan terhadap perekonomian, terdiri atas : peningkatan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan serta peningkatan produktivitas hutan <b>3. Isu Sosial</b> berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan terdiri atas : Optimalisasi Pemanfaatan Hak Akses Perhutanan Sosial (PS) dan Hak Aset TORA <b>4. Isu Tata Kelola dan Kelembagaan</b> berkaitan dengan penguatan tata Kelola sumber daya hutan terdiri atas : pemantapan Kawasan hutan, efektivitas tata Kelola dan penegakan hukum	

Sumber: Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

#### **4.2.4.2 Isu Strategis Kewilayahan Sulawesi Tengah**

Berdasarkan data dan informasi yang termuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.



Untuk Kabupaten Poso dirumuskan beberapa permasalahan dan isu strategis kewilayah, berkaitan dengan **Kabupaten Poso** sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Isu Strategis Kewilayahan Sulawesi Tengah**

No	Urusan Dan Bidang	Permasalahan
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
1.01	BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas pendidikan masih rendah, berdasarkan skor PISA 2015, kemampuan matematika, membaca, dan sains pelajar Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga dan rata-rata negara OECD</li><li>2. Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li><li>3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan.</li><li>4. Kurangnya pendidikan vokasi berbasis sumber daya dan potensi dibidang pariwisata dan pertanian</li></ol>
1.02	BIDANG KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesehatan dan gizi anak rendah (3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting, 75 dari 100 anak Indonesia mendapat imunisasi campak,)</li><li>2. Prevalensi penyakit tidak menular tinggi (26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh 4 penyakit tidak menular, kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD)</li><li>3. Prevalensi merokok tinggi (23 dari 100 remaja laki-laki usia 13-15 tahun merokok).</li><li>4. Fasilitas Kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal (3,7 Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk, 12 Tempat Tidur Rumah Sakit per 10.000 Penduduk)</li></ol>
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jaringan irigasi yang kondisinya rusak</li><li>2. Belum optimalnya pengelolaan irigasi berbasis masyarakat</li><li>3. Belum optimalnya ruas jalanyang berkondisi mantap</li><li>4. Belum tercapainya target Universal Akses 100-0-100</li></ol>



No	Urusan Dan Bidang	Permasalahan
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum terintegrasinya penanganan lintas sektor penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan</li><li>2. Pencapaian target penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni yang masih lambat</li></ol>
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Rencana Kontijensi</li><li>2. Melakukan Pelatihan SDM dalam Penanganan Bencana</li></ol>
1.06	BIDANG SOSIAL	Prosentase masyarakat miskin Prov. 13,48% Nas. 9,22%
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya peningkatan Produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.</li><li>2. Pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial</li><li>3. Pusat pelatihan tenaga kerja yang ada masih berskala LLK</li></ol>
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018)</li><li>2. Sekitar 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka, sekitar 1 dari 10 diantaranya mengalami kekerasan (RPJMN 2020-2024)</li></ol>
2.09	BIDANG PANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan</li><li>2. Menghidupkan kembali kelompok-kelompok distribusi pangan masyarakat</li><li>3. Pengembangan toko tani Indonesia.</li></ol>
2.10	BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya pencatatan aset tanah Pemerintah Daerah
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya Edukasi dan komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan.</li><li>2. Pengendalian dan Kerusakan Pencegahan Kerusakan Pesisir Pantai.</li></ol>
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus.</li><li>2. Pelayanan administrasi</li></ol>





No	Urusan Dan Bidang	Permasalahan
		kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan belum terintegrasi lintas sector.
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama.</li><li>2. Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam mengelola pemerintahan desa.</li><li>3. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.</li></ol>
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018)</li></ol>
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe A Lembomawo dan Terminal Tipe B Tentena diakibatkan kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai</li><li>2. Perlu pembangunan infrastruktur kawasan terminal Tipe A dan Terminal Tipe B yang berada di wilayah .</li><li>3. Masih banyaknya ruas jalan provinsi yang belum didukung oleh rambu jalan.</li><li>4. Belum optimalnya Jembatan Timbang di Mayoa sehingga banyak kendaraan ODOL (OverDimensi Over Loading) yang terlewat sehingga merusak Jalan Trans Sulawesi</li></ol>
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimnya Pelatihan dan Pembinaan sumber daya manusia dalam pemanfaatan fasilitas teknologi informasi.</li><li>2. Minimnya ketersediaan jaringan di daerah yang masih blind spot.</li><li>3. Minimnya minat masyarakat dalam mengakses informasi yang disediakan pemerintah melalui situs resmi.</li></ol>
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya pemuda yang aktif memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan (6,27%)</li></ol>



No	Urusan Dan Bidang	Permasalahan
		2. Masih kurangnya keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan organisasi 6,36 % (Susenas, 2018).
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	1. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	1. Masih kurangnya pengembangan budaya kegemaran membaca; 2. Masih kurangnya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; 3. Masih kurangnya akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
2.24	BIDANG KEARSIPAN	
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
3.27	PERTANIAN	1. Belum optimalnya peran Balai Benih di dan semakin berkurangnya tenaga PPL dan petugas para medik perternakan 2. Lebih mengutamakan produk-produk pertanian yang memenuhi kebutuhan ekspor dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah.
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan
3.26	BIDANG PARIWISATA	1. Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata (DTW) yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat 2. Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antardaerah sesuai potensi
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya pengembangan sector UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian karena belum adanya industri pengolahan
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	1. Mengkoordinasikan Penyiapan, Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi yang telah direncanakan
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1. Belum terselesaikannya batas-batas administrasi wilayah 2. Pelaksanaan otonomi daerah yang



No	Urusan Dan Bidang	Permasalahan
		belum maksimal 3. Rendahnya kegiatan kerjasama Daerah 4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa 5. Perbaiki manajemen layanan publik berbasis teknologi Informasi 6. Penegakan Hukum yang Belum Optimal (Indeks Pembangunan Hukum 0,60 2017).
5.03	KEPEGAWAIAN	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
7.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan. 2. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama. 3. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa 4. Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018

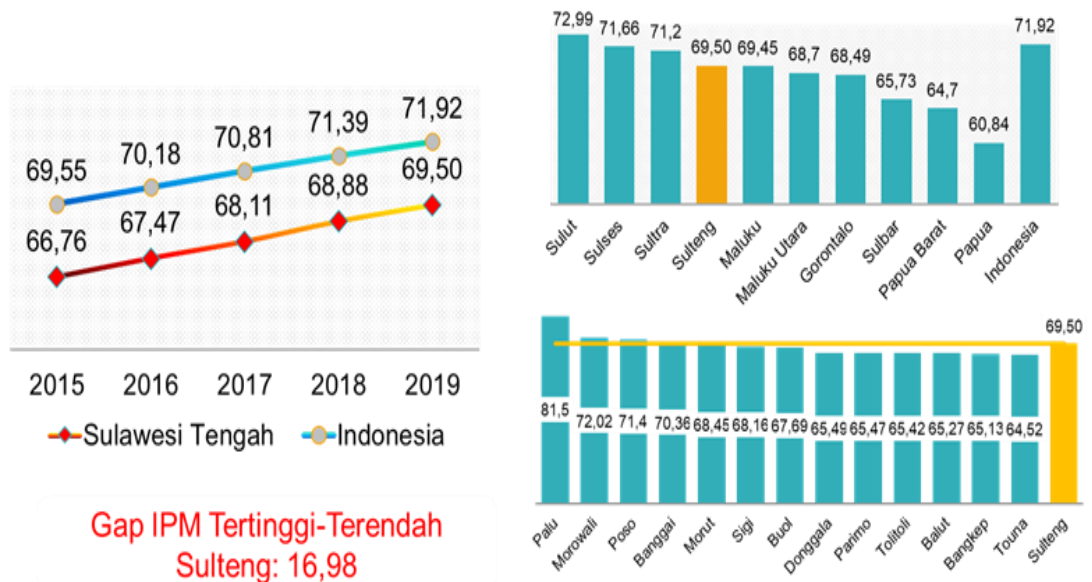
Adapun isu-isu Strategis utama di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

### **1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kondisi empiris ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah. Pada tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 67,47 serta pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 68,11 hingga tahun 2019 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 69,50. Pembangunan mutu modal manusia di Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Sulawesi Tengah selama 2012-2019, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Berdasarkan

metode baru IPM, terlihat pada Tahun 2012 IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 65,00 poin pada tahun 2012, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahun hingga menjadi 69,50 poin tahun 2019. Angka IPM ini masih berada di bawah rata-rata Nasional mencapai 71,92. Dalam perspektif regional Sulampua tahun 2019, IPM Sulawesi Tengah menempati ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdapat satu daerah yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kota Palu. Untuk daerah kabupaten/kota, Tahun 2019 pada umumnya termasuk dalam kategori menengah ke atas. IPM Kota Palu mencapai 81,50; Kabupaten Morowali sebesar 72,05; dan Kabupaten Poso 69,78. Selanjutnya, Kabupaten Banggai 70,36; Kabupaten Morowali Utara 68,45; Kabupaten Sigi 68,16; Kabupaten Buol 66,69; Kabupaten Donggala 65,49. Sementara itu, Kabupaten Parigi Moutong 65,47; Kabupaten Tolitoli 65,42; Kabupaten Banggai Laut 65,47; Kabupaten Banggai Kepulauan 65,13; dan Kabupaten Tojo Una-una 64,52. Berdasarkan pencapaiannya, peningkatan tertinggi pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Indikator (indeks) ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 4.5**  
**Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota**  
**Tahun 2015-2019**



## **2. Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi**

Perkembangan positif beberapa indikator makro perekonomian Sulawesi Tengah juga berpengaruh positif terhadap kondisi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berakibat pada peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan beberapa komponen yang mendukung perbaikan dan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami penurunan periode 2013-2020. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan, data perkembangan menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif, dimana pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 400,40 jiwa atau sebesar 14,32 persen menurun menjadi sebanyak 387,06 jiwa atau sebesar 13,61 persen Tahun 2014, namun Tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 420,52 jiwa atau sebesar 14,45 persen dan menurun pada Tahun 2017 sebanyak 417,87 jiwa atau sebesar 14,14 persen.

Pada Maret Tahun 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai sebanyak 410,36 ribu orang atau sebesar 13,48 persen, berkurang sebesar 3,13 ribu orang dibandingkan dengan September Tahun 2018 yang sebesar 413,49 ribu orang atau sebesar 13,69 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September Tahun 2018 sebesar 9,50 persen turun menjadi 9,32 persen pada Maret Tahun 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September tahun 2018 sebesar 15,41 persen turun menjadi sebesar 15,26 persen pada Maret Tahun 2019. Sementara capaian penurunan kemiskinan pada Maret Tahun 2020 turun menjadi sebesar 12,92.

Jumlah penduduk miskin Sulawesi tengah pada Maret Tahun 2020 mencapai sebanyak 398,73 ribu orang. Angka kemiskinan ini menunjukkan penurunan sebesar 5,30 ribu orang dibandingkan September Tahun 2019, sementara dibandingkan Maret Tahun 2018 jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sebanyak 11,63 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah



perkotaan di Sulawesi Tengah turun sebesar 0,73 ribu orang dan daerah di perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun 8,90 persen menjadi 8,76 persen, sedangkan di perdesaan turun dari sebesar 15,01 persen menjadi sebesar 14,69 persen. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah Maret Tahun 2020 turun menjadi sebesar 12,92 persen.

**Tabel 4.6****Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah 2019-2020**

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2019	84,74	9,32
September 2019	81,46	8,90
Maret 2020	80,73	8,76
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2019	325,62	15,26
September 2019	322,57	15,01
Maret 2020	318,00	14,69
<b>Total</b>		
Maret 2019	410,36	13,48
September 2019	404,03	13,18
Maret 2020	398,73	12,92

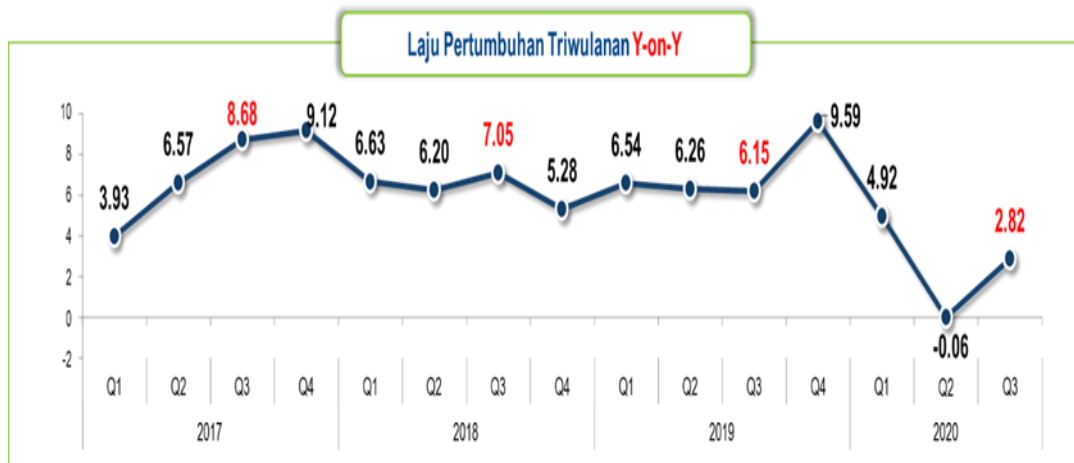
*Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas)  
Maret 2019, September 2019, Maret 2020*

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, selain ada faktor jumlah penduduk. Semakin tinggi angka jumlah penduduk miskin maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan, tetapi tingginya tingkat kemiskinan, tidak berarti bahwa jumlah penduduk miskin di suatu daerah itu lebih banyak dari pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, namun tergantung dari jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam daerah tersebut.

**3. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas**

Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota secara berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas rata-rata nasional, namun masih bertumpu pada Sektor Pertanian (Sektor Primer) dimana pertumbuhannya tinggi tetapi relatif belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan berangsur-angsur beralih ke sektor Sekunder Industri, Perdagangan dan Jasa.

Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah masih menunjukkan kinerja yang positif yakni pada triwulan III-2020 tumbuh sebesar 2,82 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya 6,15 persen (yoy). Namun demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih lebih baik dari provinsi di Sulawesi Tengah yang sebagian besar mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus. Dari sisi penawaran, kenaikan pertumbuhan didorong meningkatnya pertumbuhan di Sektor Industri Pengolahan, yang berimbang pada Sektor Pertambangan dan Pengalihan sebagai penyedia input (*raw material*). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ditopang dari konsumsi rumah tangga dan sektor pemerintah, serta meningkatnya kinerja ekspor. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan investasi mulai mengalami deselerasi.

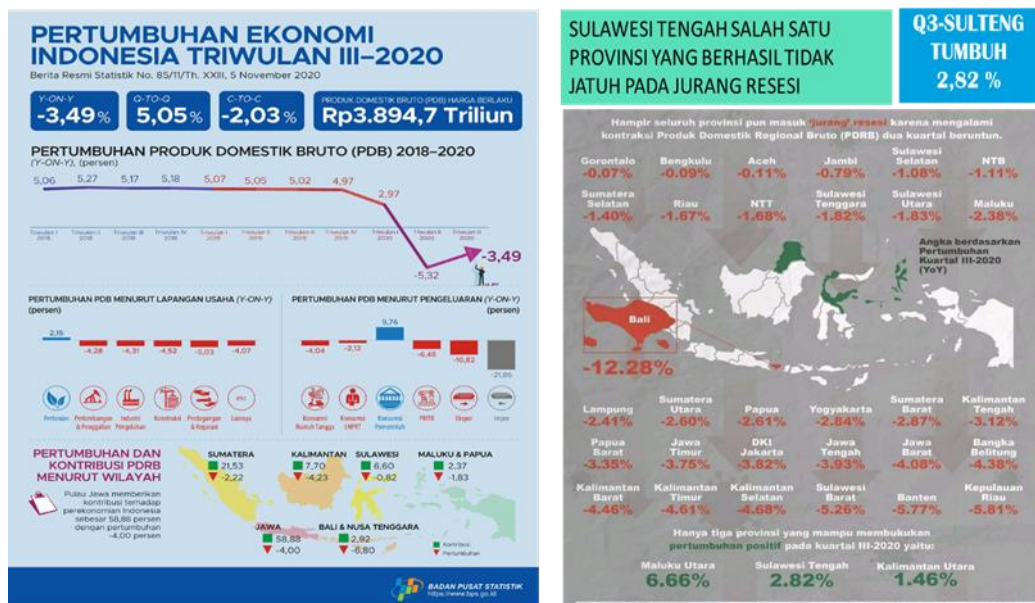


**Gambar 4.6**

**Capaian Pertumbuhan Ekonomi  
Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020 (Y on Y)**

Sementara itu, dari sisi ukuran ekonomi, Sulawesi Tengah menempati peringkat ketiga di Sulampua setelah Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua. Nilai PDRB Sulawesi Tengah terus meningkat menjadi indikatornya, yang berasal dari kinerja ekspor. Nilai ekspor Sulawesi Tengah yang terbesar di Sulampua. Pada periode Januari-Oktober Tahun 2018, total ekspor mencapai USD 4.116.30 juta, atau 30 persen dari total ekspor. Tingginya ekspor tersebut terutama ditopang oleh komoditas olahan nikel dan gas, yang pangsa mencapai 96,71 persen. Di sisi lain, impor hanya USD 1.906.16 juta, sehingga neraca perdagangan tercatat surplus sebesar USD 2.207,14 juta. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi

Tengah yang relatif tinggi di beberapa tahun terakhir, secara struktural juga diikuti dengan proses transformasi. Dimana, pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada Tahun 2013 hanya 5,67 persen, sudah mencapai sebesar 12,09 persen Tahun 2019. Sementara, pangsa Sektor Pertanian menurun dari sebesar 34,36 persen pada Tahun 2013 menjadi sebesar 28,75 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, proses transformasi sektor tersebut juga diikuti penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi di Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun 2013 hanya sebesar 5,04 persen, namun sudah mencapai 7,57 persen Tahun 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi nasional dan daerah ikut berimbas pada menurunnya ekonomi Sulawesi Tengah pada Q-3 Oktober Tahun 2020 menjadi sebesar 2,64 persen, lebih baik dari kondisi nasional pada Q-3 Oktober Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,49% dan masuk pada jurang resesi.



**Gambar 4.7**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan antar Provinsi Kuartal-3 tahun 2020**

Dalam konteks ekonomi, tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah saat ini adalah permasalahan pengendalian harga-harga barang dan jasa. Inflasi pada November 2019 tercatat 7,27 persen (yoy), atau secara akumulatif telah mencapai 5,29 persen (ytd), menurun pada Oktober Tahun 2020 menjadi 0,41 persen. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga barang dan jasa konstruksi, seperti; jasa tukang bukan



mandor, besi beton, seng, dan semen, yang disebabkan oleh tingginya permintaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk renovasi atau pembangunan infrastruktur pasca bencana, dan infrastruktur pasca terjadinya bencana alam. Sementara dari sisi penawaran, terdapat hambatan dalam proses distribusi barang dikarenakan bongkar muat barang di pelabuhan masih terkendala karena kerusakan beberapa fasilitas penunjang bongkar muat akibat tsunami.

Sementara itu, stabilitas keuangan di Sulteng masih terjaga baik. Dari sisi keuangan korporasi, potensi sumber kerentanan terpantau aman, yang terindikasi dan perkembangan harga komoditas andalan Sulteng di pasar global (nikel dan gas) dan kondisi negara mitra dagang cukup stabil. Dengan demikian, kinerja ekspor ke depan diperkirakan tetap positif. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan menurunnya harga komoditas di sektor pertanian seperti kelapa sawit dan kakao. Sementara itu, dari sisi sektor rumah tangga, kondisinya terpantau sedikit mengalami pelemahan seiring dengan terjadinya bencana. Hal ini tercermin dari hasil survei Bank Indonesia dimana indeks keyakinan konsumen Sulteng diindikasikan menurun. Sedangkan, sisi Sektor Perbankan kondisinya tetap terjaga baik. Per November Tahun 2018, aset Perbankan tumbuh sebesar 9,09 persen (yoy), DPK tumbuh 14,59 persen (yoy) dan kredit tumbuh 9,16 persen (yoy), sementara *non performing loan (NPL)* dalam batas aman sebesar 2,33 persen. Namun demikian, kalangan perbankan ke depan tampaknya perlu melakukan penanganan ekstra terutama dalam memperbaiki NPL di Sektor Perdagangan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berjalannya proses transformasi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Berdasarkan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan 3,81 persen pada Agustus Tahun 2017 menjadi 3,43 persen pada Agustus Tahun 2018 sementara pada Agustus Tahun 2020, TPT menurun dan 3,77 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami sedikit penurunan dari 14,14 persen pada Maret Tahun 2017 menjadi sebesar 14,01 persen pada Maret Tahun 2018, dan Tahun 2020 menjadi sebesar 12,92 persen, seiring dengan terkendalinya inflasi (inflasi Oktober 2020: 0,41 persen (yoy)). Indeks Gini Sulawesi Tengah juga semakin membaik dari 0,355 Maret Tahun 2017 menjadi 0,346 Maret Tahun 2018. Hal yang perlu mendapat





perhatian NTP November 2018 masih berada di angka 95,70 sampai dengan Oktober Tahun 2020 berada pada 94,90. Artinya tingkat kesejahteraan petani masih rendah, karena biaya produksi masih lebih besar dari nilai jual produk pertanian karena masih dibnawah 100.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transpor-tasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013-2017 berdasarkan kondisi jalan mengalami perkembangan fluktuatif. Pembangunan di bidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi periode Tahun 2013-2016 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi mencapai 47,70 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.643,74 km meningkat menjadi 52,04 persen pada Tahun 2014; Tahun 2015 kondisi jalan mantap meningkat menjadi 57,70 persen; Tahun 2016 meningkat menjadi 58,85 persen; selanjutnya meningkat menjadi 60,89 persen Tahun 2019. Di sisi lain, perkembangan jalan nasional dari sepanjang 2.373,40 km yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah kondisi jalan dalam status Kondisi Jalan Mantap pada Tahun 2019 sebesar 95,01 persen.

Kondisi ketersediaan sumber energi listrik belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat dan Sektor Industri, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah. Kota Palu sebagai titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang ditargetkan akan tercapai pada Tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data, menunjukkan daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya tersambung sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan



sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik

#### **5. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan HAM Belum Optimal**

Dari sisi tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Kondisi kelembagaan pemerintah daerah dari aspek struktur maupun fungsi belum efektif dan efisien, sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, di samping itu masih rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip *good governance*. Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2016 tentang perangkat daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah.

Dari sisi hukum dan penegakkan hak asasi manusia, masih adanya budaya hukum masyarakat rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah di bidang pembinaan tertib hukum dalam usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai kasus hukum sehingga perlu upaya yang terus menerus untuk memperbaikinya.

## **6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Dan Berkelanjutan Belum Optimal**

Pengelolaan sumberdaya alam yang belum memperhatikan fungsi dan tata kelola lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan (*deforestasi*), akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal mining*), rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

## **7. Potensi Bencana Sulawesi Tengah**

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga di antaranya: Kabupaten Donggala, Palu, Morowali, Poso, Kepulauan Banggai, Banggai Tolitoli, Buol, Tojo Una-Una, dan Sigi serta wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018, yakni: Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong dikategorikan sebagai Kota dan Kabupaten dengan risiko multi ancaman tinggi. Pasca kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi (*triple disaster*) yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah Sulawesi Tengah.

### **a. Gempa Bumi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi. Penyebab utama adanya Patahan Palu Koro (Sesar Palu Koro) yang memanjang dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone dengan panjang sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada di sekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relatif dangkal. Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR (*scala richter*). Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

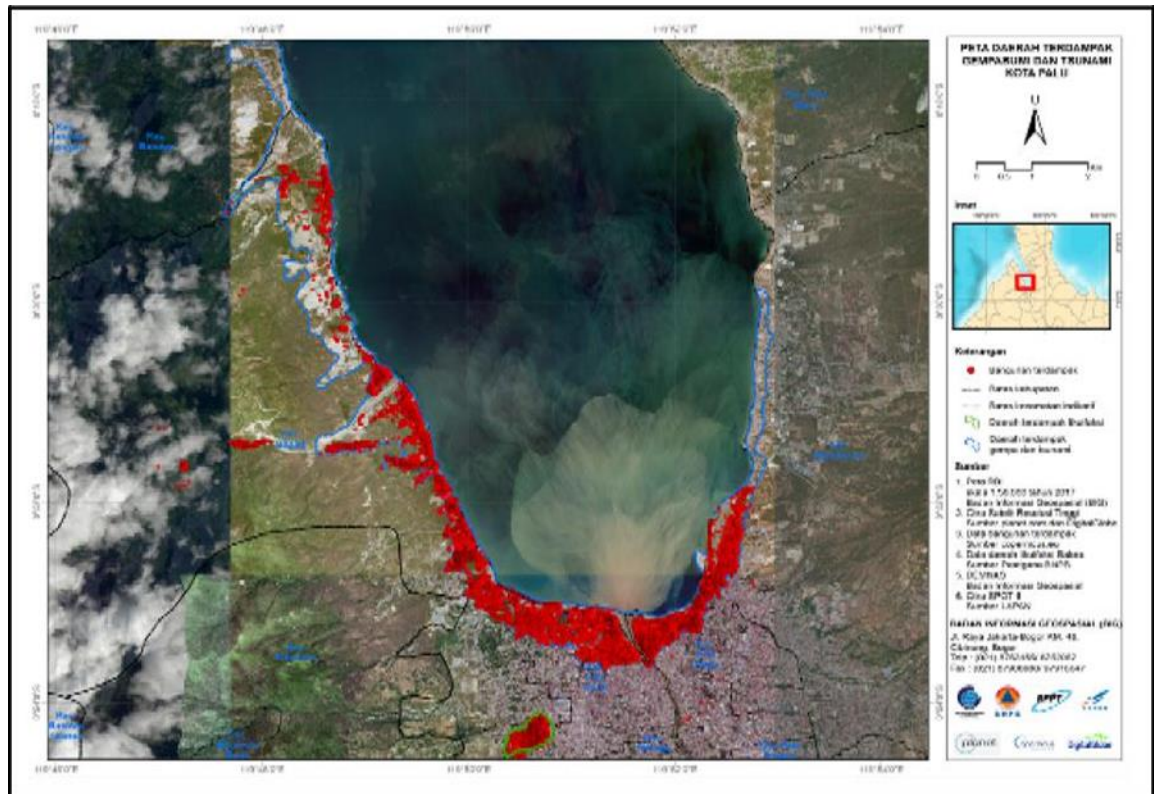
### **b. Tsunami**

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan tsunami, beberapa *peristiwa* tsunami yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tersebut:

1. 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter;
2. 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten

Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam;

3. 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli.



Sumber: BIG, LAPAN dan BNPB

**Gambar 4.8**  
**Wilayah Terdampak Gempa Dan Tsunami**

### c. Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Donggala dan Palu 28 September Tahun 2018 mengakibatkan beberapa wilayah di sekitarnya mengalami fenomena mengejutkan disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Kota Palu, Desa Jono Oge dan Desa Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi mengalami likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblasnya wilayah tersebut. Terjadinya likuifaksi dimana hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa dan tidak memiliki daya ikat.

Sementara penghitungan dan pendataan terkait dengan wilayah terdampak yang juga termasuk jumlah bangunan yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, masih dan sedang





dilakukan oleh lembaga terkait BNPB, pada saat rencana induk ini disiapkan, data dan informasi terkait wilayah dan jumlah bangunan terdampak bencana yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh LAPAN dan beberapa mitra terkait lainnya termasuk komunitas pemetaan *Open Street Map (OSM)*, bisa memberikan gambaran secara spasial mengenai wilayah dan jumlah bangunan terdampak. Penting untuk dijadikan catatan bahwa data tentang jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verifikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak.

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya Selatan.

Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.18,48 Triliun, khususnya di 4 kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (*in-situ*), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (*ex-situ*).

Sementara itu Kabupaten Poso juga mengalami Gempa bumi berkekuatan 5,7 SR pada Maret 2019. Akibat dari gempa tersebut, puluhan rumah warga dan sejumlah rumah ibadah di beberapa desa di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Disusul kemudian pada bulan April 2019 terjadi Gempa berkekuatan 6,9 SR mengguncang Poso, Jumat (12/4) sekitar jam 7.40 malam waktu Indonesia Tengah.





Juga pada wilayah lainnya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebuah gempa bermagnitudo 6,8 yang melanda perairan Teluk Tolo, tercatat pada tanggal 12 April 2019 Pukul 18.40 WIB. Pusat gempa berada di 85 km barat daya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kedalaman 17 km. Guncangan gempa ini dirasakan hingga Gorontalo, Palu bahkan Makassar. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami.

#### **4.2.5 Isu Strategis Daerah Lainnya**

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan :

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan;
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Identifikasi kebijakan daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

#### **Identifikasi RPJMD Daerah Lain**

<b>No.</b>	<b>Daerah Lain</b>	<b>Periode RPJMD</b>	<b>Kebijakan Terkait</b>
1	Tojo Una-Una	2016-2021	- Konektivitas Pengembangan pariwisata Toraja – Tentena – Togeana (3T) - Dukungan ketersediaan energi listrik
		RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026	- Masih dalam Proses Penyusunan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
2	Parigi Moutong	2018-2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi keputusan gubernur tentang penyelesaian batas wilayah</li><li>- Interkoneksi infrastruktur jalan</li><li>- Percepatan penurunan angka kemiskinan</li></ul>
3	Morowali Utara	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dukungan ketersediaan energi listrik untuk kawasan industri di Morowali Utara</li><li>- Interkoneksi infrastruktur jalan</li></ul>
		RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih dalam Proses Penyusunan</li></ul>
4	Sigi	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu dari penambangan emas liar dan perambahan huatan</li><li>- Penertiban penduduk yang berada di sekitar kawasan TNLL di dongi-dongi</li></ul>
		RPJMD Kabupaten Sigi 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih dalam Proses Penyusunan</li></ul>
5	Luwu Utara	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Interkoneksi infrastruktur jalan daerah perbatasan (akses wilayah Rampi)</li><li>- Dukungan ketersediaan energi listrik</li></ul>
		RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih dalam Proses Penyusunan</li></ul>
6	Luwu Timur	2016-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dukungan ketersediaan energi listrik</li><li>- Jaringan infrastruktur wilayah masih terbatas</li></ul>
		RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih dalam Proses Penyusunan</li></ul>



#### **4.2.6 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)**

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan TPB bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;



15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Studi *Baseline* Indikator TPB (SDGs) yang ditindaklanjuti Kabupaten Poso dengan menyusun RAD-SDG's Kabupaten Poso. Tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah adalah angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 masih berada pada angka 12,92 persen, sementara secara nasional 9,82 persen. Sementara terkait dengan Isu strategis Kabupaten Poso menyangkut:

- a. Masalah masih tingginya angka Kemiskinan Daerah dimana pada tahun 2019 mencapai 16,71 persen atau urutan ke-4 tertinggi dari 13 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Masih rendahnya Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso dimana pada tahun 2019 baru mencapai 6,19 persen, berada dibawah capaian Provinsi dan Urutan ke-5 dari 13 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Kontribusi sektor industri pengolahan masih sangat kecil didalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mencapai 6,56 lebih tinggi 1 poin dari Tahun 2018;
- d. Daya saing daerah masih rendah pada Tahun 2019 berada pada urutan ke-5 dari 13 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Nilai Sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Poso masih rendah dimana pada tahun 2019 berada pada level CC, sementara target RPJMD akhir periode pada Level BB;
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru dilakukan evaluasi pada penyelenggaraan pelayanan RSUD Poso, belum diukur secara keseluruhan Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan dengan Pelayanan publik baik penilaian internal maupun penilaian Ombudsman.



#### **4.2.7 Penelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso**

RPJPD merupakan dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD merupakan pedoman penyusunan RPJMD dan bahkan merupakan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Mengingat peran penting dari RPJPD, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021, harus dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Poso 2005-2025.

Visi RPJP Kabupaten Poso 2005-2025  
“Kabupaten Poso Yang Aman, Damai,  
Sejahtera, Maju, Dan Berdaya Saing”

**Tabel 4.8**

#### **Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Poso**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
1. Mewujudkan Poso Yang Aman, Damai dan Sejahtera.	<p>a. Terciptanya kondisi aman dan damai bagi masyarakat merupakan kunci dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Poso menempuh langkah-langkah kebijakan: pertama, menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang penuh dengan keragaman budaya, adat istiadat, suku dan agama yang berpotensi dalam memicu terjadinya konflik sosial. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela Negara. Ketiga, mendorong peningkatan peran aktif Polri, TNI dan Lembaga Intelijen agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas.</p> <p>b. Terbangunnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Poso secara umum relatif cukup baik, relatif tenang, tidak ada pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kondisi ini tercipta karena peran serta aktif masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, yang dapat dibuktikan dengan kegiatan keamanan lingkungan (kamling) di setiap lingkungan berjalan baik. Namun demikian jika dilihat dari angka kriminalitas, terutama pencurian masih relatif</p>





<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	<p>rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Propinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>c. Meningkatkan kesejahteraan perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius</p> <p>d. Terbangunnya kembali infrastruktur pelayanan publik akibat konflik horizontal, infrastruktur prasarana jalan ke kantong-kantong produksi sebagai upaya memperlancar aksesibilitas baik secara ekonomi maupun sosial yang akan menghasilkan nilai tambah (<i>value added</i>) pembangunan dalam mendukung pemba-ngunan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Poso agar tercipta rasa aman dan nyaman menuju perdamaian yang hakiki. Ter-wujudnya penataan ruang jalan wilayah Kabupaten Poso untuk menghindari timbulnya konflik horizontal dalam rangka pemanfaatan ruang terutama antar Kabupaten perbatasan antar kecamatan, perbatasan antar desa. Maka dalam rangka penyerasian rencana tata ruang selalu dikaji ulang, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;	<p>a. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan ekonomi dengan melakukan peru-bahan struktur ekonomi melalui penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak yang di dukung oleh sektor pertanian, perke-bunan, perikanan, dan peternakan, sertaserta pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan.</p> <p>b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung oleh investasi oleh pemerintah maupun sektor swasta dalam membangun infrastruktur perekonomian daerah serta men-ciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat menarik minat investor untuk membuka usaha di daerah.</p> <p>c. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha</p>



<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	<p>masyarakat agar dapat memberdayakan dan memberi ruang untuk menggerakkan usaha kecil mikro dalam menopang perekonomian daerah. Hal ini tentunya harus didukung oleh usaha yang berskala besar melalui sistem bapak angkat atau pola kemitraan lainnya.</p> <p>d. Pengurangan, angka kemiskinan dengan alasan ekonomi di daerah serta membuka daerah-daerah yang terisolir merupakan dampak dari pembangunan pada berbagai bidang pembangunan dengan sasaran masyarakat miskin dan terisolir.</p> <p>e. Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Poso melalui pengolahan produk primer seperti hasil pertanian dalam arti luas sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (<i>value added</i>) produk.</p> <p>f. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui promosi potensi wisata agar dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal ini harus ditunjang dengan infrastruktur pengelola pariwisata daerah lebih baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.</p> <p>g. Pengembangan nilai-nilai luhur dan keragaman budaya daerah agar dapat meningkatkan nilai-nilai kondusif dan keharmonisan sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon era perubahan masa depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.</p> <p>h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan suatu daerah antara lain ditentukan oleh kesiapan infrastruktur/prasarana dan sarana yang memadai sebagai landasan untuk mencapai kemandirian dengan pembangunan prasarana transportasi diarahkan untuk mendukung aksesibilitas ekonomi masyarakat yang mengarah pada transaksi perdagangan sebagai motivasi sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang saling menguntungkan, menciptakan inovasi pelayanan, mendorong seluruh <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan. Mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasionalnya, mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang antar</p>



<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	<p>daerah, antar pulau, baik melalui darat, laut, maupun udara.</p> <p>i. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan permukiman yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh fasilitas permukiman yang dikelola secara profesional, kredibel, memadai dan efisien.</li><li>2) Pembangunan perumahan dan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang memperhatikan aspek tata ruang, fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Disamping itu peningkatan prasarana pendukung sektor pertanian seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan wilayah daerah irigasi, pemeliharaan yang terus menerus dalam rangka mendukung ketahanan pangan Kabupaten Poso menuju kemandirian daerah dalam upaya terwujudnya swasembada pangan.</li></ol> <p>j. Pembangunan ketenagaan listrikan diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan kemampuan pemerataan kebutuhan tenaga listrik maupun daerah lainnya karena tahun 2005 ini PLTA Sulewana dalam tahap pembangunan.</li><li>2) Pada daerah-daerah tertentu yang sulit jangkauannya dalam jaringan kabel dapat dilaksanakan dengan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik terutama melalui hidro mini, pembangkit listrik tenaga surya dalam skala kecil serta mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk tetap turut serta sebagai motor pembangunan ketenagaan listrikan di daerah ini tidak menyebabkan kelestarian di daerah ini terjadi dengan baik dan pemenuhan kebutuhan seluruh <i>stakeholders</i> penanganannya harus mengacu pada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.</li></ol>
3. Mewujudkan	a. Persaingan yang makin tinggi pada masa



<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
Masyarakat dan Mutu Produk Yang Berdaya Saing;	<p>mendatang menuntut peningkatan SDM dalam mutu produk dan kemampuan dalam penguasaan serta penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.</p> <p>b. Penguatan daya saing perekonomian secara global bertumpu pada penguatan sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha makro yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.</p> <p>c. Perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>d. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan hasil daerah yang dapat meningkatkan potensi daya saing sektor. Peningkatan tersebut diharapkan akan mewujudkan kabupaten Poso sebagai sentra produksi agribisnis yang berdaya saing. Dengan demikian diharapkan setiap program yang dilaksanakan diarahkan dalam upaya peningkatan produksi agribisnis dari masing-masing sektor unggulan.</p>
4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;	<p>a. Pemberdayaan SDA yang termasuk seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan dapat dilaksanakan secara selektif, rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan faktor manfaat dan fungsinya. Pendapatan dari pempadatan SDA dan SDL dilestarikan kembali guna sebagai wujud tanggung jawab untuk upaya pemulihan dan rehabilitasi lahan kritis serta pendapatan untuk kepentingan sekarang maupun yang akan datang. Demikian halnya pengelolaan SDA yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi. Dilaksanakan lebih selektif dan diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan sebagai input untuk produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah</p>



<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	<p>yang optimal bagi daerah dan masyarakat kabupaten. Tetap memper-timbangkan fungsi dan manfaat secara seimbang dan berkelanjutan. Disamping itu pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk tetap menjaga kelestarian. Fungsi daerah lingkungan air dan keberadaan air tanah; mempertimbangkan pasokan kebutu-han serta peningkatan efisien dan efektif; Tidak konsumsi dan penggunaan air; memperkokoh manajemen lembaga yang menangani SDA kelautan dalam rangka keterpaduan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak kalah pentingnya pula pengelolaan potensi SDA kelautan disamping pengawasannya tetap ditingkatkan peman-faatannya harus benar-benar terkoordinatif melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif. Penataan ruang kawasan pesisir terus dijalankan dan tetap dievaluasibaik secara keseluruhan maupun setiap zona-zona pemanfaatan dan pengendalian. Disamping itu pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kelanjutan daya gunanya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Menciptakan lingkungan hidup masyarakat yang ramah lingkungan diperlukan perhatian dan kepedulian baik dari pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan, dunia usaha dan masyarakat yang peduli dan mengambil bagian dalam memelihara lingkungan hidup sehat.</li><li>c. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis secara arif dan bijaksana dalam mewujudkan keserasian, keseimbangan, keselarasan, har-moni, penciptaan estetika lingkungan, dan keberlanjutan melalui pengembangan kebijaka-n strategis mengenai program ramah lingkungan dan lingkungan sehat, penerapan insentif dan dis-insentif terpadu dan sinergi dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rangka menciptakan peman-faatan ruang wilayah yang tepat guna, tepat sasaran, dantepat waktu.</li><li>d. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang dengan penetapan dan pengembalian fungsi</li></ul>





<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
	kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang dan pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Penegakkan Hukum dan HAM;	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah bagi kesinambungan pembangunan dan mempertahankan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li><li>b. Membangun mental aparatur pemerintah daerah dari cenderung bersifat penguasa (abdi negara) menjadi pelayan masyarakat (abdi masyarakat), serta terciptanya transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan demokratisasi dalam manajemen pemerintahan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang baik antara lain dapat di nilai dari berkembangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan swasta.</li><li>c. Peningkatan profesionalisme dan mental aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki moral dan kemampuan yang prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan dan menyele-nggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li><li>d. Peningkatan kesejahteraan aparatur daerah sehingga dapat hidup layak bagi kemanusiaan dan kelangsungan hidup keluarganya, memotivasi melalui pemberian penghargaan atas pengabdianya yang terbaik bagi masya-rakat dan negara serta mencegah timbulnya potensi terjadinya KKN dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, sekiranya terjadi maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>e. Upaya pemerintah daerah kabupaten Poso dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran sebagai landasan terciptanya pemerintah yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) ditempuh melalui kebijakan: pertama, pembuatan dan pembaharuan ter-hadap produk materi hukum yang telah ada khususnya Perda, agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Kedua, melaksanakan dan menerapkan produk</li></ol>



Misi	Tujuan dan Sasaran
	<p>atau ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten tanpa mengabaikan persamaan derajat masyarakat dimata hukum. Ketiga, Pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya mentaati ketentuan hukum yang ada, termasuk pembinaan mentalitas aparat penegak hukum.</p> <p>f. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya dan tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat memberikan makna dan bermanfaat memberi jaminan rasa keadilan, serta ketegasan dan kepastian hukum bagi segenap elemen masyarakat tanpa diskriminasi.</p> <p>g. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat di perdesaan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik nilai budaya masyarakat setempat yang menjadi responden atau target groupnya.</p> <p>h. Dibidang politik, upaya pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah Daerah Kabupaten Poso diarahkan pada terciptanya kekuatan masyarakat madani (<i>civilsociety</i>) yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila, ber-kembangnya nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (<i>egalitarianism</i>), anti kekera-san, toleransi politik serta keadilan yang orientasi kepada kepentingan masyarakat. Guna mewujudkan upaya pembangunan di bidang hukum, kebijakan yang ditempuh: Pertama, mendorong institusi-institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam politik secara benar. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan konsistensi pemerintah daerah dalam penegakkan hukum (<i>Law enforcement</i>)tanpa membedakan setiap subyek hukum. Ketiga, mendorong partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan anggotanya.</p>
6. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya	a. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek



<b>Misi</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
Manusia	melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara ber-kelanjutan. b. Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. c. Penyediaan kebutuhan dan mutu pelayanan dasar sosial yang memadai untuk mening-katkan pengetahuan dan keterampilan masya-rakat, sehat jasmaninya, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik teknologi maju maupun teknologi tepat guna, men-junjung tata nilai budaya bangsa yang luhur dalam membentuk rasa dan karsa setiap individu, yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. d. Merupakan gambaran tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Poso baik kecerdasan intelektual, emosional dan spritual sehingga dengan kecerdasan yang dimiliki masyarakat Poso dapat berkarya menghasilkan suatu karya nyata sebagai salah satu kontribusi dan partisipasi dalam mengisi pembangunan Kabupaten Poso.

Sumber: RPJPD Kabupaten Poso 2005-2025

Analisis terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Poso bertujuan untuk merencanakan pembangunan lima tahunan ke IV dengan jangka waktu 2020-2025. Berdasarkan dokumen RPJPD pada periode RPJMD IV, *Kabupaten Poso ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif regional, nasional dan internasional.*

Perekonomian berkembang dengan baik melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. Hal ini ditunjang oleh jaringan pasar yang kuat dan stabil, serta partisipasi masyarakat Poso yang tinggi dalam dunia usaha, produksi dan jasa. Sistem perekonomian yang berjalan mampu menciptakan persaingan yang sehat dan produktif, serta mampu berjalan dengan adil dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.



Sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi salah satu tonggak utama bagi terwujudnya Kabupaten Poso yang maju dan mandiri. Kualitas pendidikan yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, jasa dan produksi dan angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan dapat terserap secara maksimal dalam seluruh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini adalah hasil dari usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya dan juga mengikuti trend global dunia usaha dan persaingan angkatan kerja yang kian ketat dan menuntut kualifikasi yang makin tinggi dan ketrampilan yang lebih profesional.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dan eksploitasi sumber daya yang tidak terbaharukan mampu menjadi penyangga utama perekonomian Kabupaten Poso diluar pajak dan retribusi lainnya, sehingga terwujud kemandirian ekonomi di Kabupaten Poso. Konsep pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut didasari oleh adanya analisis multikriteria kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga tercipta keseimbangan pemanfaatan dan kesinambungan dalam hal ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata yang produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal. Demikian juga dengan pengelolaan wilayah daratan yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional.

Antisipasi terhadap pengembangan wilayah pemukiman tidak lagi memanfaatkan lahan sawah tetapi terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten, integritas ekologi, topografi dan infrastruktur, sehingga tercipta keteraturan wilayah pemukiman dan kemudahan bagi instalasi komponen infrastruktur dan kemudahan akses dan keindahan serta kerapian wilayah permukiman.

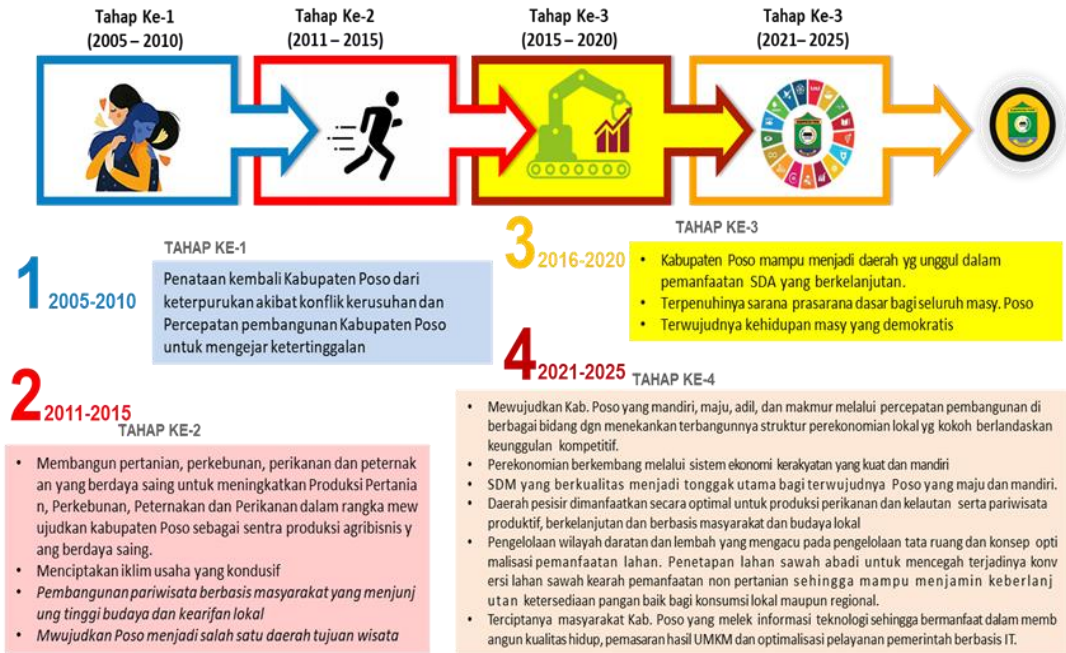
Terciptanya masyarakat Kabupaten Poso yang sadar/melek informasi teknologi sehingga bermanfaat bagi kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM dan berpartisipasi aktif dalam percaturan ekonomi regional dan global yang bergerak kian cepat serta Pelayanan Pemerintahan berbasis teknologi informasi. Hal ini didukung dengan tersedianya infrastruktur dan pelayanan jasa teknologi informasi yang mendukung pelayanan yang cepat dan profesional dibidang produksi





## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026

dan distribusi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain yang pada gilirannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Poso sendiri. Terciptanya Kabupaten Poso yang maju dan modern dalam koridor ketahanan budaya lokal yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**Gambar 4.9**  
**Tahapan RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025**

### 4.2.8 Penelaah Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Poso.

Dimana Analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa dari 319 indikator TPB, pemerintah pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 279, 209, 185 dan 183 Indikator. Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kabupaten Poso mampu melaksanakan indikator TPB meliputi 17 tujuan dan 168 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten, dengan kategori sebagai berikut:

- Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 55 indikator atau 32,74 persen;





- Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional sebanyak 16 indikator atau 9,52 persen;
- Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 26 indikator atau 15,48 Persen;
- Indikator yang belum memiliki data sebanyak 71 indikator atau 42,26 persen.

Hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026 menjelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB dimasa depan dan capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebelum penjelasan secara detail tentang capaian indikator TPB pada setiap OPD,

Berdasarkan isu strategis yang terjaring saat dilakukan analisis terhadap capaian indikator TPB dan isu pembangunan daerah lainnya yang terjaring saat pelaksanaan uji publik. Isu strategis yang terjaring selanjutnya dikelompokkan dan dikaji berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan sepuluh unsur sesuai pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut selanjutnyadiperoleh isu prioritas sebagai berikut:

#### **4.2.8.1 Isu Prioritas Bidang Lingkungan**

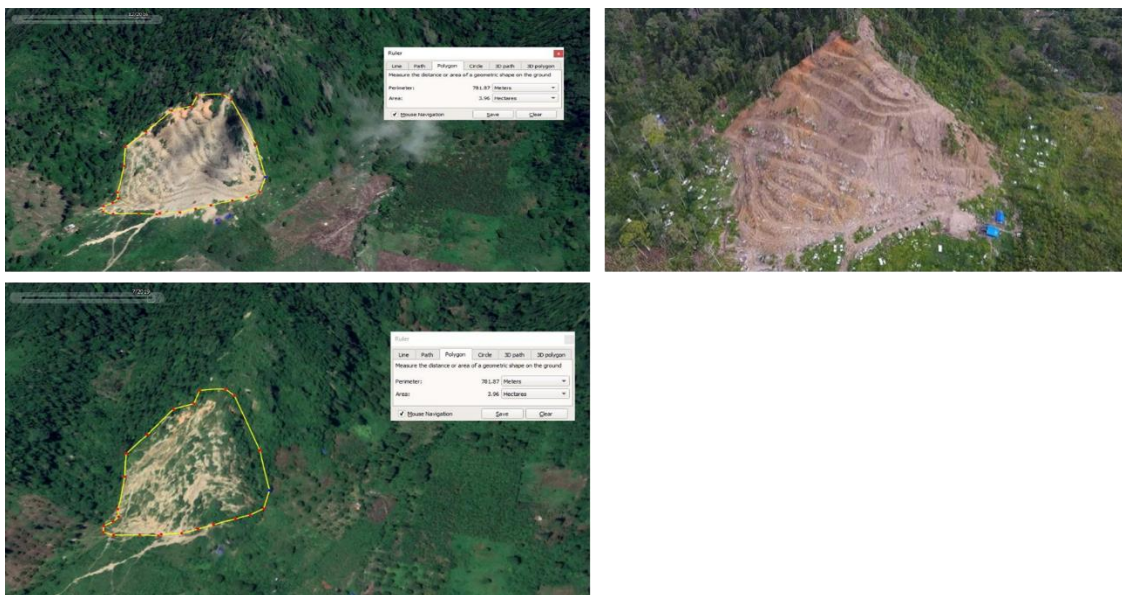
- **Penambangan Tanpa Izin**

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan taman nasional di Indonesia yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman Nasional ini secara resmi meliputi kawasan 217.991.18 ha (sekitar 1.2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km<sup>2</sup> atau 2.4% dari sisa hutan Sulawesi yakni 90.000 km<sup>2</sup>). Kawasan Taman Nasional Lore Lindu secara administratif berada di Kabupaten Donggala (Kecamatan Kulawi, Sigi biromaru, Palolo dan Pipi koro) dan Poso (Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah, Lore Timur, Lore Piore, Lore Barat dan Lore Selatan) – Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengertian Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan, bahwa Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aturan hukum bagi pelaku yang berperan vital dalam pertambangan emas tanpa izin tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan.

Diperkirakan jumlah penambang di lokasi PETI Dongi-Dongi saat ini mencapai sekitar 4.000 orang. Saat ini, area penambangan terpantau semakin luas. Pada awal penambangan illegal hanya di kawasan areal sekitar 15 hektare, kini meluas sampai ke kebun kakao milik masyarakat. Penambangan melakukan aktivitas pada pagi hari dan malam hari. Lubang-lubang rep (tanah/pasir yang mengandung emas) yang dahulu telah ditutup, kini semuanya dibuka kembali oleh para penambang. Jumlah lubang rep saat ini sudah mencapai ribuan lubang (Antara, 2021).



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, Tahun 2021

**Gambar 4.10 Kondisi Tambang Tanpa Izin di Dongi-Dongi**



• **Akses Terhadap Air Minum**

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Poso belum dapat dimaksimalkan. Hasil penyaringan isu menunjukkan bahwa akses terhadap air minum maupun kualitas air minum belum memadai. Jumlah pelanggan PDAM yang dilayani sampai tahun 2020 berdasarkan data dari PDAM Poso tercantum pada Tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Sambungan PDAM Poso Tahun 2021**

No	Lokasi	Jumlah Sambungan	Sambungan Aktif	Sambungan Non Aktif	Jumlah Kk
1	Pusat Poso	8.327	5.704	2.623	11.869
2	Cabang Tentena	2.648	2.127	521	462
3	Cabang Pendolo	1.142	854	288	511
4	Cabang Wuasa	821	442	379	944
5	Cabang Tambarana	1.088	219	869	1.205
6	Cabang Gintu	628	616	12	395
	<b>J U M L A H</b>	<b>14.654</b>	<b>9.962</b>	<b>4.692</b>	

Sumber : PDAM Kab Poso

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2019, dari 380 BUMD Penyelenggara SPAM dimulai dari BUMD Penyelenggara SPAM nilai kinerja tertinggi sampai terendah, PDAM Poso tergolong kurang sehat (Nilai 2,51). Untuk kebutuhan air minum perkotaan dapat dihitung sampai tahun 2027 sesuai Tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Kebutuhan Air Domestik Daerah Perkotaan Poso**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jumlah Penduduk (Jiwa)	48.056	48.636	49.215	49.795	50.374	50.954	51.533
Tingkat Pelayanan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	38.445	38.909	39.372	39.836	40.299	40.763	41.226
Keb. Air (lt/orang/hari)	70	70	70	70	70	70	70
Keb. Air Domestik (lt/hari)	2.691.160	2.723.608	2.756.056	2.788.504	2.820.952	2.853.400	2.885.848
Keb. Air Domestik (lt/det)	31,15	31,52	31,90	32,27	32,65	33,03	33,40



Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Keb. Air Non Domestik (lt/det)	6,23	6,31	6,38	6,46	6,53	6,61	6,68
Keb. Air Total (lt/det)	37,38	37,83	38,28	38,73	39,18	39,63	40,08
Kehilangan Air	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Produksi Air	44,85	45,39	45,93	46,48	47,02	47,56	48,10

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, Tahun 2021

- **Kebencanaan**

Dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten Poso Tahun 2018-2021 salah satu indikator untuk mengukur target kebencanaan adalah jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Target pencapaiannya untuk penyusunan dokumen kebencanaan tersebut, tahun 2017 2 dokumen, dan tahun 2018 s/ 2021 masing-masing 1 dokumen. Target tersebut terlampaui pada tahun 2018, ditargetkan 1 dokumen dan realisasinya 8 dokumen. Selebihnya target belum tercapai.

**Tabel 4.11**

**Pencapaian Target Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional Dan Daerah.**

Target/Indikator (Target Perpres No.59 tahun 2017)	Baseline (2016)	Target Pencapaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	2	1	1	1	1
		Realisasi (%)				
	Realisasi	0	8	0	0	-
	Gap	-2	+7	-1	-1	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, Tahun 2021

Dalam Lokakarya penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Poso 2021 juga terungkap, bahwa (1) tingkat kesadaran kesiapsiagaan bencana masyarakat di Kabupaten Poso terbilang masih rendah dan (2) dan belum dilakukan revisi peta rawan bencana.

Dokumen RAD TPB Kabupaten Poso Tahun 2018-2021 mencatat, terdapat empat jenis bencana yang sering terjadi di



kabupaten Poso maupun wilayah potensial terdampak, selengkapnya terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.12**  
**Jenis Bencana dan Wilayah Potensi Terdampak di Kabupaten Poso**

No	Jenis Bencana	Wilayah Potensi Terdampak	Keterangan
1	Tanah Longsor	Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Pamona Timur, Pamona Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, dan sebagian daerah Pamona Puselemba.	
2	Banjir	Kecamatan Lore Timur, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Selatan, Lore Selatan, Lore Tengah, dan ada sebagian Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Kecamatan Pamona Barat	
3	Gempa Bumi	Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Timur, Pamona Barat, dan Pamona Selatan.	Aktivitas gempa bumi di Kabupaten Poso dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro yang melintasi wilayah barat kabupaten serta patahan mikro Tambarana yang memanjang berarah Utara – Selatan ditengah wilayah Kabupaten Poso
4	Abrasi	Poso tersebar di sepanjang pantai dan danau di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan Kecamatan Pamona Tenggara	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, Tahun 2021





Selama tahun 2020 peristiwa alam berupa bencana terjadi beberapa kali di Kabupaten Poso (Mosintuwu.com). Peristiwa tersebut seharusnya menjadi acuan agar dalam perencanaan pembangunan sebaiknya memperhatikan aspek geospasial dengan membuat tata ruang wilayah yang mempertimbangkan mitigasi bencana, dan membuat kebijakan yang tidak beresiko merusak lingkungan. Banjir dan longsor menjadi langganan warga. Setiap tahun hingga tahun 2020, di wilayah Kecamatan Poso Kota dan sekitarnya, Lage dan Poso Pesisir mengalami banjir. Sementara itu longsor paling sering terjadi di wilayah Lore. Bencana terbaru yang dialami warga di tahun 2020 adalah terendamnya ratusan hektar sawah karena uji coba pintu air PLTA milik PT. Poso Energy. Sejak April tahun 2020, PT Poso Energi melakukan uji coba buka tutup pintu air bendungan PLTA Poso I. Akibat uji coba itu permukaan air danau naik hingga 50cm.

Data yang dikumpulkan oleh dinas pertanian kabupaten Poso awalnya menyebutkan 260 hektar sawah yang terendam di desa-desa di sekeliling danau Poso. Hampir sama dengan perkiraan yang disampaikan pihak PT Poso Energi yakni 206 hektar. Kenaikan permukaan air danau saat ini, tidak seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengalaman para petani, air danau sudah surut pada bulan Juli, dimana mereka akan menanam dan panen sekitar bulan Oktober atau November. Akibat terendamnya sawah, ratusan petani mengalami kerugian ekonomi untuk kebutuhan hidup termasuk terancam ditariknya jaminan rumah dan tanah untuk modal pinjaman pengolahan sawah yang tidak bisa dikembalikan. Humas PT Poso Energi menyebut pihaknya akan mengganti rugi 300 hektare lahan sawah dan lahan peternakan kerbau yang terendam air akibat uji coba pintu air PLTA Poso I. Selain lahan persawahan, akibat uji coba pintu air milik perusahaan tersebut juga mengakibatkan 94 ekor kerbau mati, dan sebagian berpindah lokasi sehingga mengganggu lahan milik orang lain.

Banjir bandang juga menerjang Desa Lengkeka, kecamatan Lore Barat tahun 2020, dimana air bah turun dari kawasan pegunungan di sebelah utara Desa Lengkeka. Banjir bandang sebelumnya dialami wilayah ini pada tahun 2007. Pada bulan Mei 2020, sebanyak 5 desa di kecamatan lembah Lore, yakni desa Wuasa, Banyusari, Kaduwaa, Alitupu, Watumaeta dan Talabosa



terisolir akibat longsor yang menutup seluruh jalur keluar masuk wilayah itu akibat luapan Sungai Lariang dan tiga sungai yang membentuk Sungai Lariang. Ratusan rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 75cm – 1m. Banjir ini juga menyebabkan, puluhan hektare sawah dan lahan sayuran rusak berat akibat diterjang banjir bandang.

Luapan sungai Poso akibat hujan deras juga sempat merendam sebagian kelurahan di kecamatan Poso Kota dan Poso Kota Selatan, 4 desa di kecamatan Lage. Data BPBD kabupaten Poso tahun 2020 menyebutkan 17 desa terkena banjir dengan total warga terdampak sebanyak 1,842 jiwa. Sebanyak 679 orang di desa banyusari kecamatan Lore Utara harus mengungsi karena rumah mereka rusak akibat banjir bandang. Sementara di desa Tangkura, sebanyak 400 kepala keluarga memerlukan bantuan karena rumah mereka terendam banjir, sebagian rusak. 206 orang warga dikelurahan Sayo, dan 163 di kelurahan Ranononcu terdampak banjir akibat meluapnya sungai Poso.

Sementara itu peristiwa gempa bumi terjadi sebanyak 44 kali selama tahun 2020. Gempa bumi berkekuatan M 4,5 dan 4,4 SR terjadi pada tanggal 19 dan 28 Maret serta Mei 2020, di kawasan Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), episenter gempa bumi berlokasi di titik koordinat 1,25 Lintang Selatan (LS) dan 120,57 Bujur Timur (BT), kedalaman pusat gempa (hiposentrum) tersebut adalah 10 Km.

- **Sanitasi Layak**

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana salah satu indikator TPB, khususnya pada sector lingkungan adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Dalam RPJMN 2015 – 2019 dan Pemerintah Indonesia diamanatkan untuk memenuhi target akses sanitasi layak 100%, dimana hal itu juga tertuang dalam target SDGs sesuai Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang SDGs.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Khusus wilayah perdesaan, fasilitas sanitasi yang menggunakan leher angsa dengan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah masih dikategorikan akses sanitasi layak.

Di Kabupaten Poso, posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak adalah 90,31%, tertinggi kedua pada lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah setelah Kota Palu. Nilai persentase ini berada di atas nilai rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah (74,61%) bahkan rata-rata nasional (79,53%), sebagaimana tercantum pada Gambar 4.11. Meskipun berada pada posisi yang relatif tinggi, akan tetapi karena belum mencapai target 100%, maka masih menjadi isu yang strategis.



Sumber: BPS, 2020 (data diolah kembali).

**Gambar 4.11**  
**Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Tengah**

Ketersediaan sanitasi yang layak seperti halnya ketersediaan air, berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, karena kedua hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Minimnya akses air minum dan sanitasi, tidak hanya berdampak terhadap beberapa kejadian penyakit seperti diare, akan tetapi juga merambah ke hal lainnya seperti stunting yang nantinya akan mempengaruhi produktifitas dan peningkatan ekonomi. Menurut WHO, sanitasi yang buruk akan mengurangi kesejahteraan manusia, perkembangan social dan ekonomi bahkan hilangnya kesempatan pendidikan.

#### 4.2.8.2 Isu Prioritas Bidang Sosial, Hukum dan Tata Kelola

- **Kemiskinan**

Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Poso Tahun 2018-2021, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Kabupaten Poso, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang juga mengalami penurunan dari 18,16% pada tahun 2016 menjadi 16,71% pada tahun 2018 (BPS, 2019). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 42.230 ribu penduduk pada tahun 2016 menjadi 41.740 ribu penduduk pada tahun 2018 yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 490 jiwa/tahun.

Jika merujuk pada baseline 2016 tentang angka kemiskinan tercatat 18,16%. Target dan realisasi pencapaiannya dari tahun 2017 – 2019 sama dengan realisasi. Namun pada tahun 2020 target capaiannya 15,24%, realisasi capaiannya 15,45. Terdapat gap 0,79%. Dokumen RAD TPB Kabupaten Poso Tahun 2018-2021 menyebutkan, program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB).

**Tabel 4.13**  
**Target Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan,**  
**Realisasi dan Gap**

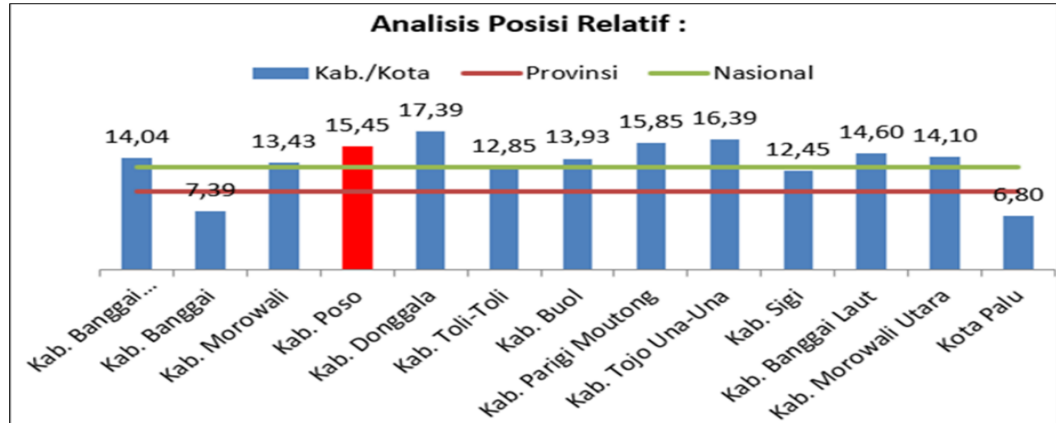
Target/Indikator (Target Perpres No.59 tahun 2017)	Baseline (2016)	Target Pencapaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	18,16	17,16	16,71	15,65	15,24	15,10
		Realisasi (%)				
	Realisasi	17,16	16,71	15,65	15,45	-
	Gap	0	0	0	0,79	-

Sumber: Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten Poso Tahun 2018-2021 dan BPS Kabupaten Poso 2020, KLHS RPJMD 2021-2026.

Jika menggunakan analisis identifikasi masalah persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016–2020 memakai empat pendekatan, yakni (1) Analisis Posisi Relatif; (2) Analisis Perkembangan Antar Waktu; (3) Analisis Efektifitas dan (4) Analisis Relevansi .

Berdasarkan analisis posisi relatif, jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, posisi Kabupaten Poso pada tahun 2020 berada pada rangking keempat

dengan angka kemiskinan 14,45%. Capaian ini masih lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 13,06%. Demikian halnya dengan rata-rata angka kemiskinan nasional yang telah mencapai 9,76%. Selengkapnya terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS/ Susenas 2020 & TNP2K 2020, KLHS RPJMD, 2021.

**Gambar 4.12**

**Analisis Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Poso  
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Sulawesi  
Tengah**

Namun berdasarkan analisis perkembangan antar waktu, (tahun 2016 - 2020) terdapat penurunan angka kemiskinan yang cukup konsisten di Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Poso sebesar 16,71 persen dan menjadi 15,45%, dimana selengkapnya terlihat pada grafik pada Gambar berikut.



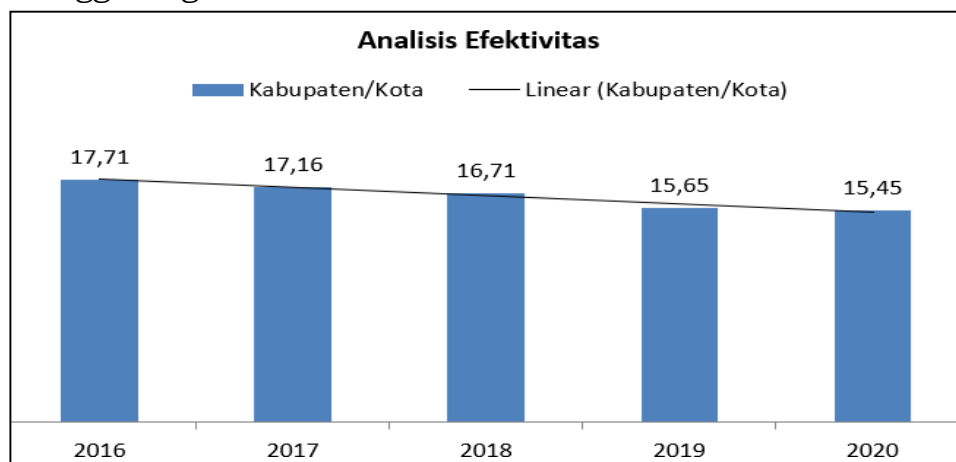
Sumber: BPS/ Susenas 2020 & TNP2K 2020

**Gambar 4.13**

**Analisis Perkembangan Antar Waktu Kemiskinan di Kabupaten  
Poso**



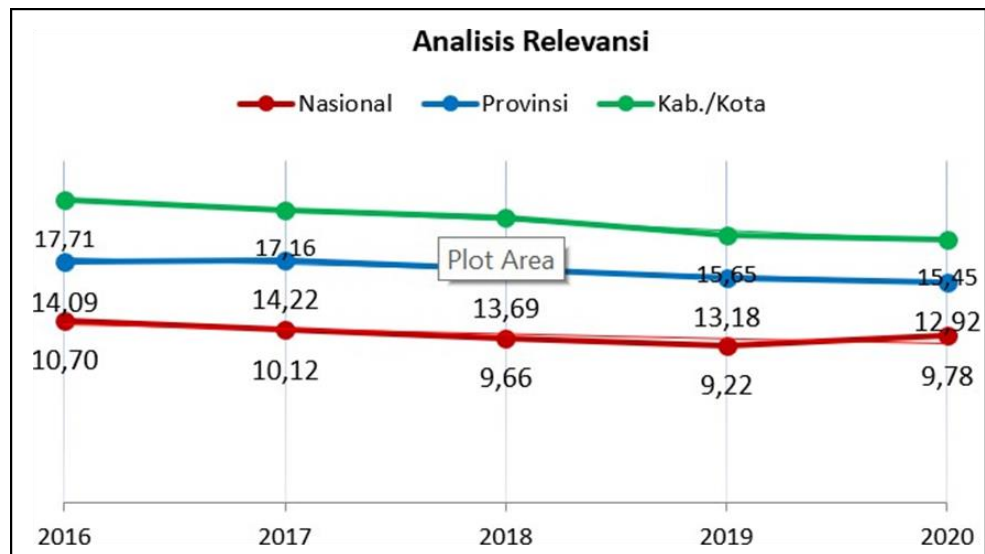
Ditinjau dari aspek analisis efektivitas, dalam kurun waktu lima tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Poso, capaiannya 17,71 persen pada tahun 2016 turun menjadi 15,45 % pada tahun 2020 (hanya turun 2,26%), sebagaimana tercantum pada Gambar 4.13. Penurunan angka kemiskinan secara moderat selama lima tersebut (2,26%). Jika diproyeksikan lima tahun ke depan, Kabupaten Poso belum bisa masuk dalam kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di bawah 10%, kecuali jika ada kebijakan yang bersifat *diskresi* atau *extra ordinary* untuk menanggulangi kemiskinan.



Sumber: BPS/ Susenas 2020 & TNP2K 2020

**Gambar 4.14**  
**Analisis Efektivitas Penurunan Angka Kemiskinan  
di Kabupaten Poso**

Berdasarkan analisis relevansi, angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun di Kabupaten Poso cenderung menurun sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah maupun penurunan kemiskinan secara nasional (Gambar 4.14). Namun penurunan tersebut seperti tertulis pada dokumen RAD TPB Kabupaten Tahun 2018-2021, “penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat”. Artinya penurunan kemiskinan belum terlalu signifikan dari apa yang diharapkan.



Sumber: TNP2K 2020

**Gambar 4.15**  
**Analisis Relevansi Penurunan Angka Kemiskinan**  
**Di Kabupaten Poso**

- **Pendidikan**

Jika merujuk pada dokumen Skenario Pencapaian SDGs di Kabupaten Poso, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah), realisasinya belum mencapai 100 persen sebagaimana target pencapaian SDGs. Masih terdapat gap 16,59% pada tahun 2018 dan 18,48% pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut perlu dukungan Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

**Tabel 4.14**  
**Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat.**  
**(Kelompok Penduduk 40% Terbawah)**

Indikator	Capaian			Rate/ thn	Target SDGs 2030
	Satuan	2018	2019		
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	%	83,41	81,52	5,23	100
GAP		16,59	18,48		

Sumber : Skenario Pencapaian SDGs di Kabupaten Poso

- **Kualitas data**

Salah satu masalah dalam pencapaian TPB dengan sejumlah indikator capaiannya dalam analisis penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Poso 2021 adalah sulitnya menemukan data yang akurat dan valid. Kesulitan ini berimplikasi terhadap penyusunan target-target pencapaian program maupun kesulitan dalam analisis dan memproyeksikan kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan. Hal yang harus dipahami adalah, membangun dengan data itu mahal, namun akan lebih mahal bila membangun tanpa data, data yang akurat dan valid.

#### 4.2.8.3 Isu Prioritas Bidang Ekonomi

- **Akses layanan Energi yang terjangkau**

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

**Tabel 4.15**  
**SDGs Tujuan 7 Terkait dengan Energi**

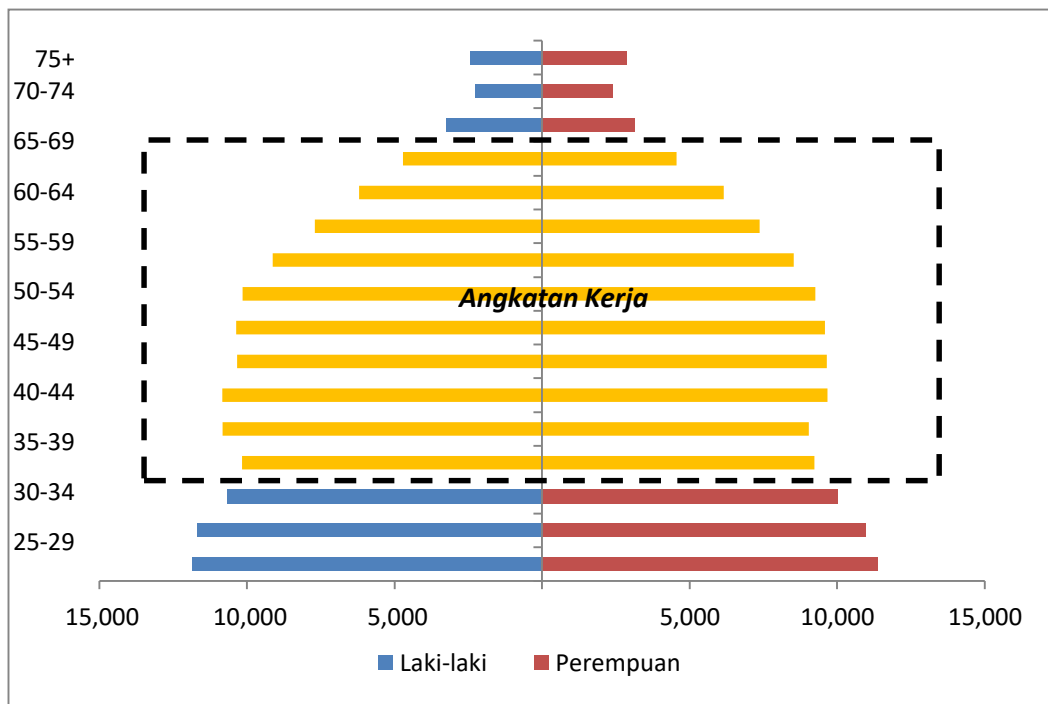
Target	Nama Indikator	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU "MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA"</b>								
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1* Rasio elektrifikasi.	% (Persen)	92,07	94,94	89,44			
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.	kWh	133	161	145			
	7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	SR (Sambungan Rumah Tangga)						
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.	NA	104,113,072					

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa konsumsi listrik serta rasio elektrifikasi Kabupaten Poso pada tahun 2018 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019 belum ada data. Hal tersebut karena kewenangan pembagian energi listrik

yang berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tingkat Provinsi.

- **Ketenagakerjaan dan UMKM**
  1. **Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.



Sumber : BPS, KLHS RPJMD, 2021

**Gambar 4.16**  
**Piramida Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Kabupaten Poso memiliki angkatan kerja yang sangat tinggi dapat dilihat pada grafik di atas. Tingginya angkatan kerja suatu daerah akan menimbulkan beberapa masalah yaitu:

a. *Rendahnya kualitas tenaga kerja*

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian

besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

*b. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja*

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

*c. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata*

Sebagian besar tenaga kerja berada di wilayah perkotaan, sementara di wilayah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

*d. Pengangguran*

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat, sehingga pengangguran akan semakin banyak.

## 2. UMKM dan Dana Desa

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tabel 4.16. menampilkan data UMKM yang berada di Kabupaten Poso.





**Tabel 4.16  
Data UMKM yang Berada di Kabupaten Poso.**

<b>Kecamatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pamona Selatan	593	594	602	612	647
Pamona Barat	306	308	318	333	358
Pamona Tenggara	724	728	735	752	762
Pamona Utara	891	926	931	951	966
Pamona Pusalemba	835	887	907	950	1,015
Pamona Timur	481	520	535	547	554
Lore Selatan	124	152	156	173	175
Lore Barat	149	166	170	179	183
Lore Utara	170	172	185	200	212
Lore Tengah	85	85	90	102	105
Lore Timur	50	51	57	69	74
Lore Peore	167	181	191	206	209
Poso Pesisir	801	834	844	865	880
Poso Pesisir Selatan	379	391	401	424	429
Poso Pesisir Utara	203	239	254	272	292
Poso Kota	1558	1794	1824	1876	1960
Poso Kota Selatan	628	1353	1373	1446	1524
Poso Kota Utara	1360	1451	1469	1504	1557
Lage	1117	1149	1159	1174	1193

Sumber : BPS 2020

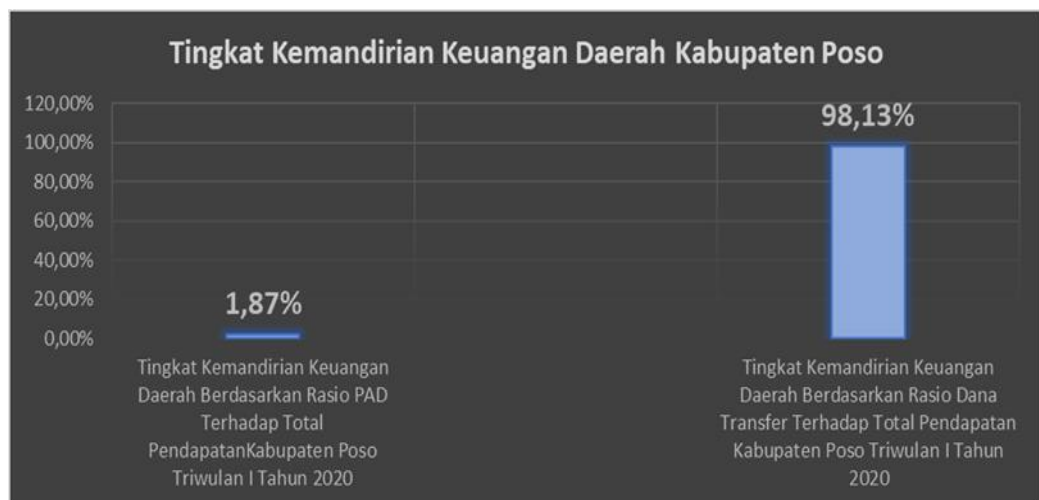
Banyaknya jumlah Usaha Mikro disuatu daerah atau Kabupaten akan mencerminkan tingginya penyerapan tenaga kerja. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara khusus dan peningkatan serta kemandirian pendapatan anggaran daerah. Peningkatan jumlah UMKM juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi desa untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian warganya. Namun peluang untuk memanfaatkan dana desa untuk pengembangan UMKM belum dimanfaatkan. Karena warga desa hanya

mengetahui dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Adapun pemanfaatan dana desa selain untuk infrastruktur prosentasinya masih sangat kecil. Padahal dana desa dapat digunakan untuk pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dapat berupa pengembangan UMKM.

- **Kemandirian Keuangan Daerah**

Jika merujuk pada laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan 1 Tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Poso Triwulan I Tahun 2020 capaiannya hanya 1,87% untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Poso. Sementara Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Dana Transfer Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Poso Triwulan I Tahun 2020 sebesar 98,13 %. Data selengkapnya terlihat pada grafik pada Gambar berikut.



Sumber: Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan 1 Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Tengah

**Gambar 4.17**

**Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Poso**

Jika dianalisis grafik pada Gambar tersebut, kemampuan Pemerintah Kabupaten Poso untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah hanya 1,87%. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Poso masih sangat tergantung kepada dana transfer untuk membiayai rencana pembangunan seperti



yang ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Poso. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Dana Transfer Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Poso pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar 98,13%.

Kecenderungan selama ini untuk daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya rendah selalu mencari terobosan untuk menambah sumber- sumber pendapatan asli daerah. Hal yang harus diwaspadai dengan kecenderungan tersebut, daerah terkadang mencari sumber-sumber pendapatan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan hidup khususnya daya dukung dan daya tampung. Alasan Pendapatan Asli Daerah selalu dijadikan sebagai argumentasi pembenaran.

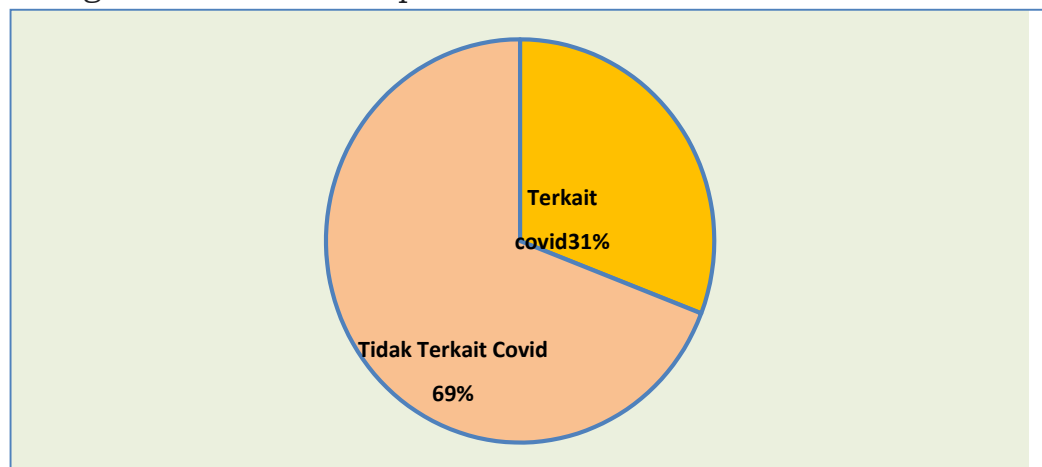
#### **4.2.8.4 Isu Prioritas Global dan Lokal**

- **Pandemi Covid-19 (Isu Global)**

Covid-19 merupakan satu penyakit yang awalnya berkembang di Negara China khususnya di Wuhan yang selanjutnya menyebar di seluruh dunia. Penyebab penyakit ini berawal dari SARS-CoV-2., diduga SARS- Cov bersumber dari kelelawar dan ditularkan ke manusia. Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai pandemi ini dengan mewajibkan masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan lainnya yang semuanya bertujuan untuk keamanan masyarakat dari penyebaran virus ini. Kebijakan lainnya pemerintah mengubah kebijakan fiskal untuk membiayai program kesehatan penduduknya dan kegiatan ekonomi, agar krisis ekonomi dan sosial tidak meluas. Penyebaran covid-19 ini membuat masyarakat ketakutan untuk melakukan aktifitas sosial maupun ekonomi. Efeknya pengunjung di pasar makin menurun, karena bahaya terpapar virus Covid-19 lebih besar. Relasi sosial antara masyarakat makin berjarak, akibat adanya aturan lebih baik diam dirumah dibanding keluar rumah. situasi ini membuat hubungan silaturahmi makin jauh, ditambah lagi pendapatan menurun dan efeknya kriminal akan meningkat, karena mereka butuh makan dan lainnya. Di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemutusan infeksi pandemi ini dengan berbagai cara, termasuk Kabupaten Poso. Pemerintah dan peran masyarakat Kabupaten Poso telah bersama-sama berupaya memutus pandemi dengan memberi

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (Testing/pemeriksaan dini, Tracing/Pelacakan, dan Teatment/Perawatan).

Pandemi Covid-19 ini menyebabkan perlambatan pencapaian berbagai target SDGs yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya refocusing anggaran APBD ke anggaran penanganan Covid-19. Dari berbagai indikator TPB di Kabupaten Poso, sebanyak 31% yang terkait dengan Covid-19 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.18.



Sumber : KLHS RPJMD 2021-2026

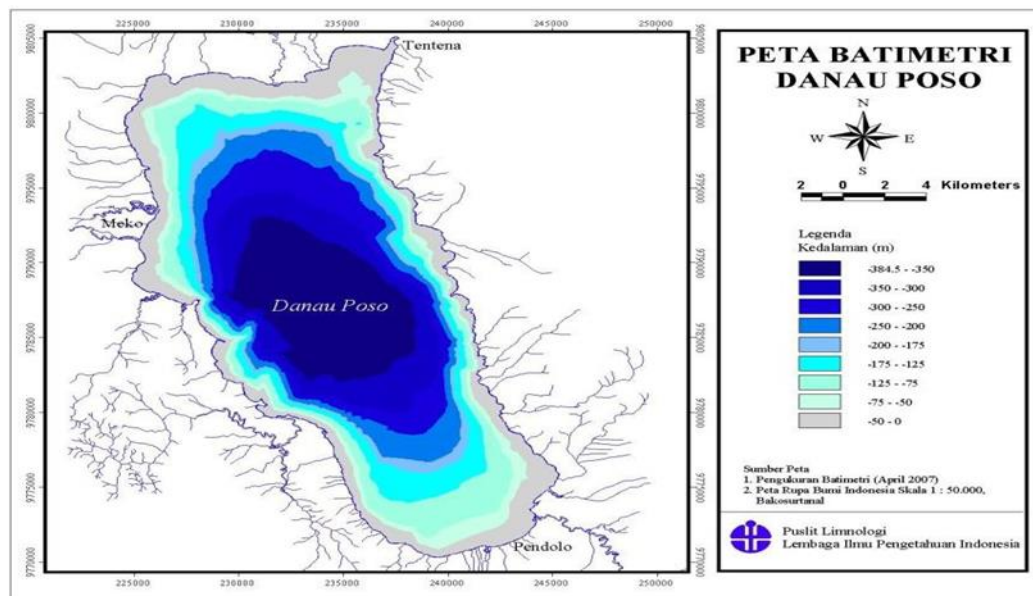
**Gambar 4.18**  
**Korelasi Indikator TPB dan Covid-19**

- **Danau Poso (Isu Lokal/Spesifik Daerah)**

Danau Poso merupakan salah satu danau purba yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia, karena keragaman dan keunikan biotanya. Danau ini merupakan lembah celah bumi yang tergenang, terbentuk karena adanya gerakan lapisan kulit bumi (Whitten *et. al.*, 1987). Danau Poso ini terluas ketiga setelah Danau Toba dan Towuti serta danau terdalam kedua setelah Danau Matano. Menurut Lukman & Ridwansyah (2009), danau Poso memiliki luas 368,92km<sup>2</sup>, panjang garis pantai mencapai 127km, sedangkan kedalaman maksimumnya 450 meter. Danau ini berada pada ketinggian 500 dpl (di atas permukaan laut), dan memiliki tingkat kesuburan rendah, digolongkan sebagai danau oligotrofik.

Berdasarkan hasil penelitian Suryono & Lukman (2009), kondisi kualitas air Danau Poso dicirikan oleh suhu yang berkisar

antara 27,0–28,8°C, pH cenderung alkalin (8,25 -8,60), konduktivitas antara 0,066-0,113 mS.cm<sup>-1</sup>, tingkat kecerahan 10 meter, kadar oksigen terlarut cukup tersedia (5,91–7,80 mg.l<sup>-1</sup>), dan bersifat air lunak (kesadahan total <75 mg.l<sup>-1</sup>CaCO<sub>3</sub> eq.). Berdasarkan data COD menunjukkan kondisi yang masih alami. Selanjutnya Lukman dan Ridwansyah (2009) melakukan pengukuran bathimetrik Danau Poso dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Lukman & Ridwansyah, 2009

**Gambar 4.19**  
**Peta Bathimeterik Danau Poso**

Berdasarkan indeks status kesuburan (TSI; *Trophic State Index*) Carlson dan kandungan khlorofilnya, perairan Danau Poso masih tergolong oligotrofik, meskipun kadar Total Nitrogen (TN) dan Total Phosphor (TP) yang terukur pada muara-muara sungai yang menjadi inlet Danau Poso menunjukkan kadar yang relatif tinggi (Suryono & Lukman, 2009).

Danau Poso memperoleh suplai air dari beberapa sungai besar yaitu, Koro Kodina, Koro Panjo, Koro Owini, Koro Meko, Koro Salukaia, Koro Wimbi. Pada musim hujan terjadi penggenangan sebagian wilayah daratan yang lebih rendah yang berada di daerah-daerah yang dekat dengan muara-muara sungai. Daerah genangan ini memiliki fungsi penting bagi dinamika populasi ikan di Danau Poso. Air danau Poso ini





bermanfaat, baik untuk pertanian, domestik, hingga pembangkit listrik.

Kekayaan flora fauna danau ini amat berlimpah. Beberapa jenis tumbuhan air ditemukan di Danau Poso, terutama di daerah perairan outlet danau yang dangkal dan agak tenang, yaitu: Teratai (*Nymphaea sp*), *Azolla pinata*, *Salvinia molesta*. Terdapat beberapa jenis fitoplankton yang dominan di Danau Poso menurut Whitten *et al.* (1987) yaitu: *Staurastum*, *Melosira*, *Botryococcus*, *Microcystis*, *Navicula*. Secara umum hewan-hewan yang menghuni danau Poso dapat dikategorikan menurut mikrohabitat yang mereka tempati (Whitten *et al.*, 1987) yaitu: Neuston mencakup hewan yang dapat hidup dipermukaan air dengan didukung oleh tegangan permukaan. Nekton mencakup hewan yang dapat berenang misalnya ikan. Zooplankton yang mencakup hewan yang hanyut terbawa arus air atau mempunyai kemampuan berenang yang lemah. Bentos mencakup hewan yang erat terasosiasi dengan dasar danau.

Beberapa jenis ikan endemik Danau Poso yaitu: ikan *Adrianichthys poptae*, *Adrianichthys kruyti*, *Adrianichthys oophorus*, *Adrianichthys roseni*, *Nomorhamphus celebensis*, *Tamanka sarasinorum*, *Weberogobius amadi*, *Anguilla sp*, *Oryzias nigrimas*, dan *Oryzias orthognathus*, *Oryzias nebulosus*. Beberapa jenis dari ikan endemik tersebut tidak ditemukan lagi hingga saat ini diduga kuat jenis ikan tersebut telah punah (Whitten *et al.*, 1987; Kottelat, 1990; Kottelat *et al.*, 1993; Parenti, 2008 dan Parenti, 2010). Danau Poso juga memiliki potensi pengembangan perikanan sidat di Indonesia. Sidat (*Anguilla spp.*) adalah jenis ikan katadromus, yaitu ikan yang melakukan pola kehidupan dominan di perairan tawar, namun pada saat bereproduksi yaitu untuk memijah akan melakukan ruaya ke laut dalam. Berdasarkan penelitian terdahulu di Perairan Poso, khususnya Muara Sungai Poso (Sugeha *et al.* 2001) ditemukan lima spesies yaitu *A. marmorata*, *A. bicolor pasific*, *A. celebensis*, *A. borneensis*, dan *A. interioris*.

Estimasi produksi sidat pada tahun 1970-an mencapai 22 – 54 ton/tahun (Sarnita, 1973). Sedangkan data tahun 1990–1995, produksi rata-rata sidat pada puncak musim penangkapan, Januari–Juni (Musim hujan) berkisar antara 1,75–9,83 ton/bulan, atau rata-rata 5,50 ton/bulan. Produksi sidat pada



tahun 1998 sekitar 30,5 ton (Laporan Dinas Perikanan Poso; *Tidak dipublikasikan*).

Berdasarkan data-data di atas tampak adanya kecenderungan penurunan produksi sidat dari Perairan Poso. Hal ini tampaknya terkait dengan penangkapan sidat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian, pada sisi lain perubahan-perubahan habitat baik pada alur ruaya maupun di habitat-habitat pembesarnya terus terjadi. Sementara itu penangkapan larva sidat yang memasuki Muara Sungai Poso, tampak berlangsung intensif (Muchsin, 2002), meskipun penangkapan tersebut umumnya hanya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Penangkapan sidat dewasa di outlet Danau Poso dan penangkapan larva di muara Sungai Poso, pada saatnya nanti akan menjadi aktivitas perikanan yang saling merugikan. Hal ini karena keberlangsungan perikanan larva tergantung pada sidat besar yang menjadi calon induk yang memijah, demikian sebaliknya kelimpahan sidat dewasa akan tergantung pada ketersediaan larva.

Perubahan habitat di wilayah Perairan Poso cukup banyak terjadi yang mengancam keberlangsungan komunitas sidat dan aktivitas perikananannya itu sendiri. Wilayah sisi barat Danau Poso, yang diduga sebelumnya merupakan wilayah transisi perairan-daratan (ATTZ; *Aquatic Terrestrial Transition Zone*) yang luas, pada saat ini telah menjadi lahan pertanian (Lukman & Ridwansyah, 2009). ATTZ adalah wilayah tepian danau yang dapat menjadi tempat sidat-sidat penghuni danau mencari makan. Acaman keberlangsungan sidat di Perairan Poso yang cukup signifikan adalah adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada alur Sungai Poso, yang memungkinkan terputusnya alur ruaya. Pada alur Sungai Poso terdapat jeram Sulewana sepanjang satu kilometer dengan ketinggian jatuh  $\pm 470$  m, yang dapat dimanfaatkan untuk PLTA (Chr. Kritijanto, 1999). Potensi ancaman penurunan populasi sidat dan konflik kepentingan antara penangkapan sidat dewasa di outlet Danau Poso dan penangkapan larva di muara Sungai Poso, serta perubahan habitat dan gangguan dalam proses ruayanya serta kepentingan pemanfaatan air danau untuk pengembangan energi listrik.



#### **4.2.9 Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Poso.**

Dokumen RTRW Kabupaten Poso merupakan acuan pengembangan tata ruang dan wilayah secara keseluruhan di Kabupaten Poso, dokumen ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Poso No. 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso 2012-2032. Sesuai dengan pasal 4 (empat) dan 5 (lima) perda tersebut yang masing-masing menjelaskan tentang kebijakan penataan ruang wilayah dan strategi penataan ruang di Kabupaten Poso dapat dirangkum pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.17  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Poso**

<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya;	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan sarana pelayanan kegiatan sosial ekonomi guna meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah sesuai hierarki PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL;</li><li>b. meningkatkan peran PKW Poso sebagai pusat orientasi koleksi dan distribusi untuk memfasilitasi pengembangan kegiatan perekonomian;</li><li>c. meningkatkan peran PKL Tentena dan PKL Wuasa sebagai pusat penghubung pergerakan barang dan orang dari PPK dan PPL menuju PKW dan pusat-pusat yang berada di atasnya;</li><li>d. meningkatkan peran PPK dan PPL sebagai pusat produksi kegiatan perekonomian; dan</li><li>e. mengembangkan PPK Gintu, PPK Doda dan PPL Lengkeka berbasis pariwisata budaya, sebagai pusat pelayanan sosial dengan fungsi utama pariwisata peninggalan budaya purbakala serta konservasi hutan.</li></ul>
2) Pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antar wilayah;	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan;</li><li>b. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata Danau Poso - Lembah Bada - Lembah Besoa dan Lembah Napu secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah;</li><li>c. meningkatkan interaksi ekonomi dan sosial antara pusat-pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana; dan</li><li>d. pengembangan sistem jaringan transportasi</li></ul>



<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
	darat (jalan kolektor dan jalan lokal) untuk mempererat keterkaitan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan wilayah pedalaman ( <i>hinterland</i> ) guna mendorong percepatan pertumbuhan wilayah perdesaan terpencil.
3) Revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman;	a. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi permukiman guna mengembalikan kemudahan kontak sosial masyarakat; dan b. melakukan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang terintegrasi guna memudahkan kontak sosial masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif;	a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan sebagai: 1) kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lembah Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, dan Madale; 2) kawasan peruntukan agro industri Lembah Napu, kawasan pusat pelayanan agropolitan Wuasa, kawasan minapolitan Poso Kota Utara, kawasan minapolitan Kecamatan Poso Pesisir dan Kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba; dan 3) kawasan industri menengah Kecamatan Poso Pesisir dan kawasan industri Kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan. b. mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi darat jalan arteri Trans Sulawesi, serta mengembangkan jalan kolektor dan jalan lokal; c. mendukung realisasi jaringan jalur bebas hambatan lintas Pulau Sulawesi dan jalur kereta api lintas Pulau Sulawesi yang melintasi wilayah Kabupaten Poso untuk transportasi massal wilayah; d. mengembangkan Bandar Udara Kasinguncu sebagai bandar udara umum pusat penyebaran; e. mengembangkan Bandar Udara Sulewana sebagai bandar udara khusus guna mendukung kegiatan pariwisata;



<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>f. mengembangkan Pelabuhan Poso sebagai pelabuhan nasional utama tersier;</li><li>g. pengembangan pelabuhan Tentena, Dulumai, Tindoli, Pendolo, Bancea dan Salukaia sebagai pelabuhan penyeberangan lintas di Kawasan Danau Poso guna mendukung kegiatan pariwisata dan pergerakan angkutan penumpang dan barang;</li><li>h. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di kawasan-kawasan yang terisolir;</li><li>i. mengembangkan <i>Base Transceiver Station</i> bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya;</li><li>j. mengembangkan secara bijaksana sumber daya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan;</li><li>k. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana air bersih untuk menunjang kegiatan perkotaan;</li><li>l. mengendalikan secara ketat upaya pengendalian pada daerah-daerah tangkapan air dan resapan air;</li><li>m. mengembangkan kapasitas dan merealisasikan interkoneksi sistem jaringan energi dari sumber energi listrik berkapasitas besar PLTA Sulewana;</li><li>n. penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi dari sumber energi listrik rama lingkungan seperti PLTMH pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi dari sistem interkoneksi PLTA Sulewana;</li><li>o. mengembangkan sistem persampahan untuk skala lokal dengan reduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan</li></ul>





<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
	lingkungan yang bersih dan sehat; p. peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah; dan melakukan upaya <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> terhadap timbulan sampah dan limbah secara terpadu.
5) penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung kelestarian lingkungan dan pengembangan kegiatan pariwisata;	a. memantapkan kawasan hutan lindung yang telah ada; b. menetapkan dan mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kawasan; c. mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan; d. mengembangkan kawasan taman nasional dengan memanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan; e. mengembangkan kawasan situs cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dan pariwisata; f. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan menghindari pengembangan kawasan budidaya pada kawasan yang rawan terhadap bencana alam; g. mengembangkan kawasan lindung lainnya sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna darat dan laut guna menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna endemik serta untuk kepentingan pariwisata; h. pengembalian fungsi secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi melalui rehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan; i. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung; j. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi; k. pembatasan pengembangan prasarana wilayah



<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
	<p>di sekitar dan di dalam kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya ikutan yang mendorong alih fungsi lahan lindung; dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pengembangan secara terbatas sarana akomodasi wisata sebagai tempat beristirahat (<i>rest area</i>) pada kawasan yang memiliki rona alam yang menarik disepanjang koridor jalur wisata pada kawasan lindung.</li></ol>
6) optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi;	<ol style="list-style-type: none"><li>a. revitalisasi kawasan hutan produksi sesuai fungsinya guna mendukung kebutuhan bahan baku sektor industri menengah dan kecil;</li><li>b. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan hutan rakyat berbasis masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan;</li><li>c. mengembangkan kawasan hutan kota dikawasan perkotaan Kota Mapane dan Kota Tentena untuk perbaikan iklim mikro kota dan pariwisata;</li><li>d. menetapkan dan mengembangkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 25 persen dari luas alokasi lahan pertanian secara keseluruhan;</li><li>e. mengembangkan kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, Poso Pesisir dan Madale melalui optimalisasi pariwisata alam, budaya dan buatan melalui penciptaan identitas (<i>icon</i>) wisata khas Kabupaten Poso yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disertai pengembangan yang berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan;</li><li>f. mengembangkan kawasan pertanian spesialisasi komoditas pada setiap wilayah sesuai dengan karakteristik kesesuaian lahan yang dimiliki;</li><li>g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat melalui intensifikasi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan perkebunan;</li><li>h. mengembangkan kawasan peruntukan agro-</li></ol>



Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)	Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)
	<p>industri Lembah Napu;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan kawasan pusat pelayanan agropolitan Kecamatan Lore Peore;</li><li>j. mengembangkan kawasan minapolitan Poso Kota Utara sebagai <i>cluster</i> sentra perikanan tangkap dan budidaya;</li><li>k. mengembangkan kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba sebagai <i>cluster</i> sentra perikanan darat;</li><li>l. mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap Teluk Tomini, dan Kawasan Lalanga;</li><li>m. pengembangan kawasan budidaya perikanan laut dan perikanan darat;</li><li>n. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan <i>cluster</i> sentra produksi peternakan;</li><li>o. mengembangkan kawasan pertambangan batuan (sirtu), logam dan non logam melalui eksplorasi dan eksploitasi yang berwawasan lingkungan;</li><li>p. mengembangkan kawasan industri menengah Kecamatan Lage, Poso Pesisir dan kawasan industri kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan, serta kegiatan industri yang non politan bisa didistribusikan ke semua kecamatan;</li><li>q. mengembangkan daya tarik wisata, pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;</li><li>r. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan beserta ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup; dan</li><li>s. mengembangkan kawasan perdagangan dengan pengembangan fasilitas jasa dan perdagangan untuk melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan secara ber-hirarkhi dan bersinergi dengan sektor informal sebagai suatu aktivitas yang saling melengkapi.</li></ul>
7) pengembangan kawasan strategis	a. mengembangkan spesialisasi kegiatan ekonomi pada masing-masing kawasan



<b>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)</b>	<b>Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)</b>
kabupaten guna menciptakan daya saing tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah;	strategis untuk kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut: 1) penyediaan infrastruktur dan kerja sama pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan agroindustri skala besar di Kawasan Strategis Lembah Napu; dan 2) mengembangkan pertanian spesifik dan <i>cluster</i> industri kecil non polusi pendukung kegiatan pariwisata sebagai inti ( <i>core</i> ) kegiatan ekonomi pada: a) kawasan Strategis Koridor Poso-Tentena-Taripa-Pendolo; b) kawasan perbatasan Tidantana di Kecamatan Pamona Selatan; c) kawasan Strategis Sulewana di Kecamatan Pamona Utara; d) kawasan Danau Poso dan sekitarnya; e) kawasan strategis Kota Poso; dan f) optimalisasi perikanan tangkap dan budidaya Teluk Tomini dengan pola <i>cluster</i> minapolitan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan pengembangan kawasan. b. mengembangkan budaya lokal sebagai keunggulan daya tarik sektor pariwisata budaya; c. penyediaan lahan dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan industri menengah; dan d. promosi intensif kawasan strategis.
8) pemantapan sinergi antara KSN, KSP dan KSK;	a. pembentukan Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (Bapesska); dan b. sinkronisasi program pengembangan kawasan strategis ekonomi melalui Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (BAPESSKA).
9) pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup; dan	a. mengembangkan kawasan penyelamatan lingkungan hidup melalui penetapan, pemantapan, rehabilitasi kawasan guna penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan keaneka-ragaman hayati; b. pemberantasan penyakit endemik <i>Schisto-</i>



Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)	Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)
	<p>somiasis di Wilayah Tampo Lore;</p> <p>c. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dengan pengembangan kawasan pengendalian ketat (<i>high control zone</i>) untuk penetapan kawasan dan pengembangan pengawasan kawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; dan</p> <p>d. melestarikan Danau Poso sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.</p>
10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.	<p>a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.</p>

Sumber: Perda No. 8 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Poso

Sementara itu, berdasarkan pasal 7 Perda tentang RTRW Kabupaten Poso maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Poso terbagi atas 5 (lima) pusat kegiatan, secara lebih lengkap terdapat pada Tabel 4.18 sebagai berikut.

**Tabel 4.18**  
**Pusat Kegiatan Kabupaten Poso**

Pusat Kegiatan	Fungsi	Lokasi
1) PKW	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten dan kota	Kota Poso
2) PKL	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa	Kota Tentena dan Kota Wuasa





<b>Pusat Kegiatan</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Lokasi</b>
	kecamatan.	
3) PKLp	kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL	a) Gintu di Kecamatan Lore Selatan; b) Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan c) Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara.
4) PPK	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa	a) Taripta di Kecamatan Pamona Timur; b) Meko di Kecamatan Pamona Barat; c) Doda di Kecamatan Lore Tengah; d) Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
5) PPL	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa	a) Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara; b) Maholo di Kecamatan Lore Timur; c) Lengkeka di Kecamatan Lore Barat; dan d) Watutau di Kecamatan Lore Peore;

### **4.3 Isu Strategis Kabupaten Poso**

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan hingga saat ini, serta dengan berpandangan terhadap indikasi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Poso, dapat dijelaskan isu-isu strategis yang terklasifikasikan dalam beberapa fungsi pemerintahan serta keterkaitannya dengan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yakni sebagai berikut.



1. Penanganan dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. SDM Berdaya Saing
4. Infrastruktur Dasar Daerah
5. Sektor Unggulan Daerah
6. Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup
8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

### **1.) Penanganan dan Pemulihan pasca Pandemi Covid-19**

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Lebih lanjut, hal ini telah mengguncang tidak hanya pada aspek Kesehatan akan tetapi pada meresotnya ekonomi global, nasional, dan daerah-daerah yang saat ini sedang rapuh dengan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Semua daerah sedang berupaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, sambil menunggu memproduksi dan distribusi vaksin anti virus corona atau Covid-19.

Kebijakan fiskal dalam bentuk stimulus fiskal masih akan ditempuh otoritas kebijakan pemerintah, untuk mendorong bergeraknya aktivitas ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (baca: APBN atau APBD), dan menurunkan target penerimaan pajak, atau kombinasi keduanya. Bentuk dari peningkatan pengeluaran pemerintah, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara langsung melalui tambahan pembayaran barang dan jasa, atau secara tidak langsung melalui transfer anggaran. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menggunakan stimulus fiskal melalui penurunan penerimaan pajak secara tidak langsung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sektor swasta.

Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan fiskal bersifat '*contractionary*' untuk menurunkan aktivitas ekonomi melalui penurunan pengeluaran pemerintah, meningkatkan penerimaan pajak, atau kombinasi keduanya. Upaya untuk menurunkan pengeluaran



pemerintah, ditujukan untuk menurunkan aktivitas ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang lebih kecil. Selain itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga bertujuan untuk menurunkan aktivitas ekonomi yakni menurunnya *disposable income*.

Sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah Pusat. Secara umum kebijakan stimulus fiskal pemerintah akan tetap ditempuh pada 2 (dua) tahun mendatang melalui kebijakan pengelolaan APBN di tingkat pusat, atau pemanfaatan APBD di tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota. Melalui alokasi anggaran ini, kebijakan stimulus fiskal digunakan untuk mempengaruhi, atau menggerakkan perekonomian melalui belanja pemerintah. Fokus perhatian saat pandemi Covid-19 ini, adalah alokasi penanganan Covid-19 yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat dan bermuara pada pemulihan ekonomi daerah baik di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten Poso.

## **2.) Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara ringkas Konvensi ILO 169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.

Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.



Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Melalui **ekonomi kerakyatan**, pemerintah daerah Kabupaten Poso akan memfokuskan pembangunan usaha ekonomi kerakyatan melalui UMKM, koperasi, Bumdes, pertanian dan pariwisata.

Hal ini didasarkan pada tersedianya berbagai potensi sumber daya alam (pertanian, dan kepariwisataan) yang memiliki keunggulan komparatif/kompetitif baik dipasaran lokal, regional maupun global untuk dikelola, dan menjadikan iklim usaha yang kondusif, kehadiran para investor di Kabupaten Poso dimasa depan akan sangat ditentukan pula oleh situasi keamanan. Selain itu faktor lain yang turut mempengaruhi adalah komitmen pemerintah bersama masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif. Di era otonomi yang luas, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan potensinya, yang berarti pula akan terjadi persaingan antar daerah dalam merebut Investasi dan pasar bagi produknya, maka kebijakan yang bersifat deregulasi akan sangat menentukan perkembangan perekonomian Kabupaten Poso kedepan.

### **3.) Infrastruktur Dasar Daerah**

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Poso yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti Jalan dan Jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi



jalan baik di Kabupaten Poso mengalami sedikit penurunan, di mana pada tahun 2019 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 767,7 Km atau dengan rasio 0,625 dari panjang jalan keseluruhan 1.229,15 Km. Data proporsi jalan kondisi baik tersebut mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana total panjang jalan tahun 2014 sepanjang 1.140,15 Km dengan proporsi jalan kondisi baik sepanjang 0,570 Km atau sebesar 58.33 dari total jalan di Kabupaten Poso.

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Poso pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tetap sama karena tidak ada penambahan panjang saluran irigasi, baik yang primer maupun sekunder. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, disisi lain daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang cukup lama tidak mendapatkan alokasi pemeliharaan dan pembangunan juga lebih disebabkan kerusakan karena rentannya kejadian bencana alam seperti banjir di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang merusak jaringan irigasi. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Poso telah mencakup 19 wilayah kecamatan yang ada. Namun masih terdapat beberapa desa-desa yang masih terpencil yang pada setiap kecamatan yang masih kesulitan jaringan telekomunikasi. Hasil pemetaan Tahun 2020 ditemukan Sinyal Lemah 7 Desa (Doda, Wuasa, Maholo, Watutau, Lengkeka, Gintu, Olumokunde)<sup>2</sup>. Titik Blind Spot 3 Desa (Dewua, Sangginora, Lena).

#### **4.) Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal**

Secara topografis sebagian besar struktur wilayah Kabupaten Poso merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan keadaan kemiringan tanah (Topografi) Kabupaten Poso sehingga wilayah kabupaten Poso sangat cocok sebagai daerah Pertanian dan Pariwisata.

Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Poso Tahun 2019 mencapai 6,47 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6,10 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,16 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat salah satunya oleh adanya peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terutama di subkategori Tanaman Perkebunan. Namun masih





perlu ditingkatkan agar sektor unggulan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Poso. Pada sisi lain, Sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah belum memberikan kontribusi yang besar. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai sektor pembangunan, termasuk salah satunya adalah sektor pariwisata Kabupaten Poso. Hotel, akomodasi, café, restoran, dan tempat-tempat belanja harus melakukan pembatasan aktivitas sementara. Berbagai event yang disebut MICE (*meetings, incentives, conferences, exhibitions*) terpaksa harus ditunda yang direncanakan sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Poso dibatalkan. Tentunya kondisi ini membuat para penyedia jasa pariwisata harus merumahkan dan bahkan memberhentikan (PHK) karyawannya. Jika dilihat dari data secara nasional, sebanyak 15 juta pekerja langsung di sektor pariwisata diprediksi terancam kehilangan pekerjaan hingga akhir Tahun 2020. Sementara itu, terdapat banyak tenaga kerja tidak langsung yang terdampak termasuk di Kabupaten Poso yaitu para pekerja UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif, toko souvenir, *tour guide*, penari, pemusik, pekerja seni di daerah wisata, dan lainnya.

Kemampuan daya beli masyarakat cenderung menurun akibat pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memprioritaskan belanja pengeluaran untuk membeli produk baik itu barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan pokok. Sedangkan pariwisata merupakan produk jasa yang dianggap sebagai kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda dan tidak mendesak harus dipenuhi. Penurunan daya beli masyarakat inilah yang turut menyebabkan sektor pariwisata semakin terpuruk pada saat pandemi.

Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Sulawesi Tengah memiliki beberapa destinasi pariwisata yang eksotis yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota. Terdapat beberapa destinasi wisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria 3S (*Size, Sustain, Spread*) mengacu pada data tingkat kunjungan, perkembangan pertahun selama 5 tahun terakhir, yaitu potensi wisata di kabupaten Poso seperti Danau Poso, Taman Nasional Lore Lindu, dan Patung Megalit peninggalan Prasejarah.

Namun demikian, destinasi pariwisata tersebut mengalami penurunan jumlah pengunjung setelah adanya penetapan virus corona sebagai pandemi global. Selain adanya wabah virus corona, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Poso dirasakan belum optimal. Sarana dan prasarana serta aksesibilitas masih perlu untuk ditingkatkan. Tidak kalah



pentingnya adalah aspek pemasaran, dimana salah satunya adalah promosi keunggulan pariwisata Kabupaten Poso masih kurang gencar dan kurang efektif sehingga perlu ditingkatkan.

Kabupaten Poso juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. **Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)** merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman Nasional Lore Lindu memiliki fauna dan flora endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi. Anoa, babirusa, rusa, kera hantu (Tangkasi), kera kakaktonkea, kuskus marsupial dan binatang pemakan daging terbesar di Sulawesi, musang Sulawesi hidup di taman ini. Taman Nasional Lore Lindu juga memiliki paling sedikit 5 jenis bajing dan 31 dari 38 jenis tikusnya, termasuk jenis endemik.

Cagar Biosfer Lore Lindu memiliki berbagai tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan pamah tropika, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan sampai hutan dengan komposisi jenis yang berbeda. Tumbuhan yang dapat dijumpai di hutan pamah tropika dan pegunungan bawah antara lain *Pterospermum celebicum*, *Cananga odorata*, *Gnetum gnemon*, *Castanopsis argentea*, *Agathis philippinensis* dan *Philocladus hypophyllus*. Di dalam kawasan taman nasional terkandung berbagai ragam satwa. Lebih dari 50% satwa yang terdapat di kawasan ini merupakan satwa endemik seperti babi rusa (*Babyrousa babirussa*), tarsius (*Tarsius spectrum*), musang coklat sulawesi (*Macrogalidia musschenbrockii*), tikus sulawesi (*Rattus celebensis*), maleo (*Macrocephalon maleo*), ular emas (*Elaphe erythrura*), katak sulawesi (*Bufo celebensis*), dan ikan betok (*Anabas testudinata*). Disamping kekayaan dan keunikan sumberdaya alam hayati, taman nasional ini juga memiliki kumpulan batuan megalitik yang bagus yang merupakan salah satu monumen megalitik terbaik di Indonesia. Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) mendapat dukungan internasional, karena ditetapkan sebagai salah satu Cagar Biosfer oleh UNESCO.

Kawasan TNLL juga terdapat patung-patung megalit yang usianya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun tersebar di kawasan Taman Nasional Lore Lindu seperti Lembah Napu, Behoa dan Bada. Terdapat 1.466 temuan megalitik dari 83 situs yang telah diungkap. Patung-patung ini sebagai monumen batu terbaik di antara patung-patung sejenis di Indonesia.



### **5.) Perlunya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya**

Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dari berbagai gangguan kriminalitas dan pencurian. Stabilitas daerah Kabupaten Poso dicirikan dari: kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa; mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan; semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok; merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan; perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan; meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

### **6.) Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara optimal, tentunya dikelola secara bijaksana dengan tetap mempertimbangkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Ada tiga yang menjadi tantangan jangka panjang secara Nasional maupun internal daerah, apabila kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang cepat, yakni: krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Disamping bertambahnya jumlah penduduk dan program transmigrasi yang tidak sesuai arah peruntukan lahan akan menyebabkan kemampuan ketersediaan lahan pangan akan semakin terbatas. Disisi lain bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air diwilayah Kabupaten Poso. Pengembangan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Poso berdampak pada terjadinya perubahan ekosistem yang akhirnya menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Kondisi lingkungan yang menggejala diuraikan di bawah ini.

#### **1. Tanah Longsor**

Penyebab utama tanah longsor adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Kecamatan-kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi adalah Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Pamona Timur, Pamona Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, dan sebagian daerah Pamona Puselemba. Tanah longor terjadi di sisi jalan, tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.



## 2. Banjir

Beberapa kawasan wilayah kecamatan di Kabupaten Poso sering dilanda banjir dan genangan periodik. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah setempat relatif kecil. Lokasi yang sangat sering terjadi banjir ada pada Kecamatan Lore Timur, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Selatan, Lore Selatan, Lore Tengah, dan ada sebagian Kecamatan Poso Pesisir Utara. Kecamatan Pamona Barat juga sering terjadi banjir. Beberapa kejadian banjir berkarakteristik banjir bandang dengan periode genangan singkat namun menimbulkan kerugian harta benda yang besar. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi permukaan lahan hutan yang telah terbuka untuk perkebunan rakyat serta topografi wilayah yang memiliki kelerengannya yang landai.

## 3. Gempa Bumi

Gempa bumi yang potensial terjadi di Kabupaten Poso adalah gempa bumi tektonik, yang diakibatkan oleh pergeseran didalam perut bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah, hingga dalam. Apabila gempa bumi memiliki magnitude besar dan memiliki kedalaman dangkal dapat menimbulkan bencana alam yang sangat merugikan. Aktivitas gempa bumi di Kabupaten Poso dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro yang melintasi wilayah barat kabupaten serta patahan mikro Tambarana yang memanjang berarah Utara – Selatan ditengah wilayah Kabupaten Poso. Wilayah kecamatan yang paling rawan terjadi gempa antara lain Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Pamona Timur, Pamona Barat, dan Pamona Selatan.

## 4. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai sehingga wilayah darat berkurang. Abrasi dan sedimentasi diperairan dekat pantai merupakan 2 proses geologi yang terkait. Abrasi berpotensi terjadi pada wilayah pantai yang tersusun oleh formasi batuan aluvial atau batuan lepas. Agen utamanya adalah ombak dan arus susur pantai. Abrasi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia berupa pengambilan karang dari laut, pengambilan pasir di pantai, dan pembabatan *mangrove*. Potensi abrasi pantai dan danau di wilayah Kabupaten Poso tersebar di sepanjang pantai dan danau di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara Kecamatan



Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona, Selatan Kecamatan Pamona Tenggara

#### 5. Neraca Air

Kebutuhan terhadap air dimaksudkan untuk irigasi lahan pertanian dan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap air bersih. Secara umum masalah sumber daya air di Kabupaten Poso belum merupakan masalah yang serius bila dibandingkan dengan kota-kota besar, karena Kabupaten Poso memiliki suplai sumber daya air yang cukup memadai untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, pertanian, dan keperluan industri rumah tangga. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Poso adalah Kawasan Laut Teluk Tomini, Danau Poso, daerah aliran sungai (DAS), dan rawa.



# BAB 5

# RPJMD



## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1 VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati Verna GM. Inkiriwang dan Wakil Bupati M. Yasin Mangun, sebagai rujukan atau referensi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Poso. Pernyataan visi Kabupaten Poso Periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, adalah:

#### **Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah**

Pernyataan visi Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

***Maju, Tangguh dan Terdepan sebagai Kata Kunci Pokok Visi:*** pembangunan Poso ditujukan untuk meningkatkan dan Memajukan Pembangunan dengan cara *Membangun Bersama, Sejahtera Bersama* sebagai jargon utama pembangunan. Dimana seluruh pembangunan dikonstruksikan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Poso yang Maju,



Tangguh dan Terdepan. Dimana hasil pembangunan harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh segenap masyarakat yang direfleksikan dengan membangun Bersama sejahtera Bersama Menuju Poso Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan.

**Membangun Bersama, Sejahtera Bersama**, memiliki pengertian sebagai suatu upaya kolektif kolegal yang dibangun dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Poso dengan pengawasan pemerintahan daerah yang bersih dan amanah dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sering disosialisasikan melalui berbagai media, sejauh ini telah dipraktekan oleh para pemimpin negara hingga tingkat desa. Akan tetapi, selalu tidak mencapai maksud idealnya, karena dalam praktek pemerintahan diberbagai jenjang menghadapi kendala yang justru lahir dari tubuh para pengelolanya yang tidak amanah. Padahal para pengelolanya adalah pengemban amanah yang berasal dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini.

Pemerintahan menyangkut keseluruhan lembaga-lembaga pemerintahan dan jajarannya, baik eksekutif maupun legislatif, yang saling berintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu titik keseimbangan, dimana seluruh fungsi dan peranan setiap lembaga dilaksanakan untuk memenuhi fungsi pemerintahan secara total. Pemerintahan yang amanah, menunjuk pada prinsip nilai kelembagaanyang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang menduduki posisi tertentu dalam setiap jenjang dan unit kerja organisasi pemerintahan. Ringkasnya, perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah adalah sebuah tatanan hidup bermasyarakat, berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, bermufakat dalam musyawarah, menuju keadilan sosial bagi seluruh warga.

Kualitas hidup seluruh warga hendaknya diwujudkan dalam berbagai aspek antara lain aspek Sosial, aspek Budaya, aspek Ekonomi, aspek Politik. Selaras dengan Visi di atas, dalam implementasinya akan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan bersama diawali pembangunan pedesaan dengan pendekatan kawasan. Pembangunan kawasan menitik beratkan potensi dan sumber daya yang terdapat di pedesaan, dan karena itu sektor dan sub-sektor Pertanian adalah sumber daya unggulan daerah.



Tabel 5.1  
Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Pokok Visi	Penjelasan Visi
1. <b>Maju</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara umum <b>Maju</b> memiliki arti, menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. visi ini ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dengan standar hidup (<i>living standard</i>) yang lebih baik (tingkat kesejahteraan) dibanding kondisi sebelumnya.</li><li>• <b>Maju</b> mengarah pada pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju dalam semua bidang dan sektor pembangunan.</li><li>• <b>Maju</b> juga ditandai pelayanan Publik yang maju berbasis Desa (<b>Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera</b>). Visi ini menjadikan Kesehatan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengurangan angka kemiskinan (<i>poverty reduction</i>) di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.</li></ul>
2. <b>Tangguh</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mempersiapkan masyarakat Poso yang <b>Tangguh</b> dimana masyarakat berpikir positif dan optimisme meraih masa depan dan toleransi tinggi, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Poso yang <b>Harmoni dan Tangguh</b> bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran, rukun dan damai (<b>Poso Harmoni dan Tangguh</b>).</li><li>• Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Poso tidak sekedar Maju tetapi juga <b>Tangguh</b> menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara mandiri meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi</li></ul>



<b>Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
	<p>Bencana alam dan Non Alam serta Perubahan Iklim yang sulit diprediksi namun dapat diantisipasi dampaknya oleh masyarakat, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>) baik ditingkat Desa sampai Kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secara umum <b>ketangguhan berkelanjutan</b> juga dimaksudkan bagi kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus atau adanya Pemerintahan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel (<b>Poso Pakaroso</b>).</li><li>• <b>Tangguh</b> juga memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan pembangunan Bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan Membangun Lingkungan Hidup, meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>). Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (<i>economic development</i>), pembangunan sosial (<i>social development</i>), dan perlindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).</li><li>• Pada konteks lain, kehidupan sosial suatu daerah yang <b>Tangguh</b> berarti suatu keadaan di mana semua komponen pemerintahan maupun masyarakat telah mampu mewujudkan serta memelihara kedamaian, keamanan, dan harmoni social tidak terpancing Isu radikalisme dan terorisme. Dengan demikian daerah telah memiliki ketangguhan yang maksimal dalam mengelola potensi internal maupun eksternal yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah.</li></ul>
<b>3. Terdepan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara umum kata <b>Terdepan</b>, berarti berada paling depan atau urutan terbaik Pada tataran Provinsi Sulawesi Tengah maknanya bahwa visi pembangunan daerah (<i>regional development</i>) yang ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dapat menempatkan daerah ini menuju dan berjalan</li></ul>



Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<p>dalam keadaan yang lebih baik (<i>on the right track</i>) dari sisi kemajuan Tata Kota dan Pelayanan Publik serta kemajuan Infrastruktur terdepan secara merata di seluruh wilayah kecamatan (<b>Poso Bersinar dan Terdepan</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur <b>Terdepan</b> merata berarti tersebar ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Poso. Hasil pembangunan di Kabupaten Poso harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan (<i>income gap</i>), dan ketimpangan wilayah (<i>regional gap</i>).</li><li>• Kata <b>Terdepan</b> dijelaskan jika kemajuan di berbagai bidang bisa dicapai dengan standar dan indikator yang optimal dan Kabupaten Poso memiliki kapasitas serta ketangguhan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, maka sudah barang tentu Kabupaten Poso akan menjadi <b>Kabupaten Terdepan</b> di Sulawesi Tengah, bahkan dapat memiliki prestasi menyamai Kabupaten lain di Indonesia yang lebih maju karena Kabupaten Poso memiliki beragam potensi sumber daya alam dan juga kekayaan seni dan budaya.</li></ul>

## 5.2 MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, yaitu:

**MISI I : DESA MAJU**  
*Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.*

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

Sasaran :

- a) Meningkatnya Status Desa;





**MISI II : POSO SEHAT**  
*Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat.*

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso.

Sasaran :

- a) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan;
- b) Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak.

**MISI III : POSO PINTAR**  
*Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.*

Tujuan :

1. Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak.

**MISI IV : POSO SEJAHTERA**  
*Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya local.*

Tujuan :

1. Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas;
2. Menurunnya penduduk miskin.

Sasaran :

- a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah;
- b) Menurunnya disparitas ekonomi;
- c) Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso;
- d) Terbukanya lapangan pekerjaan;
- e) Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan.



**MISI V : POSO PAKAROSO**  
*Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.*

Tujuan :

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.

Sasaran :

- a) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
- b) Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah;
- c) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**MISI VI : POSO HARMONI DAN TANGGUH**  
*Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran, dan damai.*

Tujuan :

1. Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
2. Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.

Sasaran :

- a) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial;
- b) Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama;
- c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana.

**MISI VII : POSO BERSINAR DAN TERDEPAN**  
*Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah.*

Tujuan :



1. Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang merata

Sasaran :

- a) Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten;
- b) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi antar wilayah;
- c) Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet;
- d) Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota.

Selanjutnya, keterkaitan misi, tujuan dan sasaran dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran**

MISI		Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju	1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	1.1.1	Meningkatnya Status Desa
2	Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat	2	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso	2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
				2.1.2	Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak
3	Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar	3	Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar.	3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing
				3.1.2	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

MISI		Tujuan		Sasaran	
4	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal	4	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah
				4.1.2	Menurunnya disparitas ekonomi
				4.1.3	Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso
		4	Menurunnya penduduk miskin.	4.2.1	Terbukanya lapangan pekerjaan
				4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan
5	Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel	5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel	5.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
				5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah
				5.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai	6.1	Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	6.1.1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
				6.1.2	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

MISI		Tujuan		Sasaran	
		6.2	Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana	6.2.1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana
7	Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah	7	Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang merata	7.1.1	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten
				7.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah
				7.1.3	Menurunya Desa Blankspot koneksi internet
				7.1.4	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota

Sumber Hasil: Rumusan Tim Penyusun dan Bapelitbangda, Tahun 2021.





**RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)**  
**KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 5.3**  
**Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

MISI	Tujuan				Sasaran				Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir	
	Uraian		Indikator		Uraian		Indikator				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju	1.1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	1.1.1	Indeks Desa Membangun	1.1.1.1	Meningkatnya Status Desa	1	Desa Maju	Persen	9,86	11,27	12,68	14,08	15,49	16,20	17,61	17,61
								2	Desa Berkembang	Persen	70,42	73,94	76,76	78,17	79,58	80,99	82,39	82,39
2	Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat	2.1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso	2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	2.1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	3	Usia Harapan Hidup	Poin	71,28	71,88	72,51	73,14	73,77	74,4	75,03	75,03
								4	Prevalensi Angka Stunting	Persen	16,80	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3	7,8	15,3
								2.1.1.2	Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak	4	Prevalensi Angka Stunting	Persen	16,80	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3
3	Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar	3.1	Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar	3.1.1	Indeks Pendidikan	3.1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing	5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7	13,92	14,14	14,36	14,58	14,80	15,02	15,02
								6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,41	9,61	9,8	9,99	10,18	10,37	10,56	10,56
								7	Indeks Pembangunan Gender	Persen	96,58	96,93	97,28	97,63	97,98	98,33	98,68	98,68
4		4.1		4.1.1					Persen	5,58	5,6	5,62	5,64	5,66	5,68	5,7	5,70	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

MISI	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir			
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal	4.2	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas	Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif	4.1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah	8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-3,89	2-4	3-3,5	3,5-4	4-5	5-6	5-6	5-6
				4.1.1.2	Menurunnya disparitas ekonomi	9	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,300	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280
						10	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	0,0625	0,1025	0,1425	0,1825	0,2225	0,2625	0,3025	0,3025
	4.1.1.3	Meningkatnya pendapatan masyarakat Poso	11	Pendapatan perkapita	Juta Rp	23,79	24,63	25,47	26,31	27,15	27,99	28,83	28,83			
	4.2.1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	4.2.1				Persen	15,45	15,45	14,94	14,43	13,92	13,41	12,9-9,9	12,9-9,9
				4.2.1.1	Terbukanya lapangan pekerjaan	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,39	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
				4.2.1.2	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	13	Nilai Tukar petani	Persen	96,37	96-98	98-100	100-102	100-102	100-102	100-102	100-102
5	Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel	5.1.1	Indeks Reformasi Brikrasi			Kategori		B	B	B	B	A	A	A
				5.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	14	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks	78,27	80,42	82,57	84,72	86,87	89,02	91,17	91,17
				5.1.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
				5.1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	16	Opini BPIK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai	6.1	Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	6.1.1	Indeks Demokrasi			Indeks		80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90
				6.1.1.1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	17	Angka Kriminalitas	Persen	15,09	13,84	12,59	11,34	10,09	8,84	7,59	7,59
				6.1.1.2	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indkes	NA	60-70	60-70	60-70	60-70	70-75	70-75	70-75



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

MISI	Tujuan		Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator			2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	6.2	Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana	6.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	6.2.1.1	Meningkatnya kemampuan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana			Persen	92,74	92,88	93,63	94,38	95,13	95,88	96,63	96,63
							19	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	1,41	1,41-2,82	2,83-4,23	4,24-5,63	5,64-7,04	7,05-8,45	8,46-9,86	8,46-9,86
							20	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	122,66	120,66	118,66	116,66	114,66	112,66	110,66	110,66 (Sedang)
7	Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah	7.1	Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang merata	7.1.1	Indeks Kualitas Infrastruktur Wilayah				Indeks	44,14	69,66	72,66	75,46	78,31	81,04	83,55	83,55
					7.1.1.1	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	21	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen	11,9	14	16,1	18,2	20,3	22,4	24,5	24,5
					7.1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah	22	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	65,75	67,67	69,59	71,51	73,43	75,35	77,27	77,27
					7.1.1.3	Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet	23	Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	83,10	84,50	85,90	87,30	88,70	90,10	91,50	91,50
					7.1.1.4	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota	24	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	5,96	8,96	11,96	14,96	17,96	20,96	23,96	23,96

Sumber: Hasil Proyeksi, diolah Bapelitbangda dan Tim Penyusun Tahun 2021

### **5.3 KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN DENGAN TUJUAN SASARAN RPJMNAS 2020-2024.**

Tujuan didesain untuk mengarahkan dan mencapai Misi yang telah ditetapkan, sementara Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Poso diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodisasi kedua dokumen rencana ini berbeda periodisasinya dengan RPJMN tahun 2020-2024 sementara RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026, namun seluruh Tujuan dan sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Beberapa tujuan dan sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab ruang lingkungannya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Beberapa penjelasan keterhubungan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026 dengan Sasaran RPJMN 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

1. **Sasaran nasional 1:** “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” didukung oleh 1 (satu) Tujuan yaitu “Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas” dan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu “Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso”, dan “Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan”;
2. **Sasaran nasional 2:** “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” didukung oleh 4 (empat) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah”, “Menurunnya disparitas ekonomi”, “Terbukanya lapangan pekerjaan” dan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”;
3. **Sasaran nasional 3:** “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, **Sulawesi**, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera” memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan” dan “Pemberdayaan Desa”, “Meningkatnya Status Desa” dan “Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah”.
4. **Sasaran nasional 4:** “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan” memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) Tujuan yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif,



- dan Akuntabel dan 1 (satu) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah”;
5. **Sasaran nasional 5:** “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk” memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso dan 1 (satu) sasaran pembangunan Kabupaten Poso “Meningkatnya pendapatan perkapita Masyarakat Poso”;
  6. **Sasaran nasional 6:** “Terpenuhinya layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan dengan 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar dan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”, Meningkatkan kualitas pendidikan berdaya saing dan “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik”;
  7. **Sasaran nasional 7:** “Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak”, “Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing” dan “Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah”;
  8. **Sasaran nasional 8:** “Terwujudnya pengentasan kemiskinan” memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) Tujuan yaitu Menurunnya penduduk miskin, 1 (satu) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Terbukanya lapangan pekerjaan”;
  9. **Sasaran nasional 9:** “Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing” didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan Kabupaten Poso: “Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”, Meningkatkan kualitas pendidikan berdaya saing, dan Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Nelayan ;
  10. **Sasaran nasional 10:** “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya” didukung oleh 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Demokrasi dan Kebudayaan, 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Poso: “Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing”;
  11. **Sasaran nasional 11:** “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan” didukung oleh 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Demokrasi dan Kebudayaan, 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Poso: “Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama”;
  12. **Sasaran nasional 12:** “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat





dan daya rekat sosial” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Poso yakni “Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial”;

13. **Sasaran nasional 13:** “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Poso yakni “Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama”;
14. **Sasaran nasional 14:** “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak”, dan “Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah”;
15. **Sasaran nasional 15:** “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Poso yakni “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Berdaya Saing”;
16. **Sasaran nasional 16:** “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah”, dan “Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten”;
17. **Sasaran nasional 17:** “Meningkatnya konektivitas wilayah” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Poso: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah”;
18. **Sasaran nasional 18:** “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan” didukung oleh 1 (satu) Tujuan yaitu “Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman” dan 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Poso yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah”;
19. **Sasaran nasional 19:** “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien” didukung oleh sasaran RPJMD Kabupaten Poso yakni “Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga”;
20. **Sasaran nasional 20:** “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu “Menurunkan Desa Blankspot koneksi internet”, dan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah”;



21. **Sasaran nasional 21:** “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki keterkaitan dengan oleh 1 (satu) Tujuan yaitu “Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup”, dan 1(satu) sasaran pembangunan Kabupaten Poso: “Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan”;
22. **Sasaran nasional 22:** “Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso yaitu: “Meningkatnya ketangguhan Desa dalam menghadapi bencana”, dan “Meningkatnya kemampuan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana”;
23. **Sasaran nasional 23:** “Pembangunan Rendah Karbon” memiliki keterkaitan dengan oleh 1 (satu) Tujuan yaitu “Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup”, dan 1(satu) sasaran pembangunan Kabupaten Poso: “Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan”;
24. **Sasaran nasional 24:** “Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) Tujuan “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Demokrasi” dan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsive, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel“ juga berkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Poso, yaitu: “Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial” dan “Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah”;

**Tabel 5.4**

**Persandingan Sasaran RPJM Nasional 2020-2024 dengan  
Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso 2021-2026**

<b>Sasaran RPJMN</b>		<b>Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso</b>	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	T 4.1	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas
		S 4.1.3	Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso
		S 4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S 4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah
		S 4.1.2	Menurunnya disparitas ekonomi
		S 4.2.1	Terbukanya lapangan pekerjaan
		S 5.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



<b>Sasaran RPJMN</b>		<b>Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso</b>	
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.	T 1.1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
		S 1.1.1	Meningkatnya Status Desa
		S 7.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola Pemerintahan	T 5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel
		S 5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	T 2.1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso
		S 4.1.3	Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso
S6	Terpenuhinya layanan dasar	T 3.1	Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar
		S 2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S 3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing
		S 5.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S 2.1.2	Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak
		S 3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing
		S 3.1.2	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	T 4.2	Menurunnya penduduk miskin
		S 4.2.1	Terbukanya lapangan pekerjaan
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S 2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S 3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing



Sasaran RPJMN		Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso	
		S 4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	T 6.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Demokrasi dan Kebudayaan
		S 3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	T 6.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Demokrasi dan Kebudayaan
		S 6.1.2	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S 6.1.1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S 6.1.2	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S 2.1.2	Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak
		S 3.1.2	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S 3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S 7.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah
		S 7.1.1	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S 7.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	T 7.1.	Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman
		S 7.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah



Sasaran RPJMN		Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Poso	
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S 7.1.3	Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S 7.1.4	Menurunya Desa Blankspot koneksi internet
		S 4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	T 6.2	Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup
		S 7.1.5	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S 1.1.2	Meningkatnya ketangguhan Desa dalam menghadapi bencana
		S 6.2.1	Meningkatnya kemampuan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana
S23	Pembangunan Rendah Karbon	T 6.2	Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup
		S 7.1.5	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	T 6.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Demokrasi
		S 6.1.1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
		T 5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel
		S 5.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah

Sumber : Hasil Analisis dan Pengolahan, 2021

#### **5.4 Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kabupaten Poso 2021-2026**

Prioritas pembangunan daerah dan Program Unggulan merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang dicanankan dan akan dilaksanakan selama masa jabatan. Program Unggulan daerah memiliki





peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. 7 (Tujuh) Program Unggulan Kabupaten Poso tahun 2021-2026, meliputi:

- 1) **Membangun Dari Desa**
- 2) **Penyelenggran Kesehatan Gratis**
- 3) **Penyelenggaraan Pendidikan Gratis**
- 4) **Mempersiapkan 500 UMKM Bangkit Mandiri**
- 5) **Program Bunga Desa**
- 6) **Bantuan rumah Ibadah, Imam, Pendeta, Mangku, Lembaga Adat, Lansia dan Santunan Duka.**
- 7) **Penyediaan Wifi Gratis**



**Gambar 5.1**  
**Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Poso**  
**Tahun 2021-2026**

7 (Tujuh) Program Unggulan Kabupaten Poso tahun 2021-2026, diformulasikan dalam Prioritas pembangunan daerah yang akan menghasilkan transformasi pembangunan menuju Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah. Arah Prioritas pembangunan Kabupaten Poso harus sejalan dengan Arah Prioritas nasional merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga 7 (Tujuh) Program Unggulan Kabupaten Poso tahun 2021-2026 sebagai janji Politik di formulasikan dalam Prioritas pembangunan daerah agar sejalan dan selaras dan disandingkan dengan Prioritas Nasional, selain



untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Prioritas Kabupaten Poso (PP) tahun 2021-2026 sebagai formulasi atas Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

<b>PP 1</b>	Peningkatan Pelayanan dan Pemulihan Kesehatan Pandemi Covid-19
<b>PP 2</b>	Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Secara Inklusif
<b>PP 3</b>	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Sektor UMKM, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata
<b>PP 4</b>	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dari Desa dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
<b>PP 5</b>	Percepatan reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik
<b>PP 6</b>	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Toleransi Masyarakat
<b>PP 7</b>	Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup

### **5.5 Penyeragaman Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kabupaten Poso 2021-2026 dengan Prioritas Nasional tahun 2020-2024.**

Sembilan agenda Prioritas Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 disandingkan dengan Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan Rencana Kerja tahunan. Hasil persandingan prioritas nasional (PN) dan Prioritas Poso (PP), dapat terlihat pada seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Poso yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.



**Tabel 5.5  
Persandingan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dengan  
Prioritas Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

<b>Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)</b>		<b>Agenda Prioritas Kabupaten Poso</b>	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 3	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Sektor UMKM, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 4	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dari Desa dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1	Peningkatan Pelayanan dan Pemulihan Kesehatan Pandemi Covid-19
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 6	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Toleransi Masyarakat
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 4	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dari Desa dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP 7	Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 5	Percepatan reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik
		PP 6	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Toleransi Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis dan Pengolahan, 2021



## **5.6 Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 dirancangan Berdasarkan kondisi saat disusunnya dokumen tersebut, tantangan yang akan dihadapi tahun yang akan datang serta memperhatikan potensi yang dimiliki maka visi Kabupaten Poso tahun 2005-2025 adalah :

***“Kabupaten Poso Yang Aman, Damai, Sejahtera,  
Maju, Dan Berdaya Saing ”***

Misi RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2026, merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasionalnya sehingga tidak menyimpang dari visi. Untuk mewujudkan visi yang ada, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan Poso Yang Aman, Damai dan Sejahtera.*
2. *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;*
3. *Mewujudkan Masyarakat dan Mutu Produk Yang Berdaya Saing;*
4. *Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;*
5. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Penegakkan Hukum dan HAM;*
6. *Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia.*

Misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, di samping sebagai penjabaran Tujuan, Sasaran, Tahapan, Arah Kebijakan dalam pencapaian Visi, harus pula menjadi bagian dari arah, kebijakan dan tahapan dalam pencapaian Visi Misi RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025. Sehingga rumusan Misi RPJMD harus disandingkan dengan Misi RPJPD sebagaimana berikut.

**Tabel 5.6**

### **Keselarasn Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJPD 2005-2025**

<b>MISI RPJPD POSO 2005-2025</b>	<b>MISI RPJMD 2021-2026</b>
MISI PERTAMA : Mewujudkan Poso Yang Aman, Damai dan Sejahtera.	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.



<b>MISI RPJPD POSO 2005-2025</b>	<b>MISI RPJMD 2021-2026</b>
<p>MISI KEDUA : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;</p>	<p>MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.</p> <p>MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.</p> <p>MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</p>
<p>MISI KETIGA : Mewujudkan Masyarakat dan Mutu Produk Yang Berdaya Saing;</p>	<p>MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.</p> <p>MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.</p>
<p>MISI KE-EMPAT Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;</p>	<p>MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.</p>
<p>MISI KE-LIMA : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Penegakkan Hukum dan HAM;</p>	<p>MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.</p>
<p>MISI KE-ENAM :</p>	<p>MISI KEDUA :</p>





<b>MISI RPJPD POSO 2005-2025</b>	<b>MISI RPJMD 2021-2026</b>
Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia.	Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat  MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar

Sumber : RPJPD 2005-2025, diolah

### **5.7 Keselarasan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.**

RPJMD Kabupaten Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 juga menjadi bagian dari pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga antara perencanaan pembangunan Kabupaten Poso dengan perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi keselarasan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dengan mengedepankan penyelarasan Visi Misi, prioritas-prioritas; sasaran program yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu:

#### ***“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”***

Adapun Misi didalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- 2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
- 3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
- 4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- 5) Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
- 6) Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
- 7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.



- 8) Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
- 9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

**Tabel 5.7**

**Keselarasan Misi RPJMD Poso 2021–2026 dan Misi RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

<b>MISI RPJMD SULTENG TAHUN 2021-2026</b>	<b>MISI RPJMD POSO 2021–2026</b>
MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	MISI KEDUA : Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat  MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar
MISI KEDUA : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.
MISI KETIGA : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
MISI KE-EMPAT Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan</b> dan merata di seluruh wilayah
MISI KE-LIMA : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan <b>merata</b> di seluruh wilayah



<b>MISI RPJMD SULTENG TAHUN 2021-2026</b>	<b>MISI RPJMD POSO 2021-2026</b>
MISI KE-ENAM : Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
MISI KE-TUJUH : Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.  MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
MISI KE-DELAPAN : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.	MISI KEDUA : Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat  MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.
MISI KE-SEMBILAN : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.

Sumber : Visi Misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2024, diolah Kembali 2021.

### **5.8 Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.**

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa Gubernur akan bersama-sama dengan para Bupati/Walikota dalam pelaksanaan TPB/SDG's yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kabupaten Poso berkomitmen melaksanakan TPB/SDG's dalam upaya transformasi peradaban global dan nasional yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDG's tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia, Provinsi Sulawesi tengah dan Kabupaten Poso yang terefleksi dari sinergitas antara Program prioritas daerah dengan



SDG's, namun juga merupakan wujud kontribusi Kabupaten Poso bagi pencapaian SDG's Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, TPB/SDG's juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerjasama yang menjadikan Kabupaten Poso yang Maju, Tangguh dan Terdepan yang didukung sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

Didalam penyusunan RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 memperhatikan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disinergikan dengan Pencapaian Visi Misi RPJMD, agar selaras dan sejalan sehingga pencapaian Target Tujuan dan sasaran RPJMD juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada periode 2021-2026. Adapun penyelarasan dari Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Misi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Keselarasan Misi RPJMD Poso 2021-2026 dan**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

No.	Tujuan Pemebangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
3	Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	MISI KEDUA : Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	<b>Tujuan Pemebangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)</b>	<b>MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026</b>
		Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Tujuan Pemebangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan	MISI KELIMA :



No.	Tujuan Pemebangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
	dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.

Sumber : Perpres No. 59 Thn 2017, diolah Kembali 2021.

### 5.9 Keselarasan SDGs Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebut **Sustainable Development Goals** disingkat **SDGs**. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut. Jadi SDGs Desa Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dengan 17 Tujuan sementara SDGs Desa berisi 18 Tujuan pembangunan.

Didalam penyusunan RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 memperhatikan implemmentasi SDGs Desa yang disinergikan dengan Pencapaian Visi Misi RPJMD, agar selaras dan sejalan. Adapun penyelarasan SDGs Desa sebagai turunan dari Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dengan Misi RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Keselarasn Misi RPJMD Poso 2021-2026**  
**dan SDGs Desa**

No.	SDG's Desa	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
1	Desa tanpa kemiskinan	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
2	Desa tanpa kelaparan	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	SDG's Desa	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
		Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
3	Desa sehat dan sejahtera	MISI KEDUA : Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat
4	Pendidikan desa berkualitas	MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar
5	Desa berkesetaraan gender	MISI KETIGA : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
7	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
8	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
9	Inovasi dan infrastruktur desa	MISI KETUJUH :



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	SDG's Desa	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
		Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan <b>Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>
10	Desa tanpa kesenjangan	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.
11	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	MISI KETUJUH : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah
12	Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan	MISI PERTAMA : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.  MISI KEEMPAT : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.
13	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
14	Ekosistem laut desa	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
15	Ekosistem daratan desa	MISI KEENAM :



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	SDG's Desa	MISI RPJMD KAB. POSO 2021-2026
		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
16	Desa damai dan berkeadilan	MISI KEENAM : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai.
17	Kemitraan untuk pembangunan desa	MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.
18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	MISI KELIMA : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.

Sumber : Permendes PDTT No. 13 Thn 2020, diolah Kembali 2021.



# BAB 6

# RPJMD



## STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan Permasalahan dan Isu-isu strategis yang telah dirumuskan dan dikemukakan pada Bab IV sebelumnya, dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V. Selanjutnya dirumuskan formulasi strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah untuk selama 5 (lima) tahun 2021-2026.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang diperjelas dan dipertajam dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplemen-tasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai kinerja strategis dalam bentuk upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.



Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026, agar visi dan misi yang sudah diuraikan secara lebih tajam dan jelas dalam tujuan dan sasaran dapat dicapai. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dirumuskan dalam RPJMD secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, serta berpedoman pada Prioritas Nasional dalam RPJM nasional tahun 2020-2024. Demikian juga strategi dan arah kebijakan perangkat daerah juga dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga terkait. Dalam kerangka tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks Rancangan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, maka rumusan strategi harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Poso untuk menciptakan output dan outcome bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Strategi harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama, indikator keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu juga untuk menciptakan budaya berpikir strategis untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan daerah merupakan penerjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam rencana kerja strategis yang dapat dioperasionalkan. Hal-hal strategis mencakup segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan. Pendekatan komprehensif digunakan dalam langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi harus berbasis pada kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan, searah dengan target



pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RPJMNas tahun 2020-2024 dan sejalan pula dengan target indikator makro Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Selain itu, perlu dijelaskan secara eksplisit bagaimana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui berbagai program prioritas indikatif. Selanjutnya, perlunya dirumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan gambaran riil atas langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah mengarahkan langkah dan waktu pencapaian indikator masing-masing sasaran dan sekaligus memberi pedoman rentang waktu pelaksanaan suatu strategi dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai periodisasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Poso sesuai dengan Surat Edaran Nomor 640/16/SJ tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2020 ayat 3 dimana periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan, dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 juga harus selaras dengan periode perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025. Berdasarkan dokumen RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dengan **Visi** yaitu “**Kabupaten Poso Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**”. Pada periode keempat RPJPD Kabupaten Poso pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan:

- Mewujudkan Kabupaten Poso yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- Perekonomian berkembang melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri
- Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas menjadi tonggak utama bagi terwujudnya Poso yang maju dan mandiri.
- Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal
- Pengelolaan wilayah daratan dan lembah yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu

menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional.

- Terciptanya masyarakat Kabupaten Poso yang melek informasi teknologi sehingga bermanfaat dalam membangun kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM dan optimalisasi pelayanan pemerintah berbasis Informasi teknologi (IT).

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran.

## **6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Poso yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantapan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam memegang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dalam percepatan mewujudkan strategi pelayanan Pakaroso. Pakaroso dalam bahasa Pamona—suku mendiami wilayah Poso, berarti menguatkan, dimana pelayanan didedikasikan untuk bersama-sama saling menguatkan dalam simpul toleransi dan menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitas akan terwujud, jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai, dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya dan memperhatikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Poso antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Mengkaji janji politik Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye;
4. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
5. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
6. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
7. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Poso yaitu:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan berbasis Misi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Mengkaji janji politik Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye sebagai prioritas dan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang;
4. Rumusan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam proses menentukan peran Pemerintah Daerah; dan
5. Strategi terdiri dari Narasi yang secara simultan saling melengkapi membentuk implementasi pencapaian Indikator kinerja yang ditetapkan dalam skenario strategi.

Metode ini digunakan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Poso. Analisis SWOT terdiri atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) sebagai metode dalam merumuskan dan melahirkan konsep strategi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kelemahan. Input utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Maka, selanjutnya isu-isu strategis tersebut dikelompokkan ke



dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Strategi untuk meminimalkan kelemahan (W) dengan memanfaatkan kesempatan (O) atau strategi WO. Berdasarkan analisis di atas, strategi dan Arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Poso untuk periode pembangunan 2021-2026 secara terperinci adalah sebagai berikut:

#### **Misi I: DESA MAJU**

***Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.***

- **Tujuan :**

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

- **Sasaran :**

- a) Meningkatnya Status Desa

- **Strategi :**

- 1) Optimalisasi Pengelolaan sumberdaya Alam berbasis Desa Menuju Desa Maju;
- 2) Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian Tujuan SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan Poso berbasis desa;
- 3) Memajukan Desa melalui Perbaikan Tatakelola Pemerintahan desa yang akuntabel, Transparan, Inovatif.

- **Arah Kebijakan**

- a) Mengembangkan Komoditas Unggulan Dan Potensi Desa berbasis IT;
- b) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa serta Prioritas Daerah;
- c) Percepatan Pembentukan Bumdes Inovatif dalam memperkuat Kelembagaan Ekonomi Desa dan Mitra Petani;
- d) Meningkatkan SDM Di Desa Melalui Pengembangan Pelatihan, pendampingan berkelanjutan.

#### **Misi II: POSO SEHAT**

***Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat.***

- **Tujuan:**

1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso.



- **Sasaran:**

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan;
- b) Meningkatkan kualitas tumbuh dan berkembangnya anak.

- **Strategi :**

- 1) Peningkatan Kesejahteraan melalui penyelenggaraan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Poso;
- 2) Meningkatkan upaya memutus mata rantai penularan penyakit menular;
- 3) Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan;
- 4) Meningkatkan kualitas tumbuh dan berkembangnya anak;
- 5) Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal.

- **Arah Kebijakan :**

- a) Penyelenggaran Kesehatan Gratis melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Seluruh Puskesmas Di Kabupaten Poso dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Meminimalkan Perkembangan penularan Covid-19 dan Prevalensi Penyakit Scistosomiasis Di Daerah Pandemi serta penyakit menular lainnya;
- c) Penyediaan Layanan Kesehatan Keliling (Mobile Health) Untuk Daerah Terpencil Dan Terjauh;
- d) Meningkatkan Akreditasi Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah
- e) Menurunkan Angka Penyakit, Kematian Ibu Hamil Dan Balita;
- f) Meningkatkan jumlah SDM Dokter, Perawat Dan Tenaga Medis Lainnya;
- g) Penurunan Angka Stanting Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Kabupaten Poso Bebas Gizi Buruk;
- h) Memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan;
- i) Peningkatan status Perempuan Sehat (Bumil Dan Balita, Lansia Sehat, Korban Kekerasan Terhadap Perempuan).

**Misi III: POSO PINTAR**

***Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas Dan Inklusif Menuju Poso Pintar.***

- **Tujuan:**

1. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar.



- **Sasaran:**
  - a) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Berdaya Saing.
  - b) Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah
  
- **Strategi :**
  - 1) Peningkatan mutu dan layanan pendidikan Gratis menuju Poso Pintar
  - 2) Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan;
  - 3) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan Pengendalian Penduduk.
  
- **Arah Kebijakan :**
  - a) Mewujudkan Poso Pintar melalui penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Sekolah Zona Bebas Pungutan (SD/SMP);
  - b) Peningkatan Dan Pemantapan Program Wajib Belajar 9 Tahun;
  - c) Peningkatan Kecukupan Ruang Belajar, Laboratorium Dan Perpustakaan Di Seluruh Wilayah Kabupaten Poso;
  - d) Pemerataan Tenaga Guru Terutama Pada Daerah Terpencil Dan Terjauh;
  - e) Meningkatkan Kompetensi Guru SD dan SMP ;
  - f) Kerjasama Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kualitas Pendidikan SMA dan Mengembangkan Pendidikan Vokasi;
  - g) Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu;
  - h) Mengembangkan Pendidikan Harmoni Di Kabupaten Poso;
  - i) Peningkatan kemandirian Perempuan melalui Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha keluarga;
  - j) Peningkatan upaya pengendalian Penduduk dan optimalisasi Program KB.

#### **Misi IV: POSO SEJAHTERA**

***Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal.***

- **Tujuan:**
  1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas
  2. Menurunkan Penduduk Miskin.
  
- **Sasaran:**
  - a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah.
  - b) Menurunnya disparitas ekonomi.



- c) Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso.
- d) Terbukanya lapangan pekerjaan.
- e) Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan.

- **Strategi :**

- 1) Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi /produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan perikanan serta Pariwisata sebagai potensi unggulan Poso.
- 2) Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya ekonomi daerah;
- 3) Menekan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan usaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi;
- 4) Membangun Iklim usaha Kondusif bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 5) Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS;
- 6) Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja;
- 7) Meningkatkan Nilai Tambah Produk pertanian.

- **Arah Kebijakan :**

- a) Optimalisasi produktivitas perikanan dan kelautan Peningkatan Ekonomi Nelayan Dan Perikanan Darat;
- b) Mewujudkan Kabupaten Poso Sebagai Lumbung Ternak;
- c) Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah Tampo Lore;
- d) Mengembangkan Sektor pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal Berbasis Sumber Daya Alam, Agrowisata Di Wilayah Pamona Bersaudara Dan Lore Bersaudara;
- e) Pengembangan Dan Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah;
- f) Menjembatani Program CSR Swasta Untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- g) Mengoptimalkan Pelayanan Investasi Sektor Unggulan Daerah;
- h) Meningkatkan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
- i) Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat;
- j) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar rakyat serta perlindungan konsumen;
- k) Penataan Kelembagaan Perusahaan Daerah Untuk Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah;

- l) Percepatan pengentasan kemiskinan dan Bantuan bagi PMKS;
- m) Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak terlantar dan Fakir Miskin;
- n) Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- o) Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
- p) Koordinasi Provinsi Mengembangkan Pendidikan Vokasi dan Pemanfaatan Balai Latihan Kerja Daerah Dan Sekolah-Sekolah Lapang;
- q) Menyiapkan 100-500 UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Bangkit;
- r) Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi dan membangun pola kemitraan.

#### **Misi V: POSO PAKAROSO**

***Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.***

**- Tujuan:**

1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel.

**- Sasaran:**

- a) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.
- b) Meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**- Strategi :**

- 1) Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima;
- 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan penjenjangan karir fungsional;
- 3) Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**- Arah Kebijakan :**

- a) Meningkatkan Disiplin Dan Budaya Kerja ASN yang professional;
- b) Program Bunga Desa melalui Peningkatan Layanan Publik yang cepat, Mudah, Terjangkau dan transparan diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
- c) Mengoptimalakan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan bebas biaya;



- d) Megoptimalkan pelayanan Perpustakaan dan kearsipan daerah;
- e) Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN dibidang perencanaan dan penganggaran;
- f) Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan
- g) Megoptimalkan pengelolaan satu data Poso berbasis Informasi teknologi
- h) Optimalisasi Persandian daerah
- i) Meningkatkan intensitas, profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah
- j) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- k) Intensifikasi, ekstensifikasi dan Inovasi didalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- l) Harmonisasi Hubungan Eksekutif dan Legislatif.

#### **Misi VI: POSO HARMONI DAN TANGGUH**

***Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran, dan damai.***

- **Tujuan:**

- 1. Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
- 2. Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana

- **Sasaran:**

- a) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
- b) Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
- c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana

- **Strategi :**

- 1) Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum;
- 2) Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Poso;
- 3) Peningkatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama;
- 4) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
- 5) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- **Arah Kebijakan :**

- a) Meningkatkan Penegakan regulasi ketertiban Umum;
- b) Mengoptimalkan Peran Serta Forum Komunikasi Umat Beragama, Deklarator Malino Sebagai Wadah Pencegahan Dini Adanya Potensi Konflik Sosial Di Masyarakat;
- c) Memupuk harmoni dan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan Peran serta Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial Dalam Menumbuh-Kembangkan Kehidupan Yang Toleran Dan Damai Di Masyarakat;
- d) Memberikan dukungan Insentif Kepada Imam Masjid, Pendeta Gereja, Pastor, Mangku, Ketua-Ketua Adat;
- e) Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda;
- f) Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

**Misi VII: POSO BERSINAR DAN TERDEPAN**

***Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah.***

- **Tujuan:**

1. Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang merata

- **Sasaran:**

- a) Meningkatkan respon dan layanan kebakaran kabupaten.
- b) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah.
- c) Menurunkan Desa Blankspot koneksi internet.
- d) Meningkatkan layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota.

- **Strategi :**

- 1) Menata tataruang kota poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman;
- 2) Mengoptimalkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
- 3) Pemertaan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Meningkatkan akses listrik rumah tangga melalui subsidi rumahtangga miskin;

- 5) Optimalisasi Dana Desa mengentaskan Desa Blankspot koneksi internet;
- 6) Meningkatkan layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota secara berkelanjutan.

- **Arah Kebijakan :**

- a) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang indah dan bersih;
- b) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- c) Rehabilitasi Dan Pembangunan Infrastruktur Dasar drainase, jalan dan jembatan;
- d) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar jaringan air bersih dan Irigasi tehnis;
- e) Meningkatkan akses listrik rumah tangga pada wilayah terpencil dan tertinggal;
- f) Penyediaan Layanan Komunikasi Dan Informasi (Jaringan Wi Fl) Pada Area-Area Blank Spot;
- g) Mengembangkan Dan Meningkatkan Tata Bangunan Dan Lingkungan Serta Sanitasi Kota Yang Bersih, Indah Dan Asri.
- h) Membangun Taman Pintar Yang Mudah Diakses Oleh Publik serta Tersedia Akses Informasi Yang Memadai Di Ruang-Ruang Terbuka.
- i) Menjadikan Kota Poso Sebagai Pusat Kuliner.

Merujuk Misi Pembangunan yang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran disertai rumusan Strategi dan Arah kebijakan pembangunan di atas maka disampaikan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1**

**Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
<b>MISI 1 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju</b>								
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	1,1	Meningkatnya Status Desa	1.1.1	Optimalisasi Pengelolaan sumberdaya Alam berbasis Desa Menuju Desa Maju	1.1.1.1	Mengembangkan Komoditas Unggulan Dan Potensi Desa berbasis IT	Diskominfo, Desa dan kecamatan
				1.1.2	Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian Tujuan SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan Poso berbasis desa	1.1.2.1	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa serta Prioritas Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.1.3	Memajukan Desa melalui Perbaikan Tatakelola Pemerintahan desa	1.1.3.1	Percepatan Pembentukan Bumdes Inovatif dalam memperkuat Kelembagaan	



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
					yang akuntabel, Transparan, Inovatif.		Ekonomi Desa dan Mitra Petani	
						1.1.3.2	Meningkatkan SDM Di Desa Melalui Pengembangan Pelatihan, pendampingan berkelanjutan	
<b>MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat</b>								
2	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso	2,1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	2.1.1	Peningkatan Kesejahteraan melalui penyelenggaraan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Poso	2.1.1.1	Penyelenggaraan Kesehatan Gratis melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Seluruh Puskesmas Di Kabupaten Poso dan Rumah Sakit Umum Daerah.	Dinkes, RS dan Puskesmas
				2.1.2	Meningkatkan upaya memutus mata rantai penularan penyakit menular.	2.1.2.1	Meminimalkan Perkembangan penularan Covid-19 dan Prevalensi Penyakit Scistosomiasis Di Daerah Pandemi serta penyakit menular lainnya	Sekretariat Daerah, Dinkes, BPBD





Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD	
				2.1.3	Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan	2.1.3.1	Penyediaan Layanan Kesehatan Keliling ( <i>Mobile Health</i> ) Untuk Daerah Terpencil Dan Terjauh	Dinkes, RSUD dan Puskesmas	
						2.1.3.2	Meningkatkan Akreditasi Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah		
						2.1.3.3	Menurunkan Angka Penyakit, Kematian Ibu Hamil Dan Balita		
						2.1.3.4	Meningkatkan jumlah SDM Dokter, Perawat Dan Tenaga Medis Lainnya		
		2,2	Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak		2.2.1	Meningkatkan kualitas tumbuh dan berkembangnya anak	2.2.1.1	Penurunan Angka Stunting Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Kabupaten Poso Bebas Gizi Buruk	Dinkes, RSUD dan Puskesmas
							2.2.2	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal	
							2.2.2.1	Memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan	Dinkes, RSUD dan Puskesmas,
							2.2.2.2	Peningkatan status Perempuan Sehat	



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
						(Bumil Dan Balita, Lansia Sehat, Korban Kekerasan Terhadap Perempuan)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>MISI 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar</b>								
3	Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar	3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing	3.1.1	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan Gratis menuju Poso Pintar	3.1.1.1	Mewujudkan Poso Pintar melalui penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Sekolah Zona Bebas Pungutan (SD/SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3.1.1.2		Peningkatan Dan Pemantapan Program Wajib Belajar 9 Tahun		
				3.1.2	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan	3.1.2.1	Peningkatan Kecukupan Ruang Belajar, Laboratorium Dan Perpustakaan Di Seluruh Wilayah Kabupaten Poso	Dikbud, Perpustakaan
						3.1.2.2	Pemerataan Tenaga Guru Terutama Pada Daerah Terpencil Dan Terjauh	



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
						3.1.2.3	Meningkatkan Kompetensi Guru SD dan SMP	
						3.1.2.4	Kerjasama Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kualitas Pendidikan SMA dan Mengembangkan Pendidikan Vokasi	
						3.1.2.5	Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Kurang Mampu	
						3.1.2.6	Mengembangkan Pendidikan Harmoni Di Kabupaten Poso	
		3,2	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah	3.2.1	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan Pengendalian Penduduk	3.2.1.1	Peningkatan kemandirian Perempuan melalui Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
						3.2.1.2	Peningkatan upaya pengendalian Penduduk dan optimalisasi Program KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
<b>MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal.</b>								
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas	4,1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah	4.1.1	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan perikanan serta Pariwisata sebagai potensi unggulan Poso	4.1.1.1	Optimalisasi produktivitas perikanan dan kelautan Peningkatan Ekonomi Nelayan Dan Perikanan Darat	Dinas Perikanan dan Kelautan
						4.1.1.2	Mewujudkan Kabupaten Poso Sebagai Lumbung Ternak	Dinas Pertanian
						4.1.1.3	Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah Tampo Lore	Dinas Pertanian
				4.1.2	Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya ekonomi daerah	4.1.2.1	Mengembangkan Sektor pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal Berbasis Sumber Daya Alam, Agrowisata Di Wilayah Pamona	DPMPTSP, Dinas Pariwisata



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
							Bersaudara Dan Lore Bersaudara	
						4.1.2.2	Pengembangan Dan Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah	Pariwisata
						4.1.2.3	Menjembatani Program CSR Swasta Untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	DPMPTSP dan Swasta
						4.1.2.4	Mengoptimalkan Pelayanan Investasi Sektor Unggulan Daerah	DPMPTSP
		4,2	Menurunnya disparitas ekonomi	4.2.1	Menekan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan usaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi	4.2.1.1	Meningkatkan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Perindustrian
						4.2.1.2	Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan





Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
		4,3	Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso	4.3.1	Membangun Iklim usaha Kondusif bagi peningkatan pendapatan masyarakat	4.3.1.1	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar rakyat serta perlindungan konsumen.	
						4.3.1.2	Penataan Kelembagaan Perusahaan Daerah Untuk Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah	BUMD
4.b	Menurunnya penduduk miskin	4b.1	Terbukanya lapangan pekerjaan	4b.1.1	Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS	4b.1.1.1	Percepatan pengentasan kemiskinan dan Bantuan bagi PMKS	Dinas Sosial
						4b.1.1.2	Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak terlantar dan Fakir Miskin	Dinas Sosial
						4b.1.1.3	Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni bagi	PU dan Perumahan



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
							masyarakat miskin dan tidak mampu	
				4b.2.1	Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja	4b.2.1.1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas tenaga Kerja
						4b.2.1.2	Koordinasi Provinsi Mengembangkan Pendidikan Vokasi dan Pemanfaatan Balai Latihan Kerja Daerah Dan Sekolah-Sekolah Lapang	
						4b.2.1.3	Menyiapkan 100-500 UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Bangkit	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
		4b.3	Meningkatnya kesejahteraan Petani	4b.3	Meningkatkan Nilai Tambah Produk pertanian	4b.3.1.1	Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi dan membangun pola kemitraan	Pertanian



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
<b>MISI 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel</b>								
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel	5,1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	5.1.1	Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima	5.1.1.1	Meningkatkan Disiplin Dan Budaya Kerja ASN yang profesional	Sekda dan BKD
						5.1.1.2	Program Bunga Desa melalui Peningkatan Layanan Publik yang cepat, Mudah, Terjangkau dan transparan diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kominfo dan Kecamatan
						5.1.1.3	Mengoptimalakan pelayanan administrasi Kependudukan secara cepat dan bebas biaya	Dukcapil dan Kecamatan
						5.1.1.4	Megoptimalkan pelayanan Kepustakaan dan kearsipan daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>URUSAN/ OPD</b>			
	5,2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	5.2.1	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan penjurangan karir fungsional	5.2.1.1	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN dibidang perencanaan dan penganggaran	Bapelitbangda dan Pendapatan
			5.2.2	Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	5.2.2.1	Peningkatan Kinerja pembangunan daerah dan Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan	Bapelitbangda dan Inspektorat
					5.2.2.2	Mengoptimalkan pengelolaan satu data Poso berbasis Informasi teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
					5.2.2.3	Optimalisasi Persandian daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
					5.2.2.4	Meningkatkan intensitas , profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah	Sekda dan BKD



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
		5,3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.3.1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.3.1.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	BKAD dan Inspektorat
						5.3.1.2	Intensifikasi, ekstensifikasi dan Inovasi didalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bapenda
						5.3.1.3	Harmonisasi Hubungan Eksekutif dan Legislatif.	Sekretaris Dewan
<b>MISI 6 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai</b>								
6	Terbangunnya kesadaran politik dan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	6,1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	6.1.1	Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum	6.6.1.1	Meningkatkan Penegakan regulasi ketertiban Umum	Satpol PP
				6.1.2	Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Poso	6.6.2.1	Mengoptimalkan Peran Serta Forum Komunikasi Umat Beragama, Deklarator Malino Sebagai Wadah Pencegahan Dini Adanya Potensi	Kesbangpol





Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
							Konflik Sosial Di Masyarakat	
		6,2	Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama	6.2.1	Peningkatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama	6.2.1.1	Memupuk harmoni dan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan Peran serta Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial Dalam Menumbuh-Kembangkan Kehidupan Yang Toleran Dan Damai Di Masyarakat	Kesbangpol
						6.2.1.2	Memberikan dukungan Insentif Kepada Imam Masjid, Pendeta Gereja, Pastor, Mangku, Ketua-Ketua Adat	PMD
				6.2.2	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	6.2.2.1	Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda	Pemuda dan Olahraga



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
6.b	Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana	6b.1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana	6b.1.1	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6b.1.1.1	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
				6b.1.2	Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	6b.1.2.1	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Badan Penanggulangan Bancana Daerah
<b>MISI 7 : Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>								
7	Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman	7,1	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	7.1.1	Menata tata ruang kota poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman	7.1.1.1	Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang indah dan bersih	PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perdagangan dan UMKM
				7.1.2	Mengoptimalkan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	7.1.2.1	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
		7,2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas	7.2.1	Pemertaan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur wilayah	7.2.1.1	Rehabilitasi Dan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PUPR



Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
			Transportasi antar wilayah				drainase, jalan dan jembatan	
						7.2.1.2	Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar jaringan air bersih dan Irigasi tehnis	PUPR
		7,3	Meningkatnya akses listrik terhadap rumah tangga	7.3.1	Meningkatkan akses listrik rumah tangga melalui subsidi rumahtangga miskin	7.3.1.1	Meningkatkan akses listrik rumah tangga pada wilayah terpencil dan tertinggal	PUPR
		7,4	Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet	7.4.1	Optimalisasi Dana Desa mengentaskan Desa Blankspot koneksi internet	7.4.1.1	Penyediaan Layanan Komunikasi Dan Informasi (Jaringan Wi Fl) Pada Area-Area Blank Spot.	Kominfo
		7,5	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota	7.5.1	Meningkatkan layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota secara berkelanjutan	7.5.1.1	Mengembangkan Dan Meningkatkan Tata Bangunan Dan Lingkungan Serta Sanitasi Kota Yang Bersih, Indah Dan Asri.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
						7.5.1.2	Membangun Taman Pintar Yang Mudah Diakses Oleh Publik serta Tersedia Akses Informasi Yang	LH dan Tataruang



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan		Sasaran		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		URUSAN/ OPD
							Memadai Di Ruang-Ruang Terbuka	
						7.5.1.3	Menjadikan Kota Poso Sebagai Pusat Kuliner	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Sumber : Pengolahan Strategi dan Arah Kebijakan, sejalan janji Politik Bupati/Wkl.Bupati, 2021



## **6.2 TEMA PEMBANGUNAN**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025.

Analisis terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Poso bertujuan untuk merencanakan pembangunan lima tahunan ke IV dengan jangka waktu 2020-2025. Berdasarkan dokumen RPJPD pada periode RPJMD IV, *Kabupaten Poso ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif regional, nasional dan internasional.*

Perekonomian berkembang dengan baik melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. Hal ini ditunjang oleh jaringan pasar yang kuat dan stabil, serta partisipasi masyarakat Poso yang tinggi dalam dunia usaha, produksi dan jasa. Sistem perekonomian yang berjalan mampu menciptakan persaingan yang sehat dan produktif, serta mampu berjalan dengan adil dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi salah satu tonggak utama bagi terwujudnya Kabupaten Poso yang maju dan mandiri. Kualitas pendidikan yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, jasa dan produksi dan angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan dapat terserap secara maksimal dalam seluruh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini adalah hasil dari usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya dan juga mengikuti trend global dunia usaha dan persaingan angkatan kerja yang kian ketat dan menuntut kualifikasi yang makin tinggi dan ketrampilan yang lebih profesional.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dan eksploitasi sumber daya yang tidak terbaharukan mampu menjadi penyangga utama perekonomian Kabupaten Poso diluar pajak dan retri-busi lainnya, sehingga terwujud kemandirian ekonomi di Kabupaten Poso. Konsep pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut didasari oleh adanya analisis multikriteria kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga tercipta keseimbangan pemanfaatan dan kesinambungan dalam hal ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

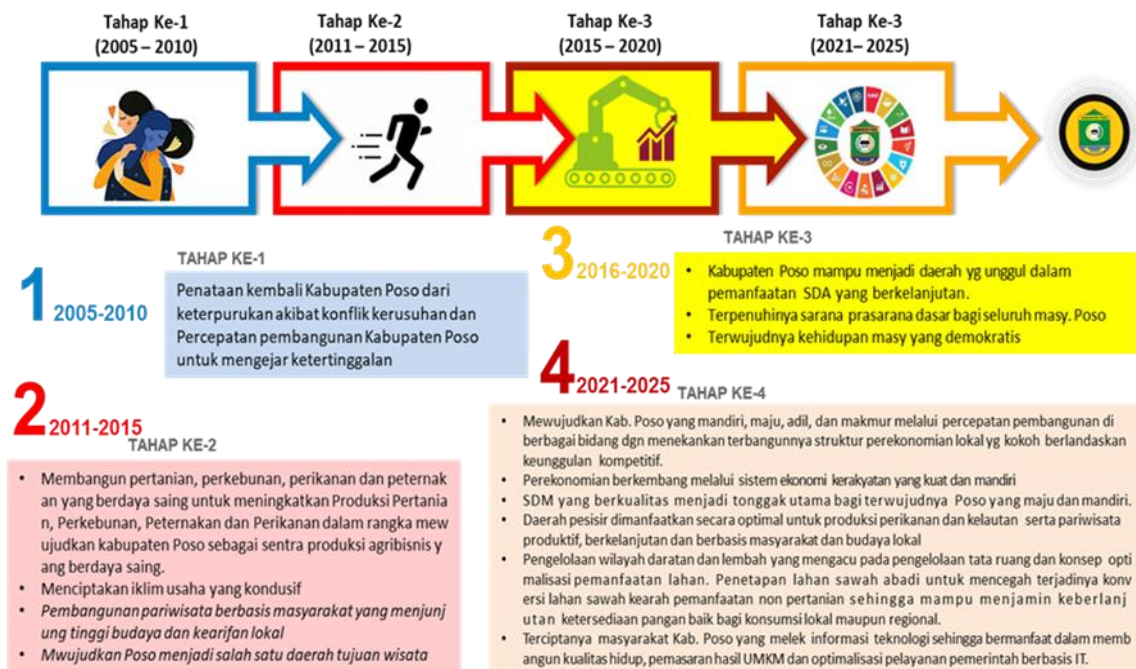
Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata yang produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal. Demikian juga dengan pengelolaan wilayah daratan yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi



pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional.

Antisipasi terhadap pengembangan wilayah pemukiman tidak lagi memanfaatkan lahan sawah tetapi terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten, integritas ekologi, topografi dan infrastruktur, sehingga tercipta keteraturan wilayah pemukiman dan kemudahan bagi instalasi komponen infrastruktur dan kemudahan akses dan keindahan serta kerapian wilayah permukiman.

Terciptanya masyarakat Kabupaten Poso yang sadar/melek informasi teknologi sehingga bermanfaat bagi kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM dan berpartisipasi aktif dalam percaturan ekonomi regional dan global yang bergerak kian cepat serta Pelayanan Pemerintahan berbasis teknologi informasi. Hal ini didukung dengan tersedianya infrastruktur dan pelayanan jasa teknologi informasi yang mendukung pelayanan yang cepat dan profesional dibidang produksi dan distribusi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain yang pada gilirannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Poso sendiri. Terciptanya Kabupaten Poso yang maju dan modern dalam koridor ketahanan budaya lokal yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**Gambar 6.1**  
**Tahapan dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Poso**  
**Tahun 2005-2025**

Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Kabupaten Poso yang Mandiri, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian local yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Poso, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan periode 2021-2026 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.



**Gambar 6.2**

**Tema/Fokus Tahunan RPJMD Kabupaten Poso Periode 2021-2026**

**6.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN**

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dirancang dan dipetakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan Program utama ini dinamakan **Program Prioritas** yang langsung ditujukan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel berikut.



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 6.2  
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif  
Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian												OPD Penang- gung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
<b>Misi 1 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju</b>																		
	<b>Tujuan 1.1</b>																	
	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	0,6356	0,6556	0,6756	0,6956	0,7156	0,7356	0,7556	0,7556	0,7556	0,7556	0,7556	0,7556	0,7556			
	Sasaran 1.1.1																	
	Meningkatnya Status Desa	Desa Maju (%)	9,86	11,27	12,68	14,08	15,49	16,20	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61			
		Desa Berkembang (%)	70,42	73,94	76,76	78,17	79,58	80,99	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)	11,00%	13,00%	27,67	15,00%	67,70	16,00%	69,05	18,00%	70,24	18,00%	72,56	20,00%	74,89	20,00%	402,15	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)	20,42%	20,42%		23,94%	15,00	27,46%	15,30	30,98%	15,56	34,50%	16,08	38,02%	16,59	38,02%	78,53	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Bumdes yang Dibina (%)	21,13%	29,58%	4.526,28	43,66%	3.087,91	57,74%	2.042,81	71,82%	2.083,78	85,90%	2.164,07	99,98%	2.244,36	99,98%	16.440,17	
		Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	2,00%	11,27%		28,17%	0,00	52,81%	0,00	73,94%	0,00	88,02%	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	30,08%	30,08%	171,91	49,59%	414,87	51,90%	285,98	53,00%	291,71	54,40%	302,95	55,20%	314,19	55,20%	1.631,65	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	65,00%	3.520,25	70,00%	3.325,36	80,00%	3.391,55	90,00%	3.449,93	95,00%	3.564,13	100,00%	3.678,32	100,00%	20.703,51	Kecamatan Poso Kota



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	65,00%	4.11464	70,00%	4.112,76	80,00%	4.194,62	90,00%	4.266,84	95,00%	4.408,07	100,00%	4.549,31	100,00%	25.644,37	Kecamatan Poso Kota Utara	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	65,00%	2.809,42	70,00%	2.809,43	80,00%	2.865,35	90,00%	2.914,67	95,00%	3.011,15	100,00%	3.107,63	100,00%	17.517,65	Kecamatan Poso Kota Selatan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6763 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	10,00	Berkembang	10,00	Berkembang	10,00	Maju	10,00	Maju	10,00	Maju	50,00	Kecamatan Lage	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	2,00	2,00	0,00	4,00	5,00	6,00	5,00	8,00	5,00	10,00	5,00	12,00	5,00	12,00	25,008		
		Status Desa Berkembang	13,00	13,00	0,00	12,00	0,00	10,00	0,00	8,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	1,00	1,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6826 (Berkembang)	Berkembang	1.698,52	Berkembang	1.698,52	Berkembang	1.732,33	Maju	1.762,15	Maju	1.820,48	Maju	1.878,81	Maju	0,00	Kecamatan Poso Pesisir	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	4,00	5,00	0,00	6,00	13,00	8,00	13,26	9,00	13,49	10,00	13,93	12,00	14,38	12,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	8,00	8,00	0,00	7,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6376 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Kecamatan Poso Pesisir Selatan	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	1,00	1,00	0,00	2,00	9,79	2,00	9,98	3,00	10,16	4,00	10,49	5,00	10,83	5,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	1,00	1,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6679 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	24,14	Maju	24,94	Maju	25,74	Maju	74,81	Kecamatan Poso Pesisir Utara	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	2,00	3,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	8,00	0,00	8,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	8,00	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6193 (Berkembang)	Berkembang	1.624,88	Berkembang	1.624,88	Berkembang	1.657,22	Berkembang	1.685,75	Berkembang	1.741,55	Maju	1.797,35	Maju	10.131,64	Kecamatan Pamona Utara	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	33,71	2,00	34,29	3,00	35,42	4,00	36,56	4,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6270 (Berkembang)	Berkembang	1.612,86	Berkembang	1.557,86	Berkembang	1.588,87	Maju	1.616,22	Maju	1.669,72	Maju	1.723,22	Maju	9.768,76	Kecamatan Pamona Pusulemba	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	23,07	4,00	23,46	5,00	24,24	6,00	25,02	6,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	8,00	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6520 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	11,43	Maju	11,63	Maju	12,01	Maju	12,40	Maju	47,46	Kecamatan Pamona Timur	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	2,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	8,00	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	13,00	11,00	0,00	9,00	0,00	7,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6113 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	25,36	Maju	25,79	Maju	26,65	Maju	27,50	Maju	105,29	Kecamatan Pamona Tenggara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	12,68	4,00	12,90	5,00	13,32	6,00	13,75	6,00	26,18	
		Status Desa Berkembang	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6619 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	13,16	Maju	13,39	Maju	13,83	Maju	14,27	Maju	54,65	Kecamatan Pamona Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	3,00	4,00	0,00	5,00	0,00	6,00	13,71	7,00	13,94	8,00	14,41	9,00	14,87	9,00	26,18	
		Status Desa Berkembang	9,00	8,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6491 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Kecamatan Pamona Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
		Status Desa Berkembang	6,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6418 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	11,91	Maju	12,12	Maju	12,52	Maju	12,92	Maju	49,47	Kecamatan Lore Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	7,15	5,00	7,27	5,00	7,51	5,00	7,75	5,00	26,18	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Status Desa Berkembang	6,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5978 (Tertinggal)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	9,94	Maju	10,11	Maju	10,44	Maju	10,78	Maju	41,27	Kecamatan Lore Timur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	1,00	5,96	2,00	6,07	3,00	6,27	3,00	6,47	3,00	26,18	
		Status Desa Berkembang	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6419 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	9,41	Maju	9,57	Maju	9,89	Maju	10,21	Maju	39,08	Kecamatan Lore Peore
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	1,00	0,00	2,00	5,65	3,00	5,74	3,00	5,93	3,00	6,12	3,00	34,03	
		Status Desa Berkembang	5,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5922 (Tertinggal)	Tertinggal	0,00	Tertinggal	0,00	Tertinggal	13,24	Berkembang	13,47	Berkembang	13,91	Berkembang	14,36	Berkembang	54,98	Kecamatan Lore Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	-	11,03	-	11,22	-	11,59	-	11,97	-	26,18	
		Status Desa Berkembang	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	7,00	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5983 (Tertinggal)	Tertinggal	0,00	Tertinggal	0,00	Berkembang	6,08	Berkembang	6,19	Berkembang	6,39	Berkembang	6,60	Berkembang	25,26	Kecamatan Lore Selatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	-	10,14	-	10,31	-	10,65	-	10,99	-	26,18		
		Status Desa Berkembang	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	4,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.4594 (Sangat Tertingga l)	Sangat Tertingga l	0,00	Sangat Tertingga l	0,00	Sangat Tertingga l	11,88	Tertingga l	12,08	Tertingga l	12,48	Berke mbang	12,88	Berkem bang	49,32	Kecamatan Lore Barat	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	-	14,25	-	14,50	-	14,98	-	15,46	-	59,19		
		Status Desa Berkembang	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
<b>Misi 2 Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat</b>																			
<b>Tujuan 2.1</b>																			
	<b>Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Poso</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>71,28</b>	<b>71,88</b>		<b>72,51</b>		<b>73,14</b>		<b>73,77</b>		<b>74,40</b>		<b>75,03</b>		<b>75,03</b>			
	<b>Sasaran 2.1.1</b>																		
	<b>Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan</b>	<b>Usia Harapan Hidup</b>	<b>71,18</b>	<b>71,25</b>		<b>71,37</b>		<b>71,49</b>		<b>71,61</b>		<b>71,73</b>		<b>71,85</b>		<b>71,85</b>			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,7/ 1.000 KH	8,7/ 1.000 KH	79,171. 14	7,7/1.00 0 KH	25.560, 61	7,7/1.0 00 KH	26.069,3 6	6,7/1.0 00 KH	26.518, 16	6,7/1.0 00 KH	27.395, 92	5,7/1.0 00 KH	28.273, 69	5,7/1.0 00 KH	199.245 ,13	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	262,70/1 00.00KH	230,7/1 00.000 KH		198,7/1 00.000 KH	0,00	166,7/1 00.000 KH	0,00	134,7/1 00.000 KH	0,00	102,7/1 00.000 KH	0,00	100/10 0.000 KH	0,00	100/10 0.000 KH	0,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	29,17%	33,30%	5,613.7 5	37,50%	447,96	41,60%	456,88	45,80%	464,75	50,00%	480,13	54,16%	495,51	54,16%	2.643,1 9	Dinas Kesehatan	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	71,00%	73,00%	311,37	74,00%	383,40	75,00%	391,03	76,00%	397,76	77,00%	410,92	78,00%	424,09	78,00%	2.390,60	Dinas Kesehatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif MKJP	28,88%	28,89%	4.182,01	28,90%	115,00	28,95%	117,29	29,00%	119,31	29,10%	123,26	30,00%	127,21	30,00%	4.784,07	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBanga)	50,00%	51,00%	299,80	52,00%	149,81	54,00%	152,79	56,00%	155,42	58,00%	160,56	60,00%	165,71	60,00%	1.103,89	
	<b>Sasaran 2.1.2</b>																	
	<b>Meningkatnya kualitas tumbuh dan berkembangnya anak</b>	<b>Prevalensi Angka Stunting</b>	<b>16,8</b>	<b>15,3</b>		<b>13,8</b>		<b>12,3</b>		<b>10,8</b>		<b>9,3</b>		<b>7,8</b>		<b>7,8</b>		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	70,00%	71,00%	266,55	73,00%	139,96	75,00%	142,75	77,00%	145,20	78,00%	150,01	79,00%	154,82	80,00%	873,84	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	0,87%	100,00%	31.421,04	100,00%	165,00	100,00%	168,28	100,00%	171,18	100,00%	176,85	100,00%	182,51	100,00%	75.191,96	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHAAN	Persentase pemenuhan layanan pasien	N/A	100,00%	2.373,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	3.183,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak	100,00%	100,00%	181,02	100,00%	312,54	100,00%	318,76	100,00%	324,25	100,00%	334,98	100,00%	345,71	100,00%	1.819,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00%	100,00%	490,49	100,00%	89,59	100,00%	91,37	100,00%	92,95	100,00%	96,02	100,00%	99,10	100,00%	802,82	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,80%	2,80%	994,64	2,65%	170,00	2,50%	173,38	2,35%	176,37	2,20%	182,21	2,15%	188,04	2,15%	1.919,64	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	65,80%	66,20%		66,60%	0,00	67,00%	0,00	67,40%	0,00	67,80%	0,00	68,20%	0,00	68,20%	0,00	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Prevalence Rate/mCPR)																
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,96%	8,40%	7,66%	0,00	7,56%	0,00	7,47%	0,00	7,31%	0,00	7,25%	0,00	7,25%	0,00		
		Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	22,00%	19,50%	17,00%	0,00	14,50%	0,00	12,50%	0,00	10,50%	0,00	7,50%	0,00	7,50%	0,00		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	14,22%	14,22%	832,19	14,36%	115,00	14,51%	117,29	14,65%	119,31	14,80%	123,26	14,95%	127,21	14,95%	4.784,07	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	36,84%	26,32%	54,36	15,79%	55,00	10,53%	56,09	10,53%	57,06	5,26%	58,95	5,26%	60,84	5,26%	342,30	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	27,00%	27,00%	72,75	36,00%	80,00	45,00%	81,59	55,00%	83,00	64,00%	85,74	73,00%	88,49	73,00%	498,82	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Misi 3 Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas, Dan Inklusif Menuju Poso Pintar</b>																		
	<b>Tujuan 3.1</b>																	
	Meningkatnya keterjangkauan dan mutu pendidikan menuju Poso Pintar	Indeks Pendidikan	NA	65-70	0,00	65-70	0,00	65-70	0,00	70-75	0,00	70-75	0,00	70-75	0,00	70-75		
	Sasaran 3.1.1																	
	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	13,7	13,92	14,14	14,36	14,58	14,8	15,02	15,02								
		Rata-rata Lama Sekolah	9,41	9,61	9,8	9,99	10,18	10,37	10,56	10,56								
	Program																	Dinas Pendidikan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50,80%	51,00%	62,737.78	51,50%	41.007.06	52,00%	41.823,26	52,50%	42.543,27	53,00%	43.951,47	54,00%	45.359,68	54,00%	277.517,77	dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,26%	85,50%		86,00%	0,00	86,50%	0,00	87,00%	0,00	87,50%	0,00	88,00%	0,00	88,00%	0,00		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	63,11%	63,50%		64,00%	0,00	64,50%	0,00	65,00%	0,00	65,50%	0,00	66,00%	0,00	66,00%	0,00		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	73,00%	78,25%	75,00	85,28%	125,00	89,90%	127,48	92,54%	129,68	97,17%	133,97	100,00%	138,26	100,00%	779,35		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1;10,53	1;10,59	295,64	1;10,66	339,79	1;10,72	346,55	1;10,78	352,52	1;10,84	364,19	1;10,84	375,86	1;10,90	2.072,86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	<b>Sasaran 3.1.2</b>																		
	<b>Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>96,58</b>	<b>96,93</b>		<b>97,28</b>		<b>97,63</b>		<b>97,98</b>		<b>98,33</b>		<b>98,68</b>		<b>98,68</b>			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	57,89%	57,89%	73,26	57,89%	84,26	57,89%	85,94	57,89%	87,42	57,89%	90,31	57,89%	93,21	57,89%	525,40	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,40%	2,30%	105,81	2,20%	115,65	2,10%	117,95	2,00%	119,98	1,90%	123,95	1,80%	127,92	1,80%	714,70	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	57,89%	57,89%	118,16	57,89%	136,06	57,89%	138,76	57,89%	141,15	57,89%	145,83	57,89%	150,50	57,89%	850,46	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data anak perempuan dan data terpilah gender yang tersedia	1	1	105,14	1	85,14	1	86,83	1	88,33	1	91,25	1	94,18	1	530,87	
<b>Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal</b>																		
	<b>Tujuan 4.1</b>																	
	<b>Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas</b>	<b>Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	<b>5,58</b>	<b>5,6</b>		<b>5,62</b>		<b>5,64</b>		<b>5,66</b>		<b>5,68</b>		<b>5,7</b>		<b>5,7</b>		
	<b>Sasaran 4.1.1</b>																	
	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>-3,89</b>	<b>2-4</b>		<b>3,3-3,5</b>		<b>3,5-4</b>		<b>4-5</b>		<b>5-6</b>		<b>5-6</b>		<b>5-6</b>		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	1,48%	1,48%	2,068.64	1,48%	722,53	1,49%	736,92	1,49%	749,60	1,50%	774,41	1,51%	799,23	1,51%	5.766,63	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait.	16,67%	33,34%	0,00	50,00%	0,00	66,67%	0,00	83,34%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah data Industri yang masuk dalam SIInas	16,67%	33,34%	0,00	50,00%	0,00	66,67%	0,00	83,34%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	(87,34)	0,00	331.29	0,07	951,19	0,09	970,13	0,28	986,83	0,72	1.019,4 9	0,82	1.052,1 6	0,82	5.700,9 9	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%)	1.947,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	1.8%	1.8%	521.99	1.92%	457,01	2%	466,11	2.08%	474,13	2.29%	489,82	2.59%	505,52	2.59%	2.933,5 9	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat hunian akomodasi	N/A	N/A	100.00	48%	120,00	53%	122,39	56%	124,50	56%	128,62	58%	132,74	58%	728,24	
		Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata (%)	N/A	5.56%		5.26%		5%		4.76%		4.55%		4.35%		4.35%		
		Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay)	N/A	N/A		0,5 Hari		0,5 Hari		0,5 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari
	<b>Sasaran 4.1.2</b>																	
	<b>Menurunnya disparitas ekonomi</b>	<b>Indeks Gini Rasio</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		<b>0,300- 0,280</b>		
<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>		<b>0,063</b>	<b>0,1025</b>		<b>0,1425</b>		<b>0,1825</b>		<b>0,2225</b>		<b>0,2625</b>		<b>0,3025</b>		<b>0,3025</b>			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	16,25%	17,65%	20,00	20,45%	15,00	23,25%	15,30	26,05%	15,56	28,85%	16,08	31,65%	16,59	31,65%	98,53	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	4,20%	5,60%	56,74	8,40%	32,28	12,61%	32,92	18,21%	33,48	25,21%	34,59	31,65%	35,70	31,65%	225,71	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang	19,89%	33,29%	27,81	46,69%	22,08	60,09%	22,52	73,49%	22,91	86,89%	23,66	100,00 %	24,42	100,00 %	143,39	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		mengikuti pelatihan																
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	3,51%	3,90%	53,51	4,29%	264,68	55,25%	269,95	4,73%	274,60	5,07%	283,69	5,56%	292,78	5,56%	1.457,17	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	13,82%	14,10%	379,90	14,49%	307,18	14,91%	313,29	15,35%	318,69	15,88%	329,24	16,61%	339,78	16,61%	1.770,56	
		Tertib Usaha	100,00%	100,00 %	56,32	100,00%	51,93	100,00 %	41,93	100,00 %	47,99	100,00 %	49,62	100,00 %	51,26	100,00 %	303,45	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00%	100,00 %		100,00%	51,93	100,00 %	52,96	100,00 %	53,87	100,00 %	55,66	100,00 %	57,44	100,00 %	328,18	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100,00%	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90%	5,90%	85,17	5,90%	110,30	5,90%	112,49	5,90%	114,43	5,90%	118,22	5,90%	122,01	5,90%	577,45	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-28,91%	1,25%	0,00	1,75%	83,15	2,00%	84,81	2,25%	86,27	2,45%	89,12	2,75%	91,98	2,75%	554,36	
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-28,91%	1,25%	38,89	1,75%	107,11	2,00%	109,24	2,25%	111,12	2,45%	114,80	2,75%	118,48	2,75%	560,75	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100,00%	100,00 %	0,00	100,00%	50,00	100,00 %	51,00	100,00 %	51,87	100,00 %	53,59	100,00 %	55,31	100,00 %	261,77	
		persentase penanganan	100,00%	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		pengaduan konsumen																	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0,00%	100,00 %	6.551,54	100,00%	321,20	100,00 %	327,59	100,00 %	333,23	100,00 %	344,26	100,00 %	355,29	100,00 %	12.673,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	100,00 %		100,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	90,88%	90,17%	2.667,88	89,58%	905,35	88,94%	923,37	88,28%	939,27	87,57%	970,36	86,74%	1.001,45	86,74%	7.680,11		
		Persentase RTLH	53,99%	52,75%	0,00	52,00%	0,00	51,24%	0,00	50,46%	0,00	49,67%	0,00	48,82%	0,00	48,82%	0,00		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50,15%	49,21%	0,00	48,71%	1.015,00	48,22%	1.035,20	47,72%	1.053,02	47,72%	1.087,88	46,72%	1.122,74	46,72%	5.313,84		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola	4.485.950 m <sup>2</sup>	25,6734 m <sup>2</sup>	104,33	1,4263 m <sup>2</sup>	14,15	1,4263 m <sup>2</sup>	14,43	1,4263 m <sup>2</sup>	14,67	1,4263 m <sup>2</sup>	15,16	1,4263 m <sup>2</sup>	15,65	1,4263 m <sup>2</sup>	178,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	70,56%	72,17%	8.971,26	72,30%	1.840,77	72,41%	1.402,49	72,53%	1.448,71	72,64%	1.525,51	72,76%	1.602,31	72,76%	16.136,97	Dinas PUPR	
	<b>Sasaran 4.1.3</b>																		
	<b>Meningkatnya pendapatan Masyarakat Poso</b>	<b>Pendapatan perkapita</b>	<b>23,79</b>	<b>24,63</b>		<b>25,47</b>		<b>26,31</b>		<b>27,15</b>		<b>27,99</b>		<b>28,83</b>		<b>28,83</b>			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)	12,00	13,00	54.78	13,00	115,00	13,00	117,29	13,00	119,31	13,00	123,26	14,00	127,21	14,00	667,06	Dinas Penanaman Modal
		Jumlah investor berskala nasional (PMA) (Investor)	100%	100%		100%	114,05	100%	116,32	100%	118,32	100%	122,24	200%	126,16	200%	611,13	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketercapaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) (%)	100%	100%	14.05	100%	214,85	100%	219,13	100%	222,90	100%	230,28	100%	237,65	100%	1.242,66	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	78%	3,12%	94.58	9,09%	0,00	8,30%	0,00	7,69%	0,00	7,14%	0,00	6,67%	0,00	6,67%	0,00	
	<b>Tujuan 4.2</b>																	
	<b>Menurunnya penduduk miskin</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>15,45</b>	<b>15,45</b>		<b>14,94</b>		<b>14,43</b>		<b>13,92</b>		<b>13,41</b>		<b>12,9-9,9</b>		<b>12,9-9,9</b>		
	<b>Sasaran 4.2.1</b>																	
	<b>Terbukanya lapangan pekerjaan</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>2,39</b>	<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		<b>2-3</b>		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,06%	0,07%	76.92	0,08%	192,58	0,10%	196,41	0,11%	199,79	0,13%	206,40	0,14%	213,02	0,63%	1.279,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	78,07%	78,81%		79,55%	0,00	80,29%	0,00	81,04%	0,00	81,78%	0,00	82,52%	0,00	82,52%	0,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	2,47%	2,53%	107.47	2,85%	108,47	3,17%	110,63	3,48%	112,53	3,80%	116,26	4,12%	119,98	19,95%	675,35	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	3,45%	3,76%	176.14	4,39%	166,14	4,70%	169,44	4,70%	172,36	5,02%	178,06	5,33%	183,77	5,33%	1.045,91	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).																
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelompok di berdayakan	0,00%	4,00%	494,09	8,33%	397,09	14,29%	404,99	22,22%	411,96	38,46%	425,60	85,71%	439,24	85,71%	2.517,6 <sub>4</sub>	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	2,61%	2,83%	532,97	3,04%	370,00	3,28%	377,36	3,48%	383,86	3,61%	396,57	3,85%	409,27	3,85%	2.410,0 <sub>4</sub>	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	100,00%	91,17%	176,52	90,91%	165,00	90,00%	168,28	88,89%	171,18	87,50%	176,85	85,71%	182,51	85,71%	1.040,3 <sub>5</sub>	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	20,00%	20,00%	210,20	25,00%	148,00	25,00%	150,95	25,00%	153,54	12,50%	158,63	12,50%	163,71	100,00%	885,02	Disnakertrans
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi	0,557692308	0,5577	56,05	0,5677	65,00	0,5777	66,29	0,5877	67,44	0,5977	69,67	0,6077	71,90	0,6077	396,34	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang di revitalisasi	0,29	0,29	61,90	0,3	68,00	0,31	69,35	0,32	70,55	0,33	72,88	0,34	75,22	0,34	417,90	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	<b>Sasaran 4.2.2</b>																			
	<b>Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan</b>	<b>Nilai Tukar petani</b>	<b>96,37</b>	<b>96-98</b>		<b>98-100</b>		<b>100- 102</b>		<b>100- 102</b>		<b>100- 102</b>		<b>100- 102</b>		<b>100- 102</b>				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Desa Mandiri Pangan	0,27	0,30	562,68	0,33	200,70	0,36	204,70	0,39	208,22	0,42	215,12	0,45	222,01	0,45	1.702,6 3	Dinas Ketahanan Pangan		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-	-	5,197,3 4	-	4.539,9 7	-	4.630,33	-	4.710,0 5	-	4.865,9 5	-	5.021,8 6	-	29.670, 00	Dinas Pertanian		
		1. Padi	4,82	5,12	0,00	5,28	0,00	5,44	0,00	5,56	0,00	5,74	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00			
		2. Jagung	5,05	5,67	0,00	5,71	0,00	6,04	0,00	6,37	0,00	6,71	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00			
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		-	0,00
		1. Bawang Merah	7,92	7,93	0,00	7,94	0,00	7,95	0,00	7,96	0,00	7,98	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00		8,00	0,00
		2. Cabe	3,11	3,18	0,00	3,25	0,00	3,32	0,00	3,41	0,00	3,50	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00		3,80	0,00
		3. Tomat	18,22	18,49	0,00	18,76	0,00	19,03	0,00	19,30	0,00	19,57	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00		19,84	0,00
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		-	0,00
		1. Kakao	0,85	0,86	0,00	0,88	0,00	0,90	0,00	0,92	0,00	0,94	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,96	0,00
		2. Kopi Arabika	1,95	2,00	0,00	2,04	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00	2,16	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00		2,23	0,00
		3. Kopi Robusta	0,78	0,80	0,00	0,82	0,00	0,84	0,00	0,87	0,00	0,89	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		1,00	0,00
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		-	0,00
		1. Sapi	0,07	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,12	0,00
2. Kerbau	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		3. Babi	0,04	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00		
		4. Kambing	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00		
		Prosentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	34,60	35,00	6.005,56	43,00	1.629,36	46,00	1.661,79	50,00	1.690,40	60,00	1.746,35	71,00	1.802,31	71,00	14.776,81		
		Prosentase Penataan Padang Pengembalaan	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	46,67	41,67	513,24	36,67	708,03	31,67	722,12	26,67	734,55	21,67	758,86	16,67	783,18	16,67	4.324,05		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal pengendalian dan penanggulangan Bencana OPT	68,00%	67,00%	303,13	64,00%	394,00	62,00%	401,84	60,00%	408,76	58,00%	422,29	55,00%	435,82	55,00%	2.618,19		
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	16,67	16,67		16,67	0,00	33,34	0,00	50,00	0,00	66,67	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas	-	-	184,20	-	213,27	-	217,51	-	221,26	-	228,58	-	235,91	-	1.406,63		
		a. Pertanian	28,00	34,00	0,00	42,00	0,00	50,00	0,00	60,00	0,00	92,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		b. Perkebunan	4,00	8,00	0,00	12,00	0,00	16,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		c. Peternakan	17,33	29,33	0,00	42,67	0,00	57,33	0,00	72,00	0,00	86,67	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	23,30	39,64	8.228,40	47,81	263,05	55,40	268,28	62,69	272,90	69,99	281,93	84,39	290,97	84,39	10.969,17		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	11472,30	12.000,00	1.865,78	12.500,00	634,23	13.000,00	646,86	13.500,00	657,99	14.000,00	679,77	14.500,00	701,55	14.500,00	5.232,25	Dinas Perikanan dan Kelautan	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	3.175,38	3.200,00	1.530,64	3.300,00	583,71	3.400,00	595,33	3.500,00	605,58	3.600,00	625,62	3.700,00	645,67	3.700,00	4.707,17		





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian												OPD Penang- gung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	30,41%	42,11%	151,03	53,80%	176,25	65,50%	179,76	83,04%	182,86	94,74%	188,91	100,00 %	194,96	100,00 %	1.097,9 8	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,36	0,68	40,422. 84	0,73	11.821, 20	0,73	12.056,4 8	0,73	12.264, 04	0,73	12.669, 99	0,73	13.075, 93	0,73	103.490 ,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	37,55%	41,62%	0,00	43,84%	0,00	46,07%	0,00	48,29%	0,00	50,51%	0,00	52,73%	0,00	52,73%	0,00	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46,71%	60,58%	0,00	63,45%	0,00	66,33%	0,00	69,21%	0,00	72,09%	0,00	74,97%	0,00	74,97%	0,00	
	<b>Misi 5 Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif, Profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel</b>																	
	<b>Tujuan 5.1</b>																	
	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang responsif, profesional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif, dan Akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Brikrasi</b>	<b>NA</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		
	<b>Sasaran 5.1.1</b>																	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian												OPD Penang- gung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik</b>	<b>Indek Kepuasan Pelayanan Publik</b>	<b>78,27</b>	<b>80,42</b>		<b>82,57</b>		<b>84,72</b>		<b>86,87</b>		<b>89,02</b>		<b>91,17</b>		<b>91,17</b>		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	99,87%	99,87%	246,19	99,87%	70,04	99,90%	71,43	99,94%	72,66	99,97%	75,07	100,00 %	77,47	99,87%	612,85	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	75,00%		80,00%	0,00	85,00%	0,00	90,00%	0,00	95,00%	0,00	97,00%	0,00	97,00%	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPII	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	94,55%	94,55%	308,21	95,00%	87,38	96,00%	89,12	97,00%	90,65	98,00%	93,65	99,00%	96,65	99,00%	765,66	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	75,00%	80,00%		85,00%	0,00	90,00%	0,00	95,00%	0,00	97,00%	0,00	99,00%	0,00	99,00%	0,00	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	N/A	100,00 %		100,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	
		Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	N/A	100,00 %		100,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data	100,00%	100,00 %	180,97	100,00%	53,15	100,00 %	54,20	100,00 %	55,14	100,00 %	56,96	100,00 %	58,79	100,00 %	459,21	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	N/A	100,00 %	195,82	100,00%	65,82	100,00 %	67,13	100,00 %	68,28	100,00 %	70,54	100,00 %	72,80	1,55%	540,39	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan	0,00%	8,00%	944,89	17,00%	2.226,3 7	33,00%	2.270,69	50,00%	2.309,7 8	75,00%	2.386,2 3	100,00 %	2.462,6 9	100,00 %	12.384, 52	Dinas Komunikasi dan Informatika



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		terhubung dengan sistem penghubung layanan																
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	72,00%	72,00%	0,00	82,00%	0,00	92,00%	0,00	94,00%	0,00	96,00%	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	0,00%	17,00%	47,85	24,00%	47,85	31,00%	48,80	38,00%	49,64	45,00%	51,29	52,00%	52,93	100,00 %	298,37	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	100,00%	100,00 %	386,65	100,00%	92,27	100,00 %	94,11	100,00 %	95,73	100,00 %	98,90	100,00 %	102,06	100,00 %	892,72	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%)	100,00%	100,00 %	15,00	100,00%	25,81	100,00 %	26,32	100,00 %	26,78	100,00 %	27,66	100,00 %	28,55	100,00 %	157,93	
	<b>Sasaran 5.1.2</b>																	
	<b>Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>BB</b>	<b>0,00</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	282.939,90	BB	212.466,69	BB	216.669,70	A	220.399,80	A	227.695,14	A	234.990,48	A	1.186.618,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	63.514,88	BB	63.460,56	BB	64.723,67	A	65.837,92	A	68.017,19	A	70.196,46	A	395.077,37	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	86.014,25	C	77.791,84	B	79.340,19	BB	80.706,08	BB	83.377,49	A	86.048,90	A	416.904,32	RSUD Poso
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	13.841,85	A	14.513,73	A	14.802,61	A	15.057,44	A	15.555,85	A	16.054,26	A	78.790,34	Dinas PUPR
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.188,47	BB	4.762,05	BB	4.856,83	A	4.940,44	A	5.103,97	A	5.267,51	A	26.088,39	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	D	C	7,717.9 2	CC	7.785,3 1	B	7.940,26	B	8.076,9 6	BB	8.344,3 1	BB	8.611,6 6	BB	44.122, 92	Satpol PP
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3,531.1 1	B	3.632,1 8	BB	3.704,48	BB	3.768,2 5	A	3.892,9 9	A	4.017,7 2	A	19.760, 43	BPBD
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3,959.2 4	B	4.180,6 6	BB	4.263,87	BB	4.337,2 8	A	4.480,8 5	A	4.624,4 1	A	22.710, 69	Dinsos
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,232.7 7	BB	4.280,5 1	BB	4.365,71	A	4.440,8 7	A	4.587,8 6	A	4.734,8 6	A	22.840, 74	Disnakertran s
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	2,903.1 3	BB	3.028,3 4	BB	3.088,62	A	3.141,7 9	A	3.245,7 9	A	3.349,7 8	A	16.218, 77	DP3A
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	3,611.7 8	B	3.752,1 3	B	3.826,81	BB	3.892,6 9	BB	4.021,5 4	A	4.150,3 9	A	20.336, 11	Dinas Ketahanan Pangan
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	9,658.8 5	BB	9.780,4 8	BB	9.975,15	A	10.146, 88	A	10.482, 75	A	10.818, 61	A	54.907, 78	DLH
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	4,629.9 6	B	4.545,8 9	BB	4.636,37	A	4.716,1 9	A	4.872,3 0	A	5.028,4 1	A	25.055, 45	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3,202.3 6	BB	3.284,5 1	BB	3.349,89	A	3.407,5 6	A	3.520,3 5	A	3.633,1 4	A	17.667, 75	DPMD
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	5,599.8 8	BB	5.871,9 5	BB	5.988,82	A	6.091,9 2	A	6.293,5 7	A	6.495,2 1	A	31.157, 21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,867.0 2	BB	1.138,8 2	BB	5.123,95	A	5.212,1 6	A	5.384,6 9	A	5.557,2 2	A	27.440, 80	Dishub
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,815.1 3	B	4.762,8 6	BB	4.857,66	BB	4.941,2 9	A	5.104,8 5	A	5.268,4 1	A	26.241, 77	Diskominfo
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	5,665.9 6	BB	6.052,8 3	A	6.173,30	A	6.279,5 8	A	6.487,4 4	A	6.695,2 9	A	32.787, 80	Diskumperid ndag
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3,443.8 3	BB	3.559,7 9	BB	3.630,64	A	3.693,1 5	A	3.815,3 9	A	3.937,6 4	A	19.228, 47	DPM dan PTSP
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	C	CC	3,088.5 4	B	3.170,0 3	B	3.233,12	BB	3.288,7 8	BB	3.397,6 4	A	3.506,5 0	A	17.080, 49	Dikpora



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	4.140,6 9	B	4.320,0 0	B	4.405,99	BB	4.481,8 4	BB	4.630,1 9	A	4.778,5 4	A	23.194, 96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	1.163,9 8	BB	6.629,6 5	A	6.761,60	A	6.878,0 1	A	7.105,6 8	A	7.333,3 4	A	35.872, 26	Dinas Perikanan dan Kelautan
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	4.481,3 9	BB	4.379,4 6	BB	4.466,63	BB	4.543,5 3	A	4.693,9 2	A	4.844,3 1	A	24.539, 21	Dinas Pariwisata
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	21.862, 36	BB	22.053, 81	BB	22.492,7 6	BB	22.879, 99	A	23.637, 33	A	24.394, 67	A	117.519 ,02	Dinas Pertanian
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	CC	29.139, 00	B	27.072, 25	B	27.284,9 2	BB	27.754, 65	BB	28.673, 34	A	29.592, 03	A	150.453 ,35	Setda
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	20.136, 62	BB	20.248, 71	BB	20.651,7 3	A	21.007, 27	A	21.702, 62	A	22.397, 97	A	111.449 ,25	Sekwan
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	A	A	6.516,8 0	A	6.626,5 6	A	6.758,45	A	6.874,8 1	A	7.102,3 7	A	7.329,9 2	A	35.834, 56	Bappelitbang da
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	7.784,2 7	BB	8.197,5 8	BB	8.360,75	A	8.504,6 8	A	8.786,1 9	A	9.067,7 0	A	44.939, 67	Bapenda
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	7.783,1 2	BB	8.367,1 9	BB	8.533,73	A	8.680,6 4	A	8.967,9 8	A	9.255,3 1	A	46.515, 98	BKAD
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	5.937,7 5	BB	6.092,1 2	BB	6.213,38	A	6.320,3 4	A	6.529,5 5	A	6.738,7 6	A	33.060, 81	BKPSDM
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	6.135,3 2	A	6.661,7 2	A	6.794,32	A	6.911,2 8	A	7.140,0 5	A	7.368,8 2	A	36.420, 08	Inspektorat
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	2.134,7 5	BB	3.101,2 2	BB	3.162,95	A	3.217,4 0	A	3.323,9 0	A	3.430,4 0	A	17.133, 55	Badan Kesbangpol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90,00%	90,00%	395.511	90,00%	3.754,0 3	90,00%	3.828,75	90,00%	3.894,6 6	90,00%	4.023,5 8	90,00%	4.152,4 9	90,00%	23.049, 65	Setda
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian	90,00%	90,00%	121.438	90,00%	1.154,3 7	90,00%	1.177,35	90,00%	1.197,6 2	90,00%	1.237,2 6	90,00%	1.276,9 0	90,00%	7.197,2 7	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		dan Pembangunan																	
4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Administrasi Umum	90,00%	100,00	0,00	90,00%	0,00	90,00%	326,17	90,00%	331,79	90,00%	342,77	90,00%	353,75	90,00%	1.682,99		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	45,00%	45,00%	76,81	62,00%	99,92	74,00%	101,90	86,00%	103,66	94,00%	107,09	100,00%	110,52	100,00%	623,01	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	2,00	2,00	18,58	2,00	24,93	2,00	25,43	3,00	25,86	3,00	26,72	4,00	27,58	4,00	155,78		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	88,26	88,76	2.036,40	89,26	2.129,29	89,76	2.171,67	90,26	2.209,06	90,76	2.282,18	91,26	2.355,30	91,26	13.238,85		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	90,07	91,07	1.250,42	92,07	1.661,18	93,07	1.694,25	94,07	1.723,41	95,07	1.780,46	96,07	1.837,50	96,07	9.814,01	Bapalitbangda	
		Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,12	96,12	0,00	97,12	0,00	98,12	0,00	98,62	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00		
		Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	91,46	92,46	0,00	93,46	0,00	94,46	0,00	95,46	0,00	96,46	0,00	97,46	0,00	97,46	0,00		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan dokumen	50,00	75,00	241,77	75,00	741,77	100,00	756,54	100,00	769,56	100,00	795,03	100,00	820,51	100,00	4.125,19		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		penelitian dan pengembangan																	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	50,00%	75,00%	10,297.32	80,00%	12.143,53	85,00%	12.385,23	90,00%	12.598,45	95,00%	13.015,47	100,00%	13.432,48	100,00%	75.718,69		
t		Cakupan pelayanan kesejahteraan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan	90,00%	90,00%	0,00	92,00%	0,00	94,00%	0,00	96,00%	0,00	98,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00		Sekretariat DPRD
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	387,5	462,5	66,14	537,5	10,04	612,5	10,24	637,5	10,42	712,5	10,76	787,5	11,11	787,5	118,72		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagas dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1.474,00	1.524,00	7,04	1.574,00	82,50	1.624,00	84,14	1.674,00	85,59	1.724,00	88,42	1.774,00	91,26	1.774,00	438,95		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	-	-	0,00	25,70	9,80	-	10,00	-	10,17	-	10,50	-	10,84	-	51,31		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	100,00%	100,00%	1.240,64	100,00%	1.556,45	100,00%	1.587,43	100,00%	1.614,76	100,00%	1.668,20	100,00%	1.721,65	100,00%	9.910,86		Badan Kepegawaian dan Pengembangan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	n Sumber Daya Manusia
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,09	1,11	0,00	1,13	0,00	1,15	0,00	1,17	0,00	1,19	0,00	1,21	0,00	1,21	0,00	-	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,99%	0,08	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	-	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	62,16%	-	0,00	0,80	0,00	0,85	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	40,23%	-	158,84	0,80	205,92	0,85	210,02	0,90	213,64	0,95	220,71	1,00	227,78	1,00	1.078,06	-	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	29,25%	-	0,00	0,75	0,00	0,85	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	
	<b>Sasaran 5.1.3</b>																		
	<b>Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</b>	<b>NA</b>	<b>C</b>		<b>C</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	0,155	0,159	1.040,7 3	0,163	1.960,8 9	0,167	1.999,92	0,171	2.034,3 5	0,175	2.101,6 8	0,179	2.169,0 2	0,179	11.306, 59	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	75,27%	76,27%	0,00	78,27%	0,00	79,77%	0,00	81,27%	0,00	82,77%	0,00	84,27%	0,00	84,27%	0,00	
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,88%	6,50%	2.590,9 8	4,00%	2.332,4 9	3,5%	2.378,92	3,00%	2.419,8 7	2,00%	2.499,9 7	1,5%	2.580,0 7	1,5%	17.910, 89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	31,80	30,00%		29,00%		28,00%		27,00%		26,00%		25,00%		25,00%		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	63,01	63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		
		Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	1,72 %	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah BMD yang dikelola dengan tertib dan baik	66,00%	90,00%	381,94	100,00%	600,00	100,00 %	611,94	100,00 %	622,48	100,00 %	643,08	100,00 %	663,68	100,00 %	2.678,9 3	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	15,50%	15,90%	1.453,0 1	16,30%	1.960,8 9	16,70%	1.999,92	17,10%	2.034,3 5	17,50%	2.101,6 8	17,90%	2.169,0 2	17,90%	11.306, 59	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	75,27%	76,27%		78,27%		79,77%		81,27%		82,77%		84,27%		84,27%		Badan Pendapatan
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP	31,25%	39,38%	2.450,4 2	47,51%	2.297,4 4	55,64%	2.343,17	63,77%	2.383,5 1	71,90%	2.462,4 0	80,00%	2.541,3 0	80,00%	14.287, 02	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan	N/A	0,80	368,79	0,85	451,75	0,90	460,74	1,00	468,67	1,00	484,19	1,00	499,70	1,00	2.892,2 4	
<b>Misi 6 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso Yang Harmoni Dan Tangguh Bencana, Sadar Akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran, Dan Damai</b>																		
<b>Tujuan 6.1</b>																		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Demokrasi</b>	<b>Indeks Demokrasi</b>	<b>NA</b>	<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		<b>80-90</b>		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	100,00%	100,00 %	599,23	100,00%	549,23	100,00 %	560,16	100,00 %	569,81	100,00 %	588,67	100,00 %	607,53	100,00 %	3.424,64	Badan Kembangpol
	<b>Sasaran 6.1.1</b>																	
	<b>Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial</b>	<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>15,09</b>	<b>13,84</b>		<b>12,59</b>		<b>11,34</b>		<b>10,09</b>		<b>8,84</b>		<b>7,59</b>		<b>7,59</b>		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	36,97	100%	36,97	100%	37,41	100%	38,05	100%	39,32	100%	40,58	100%	229,29	Satpol PP
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0,025%	0,005%	144,60	0,005%	176,27	0,005%	282,08	0,005%	286,94	0,005%	296,47	0,005%	306,00	0,025%	1.524,03	Badan Kembangpol
			0%	0%	0,00	2%	0,00	4%	0,00	6%	0,00	8%	0,00	10%	0,00	10%	0,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	100%	73,10	100%	522,00	100%	170,14	100%	173,07	100%	178,82	100%	184,57	100%	1.334,92	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	100%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Poso Kota
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Poso Kota Utara





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Poso Kota Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Lage
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Poso Pesisir
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Poso Pesisir Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Pamona Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Pamona Pusulemba
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Pamona Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Pamona Tenggara



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Pamona Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	Kecamatan Pamona Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Lore Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Lore Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	6,50	100%	6,63	100%	6,74	100%	6,97	100%	7,19	100%	34,03	Kecamatan Lore Peore
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Lore Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	5,00	100%	5,10	100%	5,19	100%	5,36	100%	5,53	100%	26,18	Kecamatan Lore Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban masyarakat yang tertangani Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0%	0,00	100%	33,50	100%	34,17	100%	34,75	100%	35,91	100%	37,06	100%	175,38	Kecamatan Lore Barat



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	<b>Sasaran 6.1.2</b>																		
	<b>Terciptanya masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>NA</b>	<b>60-70</b>		<b>60-70</b>		<b>60-70</b>		<b>60-70</b>		<b>70-75</b>		<b>70-75</b>		<b>70-75</b>			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100,00%	100,00 % 443.29	100,00%	110,00	100,00 % 112,19	100,00 % 114,12	100,00 % 117,90	100,00 % 121,68	100,00 % 1.038,53								
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan.	100,00%	100,00 % 248.81	100,00%	208,81	100,00 % 212,97	100,00 % 216,63	100,00 % 223,80	100,00 % 230,97	100,00 % 1.301,99								Badan Keskabpol
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan	20,00%	36,53% 292.53	62,37%	97,87	72,37% 99,82	72,37% 101,54	72,37% 104,90	72,37% 108,26	72,37% 827,97								
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Penyelenggaraan Event Seni Tradisional	15,00%	31,57% 30.00	42,10%	30,00	52,60% 30,89	73,68% 31,78	73,68% 33,25	73,68% 34,73	73,68% 190,64								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	5,00%	6,12% 50.00	12,24%	50,00	15,30% 51,48	20,40% 52,96	20,40% 55,42	20,40% 57,88	100,00 % 317,73								
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10,64%	11,17% 787.31	11,70%	760,27	12,23% 775,40	12,76% 788,75	13,29% 814,86	13,82% 840,97	24,35% 4.767,97								
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,12%	22,60%	22,74%	0,00	22,78% 0,00	23,06% 0,00	24,19% 0,00	24,35% 0,00	24,35% 0,00	24,35% 0,00							Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	0,00%	18 Medali 615.27	18 Medali	1.459,91	18 Medali 1.488,97	21 Medali 1.514,61	21 Medali 1.564,74	21 Medali 1.614,87	21 Medali 9.120,70								
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	0,35%	0,35% 109.89	2,77%	112,90	3,46% 115,15	3,81% 117,13	4,15% 121,01	4,50% 124,88	4,50% 700,95								
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan	100,00%	100,00 % 93.96	100,00%	70,00	100,00 % 71,39	100,00 % 72,62	100,00 % 75,03	100,00 % 77,43	100,00 % 460,44								Dinas Sosial



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	30,77%	42,31%	80,74	53,85%	62,22	65,38%	63,46	76,92%	64,55	88,46%	66,68	100,00 %	68,82	100,00 %	406,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	<b>Tujuan 6.2</b>																	
	<b>Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah</b>	<b>92,47</b>	<b>92,88</b>		<b>93,63</b>		<b>94,38</b>		<b>95,13</b>		<b>95,88</b>		<b>96,63</b>		<b>96,63</b>		
	<b>Sasaran 6.2.1</b>																	
	<b>Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana</b>	<b>Persentase Desa Tangguh Bencana</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41- 2,82</b>		<b>2,83- 4,23</b>		<b>4,24- 5,63</b>		<b>5,64- 7,04</b>		<b>7,05- 8,45</b>		<b>8,46- 9,86</b>		<b>8,46- 9,86</b>		
		<b>Indeks Resiko Bencana Daerah</b>	<b>122,66</b>	<b>120,66</b>		<b>118,66</b>		<b>116,66</b>		<b>114,66</b>		<b>112,66</b>		<b>110,66</b>		<b>110,66 (Sedang )</b>		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	283,09	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	303,99	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	54,72%	54.82%	163,96	54.92%	223,50	55.02%	227,94	55.12%	231,87	55.22%	239,54	55.32%	247,22	55.32%	1.416,0 5	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	88,08%	88.18%		88.28%		88.39%		88.49%		88.59%		88.69%		88.69%		
		Indeks Tutupan Lahan	86.06%	86.72%		87.38%		88.05%		88.71%		89.37%		90.03%		90.03%		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	15,00%	16,00%	93,78	16,50%	160,01	17,00%	163,19	17,50%	166,00	18,00%	171,50	18,50%	176,99	18,50%	965,65	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	72,00%	74,00%	20,86	76,00%	26,72	78,00%	27,25	79,00%	27,72	80,00%	28,64	81,00%	29,56	81,00%	189,84	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	60,00%	63,00%	34,91	75,00%	62,46	88,00%	63,71	89,00%	64,80	90,00%	66,95	100,00 %	69,09	100,00 %	406,83	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	30,00%	45,00%	-	60,00%	84,58	75,00%	86,27	80,00%	87,75	85,00%	90,66	88,00%	93,56	88,00%	507,73	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	80,00%	89,00%	10,77	88,00%	42,97	75,00%	43,82	63,00%	44,58	50,00%	46,05	33,00%	47,53	33,00%	264,91	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi	3,33%	16,67%	2,482,03	16,67%	1.128,55	16,67%	1.151,01	16,67%	1.170,83	16,67%	1.209,58	13,33%	1.248,34	13,33%	7.161,84	Badan Penanggulan Bancana Daerah
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00 %	1,928,26	100,00%	70,00	100,00 %	71,39	100,00 %	72,62	100,00 %	75,03	100,00 %	77,43	100,00 %	460,44	Dinas Sosial
<b>Misi 7 Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang Terdepan dan merata di seluruh wilayah</b>																		
<b>Tujuan 7.1</b>																		





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	Terwujudnya Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang merata	Indeks Kualitas Infrastruktur Wilayah	44,14	69,66		72,66		75,46		78,31		81,04		83,55		83,55		
	Sasaran 7.1.1																	
	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	11,9	14,00		16,10		18,20		20,30		22,40		24,50		24,50		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	31,29	15 Menit	88,29	15 Menit	90,05	15 Menit	91,60	15 Menit	94,63	15 Menit	97,66	15 Menit	493,52	Sat Pol dan Pemadam Kebakaran
	Sasaran 7.1.2																	
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi antar wilayah	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	65,75	67,67		69,59		71,51		73,43		75,35		77,27		77,27		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	50,00%	50,19%	1.490,34	50,42%	2.334,99	50,64%	2.381,47	50,87%	2.422,47	51,09%	2.502,65	51,31%	2.582,84	51,31%	13.603,64	Dinas PUPR
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten / kota	2,50	5,5	7.054,67	5,5	7.440,25	5,5	7.588,34	5,5	7.718,98	5,5	7.974,48	5,5	8.229,98	5,5	46.342,36	Dinas Perhubungan
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%)	30,00%	30,00%		30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	3,88%	3,68%		3,47%	0,00	3,27%	0,00	3,06%	0,00	2,86%	0,00	2,65%	0,00	2,65%	0,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	12,92%	12,92%	25,00	13,42%	25,00	13,92%	25,50	14,42%	25,94	14,92%	26,80	15,42%	27,65	15,42%	155,88	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengelolaan Penerbangan	4,54%	4,54%	162,36	4,79%	298,23	5,04%	304,17	5,29%	309,40	5,54%	319,64	5,79%	329,89	5,79%	1.859,5 6	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	36,95%	36,98%	86,714. 84	37,00%	14.941, 39	37,04%	15.238,7 8	37,07%	15.501, 12	37,10%	16.014, 22	37,13%	16.527, 31	37,13%	173.636 ,30	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik	73,00%	83,00%	4,691.5 6	86,00%	6.625,3 5	90,00%	6.757,22	93,00%	6.873,5 5	97,00%	7.101,0 7	100,00 %	7.328,5 9	100,00 %	43.190, 72	Dinas PUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95,56%	96,30%	184,29	96,40%	193,74	96,55%	197,60	96,79%	201,00	96,91%	207,65	96,97%	214,31	96,97%	1.264,6 9	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks kualitas jasa konstruksi	30,00%	42,00%	95,31	54,00%	125,95	66,00%	128,46	78,00%	130,67	90,00%	134,99	100,00 %	139,32	100,00 %	766,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Sasaran 7.1.3</b>																	
	<b>Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet</b>	<b>Persentase Koneksi Internet Desa</b>	<b>83,10</b>	<b>84,50</b>		<b>85,90</b>		<b>87,30</b>		<b>88,70</b>		<b>90,10</b>		<b>91,50</b>		<b>91,50</b>		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)	20,42%	20,42%	0,00	23,94%	15,00	27,46%	15,30	30,98%	15,56	34,50%	16,08	38,02%	16,59	38,02%	78,53	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	<b>Sasaran 7.1.4</b>																	
	<b>Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Persampahan</b>	<b>5,96</b>	<b>8,96</b>		<b>11,96</b>		<b>14,96</b>		<b>17,96</b>		<b>20,96</b>		<b>23,96</b>		<b>23,96</b>		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60,30%	62,12%	1,710.4 7	52,00%	1.256,7 9	51,24%	1.281,80	50,46%	1.303,8 7	49,67%	1.347,0 3	48,82%	1.390,1 9	48,82%	8.375,8 8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	85,00%	86,00%	1,698.5 4	87,00%	2.333,6 6	88,00%	2.380,11	89,00%	2.421,0 8	90,00%	2.501,2 2	91,00%	2.581,3 6	91,00%	14.208, 86	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	61,83%	62,21%	2,469.3 7	62,73%	1.085,3 3	63,25%	1.106,94	63,77%	1.125,9 9	64,28%	1.163,2 6	84,80%	1.200,5 4	84,80%	8.403,8 4	Dinas Pekerjaan Umum dan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian														OPD Penang- gung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		layanan pengolahan air limbah domestik																Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,00%	85,00%	690,03	86,00%	505,28	87,00%	515,33	88,00%	524,21	89,00%	541,56	90,00%	558,91	90,00%	3.348,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	33,33%	44,44%	193,66	55,56%	210,00	66,67%	214,18	77,78%	217,87	88,89%	225,08	100,00%	232,29	100,00%	1.293,07	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

---

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan dilanjutkan dengan rumusan program tahun periode RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup dalam rangka membiayai pembangunan Kabupaten Poso selama 6 (enam) tahun ke depan.

### 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1 di bawah ini sebesar Rp. 1.141.634.441.515,00 pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar Rp834.612.593.840,20, kemudian pada tahun 2024 sebesar Rp865.878.878.499,89. Sedangkan pada tahun 2026, diperkirakan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Poso sebesar Rp923.200.915.017,04. Besar kapasitas riil keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi oleh pengeluaran daerah yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja



terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil keuangan daerah.





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2021-2026 Kabupaten Poso**

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	<b>Kapasitas Riil</b>	1,155,167,687,179,00	834.612.593.840,20	851.224.545.948,54	865.878.878.499,89	894.539.896.758,46	923.200.915.017,04
<b>5</b>	<b>Belanja</b>						
5.1	Belanja Operasi	923,532,771,358	731.287.813.402,00	743.422.962.616,75	753.600.492.274,30	775.409.261.205,64	797.218.030.136,97
5.1.1	Belanja Pegawai	592,831,915,446	516.945.227.694,00	525.082.920.573,09	530.262.993.894,98	543.296.650.636,10	556.330.307.377,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313,838,128,384	212.663.381.780,00	202.345.277.986,05	206.600.974.192,10	214.808.388.303,76	223.015.802.415,42
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	6,908,403,928	1.679.203.928,00	6.591.640.908,45	6.684.877.888,89	6.814.845.967,45	6.944.814.046,01
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9,954,323,600	0,00	9.403.123.149,17	10.051.646.298,33	10.489.376.298,33	10.927.106.298,33
5.2	Belanja Modal	231,634,915,821	103.324.780.438,00	107.801.583.331,80	112.278.386.225,59	119.130.635.552,83	125.982.884.880,07
5.3	Belanja Tak terduga	4,534,026,744	5.896.131.391,90	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.614.911.006,10	3.729.822.012,19
5.4	Belanja Transfer	207,466,535,282	211.109.331.629,90	208.748.201.017,96	209.803.881.414,11	211.915.242.206,41	214.026.602.998,71

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021



## **7.2 Program Perangkat Daerah**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, juga memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan, serta 7 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2021-2026; maka disusun program yang akan dilaksanakan dalam enam tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Poso periode 2021-2026.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan (enam) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas yang disajikan dalam tabel 7.1 anggaran selama enam tahun akan dapat didukung dengan kapasitas fiskal daerah disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 berikut ini.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Poso**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
<b>1.01</b>	<b>Usuran Pendidikan</b>																	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	282.939,90	BB	212.466,69	BB	216.669,70	A	220.399,80	A	227.695,14	A	234.990,48	A	1.186.618,21	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50,80%	51,00%	62.737,78	51,50%	41.007,06	52,00%	41.823,26	52,50%	42.543,27	53,00%	43.951,47	54,00%	45.359,68	54,00%	277.517,77	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,26%	85,50%		86%		86,50%		87%		87,50%		88%		88%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	63,11%	63,50%		64%		64,50%		65%		65,50%		66%		66%		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	73%	78%	75,00	85%	125,00	90%	127,48	93%	129,68	97%	133,97	100%	138,26	100%	779,35	
<b>1.02</b>	<b>Usuran Kesehatan</b>																	
	<b>Dinas Kesehatan</b>																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	63.514,88	BB	63.460,56	BB	64.723,67	A	65.837,92	A	68.017,19	A	70.196,46	A	395.077,37	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,7/1.000 KH	8,7/1.000 KH	79.171,14	7,7/1.000 KH	25.560,61	7,7/1.000 KH	26.069,36	6,7/1.000 KH	26.518,16	6,7/1.000 KH	27.395,92	5,7/1.000 KH	28.273,69	5,7/1.000 KH	199.245,13	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	262,70/100.000 KH	230,7/100.000 KH		198,7/100.000 KH		166,7/100.000 KH		134,7/100.000 KH		102,7/100.000 KH		100/100.000 KH		100/100.000 KH		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	29,17%	33,30%	5.613,75	37,50%	447,96	41,60%	456,88	45,80%	464,75	50,00%	480,13	54,16%	495,51	54,16%	2.643,19	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	71,00%	73,00%	311,37	74,00%	383,40	75,00%	391,03	76,00%	397,76	77,00%	410,92	78,00%	424,09	78,00%	2.390,60	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	70,00%	71,00%	266,55	73,00%	139,96	75,00%	142,75	77,00%	145,20	78,00%	150,01	79,00%	154,82	80,00%	873,84	
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	86.014,25	C	77.791,84	B	79.340,19	BB	80.706,08	BB	83.377,49	A	86.048,90	A	416.904,32	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	0,87%	100,00%	31,421,04	100,00%	165,00	100,00%	168,28	100,00%	171,18	100,00%	176,85	100,00%	182,51	100,00%	75.191,96	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan layanan pasien	N/A	100,00%	2,373,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	162,00	100,00%	3.183,00	
<b>1.03</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	13,841,85	A	14,513,73	A	14,802,61	A	15,057,44	A	15,555,85	A	16,054,26	A	78,790,34	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	36,38%	68,27%	40,422,84	72,59%	11,821,20	72,64%	12,056,48	72,68%	12,264,04	72,72%	12,669,99	72,77%	13,075,93	72,77%	103,490,31	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	37,55%	41,62%		43,84%		46,07%		48,29%		50,51%		52,73%		52,73%		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46,71%	60,58%		63,45%		66,33%		69,21%		72,09%		74,97%		74,97%		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	70,56%	72,17%	8.971,26	72,30%	1.840,77	72,41%	1.877,41	72,53%	1.909,73	72,64%	1.972,95	72,76%	2.036,16	72,76%	17.954,19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,83%	62,21%	2.469,37	62,73%	1.085,33	63,25%	1.106,94	63,77%	1.125,99	64,28%	1.163,26	84,80%	1.200,54	84,80%	8.403,84	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	50,00%	50,19%	1.490,34	50,42%	2.334,99	50,64%	2.381,47	50,87%	2.422,47	51,09%	2.502,65	51,31%	2.582,84	51,31%	13.603,64	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik	73,00%	83,00%	4.691,56	86,00%	6.625,35	90,00%	6.757,22	93,00%	6.873,55	97,00%	7.101,07	100,00%	7.328,59	100,00%	43.190,72	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	95,56%	96,30%	184,29	96,40%	193,74	96,55%	197,60	96,79%	201,00	96,91%	207,65	96,97%	214,31	96,97%	1.264,69	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	36,95%	36,98%	86,714,84	37,00%	14.941,39	37,04%	15.238,78	37,07%	15.501,12	37,10%	16.014,22	37,13%	16.527,31	37,13%	173,636,30	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks kualitas jasa konstruksi	30,00%	42,00%	95,31	54,00%	125,95	66,00%	128,46	78,00%	130,67	90,00%	134,99	100,00%	139,32	100,00%	766,94	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,00%	85,00%	690,03	86,00%	505,28	87,00%	515,33	88,00%	524,21	89,00%	541,56	90,00%	558,91	90,00%	3.348,06	
<b>1.04</b>	<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>																	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.188,47	BB	4.762,05	BB	4.856,83	A	4.940,44	A	5.103,97	A	5.267,51	A	26.088,39	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	100,00%	6.551,54	100,00%	321,20	100,00%	327,59	100,00%	333,23	100,00%	344,26	100,00%	355,29	100,00%	12.673,96	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah	90,88%	90,17%	2.667,88	89,58%	905,35	88,94%	923,37	88,28%	939,27	87,57%	970,36	86,74%	1.001,45	86,74%	7.680,11	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
		10 Ha																
		Persentase RTLH	53,99%	52,75%	0,00	52,00%	0,00	51,24 %	0,00	50,46%	0,00	49,67%	0,00	48,82%	0,00	48,82%	0,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50,15%	49,21%	0,00	48,71%	1.015,00	48,22 %	1.035,20	47,72%	1.053,02	47,72%	1.087,88	46,72%	1.122,74	46,72%	5.313,84	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60,30%	62,12%	1.710,47	64,39%	1.256,79	67,87 %	1.281,80	69,61%	1.303,87	72,25%	1.347,03	75,36%	1.390,19	75,36%	8.375,88	
<b>1.05</b>	<b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>																	
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>																	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	D	C	7.717,92	CC	7.785,31	B	7.940,26	B	8.076,96	BB	8.344,31	BB	8.611,66	BB	44.122,92	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prsentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	36,97	100%	36,97	100%	37,70	100%	38,35	100%	39,62	100%	40,89	100%	230,49	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	31,29	15 Menit	88,29	15 Menit	90,05	15 Menit	91,60	15 Menit	94,63	15 Menit	97,66	15 Menit	493,52	
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>																	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3.531,11	B	3.632,18	BB	3.704,48	BB	3.768,25	A	3.892,99	A	4.017,72	A	19.760,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi	3,33%	16,67%	2.482,03	16,67%	1.128,55	16,67 %	1.151,01	16,67%	1.170,83	16,67%	1.209,58	13,33%	1.248,34	13,33%	7.161,84	
<b>1.06</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>																	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	3,959.24	BB	4.180,66	A	4.263,87	A	4.337,28	A	4.480,85	A	4.624,41	-	22.710,69	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelompok di berdayakan	0,00%	4,00%	494,09	8,33%	397,09	14,29%	404,99	22,22%	411,96	38,46%	425,60	85,71%	439,24	85,71%	2.517,64	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	2,61%	2,83%	532,97	3,04%	370,00	3,28%	377,36	3,48%	383,86	3,61%	396,57	3,85%	409,27	3,85%	2.410,04	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	100,00%	91,17%	176,52	90,91%	165,00	90,00%	168,28	88,89%	171,18	87,50%	176,85	85,71%	182,51	85,71%	1.040,35	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	1.928,26	100,00%	342,66	100,00%	349,48	100,00%	355,50	100,00%	367,26	100,00%	379,03	100,00%	1.833,92	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	100,00%	100,00%	93,96	100,00%	70,00	100,00%	71,39	100,00%	72,62	100,00%	75,03	100,00%	77,43	100,00%	460,44	
<b>2.07</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>																	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4,232.77	BB	4.280,51	BB	4.365,71	A	4.440,87	A	4.587,86	A	4.734,86	A	22.840,74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,06%	0,07%	76,92	0,08%	192,58	0,10%	196,41	0,11%	199,79	0,13%	206,40	0,14%	213,02	0,63%	1.279,60	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	78,07%	78,81%		79,55%	0,00	80,29%	0,00	81,04%	0,00	81,78%	0,00	82,52%	0,00	82,52%	0,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	2,47%	2,53%	107,47	2,85%	108,47	3,17%	110,63	3,48%	112,53	3,80%	116,26	4,12%	119,98	19,95%	675,35	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	3,45%	3,76%	176,14	4,39%	166,14	4,70%	169,44	4,70%	172,36	5,02%	178,06	5,33%	183,77	5,33%	1.045,91	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
		BPJS Ketenagakerjaan).																
<b>2.08</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	2,903.13	BB	3.028,34	BB	3.088,62	A	3.141,79	A	3.245,79	A	3.349,78	A	16.218,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	57,89%	57,89%	73,26	57,89%	84,26	57,89%	85,94	57,89%	87,42	57,89%	90,31	57,89%	93,21	57,89%	525,40	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,40%	2,30%	105,81	2,20%	115,65	2,10%	117,95	2,00%	119,98	1,90%	123,95	1,80%	127,92	1,80%	714,70	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	57,89%	57,89%	118,16	57,89%	136,06	57,89%	138,76	57,89%	141,15	57,89%	145,83	57,89%	150,50	57,89%	850,46	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data anak perempuan dan data terpilah gender yang tersedia	100,00%	100,00%	105,14	100,00%	85,14	100,00%	86,83	100,00%	88,33	100,00%	91,25	100,00%	94,18	100,00%	530,87	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak	100,00%	100,00%	181,02	100,00%	312,54	100,00%	318,76	100,00%	324,25	100,00%	334,98	100,00%	345,71	100,00%	1.819,14	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00%	100,00%	490,49	100,00%	89,59	100,00%	91,37	100,00%	92,95	100,00%	96,02	100,00%	99,10	100,00%	802,82	
<b>2.09</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pangan</b>																	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	3,611.78	B	3.752,13	B	3.826,81	BB	3.892,69	BB	4.021,54	A	4.150,39	A	20.336,11	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Desa Mandiri Pangan	27,06%	30,00%	562,68	32,94%	200,70	35,88%	204,70	38,82%	208,22	41,76%	215,12	44,71%	222,01	44,71%	1.702,63	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	14,22%	14,22%	832,19	14,36%	410,49	14,51%	418,66	14,65%	425,87	14,80%	439,97	14,95%	454,06	14,95%	2.994,02	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	36,84%	26,32%	54,36	15,79%	55,00	10,53 %	56,09	10,53%	57,06	5,26%	58,95	5,26%	60,84	5,26%	342,30	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	27,00%	27,00%	72,75	36,00%	80,00	45,00 %	81,59	55,00%	83,00	64,00%	85,74	73,00%	88,49	73,00%	498,82	
<b>2.10</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian</b>																	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	30,77%	42,31%	80,74	53,85%	62,22	65,38 %	63,46	76,92%	64,55	88,46%	66,68	100,00 %	68,82	100,00 %	406,46	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola	4.485.950 m2	25,6734 m2	104,33	1,4263 m2	14,15	1,4263 m2	14,43	1,4263 m2	14,67	1,4263 m2	15,16	1,4263 m2	15,65	1,4263 m2	178,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	33,33%	44,44%	193,66	55,56%	210,00	66,67 %	214,18	77,78%	217,87	88,89%	225,08	100,00 %	232,29	100,00 %	1.293,07	
<b>2.11</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>																	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	9,658.85	BB	9.780,48	BB	9.975,15	A	10.146,88	A	10.482,75	A	10.818,61	A	54.907,78	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100,00%	100,00 %	283,09	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	303,99	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	54,72%	54.82%	163,96	54.92%	223,50	55.02 %	227,94	55.12%	231,87	55.22%	239,54	55.32%	247,22	55.32%	1.416,05	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	88,08%	88.18%		88.28%		88.39 %		88.49%		88.59%		88.69%		88.69%		
		Indeks Tutupan Lahan	86,06%	86.72%		87.38%		88.05 %		88.71%		89.37%		90.03%		90.03%		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	15,00%	16,00%	93,78	16,50%	160,01	17,00 %	163,19	17,50%	166,00	18,00%	171,50	18,50%	176,99	18,50%	965,65	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	72,00%	74,00%	20,86	76,00%	26,72	78,00 %	27,25	79,00%	27,72	80,00%	28,64	81,00%	29,56	81,00%	189,84	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	60,00%	63,00%	34,91	75,00%	62,46	88,00 %	63,71	89,00%	64,80	90,00%	66,95	100,00 %	69,09	100,00 %	406,83	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	30,00%	-	-	60,00%	84,58	75,00 %	86,27	80,00%	87,75	85,00%	90,66	88,00%	93,56	88,00%	507,73	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	80,00%	89,00%	10,77	88,00%	42,97	75,00 %	43,82	63,00%	44,58	50,00%	46,05	33,00%	47,53	33,00%	264,91	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	85,00%	86,00%	1.698,54	87,00%	2.333,66	88,00 %	2.380,11	89,00%	2.421,08	90,00%	2.501,22	91,00%	2.581,36	91,00%	14.208,86	
<b>2.12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	4.629,96	B	4.545,89	BB	4.636,37	A	4.716,19	A	4.872,30	A	5.028,41	A	25.055,45	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	100%	100%	246,19	100%	70,04	100%	71,43	100%	72,66	100%	75,07	100%	77,47	100%	612,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70,00%	75,00%		80,00%		85,00 %		90,00%		95,00%		97,00%		97,00%		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	95%	95%	308,21	95%	87,38	96%	89,12	97%	90,65	98%	93,65	99%	96,65	99%	765,66	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	75%	80%		85%		90%		95%		97%		99%		99%		





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data	100%	100%	180,97	100%	53,15	100%	54,20	100%	55,14	100%	56,96	100%	58,79	100%	459,21	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	N/A	100%	195,82	100%	65,82	100%	67,13	100%	68,28	100%	70,54	100%	72,80	2%	540,39	
<b>2.13</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	3.202,36	BB	3.284,51	BB	3.349,89	A	3.407,56	A	3.520,35	A	3.633,14	A	17.667,75	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)	11,00%	13,00%	27,67	15,00%	67,70	16,00%	69,05	18,00%	70,24	18,00%	72,56	20,00%	74,89	20,00%	402,15	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)	20,42%	20,42%		23,94%	15,00	27,46%	15,30	30,98%	15,56	34,50%	16,08	38,02%	16,59	38,02%	78,53	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Bumdes yang Dibina (%)	21,13%	29,58%	4.526,28	43,66%	3.087,91	57,74%	3.149,37	71,82%	3.203,58	85,90%	3.309,62	99,98%	3.415,66	99,98%	20.983,39	
		Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	2,00%	11,27%		28,17%		52,81%		73,94%		88,02%		99,99%		99,99%		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	30,08%	30,08%	171,91	49,59%	414,87	51,90%	423,13	53,00%	430,41	54,40%	444,66	55,20%	458,90	55,20%	2.193,91	
<b>2.14</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana</b>																	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	5.599,88	BB	5.871,95	BB	5.988,82	A	6.091,92	A	6.293,57	A	6.495,21	A	31.157,21	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,80%	2,80%	994.64	2,65%	170,00	2,50%	173,38	2,35%	176,37	2,20%	182,21	2,15%	188,04	2,15%	1.919,64		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,80%	66,20%		66,60%		67,00%		67,40%		67,80%		68,20%		68,20%			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,96%	8,40%		7,66%		7,56%		7,47%		7,31%		7,25%		7,25%			
		Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	22,00%	19,50%		17,00%		14,50%		12,50%		10,50%		7,50%		7,50%			
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif MKJP	28,88%	28,89%	4.182,01	28,90%	115,00	28,95%	117,29	29,00%	119,31	29,10%	123,26	30,00%	127,21	30,00%	4.784,07		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	50,00%	51,00%	299.80	52,00%	149,81	54,00%	152,79	56,00%	155,42	58,00%	160,56	60,00%	165,71	60,00%	1.103,89		
<b>2.15</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>																		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.867,02	BB	1.138,82	BB	5.123,95	A	5.212,16	A	5.384,69	A	5.557,22	A	27.440,80	Dinas Perhubungan	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten / kota	2,5	5,5	7.054,67	5,5	7.440,25	5,5	7.588,34	5,5	7.718,98	5,5	7.974,48	5,5	8.229,98	5,5	46.342,36		
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%)	30,00%	30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%			
		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	3,88%	3,68%		3,47%		3,27%		3,06%		2,86%		2,65%		2,65%			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	12,92%	12,92%	25.00	13,42%	25,00	13,92%	25,50	14,42%	25,94	14,92%	26,80	15,42%	27,65	15,42%	155,88		
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengelolaan Penerbangan	4,54%	4,54%	162.36	4,79%	298,23	5,04%	304,17	5,29%	309,40	5,54%	319,64	5,79%	329,89	5,79%	1.859,56		
<b>2.16</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>																		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	B	B	4.815,13	B	4.762,86	BB	4.857,66	BB	4.941,29	A	5.104,85	A	5.268,41	A	26.241,77	Dinas Komunikasi, Informatika dan	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
	KABUPATEN/KOTA																	Persandian
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	0,00%	8,00%	944.89	17,00%	2.226,37	33,00%	2.270,69	50,00%	2.309,78	75,00%	2.386,23	100,00%	2.462,69	100,00%	12.384,52	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	72,00%	72,00%		82,00%		92,00%		94,00%		96,00%		100,00%		100,00%		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	0,00%	17,00%	47.85	24,00%	47,85	31,00%	48,80	38,00%	49,64	45,00%	51,29	52,00%	52,93	100,00%	298,37	
<b>2.17</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	5.665,96	BB	6.052,83	A	6.173,30	A	6.279,58	A	6.487,44	A	6.695,29	A	32.787,80	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	16,25%	17,65%	20,00	20,45%	15,00	23,25%	15,30	26,05%	15,56	28,85%	16,08	31,65%	16,59	31,65%	98,53	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	4,20%	5,60%	56,74	8,40%	32,28	12,61%	32,92	18,21%	33,48	25,21%	34,59	31,65%	35,70	31,65%	225,71	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	19,89%	33,29%	27,81	46,69%	22,08	60,09%	22,52	73,49%	22,91	86,89%	23,66	100,00%	24,42	100,00%	143,39	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	3,51%	3,90%	53.51	4,29%	264,68	55,25%	269,95	4,73%	274,60	5,07%	283,69	5,56%	292,78	5,56%	1.457,17	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	13,82%	14,10%	379.90	14,49%	307,18	14,91%	313,29	15,35%	318,69	15,88%	329,24	16,61%	339,78	16,61%	1.770,56	
<b>2.18</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>																	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	B	B	3.443,83	BB	3.559,79	BB	3.630,64	A	3.693,15	A	3.815,39	A	3.937,64	A	19.228,47	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
	KABUPATEN/KOTA																	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Investor)	12,00	13,00	54.78	13,00	115,00	13,00	117,29	13,00	119,31	13,00	123,26	14,00	127,21	14,00	667,06	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketercapaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) (%)	100,00%	100,00%	14.05	100,00%	114,05	100,00%	116,32	100,00%	118,32	100,00%	122,24	100,00%	126,16	100,00%	611,13	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	77,78%	3,12%	94.58	9,09%	214,85	8,30%	219,13	7,69%	222,90	7,14%	230,28	6,67%	237,65	6,67%	1.242,66	
		Tercapainya realisasi penanaman modal	3,2 Trilyun	3,3 Trilyun		3,6 Trilyun	3,9 Trilyun		4,2 Trilyun	4,5 Trilyun		4,8 Trilyun	4,8 Trilyun		4,8 Trilyun			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	100,00%	100,00%	386.65	100,00%	92,27	100,00%	94,11	100,00%	95,73	100,00%	98,90	100,00%	102,06	100,00%	892,72	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%)	100,00%	100,00%	15.00	100,00%	25,81	100,00%	26,32	100,00%	26,78	100,00%	27,66	100,00%	28,55	100,00%	157,93	
<b>2.19</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kemudahan dan Olahraga</b>																	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	C	CC	3.088,54	B	3.170,03	B	3.233,12	BB	3.288,78	BB	3.397,64	A	3.506,50	A	17.080,49	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10,64%	11,17%	787.31	11,70%	760,27	12,23%	775,40	12,76%	788,75	13,29%	814,86	13,82%	840,97	24,35%	4.767,97	
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,12%	22,60%		22,74%		22,78%		23,06%		24,19%		24,35%		24,35%		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	-	18 Medali	615.27	18 Medali	1.459,91	18 Medali	1.488,97	21 Medali	1.514,61	21 Medali	1.564,74	21 Medali	1.614,87	21 Medali	9.120,70	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	0,35%	0,35%	109.89	2,77%	112,90	3,46%	115,15	3,81%	117,13	4,15%	121,01	4,50%	124,88	4,50%	700,95	
<b>2.20</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>																	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.20.02	OPROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	45,00%	45,00%	76.81	62,00%	99,92	74,00 %	101,90	86,00%	103,66	94,00%	107,09	100,00 %	110,52	100,00 %	623,01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
<b>2.21</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi</b>																	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	2,00	2,00	18.58	2,00	24,93	2,00	25,43	3,00	25,86	3,00	26,72	4,00	27,58	4,00	155,78	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
<b>2.22</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>																	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan	20,00%	37%	292.53	62,37%	97,87	72%	99,82	72%	101,54	72%	104,90	72%	108,26	72%	827,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Penyelenggaraan Event Seni Tradisional	15,00%	31,57%	30.00	42,10%	30,00	52,60 %	30,89	73,68%	31,78	73,68%	33,25	73,68%	34,73	73,68%	190,64	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	5,00%	6,12%	50.00	12,24%	50,00	15,30 %	51,48	20,40%	52,96	20,40%	55,42	20,40%	57,88	100,00 %	317,73	
<b>2.23</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>																	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	4.140,69	B	4.320,00	B	4.405,99	BB	4.481,84	BB	4.630,19	A	4.778,54	A	23.194,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1;10,53	1;10,59	295.64	1;10,66	339,79	1;10,72	346,55	1;10,78	352,52	1;10,84	364,19	1;10,84	375,86	1;10,90	2.072,86	
<b>2.24</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>																	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	387.5	462.5	66,14	537.5	10,04	612.5	10,24	637.5	10,42	712.5	10,76	787.5	11,11	787.5	118,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1.474,00	1.524,00	7,04	1.574,00	82,50	1.624,00	84,14	1.674,00	85,59	1.724,00	88,42	1.774,00	91,26	1.774,00	438,95	
2.24.04	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	-	-	0,00	6,66%	9,80	6,66%	10,00	13,33%	10,17	13,33%	10,50	13,33%	10,84	26,66%	51,31	
<b>3.25</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>																	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	1.163,98	BB	6.629,65	A	6.761,60	A	6.878,01	A	7.105,68	A	7.333,34	A	35.872,26	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	11472,30	12.000,00	1.865,78	12.500,00	634,23	13.000,00	646,86	13.500,00	657,99	14.000,00	679,77	14.500,00	701,55	14.500,00	5.232,25	Dinas Perikanan dan Kelautan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	3.175,38	3.200,00	1.530,64	3.300,00	583,71	3.400,00	595,33	3.500,00	605,58	3.600,00	625,62	3.700,00	645,67	3.700,00	4.707,17	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	30,41%	42,11%	151,03	53,80%	176,25	65,50%	179,76	83,04%	182,86	94,74%	188,91	100,00%	194,96	100,00%	1.097,98	
<b>3.26</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>																	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	4.481,39	BB	4.379,46	BB	4.466,63	BB	4.543,53	A	4.693,92	A	4.844,31	A	24.539,21	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	(87,34)	0,05	331,29	0,07	951,19	0,09	970,13	0,28	986,83	0,72	1.019,49	0,82	1.052,16	0,82	5.700,99	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%)	1.947,00	0,01	0,00	0,01		0,03		0,05		0,07		0,09		0,09		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	1.8%	1.8%	521,99	1.92%	457,01	2%	466,11	2.08%	474,13	2.29%	489,82	2.59%	505,52	2.59%	2.933,59	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat hunian akomodasi	N/A	N/A	100,00	48%	120,00	53%	122,39	56%	124,50	56%	128,62	58%	132,74	58%	728,24		
		Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata (%)	N/A	5.56%		5.26%		5%		4.76%		4.55%		4.35%		4.35%			
		Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay)	N/A	N/A		0,5 Hari		0,5 Hari		0,5 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari			
<b>3.27</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>																		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	21,862.36	BB	22.053,81	BB	22.492,76	BB	22.879,99	A	23.637,33	A	24.394,67	A	117.519,02	Dinas Pertanian	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-		5,197.34		4.539,97	-	4.630,33	-	4.710,05	-	4.865,95	-	5.021,86	-	29.670,00		
		1. Padi	4,82	5,12		5,28		5,44		5,56		5,74		6,03		6,03			
		2. Jagung	5,05	5,67		5,71		6,04		6,37		6,71		7,86		7,86			
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura																	
		1. Bawang Merah	7,92	7,93		7,94		7,95		7,96		7,98		8,00		8,00			
		2. Cabe	3,11	3,18		3,25		3,32		3,41		3,50		3,80		3,80			
		3. Tomat	18,22	18,49		18,76		19,03		19,30		19,57		19,84		19,84			
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan																	
		1. Kakao	0,85	0,86		0,88		0,90		0,92		0,94		0,96		0,96			
		2. Kopi Arabika	1,95	2,00		2,04		2,08		2,12		2,16		2,23		2,23			
		3. Kopi Robusta	0,78	0,80		0,82		0,84		0,87		0,89		1,00		1,00			
		Prosentase Peningkatan Produktivitas Peternakan																	
		1. Sapi	0,07	0,08		0,08		0,09		0,10		0,11		0,12		0,12			
		2. Kerbau	0,11	0,11		0,11		0,12		0,13		0,13		0,14		0,14			
3. Babi	0,04	0,04		0,05		0,06		0,06		0,07		0,07		0,07					
4. Kambing	0,02	0,02		0,02		0,02		0,02		0,03		0,04		0,04					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	34,60	35,00	6,005.56	43,00	1.629,36	46,00	1.661,79	50,00	1.690,40	60,00	1.746,35	71,00	1.802,31	71,00	14.776,81		
		Prosentase Penataan Padang Pengembalaan	0,06	0,06		0,06		0,07		0,09		0,11		0,14		0,14			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	46,67	41,67	513,24	36,67	708,03	31,67	722,12	26,67	734,55	21,67	758,86	16,67	783,18	16,67	4.324,05		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal pengendalian dan penanggulangan Bencana OPT	0,68	0,67	303,13	0,64	394,00	0,62	401,84	0,60	408,76	0,58	422,29	0,55	435,82	0,55	2.618,19		
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	16,67	16,67		16,67		33,34		50,00		66,67		100,00		100,00			100,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas			184,20		213,27		217,51		221,26		228,58		235,91		1.406,63		
		a. Pertanian	28,00	34,00		42,00		50,00		60,00		92,00		100,00		100,00			100,00
		b. Perkebunan	4,00	8,00		12,00		16,00		20,00		60,00		92,00		92,00			92,00
		c. Peternakan	17,33	29,33		42,67		57,33		72,00		86,67		100,00		100,00			100,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	23,30	39,64	8,228.40	47,81	263,05	55,40	268,28	62,69	272,90	69,99	281,93	84,39	290,97	84,39	10.969,17		
<b>3.30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>																		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	100,00%	100,00%	56,32	100,00%	51,93	100,00%	52,96	100,00%	53,87	100,00%	55,66	100,00%	57,44	100,00%	328,18	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			100,00%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100,00%	-	0,00	100,00%	110,30	100,00%	112,49	100,00%	114,43	100,00%	118,22	100,00%	122,01	100,00%	577,45		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90%	5,90%	85,17	5,90%	83,15	5,90%	84,81	5,90%	86,27	5,90%	89,12	5,90%	91,98	5,90%	554,36	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-0,2891	0,0125	0,00	0,0175	107,11	0,02	109,24	0,0225	111,12	0,0245	114,80	0,0275	118,48	0,0275	560,75	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan persentase penanganan pengaduan konsumen	100%	100%	38,89	100%	50,00	100%	51,00	100%	51,87	100%	53,59	100%	55,31	100%	261,77	
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>3.31</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>																	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	1,48%	1,48%	2,068,64	1,48%	722,53	1,49%	736,92	1,49%	749,60	1,50%	774,41	1,51%	799,23	1,51%	5,766,63	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait.	16,67%	33,34%		50,00%		66,67%		83,34%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah data Industri yang masuk dalam SIInas	16,67%	33,34%		50,00%		66,67%		83,34%		100,00%		100,00%		100,00%		
<b>3.32</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>																	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	20,00%	20,00%	210,20	25,00%	148,00	25,00%	150,95	25,00%	153,54	12,50%	158,63	12,50%	163,71	100,00%	885,02	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang di revitalisasi	55,77%	55,77%	56,05	56,77%	65,00	57,77%	66,29	58,77%	67,44	59,77%	69,67	60,77%	71,90	60,77%	396,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang di	29,00%	29,00%	61,90	30,00%	68,00	31,00%	69,35	32,00%	70,55	33,00%	72,88	34,00%	75,22	34,00%	417,90	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
		revitalisasi																
<b>4.01</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>																	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	CC	29.139,00	B	27.072,25	B	27.284,92	BB	27.754,65	BB	28.673,34	A	29.592,03	A	150.453,35	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90,00%	90,00%	395.511	90,00%	3.754,03	90,00%	3.828,75	90,00%	3.894,66	90,00%	4.023,58	90,00%	4.152,49	90,00%	23.049,65	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90,00%	90,00%	121.438	90,00%	1.154,37	90,00%	1.177,35	90,00%	1.197,62	90,00%	1.237,26	90,00%	1.276,90	90,00%	7.197,27	
4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Presentase Kebijakan Strategis Di Bidang Administrasi Umum	90,00%	100,00	0,00	90,00%	0,00	90,00%	326,17	90,00%	331,79	90,00%	342,77	90,00%	353,75	90,00%	1.682,99	
<b>4.02</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>																	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	20.136,62	BB	20.248,71	BB	20.651,73	A	21.007,27	A	21.702,62	A	22.397,97	A	111.449,25	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	50%	75%	10.297,32	80%	12.143,53	85%	12.385,23	90%	12.598,45	95%	13.015,47	100%	13.432,48	100%	75.718,69	
		Cakupan pelayanan kesejahteraan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan	90%	90%	0,00	92%	0,00	94%	0,00	96%	0,00	98%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	A	A	6.516,80	A	6.626,56	A	6.758,45	A	6.874,81	A	7.102,37	A	7.329,92	A	35.834,56	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	88,26	88,76	2.036,40	89,26	2.129,29	89,76	2.171,67	90,26	2.209,06	90,76	2.282,18	91,26	2.355,30	91,26	13.238,85	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	90,07	91,07	1.250,42	92,07	1.661,18	93,07	1.694,25	94,07	1.723,41	95,07	1.780,46	96,07	1.837,50	96,07	9.814,01	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,12	96,12		97,12		98,12		98,62		99,12		99,12		99,12		
		Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	91,46	92,46		93,46		94,46		95,46		96,46		97,46		97,46		
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>																	
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	7,784.27	BB	8.197,58	BB	8.360,75	A	8.504,68	A	8.786,19	A	9.067,70	A	44.939,67	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	15,50%	15,90%	1,453.01	16,30%	1.960,89	16,70%	1.999,92	17,10%	2.034,35	17,50%	2.101,68	17,90%	2.169,02	17,90%	11.306,59	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	75,27%	76,27%		78,27%		79,77%		81,27%		82,77%		84,27%		84,27%		
	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	7,783.12	BB	8.367,19	BB	8.533,73	A	8.680,64	A	8.967,98	A	9.255,31	A	46.515,98	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8.88%	6.50%	2.590,98	4.00%	2.332,49	3.5%	2.378,92	3.00%	2.419,87	2.00%	2.499,97	1.5%	2.580,07	1.5%	17.910,89	
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	31.80	30,00%		29,00%		28,00%		27,00%		26,00%		25,00%		25,00%		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	63.01	63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		63,00%		
		Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	1,72 %	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	66,00%	90,00%	381.94	100,00 %	600,00	100,00 %	611,94	100,00 %	622,48	100,00 %	643,08	100,00 %	663,68	100,00 %	2.678,93	
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>																	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	5,937.75	BB	6.092,12	BB	6.213,38	A	6.320,34	A	6.529,55	A	6.738,76	A	33.060,81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	100,00%	100,00%	1.240,64	100,00%	1.556,45	100,00%	1.587,43	100,00%	1.614,76	100,00%	1.668,20	100,00%	1.721,65	100,00%	9.910,86	Manusia
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	109%	111%		113%		115%		117%		119%		121%		121%		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,99%	8%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>																	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	62,16%	0%	158,84	80%	205,92	85%	210,02	90%	213,64	95%	220,71	100%	227,78	100%	1.078,06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	40,23%	0%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	29,25%	0%		75%		85%		90%		95%		100%		100%		
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	50,00	75,00	241,77	75,00	741,77	100,00	756,54	100,00	769,56	100,00	795,03	100,00	820,51	100,00	4.125,19	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>6.01</b>	<b>Pengawasan</b>																	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	6.135,32	A	6.661,72	A	6.794,32	A	6.911,28	A	7.140,05	A	7.368,82	A	36.420,08	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SPIP	31,25%	39,38%	2.450,42	47,51%	2.297,44	55,64%	2.343,17	63,77%	2.383,51	71,90%	2.462,40	80,00%	2.541,30	80,00%	14.287,02	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan	N/A	80,00%	368,79	85,00%	451,75	90,00%	460,74	100,00%	468,67	100,00%	484,19	100,00%	499,70	100,00%	2.892,24	
<b>7</b>	<b>Urus Kewilayahan</b>																	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Kota</b>																	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	8,004.47	B	8.462,37	B	8.630,81	BB	8.779,39	BB	9.069,99	A	9.360,59	A	46.068,95	Kecamatan Poso Kota
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,46	50,96	21,94	53,46	50,23	58,46	51,23	63,46	52,11	68,46	53,84	73,46	55,56	73,46	284,90	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	65,00%	3.520,25	70,00%	3.325,36	80,00%	3.391,55	90,00%	3.449,93	95,00%	3.564,13	100,00%	3.678,32	100,00%	20.703,51	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	100,00%	0,00	100,00%	5,00	100,00%	5,10	100,00%	5,19	100,00%	5,36	100,00%	5,53	100,00%	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Kota Utara</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	7,708.48	B	7.905,73	B	8.063,09	BB	8.201,90	BB	8.473,38	A	8.744,87	A	42.267,26	Kecamatan Poso Kota Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	54,49	56,99	8,02	59,49	38,02	64,49	38,78	69,49	39,44	74,49	40,75	79,49	42,06	84,49	207,07	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	0,65	4.114,64	0,70	4.112,76	0,80	4.194,62	0,90	4.266,84	0,95	4.408,07	1,00	4.549,31	1,00	25.644,37	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Kota Selatan</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	5,597.50	B	5.872,43	B	5.989,32	BB	6.092,43	BB	6.294,09	A	6.495,75	A	31.632,50	Kecamatan Poso Kota Selatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,32	50,82	6,48	53,32	36,48	58,32	37,20	63,32	37,84	68,32	39,09	73,32	40,35	73,32	197,43		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	N/A	0,65	2.809,42	0,70	2.809,43	0,80	2.865,35	0,90	2.914,67	0,95	3.011,15	1,00	3.107,63	1,00	17.517,65		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lage</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	3.068,70	B	3.098,80	B	3.160,48	BB	3.214,89	BB	3.321,31	A	3.427,72	A	16.489,76		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	49,58	52,08	7,74	54,58	30,00	59,58	30,90	64,58	31,69	69,58	33,23	74,58	34,78	74,58	250,59		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6763 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	10,00	Berkembang	10,00	Berkembang	10,00	Maju	10,00	Maju	10,00	Maju	50,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	2,00	2,00	0,00	4,00	5,00	6,00	5,00	8,00	5,00	10,00	5,00	12,00	5,00	12,00	25,008	Kecamatan Lage	
		Status Desa Berkembang	13,00	13,00	-	12,00	-	10,00	-	8,00	-	6,00	-	4,00	-	4,00			
		Status Desa Tertinggal	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	0,00	2,00	-	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	#VALUE!		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
	PEMERINTAHAN UMUM																	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Pesisir</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	5,169,08	B	5.227,16	B	5.331,20	BB	5.422,98	BB	5.602,48	A	5.781,99	A		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	52,41	54,91	7,96	57,41	56,91	59,91	58,04	62,41	59,04	64,91	60,99	67,41	62,95	67,41		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6826 (Berkembang)	Berkembang	1,698,52	Berkembang	1,698,52	Berkembang	1,732,33	Maju	1,762,15	Maju	1,820,48	Maju	1,878,81	Maju		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	4	5	0,00	6	13,00	8	13,26	9	13,49	10	13,93	12	14,38	12	26,18	Kecamatan Poso Pesisir
		Status Desa Berkembang	8	8		7		5		4		3		1		1		
		Status Desa Tertinggal	1	0		0		0		0		0		0		0		
		Status Desa Sangat Tertinggal	0	0		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0	0,00	1	5,00	1	5,10	1	5,19	1	5,36	1	5,53	1	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2	2,00	2	2,04	2	2,07	2	2,14	2	2,21	2	10,47	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Pesisir Selatan</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2,256,98	B	2.271,50	B	2.316,71	BB	2.356,60	BB	2.434,60	A	2.512,61	A	12,121,06	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,40	50,90	9,58	53,40	39,58	55,90	40,36	58,40	41,06	60,90	42,42	63,40	43,78	63,40	216,76	Kecamatan Poso Pesisir Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6376 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	
7.01.06	PROGRAM	Status Desa Maju			0,00		9,79		9,98		10,16		10,49		10,83		26,18	





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1,00	1,00		2,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00			
		Status Desa Berkembang	7,00	7,00		7,00		7,00		6,00		5,00		4,00		4,00		0,00	
		Status Desa Tertinggal	1,00	1,00		-		-		-		-		-		-		0,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-		0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	0,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,00	2,07	2,00	2,14	2,00	2,21	2,00	10,47		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Poso Pesisir Utara</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2.248,58	B	2.279,23	B	2.324,59	BB	2.339,75	BB	2.417,20	A	2.494,65	A	12.085,14		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	53,70	56,20	7,78	58,70	42,43	61,20	43,27	63,70	44,02	66,20	45,48	68,70	46,93	68,70	234,56		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6679 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	24,14	Maju	24,94	Maju	25,74	Maju	74,81		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	2,00	3,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	8,00	0,00	8,00	26,18	Kecamatan Poso Pesisir Utara	
		Status Desa Berkembang	8,00	7,00		6,00		5,00		4,00		3,00		2,00		2,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	7,24	2,00	7,48	2,00	7,72	2,00	22,44		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Utara</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	4,867,56	B	4.939,32	B	4.998,53	BB	5.084,58	BB	5.252,88	A	5.421,19	A	26,368,39	Kecamatan Pamona Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	51,26	53,76	10,35	56,26	40,35	58,76	41,15	61,26	41,86	63,76	43,25	66,26	44,63	66,26	221,59	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6193 (Berkembang)	Berkembang	1,624,87	Berkembang	1.624,88	Berkembang	1.657,22	Berkembang	1.685,75	Berkembang	1.741,55	Maju	1.797,35	Maju	10,131,64	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	1	1	0,00	2	0,00	2	33,71	2	34,29	3	35,42	4	36,56	4	26,18	
		Status Desa Berkembang	3	3		3		4		5		4		3		3		
		Status Desa Tertinggal	3	3		2		1		0		0		0		0		
		Status Desa Sangat Tertinggal	0	0		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	0	0,00	1	5,00	1	5,10	1	5,19	1	5,36	1	5,53	1	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2	0,00	2	5,39	2	5,49	2	5,67	2	5,85	2	22,39	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Pusulemba</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	5,804,42	B	5.924,99	B	6.015,24	BB	6.118,80	BB	6.321,33	A	6.523,87	A	31,595,17	Kecamatan Pamona Pusulemba
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	53,57	56,07	12,93	58,57	51,23	61,07	52,25	63,57	53,15	66,07	54,91	68,57	56,67	68,57	289,44	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6270 (Berkembang)	Berkembang	1,612,86	Berkembang	1.557,86	Berkembang	1.588,87	Maju	1.616,22	Maju	1.669,72	Maju	1.723,22	Maju	9,768,76	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	23,07	4,00	23,46	5,00	24,24	6,00	25,02	6,00	26,18	
		Status Desa Berkembang	8,00	7,00		6,00		5,00		4,00		3,00		2,00		2,00	0,00	
		Status Desa Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-		0,00



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	4,61	2,00	4,69	2,00	4,85	2,00	5,00	2,00	19,16		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Timur</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	1,998,42	B	2.107,40	B	2.132,86	BB	2.169,57	BB	2.241,39	A	2.313,20	A	11.191,64		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,29	50,79	6,96	53,29	42,68	55,79	43,52	58,29	44,27	60,79	45,74	63,29	47,20	65,79	236,09		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6520 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	11,43	Maju	11,63	Maju	12,01	Maju	12,40	Maju	47,46		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	2,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	8,00	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26,18	Kecamatan Pamona Timur	
		Status Desa Berkembang	13,00	11,00	9,00	7,00	5,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Status Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	5,06	2,00	5,14	2,00	5,31	2,00	5,48	2,00	20,99		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Tenggara</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2,402,84	B	2.441,53	B	2.447,02	BB	2.489,15	BB	2.571,54	A	2.653,93	A	12.820,51	Kecamatan Pamona Tenggara	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,60	51,10	5,73	53,60	39,58	56,10	40,36	58,60	41,06	61,10	42,42	63,60	43,78	63,60	216,76		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6113 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	25,36	Maju	25,79	Maju	26,65	Maju	27,50	Maju	105,29		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	12,68	4,00	12,90	5,00	13,32	6,00	13,75	6,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	6,00	6,00		6,00		6,00		5,00		4,00		3,00		3,00			
		Status Desa Tertinggal	3,00	2,00		1,00		-		-		-		-		-			-
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	5,07	2,00	5,16	2,00	5,33	2,00	5,50	2,00	21,06		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Selatan</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2,681,46	B	2,629,52	B	2,649,76	BB	2,695,37	BB	2,784,59	A	2,873,81	A	13,741,05	Kecamatan Pamona Selatan	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	51,99	54,49	23,57	56,99	53,58	59,49	54,65	61,99	55,59	64,49	57,43	66,99	59,27	66,99	304,09		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6619 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	13,16	Maju	13,39	Maju	13,83	Maju	14,27	Maju	54,65		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	3,00	4,00	0,00	5,00	0,00	6,00	13,71	7,00	13,94	8,00	14,41	9,00	14,87	9,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	9,00	8,00		7,00		6,00		5,00		4,00		3,00		3,00			
		Status Desa Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-		-	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	5,21	2,00	5,30	2,00	5,47	2,00	5,65	2,00	21,63	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Pamona Barat</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	1.700,73	B	1.750,04	B	1.784,87	BB	1.815,60	BB	1.875,69	A	1.935,79	A	9.335,60	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,27	50,77	5,49	53,27	30,00	55,77	30,60	58,27	31,12	60,77	32,15	63,27	33,18	63,27	164,31	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6491 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	Maju	0,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Kecamatan Pamona Barat
		Status Desa Berkembang	6,00	5,00		4,00		3,00		2,00		-		-		-		
		Status Desa Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Utara</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2.189,83	B	2.288,04	B	2.314,52	BB	2.354,37	BB	2.432,30	A	2.510,23	A	12.132,38	Kecamatan Lore Utara





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	KABUPATEN/KOTA																		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	52,33	54,83	8,03	57,33	38,03	59,83	38,78	62,33	39,45	64,83	40,76	67,33	42,06	67,33	207,10		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.6418 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	11,91	Maju	12,12	Maju	12,52	Maju	12,92	Maju	49,47		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	4,00	7,15	5,00	7,27	5,00	7,51	5,00	7,75	5,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	6,00	5,00		4,00		3,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
		Status Desa Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	5,00	2,00	5,10	2,00	5,19	2,00	5,36	2,00	5,53	2,00	26,18		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Timur</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	1.876,24	B	1.892,15	B	1.913,91	BB	1.946,86	BB	2.011,30	A	2.075,74	A	10.036,76		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,25	50,75	6.55	53,25	46,78	55,75	47,71	58,25	48,53	60,75	50,13	63,25	51,74	63,25	251,43		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5978 (Tertinggal)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	9,94	Maju	10,11	Maju	10,44	Maju	10,78	Maju	41,27		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	1,00	5,96	2,00	6,07	3,00	6,27	3,00	6,47	3,00	26,18		
		Status Desa Berkembang	3,00	4,00		4,00		4,00		3,00		2,00		2,00		2,00			
		Status Desa Tertinggal	2,00	1,00		1,00		-		-		-		-		-			
																		Kecamatan Lore Timur	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target														OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	5,00	2,00	5,10	2,00	5,19	2,00	5,36	2,00	5,53	2,00	26,18		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Peore</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	1,719,91	B	1.787,42	B	1.807,94	BB	1.839,07	BB	1.899,94	A	1.960,82	A	9.515,17		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,25	50,75	4,99	53,25	46,36	55,75	47,28	58,25	48,09	60,75	49,68	63,25	51,28	63,25	259,04		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0,6419 (Berkembang)	Berkembang	0,00	Berkembang	0,00	Berkembang	9,41	Maju	9,57	Maju	9,89	Maju	10,21	Maju	39,08		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	1,00	0,00	2,00	5,65	3,00	5,74	3,00	5,93	3,00	6,12	3,00	34,03	Kecamatan Lore Peore	
		Status Desa Berkembang	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
		Status Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	6,50	1,00	6,63	1,00	6,74	1,00	6,97	1,00	7,19	1,00	34,03		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	5,00	2,00	5,10	2,00	5,19	2,00	5,36	2,00	5,53	2,00	26,18		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Tengah</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2,076,42	B	2.114,74	B	2.132,56	BB	2.169,27	BB	2.241,08	A	2.312,88	A	11.194,82	Kecamatan Lore Tengah	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,24	50,74	8,80	53,24	38,80	55,74	39,57	58,24	40,25	60,74	41,59	63,24	42,92	63,24	211,93		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5922 (Tertinggal)	Tertinggal	0,00	Tertinggal	0,00	Tertinggal	13,24	Berkembang	13,47	Berkembang	13,91	Berkembang	14,36	Berkembang	54,98		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	-	11,03	-	11,22	-	11,59	-	11,97	-	26,18		
		Status Desa Berkembang	1,00	1,00		2,00		3,00		5,00		6,00		7,00		7,00			
		Status Desa Tertinggal	7,00	7,00		6,00		5,00		4,00		3,00		2,00		2,00			
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-		-		-		-		-		-		-			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	5,00	2,00	5,10	2,00	5,19	2,00	5,36	2,00	5,53	2,00	26,18		
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Selatan</b>																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	1.897,84	B	1.936,91	B	1.955,19	BB	1.988,85	BB	2.054,68	A	2.120,51	A	10.269,56		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,22	50,72	15,76	53,22	45,76	55,72	46,67	58,22	47,47	60,72	49,04	63,22	50,61	63,22	255,30		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.5983 (Tertinggal)	Tertinggal	0,00	Tertinggal	0,00	Berkembang	6,08	Berkembang	6,19	Berkembang	6,39	Berkembang	6,60	Berkembang	25,26	Kecamatan Lore Selatan	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	-	-	0,00	-	0,00	-	10,14	-	10,31	-	10,65	-	10,99	-	26,18		
		Status Desa Berkembang	4,00	4,00		5,00		6,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
		Status Desa Tertinggal	4,00	4,00		3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		1,00			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
		Status Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	5,00	1,00	5,10	1,00	5,19	1,00	5,36	1,00	5,53	1,00	26,18	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	4,05	2,00	4,12	2,00	4,26	2,00	4,40	2,00	16,84	
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Lore Barat</b>																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	N/A	C	2,188,00	B	2.288,34	B	2.307,75	BB	2.347,48	BB	2.425,19	A	2.502,89	A	12.127,05	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,22	50,72	7,25	53,22	7,25	55,72	7,39	58,22	7,52	60,72	7,77	63,22	8,02	63,22	45,21	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	0.4594 (Sangat Tertinggal)	Sangat Tertinggal	0,00	Sangat Tertinggal	0,00	Sangat Tertinggal	11,88	Tertinggal	12,08	Tertinggal	12,48	Berkembang	12,88	Berkembang	49,32	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Maju	0	0	0,00	0	0,00	0	14,25	0	14,50	0	14,98	0	15,46	0	59,19	Kecamatan Lore Barat
		Status Desa Berkembang	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	3,00	-	3,00	-	
		Status Desa Tertinggal	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
		Status Desa Sangat Tertinggal	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	N/A	-	0,00	1,00	33,50	1,00	34,17	1,00	34,75	1,00	35,91	1,00	37,06	1,00	175,38	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	0	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
<b>1.05</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

KODE	Program / Keg. / Sub Keg.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Awal Tahun (2020)	Target												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	B	2.134,75	BB	3.101,22	BB	3.162,95	A	3.217,40	A	3.323,90	A	3.430,40	A	17.133,55	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	0,025%	0,005%	144,60	0,005%	176,27	0,005%	766,75	0,005%	766,75	0,005%	766,75	0,005%	766,75	0,025%	3.419,54	
		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	-	-		0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10							
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	100,00%	100,00%	599,23	100,00%	549,23	100,00%	560,16	100,00%	569,81	100,00%	588,67	100,00%	607,53	100,00%	3.424,64	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100,00%	100,00%	443,29	100,00%	110,00	100,00%	112,19	100,00%	114,12	100,00%	117,90	100,00%	121,68	100,00%	1.038,53	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan.	100,00%	100,00%	248,81	100,00%	208,81	100,00%	212,97	100,00%	216,63	100,00%	223,80	100,00%	230,97	100,00%	1.301,99	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	73,10	100,00%	522,00	100,00%	532,39	100,00%	541,55	100,00%	559,48	100,00%	577,40	100,00%	2.839,14	
<b>Total</b>					<b>1.155,16</b>		<b>834,612,59</b>		<b>851,224,55</b>		<b>865,878,88</b>		<b>894,539,90</b>		<b>923,200,92</b>			



# BAB 8

# RPJMD



## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

Kinerja penyelenggaraan penetapan indikator kinerja daerah mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Bupati dan Wakil Bupati Poso yang dimanifestasikan dalam hirarki lembaga yang dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kinerja Daerah (IKD tanggungjawab dan kontrak kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan ukuran keberhasilan terhadap program perangkat daerah (PD) Utama (IKU) Kabupaten Poso untuk periode 2021-2026. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

### 8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Poso selama 6 (enam) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka



pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Poso diupayakan mampu menjaga keharmonisan daerah, keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta memajukan Desa yang ada di Kabupaten Poso. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian s/d tahun 2026 ditampilkan pada Tabel 8.1 berikut ini.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6556	0,6756	0,6956	0,7156	0,7356	0,7556	0,7556
2	Desa Maju	Persen	11,27	12,68	14,08	15,49	16,20	17,61	17,61
3	Desa Berkembang	Persen	73,94	76,76	78,17	79,58	80,99	82,39	82,39
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,88	72,51	73,14	73,77	74,4	75,03	75,03
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,25	71,37	71,49	71,61	71,73	71,85	71,85
6	Prevalensi Angka Stunting	Persen	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3	7,8	7,8
7	Indeks Pendidikan	Indeks	65-70	65-70	65-70	70-75	70-75	70-75	70-75
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,92	14,14	14,36	14,58	14,80	15,02	15,02
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,61	9,8	9,99	10,18	10,37	10,56	10,56
10	Indeks Pembangunan Gender	Persen	96,93	97,28	97,63	97,98	98,33	98,68	98,68
11	Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif	Persen	5,6	5,62	5,64	5,66	5,68	5,7	5,70
12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2-4	3-3,50	3,5-4	4-5	5-6	5-6	5-6
13	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280
14	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	0,1025	0,1425	0,1825	0,2225	0,2625	0,3025	0,3025
15	Pendapatan perkapita	Juta Rp	24,91	25,75	26,59	27,43	28,27	28,27	28,27
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,45	14,94	14,43	13,92	13,41	12,9-9,9	12,9-9,9
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
18	Nilai Tukar petani	Persen	96-98	98-100	100-102	100-102	100-102	100-102	100-102
19	Indeks Reformasi Briokrasi		B	BB	BB	BB	A	A	A



No	Indikator	Satuan	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
20	Indek Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks	80,42	82,57	84,72	86,87	89,02	91,17	91,17
21	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	A	A	A	A	A
22	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Indeks Demokrasi	Kategori	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90
24	Angka Kriminalitas	Persen	13,84	12,59	11,34	10,09	8,84	7,59	7,59
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indkes	60-70	60-70	60-70	60-70	70-75	70-75	70-75
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indkes	72,88	73,63	74,38	75,13	75,88	76,63	76,63
27	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	1,41-2,82	2,83-4,23	4,24-5,63	5,64-7,04	7,05-8,45	8,46-9,86	8,46-9,86
28	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	120,66	118,66	116,66	114,66	112,66	110,66	110,66 (Sedang)
29	Indeks Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks	69,66	72,66	75,46	78,31	81,04	83,55	83,55
30	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen	14	16,1	18,2	20,3	22,4	24,5	24,5
31	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	67,67	69,59	71,51	73,43	75,35	77,27	77,27
32	Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	84,50	85,90	87,30	88,70	90,10	91,50	91,50
33	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	8,96	11,96	14,96	17,96	20,96	23,96	23,96

## 8.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan



kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Poso**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	(3,01)	2-3	3-5	4-5	4-5	5-6	5-6
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	(3,89)	2-4	3-3,50	3,5-4	4-5	5-6	5-6
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	9.219,87	9.841,29	10.504,59	11.212,60	11.968,33	12.775,00	13.636,03
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	9.219,87	9.841,29	10.504,59	11.212,60	11.968,33	12.775,00	13.636,03
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	6.224,31	6.480,75	6.747,76	7.025,77	7.315,23	7.616,62	7.930,42
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	6.224,31	6.480,75	6.747,76	7.025,77	7.315,23	7.616,62	7.930,42
1.1.7	Laju inflasi	-	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	-						
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	37,65	39,84	42,15	44,59	47,18	49,91	52,81
	- Perkembangan PDRB Perkapita (%)	1,58	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	25,42	24,91	25,75	26,59	27,43	28,27	28,27
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	0,63	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
1.1.9	Indeks Gini	-	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280	0,300-0,280
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	-						





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Garis Kemiskinan (000)	515.435,00	548.422,8	583.521,9	620.867,3	660.602,8	702.881,4	747.865,8
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	40.200,00	31.637,40	24.898,63	19.595,22	15.421,44	12.136,67	9.551,56
	- Persentase Kemiskinan (%)	15,45	15,45	14,94	14,43	13,92	13,41	12,9-9,9
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,53	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,68	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,28	71,88	72,51	73,14	73,77	74,40	75,03
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	84,55	84,6	85,1	85,6	86,1	86,6	87,1-90,10
<b>1.2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>	-						
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00	100,14	100,27	100,41	100,55	100,68	100,82
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,41	9,61	9,80	9,99	10,18	10,37	10,56
1.2.3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,18	71,25	71,37	71,49	71,61	71,73	71,85
1.2.4	Balita Gizi Buruk	15,00						
1.2.5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	72,36	72,79	73,23	73,67	74,10	74,55	74,99
1.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,78	76,28	77,80	79,36	80,94	82,56	84,21
1.2.7	Tingkat pengangguran terbuka	2,39	2,24	2,10	1,97	1,85	1,74	1,63
1.2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja	97,61	97,76	97,90	98,03	98,15	98,26	98,37
1.2.9	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	-						
	- PDRB ADHB	63,99	68,23	72,75	77,58	82,72	88,21	94,05
	- PDRB ADHK	43,20	44,77	46,40	48,09	49,84	51,65	53,53
1.2.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,83	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
1.2.11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	120,00	120,42	120,84	121,26	121,69	122,11	122,54
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten	-						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- PDRB ADHB	38,93	39,36	39,79	40,23	40,67	41,12	41,57
	- PDRB ADHK	39,04	39,35	39,66	39,98	40,30	40,62	40,95
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten	-						
	- PDRB ADHB	7,48	7,70	7,92	8,15	8,39	8,63	8,88
	- PDRB ADHK	7,43	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	-						
	Padi	99.359,51	107.506,99	116.322,56	125.861,01	136.181,62	147.348,51	159.431,09
	Jagung	8.510,00	9.281,86	10.123,72	11.041,94	12.043,45	13.135,79	14.327,20
	Kacang Kedelai	471,00	541,65	622,90	716,33	823,78	947,35	1.089,45
	Kacang Tanah	107,00	111,07	115,29	119,67	124,21	128,93	133,83
	Kacang Hijau	20,6	21,32	22,07	22,84	23,64	24,47	25,32
	Ketela Pohon	7.626,00	7.931,04	8.248,28	8.578,21	8.921,34	9.278,20	9.649,32
	Ketela Rambat	7.043,00	7.204,99	7.370,70	7.540,23	7.713,66	7.891,07	8.072,56
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	17,76	18,95	20,21	21,57	23,01	24,56	26,20
	- PDRB ADHK	17,17	18,15	19,18	20,27	21,43	22,65	23,94
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	-						
	Cengkeh	3.452,00	798,96	4.028,48	932,39	4.701,24	1.088,10	5.486,35
	Kelapa Dalam	8.194,73	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-5000
	Kelapa Sawit	2.700,39	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000	500-1000
	Kopi	737,30	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000
	Karet	216,00	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
	Kakao	23.740,31	20000-25000	20000-25000	20000-25000	20000-25000	20000-25000	20000-25000
	Pala	9,91	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
	Kemiri	83,12	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	3,45	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	- PDRB ADHK	3,32	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	1,56	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
	- PDRB ADHK	1,39	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	2,03	2,09	2,14	2,20	2,26	2,32	2,39
	- PDRB ADHK	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,74	1,75
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	3,09	3,14	3,19	3,25	3,30	3,36	3,41
	- PDRB ADHK	3,08	3,09	3,11	3,12	3,14	3,15	3,17
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	11,83	12,02	12,22	12,42	12,62	12,83	13,04
	- PDRB ADHK	11,84	12,02	12,20	12,38	12,57	12,75	12,95
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	1,61	1,63	1,66	1,69	1,71	1,74	1,76
	- PDRB ADHK	1,48	1,48	1,48	1,49	1,49	1,50	1,50
1.2.24	Pertumbuhan Industri	(14,10)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
<b>1.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>	-						
1.3.1	Seni Budaya	-						
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	1,02	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,23	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2	Olahraga	-						
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	1,02	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	0,08	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1	0,5-1
<b>2.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.1.1</b>	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	-						
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	9,00	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	-						
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	104,29	100-101	100-101	100-101	100-101	100-101	100-101
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,58	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	93,36	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	-						
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	99,88	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	95,19	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	97,69	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	-						
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	93,89	95-98	95-98	95-98	95-98	95-98	95-98
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	79,19	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	68,16	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75	70-75
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	-						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
98	- Tingkat SD/MI	85,47	92-95	92-95	92-95	92-95	92-95	92-95
	- Tingkat SMP/MTs	64,33	75-80	75-81	75-82	75-83	75-84	75-85
	- Tingkat SMA/SMK/MA	-						
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	-						
	- Tingkat SD/MI	0,08	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02
	- Tingkat SMP/MTs	0,50	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2
	- Tingkat SMA/SMK/MA	-						
2.1.1.7	Angka Kelulusan	-						
	- Tingkat SD/MI	99,88	100	100	100	100	100	100
	- Tingkat SMP/MTs	95,19	100	100	100	100	100	100
	- Tingkat SMA/SMK/MA	97,69	100	100	100	100	100	100
2.1.1.8	Fasilitas Pendidikan	-						
	- Tingkat SD/MI	243,00	245-250	245-250	245-250	245-250	245-250	245-250
	- Tingkat SMP/MTs	82,00	85-100	85-100	85-100	85-100	85-100	85-100
	- Tingkat SMA/SMK/MA	41,00	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
2.1.1.9	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10
2.1.1.10	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	0,08	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10
2.1.1.11	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	98,11	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,75	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.2.1	<b>Angka Kematian Bayi</b>	8,7/1.000 KH	10/1000KH	10/1000KH	10/1000KH	10/1000KH	10/1000KH	10/1000KH
2.1.2.2	Rasio posyandu per satuan balita	86,54	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
2.1.2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk	-						
	Rasio Puskesmas	0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10	0,09-0,10





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rasio Posyandu	1,16	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
	Rasio Polindes	0,59	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8
	Rasio Sarana Kesehatan	1,85	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.1.2.4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,01	0,012-0,015	0,012-0,015	0,012-0,015	0,012-0,015	0,012-0,015	0,012-0,015
2.1.2.5	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,18	0,20-0,25	0,20-0,25	0,20-0,25	0,20-0,25	0,20-0,25	0,20-0,25
2.1.2.6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	3,62	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
2.1.2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,10	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86,60	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80
2.1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	15,52						
2.1.2.11	Angka Kejadian Malaria	6,53	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02	0,01-0,02
2.1.2.12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,04	0,01-0,012	0,01-0,012	0,01-0,012	0,01-0,012	0,01-0,012	0,01-0,012
2.1.2.13	Cakupan puskesmas (Persen)	-	100	100	100	100	100	100
2.1.2.14	Cakupan Polindes (Persen)	-	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
2.1.2.15	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	84,80	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
2.1.2.16	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	80,09	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
2.1.2.17	Angka Stunting	16,80	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3	7,8
<b>2.1.4.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
2.1.4.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,44	0,60-0,65	0,60-0,65	0,60-0,65	0,60-0,65	0,60-0,65	0,60-0,65



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.4.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,01	0,005-0,006	0,005-0,006	0,005-0,006	0,005-0,006	0,005-0,006	0,005-0,006
2.1.4.3	Proporsi Jalan yang dapat dilalui Kendaraan Roda Empat	59,68	67,67	69,59	71,51	73,43	75,35	77,27
	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	0,02	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%
2.1.4.4	Rasio Jaringan Irigasi	11,59	12-13	12-13	12-13	12-13	12-13	12-13
2.1.4.5	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (1.000)	4,36	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2.1.4.6	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,00	0,00-0,00%	0,00-0,00%	0,00-0,00%	0,00-0,00%	0,00-0,00%	0,00-0,00%
2.1.4.7	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,04	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%	4-5%
2.1.4.8	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan (Data Tahun 2020 yang tersedia adalah Jumlah)	129,00	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%	2-3%
<b>2.1.5.</b>	<b>Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;</b>							
2.1.5.1	Rumah tangga pengguna air bersih	80,29	90-95	90-96	90-97	90-98	90-99	90-100
2.1.5.2	Rumah tangga pengguna listrik	99,28	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.5.3	Rumah layak huni	90,58	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.5.4	Rumah tangga ber-Sanitasi	90,31	90-95	90-96	90-97	90-98	90-99	90-100
2.1.5.5	Rasio Permukiman Layak Huni	99,49	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.1.5.6	Persentase Pemukiman yang Tertata	99,49	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
<b>2.1.6.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;</b>							
2.1.6.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5,43	50	50	50	50	50	50



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.6.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	23,80	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
2.1.6.3	Persentase Penegakan PERDA	90,00	100	100	100	100	100	100
<b>2.1.8.</b>	<b>Sosial</b>							
2.1.8.1	Jumlah PMKS PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	100,00	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100
<b>2.2.</b>	<b>Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
2.2.1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (Kasus)	8,00	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
2.2.1.2	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Orang)	136,00	150-200	150-200	150-200	150-200	150-200	150-200
2.2.1.3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (Orang)	1.256,00	3500-4000	3500-4000	3500-4000	3500-4000	3500-4000	3500-4000
2.2.1.4	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	80,00	400-500	400-500	400-500	400-500	400-500	400-500
2.2.1.5	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)	20,00	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
2.2.1.6	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Orang)	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
2.2.1.7	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 (orang)	807,00	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000	900-1000
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,56	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki	20,00	20	20	20	20	20	20



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	perempuan di DPRD							
2.2.2.3	Rasio KDRT	0,08	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1
2.2.2.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	61,58	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
<b>2.2.3.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>							
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	50,28	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
2.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein	-						
	Ketersediaan Energi	2.752 Kkal/Kap/Hari	4000-5000 kkal/kap/hari	4000-5000 kkal/kap/hari	4000-5000 kkal/kap/hari	4000-5000 kkal/kap/hari	4000-5000 kkal/kap/hari	4000-5000 kkal/kap/hari
	Ketersediaan Protein	80.4 gram/Kap/Hari	180-200 kkal/kap/hari	180-200 kkal/kap/hari	180-200 kkal/kap/hari	180-200 kkal/kap/hari	180-200 kkal/kap/hari	180-200 kkal/kap/hari
2.2.3.3	Wilayah Rawan Pangan (Kecamatan)	-						
	Aman	3,00	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	Waspada	9,00	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
	Rawan	7,00	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
<b>2.2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>							
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Poso	Belum Ada	Belum-100	Belum-100	Belum-100	Belum-100	Belum-100	Belum-100
2.2.5.2	Terselenggaranya KLHS K/R/P	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	5 sungai (memenuhi) dan 11 titik sungai (cemar ringan)	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	91,68	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
2.2.5.5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 orang	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	0	0	0	Ada	Ada	Ada
2.2.5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	85,0%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
<b>2.2.6.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	94-100	94-100	94-100	94-100	94-100	94-100
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	76.247,00	73.693-100	73.693-100	73.693-100	73.693-100	73.693-100	73.693-100
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	37.765,00	37.765-100	37.765-100	37.765-100	37.765-100	37.765-100	37.765-100
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Ada	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100	Ada-100
<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00%	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
2.2.7.2	Jumlah Kelompok PKK	14200,00%	142	142	142	142	142	142
2.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi	0,00%	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01
2.2.7.4	Persentase PKK Aktif	75,00%	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80
2.2.7.5	Posyandu aktif	28400,00%	280-285	280-285	280-285	280-285	280-285	280-285
<b>2.2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,00	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,80	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
2.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	44,80	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
2.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	3,40	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
2.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,04	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.2.8.7	Cakupan peserta KB aktif	65,78	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100
2.2.8.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,49	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
2.2.8.9	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	94,71	100-100	100-100	100-100	100-100	100-100	100-100
2.2.8.10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,00	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25
2.2.8.11	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	0,82	0,60-0,60	0,60-0,60	0,60-0,60	0,60-0,60	0,60-0,60	0,60-0,60
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>							
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)							
	- Jumlah Penumpang Angkutan Darat	28.260,00	65 ribu-70 ribu	65 ribu-70 ribu	65 ribu-70 ribu	65 ribu-70 ribu	65 ribu-70 ribu	65 ribu-70 ribu
	- Jumlah Penumpang Angkutan	3.044,00	1,5-2 ribu	1,5-2 ribu	1,5-2 ribu	1,5-2 ribu	1,5-2 ribu	1,5-2 ribu



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Laut							
	- Jumlah Penumpang Angkutan Udara	21.753,00	30 ribu-35 ribu	30 ribu-35 ribu	30 ribu-35 ribu	30 ribu-35 ribu	30 ribu-35 ribu	30 ribu-35 ribu
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	4,00	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
2.2.9.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.300,00	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	174,00	125-150	125-150	125-150	125-150	125-150	125-150
2.2.9.5	Jumlah Angkutan Barang	-						
	Jumlah orang (orang)	53.057,00	100 ribu-200 ribu	100 ribu-200 ribu	100 ribu-200 ribu	100 ribu-200 ribu	100 ribu-200 ribu	100 ribu-200 ribu
	Jumlah Barang (ton)	298.446,00	200 ribu-300 ribu	200 ribu-300 ribu	200 ribu-300 ribu	200 ribu-300 ribu	200 ribu-300 ribu	200 ribu-300 ribu
2.2.9.6	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-						
	- Jumlah Pelabuhan Laut	1,00	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Bandar Udara	1,00	1	1	1	1	1	1
	- Jumlah Terminal Bis	2,00	2	2	2	2	2	2
<b>2.2.10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
2.2.10.1	Persentase penduduk yang menggunakan HP	-	90-95	90-96	90-97	90-98	90-99	90-100
2.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	19,00	42-45	42-46	42-47	42-48	42-49	42-50
2.2.10.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	6.683,00	7 ribu - 8 ribu	8 ribu - 8 ribu	9 ribu - 8 ribu	10 ribu - 8 ribu	11 ribu - 8 ribu	12 ribu - 8 ribu
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	65,74	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70
2.2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	45,34	100	100	100	100	100	100
2.2.11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	1,00	100	100	100	100	100	100
2.2.11.4	Persentase BPR/LKM aktif	0%	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01	0,00-0,01
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional	2,00	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(PMDN/PMA)							
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-						
	- Jumlah investasi PMDN (Miliar USS)	-	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2
	- Jumlah investasi PMA (Juta)	3.244.081,74	4.744.081,74	6.244.081,74	7.744.081,74	9.244.081,74	10.744.081,74	12.244.081,74
2.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	0,00						
2.2.12.4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	83,17	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
<b>2.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
2.2.13.1	Persentase jumlah organisasi pemuda yang dibina	14,00	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
2.2.13.2	Jumlah Pemuda Non Organisasi yang dibina	142,00	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
2.2.13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	58,00	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
2.2.13.4	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat nasional	2,00	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
2.2.13.5	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat regional (asean)	-	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.2.13.6	Prestasi yang diraih Atlet Poso pada tingkat internasional	-	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
<b>2.2.14.</b>	<b>Statistik</b>							
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.2.15.</b>	<b>Persandian</b>							
2.2.15.1	Pengelolaan Persandian	100,00	100	100	100	100	100	100
2.2.15.2	Peningkatan SDM pengelola Persandian	-						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2.2.16.</b>	<b>Kebudayaan</b>							
2.2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,099	72 ribu-73 ribu	72 ribu-73 ribu	72 ribu-73 ribu	72 ribu-73 ribu	72 ribu-73 ribu	72 ribu-73 ribu
2.2.17.2	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	0,038	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.2.17.3	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	25.303,000	72ribu-73 ribu	72ribu-73 ribu	72ribu-73 ribu	72ribu-73 ribu	72ribu-73 ribu	72ribu-73 ribu
2.2.17.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	450,000	600-700	600-700	600-700	600-700	600-700	600-700
<b>2.3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>							
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisman	214,00	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu	2 ribu-3 ribu
	Jumlah Kunjungan Wisnu	19.374,00	55 ribu - 60 ribu	55 ribu - 60 ribu	55 ribu - 60 ribu	55 ribu - 60 ribu	55 ribu - 60 ribu	55 ribu - 60 ribu
2.3.1.2	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan budaya	-	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
2.3.1.3	PAD sektor pariwisata	0,19	1-2%	1-2%	1-2%	1-2%	1-2%	1-2%
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian</b>							
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanian	-						
	- PDRB ADHB	38,93	39-40	39-40	39-40	39-40	39-40	39-40
	- PDRB ADHK	39,04	39-40	39-40	39-40	39-40	39-40	39-40
2.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-						
	Padi	99.359,51	130-150 ribu	130-150 ribu	130-150 ribu	130-150 ribu	130-150 ribu	130-150 ribu
	Jagung	8.510,00	40-45 ribu	40-45 ribu	40-45 ribu	40-45 ribu	40-45 ribu	40-45 ribu



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kacang Kedelai	471,00	1,7-2 ribu	1,7-2 ribu	1,7-2 ribu	1,7-2 ribu	1,7-2 ribu	1,7-2 ribu
	Kacang Tanah	107,00	160-170	160-171	160-172	160-173	160-174	160-175
	Kacang Hijau	20,6	30-40	30-41	30-42	30-43	30-44	30-45
	Ketela Pohon	7.626,00	7-7,5 ribu	7-7,5 ribu	7-7,5 ribu	7-7,5 ribu	7-7,5 ribu	7-7,5 ribu
	Ketela Rambat	7.043,00	7-8 ribu	7-8 ribu	7-8 ribu	7-8 ribu	7-8 ribu	7-8 ribu
2.3.2.3	Cakupan bina kelompok petani	1.873,00	1,9-2 ribu	1,9-2 ribu	1,9-2 ribu	1,9-2 ribu	1,9-2 ribu	1,9-2 ribu
<b>2.3.3.</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>							
2.3.3.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,28	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	99-100
<b>2.3.4.</b>	<b>Perdagangan</b>							
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	(2.255,00)	(1,4-1,5 Juta)	(1,4-1,5 Juta)	(1,4-1,5 Juta)	(1,4-1,5 Juta)	(1,4-1,5 Juta)	(1,4-1,5 Juta)
<b>2.3.5.</b>	<b>Perindustrian</b>							
2.3.5.1	Pertumbuhan Industri	(14,10)	(5-10)	(5-10)	(5-10)	(5-10)	(5-10)	(5-10)
2.3.5.2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	-						
	- PDRB ADHB	1,61	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00
	- PDRB ADHK	1,48	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00	1,5-2,00
2.3.5.3	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	-						
<b>2.3.5.</b>	<b>Transmigrasi</b>							
2.3.5.1	Jumlah UPT Pendukung Kota Terpadu Mandiri (Unit)	4,00	4	4	4	4	4	4
2.3.5.2	Jumlah warga transmigran yang dibina di kawasan transmigrasi (KK)	100,00	600-650	600-650	600-650	600-650	600-650	600-650
2.3.5.3	Jumlah keluarga miskin yang ikut transmigrasi lokal (KK)	100,00	450-500	450-500	450-500	450-500	450-500	450-500
2.3.5.4	Jumlah Transmigran Swakasa	-	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Penunjang</b>							





**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2.4.1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.4.2</b>	<b>Keuangan</b>							
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,74	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
2.4.2.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	27,98	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
2.4.2.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	16,06	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
2.4.2.5	Persentase belanja langsung	37,63	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
2.4.2.6	Persentase belanja belanja tidak langsung	62,37	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
2.4.2.7	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
<b>2.4.3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>		90-95					
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
2.4.3.2	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma	285,00	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.3.3	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktura	3,00	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
2.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37,00	37	37	37	37	37	37
2.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	869,00	869-870	869-870	869-870	869-870	869-870	869-870
<b>2.4.4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
<b>2.4.5</b>	<b>Pengawasan</b>							
2.4.5.1	Persentase/Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	53,03	53-53	53-53	53-53	53-53	53-53	53-53
2.4.5.2	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	0,00	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
2.4.5.3	Jumlah temuan BPK	0,00	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120	100-120
<b>2.4.6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>							
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Poso	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>3</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>							



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	1.198.066,00	878-900 ribu	878-900 ribu	878-900 ribu	878-900 ribu	878-900 ribu	878-900 ribu
3.1.2	Nilai Tukar Petani	98,69	96-100	96-100	96-100	96-100	96-100	96-100
3.1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita	614.537,00	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
3.1.4	Produktivitas Total Daerah	42,17	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50	45-50
3.1.5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-						
	- PDRB ADHB	0,68	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5
	- PDRB ADHK	-	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	1.229,13	1,2-1,3 ribu	1,2-1,3 ribu	1,2-1,3 ribu	1,2-1,3 ribu	1,2-1,3 ribu	1,2-1,3 ribu
3.2.2	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	-	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	-						
	Jumlah penumpang Bis	28.260,00	68-70 ribu	68-70 ribu	68-70 ribu	68-70 ribu	68-70 ribu	68-70 ribu
	Jumlah penumpang Kapal laut	3.044,00	1,5 ribu-2 ribu	1,5 ribu-2 ribu	1,5 ribu-2 ribu	1,5 ribu-2 ribu	1,5 ribu-2 ribu	1,5 ribu-2 ribu
	Jumlah penumpang Pesawat udara	21.753,00	30-35 ribu	30-35 ribu	30-35 ribu	30-35 ribu	30-35 ribu	30-35 ribu
	Jumlah Angkutan Barang	-						
	Jumlah orang (orang)	53.057,00	117-120 ribu	117-120 ribu	117-120 ribu	117-120 ribu	117-120 ribu	117-120 ribu
	Jumlah Barang (ton)	298.446,00	200-250 ribu	200-250 ribu	200-250 ribu	200-250 ribu	200-250 ribu	200-250 ribu
3.2.5	Luas Wilayah Produktif	-						
	- Jumlah Luas Wilayah Produktif	363.776,00	363-400	363-400	363-400	363-400	363-400	363-400



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	603.105,00	603.105	603.105	603.105	603.105	603.105	603.105
	- Persentase Wilayah Produktif	0,60	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7
3.2.6	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	76.328,00	8-9 ribu	8-9 ribu	8-9 ribu	8-9 ribu	8-9 ribu	8-9 ribu
3.2.7	Luas Wilayah Kekeringan (Ha)	55.542,00	57-60 ribu	57-60 ribu	57-60 ribu	57-60 ribu	57-60 ribu	57-60 ribu
3.2.9	Luas Wilayah Perkotaan	-						
	- Jumlah Luas Wilayah Perkotaan	5.795,00	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
	- Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	603.105,00	603.105	603.105	603.105	603.105	603.105	603.105
	- Persentase Wilayah Perkotaan	0,01	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096
3.2.10	Jumlah Bank	-						
	- Konvensional	7,00	7	7	7	7	7	7
	- Syariah	1,00	1	1	1	1	1	1
3.2.11	Jumlah Restoran/Rumah Makan	107,00	456-460	456-460	456-460	456-460	456-460	456-460
71--80	Jumlah Penginapan/Hotel	77,00	71-75	71-75	71-75	71-75	71-75	71-75
<b>3.3.</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
3.3.1	Angka Kriminalitas	78,13	13,84	12,59	11,34	10,09	8,84	7,59
<b>3.4.</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
3.4.1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	-						
	- Rasio Lulusan S1-S2-S3	465,05	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
3.4.2	Tingkat Ketergantungan							
	- Rasio Ketergantungan	46,10	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50

# BAB 9

# RPJMD



## PENUTUP

RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso.

### **9.1 KAJIDAH PELAKSANAAN**

RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan solusi atas permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Poso, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya pada Periode jabatan Bupati Wakil Bupati tahun 2021-2024 serta masa transisi RPJMD tahun 2025-2016;





2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan dilengkapi dengan target kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Pemerintah Kabupaten Poso akan selalu menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
4. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dengan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Poso dengan Rencana Kerja SKPD;
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Poso wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis SKPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
6. Dalam pencapaian saran pembangunan dari Desa sampai Kabupaten maka RPJMD akan diharmonisasikan dengan Dokumen perencanaan Desa khususnya RPJM Desa agar terjadi sinergisitas pembangunan antara Kabupaten dan Desa melalui peran pemerintah Kecamatan, Bapelitbangda dan Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa.
7. Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 dimana Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 masih dalam tahap proses penyusunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program **Bupati Verna G.M Inkiriwang dan Wakil Bupati M. Yasin Mangun** Kabupaten Poso hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2022.
8. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 ini dengan memperhatikan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023-2024.



9. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui pembiayaan dari APBD Provinsi, APBN Pusat, Maupun Program Prioritas Dana Desa, serta skema kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah maupun lembaga-lembaga Lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **9.2 PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dan tahun 2025. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso. Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan RKPD 2026 akan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Poso 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025-2026. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 dan tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Poso Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Poso akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025-2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

**Bupati Poso,**

**dr. Verna G.M Inkiriwang**